



Agama dan Perubahan Sosial

Mattulada
Ismuha
Baihaqi A.K.
Abu Hamid

Taufik Abdullah, ed.

Diterbitkan untuk Yayasan Ilmu-ilmu Sosial

BIBLIOTHEEK KITLV



0038 7926

850 372305

9 - 2444 - N 5750'

Agama dan Perubahan Sosial

Mattulada
Ismuha
Baihaqi A.K.
Abu Hamid
Taufik Abdullah, ed.



PENERBIT
CV. RAJAWALI
JAKARTA

292



Agama dan
Perubahan Sosial

9 - 2444 - N

PENGANTAR

Agama dan Perubahan Sosial

Mattulada

Ismuha

Baihaqi A.K.

Abu Hamid

Taufik Abdullah, ed.

Dalam melaksanakan penelitian, tiap anggota dan team peneliti mempunyai keleluasaan untuk memberikan tekanan pada masalah tertentu yang diajukan dalam cakupan tugas dan dalam memilih cara pendekatan terhadap masalah tersebut. Dengan begini masing-masing dapat memberikan sumbangan sesuai dengan perhatian dan kemampuan ilmiyahnya.

Proyek Penelitian "Agama dan Perubahan Sosial" bermula dari adanya Leknas - LIPI,

yang menyadari perlunya penelitian tentang peranan agama

dalam kehidupan masyarakat.

Mukti Ali, yang pada waktu itu menjabat sebagai

R.I. Ia mengemukakan

pentingnya ilmu-ilmu sosial

untuk mengetahui

antara agama, sebagai kenyataan

dan sosial yang empiris

itu memantapkan diri

kepada

ini

ini

ini

ini

ini

ini



PENERBIT
CV. RAJAWALI
JAKARTA



AGAMA DAN
PERUBAHAN SOSIAL

Taufik Abdullah, ed.
Abu Hamid
Baidardi A.K.
Ismuh
Mallulads

AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL

Dr. Taufik Abdullah, editor.

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, bekerja
sama dengan Yayasan Ilmu Ilmu Sosial (YIIS)

Hak cipta dan Hak penerbitan pada YIIS

Cetakan pertama November 1983.

Tatamuka oleh Edi Sulistio

Kulit muka oleh M. Sudarmanto

IBM Setting CV. Gramada

Dicetak oleh Radar Jaya Offset

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi
buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan
cara penggunaan mesin fotocopy, tanpa izin sab
dari penerbit.*

PENGANTAR

Karangan-karangan yang terhimpun dalam buku ini adalah sebagian dari laporan penelitian yang dijalankan di beberapa daerah, yang masing-masing bertolak dari suatu kerangka cakupan tugas yang sama.

Dalam melaksanakan penelitian, tiap anggota dan team peneliti mempunyai keleluasaan untuk memberikan tekanan pada masalah tertentu yang diajukan dalam cakupan tugas dan dalam memilih cara pendekatan terhadap masalah tersebut. Dengan begini masing-masing dapat memberikan sumbangan sesuai dengan perhatian dan kemampuan ilmiahnya.

Proyek Penelitian "Agama dan Perubahan Sosial" bermula dari adanya kesesuaian perhatian Leknas - LIPI, yang menyadari perlunya penelitian tentang peranan agama dalam kehidupan masyarakat, dengan seruan Prof. Dr.H. Mukti Ali, yang pada waktu itu menjabat Menteri Agama R.I. Ia menganjurkan kerjasama yang erat antara para sarjana ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu agama dalam usaha untuk mengetahui dengan baik hubungan timbal-balik antara agama, sebagai kenyataan batiniah, dengan kenyataan sosial yang empirik, dalam mana kenyataan batiniah itu memanifestasikan diri. Tidaklah memadai rasanya jika kenyataan batiniah itu hanyalah dilihat dari sudut substansi ajaran saja, sebagaimana yang biasa dilakukan. Sebab jika benar kenyataan religius itu bermakna dalam hidup

ini maka haruslah dilihat pula bagaimana agama itu terpancar dalam penghayatan kultural dan kenyataan sosial. Bagaimanakah corak hubungan antara "apa yang diyakini sebagai kebenaran" dengan "apa yang mengitari diri" memberi bentuk dan irama dari dinamik sosial dan, sebaliknya, seberapa jauhkah dinamik ini menentukan bentuk hubungan kedua hal itu. Dalam penelitian ini tidaklah dipersoalkan "benar" atau "salah" substansi dari "apa yang diyakini" itu — suatu masalah yang berada dalam lapangan teologi dan filsafat — tetapi bagaimana ajaran itu memantulkan dirinya dalam kesadaran dan dalam pola prilaku. "Haram" dan "halal" adalah ketentuan-ketentuan yang dapat ditunjukkan oleh para ulama dan ahli fikih, tetapi bagaimana pola anggapan dan prilaku pribadi dan prilaku sosial adalah tugas peneliti sosial untuk menelaahnya.

Penelitian tentang hal yang belakangan ini bukan semata-mata didorong oleh pengetahuan akan pentingnya kedudukan agama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, tetapi juga oleh keinsyafan bahwa setiap derap pembangunan menciptakan realitanya sendiri. Hal ini bukan tidak mungkin menimbulkan bertambah kerasnya perbenturan nilai-nilai, yang kadang-kadang sifatnya bisa sangat mendasar. Suatu kegiatan dari salah satu kehidupan mempunyai kemungkinan untuk merangsang aspek lain, bahkan juga mendorongnya untuk memberi reaksi. Tiap aspek mempunyai logikanya sendiri yang pada titik temu tertentu dapat saling berbenturan. Kegiatan dari aspek ekonomi yang dijalankan dengan ekstrim tanpa memperhatikan logika dari aspek-aspek kehidupan lainnya, umpamanya, bukan tak mungkin menghidupkan tuntutan "pahala" dan "dosa" yang diperkembang oleh kesadaran agama. Atau dari aspek kesadaran sosial yang menuntut harus adanya kewajiban dalam pembagian pendapatan. Dan begitulah seterusnya. Jika keadaan ini terjadi maka kestabilan dan kemantapan sosial pun bisa menjadi taruhan, Tanpa harus mengulang

tekad politik yang selalu dikumandangkan, maka bisalah dimengerti hasrat pembangunan yang bersifat integral dan seimbang menjadi suatu keharusan yang makin mendesak secara riil.

Dari sudut strategi pembangunan bukanlah tujuan pokok dari penelitian ini untuk mempersoalkan "bagaimana agama bisa membantu pembangunan" suatu hal yang bukan tak ada harganya, bahkan sangat penting, tetapi lebih mendasar dari itu. Secara bertahap penelitian ini ingin menjelajahi masalah manifestasi agama dalam kehidupan sosial dan, sebaliknya, pengaruh kehidupan sosial terhadap kenyataan batiniah itu. Dalam hal ini maka segi kultural dan struktural diperhatikan secara seimbang. Dengan begini pembangunan tidaklah harus dilihat sebagai sesuatu yang berada "di luar" agama, tetapi sebagai sesuatu yang terpaut padanya, sebagai sesuatu yang bersumber dari apa yang diyakini. Dengan demikian pula masalah partisipasi pun diharapkan bisa diterangi, dengan lebih baik.

Sambil lalu telah dapat diduga bahwa penelitian ini bertolak dari suatu praduga teoritis bahwa agama *bukanlah* sesuatu yang bersifat subordinatif terhadap kenyataan sosial-ekonomis. Agama pada dasarnya bersifat independen, yang secara teoritis bisa terlibat dalam kaitan saling mempengaruhi dengan kenyataan sosial-ekonomis itu. Sebagai unit yang independen maka, bagi penganutnya, agama mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk menentukan pola perilaku manusia dan bentuk struktur sosial. Dengan begini ajaran agama (atau aspek kultural dari agama), mempunyai kemungkinan untuk mendorong atau bahkan mena-
han proses perubahan sosial, yaitu suatu proses yang meng-
gugah kemantapan struktur dan mempersoalkan keberlaku-
an nilai-nilai lama.

Sudah barang tentu agama mempunyai berbagai pra-
nata dan lembaga yang memungkinkan ajarannya lebih

langsung dapat ditangkap oleh individu-individu penganutnya dan lebih mungkin terpantul dalam pengaturan hubungan dan sistem perilaku sosial. Dalam Islam, yang tidak mempunyai sistem kelembagaan yang formal-hirarkis, peralatan yang paling strategis untuk hal-hal tersebut ialah ulama dan lembaga pendidikan. Bahkan tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa dinamika dari kedua hal ini adalah ukuran yang paling sesuai untuk meninjau masyarakat Islam. Sebab itulah, penelitian yang semuladirencanakan, akan membahas berbagai aspek yang menyangkut hubungan agama, khususnya Islam, dengan perubahan sosial ini, menjadikan peranan ulama dan lembaga pendidikan sebagai fokus yang paling awal untuk diselidiki.

Pada tahap awal dari penelitian ini, perhatian utama ialah pengumpulan data deskriptif dari masalah yang telah dirumuskan. Sedangkan berbagai masalah teoritis tentang pendekatan ilmiah terhadap agama yang sejak pertengahan 1960-an, makin hangat diperdebatkan, tidaklah terlalu dipusingkan. Dengan landasan pemikiran awal ini, maka penelitian tentang kedudukan ulama dan sistem pendidikan Islam diadakan di Daerah Istimewa Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Pada tahap kedua perhatian ditujukan pada pengaruh agama dalam struktur dan hidup kekeluargaan di Aceh dan Sulawesi Selatan. Sedangkan pada tahap ketiga perhatian khusus ialah agama dan perilaku ekonomi yang dilakukan di Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Tahap-tahap penelitian ini telah dilaporkan dalam beberapa monografi, yang diterbitkan dalam jumlah terbatas, perbandingan bibliografis dari buku-buku pelajaran sekolah agama, dan dalam beberapa nomer *Bulletin Penelitian Agama dan Perubahan Sosial*, yang dulu pernah diterbitkan Leknas — LIPI.

Terbitan pertama dari Seri Monografi *Agama dan Perubahan Sosial* ialah tulisan dari Drs. H. Ismuha, bekas Rektor I.A.I.N. Arraniri (Banda Aceh) dan I.A.I.N. Sumatra Utara (Medan). Dalam tulisan ini penulis meninjau peranan ulama di Aceh dari sudut pengamatan sejarah. Dimulai dari kisah legendaris yang termaktub dalam *Hikayat Raja-Raja Pasai*, yang memperlihatkan Islam sebagai peletak dasar dari tradisi kekuasaan yang bersifat supradesa dan kebudayaan Aceh, tulisan ini menelusuri proses historis dari makin strategisnya kesungguhan ulama dalam masyarakat Aceh. Kekosongan pimpinan pusat, sebagai akibat dikalahkannya Sultan dan direbutnya *dalam* (kraton) Kotapraja oleh Belanda dalam agresi terhadap kesultanan Aceh dilancarkan (mulai 1872), menyebabkan para ulama, yang sesungguhnya berada di luar struktur kekuasaan, tampil kedepan sebagai pemimpin rakyat. Kekosongan ini makin terasa ketika sebagian dari para *uluhbalang*, penguasa daerah, bisa pula dijinakkan. Sejak perang Aceh-Belanda, yang nyaris tanpa akhir sampai dengan jatuhnya kekuasaan Belanda, sampai dengan tahun 1950-an, para ulama sering muncul sebagai perumus dari "ke-Aceh-an". Dengan begini dapatlah dimengerti bahwa ulama memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan politik.

Tinjauan historis ini dilengkapi oleh tulisan Drs. Baihaqi, bekas dosen I.A.I.N. Arraniri, yang secara lebih khusus, meninjau ulama dan dunia pendidikan Islam di Aceh sekarang. Sejak 1930-an *dayah* (pesantren), yang dipimpin para ulama, telah mengalami pembaharuan dalam struktur dan organisasi — sistem kelas diadakan, mata pelajaran umum diberikan, dan sebagainya. Jika diingat bahwa rasa permusuhan terhadap pemerintah Belanda hampir-hampir tanpa akhir, yang antara lain menyebabkan pula orang tua sebagian enggan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah, maka tidaklah berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa sekolah-

sekolah agama itu adalah pendorong utama dari dinamisasi dan modernisasi Aceh. Walaupun begitu, Baihaqi melihat pula kemungkinan masa depan yang cukup rawan. Kerawanan ini bukan hanya karena makin tertinggalnya mutu madrasah dibanding dengan sekolah-sekolah umum, tetapi lebih-lebih karena masih kurang pastinya masa depan para tamatan madrasah. Akibatnya, sejauh dimungkinkan, murid-murid madrasah berusaha untuk pindah ke sistem sekolah umum, yang dianggap memberi prospek yang lebih cerah. Tentu masih ada hal-hal yang perlu diselidiki, tetapi sinyalemen ini mengundang pemikiran yang lebih sungguh-sungguh. Sebab, jika diikuti akibat logisnya bisa terjadi suatu jurang yang dalam antara nilai-nilai yang tetap dimulia-kan dengan perkembangan sosial secara struktural — serambi Mekah makin miskin dengan pemelihara Nilai Abadi.

Laporan ketiga ditulis oleh Dr. Mattulada, bekas De-kan Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin (Ujung Pan-dang). Di sini ia menguraikan beberapa aspek historis dari perkembangan peranan ulama di Sulawesi Selatan. Mulai dari awal bermula Islam datang dan berkembang (abad 17) sampai dengan situasi yang terakhir. Jika pada bagian-bagi-an permulaan ditekankan proses perubahan struktural yang dilakukan bicara sadar, sebagai konsekuensi dari diterimanya agama baru, maka pada bab-bab kemudian lebih diperhatikan usaha kearah pemantapan penghayatan kultural dari ajaran Islam.

Ada dua hal yang cukup menarik dari peristiwa ini, jika dibanding dengan proses yang sama di daerah lain. Sebagaimana kota-kota pelabuhan lainnya di abad 16 — 17, suasana kota Makasar sesuai sekali dengan ucapan para pe-lapor Portugis bahwa "rakyatnya Muslim, tetapi rajanya kafir". Rakyat tersebut sebagian besar adalah para peda-gang. Keistimewaan kota Makassar, yang menjadi pusat dari kerajaan kembar orang Makassar, yaitu Gowa-Tallo, ialah bahwa penguasanya dengan sadar memilih Islam dan

meresmikan agama ini sebagai agama kerajaan. Penguasa Kerajaan kembar ini tidak hanya menyuruh rakyat Gowa-Tallo agar memeluk Islam, tetapi juga mengajurkan dengan keras kerajaan-kerajaan lain, seperti Bone dan Soppeng, untuk mengikuti jejak mereka. Jadi, jika Islam di Aceh meletakkan dasar bagi adanya kekuasaan pusat, maka di Sulawesi Selatan, kekuasaan pusat itu di — Islamkan dan selanjutnya proses Islamisasi berasal dari "atas".

Kenyataan struktural bahwa agama adalah tanggung jawab langsung dari para bangsawan-penguasa menyebabkan, antara lain, tidak bisa dipisahkannya pemeliharaan pemerintahan dengan pengatur ritual keagamaan. Kedua kelompok berasal dari sumber sosial yang sama — para bangsawan. Jadi adanya pembagian yang tegas antara guru-guru agama dengan pejabat agama, seperti yang terdapat di beberapa daerah lain, sampai dengan munculnya gerakan reformasi Islam, yang diwakili oleh Muhammadiyah, tidaklah terjadi di Sulawesi Selatan.

Uraian selintas tentang perkembangan sistem dan jaringan pendidikan Islam ini dilengkapi secara lebih terperinci oleh Drs. Abu Hamid, dosen Fakultas Sastra, UNHAS. Dengan memakai acuan-ancuan historis penulis mengupas masalah *pangngedereng* dan *Bate Salapang*, yang merupakan pranata dan lembaga yang diadakan kerajaan untuk menampung tradisi lama dengan keyakinan religius yang baru. Proses adaptasi ini membawa akibat dalam ketentuan hukum yang berlaku dan pembaruan organisasi pemerintahan, serta dalam sistem pelapisan sosial, dalam mana keturunan dan profesi dipentingkan. Dalam kategori profesi inilah kedudukan ulama, *toparinta*, menjadi sangat penting.

Terlepas dari pada kecenderungan sekarang, yang memperlihatkan telah makin beragamnya kedudukan sosial yang dipegang oleh seorang *toparinta*, sebagai guru dan pendidik, peranannya sangat menonjol. Sehubungan dengan itu laporan ini secara terperinci mencoba menelusuri sejauh pendahu-

luan dan sistem organisasi serta pendidikan tiga perguruan Islam terkemuka. Namun, tak obahnya dengan kisah Aceh, yang dilaporkan Baihaqi, terlepas dari segala dinamika dan semangat pembaharuan yang diperlihatkan oleh sekolah-sekolah agama, suasana yang cukup rawan juga kelihatan. Pesantren dan madrasah makin kehilangan rona, jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum.

Meskipun cara menyampaikan masalah berbeda-beda dan dengan perhatian khusus yang tak pula sama, keempat laporan ini dapat dipakai sebagai alat untuk studi perbandingan mengenai peranan ulama dan pendidikan ulama di kedua daerah penelitian. Sambil lalu dapatlah dikatakan bahwa sekalipun dalam pengetahuan awam Aceh dan Sulawesi Selatan terkenal sebagai dua daerah yang paling "Kuat Islam nya", ternyata perbedaan-perbedaan penting juga terdapat. Meskipun intensitas dari perasaan keagamaan di kalangan penganut Islam di kedua daerah "sama kuat", tingkat penetrasi Islam ke dalam kelompok-kelompok sosial tidaklah sama. Di Sulawesi Selatan, umpamanya, masih terdapat kelompok-kelompok kecil yang terluput dari pendalaman Islam. Selanjutnya keberlakuan ortodoksi tidaklah pula sama di kedua daerah itu. Di samping itu, pengaturan sosial, sebagai akibat dari kedatangan Islam, juga memperlihatkan bentuk yang berbeda-beda. Sebagai akibat pengalaman sejarah yang berbeda, baik pada tahap awal pembentukan tradisi Islam maupun pada perkembangan selanjutnya, menyangkut ulama Bugis/Makassar dan Aceh secara struktural berbeda.

Dalam perbedaan struktural inilah pula tampak ulama memainkan peranan sosial mereka masing-masing. Dalam perbedaaan ini pula sesungguhnya kelihatan betapa sekolah-sekolah agama sama-sama pernah merupakan unsur dinamisasi masyarakat. Namun, di saat perbedaan-perbedaan

struktural, yang bersumber dari pengalaman historis yang berbeda dan latar belakang etnis-kultural yang tak pula sama, makin mengendor, sebagai akibat dari makin terbentuknya corak struktur dan kultural yang bersifat "metropolitan Indonesia", peranan sekolah agama makin memudar. Pada hal, bukanlah, justru aspek kultural Islam, yang bersifat universal, adalah pula merupakan salah satu unsur utama pula dari terbentuknya suasana "metropolitan Indonesia" itu? Bagaimana hal ini harus diterangkan? Maka, salah satu kesimpulan analitis dari perbandingan ini bagi kumpulan studi sejarah dan masyarakat Islam di Indonesia ialah kemungkinan saling menyentuhnya kekuatan aspek kultural Islam dengan aspek struktural-nya.

Aspek kultural, yang menyangkut substansi ajaran dan doktrin agama (terlepas dari variasinya, mulai dari tarekat yang beragam-ragam sampai dengan sikap terhadap soal *Khilafiyah* dan *Ijtihad* yang menimbulkan "kaum kuno" dan "kaum muda"); bertolak dari keharusan akan adanya integrasi ummat terwujudnya "komunitas mereka yang percaya" secara utuh. Sedangkan aspek struktural, yang menyentuh pengaturan sosial masyarakat penganut, menuntut kemantapan hubungan sosial yang konkrit yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tradisional, seperti kesatuan tradisi politik dan adat istiadat, dan sebagainya. Dalam konteks nasional-lah kedua aspek agama dari masing-masing kelompok etnis-kultural saling bertemu dan berbenturan,

Bukanlah maksud pengantar singkat untuk membahas masalah ini. Penelaahan yang teliti terhadap keempat laporan ini akan memungkinkan kita untuk mendalami masalah ini dengan baik. Hanya saja dari sudut perspektif historis sebuah perkiraan awal mungkin bisa diajukan. Sebelum penjajahan sekolah agama (pesantren, dayah, surau) adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang tersedia.

Dengan datangnya penjajahan, sekolah agama, di samping berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan dan semangat independen — sebagaimana kelihatan pada peranan para ulama dan guru agama dalam perlawanan bersenjata dan pergerakan rakyat juga sekali gus merupakan alternatif terhadap sistem kolonial. Sekolah agama, dengan kata lain, adalah "benteng" dan "alternatif". Sekarang, berbagai alasan fungsional dari kehadiran dan pentingnya peranan sekolah agama telah mulai kehilangan validitas-nya. Zaman kolonial telah berakhir, maka sifat "benteng" dan "alternatif" pun ikut membayar. Bahkan di sekolah umum, pendidikan agama mendapat tempat penting. Tak kurang pentingnya ialah keputusan yang memungkinkan seorang pelajar madrasah untuk pindah dari sistem pendidikan agama ke pendidikan umum. Dengan kata lain proses ke arah mulai terwujudnya sistem pendidikan nasional yang tunggal boleh jadi memperlemah sistem pendidikan Islam. Tetapi sejauh manakah hal ini secara empirik bisa dibuktikan? Akhirnya suatu pertanyaan pokok lain bisa diajukan pula. Mengapakah pesantren-pesantren di Jawa masih atau tetap memperlihatkan vitalitas-nya? Jawaban tampaknya harus dicari pada berbagai kaitan struktural dan pengalaman historis.

Tulisan yang dimuat dalam buku ini hanyalah bermaksud mengungkapkan dan memperjelas situasi keulamaan dan pendidikan Islam di kedua daerah. Sedangkan maksud tulisan pengantar ini hanyalah pula sekedar memperlihatkan satu-dua keyakinan analitis yang bisa ditarik dari deskripsi yang diberikan keempat tulisan itu. Sudah tentu masih banyak aspek-aspek yang perlu ditelusuri, tetapi sebagai permulaan, mudah-mudahan apa yang disajikan memadai sekedarnya.

Akhirnya, sebagai bekas ketua team peneliti dan editor laporan ini, semestinyalah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof.Dr.H.

Mukti Ali, dan Dr. Mulyanto Sumardi, bekas kepala Badan Litbang, Departemen Agama, yang dalam kedudukan masing-masing memberi kepercayaan kepada team peneliti dan secara aktif ikut memperhatikan jalannya penelitian ini. Sebagaimana galibnya dengan kerja penelitian lapangan, sudah barang tentu penelitian ini mendapat bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu tema peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dalam proses penulisan keempat penulis juga mendapat bantuan, baik berupa kritik, pertanyaan, bahkan kadang-kadang teguran, dari anggota-anggota team yang lain, yang maksudnya tak lain daripada perbaikan mutu penulisan. Atas partisipasi itu keempat penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih. Terlepas dari segala bantuan, nasehat dan kritik itu, apapun kesalahan yang mungkin terdapat adalah tanggung jawab keempat penulis ini, dan tentu saja, ketua team/editor.

- I. *Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah*
Ismuha, IAIN Al Jami'ah Ar-Raniry, Banda Aceh ... 1
- II. *Ulama dan Madrasah Aceh* Taufik Abdullah.
Baihaqi, A.K., IAIN Al Jami'ah Ar-Raniry, Banda
Aceh 111
- III. *Islam di Sulawesi Selatan*
Mattulada, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin,
Ujung Pandang 209
- IV. *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*
Abu Hamid, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin,
Ujung Pandang 323

DAFTAR ISI

ULAMA ACEH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Drs. H. Ismuha

Kata Pengantar, Taufik Abdullah	V
I. <i>Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah</i> Ismuha, IAIN Al Jami'ah Ar-Raniry, Banda Aceh ...	1
II. <i>Ulama dan Madrasah Aceh</i> Baihaqi A.K., IAIN Al Jami'ah Ar-Raniry, Banda Aceh	111
III. <i>Islam di Sulawesi Selatan</i> Mattulada, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang	209
IV. <i>Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan</i> Abu Hamid, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang	323

DAFTAR ISI

Kata Pengantar, Taufik Abdullah	V
I. Ummat Aceh Dalam Perspektif Sejarah	
Isma'ul, IAIN Al Jam'iah Ar-Raniry, Banda Aceh ... I	I
II. Ummat dan Madrasah Aceh	
Baidardi A.K., IAIN Al Jam'iah Ar-Raniry, Banda Aceh ... III	III
III. Islam di Sulawesi Selatan	
Mattulada, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang ... 209	209
IV. Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan	
Abu Hamid, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang ... 323	323

PENDAHULUAN

ULAMA ACEH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Drs. H. Ismuha

1. Pengertian Ulama

Perkataan *ulama* berasal dari bahasa Arab, jama' (plural) dari kata *'alim* yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. *Ulama* berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmiawan.

Pemakaian perkataan ini di Indonesia agak bergeser sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa Arab. Di Indonesia, *alem* diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan *Ulama* dipeksi dalam arti mufrad (singular), sehingga kalau dimaksud *jama'*, ditambah perkataan *para* sebelumnya, atau diulang, sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia, sehingga menjadi *para ulama* atau *ulama-ulama*. (Bandingkan Alfian, 1975: 22). Di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya, perkataan *ulama* hanya digunakan untuk para ahli agama Islam saja. Tetapi sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menggunakan juga perkataan *ulama* itu untuk para ahli agama Budha dan Hindu, para ahli agama Khatolik dan para ahli agama Kristen, sehingga dalam M.F.R.S. terdapat golongan *ulama*, yang terdiri dari *Ulama Islam*, *Ulama Khatolik*, *Ulama Kristen*, serta *Ulama Hindu* dan *Ulama Budha*.

Yang dimaksud dengan *Ulama* dalam judul tulisan ini adalah *Ulama Islam*. Karena selain dari lebih dekat dengan pengertian aslinya, juga karena sampai sekarang, orang

GLAMA ACEH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Drs. H. Ismuh

PENDAHULUAN

1. Pengertian Ulama

Perkataan *ulama* berasal dari bahasa Arab, jama' (plural) dari kata *'alim* yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. *Ulama* berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmiawan.

Pemakaian perkataan ini di Indonesia agak bergeser sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa Arab. Di Indonesia, *alem* diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan *Ulama* dipakai dalam arti mufrad (singular), sehingga kalau dimaksud *jama'*, ditambah perkataan *para* sebelumnya, atau diulang, sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia, sehingga menjadi *para ulama* atau *ulama-ulama*. (Bandingkan Alfian, 1975: 22). Di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya, perkataan *ulama* hanya digunakan untuk para ahli agama Islam saja. Tetapi sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menggunakan juga perkataan *ulama* itu untuk para ahli agama Budha dan Hindu, para ahli agama Khatolik dan para ahli agama Kristen, sehingga dalam M.P.R.S. terdapat golongan *ulama*, yang terdiri dari *Ulama Islam*, *Ulama Khatolik*, *Ulama Kristen*, serta *Ulama Hindu* dan *Ulama Budha*.

Yang dimaksud dengan *Ulama* dalam judul tulisan ini adalah *Ulama Islam*. Karena selain dari lebih dekat dengan pengertian aslinya, juga karena sampai sekarang, orang

Aceh yang tinggal di Aceh, tidak ada yang beragama selain dari agama Islam.

2. Daerah Aceh

Aceh adalah daerah yang letaknya paling ujung sebelah Barat Laut pulau Sumatra. Luasnya 3.539.000 HA dengan penduduk hanya 2.008.747 jiwa. (Hamzah, 1974:23-24). Berdasarkan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959, ia bernama *Daerah Istimewa Aceh*. (Talsya, 1969:41-42). Sekarang Aceh terbagi dalam 10 daerah tingkat II, yaitu delapan kabupaten dan dua kotamadya. Delapan kabupaten ialah: Aceh Besar, Pidie, Aceh-Utara, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat dan Aceh Tengah. Sedang dua kotamadya ialah Kotamadya Banda Aceh dan Kotamadya Sabang.

Sebelum abad ke XVI, daerah yang sekarang disebut *Daerah Istimewa Aceh*, merupakan beberapa kerajaan kecil yang masing-masing berdaulat penuh, seperti *Kerajaan Peureulak*, *Kerajaan Pasei*, *Kerajaan Peusangan*, *Kerajaan Lingga*, *Kerajaan Pidie*, *Kerajaan Indrajaya*, *Kerajaan Benua* dan lain-lain lagi. (Hasjmy, 1975:7). Baru sesudah Ali Mughaiyat Syah dinobatkan menjadi Sultan Aceh pada tahun 1514, seluruh kerajaan-kerajaan itu berhasil dipersatukan menjadi satu kerajaan yang diberi nama *Kerajaan Aceh Darussalam*. (Zainuddin, 1961: 394-396).

3. Masuknya Islam di Aceh

Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam ialah daerah Aceh. Hanya mengenai bila dan tahun berapa Islam itu mulai masuk, belum dapat dijelaskan dengan pasti. (Hamka, 1945:2-3). Menurut kesimpulan seminar masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 1963, Islam untuk pertama kalinya

telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijrah (abad ketujuh/kedelapan Masehi) dan langsung dari Arab. Daerah yang pertama di datangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera, dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja Islam yang pertama berada di Aceh. Bahwa penyiaran Islam di Indonesia itu dilakukan dengan cara damai. Bahwa kedatangan Islam ke Indonesia, membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. (Risalah Seminar, 1963 : 265).

ISLAM DAN MASYARAKAT ACEH

1. *Adat dan Hukum Islam*

Masuknya Islam ke Aceh pada abad ketujuh atau kedelapan masehi, banyak sekali mempengaruhi adat-istiadat Aceh. Malahan pengaruh Islam itu sangat besar, sehingga ada pepatah yang berbunyi: *Hukom ngo Adat lagee Zat ngo sipheuet* (Hukum dengan adat seperti benda dengan sifatnya, tidak terpisah). Yang dimaksud dengan hukum di sini ialah hukum Islam yang diajarkan oleh para ulama. Ini ditunjukkan oleh pepatah lain yang berbunyi: *Adat bak Meureuhom, Hukum Bak Syiah Ulama*. Yang dimaksud dengan Poteu Meureuhom ialah almarhum Sulthan Iskandar Muda. (Ismuha, 1975 : 37).¹ Demikian besar pengaruh Islam di Aceh, sehingga sapaan waktu berjumpa dan ucapan waktu berpisah, tidak lagi diucapkan yang lain-lain melainkan sudah menjadi *Assalamu'alaikum* (selamat, Tuan) dan jawabannya: *Wa'Alaikumssalam Wa Rahmatullah* -- (Tuan juga selamat beserta rahmat Allah). Bila seseorang menerima pemberian dari orang lain, tidak lagi mengucapkan: *Terima kasih* atau yang lain, melainkan sudah diganti dengan *Al-hamdulillah* (Segala puji bagi Allah). Apabila mendengar ada orang meninggal, segera mengucapkan: *Innaa Lillahi Wa Innaa Ilaihi Raaji'uun* (Semua kita milik Allah dan semua kita akan kembali kepada-Nya).

Di Aceh, tangan kanan dan tangan kiri tidak sama nilainya, meskipun lahirnya sekali gus. Oleh karena itu pan-

tang sekali orang memberi salam dengan tangan kiri. Juga pantang menerima sesuatu dari orang lain dengan tangan kiri, demikian pula menyerahkannya, kecuali kalau terhadap anak-anak. Juga terlarang menunjuk sesuatu dengan tangan kiri. (Ismuha, 1975: 41).

Kecuali di daerah Gayo Alas, sistim kekeluargaan di Aceh adalah parental. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Islam, orang boleh kawin dengan saudara sepupunya, baik saudara sepupu dari fihak ayah, maupun dari fihak ibu. Demikian pula hukum warisan. Sejak zaman Iskandar Muda sampai sekarang, yang dipakai hukum Islam, baik di Pengadilan Negeri, apa lagi di Pengadilan Agama. (Ismuha, 1975: b. 39).

Tempat umum di tiap-tiap kampung disebut: *Meunasah*. Berasal dari bahasa Arab *Madrasah* yang berarti tempat belajar atau sekolah. Memang *Meunasah* itu mempunyai mul-ti fungsi. Di antaranya sebagai tempat belajar membaca Qur'an dan pelajaran-pelajaran lain sehingga ia merupakan S.D. (Sekolah Dasar). Fungsi lain dari *Meunasah* itu adalah sebagai tempat shalat lima-waktu untuk kampung itu. Dalam hubungan ini, diatur pula letak *Meunasah* itu harus berbeda dengan letak rumah, supaya orang segera dapat mengetahui mana yang rumah dan mana pula yang *Meunasah* dan sekaligus juga orang dapat mengetahui kemana arah kiblat kalau akan shalat. Fungsi lain ialah sebagai tempat shalat *Tarawih* dan tempat membaca Qur'an bersama-sama di bulan puasa, serta tempat kenduri maulud pada bulan mauludan. Juga sebagai tempat menyerahkan zakat fithrah pada hari raya puasa, tempat menyembelih qurban pada hari raya haji, tempat mengadakan perdamaian bila terjadi sengketa antara anggota kampung itu, tempat bermusyawarah dalam segala urusan, dan masih banyak lagi fungsinya.

2. Sikap Rakyat Terhadap Islam

Sebagai hasil usaha para ulama dan para muballigh Islam sejak mulanya Islam masuk di Aceh, maka rakyat Aceh sangat fanatik kepada Islam. Fanatik adalah lain daripada taat. Seorang yang fanatik belum tentu taat. Kalau kita katakan mereka tidak Islam, mereka marah betul dan matipun mereka mau. Tetapi belum tentu semua mereka shalat dan puasa. Menurut tinjauan permulaan, mengenai tidak shalat lebih banyak di kalangan wanita, sedang mengenai puasa, hampir tidak ada wanita yang tidak puasa, kecuali dalam keadaan kotor yang memang tidak dibolehkan puasa. Sebaliknya yang tidak puasa, lebih banyak di kalangan pria. Wanita lebih taat mengenai puasa. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena wanita lebih banyak tinggal di rumah dan mereka senang menyiapkan macam-macam makanan untuk berbuka. Sedapnya memakan makanan itu, kalau orang memang puasa. Sedang pria dapat keluyuran ke-kota, sehingga dapat makan dan minum dengan sembunyi-sembunyi di warung Cina oleh karena itulah sejak revolusi, di Aceh dilarang Cina berjualan makanan masak di siang hari selama bulan puasa. Sesudah penyerahan kedaulatan, larangan ini tidak bertahan lama, kemudian diperbaharui lagi sejak keluarnya Keputusan Penguasa Perang Daerah untuk Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 7 April 1972 No. KPTS/PEPERDA-061/3/1962, yang ditandatangani oleh Panglima Daerah Militer I/Iskandar Muda selaku Penguasa Perang Daerah untuk Daerah Istimewa Aceh, Kolonel M. Jasin. Keputusan tersebut berisi:

Pertama : Terlaksananya secara tertib dan seksama unsur-unsur Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh, dengan mengindahkan peraturan perundangan Negara.

Kedua : Penertiban pelaksanaan arti dan maksud ayat pertama di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan Keputusan Peperda tersebut, maka DPRD Gotong-Royong Daerah Istimewa Aceh, sesudah lima kali sidang, maka pada tanggal 15 Agustus 1962 mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

- I. Dalam batas-batas wewenang serta kemungkinan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh akan melaksanakan unsur-unsur Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya sesuai seperti prinsip-prinsip yang terkandung dalam Keputusan Peperda tanggal 7 April 1962 No. KPTS/PEPERDA-061/3/1962.
- II. Untuk pelaksanaan usaha tersebut, akan dibuat peraturan-peraturan Daerah dan untuk merencanakan peraturan-peraturan itu, dimana dianggap perlu, akan diserahkan kepada suatu panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- III. Untuk menjaga jangan ada kesimpang-siuran di dalam pengertian dan penyelenggaraan tentang unsur-unsur Syari'at Islam yang dimaksud, meminta kepada Pemerintah Pusat supaya segera membuat Undang-Undang Pokok tentang Agama. (Sekretariat DPRD—GR Daerah Istimewa Aceh, 1972: 207).

Baik keputusan Peperda tersebut di atas, maupun pernyataan DPRD — GR tersebut, dikeluarkan dalam rangka politik pemulihan keamanan di Aceh. Mengapa jalan itu ditempuh, tidak lain melainkan oleh karena rakyat Aceh sangat fanatik kepada Islam.

STRUKTUR SOSIAL

1. *Penggolongan Masyarakat*

Sebelum Aceh dapat diperintah Belanda, penggolongan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Golongan Hulubalang (Uluebalang) yaitu golongan yang memerintah negeri. Golongan ini, mula-mula juga merupakan rakyat biasa. Tetapi karena mempunyai wibawa, disebabkan kekayaan, keberanian kecakapan dalam mengatur dan memimpin, maka ia diangkat menjadi kepala rakyat. Kemudian, mengingat jasa-jasanya, ditambah pula bahwa biasanya anak mereka banyak yang mengikuti jejak orang tuanya, maka sesudah ia meninggal, diangkat pula anaknya sebagai pengganti. Sesudah keadaan demikian berjalan lama, maka kecakapan dan kemampuan anak tidak lagi menjadi pertimbangan, tetapi jabatan memerintah itu sudah dianggap sebagai sesuatu peninggalan yang harus diwarisi.
2. Golongan Ulama atau golongan ahli dan pengajar agama. Golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Tentu ada perbedaan antara satu dengan lainnya tentang dalam dangkalnya pengetahuan yang mereka miliki masing-masing, sebagai juga berbeda tentang banyak-sedikitnya bidang pengetahuan yang mereka kuasai. Dahulu sebelum diperintah oleh

- Belanda, para ulama selain dari menguasai ilmu pengetahuan bidang agama, juga banyak diantara mereka yang menguasai pula bidang-bidang lain.
3. Golongan saudagar, yaitu golongan orang kaya. Golongan inipun berasal dari rakyat biasa yang mempunyai nasib lebih baik dalam usaha mereka mendapatkan kekayaan.
 4. Golongan Tani, golongan inilah yang terbanyak. Dan golongan ini pula yang merupakan golongan asli. Artinya tiga golongan lainnya adalah berasal dari golongan tani ini.
 5. Golongan terpelajar/pegawai. Yang dimaksudkan dengan terpelajar ialah mereka yang telah mengenyam pendidikan Barat, lalu diangkat menjadi pegawai pemerintah. Tetapi golongan ini tidak banyak pada masa Belanda, karena pada umumnya rakyat Aceh tidak mau bekerja pada pemerintah Belanda, disebabkan pengaruh permusuhan belum lagi padam dalam jiwa rakyat. Baru pada masa Jepang, keinginan bekerja pada pemerintah mulai timbul dan bertambah subur pada masa kemerdekaan. Hal inipun disebabkan pengaruh ulama, yang pada masa Belanda mengharamkan orang muslim bekerja pada *kafir harby*, artinya kafir yang dalam keadaan perang dengan kaum muslimin. Tetapi pada masa Jepang, ulama memberi fatwa bahwa Jepang meskipun kafir, tetapi bukan kafir harby, sebab mereka tidak berperang dengan kita, malahan membantu kita mengusir musuh kita *kafir harby* Belanda. Oleh karena itu, bekerja pada pemerintah Jepang tidak haram. Apa lagi sesudah masa kemerdekaan, pemerintah memang sudah pemerintah kita sendiri.
 6. Golongan Buruh, yaitu golongan inipun tidak begitu banyak.

2. Hubungan Antara Berbagai Golongan

Sebelum masa Belanda, hubungan antara empat golongan tersebut pertama adalah baik sekali. Masing-masing golongan menghormati golongan lainnya secara wajar. Mereka saling bantu membantu. Khusus mengenai golongan Hulubalang dan golongan Ulama, mereka saling nasehat-menasehati. Di samping Hulubalang yang menjadi Kepala rakyat, selalu ada seorang ulama yang bertindak sebagai penasehat hukum.

Melihat perlawanan terhadap Belanda lebih banyak dilakukan oleh para ulama, atau setidaknya dengan semangat agama yang dikobarkan oleh ulama, maka demi kepentingan siasat pemerintahannya Belanda sejak memerintah Aceh, melakukan usaha-usaha untuk merusak kerja sama yang baik antara golongan Hulubalang dan golongan ulama. Usaha ini ada yang berhasil dan ada pula yang tidak. Pidie adalah contoh yang baik untuk menunjukkan sebagai tempat yang berhasil usaha Belanda itu, sedang Aceh Utara, juga baik untuk dikemukakan sebagai contoh tempat yang kurang berhasilnya usaha Belanda itu, sehingga nampak kita lihat masih adanya kerjasama yang diwarisi dari zaman sebelum Belanda. Di antara faktor yang membantu usaha Belanda di Pidie ialah terlalu banyaknya Hulubalang di sana, sehingga masing-masing mereka hanya mempunyai daerah yang kecil saja. Dengan demikian tentulah tidak banyak penghasilan mereka. Hal ini mengakibatkan timbulnya pikiran untuk mencari jalan tambahan penghasilan. Di antara jalan itu ada yang bertentangan dengan Agama. Karena bertentangan dengan agama, tentulah para ulama berusaha untuk mencegahnya. Mula-mula dengan cara baik. Usaha para ulama untuk mencegahnya perbuatan yang bertentangan dengan agama itu, jarang yang berhasil. Dengan demikian timbullah rasa tidak enak. Apa lagi kalau usaha para ulama itu ditolak mentah-mentah. Dengan

yang mereka kuasai. Dahulu sebelum diperintah oleh

dalih bahwa daerah Pidie bukanlah daerah yang diperintah langsung oleh Belanda, melainkan merupakan *Zelfbestuur-gedied* (daerah yang memerintah diri sendiri), maka Belanda membiarkan saja tindakan Hulubalang yang berstatus *Zelfbestuurder* itu bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

Lain halnya dengan di Aceh Utara yang *Zelfbestuurder*-nya mempunyai daerah yang jauh lebih luas dari daerah para *Zelfbestuurder* di Pidie. Oleh karenanya pendapatan mereka cukup, maka tidak perlu melakukan hal-hal yang menimbulkan ketegangan dengan para ulama. Sebaliknya, malahan mereka sanggup membantu usaha-usaha ulama mendirikan madrasah-madrasah dalam daerahnya. Hal ini berjalan terus sampai Jepang datang. Sejak Jepang datang, terjadilah salah paham antara Hulubalang dengan para Ulama. Ini terjadi karena waktu koloni kelima Jepang yang bernama *Fujiwara Kikan* datang ke Aceh, disambut oleh para Ulama yang tergabung dalam P.U.S.A. (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) tanpa diketahui oleh para Hulubalang. Para ulama berpendapat bahwa itu perlu disambut dalam rangka mengusir penjajah Belanda.

Tetapi hal ini sangat berbahaya kalau sampai diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu harus dikerjakan dengan sangat rahasia, tidak boleh diketahui oleh banyak orang, lebih-lebih lagi orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemerintah Hindia Belanda. Para Hulubalang, karena jabatannya, dekat dengan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu para ulama tidak berani menyampaikan hal itu kepada mereka, meskipun mereka orang yang dekat pula dengan para ulama dan dekat pula dengan rakyat. Karena kebocoran rahasia, tidak hanya disebabkan pengkhianatan, tetapi mungkin juga dengan cara yang tidak disengaja. Oleh karena itu, kecuali di Aceh Besar, gerakan *Fujiwara Kikan* itu tidak diketahui oleh para Hulubalang.

Sebagai contoh kita ambil saja *Zelfbestuurder* dari Peusangan Teuku Haji Chik Muhammad Johan Alamsyah. Ia dengan Belanda rapat sekali dan dengan ulama dan rakyat pun hubungannya paling baik. Demikian baiknya sehingga waktu didirikan P.U.S.A. di Matanggelumang Dua pada bulan Mei 1939, ia diangkat menjadi *Beschemheer* (Pelindung) *Hoofdbestuur* (Pengurus Besar) P.U.S.A. oleh karena terlalu dekat baik kepada Belanda maupun kepada Ulama, maka ada hulubalang lain yang iri. Pada umumnya Hulubalang yang baik dengan rakyat, dicopot dari jabatannya dan dibuang ke luar Aceh, seperti Teuku Chik M. Thaib Peureulak, Teuku M. Said Cunda dan Teuku Bujang Krueng Geukueh. Sebaliknya yang baik dengan Belanda, kurang baik dengan rakyat. Oleh karena itu Teuku Cut Hasan Cet, setelah mendengar Teuku Haji Chik Muhammad Johan Alamsyah diangkat menjadi *Beschemheer* H.B.-P.U.S.A., menuhunya ingin menjadi Sultan Aceh lewat P.U.S.A. Teuku Cut Hasan menafsirkan P.U.S.A. dengan *Persatuan Untuk Sulthanat Aceh*.

Itulah sebabnya maka Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap di Matanggelumang Dua dan Teungku Haji Abubakar Ibrahim di Bireuen yang memelopori penerimaan *Fujiwara Kikan* di Aceh Utara, tidak berani memberitahukan hal itu kepada Hulubalang-hulubalang di Aceh Utara, termasuk Teuku Haji Chik Muhammad Johan Alamsyah, Hulubalang Peusangan.

Melihat tokoh-tokoh P.U.S.A. memakai leter "F" dilengannya waktu Jepang mendarat, disusul dengan penunjukan mereka untuk menggantikan Belanda sebagai *Controleur* (Wedana), maka para Hulubalang diluar Aceh Besar, merasa ditinggalkan oleh para ulama untuk maksud-maksud yang kurang baik. Hal ini lebih-lebih dirasakan oleh para Hulubalang yang tadinya sangat rapat dengan ulama. Mereka berkecil hati dalam hal itu. Mereka tidak dapat mera-

sakan bagaimana riskan tindakan membantu *Fujiwara Kikan* yang menurut kacamata pemerintah Hindia Belanda tentulah perbuatan itu merupakan memberi bantuan kepada musuh, meskipun menurut kacamata Indonesia, itu termasuk dalam rangka perjuangan mengusir musuh untuk merobut kembali kemerdekaan yang sudah hilang. Keretakan itu mengakibatkan adanya laporan-laporan yang mencurigakan Jepang terhadap para ulama, terutama yang tergabung dalam P.U.S.A. Sehingga banyak di antara mereka yang ditangkap Jepang; diantaranya Teungku M. Daud Beureueh Teungku Abd. Wahab Keunalo Seulimeum, T.M. Amin, Teungku Amir Husin Al-Mujahid, Teungku Abubakar Adamy dan lain-lain. Mereka diperiksa oleh *Kempetai* Jepang yang sangat terkenal kejahnya. Setelah ditahan beberapa lama mereka dilepaskan kembali, karena sesudah diperiksa, ternyata mereka tidak bersalah seperti yang dilaporkan orang. (Ismuha, 1969: 37).

3. *Meunasah* Sebagai Tempat Kegiatan Umum

Daerah yang terkecil di Aceh disebut *Gampong* (Kampung). *Gampong* dikepalai oleh dua orang, ibarat rumah tangga dikepalai oleh ayah dan ibu. *Keuchik* dalam *gampong*, ibarat ayah dalam rumah tangga, dan *Imum Meunasah* merupakan ibu dalam rumah tangga. Sebagai dalam rumah tangga ada pembagian pekerjaan antara ayah dan ibu, demikian pula halnya di *gampong* ada pembagian pekerjaan antara *Keuchik* dan *Imum Meunasah*, di samping ada pula hal-hal yang dikerjakan bersama oleh mereka berdua. Urusan pemerintahan dikerjakan oleh *Keuchik* dan urusan keagamaan dikerjakan oleh *Imum Meunasah*. Kalau ada persengketaan antara warga *gampong* yang bersangkutan, maka tugas untuk mendamaikan antara kedua belah pihak yang bersengketa adalah tugas bersama antara *Keuchik* dan *Teungku Imum Meunasah* ditambah dengan empat orang lainnya yang disebut *Tuha Peuet* (empat orang, orang-

orang tua) yang dipilih diantara warga gampong itu yang dipandang mempunyai pengaruh. Teungku Imum dipilih seorang yang mempunyai pengetahuan agama sekedarnya, sehingga ia dapat mengajar membaca Qur'an dan pengetahuan agama praktis lainnya. Oleh karena itu, bolehlah disebut bahwa Teungku Imum itu merupakan ulama kecil yang bertugas ditiap-tiap gampong.

Merawat Meunasah sehari-hari adalah tugas Teungku Imum, demikian pula perbaikan kecil-kecil. Untuk ini dan sekedar jerih payah Teungku Imum, diusahakan adanya sawah dan/atau kebun wakaf yang dikerjakan oleh Teungku Imum. Hasilnya sebagian untuk Teungku Imum dan sebagian lain untuk rawatan kecil-kecil untuk Meunasah. Kalau rawatan yang memerlukan banyak biaya, maka itu menjadi tanggungan seluruh warga gampong itu.

Keuchik tidak mendapat bagian dari harta wakaf itu. Tetapi ia mempunyai sumber lain, yaitu *sige* pada jual beli, terutama jual beli barang tak bergerak. Lima persen dari harganya menjadi hak Keuchik sebagai saksi utama dalam jual beli itu. Sebagian dari uang itu juga diberikan kepada saksi-saksi lainnya.

Jual beli itu dilangsungkan di Meunasah, terutama mengenai jual beli barang tak bergerak, supaya disaksikan oleh orang banyak. Sebab Meunasah, sebagian yang telah kita singgung sebelumnya mempunyai multi fungsi, bukan saja hal-hal yang bersangkutan dengan masalah sosial, tetapi juga yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Umpamanya, Meunasah itu juga dapat dipergunakan sebagai tempat mengerjakan pekerjaan tangan bagi anak-anak muda, seperti menjahit daun rumbia untuk atap, membuat keranjang dan sebagainya.

Dalam hal mendamaikan orang yang bersengketa, yang memimpin pertemuan adalah Keuchik, sedang yang memegang peranan memberi pandangan yang disadurkan dengan

LATAR-BELAKANG ULAMA DAN PENDIDIKANNYA

1. *Dasar Pengakuan Masyarakat*

Gelar ulama diperoleh seseorang dengan dua syarat:

Pertama : mempunyai pengetahuan Agama Islam,

Kedua : pengakuan masyarakat.

Syarat pertama dapat dipenuhi oleh seseorang sesudah ia menempuh masa belajar yang cukup lama. Syarat kedua, baru dapat dipenuhi sesudah masyarakat melihat ketaatannya terhadap ajaran Islam disamping pengetahuannya tentang ajaran itu. Mengetahui saja tanpa mengamalkan pengetahuan itu, tidak cukup untuk menarik pengakuan dari masyarakat. Hal ini disebabkan, karena pengakuan sebagai ulama, diiringi dengan penghormatan terhadap orang yang diakui itu. Sedang terhadap orang yang mengetahui saja tanpa mengamalkan, tidak ada penghormatan itu, bahkan sebaliknya akan mendapat celaan, lebih dari celaan terhadap orang yang tidak mengamalkan, sedang ia pun tidak mengetahui.

2. *Sistim Pendidikan*

Pendidikan dasar dilaksanakan di *Meunasah* tiap *gampông* untuk anak laki-laki. Gurunya adalah *Teungku Imum* dengan dibantu oleh satu - dua orang guru bantu lainnya, sesuai dengan kebutuhan. Untuk anak-anak perempuan, dilaksanakan di rumah *Teungku Imum*, dengan isterinya se -

bagai guru yang disebut *Teungku Di Rumoh*. Yang mula-mula sekali diajar, baik di rumah maupun di Meunasah, ialah membaca Qur'an. Untuk ini dimulai dengan memperkenalkan huruf *hijaiah* (alfabet) seperti tercantum dalam buku *Qaidah Bagdadiah*. Kalau ini sudah selesai, pengajian berpindah kepada *Juz'Amma*, yaitu juz ke-30 dari Qur'an, yang terdiri dari 37 surat pendek-pendek, sudah dicetak terpisah dari 29 juz lainnya. Kalau ini sudah selesai, baru diajarkan Qur'an besar yang terdiri dari 30 juz.

Sebagian besar dari Teungku Imum Meunasah, selain dari mengajarkan Qur'an, juga mengajarkan kitab *Jawoe*² yang masih tingkat rendah, seperti *Masailal Muhtadi* yang memakai sistim soal jawab. Dimulai dengan masalah *Tauhid* (Keesaan Tuhan), kemudian sedikit mengenai hukum yang berhubungan dengan shalat, puasa & sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi, seperti *Bidayah*, *Miftahul Jannah*, *Shirath*, *Sabilah Muhtadin*, *Kitab Delapan* dan *Majmu'*. Semua kitab itu ditulis dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab. Tetapi di Aceh terkenal dengan nama *Kitab Jawoe*. Meskipun kitab-kitab itu sebenarnya sudah cukup luas pembahasannya mengenai hukum-hukum menurut mazhab Syafi'iy, namun orang yang hanya dapat membaca kitab-kitab itu saja, nilainya kurang, dibandingkan dengan ulama yang disebut *Malemnahu*. Sedangkan yang pertama tadi disebut *malem jawoe*. Oleh karena itu, kebanyakan orang memilih mempelajari *kitab nahu*. Yang dimaksud dengan *kitab nahu* di sini, ialah kitab yang dalam bahasa Arab. Meskipun arti *nahu* itu sendiri adalah tata bahasa. Dinamakan kitab-kitab itu dengan kitab nahu, karena orang tidak dapat membacanya kalau mereka belum pandai nahu. Pelajaran semacam ini tidak diajarkan di Meunasah, melainkan di *Dayah* (Pesantren). *Dayah* ini biasanya dekat mesjid, meskipun ada juga di dekat rumah Teungku yang punya *dayah* itu sendiri, terutama *Dayah* yang tingkat pelajarannya sudah tinggi.

Oleh karena itu orang yang ingin belajar *nahu* itu tidak dapat belajar secara sambilan. Untuk ini mereka harus memilih *dayah* yang agak jauh sedikit dari kampungnya dan tinggal di *dayah* itu. Cara begini disebut *Meudagang*. Di *dayah* itu sudah disediakan pondok-pondok kecil yang disebut *rangkang*. Rangkang ini merupakan rumah panggung kecil yang memuat dua orang tiap rumah. Atau merupakan rumah panjang yang dibagi dalam beberapa bilik, yang tiap bilik ditempati oleh dua orang. Mereka masak sendiri, berkongsi dua atau empat orang. Mereka mencari kayu api sendiri, berbelanja sendiri, mencuci sendiri, pokoknya semua pekerjaan dilakukan sendiri. Waktu-waktu luang digunakan untuk menanam sayur-sayuran, bawang dan sebagainya. Kadang-kadang juga membantu *Teungku di Bale* ³ untuk memotong padi yang sudah masak. Oleh karena itu kebanyakan mereka sudah dibiasakan berdiri di atas kaki sendiri. Suatu hal yang dapat dikatakan positif dari cara yang demikian.

Tetapi sebaliknya ada juga hal negatif atau sebutkan sajarah kurang memuaskan, yaitu prosentase yang berhasil dari mereka yang *meudagang* itu sedikit sekali. hal ini disebabkan oleh cara mengajar yang tidak membantu. Tetapi mereka yang berhasil, yang sedikit itu, benar-benar pandai dan tahan uji. Mereka sudah dapat mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang ditemui oleh semua *oreuang meudagang* (santri) itu.

Pelajaran dimulai dengan *sharaf* (perubahan kata). Satu kata dapat berubah menjadi 54 kata, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disusun rapi, tetapi mengha-falnya sekaligus, tidak sembarang orang dapat. Memang *sharaf* ini diperlukan untuk mengetahui asalkata. Untuk dapat mempergunakan kamus, orang juga harus mengetahui lebih dahulu asal sesuatu kata.

Selesai itu, dilanjutkan dengan mempelajari *nahu*, dimulai dengan kitab *Ajrumiyah*, kemudian *Makhtashar*,

Mutammimah dan akhirnya *Alfiah* bersama *Syarahnya*. *Nahu* ini diperlukan untuk dapat membaca huruf akhir, baik dari kata kerja, maupun dari kata benda. Sebab kitab-kitab ditulis dengan huruf gundul, berbeda dengan Al Qur'an yang ditulis dengan huruf yang pakai sandang, sehingga dapat dibaca meskipun oleh orang yang tidak paham bahasa Arab. Disinilah letak kegagalan kebanyakan *oreueng meudagang*, di samping satu-dua orang yang berhasil dan dapat dibanggakan.

Sesudah itu baru diajarkan kitab-kitab *Fiqih* yang membicarakan hukum, dimulai dengan *Safinatu'n-Naja*, *Matan Taqrib*, kemudian *Fathu 'l-Qarib*, *Fathu 'l-Mu'in*, *Tahrir*, *Iqna'*, *Fathu 'l-Wahab*, *Mahally*, *Tuhfan* dan *Nihayah*.

Selesai itu, baru diajarkan *Tafsir Qur'an* dan *Hadits*. Tetapi kedua mata pelajaran ini, demikian pula *Balaghah*, yang mencakup Ilmu *Ma'ani*, *Bayan* dan *Badi'*, demikian pula *Manthiq* (Logika), tidak diajarkan di semua *dayah*, melainkan di *dayah-dayah* tertentu saja, di mana *Teungku* (Kiai) dapat menguasai mata pelajaran tersebut.

Caranya memberi pelajaran, *Teungku* membaca dan para pelajar mendengar. Sesudah dibaca, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu lama dan kadang-kadang juga ke dalam bahasa Aceh. Untuk membantu para pelajar mengetahui kedudukan tiap kata dalam kalimat, ditentukan cara menterjemahkannya, sehingga kedengarannya lucu kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia sekarang. Misalnya, kalau *Mubtada* (subjek) diberi perkataan: *Bermula*, dan pada predikat ditambah *itu*. Umpamanya, *Alkitaabu Jadidun* diterjemahkan: *Bermula kitab itu baru*. Sebagai pedoman terjemahan semacam itu dibuat sajak sebagai berikut:

*Bermula di Mubtada, Oleh-lah di Faee,
Itu Khabar, Maf'ul akan naeb Fa-ee.* ⁴

Pelajaran yang sudah tinggi diberikan sendiri oleh *Teungku*

di Bale, sedang yang masih rendah diserahkan kepada Teungku Di Rangkang untuk memberinya. Teungku Di Rangkang dipilih di antara para pelajar yang sudah tinggi dan cakap. Hal ini merupakan praktek pula bagi pelajar itu sendiri, sehingga sesudah selesai pelajarannya nanti, dengan mudah dapat mengajar, kalau mereka mau mendirikan dayahnya sendiri di kampungnya. Mengenai selesai tidaknya seorang pelajar, tidak ditentukan oleh jumlah tahun mereka belajar, melainkan ditentukan oleh mampu-tidaknya seseorang menguasai kitab-kitab yang telah dipelajarinya. Yang mengetahui hal ini adalah Teungku Di Bale sendiri. Oleh karena itu orang dapat memperhatikan siapa-siapa yang ditunjuk menjadi Teungku Di Rangkang, dan siapa pula yang kadang-kadang kalau Teungku Di Bale sendiri berhalangan, disuruh mewakilinya. Ijazah hanya diucapkan dengan lisan, yang menyatakan bahwa Teungku telah mengijazahkan ilmu yang telah dipelajarinya dari Teungku.

3. *Pembaharuan Sistim Pendidikan.*

Idee untuk memperbaharui sistim pendidikan Islam di Aceh, dipelopori oleh Tuanku Raja Keumala, seorang ulama bangsawan, keturunan dari Sultan-sultan Aceh, yang pada tahun 1903 bersama-sama Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah, Sultan Aceh terakhir, dapat ditawan oleh tentara Belanda. Oleh karena itulah Belanda menganggap pada tahun itu dapat menaklukkan Aceh.

Dengan suratnya tanggal 22 Oktober 1915, Tuanku Raja Keumala, meminta izin kepada Gubernur Militer dan Sipil Swart, untuk mendirikan sebuah madrasah di Kuta-raja (sekarang Banda Aceh), dengan nama *Madrasah Khairiyah*.

Permintaan itu oleh Gubernur Swart dijawab dengan suratnya tanggal 6 Nopember 1915 No. 979/15, di mana dinyatakan antara lain:

1. Kepada Tuanku Raja Keumala yang bertempat tinggal di kampung Keudah, diizinkan mendirikan sebuah madrasah, tempat belajar orang-orang dewasa dan pemuda.
2. Mata pelajaran yang boleh diajar hanya menulis dan membaca bahasa Arab sehingga dapat memahami kitab-kitab agama Islam dengan baik, ilmu Tauhid dan ilmu Fiqah.
3. Diwajibkan kepada Tuanku Raja Keumala untuk membuat daftar dan mendaftarkan murid-murid sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad tahun 1905 No. 550 dan yang ditentukan seperti syarat-syarat Bijblad No. 6363.
4. Murid-murid yang datangnya dari luar Kutaraja, haruslah ada surat keterangan dari pemerintah setempat.
5. Tiap-tiap tanggal 2 Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahun, haruslah memberi laporan kepada pemerintah setempat di Kutaraja melalui komisi yang diangkat untuk itu.
6. Untuk mengawasi madrasah tersebut, diangkatlah sebuah komisi yang terdiri dari Teungku Syekh Ibrahim Brawe sebagai Ketua Hoofddjaksa dan Kepala Penghulu pada Landraad Kutaraja, sebagai anggota-anggota.
7. Kalau syarat-syarat yang telah ditetapkan dilanggar, Tuanku Raja Keumala akan dihukum dan madrasah akan ditutup.

Meskipun izin yang diberikan demikian sempit, namun pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1906, Tuanku Raja Keumala mendirikan juga *Madrasah Khairiyah* yang telah dicita-citakan itu, dengan mengambil tempat halaman belakang mesjid Baitur Rahman Kutaraja. Direktornya diang-

kat Teungku Syekh Muhammad Saman Siron, seorang ulama yang sudah lama belajar di Mekkah. (Hasjmy, 1975: 24-25).

Bagaimanapun juga, pembaharuan sistim pendidikan agama Islam sudah dimulai. Para murid yang dulunya duduk bersimpuh dilantai, kini sudah mempergunakan bangku. Para guru yang dulunya hanya membacakan kitab dan menerjemahkannya serta menjelaskannya maksudnya secara lisan, kini sudah menggunakan papan tulis sebagai alat untuk memudahkan para pelajar memahami apa yang diterangkan oleh guru, tetapi karena Kutaraja termasuk daerah yang diperintah langsung oleh Belanda (*Rechtstreeksch bestuurgebied*), tidak seperti kota-kota lainnya di luar Aceh Besar, maka ia terkena Ordonansi Guru Stbl. 1905 No. 550 yang mengadakan pengawasan yang sangat ketat seperti ternyata dalam surat izin Gubernur Swart tersebut di atas.⁵ Oleh karena itu *Madrasah Khairiyah* tidak maju seperti yang diharapkan. Baru sesudah Stbl. 1905 No. 550 itu diperingan dengan keluarnya Stbl. 1925 No. 219, *Madrasah Khairiyah* mulai maju. Menurut Ordonansi Guru Stbl. 1925 ini, minta izin tidak lagi diwajibkan, melainkan cukup dengan memberi tahu saja. (Balai Pustaka, 1940: 9-10).

Kira-kira dalam tahun 1920, S.I. (Sarekat Islam) melebarkan sayapnya ke Aceh. Di antara pemimpin-pemimpin S.I. di Aceh ialah Teungku Syekh Abdul Hamid Samalanga yang lebih terkenal dengan Ayah Hamid, di samping Teungku Bujang Krueng Geukueh dan Teuku Muhammad Said Cunda.

Pada tahun 1926, pemerintah Hindia Belanda melakukan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin Sarekat Islam di seluruh Indonesia. Di antara yang ditangkap di Aceh ialah Teuku Bujang dan Teuku Chik Muhammad Said Cunda. Sedang Teungku Syekh Abdul Hamid, dapat

melarikan diri pada waktu tengah malam buta menuju Pulau Pinang dan terus ke Mekkah.

Dari Mekkah Ayah Hamid mengirimkan surat-kabar *Umul Qura* yang terbit di Mekkah, kepada kawan-kawannya di Aceh. Di celah-celah surat kabar itu ditulisnya berita-berita yang dianggap perlu disampaikan kepada kawan-kawannya. Di antara yang menerima kiriman *Umul Qura* itu ialah Teungku Haji Abdullah Ujung Rimba, Ketua Majlis Ulama Aceh sekarang. Di antara pesan-pesan yang disampaikan kepada Teungku H. Abdullah Ujung Rimba ialah anjurannya supaya para ulama di Aceh mengadakan pembaharuan cara belajar dan mengajar di Dayah-dayah di Aceh. Teungku-teungku di Dayah di mana yang sudah-sudah hanya pasif saja menunggu datangnya para murid, tidak usaha untuk mencari murid. Juga cara memberi pelajaran masih dipakai cara *halah* (duduk di sekeliling Teungku). Teungku membaca dan menerangkan dengan lisan tanpa memakai alat pembantu seperti papan tulis. Ayah Hamid berpendapat bahwa kalau hal itu terus dipertahankan, maka pada suatu saat nanti, dayah-dayah akan kosong dan akibatnya kita akan kehabisan ulama. Oleh karena itu Ayah Hamid menganjurkan supaya didirikan madrasah-madrasah dengan sistem belajarnya pakai bangku & papan tulis.

Teungku Haji Abdullah Ujung Rimba berpendapat bahwa anjuran itu adalah baik, tetapi merupakan pekerjaan besar dan beliau merasa tidak mampu untuk itu. Beliau teringat kepada Teungku M. Daud Beureu-eh yang dipandang orang kuat. Teungku M. Daud Beureu-eh pada waktu itu sudah pindah dari Usi (Pidie) ke Lho' Seumawe (Aceh Utara), memimpin Dayah Uteuen Bayi yang dibangun oleh Uleebalang Lho' Seumawe, Teuku Maharaja.

Teungku Haji Abdullah Ujung Rimba berangkat ke Lho' Seumawe, menemui Teungku M. Daud Beureu-eh dan menyampaikan pesan Ayah Hamid liwat *Ummul Qura*

itu. Teungku M. Daud Beureu-eh menyambut baik idee itu, hanya beliau sekarang sudah terikat dengan Dayahnya Uteuen Bayi yang belum lama dipimpinnya. Oleh karena itu beliau menganjurkan supaya Teungku Haji Abdullah Ujung Rimba merintis jalan lebih dahulu, dengan menemui beberapa ulama yang dirasa dapat menerima idee itu. Teungku Ujung Rimba menyanggupi hal itu, tetapi beliau tidak yakin akan berhasil, kalau Teungku Beureu-eh tidak turut serta. Oleh karena itu Teungku Beureu-eh menyanggupi juga untuk menyampaikan hal itu kepada ulama yang dapat dijumpainya di Aceh Utara, sedang Teungku Ujung Rimba ditugaskan untuk para ulama di Pidie.⁶

Sementara itu, pada tahun 1927, Teungku M. Hasbi Ash. Shiddieqy yang dikirim oleh Syekh Muhammad Ibnu Salim Al-Kalaly ke Al-Irsyad di Surabaya, telah menamatkan pelajarannya dengan hasil baik, sesudah setahun belajar di tingkat terakhir bahagian 'Aliah (tingkat atas). Syekh Al-Kalaly yang sudah lama membuka pengajian di Lho' Seumawe, dengan pulangnya Teungku Hasbi, merasa mempunyai tenaga yang baik untuk meningkatkan pengajiannya. Lalu beliau membuka Madrasah Al-Irsyad cabang Lho' Seumawe dan mengangkat Teungku M. Hasbi sebagai direkturnya. (Ismuha, 1968: 7). Dengan demikian, Madrasah Al-Irsyad di Lho' Seumawe itu, meskipun tidak lanjut usianya, merupakan madrasah kedua di Aceh sesudah Madrasah Khairiyah di Kutaraja. Kemudian disusul oleh *Madrasah Ahlussunnah Wal-Djama'ah*, di Idi di bawah pimpinan Said Husin.⁷

Di antara ulama Aceh Utara yang disampaikan pesan Ayah Hamid oleh Teungku Daud Beureu-eh ialah Teungku Abdul Rahman Meunasah Meucap di Matanggelumang Dua. Beliau ini juga mempunyai Dayah sendiri di Meunasah Meucap. Pesan Ayah Hamid itu diterimanya dengan rasa syukur. Segera ia mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Langkah pertama ia mendekati Zelfbestuurder dari

Peusangan Teuku Haji Chik Muhammad Djohan Alamsyah. Diceritakan pengalamannya di Langkat tentang hasil-hasil yang dicapai melalui madrasah dan dibandingkan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh dayah-dayah di Aceh, termasuk dayahnya sendiri. Rupanya pucuk dicinta ulam tiba. Teuku Chik Peusangan memang selama ini sedang memikirkan bagaimana caranya menahan Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap jangan sampai keluar dari daerahnya, Land-schap Peusangan, sesudah ia kedatangan Teungku Haji Nyak, Qadli Zelfbestuurder dari Gelumpang-Dua di Geurugok, sebagai utusan dari Zelfbestuurder tersebut untuk meminta izin supaya Teungku Abd. Rahman yang sudah membeli sepetak kebun di daerah Geurugok, dapat pindah mengajar di daerah Geurugok. Melihat keinginan Teungku Meunasah Meucap untuk mendirikan madrasah merupakan jalan yang baik untuk memikatnya, sehingga ia tidak perlu jauh-jauh untuk melaksanakan ideenya. Teuku Chik Peusangan menyetujui sepenuhnya idee Teungku Abd. Rahman untuk mendirikan madrasah, bahkan tanahpun disediakan di tempat yang baik di kota Matanggalumpang Dua.

Demikianlah pada tanggal 21 Djamadil Achir 1348 Hijriah bertepatan dengan 14 Nopember 1929, berdirilah sebuah organisasi yang diberi nama "*Almuslim*" dengan Ketuanya Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap. Organisasi ini bertujuan antara lain untuk mendirikan sebuah madrasah yang diberi nama *Madrasah Al-Muslim Peusangan*.

Sesudah diadakan persiapan seperlunya, maka tanggal 14 Zulqa'dah 1348 Hijriah, bertepatan dengan 13 April 1930, diresmikanlah pembukaan Madrasah Al-Muslim Peusangan itu dengan Habib Mahmud, sebagai guru kepala dan Teungku Haji Ridwan yang lebih terkenal dengan Teungku Haji Cut sebagai guru bantu. (Ismuha, 1949:11-13).

Seiring dengan itu, Teungku M. Daud Beureu-eh juga pulang ke Sigli dan mengumpulkan ulama-ulama yang ta-

dinya sudah dihubungi oleh Teungku Haji Abdullah Rimba, guna mengadakan suatu musyawarah. Musyawarah itu diadakan di Garut. Sesudah beberapa kali diadakan pertemuan, dimana didiskusikan untung-rugi dan baik-buruknya diadakan pembaharuan cara mengajar itu, barulah didapat kata sepakat untuk menerima idee tersebut. Berdasarkan ini, maka didirikan pulalah suatu organisasi yang diberi nama *Djamdiyatuddinia* dengan tujuan antara lain untuk mendirikan madrasah yang diberi nama *Madrasah Sa'adah Abadiyah*. Untuk ini ada kesulitan lain, yaitu tempat mendirikan madrasah yang dimaksud. Di Beureunuen, Landschap tempat kelahiran Teungku M. Daud Beureu-eh, tidak mungkin, karena *Zelfbestuurdernya* tidak senang kepada Teungku Beureu-eh yang dianggap terlalu keras kepala. Kemudian dicari-cari, akhirnya diperoleh di Landschap Teuku Bentara Pineung, ayah dari Mr. T.M. Hasan. Teuku Bentara Pineung, tidak hanya memberi izin didirikan madrasah itu di dalam daerahnya, malahan tanahnya pun diberikan. Lokasinya di Blang Paseh, dekat laut, termasuk kota Sigli. Demikianlah pada akhir tahun 1930, *Madrasah Saadah Abadiyah* diresmikan di Kebun Kelapa Blang Paseh Sigli.⁸ Sesudah itu di mana-mana di seluruh Aceh dibangun madrasah bagaikan jamur di musim hujan.

Suatu hal yang menarik, selain dari perubahan para pelajar duduk dibangku dan guru mempergunakan papan tulis, ialah masuknya pengetahuan umum dalam kurikulum madrasah-madrasah itu, seperti berhitung, ilmu bumi dan logika. Hanya saja tidak dianggap pengetahuan umum, melainkan semuanya dianggap pengetahuan agama, karena selain dari namanya disebut dalam bahasa Arab, juga diajarkan dengan memakai buku dalam bahasa Arab. Untuk hitungan disebut *Ilmu Hisab*, untuk Ilmu Bumi disebut *Ilmu Jugrafi*, untuk Logika disebut *Ilmu Manthiq*, Ilmu Jiwa disebut *Ilmunnafs* untuk Ilmu Pendidikan disebut *Ilmuttarbiah* dan sebagainya.

Sebagai kitab pegangan guru dipakai kitab-kitab keluaran Mesir. Kemudian sesudah keluar karangan-karangan orang Indonesia sendiri dipergunakan pula kitab-kitab baru itu, seperti *'Ilmul Manthiq* karangan Muhammad Nur el Ibrahimy, *'Ilmul Jughrafiah*, *'Ilmunnaf* dan *'Ilmut-Tarbiah* karangan Mahmud Yunus. Tetapi semua itu masih tetap dalam bahasa Arab. Kemudian dimasukkan pula *'Ilmus Shih-hah* (Ilmu Kesehatan), *'Ilmun Nabaat* (Ilmu Tumbuh-tumbuhan), *'Ilmul Hayawan* (Ilmu Binatang) dan paling akhir dimasukan pula bahasa Belanda dan Bahasa Inggris.

4. Pusat Pendidikan di Aceh

Sepanjang sejarah, dapat dilihat bahwa pusat pendidikan di Aceh tidak tetap pada suatu tempat, melainkan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain.

Pada masa kerajaan Islam Peureulak, pusat pendidikan Islam ialah *Dayah Cot Kala*. Kira-kira dekat *Bayauen* (Aceh Timur), sekarang. Pendirinya ialah Ulama Pangeran *Teungku Chik Muhammad Amin* pada akhir abad ketiga hijriah (awal abad ke X Masehi). Inilah pusat pendidikan pertama.

Pada masa kerajaan Islam Lingga (Aceh Tengah sekarang), terdapat pula pusat pendidikan di sana yang terkenal dengan *Dayah Seuruleu*. Sesudah kerajaan Indra Purba (Aceh Besar sekarang) menjadi kerajaan Islam, dengan nama Kerajaan Darussalam, didirikan pula pusat pendidikan di sana dengan nama *Dayah Lam Keuneu'eun* di bawah pimpinan *Syekh Abdullah Kan'an* yang kemudian terkenal dengan *Teungku Chik Lam Keuneu'eun*. (Hasjmy, 1975: 8-9).

Sesudah Aceh menjadi satu kerajaan Islam yang berpusat di Banda Aceh Darussalam, maka pusat pendidikan pun berpindah kepusat kerajaan Banda Aceh dengan didirikannya sebuah perguruan tinggi dengan nama *Jami'ah*

Baitur Rahman (Universitas Baitur Rahman) dan mempunyai 17 *Daar* (Fakultas), yaitu:

1. Daru 't-Tafsir Wa 'l-Hadits : Fakultas/Jurusan Tafsir dan Hadits.
2. Daru 't-Thibb : Fakultas Kedokteran.
3. Daru 'l-Kimya : Fakultas/jurusan Kimia.
4. Daru 't-Taarikh : Fakultas/jurusan Sejarah.
5. Daru 'l-Hisaab : Fakultas/jurusan Ilmu Pasti.
6. Daru 's-Siyasah : Fakultas/jurusan Politik.
7. Daru 'l-Aqli : Fakultas/jurusan Ilmu Aqal.
8. Daru 'z-Zira'ah : Fakultas Pertanian.
9. Daru 'l-Ahkaam : Fakultas Hukum.
10. Daru 'l-Falsafah : Fakultas/jurusan Filsafat.
11. Daru 'l-Kalaam : Fakultas/jurusan Teologi.
12. Daru 'l-Wizaarah : Fakultas/jurusan Ilmu Pemerintahan.
13. Daru Chazaanah Bait 'l-Maal : Fakultas/jurusan Keuangan dan Perbendaharaan Negara.
14. Daru 'l-Ardli : Fakultas/jurusan Pertambangan.
15. Daru 'n-Nahwi : Fakultas/jurusan Bahasa Arab.
16. Daru 'l-Mazahib : Fakultas Ilmu-ilmu Agama.
17. Daru 'l-Harbi : Fakultas Ilmu Peperangan. (Hasjmy, 1969: 9).

Akibat perang melawan Belanda, pusat pendidikan itu menjadi hancur lebur dan para ulamanya banyak yang su-

dah syahid. Sesudah perang usai, beberapa ulama yang masih hidup berusaha menghidupkan kembali dayah-dayah itu ditempat mereka masing-masing. Dengan demikian berdirilah beberapa pusat pendidikan baru seperti Dayah Meunasah Kumbang di Aceh Utara, Dayah Ie Leubeue di Pidie, Dayang Tanjungan di Aceh Utara, Dayah Tanoh Abee dan Dayah Kruengkale di Aceh Besar.

Kemudian pada zaman timbulnya madrasah-madrasah, yang dapat disebutkan sebagai pusat pendidikan di masa itu ialah Matanggalumpang Dua di Aceh Utara dengan Madrasah Al-Muslimnya, Blang Paseh Sigli, Pidie dengan Madrasah Saadah Abadiyah-nya dan Montasiek, Aceh Besar dengan Madrasah Djadam-nya.

Sesudah lahirnya P.U.S.A. pada tahun 1939, pusat pendidikan itu berpindah ke Bireuen dengan berdirinya Norma Islam Instituut, dan ke Lam Paku dengan berdirinya M.I.M. (Ma'had Iskandar Muda), masing-masing di Aceh Utara dan Aceh Besar.

Kemudian sesudah zaman merdeka, sesuai dengan perkembangan, pindah lagi ke ibu kota Aceh Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dan dengan diresmikan pembukaan Kopelma Darussalam pada tanggal 2 September 1959, maka sampai sekarang Pusat Pendidikan di Aceh adalah Darussalam—Banda Aceh, baik pendidikan umum, maupun pendidikan Agama. Pendidikan umum dengan Universitas Syiahkuala-nya dan pendidikan agama dengan IAIN Jami'ah Ar-Raniry-nya.

Universitas Syiahkuala mempunyai 7 buah Fakultas, yaitu:

1. Fakultas Ekonomi;
2. Fakultas Kedokteran Hewan;
3. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat;
4. Fakultas Teknik;

5. Fakultas Pertanian;
6. Fakultas Ilmu Pendidikan;
7. Fakultas Keguruan.

I.A.I.N. Jami'ah Ar-Raniry mempunyai 4 Fakultas, yaitu:

1. Fakultas Syari'ah (Hukum Islam);
2. Fakultas Tarbiah (Pendidikan Islam);
3. Fakultas Ushuluddin (Theology);
4. Fakultas Dakwah dan Publisistik.

Di samping Universitas Syiahkuala dan IAIN Ar-Raniry, ada dua lembaga pendidikan tinggi lainnya di Darussalam, yaitu A.P.D.N. (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) dan Dayah Teungku Chik Pantekulu.

5. *Perbedaan Ajaran*

Ajaran Islam secara garis besarnya dapat dibagi dua. Yang pertama mengenai 'Aqidah (kepercayaan) dan yang kedua mengenai *Fiqih* (hukum).

Mengenai 'Aqidah dapat dibedakan dalam tiga aliran, yaitu Aliran *Ahlussunnah Wal Jamaah*, Aliran *Mu'tazilah* dan Aliran *Suluk* yang disebut juga Aliran *Wihdatul Wujud*.

Mengenai *Fiqih* ada empat mazhab yang masyhur, yaitu Mazhab Hanafy yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, Mazhab Maliky yang dipelopori oleh Imam Malik, Mazhab Syafi'iy yang dipelopori oleh Imam Syafi'iy dan Mazhab Hanbaly yang dipelopori oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal.

Mengenai *Fiqih*, di Aceh pada mula-mulanya tidak ada perbedaan, semua ulama menganut mazhab Syafi'iy, sebagai juga di daerah lain di seluruh Indonesia. Tetapi mengenai 'Aqidah terdapat dua aliran di Aceh dahulu. Pertama aliran *Wihdatul Wujud* yang dipelopori oleh *Hamzah Fansu*.

ry dan Syamsuddin As-Sumatrany, yang oleh Dr. C.A.O. Van Nieuwenhuijze disebutkan Syamsu 'l-Din van Pasai. Pada masa Sulthan Iskandar Muda, aliran *Wihdatul Wujud* ini banyak dianut, karena ulama yang mendampingi beliau adalah Syamsuddin As-Sumatrany. Baru pada masa Sulthan Iskandar Thani aliran *Ahlussunah wal Djama'ah* menjadi aliran yang dianut oleh pemerintah, karena ulama yang mendampingi adalah Nuruddin Ar-Raniry, demikian pula pada masa Sulthanah Shafiatuddin, karena yang mendampingi beliau adalah Abdur Rauf Syiahkuala. (Abdullah Ujung Rimba dan Abdullah Arif, 1964: 9-13). *)

Sesudah Muhammadiyah masuk di Aceh, mengenai *Fiqih* pun mulai ada perbedaan aliran. Artinya mulai ada yang menganut pendapat yang lain dari Mazhab Syafi'iy. Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada sesuatu mazhab tertentu; setiap masalah diperiksa dalil-dalilnya. Mana yang dianggap dalilnya kuat, itulah yang diambil. Untuk ini Muhammadiyah membentuk suatu majlis khusus yang dinamakan *Majlis Tarjih*. Oleh karena itu kita sering mendengar bahwa Muhammadiyah tidak bermazhab. Tetapi itu sebenarnya tidak betul. Sebab dengan adanya Majlis Tarjih yang mengambil keputusan tentang hukum sesuatu masalah dan keputusan itu dikirimkan kepada semua warga Muhammadiyah untuk diamalkan, maka berarti itu juga suatu mazhab yang dapat disebutkan Mazhab Muhammadiyah. Tetapi karena tokoh-tokoh Muhammadiyah di Aceh, bukan para ulama, maka aliran itu mula-mula tidak mendapat pasaran. Masyarakat Aceh tidak menaruh kepercayaan terhadap hukum Islam yang disampaikan oleh bukan para ulama, lebih-lebih lagi hukum yang disampaikan itu banyak berbeda dengan hukum yang mereka dengar dari para ulama yang mereka percayai.

Dalam hal ini Prof. Hasbi Ash Shiddieqy banyak jasa-

*) Keterangan tentang hal ini lihat Baihaqi I *Ulama dan Madrasah* (Editor).

nya. Beliaulah ulama yang pertama-tama menyodorkan kepada masyarakat hukum-hukum Islam yang diambil dari mazhab lain dari mazhab Syafi'iy, apabila beliau melihat bahwa itu yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia. Tentu saja pada mula-mulanya mendapat reaksi juga dari para ulama yang hanya mempelajari kitab-kitab dalam mazhab Syafi'iy saja. Tetapi kini hampir seluruh yang difatwakan oleh Teungku Hasbi dahulu, sudah dianut oleh sebagian masyarakat, termasuk sebagian besar para ulamanya. Hal ini sangat dibantu oleh suasana menjelang terbentuknya P.U.S.A., lebih-lebih sesudah terbentuknya organisasi itu. Sejak itu para ulama sudah sering bertemu, sehingga ada kesempatan untuk saling tukar pikiran dalam berbagai masalah. Ulama PUSA lebih bijaksana dalam membawa faham baru. Faham baru dibawa tanpa mencela ulama-ulama yang menganut faham lama, sebagai yang dilakukan oleh sementara ulama yang terlalu bersemangat. Ulama PUSA menjelaskan bahwa faham yang lama itu juga betul, sesuai dengan kondisi dan situasi pada waktu itu. Andaikata mereka masih hidup sekarang, tentu mereka juga berpendapat lain dari pendapat dahulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan apa yang dialami oleh Imam Syafi'iy. Beliau mempunyai dua *qaul* (pendapat) dalam beberapa masalah. Ada *Qaul Qadim* (pendapat lama) yaitu pendapat beliau sebelum menetap di Mesir; dan *Qaul Jadid* (pendapat baru) sesudah beliau menetap di Mesir. Ini menunjukkan bahwa situasi dan kondisi juga mempunyai pengaruh dalam berijtihad. Ulama PUSA tidak mencela orang yang mengatakan bahwa ijtihad sudah ditutup pintunya. Sebab itu juga merupakan suatu ijtihad, sesuai dengan situasi pada waktu itu, di mana semua orang sudah mengaku mujtahid, meskipun baris kitab saja belum tentu benar membacanya. Dalam suasana demikian, memang sangat muslihatlah ada ijtihad bahwa pintu ijtihad itu sudah ditutup, supaya tidak semua orang memasuki pintu itu.

Ini dapat kita lihat, bahwa ulama yang mengatakan pintu ijihad itu sudah ditutup, dalam praktek mereka juga ber-ijihad, dengan memberi fatwa mengenai masalah-masalah yang belum ada hukumnya; hanya saja mereka tidak mau menamakan itu ijihad, demi kemasyarakatan.

tel. 1873, ia berangkat ke Aceh dan tiba di sana tiga hari kemudian. (Pang, 1931 : 150).

PERANAN ULAMA DALAM PERANG ACEH

1. *Perang Aceh Mulai*

Dalam usaha meluaskan daerah jajahannya, pemerintah Hindia Belanda pada akhir bulan Agustus 1872, mengirimkan beberapa utusan ke Aceh untuk membujuk Sultan Aceh supaya mau mengaku tunduk di bawah pemerintah Hindia Belanda dengan cara damai. Bujukan itu ditolak oleh Sultan Aceh. (Jakub, 1952 : 13). Sultan Mahmud Syah yang memerintah pada waktu itu, sudah yakin bahwa dengan penolakannya, Aceh pasti akan diserang Belanda. Untuk menghadapi serangan yang mungkin akan datang dengan tiba-tiba, Sultan memerintahkan seluruh panglima untuk mempersiapkan kubu-kubu pertahanan di sepanjang pantai wilayah Tiga Sagi (Kabupaten Aceh Besar dan Kotamadya sekarang). Kepada gurunya Teungku Syekh Abbas Kutakarang, diminta untuk menyebarkan semangat jihad mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Berdasarkan semangat jihad yang dikobarkan oleh Teungku Chik Kutakarang itu, maka panglima-panglima *Sagi*⁹ dan para Uleebalang dapat memobilisasikan rakyat untuk berlatih guna menghadapi serangan musuh yang diduga akan segera datang (Razi dan Anwar Nurdin, 1963 : 14).

Ternyata dugaan Sultan Mahmud Syah itu tidak meleset. Pada tanggal 7 Maret 1873, berangkatlah dari Jakarta menuju perairan Aceh, wakil ketua Dewan Hindia,

Nieuwenhuijzen dengan dua buah kapal perang, sebagai komisaris pemerintah Hindia Belanda untuk menuntut supaya Sultan Aceh mengakui pertuanan Belanda Nieuwenhuijzen singgah di Singapore dan Penang. Di Penang ia mendapat dua buah kapal perang lagi. Lalu tanggal 19 Maret 1873, ia berangkat ke Aceh dan tiba di sana tiga hari kemudian. (Pane, 1931 : 150).

Angkatan perang Belanda di bawah pimpinan Majoor Generaal Kohler baru berangkat dari Tanjung Periok menuju Aceh pada tanggal 22 Maret 1873 dan tiba di perairan Aceh pada tanggal 4 April 1873. Mungkin oleh karena inilah ultimatum perang yang sudah ditulis oleh Nieuwenhuijzen pada tanggal 26 Maret 1873, baru pada tanggal 1 April dikirimkan, sesudah berkali-kali terjadi surat menyurat yang tidak memuaskan Belanda, karena Sultan Aceh hanya menyatakan tidak ingin perang dan ingin bersahabat dengan Belanda, tetapi tidak menyatakan pengakuan hak pertuanan Belanda atas Aceh.

Serangan agresi pertama ini dimulai pada tanggal 5 April 1873. Dalam pertempuran sengit yang berlangsung 18 hari itu, tentara Belanda telah dipukul mundur, sampai hancur lebur, termasuk panglima-panglima yaitu Majoor Generaal Kohler tertembak mati dalam medan pertempuran. Sisa-sisa tentara Belanda yang masih hidup, melarikan diri dengan meninggalkan mayat-mayat kawannya. (Said, 1961 : 401-418). Ini adalah berkat semangat jihad yang dikobarkan oleh ulama Chik Kutakarang.

Gouverneur Generaal Hindia Belanda, Loudon, ingin menebus kegagalan totalnya dari penyerbuan pertama yang menewaskan panglima Majoor Generaal Kohler. Untuk ini dimulainya dengan mengirimkan sejumlah mata-mata yang akan menyelidiki situasi dan kondisi Aceh. Kemudian disusul dengan pengangkatan Letnan Jendral J. Van Swieten se-

bagai komandan ekspedisi kedua untuk menaklukkan Aceh dengan kekerasan.

Pada tanggal 16 Nopember 1873, berangkatlah panglima agresi kedua, Letnan Jendral Van Swieten menuju Aceh dengan membawa 60 buah kapal perang yang dilengkapi dengan 206 pucuk meriam, 22 pucuk mortir, 389 orang perwira, 7888 orang serdadu biasa, 32 orang perwira dokter, 3565 orang hukuman laki-laki yang dipaksa untuk berperang dan 243 hukuman perempuan. Juga barisan kuda (kaveleri) selengkapnya dengan empat perwira dan 75 bawahan beserta kuda perang sembrani (tangkas). Tidak ketinggalan pula pasukan jeni, lengkap dengan petugas dan alat-alatnya, termasuk rel kereta api, alat-alat untuk rakit besi, rakit perahu dan sebagainya. Alhasil ekspedisi kedua ini kekuatannya dan perlengkapannya berlipat ganda dari ekspedisi pertama. Malahan turut dibawa tiga orang pegawai agama, yaitu, seorang veldpridekter, seorang pastor dan seorang guru agama Islam, yaitu H.M. Ilyas dari Semarang. Tidak hanya itu, tetapi juga dibawa serta dari Jawa lima orang mata-mata, sampai di Penang ditambah lagi beberapa orang Tionghoa yang pandai bahasa Aceh, seorang Keling, seorang Arab, seorang dari Padang, seorang dari Trumon (Aceh Selatan) dan beberapa orang lagi mata-mata lainnya. Di Aceh sendiri sudah menunggu seorang kaki tangan Belanda yang ulung bernama Ali Bahanan.

Selain dari Van Swieten sendiri selaku komandan, turut dua orang jendral lainnya, yaitu Generaal Majoor Verspijck selaku orang kedua dan Generaal Majoor J.L.J.H. Pel, juga dua orang kolonel dan empat orang Letnan Kolonel, di samping sejumlah Majoor dan Kapten yang sudah banyak pengalaman. Pokoknya persiapan Belanda kali ini cukup hebat.

Kiranya belum lengkap, kalau kita belum menyebutkan dua persiapan lainnya dari Gouverneur Generaal Loudon, yaitu:

Pertama : ia dapat membujuk beberapa raja di Jawa, sehingga kepada panglima perang Letnan Jendral Van Swieten dan wakilnya Mayor Jendral Verspijck, dapat diperbantukan perwira Legiun Mangkunegara, Pangeran Ariogondosisworo, perwira Paku Alam, R.M.P. Pakungperang, Pitmeester (Kapten Barisan Kuda) Barisan Bangkalan, Pangeran P. Adinegoro dan perwira Barisan Sumenep, R.A. Kromo.

Kedua : jumlah tentaranya ditambah dengan kuman-kuman kolera yang dibawanya dari Jakarta. Seorang bekas komandan divisi tentara Itali yang sudah pensiun bernama Mino dan bekerja pada Belanda sebagai Kapten salah satu kapal ekspedisi kedua itu, menjadi salah seorang korban tentara kolera, dan mati di tengah laut dalam pelayaran menuju Aceh. Mayatnya tidak dibuang ke-laut seperti biasanya orang mati di kapal, melainkan sengaja dibawa ke darat dan dilemparkan di pantai Aceh supaya Aceh ketularan kolera. Maksud buruk ini memang berhasil. Untung jugalah bahwa mayat itu dapat ditanam oleh rakyat Aceh, sehingga korbannya tidak begitu meluas.

Di fihak Aceh, Panglima Polem Cut Banta, sejalan dengan persiapan-persiapan lainnya, mengulangi perintah hariannya berdasarkan fatwa Teungku Chik Kutakarang untuk melanjutkan Perang Sabil melawan kafir Belanda yang hendak menjajah Agama, Bangsa dan Negara kita. Perintah harian ini disebar-luaskan ke tiap mesjid, meunasah dan di tempat-tempat lain dalam semua kesempatan.

Pada tanggal 23 Nopember 1873, tentara Belanda mulai mendarat di pantai *Kuala Lue* dan besoknya berkum-

pul di *Kuala Gigieng*. Pendaratan ini dilakukan di bawah pimpinan wakil panglima perang Mayor Jendral Verspijck. Enam hari kemudian baru dapat mencapai Kuala Aceh. Meskipun persenjataan pihak Belanda sangat lengkap menurut ukuran pada waktu itu, sedang pihak Aceh persenjataannya sangat kurang dan sederhana, namun berkat semangat jihad yang dikobarkan oleh para ulama, rakyat Aceh rela mengorbankan segala yang dimilikinya, harta, jiwa sekalipun. Demikianlah setelah menderita korban yang sangat banyak di kedua belah pihak, maka pada tanggal 24 Januari 1874, istana kerajaan Aceh yang sudah dikosongkan, dapat diduduki oleh tentara Belanda. Sultan dan para pejabat lainnya sudah mengungsi sebelumnya dan memindahkan pusat pemerintahan Aceh, mula-mula ke Luengbata kemudian ke Paga Aye. Tidak lama sesudah itu Sultan Aceh Mahmud Syah mangkat, akibat serangan kolera. (Said, 1961 : 440-460).

Jatuhnya keraton adalah malapetaka yang menyebabkan keadaan menjadi sangat gawat, sehingga memerlukan pemusatan pikiran dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam rangka melanjutkan perlawanan. Salah satu langkah yang diambil ialah mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh kurang lebih 500 orang pemimpin dan ulama. Musyawarah yang dipimpin oleh Imeum Luengbata dan Teuku Lamnga. Setelah para ulama memberikan penjelasan dan pendapat ditinjau dari sudut hukum Islam, maka rapat memutuskan: Wajib Perang Sabil untuk mengusir kafir Belanda. Keputusan itu diucapkan bersama merupakan sumpah, dengan suara yang mengguntur. (Said, 1961 : 437). (Tanggal dari peristiwa ini belum ditemukan dalam catatan sejarah).

Menurut dokumen tulisan tangan dengan huruf Arab bahasa Melayu dan pakai cap kerajaan, yang saya peroleh dari Said Abidin Lam Oi dan foto-copinya di halaman berikut, bahwa pada hari Ahad tanggal 1 Muharram tahun 1290

Hijriah, tiga orang pemimpin Aceh telah bersumpah tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Bila salah seorang di antara mereka tunduk, maka anak cucunya akan dikutuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketiga orang pemimpin itu ialah:

1. Ulama, Teungku di Meulek Said Abdullah bin Sidi Alhabib Saifuddin Teungku Di Ahmad Jamalullail Ba Alawy Al-Husainy.¹⁰⁾
2. Paduka Banta Muda Tuanku Hasyim.
3. Paduka Banta Keucik Tuanku Mahmud.

Dokumen itu dimulai dengan Muqaddimah dalam bahasa Arab, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Melayu yang berbunyi sebagai berikut:

Syahdan sebermula maka ketahui olehmu hai Thahlib, bahwasanya inilah surat amanah pesan washiat hamba faqir Teungku Di Meulek Said Abdullah bin Sidi Alhabib Saifuddin Teungku Di Ahmad Al-Jamalullail Ba'Alawy Al-Husainy dan amanah pesan washiat Sri Paduka Bangta Muda Tuanku Hasjim & Sri Paduka Bangta Keucik Tuanku Mahmud, yaitu pada tahun-hijrah Nabi S.A.W. seribu dua ratus sembilan puluh (sanah 1290 H) pada tanggal 1 hari bulan Muharram pada hari Ahad yaitu pada zaman kerajaan Paduka Sri As-Sultan 'Alauddin Mahmud Syah Dhillullahi fil 'Alam.

Yang pertama telah ijma' mufakat kami tiga orang nama yang telah tersebut dalam suratimeya ini dengan bersumpah bahwasanya kami tiga orang sekali-kali tidak mau tunduk dibawah kekuasaan Holanda dengan menyerah diri ta'luk di bawah kekuasaan seteru. Maka barangsiapa dalam tiga orang yang ternama tersebut namanya dalam surat istimewa ini tunduk dan ta'luk ke bawah kekuasaan Holanda, maka atasnya kutuk

Allah sampai pada anak cucu-nya masing-masing.-

Ismail Yakub dalam bukunya *Teungku Tjhik Di Tiro*, menyebutkan adanya perundingan lain yang dinamakan Perundingan Lamsie, karena adanya dalam daerah Lamsie, termasuk dalam XXII Mukim yang dikepalai oleh Panglima Polem sebagai Kepala Sagi. Perundingan itu diadakan sesudah Seulimeum jatuh ke tangan Belanda. Oleh karena itu terpaksa diadakan secara rahasia, dihadiri oleh uleebalang-uleebalang yang pada lahirnya sudah takluk kepada Belanda. Juga dihadiri oleh para panglima, para ulama dan orang-orang terkemuka, dalam daerah XXII Mukim, termasuk Panglima Polem sendiri dan Teungku Chik Abd. Wahab Tanoh Abee.

Dalam perundingan itu macam-macam pendapat sudah dikeluarkan. Ada yang terlalu bersemangat, ada yang terlalu lembek dan ada pula yang sedang. Akhirnya diminta pendapat Teungku Chik Tanoh Abee. Beliau mengatakan bahwa tenaga perjuangan belum hancur seluruhnya. Tetapi yang sudah kurang benar adalah kesucian batin dan persatuan hati. Panjang lebar Teungku memberikan penjelasan. Akhirnya beliau menutup kata: "Sebelum kita memerangi musuh lahir, perangilah dahulu musuh batin, yaitu hawa nafsu. Harta rakyat yang ada pada masing-masing kita, yang telah diambil karena menuruti hawa nafsu, serahkan kembali dengan segera. Janganlah rakyat itu selalu teranjaya. Tegakkanlah keadilan di tengah-tengah kita lebih dahulu, sebelum kita minta keadilan pada orang lain. Dari itu, taubatlah Teuku-teuku dahulu sebelum mengajak rakyat memerangi *Kompeni*. Kalau tidak juga dikembalikan harta-harta rakyat yang diambil dengan jalan tidak sah, yakinlah rakyat itu akan membelakangi kita dan kita akan tersapu bersih dari Aceh ini melebihi dari yang sudah-sudah. Kalau yang saya minta Teuku-teuku penuhi, maka saya akan bersama-sama ke medan perang. Bila tidak, sa-

ya dan murid-murid saya jangan dibawa serta. Dan saya pandang, Teuku-teuku berperang dengan Saudara sendiri”.

Nasehat dan kata putus Teungku Chik Di Tanoh Abee dikuatkan oleh Teuku Panglima Polem dan menganjurkan dengan keras supaya masing-masing uleebalang yang ada padanya harta rakyat, hendaklah dikembalikan dengan cepat. Kemudian bersama-sama nanti menyerang musuh. (Yakub, 1952 : 23 —).

2. Ulama Pahlawan Teungku Chik Di Tiro. ¹¹

Pada akhir tahun 1880, boleh dikatakan daerah yang disebut *Aceh Lhee Sagoe*, yaitu kabupaten Aceh Besar dan Kotamadya Banda Aceh sekarang, sudah jatuh ke tangan Belanda, kecuali daerah pegunungan Seulawah. Di situlah para pejuang yang menjadi buruan tentara Belanda, menjadikan tempat persembunyian.

Di daerah pesisir, di luar Aceh Lhee Sagoe, Belanda menjalankan politik lain, yaitu politik damai dan berunding. Beberapa Uleebalang sudah ada yang bersedia menandatangani *Korte Verklaring* (Perjanjian Pendek). Isinya merupakan pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda atas daerah itu, sedang Uleebalang yang bersangkutan diangkat menjadi *Zelfbestuurder* (Yang memerintah sendiri). Artinya, daerah itu tidak langsung diperintah oleh Belanda. Dapat diterjemahkan dengan Daerah Swapraja.

Dalam keadaan demikian, para pejuang yang bersembunyi disekitar gunung Seulawah, berpikir bahwa berdiam diri begini ini tidak ada artinya dan tidak ada penghabisannya. Oleh karena itu mereka berkumpul di gunung Biram dekat Lamtamot, kira-kira 10 kilometer dari Seuli-meum. Dalam pertemuan itu mereka membahas langkah-langkah yang lebih bermanfaat dalam menghadapi suasana yang demikian. Sesudah bertukar pikiran panjang lebar, mereka mengambil keputusan, bahwa perjuangan harus

diteruskan. Untuk ini perlu mengusahakan bantuan dari luar Aceh Besar. Bantuan itu harus diminta melalui para ulama, karena ulamalah yang mempunyai pengaruh besar dalam menghadapi maut. Untuk itu perlu mengirimkan beberapa orang utusan ke daerah Pidie, karena daerah itu selain dari mempunyai banyak ulama pemimpin, juga merupakan daerah yang terdekat dan lebih mudah dihubungi. Tambahan pula bahwa keadaan di sana masih lapang, tidak seperti di Aceh Besar yang sudah dikuasai seluruhnya oleh tentara Belanda. Di sana Belanda hanya baru menguasai kota Sigli saja.

Utusan gunung Biram berangkat ke Pidie melalui bukit barisan dipinggir Gunung Seulawah, untuk menghindari dari penglihatan mata-mata musuh. Sampai di Pidie, dengan hati-hati sekali mencari info mengenai ulama-ulama pemimpin. Sesudah beberapa hari berusaha, akhirnya mereka mendengar bahwa pusat pimpinan ulama di Pidie adalah Tiro, kurang lebih 20 kilo meter lagi jaraknya. Seluruhnya Uleebalang dan Ulama Pidie menaruh hormat kepada ulama Tiro yang mereka sebut Teungku Chik Di Tiro. Sebab Tiro pada waktu itu sudah menjadi pusat pimpinan agama dan murid-murid yang belajar di situ sudah bertebaran di seluruh Aceh.

Nama Ulama pemimpin pada waktu itu ialah Teungku Chik Di Tiro Muhammad Amin dan sering juga disebut Teungku Chik Dayah Cut. Kepada beliaulah utusan Gunung Biram tadi menyampaikan amanahnya yang dibawanya dari Aceh Besar. Teungku Chik Dayah Cut mendapat gambaran yang jelas mengenai keadaan Aceh Besar pada waktu itu, lebih-lebih lagi karena ia sendiri tiga tahun sebelumnya, pernah bergerilya di Lamsok dan menyerbu benteng Belanda di Lam Teungoh.

Sepulangnya dari gerilya di Lamsok, Teungku tetap memikirkan nasib negeri dan agama yang sudah dikuasai oleh

musuh di Aceh Besar dan Sigli. Oleh karena itu selain dari memberi pelajaran agama, sejarah Islam dan Ilmu-ilmu lain, juga beliau membangun tempat membuat Rencong Aceh, tombak dan Peudeung On Jok (pedang berbentuk daun ijuk).

Sebagai sambutan terhadap amanah yang disampaikan oleh utusan Gunung Biram, Teungku Chik Dayah Cut mengundang orang-orang terkemuka di sekitar Tiro untuk menghadiri rapat yang sengaja diadakan di Dayah Krueng. Dalam rapat ini utusan Gunung Biram menjelaskan suasana di Aceh pada waktu itu. Kemudian Teungku Chik Dayah Cut memberikan komentar seperlunya. Rapat kedua diadakan di Dayah Lampoh Raya untuk menentukan sikap dan bantuan yang dapat diberikan kepada pejuang yang masih ada di Aceh Besar.

Rapat kedua ini telah mengambil beberapa keputusan:

Pertama: Bantuan harus diberikan cepat, sebelum terlambat. Sebab:

- a. Bila Belanda sudah sampai ke udik-udik di Pidie ini seperti di Aceh Besar, maka seluruh pejuang Pidie dan bagian lain dari Seluruh Aceh akan mengalami seperti apa yang telah dialami saudaranya di Aceh Besar, yaitu mengungsi dan menyingkirkan diri ke gunung-gunung yang kelam.
- b. Bila kaum pejuang di Aceh Besar sudah tersapu bersih, maka Belanda akan menuju ke Pidie, daerah yang berbatasan dengan Aceh Besar. Kalau sudah begitu, jangankan mengusir musuh di Aceh Besar, memper-tahankan Pidie-pun sudah sulit.

Kedua: Pemimpin yang diutus ke Aceh Besar, harus mempunyai sifat-sifat istimewa, sebab:

- a. Semangat kaum pejuang sudah luntur, maka hendaklah ada pemimpin yang sanggup membangunkan dan meng-

hidupkan kembali semangat mereka yang telah mati itu.

- b. Orang yang mau berjuang sudah berkurang, maka hendaklah ada pemimpin yang sanggup mencari kawan berjuang.
- c. Pemimpin yang dicari itu akan berangkat ke Aceh Besar. Oleh karena itu haruslah ia orang yang tabah, jujur, berani dan mendapat kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat perlu benar, karena rakyat Aceh Besar sudah goyah kepercayaannya kepada kepalanya, sebab mereka hanya dipakai sebagai landasan.

Para anggota rapat menoleh kiri-kanan, melihat dan memperhatikan siapakah gerangan yang sanggup menghadapi pekerjaan yang maha sulit itu. siapakah yang sanggup membangun semangat rakyat, mencari kawan berperang, menanam kembali kepercayaan rakyat kepada pemimpin, menerangkan tujuan peperangan. Lebih-lebih lagi sulitnya pergi jauh ke sana, ke Aceh Besar, daerah yang sudah aman dalam tangan musuh. Se-akan-akan pemimpin itu mengadakan perang baru, hendak menaklukan sebuah negeri lain yang kuat dan cukup persediaan alat perangnya. Sedang dipihak penyerang, selain tidak mempunyai persediaan alat perangnya. Sedang di pihak penyerang, selain tidak mempunyai persediaan alat apa-apa, juga keadaannya sedang kucar kacir.

Sesudah mengambil keputusan tersebut, keadaan rapat sunyi-senyap, semua terdiam seakan-akan rapat sudah sampai kepada jalan buntu. Sesaat kemudian, kelihatan Teungku Chik Dayah Cut berbisik-bisik dengan kemenakannya yang baru pulang dari Mekkah, Teungku Haji Syekh Muhammad Saman. Sesudah itu yang tersebut belakangan tampil kemuka berbicara dengan lancar dan suara yang keras. Memang ia terkenal sebagai seorang Khatib dan pembicara yang menarik disekitar Tiro. Teungku Syekh

Saman mengatakan: dari segenap golongan rakyat, baik yang merupakan alat-alat perang, bahan-bahan makanan, perbelanjaan, maupun tenaga suka-rela yang memasuki lasykar muslimin yang dibentuk sampai berjumlah puluhan ribu. Dalam masa 10 tahun lebih beliau memimpin peperangan, sudah dapat merebut kembali sebahagian besar daerah dalam Aceh Besar, hanya tinggal daerah sekitar Kutaraja (kotamadya Banda Aceh sekarang) saja lagi yang belum dapat direbutnya. Takdir Allah, usaha pihak Belanda, untuk menewaskannya dapat berhasil, bukan dengan dibunuhnya di medan perang, melainkan dengan membayar pengkhianat bangsa yang bersedia memberinya racun dalam makanan yang dihadiahkan kepadanya selaku sumbangan yang diberi nama *khanduri* untuk Teungku. Beliau meninggal kena racun di *Mureue* pada tahun 1891. Perjuangannya dilanjutkan oleh keturunannya dan para pahlawan lainnya sambung menyambung sampai tahun 1912. (Pane, 1951: 174).

3. *Teungku Chik Pante Kulu dan Hikayat Prang Sabi*

Selain dari keahliannya sendiri berpidato dan kecapannya memimpin, Teungku Chik Di Tiro dapat berhasil merebut kembali sebahagian besar daerah yang sudah dikuasai Belanda di Aceh Besar, juga disebabkan oleh peranan Teungku Chik Pante Kulu dengan Hikayat Prang Sabinya.

Nama lengkap dari pengarang hikayat tersebut adalah Teuku Chik Haji Muhammad Pante Kulu. Sejak kecilnya ia sudah mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkembang di Dayah Tiro pada waktu itu, yang dipimpin oleh Teungku Chik Dayah Cut Muhammad Amin. Sesudah pandai dalam semua bidang ilmu yang diajar di Dayah tersebut, ia ingin naik haji untuk menunaikan rukun Islam ke-lima, sambil menambah pengetahuan dan pengalamannya di Mekkah.

Naik haji pada waktu itu adalah sulit, tidak seperti sekarang. Satu-satunya jalan ialah melalui pelabuhan Idi di Aceh Timur, karena pelabuhan itulah yang ramai disinggahi kapal untuk mengangkut hasil bumi yang banyak di sana, yaitu lada (merica). Dari Idi ke Penang, dan dari Penang baru ke Jeddah.

Sesudah menunaikan ibadah haji, Teungku Pante Kulu tidak terus pulang, melainkan menambah pengetahuan dan pengalaman lebih dahulu. Selain dari belajar, ia juga bergaul dengan ahli-ahli pergerakan yang berkunjung ke Mekkah pada waktu itu. Waktu pecahnya perang Aceh dengan Belanda, Teungku Chik Pante Kulu masih di Mekkah. Sesudah berdiam empat tahun lamanya di Mekkah, ia kembali dengan maksud supaya dapat membantu perang melawan Belanda.

Dari bekas gurunya Teungku Chik Dayah Cut, ia mendapat keterangan jelas mengenai situasi Aceh dan mengenai kawannya Teungku Chik Muhammad Saman Tiro yang telah diangkat menjadi Panglima Perang dan sedang berjuang memimpin perjuangan melawan Belanda di Aceh Besar, karena Teungku Chik Saman selalu mengirimkan laporan kepada pamannya Teungku Chik Dayah Cut Di Tiro. Teungku Pante Kulu juga mendapat perintah untuk menyusul ke Aceh Besar. Memang maksudnya pulang untuk membantu perang.

Beliau mempunyai bakat yang besar mengenai sastra, terutama sastra Aceh. Bermodalkan keahliannya dalam seni sastra Aceh inilah, ia berangkat menyusul Teungku Chik Di Tiro ke Aceh Besar. Ia tidak hanya pandai mengarang sajak-sajak Aceh, tetapi juga pandai melagukannya sendiri dengan suaranya yang merdu dan lagunya yang seronok. Ia telah menyusun sebuah hikayat yang diberi nama: *Hikayat Prang Sabi*. Hikayat ini disusun dalam bahasa Aceh bersajak, sebagai lazimnya karangan-karangan dalam bahasa

Aceh pada waktu itu. Isinya anjuran untuk berperang melawan kafir untuk meninggalkan agama Allah yang disebut *Perang Fi Sabilillah*. Kalah atau menang, mati atau hidup dalam perang itu, semua mendapat pahala dari Tuhan. Kalau mati dalam perang sabi dinamakan mati syahid. Orang mati syahid dalam perang, tidak usah dimandikan dan tidak usah dikafankan dengan kain kafan yang baru seperti biasanya, cukup dikafankan dengan pakaian yang ada di-badannya saja. Darahnya dan pakaian itu sebagai saksi yang kuat bahwa orang itu adalah mati syahid.

Sebagai pengaruh dari Hikayat Prang Sabi itu, setiap putera Aceh yang mendengar bacaan hikayat itu, dengan suka-rela mendaftarkan diri menjadi anggota lasykar Muslimin untuk mencari mati syahid.

Pengaruh Hikayat Prang Sabi itu tidak hanya selama perang besar-besaran sedang berlangsung, tetapi terus saja sampai peperangan usai. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda melarang keras orang membaca, mendengar, memiliki, menyimpan dan membawa Hikayat Prang Sabi itu. Pelanggar larangan tersebut, diancam dengan hukuman yang berat.

Sebagai contoh akibat pengaruh Hikayat Prang Sabi kepada pemuda Aceh, Anzib Lamnyong, sastrawan tua Aceh yang baru saja meninggalkan permulaan tahun ini (1976) dalam kata pengantarnya waktu menyalin Hikayat Prang Sabi itu ke dalam huruf Latin, menulis dalam bahasa Aceh yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

Apabila Belanda mengetahui ada orang yang menyimpan Hikayat Prang Sabi, terus dirampas dan penyimpanannya dihukum, demikian pula terhadap siapa saja yang membacanya.

Penyalin naskah ini pernah mengetahui, ada seorang-orang yang bernama Leem Abah, penduduk kampung Peurada kemukiman Kayee Adang, daerah

XXVI Mukim (sekarang kecamatan Ingin Jaya). Pada suatu malam ia mendengar orang membaca *Hikayat Prang Sabi*. Besoknya tanpa diketahui siapapun, pada pagi-pagi buta ia telah berada di Peukan Aceh di depan *Societeit Atjeh Club* (Balai Teuku Umar sekarang) di mana dijumpainya seorang orang Belanda lagi berjalan-jalan, lantas dengan mendadak Leem Abah menghunus rencongnya yang disembunyikan dalam lipatan kain, dan ditikam Belanda itu tepat pada dadanya, hingga jatuh terlentang dan mati terus disitu juga. Sesaat kemudian Leem Abah tersebut terus ditangkap dan akhirnya diinternir ke pulau Jawa, yang mungkin telah dibunuh, sebab tidak pernah pulang lagi ke Aceh.

Peristiwa ini terjadi dalam tahun 1907, pada waktu pertama kali Belanda menetapkan wajib bayar pajak bagi orang Aceh.

Selain dari peristiwa tersebut, pada masa itu masih banyak lagi terjadi kejadian-kejadian yang serupa, di mana satu dua orang masuk kota dan terus membunuh Belanda, sehingga terpaksa diadakan penjagaan yang ketat, dan siapa saja yang dicurigai terus ditangkap. (Hasjmy, 1971: 40-41).

4. *Teungku Fakinah Ulama Pahlawan Wanita*

Bantuan yang diperoleh Teungku Chik Di Tiro tidak hanya terbatas dari kaum pria saja, tetapi juga dari kaum wanita tidak terpermanai nilainya, baik berupa tenaga pengumpulan dana dari harta sabil, maupun tenaga kerja membuat benteng-benteng pertahanan. Hal ini dipelopori oleh seorang ulama wanita, Teungku Fakinah namanya yang sering disingkat dengan Teungku Faki. Tiga buah benteng baru yang didirikan di Lam Krak atas perintah Teungku Chik Di Tiro, sebuah di antaranya dikerjakan oleh para wanita di bawah pimpinan Teungku Fakinah. Benteng ini ia

lah Kuta Cot Weue. Tidak hanya untuk membuatnya saja, tetapi juga Teungku Fakinah menjadi Panglima dalam mempertahankan benteng itu dari serangan Belanda. Sebuah benteng lainnya, yaitu Kuta Bak Garut, dikepalai oleh adik-laki-laki Teungku Fakinah, bernama Teungku Amat yang disebut juga Teungku Leupueng.

Teungku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di Mukim Lam Krak, termasuk daerah XXII Mukim yang dikepalai oleh Panglima Polem ayahnya bernama Teungku Asahan sebagai lakab, sedang nama aslinya adalah Datu Mahmud. Ibunya bernama Fathimah yang sering dipanggil dengan sebutan Cut Mah, puteri seorang ulama besar, Teungku Muhammad Saad yang terkenal dengan lakab Teungku Chik Lampucok.

Selagi kecil, Fakinah telah belajar dari orang tuanya. Ibunya Teungku Fathimah mengajarkan dia tulis baca huruf Arab, membaca Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama lainnya melalui kitab-kitab Jawoe (kitab berbahasa Melayu lama). Di samping itu juga diajarkan berbagai kerajinan tangan. Ayahnya mengajarkan bahasa Arab, Fiqah, tashauf, sejarah Islam, tafsir, hadits dan lain-lain, sehingga ketika berumur 20 tahun, sudah dapat digolongkan gadis yang sudah Alim. Lalu dikawinkan dengan seorang ulama muda pula yang bernama Teungku Ahmad, yang kemudian kedua suami-isteri ini mengajar pada pusat pendidikan Islam Dayah Lampucok yang dibangun oleh orang tua Fakinah. Sejak itu Dayah Lampucok, selain dari menerima pelajar pria, juga menerima pelajar wanita untuk menerima berbagai ilmu dari Teungku Fakinah, termasuk juga kerajinan tangan.

Karena Sultan Aceh Alaidin Mahmud Syah (1870-1874), menolak ajakan Belanda supaya Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas Aceh, maka beliau sudah menduga bahwa Belanda pada suatu saat pasti akan menyerang

Aceh. Oleh karena itu beliau merasa perlu mengadakan persiapan-persiapan perang. Dalam rangka ini, semua pusat pendidikan Islam diwajibkan untuk melatih para pelajar memanggul senjata, baik laki-laki maupun perempuan.

Teungku Ahmad, suami Teungku Fakinah, bersama sepasukan pemuda pelajar yang sudah terlatih selama setahun di Dayah Lampucok ditugaskan untuk memperkuat penjagaan Pantai Cermen untuk mencegah pendaratan musuh. Komandan pasukan di Pantai Cermen itu adalah Panglima Polem Nyak Banta.

Pendaratan tentara Belanda disambut dengan perlawanan yang dahsyat, sehingga terjadilah pertempuran yang seru, yang mengakibatkan jatuhnya korban yang tidak sedikit di kedua belah pihak. Di pihak Aceh, pada tanggal 8 April 1873 telah syahid wakil komandan pasukan Rama Setia, Imeum Lam Krak, Teungku Ahmad suami Teungku Fakinah serta sejumlah perajurit lainnya. (Zainuddin, 1966 : 70).

Syahid suaminya mendorong Teungku Fakinah untuk menggantikan kedudukan suaminya itu, baik selaku pimpinan Dayah Lampucok, maupun selaku pimpinan lasykar.

Pada mulanya Fakinah mengadakan kampanye perang keseluruh daerah Aceh Besar, membangkitkan semangat jihad, terutama dalam kalayan kaum wanita, serta mengusahakan pengumpulan dana perang. Sesudah ini berhasil baik, maka dibentuknyalah pasukan wanita, yang mula-mula hanya terdiri dari janda-janda yang suaminya telah syahid dalam perang sabi. Tetapi kemudian, wanita yang masih mempunyai suami pun diterima menjadi anggota pasukannya, sehingga pasukannya menjadi besar, cukup menjadi satu *Sukey* yang terdiri dari empat *Balang* sedang Teungku Fakinah sendiri menjadi panglima *Sukey* (*Sukey* kira-kira sama dengan resimen dan *Balang* sama dengan *Batalion*). *Balang* terbagi lagi dalam beberapa *kawan* (kom-

pi). Kawan terbagi lagi dalam beberapa *Rakan* (Peleton). *Rakan* terbagi dalam beberapa *Sabat* (Regu).

Diantara empat Balang dari Sukey Teungku Fakinah, ada sebuah balang yang terdiri dari wanita seluruhnya, mulai dari komandan sampai perajuritnya. *Komandan Balang* disebut *Uleebalang*. Jadi asal arti uleebalang adalah komandan batalyon. Dalam *Balang* yang dikepalai oleh pria, ada pula satu dua *Kawan* atau satu dua *Rakan* atau satu dua *Regu* yang seluruhnya terdiri dari wanita.

Masing-masing Balang itu mempunyai *kuta* (benteng) sendiri, yaitu:

1. Kuta Cot Weue, yang didiami oleh Balang Wanita melalui, dipimpin langsung oleh Teungku Fakinah dan merangkap sebagai markas Sukey.
2. Kuta Lamsayuen, yang didiami oleh Balang dibawah pimpinan Teungku Muhammad Saleh.
3. Kuta Cot Bakgarut, yang didiami oleh Balang yang dipimpin oleh adik Teungku Fakinah, Pang Amat, yang disebut juga Teungku Leupueng.
4. Kuta Bakbale, yang didiami oleh Balang di bawah pimpinan Pang. Abdurrahman yang disebut juga Habib Lhong atau Habib Kabul.

Pada tanggal 9 Juni 1896, pasukan pilihan tentara Belanda yang besar jumlahnya di bawah pimpinan Kolonel J.W. Stempoort melakukan serangan umum terhadap benteng-benteng Sukey Fakinah di daerah Lam Krak. Serangan itu disambut dengan perlawanan yang gigih selama dua bulan. Baru pada bulan Agustus 1896, tentara Belanda dapat menduduki daerah Lam Krak, dan Teungku Fakinah bersama sisa pasukannya terpaksa mengundurkan diri ke Kuta Cot Ukam, kemudian ke Gleyeueng, kemudian ke Indrapuri. Dalam pertempuran ini, syahid pula suaminya yang kedua, Teungku Badai.

Sesudah Aceh Besar jatuh kembali ke tangan tentara Belanda, maka Teungku Fakinah bersama Panglima-panglima Sukey yang lain hijrah ke Pidie. Mula-mula ke Tiro, kemudian ke Tangse. Di Tangse Teungku Fakinah mendirikan dayah secara darurat bersama-sama dengan ulama-ulama lainnya, untuk mengajar putera-puteri yang lahir sejak perang berkecamuk, yang pada waktu itu sudah mulai remaja.

Pada bulan April 1899, tentara Belanda dapat merebut Kubu pertahanan Tangse, benteng demi benteng, sesudah memakan korban yang tidak sedikit dari kedua belah pihak, Teungku Fakinah bersama-sama dengan kawannya pahlawan wanita lain, dengan mengarungi rimba raya, berangkat menuju Pase, kemudian ke daerah *Gayo Luas*, untuk melanjutkan perang gerilya. (Hasjmy, 1976: 20-26).

SEKITAR LAHIRNYA P.U.S.A

1. *Suasana Umum sejak Perang Aceh dan Masa Belanda*

Sejak pecahnya perang Aceh melawan Belanda pada tahun 1873, hampir semua dayah mengalihkan aktivitasnya ke arah perjuangan fisik melawan Belanda. Sejak perang itu berkecamuk, banyak tenaga ulama yang hilang, karena syahid di medan perang. Hal ini berlangsung sampai tahun 1912. Sejak tahun 1913, sisa ulama yang tidak syahid, mulai mengusahakan hidupnya kembali dayah-dayah di seluruh Aceh. Tentu saja hal ini tidak lagi leluasa seperti dulu, karena sejak tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda sudah mulai berjalan di Aceh. Pemerintah kolonial Belanda sudah menjalankan Ordonansi Guru pada tahun 1905 (Stbl. 1905 No. 550), yang mula-mula berlaku di Jawa, yang mengawasi tiap guru yang mengajar agama. Untuk mendirikan sebuah pesantren atau madrasah, harus minta izin lebih dahulu. Untuk mendapatkan izin itu, disyaratkan beberapa hal, umpamanya pembatasan mata pelajaran yang boleh diajar, yaitu membaca dan menulis bahasa Arab, Tauhid (Ketuhanan) dan Fiqih (Hukum Islam), tiap pelajar yang datang dari luar kota, harus mempunyai surat keterangan dari pemerintah setempat dan tiap tiga bulan sekali harus melaporkan, keterangan sebagaimana yang telah dialami oleh Tuanku Raja Keumala waktu meminta izin untuk mendirikan Madrasah Khairiah di Kutaraja. Meskipun Stbl. 1905 itu sebenarnya hanya berlaku

untuk daerah yang diperintah langsung oleh Belanda, Aceh Besar dan Singkel, tetapi secara halus pemerintah Hindia Belanda, juga menekankan kepada para Zelfbestuurder di luar kedua daerah itu, untuk bertindak lebih hati-hati. Mungkin hal ini sebagai akibat dari nasehat Dr. Snouck Hurgronje yang antara lain berbunyi: Jangan mencoba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari pada ulama. Sebab keyakinan merekalah yang menyuruh mereka melawan Belanda. Terhadap mereka haruslah pelor yang berbicara. (Said, 1961: 568).

Sebagai akibat dari-pada itu, maka dayah-dayah yang dibangun kembali itu, tidaklah setaraf lagi dengan dayah-dayah yang hidup sebelum perang Aceh. Pelajaran keterampilan sudah tidak ada, sejarah Islam tidak ada. Tafsir Al-Qur'an kurang. Untuk keselamatan diri, maka sikap yang diambil ialah bagaimana yang diperintah, dipatuhi saja dan tidak lagi mengadakan kontak antara ulama di satu Afdeeling dengan ulama di afdeeling lain. Mereka hidup sendiri-sendiri. Lama kelamaan, mereka buta suasana dan mudah diperalat orang.

Meskipun demikian, di antara sekian jumlah ulama yang timbul sesudah perang usai, ada juga satu dua yang sadar, bahwa keadaan yang demikian rupa itu, kalau berjalan terus, akan membawa kehancuran Aceh. Demikian pula di kalangan keluarga dan famili uleebalang yang memerintah, di antara jumlah yang banyak, ada pula satu dua orang yang merasa tidak enak terhadap nasehat Snouck Hurgronje yang antara lain mengusulkan: "Supaya membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membikin korps pangreh-peraja senantiasa merasa diri kelas memerintah". (Said, 1961: 368). Mereka sadar bahwa meskipun mula-mula saran Snouck itu tidak dijalankan, tetapi kemudian ternyata hal itu sudah dijalan-

kan. Jadi ini berarti, bahwa demi kepentingan kolonial Belanda, perlu dipisahkan golongan bangsawan dari golongan rakyat, terutama golongan ulama. Kecuali ulama yang mau menurut saja, ulama yang merasa dirinya lemah, sehingga kalau ia tidak setuju terhadap sesuatu, cukup hanya menyatakan dalam hati saja, sedang mulutnya mengucapkan: "Ya", dengan alasan "demi keselamatan".

Mula-mula kesadaran itu hanya tinggal dalam hati saja. Tetapi kemudian muncul keluar dalam pembicaraan dan akhirnya menimbulkan kerja-sama antara kedua golongan yang hendak dipisahkan oleh pemerintah kolonial.

Dari segi lain kita lihat hubungan antara ulama dengan ulama sesudah tahun dua puluhan, terdapat sedikit ketegangan disebabkan masalah khilafiah. Beberapa masalah dalam hukum Islam mempunyai naskah yang tegas tetapi ada pula yang menimbulkan perbedaan pendapat, yang malah telah ada sejak zaman sahabat. Dan hal ini tidak mungkin ditiadakan begitu saja, kecuali sekedar mengatasi akibatnya, yaitu mana yang dianut oleh pemerintah, itulah yang berlaku di antara banyak pendapat itu. Ini-pun sebenarnya digariskan dalam qaidah ushul Fiqih. Oleh karena itu, seharusnya tidak perlu terjadi percekcoakan antara dua orang yang berbeda pendapat.

Akhirnya timbul juga kesadaran di kalangan para ulama sendiri. Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap yang pada tahun 1930 sudah mendirikan *Madrasah Almuslim Peusangan* di Matangelumpang Dua sudah lama merasakan hal ini, dan sudah mulai dikemukakannya kepada kawan-kawannya yang berada di Peusangan sendiri. Kemudian untuk memenuhi undangan sebagai pembicara dalam suatu perayaan Maulid, Teungku Abd. Rahman berangkat ke Blang Jrue. Di sana disambut oleh Teungku Ismail Yakob, Direktur *Madrasah Bustanu 'l-Ma'arif* di Blang Jrue. Dalam suatu pembicaraan tidak resmi, kedua ulama itu mem-

bicarakan keadaan masyarakat Aceh pada masa itu, dan bagaimana seharusnya di masa yang akan datang. Akhirnya sampailah pembicaraan kepada idee mendirikan sebuah organisasi ulama sebagai suatu jalan untuk memperbaiki masyarakat Aceh ke arah yang lebih baik dari yang sudah-sudah. Kedua ulama itu sudah sepakat untuk menyebar-luaskan idee itu kepada para ulama lainnya.

Sepulangnya dari Blang Jruen, Teungku Abd. Rahman melaporkan pembicaraannya dengan Teungku Ismail Yakob, kepada kawan-kawan seperjuangannya di Matanggelumpang Dua, terutama kepada Teungku Usman Aziz, salah seorang guru Madrasah Almuslim Peusangan yang merupakan tangan kanannya. Sejak itu, idee hendak mendirikan organisasi ulama itu disebar-luaskan oleh Teungku Abd. Rahman, Teungku Usman Aziz keseluruh daerah Aceh, baik secara lisan dalam suatu pertemuan, maupun dengan perantaraan surat yang dikirimkan kepada para ulama yang belum sempat dikunjungi. Idee itu disambut baik oleh para ulama, terutama oleh Teungku Muhammad Daud Beureu-eh di Sigli.

2. *P. Oe. S. A. Lahir*

Sesudah persiapan dianggap cukup, maka Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap mengundang semua ulama yang dianggap patut dan mempunyai pengaruh di Aceh untuk menghadiri suatu musyawarah ulama yang akan dilangsungkan di Matanggelumpang Dua, tepat pada hari perayaan maulid Nabi, yaitu tanggal 12 Rabi'ul Auwal 1358 H, bertepatan dengan 5 Mei 1939 M.

Teungku Ismail Yakob memberi penjelasan panjang lebar mengenai idee Teungku Abd. Rahman untuk mendirikan suatu organisasi ulama. Dijelaskan maksud dan tujuan dari organisasi ulama yang akan didirikan itu, yaitu:

1. untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syi'ar Islam yang suci, terutama di tanah Aceh yang pernah digelar dengan *Serambi Mekkah* pada masa keemasannya yang telah silam dan yang dalam beberapa masa yang telah lalu sampai sekarang, telah berubah menjadi satu negeri yang amat ketinggalan dari tetangga-tetangganya yang berdekatan, apalagi yang berjauhan, dan sudah demikian lamanya terbenam, dalam lembah kejahilan dan kegelapan.
2. hendak berusaha sedapat tenaga buat mempersatukan faham ulama-ulama Aceh tentang menerangkan hukum-hukum di mana mungkin, karena menurut yang telah dialami pada masa-masa yang telah lampau, pertikaian faham antara ulama-ulama kita, sering juga membawa kepada akibat yang tidak diinginkan oleh kita semua, begitu juga pertikaian faham itu adalah, menjadi batu penggelincirkan langkah kemajuan Islam yang suci.
3. berusaha memperbaiki dan mempersatukan rencana pelajaran sekolah-sekolah agama di seluruh tanah Aceh.

Dengan suara bulat, musyawarah menyetujui pembentukan suatu organisasi ulama dengan tujuan sebagai tersebut di atas, dan diberi nama *Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh*, disingkat menjadi P.Oe.S.A. (selanjutnya ditulis P.U.S.A.).

Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap, sudah mengkampanyekan kepada para peserta musyawarah, supaya memilih Teungku M. Daud Beureu-eh sebagai ketua. Selesai disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka dipilihlah Hoofdbestuur P.U.S.A. yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Ketua I : Teungku M. Daud Beureu-eh.

- Ketua II : Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap.
- Setia Usaha I : Teungku M. Nur el Ibrahimy.
- Setia Usaha II: Teungku Ismail Yakob.
- Bendahari : T.M. Amin.
- Komisaris : -- Tgk. Abd. Waliab Keunaloe Seulimeum.
- Tgk. Syekh Haji Abd. Hamid Samalanga.
- Tgk. Usman Lampoh Awe.
- Teungku Yahya Baden Peudada.
- Teungku Mahmud Simpang Ulim.
- Teungku Ahmad Damanhuri Takengon.
- Teungku M. Daud
- Teungku Usman Aziz Lho' Sukon.

Sesuai dengan Anggaran Dasar yang menetapkan bahwa Hoofdbestuur berkedudukan di tempat kedudukan Ketua I dan Setia Usaha I, maka Sigli menjadi tempat kedudukan Hoofdbestuur P.U.S.A. (Ismuha, 1949 : 15 - 19).

Dari uraian di atas jelaslah apa sebenarnya maksud dan tujuan P.U.S.A. yaitu: *Pertama, berusaha untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan Agama Islam. Kedua, berusaha untuk mempersatukan faham para ulama Aceh tentang hukum-hukum Islam. Ketiga: memperbaiki dan mempersatukan leerplan sekolah-sekolah agama di seluruh Aceh.*

Tidak lama sesudah P.U.S.A. lahir, ada sementara Uleebalang yang menafsirkan tujuan P.U.S.A. itu untuk mendirikan kembali sultanat Aceh, dengan Zelfbestuurder dari Peusangan, Teuku Haji Chik Muhammad Johan Alamsyah sebagai calon Sultan, dan PUSA diartikannya *Persatuan Untuk Sultanat Aceh*. Hal ini ditimbulkan oleh rasa kekuatiran ka-

lau sultanat Aceh dikembalikan oleh Belanda, maka kekuasaan Zelfbestuurder lainnya akan berkurang, hanya, Teuku Chik Peusangan saja yang baik. Penafsiran itu didasarkan kepada dua hal. *Pertama*: Sebelum P.U.S.A. terbentuk, sudah mulai ada tulisan-tulisan dalam beberapa majalah dan surat-kabar di Medan mengenai masalah sultanat Aceh, seperti majalah "*Penyebar*" & "*Seruan Kita*". Sesudah P.U.S.A. terbentuk, suara-suara semacam itu di koran Medan masih ada juga sekali-kali. *Kedua*, karena Zelfbestuurder dari Peusangan Teuku Haji Chik Muhammad Johan Alamsyah, diangkat sebagai Beschembeer (pelindung) P.U.S.A.

Sesudah terjadi pemberontakan Aceh pada tahun 1953, karena dihapuskan Propinsi Aceh yang telah dibentuk sejak 1 Januari 1950, D.P.R. membicarakan masalah pemberontakan Aceh itu. Karena yang memimpin pemberontakan itu adalah Teungku M. Daud Beureu-eh, bekas Ketua Pengurus Besar P.U.S.A., maka seorang anggota fraksi P.K.I. bernama Sarwono yang pernah tinggal di Aceh sekitar proklamasi kemerdekaan R.I. mengatakan dalam D.P.R. bahwa P.U.S.A. itu dibentuk oleh Belanda via Teuku Chik Peusangan, dengan maksud, untuk menentang Muhammadiyah masuk ke Aceh. Pada hal dia tahu bahwa P.U.S.A. aktif dalam mengejar Belanda di Aceh menjelang datangnya tentara Jepang. Tetapi oleh karena dasar P.K.I. memang benci kepada ulama, karena dengan adanya ulama, maka komunisme, sukar dimasukkan ke dalam masyarakat Aceh, maka diambillah kesempatan pemberontakan itu, untuk memukul lawannya dengan tangan orang lain.

Penafsiran yang terakhir kita dengar, dan sampai sekarang masih ada juga, yaitu P.U.S.A. itu dibentuk untuk melawan Uleebalang. Penafsiran ini lebih berbahaya lagi, karena selain dari bersifat adu domba antara golongan-golongan dalam masyarakat Aceh sendiri, juga oleh karena pemu-

da-pemuda Aceh sekarang, lahir sesudah lahirnya P.U.S.A. Jadi mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lebih-lebih lagi karena dokumen-dokumen mengenai itu sudah tidak ada lagi, hilang waktu pemberontakan terjadi dan orang Aceh sendiripun pada umumnya kurang mementingkan masalah dokumen. Waktu mengerjakan sesuatu, lebih banyak memikirkan Lillahi Ta'ala, sehingga tidak merasa perlu menyimpan dokumen, malahan kadang-kadang tidak mencatatnya sama sekali. Baru kemudian waktu diperlukan, kalangkabut mencarinya, sehingga karena tidak ada dokumen sebagai pegangan, seringkali mengenai tanggal banyak salah menerangkannya apabila ditanya orang, meskipun ia sendiri mengalami peristiwa itu.

Memang benar, bahwa dalam perjalanan sejarah, hal-hal yang tidak dimaksudkan, kadang-kadang terjadi. Demikian pula dalam hal ini. Bukan tidak ada, oknum-oknum dari anggota-anggota P.U.S.A. karena sesuatu sebab yang datang kemudian, bentrok dengan sementara uleebalang. Tetapi ini jangan dialamatkan kepada P.U.S.A. apalagi menafsirkan bahwa P.U.S.A. memang dibentuk untuk itu.

Hal itu ditambah lagi oleh kenyataan bahwa P.U.S.A., didirikan di Peusangan itu, dengan restu Uleebalang Peusangan Teuku Haji Chik Muhammad Johan Alamsyah, selaku Zelfbestuurder dari Peusangan pada waktu itu. Juga Bendaharinya T.M. Amin, adalah golongan uleebalang, malahan sesudah Teungku M. Nur Ibrahimy diangkat menjadi Direktur *Normaal Islam Instituut* yang didirikan oleh P.U.S.A. di Bireuen, T.M. Amin diangkat menjadi Sekretaris Hoofdbestuur P.U.S.A. yang memegang peranan penting. Kedua hal inilah yang mencurigakan Uleebalang lain, sehingga timbulnya tuduhan bahwa PUSA. bertujuan untuk mengembalikan sultanat Aceh. Dengan demikian jelaslah bahwa orang menafsirkan tujuan P.U.S.A. itu menurut selera sendiri-sendiri, tidak menurut keadaan yang sebenarnya.

3. Gerakan Reformasi

Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, memang gerakan reformasi di Aceh adalah lebih kemudian. Hal ini disebabkan oleh kesibukan peperangan melawan Belanda puluhan tahun dan juga paling terkemudian usainya dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Sebenarnya reformasi ini sudah mulai jauh sebelum P.U.S.A. lahir, tetapi jalannya masih lamban, baru sesudah PUSA lahir, jalannya reformasi itu cepat sekali, jauh lebih cepat dari yang diduga orang, untuk adilnya, kita harus mulai mencatat reformasi itu sejak timbul idee perubahan cara mengajar pengetahuan agama dari cara duduk ber-halaqah di Bale menjadi secara duduk di bangku dan memakai papan tulis di Madrasah. Idee ini mula-mula timbul di Aceh Besar pada tahun 1915, dipelopori oleh Tuanku Rajakeumala dan Teungku Syekh Muhammad Saman Siron. Kemudian diikuti oleh Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie dan lain-lain.

Perubahan cara belajar ini adalah perubahan yang mudah sekali ditandai, karena memang mudah dilihat oleh siapapun. Kemudian disusul oleh perubahan yang merupakan tambahan pengetahuan umum di madrasah-madrasah yang didirikan itu. Perubahan ini tidak semudah perubahan cara belajar tadi, dapat diketahui orang. Ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena memang perubahan itu dilakukan secara berangsur-angsur, dan kedua karena diajarkan dalam bahasa Arab, sehingga orang mengira semua itu pelajaran agama.

Meskipun terhadap kedua perubahan itu terdapat juga reaksi, tetapi reaksinya tidak seberapa kalau dibandingkan dengan reaksi mengenai penyimpanan hukum dari mazhab Syafi'iy ke mazhab lainnya. Mengenai hal yang terakhir ini, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di Jawa, mendapat tantangan yang cukup berat pada saat-saat Muhammadiyah mu-

lai mengembangkan faham tidak terikat dengan mazhab Syafi'iy saja. Menurut pengamatan penulis, keras-tidaknya reaksi itu, seringkali ditentukan oleh sikap orang yang bersangkutan.

Sebagai contoh dapat kita sebutkan usaha orang-orang Muhammadiyah di Aceh dahulu sebelum zaman kemerdekaan, kurang sekali berhasil dalam membawa pembaharuan. Hal ini disebabkan oleh dua hal:

Pertama: karena Muhammadiyah di Aceh pada waktu itu, dipimpin bukan oleh orang yang mendapat predikat ulama, sehingga oleh karenanya, hukum-hukum yang difatwakan mereka yang bertentangan dengan hukum yang sudah biasa didengar dari mereka yang berpredikat ulama, sama sekali tidak berpengaruh.

Kedua : karena kebetulan orang-orang Muhammadiyah di Aceh pada waktu itu, sikapnya sangat keras, dan dengan mudah mau mencoba siapa saja yang tidak sefaham dengan mereka. Hal ini dapat saya bedakan dengan orang-orang Muhammadiyah di Yogyakarta sendiri, di tempat pusatnya Muhammadiyah. Selama 14 tahun saya, berada di Yogyakarta dan bergaul dengan orang-orang Muhammadiyah ternyata pada umumnya, meskipun sama-sama Muhammadiyah, tetapi ajaran/sikap terhadap orang yang tidak sefaham, jauh lebih lunak, baik dalam cara bergaul, maupun dalam memberi nilai terhadap faham yang berbeda. Oleh karena itulah maka P.U.S.A. di Aceh lebih berhasil dari Muhammadiyah dalam membawa faham baru. Mungkin PUSA yang lahir kemudian dari pada masuknya Muhammadiyah di Aceh, dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Muhammadiyah yang kurang sukses itu.

4. *Hal-hal yang Membantu Reformasi*

Secara garis besarnya, hal-hal yang membantu reformasi di Aceh, dapat kita bagi dua. Pertama, pengaruh dari luar,

dan kedua watak rakyat Aceh sendiri.

Mengenai pengaruh dari luar, dapat kita simpulkan dalam dua hal pula, yaitu:

- a. adanya pemuda-pemuda Aceh yang keluar daerah, baik untuk belajar, maupun karena lari dari tangkapan politik yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda seperti yang terjadi terhadap diri Teungku Syekh Abdul Hamid Samalanga.
- b. masuknya kitab-kitab faham baru, seperti karangan Syekh Muhammad Abduh, Maushthafa Galayiny dan lain-lain sebagainya.

Mengenai watak rakyat Aceh, dapat kita katakan, bahwa pada umumnya rakyat Aceh, lekas dapat menerima apa saja yang merupakan barang baru, dan segera pula membuang segala sesuatu yang dianggap sudah lama. Sikap ini tentu ada baik dan ada buruknya. Ditinjau dari segi kemajuan, sikap itu baik. Tetapi dilihat dari segi kebudayaan, itu kurang baik.

Untuk menguatkan keterangan ini, perlu kiranya dikemukakan beberapa bukti sebagai berikut:

1. Secara resmi, Belanda dapat memerintah Aceh selama 39 tahun sedang dalam keadaan aman hanya selama 15 tahun saja. Meskipun demikian, kebudayaan Aceh hampir memudar, sedang di Jawa, yang diperintah oleh Belanda selama 350 tahun, kebudayaannya boleh dikatakan masih utuh.
2. Menurut keterangan beberapa orang responden yang sudah tua, Mesjid Indrapuri (kabupaten Aceh Besar), didirikan di atas fondamen candi Hindu yang diruntuhkan setelah rakyat di sana memeluk agama Islam.
3. Di Banda Aceh ada sebuah perkuburan. Di sana banyak dikuburkan jenderal-jenderal Belanda yang tewas da-

lam perang Aceh. Di pintu gerbangnya ditulis nama-nama mereka dan di dalamnya dibuat patung-patung mereka, sebagai penghargaan atas kepahlawanan mereka. Sebenarnya, untuk Aceh itu merupakan fakta yang berbicara tentang kepahlawanan Aceh dalam perang melawan Belanda itu. Tetapi nyatanya, waktu kekuasaan Belanda tumbang, di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942, pagar perkuburan itu dirusak rakyat dan patung-patungnya dihancurkan. Untung jugalah pintu gerbangnya belum sempat dihancurkan.

4. Sebelum Belanda dapat menguasai Aceh, semua orang Aceh dapat membaca huruf Arab, meskipun tidak semuanya dapat menulis. Sesudah Belanda mengajarkan huruf latin, maka mulailah huruf Arab kurang mendapat perhatian. Lebih-lebih lagi pada zaman Jepang.
5. Sesudah madrasah-madrasah didirikan sejak tahun 1926, maka *Dayah* (pesantren), sedikit demi sedikit peminatnya mulai berkurang. Lebih-lebih sesudah masa kemerdekaan, sesudah hampir semua madrasah di Aceh dinegerikan pada tahun 1946 oleh pemerintah Daerah Aceh dan pada tahun 1952 oleh pemerintah pusat. (Yayasan Pembina Darussalam, 1969: 403 — 404).
6. Meskipun Aceh agak terisolir karena letaknya paling ujung sebelah Barat-Laut, namun pengaruh luar daerah, cepat sekali terlihat di sana.

PERANAN ULAMA PADA MASA JEPANG

1. *Menjelang Jepang Datang*

Di antara akibat perang Aceh melawan Belanda yang berlarut-larut sampai puluhan tahun ialah melanjutkan kebencian rakyat Aceh melihat serdadu Belanda, meskipun serdadu itu orang Indonesia sendiri yang diambil dari daerah lain di luar Aceh. Belanda tidak mau menerima orang Aceh menjadi serdadu, karena dikuatirkan akan berontak lagi. Sebaliknya, rakyat Aceh juga tidak mau menjadi serdadu Belanda, karena yang demikian dianggap menjadi budak musuh. Bukan hanya menjadi serdadu saja, bahkan menjadi pegawai pada kantor Belanda-pun dianggap tidak baik, meskipun tidak sejelek menjadi serdadu.

Akibat lain ialah bahwa waktu Jepang memaklumkan perang terhadap sekutu yang di-antara-nya termasuk Belanda, pada tanggal 8 Desember 1942, maka rakyat Aceh menyambut gembira, dengan harapan bahwa dengan demikian, Belanda akan enyah dari Indonesia. Oleh karena itu, waktu koloni kelima Jepang yang diberi nama *Fujiwara Kikan* datang di Aceh, disambut oleh para ulama yang tergabung dalam P.U.S.A. dengan cara yang sangat rahasia. Tetapi setelah rakyat mengetahuinya dan mengetahui pula bahwa para ulama sudah menyambut, maka rakyat-pun menyambutnya dengan sukaria dan memberi bantuan dimana perlu. Sebelum Jepang mendarat, leter "F" sebagai tanda anggota *Fujiwara Kikan*, sudah dibagi-bagikan kepada

rakyat, meskipun dalam jumlah terbatas. Oleh karena hal itu merupakan satu hal yang sangat berbahaya, maka sudah logislah kalau tidak berani diberitahukan kepada semua orang, meskipun orang itu termasuk kawan. Karena bukan saja dikuatirkan akan bocor karena pengkhianatan dan pemberitahuan kepada Pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga cukup berbahaya, apabila tanpa disadari dan tanpa bermaksud tidak baik, sambil bergurau, mengucapkan kata-kata yang menjadi bahan penyelidikan bagi alat pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itulah maka masalah Fujiwara Kikan ini, kecuali di Aceh Besar, tidak berani diberitahukan kepada para Uleebalang yang berkuasa pada waktu itu, meskipun Uleebalang itu baik serta dekat dengan rakyat dan ulama, di samping baik dan dekat dengan Belanda.

Itulah sebabnya maka Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap di Peusangan dan Haji Abubakar Ibrahim di Bireuen yang memelopori penerimaan Fujiwara Kikan di Aceh Utara, tidak berani memberitahukan hal itu kepada para Uleebalang di Aceh Utara, termasuk Teuku Haji Chik Muhammad Johan Alamsyah, pelindung P.U.S.A. sendiri.

Lain halnya di Aceh Besar. Teungku Abd. Wahab Keunaloe Seulimeum, Wakil Ketua II Hoofdbestuur (Pengurus Besar) PUSA, berita Fujiwara Kikan yang dibawa oleh bekas muridnya Sayid Abubakar, berani disampaikan kepada Teungku Panglima Polem M. Ali, Kepala Sagi XXII Mukim. Hal ini disebabkan karena Panglima Polem Muhammad Ali, tidak begitu rapat dengan Belanda. Tambahan pula bahwa pada kira-kira tahun 1930, sesudah berita sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 mengumandang di Aceh, Panglima Polem M. Ali, T. Nyak Arif dan beberapa orang lainnya, pernah bersumpah bahwa kalau ada kesempatan yang baik, mereka akan mengadakan pemberontakan. Demikian pula T. Nyak Arif. Meskipun memegang jabatan Kepala Sagi XXVI Mukim, tetapi ia kurang disukai oleh Be-

landa. Ini terbukti dengan kejadian sesudah ia diangkat menjadi anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat), tidak berapa lama ia diperhentikan, karena dalam pidato-pidatonya dalam *Volksraad*, sangat keras mengecam pemerintah Hindia Belanda. Lalu beliau digantikan dengan Tuanku Mahmud yang pembawaannya agak lemah sedikit.

Teuku Panglima Polem Muhammad Ali atau T.M.A. Panglima Polem menulis dalam *Memoir*-nya sebagai berikut:

Dalam bulan Pebruari 1942, keadaan di Indonesia makin genting, termasuk di Atjeh. Kami pada saat-saat ini bertambah sibuk mengatur segala sesuatu dengan pemimpin-pemimpin PUSA di Atjeh Besar (Tgk. Abdul Wahab). Satu-satunya daerah jang agak bebas mengatur itu adalah Atjeh Besar, karena kami panglima-panglima Sagi dan Uleebalang turut serta, sedang di daerah lain tidak leluasa diatur, karena tidak ada kerdjasama dengan Ulee-balang-uleebalang, karena ada persoalan tjuriga-mentjuri-gai.

Pada tanggal 24 Pebruari 1942, sekembali saja dari Kutaraja, di Seulimeum saja ditunggu oleh *Teuku Abdul wahab Keuloe*. Oleh *Teungku Abdul Wahab*, dipaparkan bahwa rakjat sudah siap menunggu komando momennja lewat tengah malam.

Saja minta dipersiapkan untuk menerima komando, setelah sembahjang Isja, saja dan *Tju Amat* (pegawai kantor pembantu Pos di Seulimeum), sesuai dengan rentjana, telah dapat mengambil suatu bungkusan berisi uang sebanyak F. 5.000,— (lima ribu Gulden). untuk biaya perjuangn, dari kantor pos Seulimeum, uang mana diserahkan kepada Tgk, Abdul Wahab.

Setelah itu dengan mobil saja BL. 22 dengan menggunakan djalan memutar ke Lamsie, Lamkabeue, Gla, terus ke Lamteuba untuk mengambil *Keutjhik Adjat* dan memberi instruksi kepada *Keutjhik Husin* untuk

mengurus rumah tangga saja. Waktu itu isteri saja dan anak saja T. Bachtiar (jang djuga lahir di sana) tinggal di Gla.

Dengan tidak singgah di Gla, kami pulang ke Seulimeum. Dengan begitu, kepada istri saja, tidak saja beritahukan apa-apa. Tiba kami di Seulimeum sudah lewat tengah malam, kami pergi ke Keunaloe. Di muka rumah sekolah agama disana, telah berkumpul beribu-ribu rakjat, pemuda-pemuda, pandu-pandu. Di antara jang masih saja ingat, T. Ubit dan Tgk. Jahja (tjamat Indrapuri sekarang).

Saja berpidato dengan singkat tetapi padat, memberi petundjuk, langkah jang harus diambil dan dalam langkah pertama menjerang tangsi militer di Seulimeum, dan rumah Controleur, karena ini dianggap sebagai lambang pemerintahan kolonial di Seulimeum.

Saja tegaskan pula, bahwa pemberontakan ini adalah pemberontakan (perang) mengusir Belanda (musuh). Ini peperangan sutji. Oleh sebab itu perlu didjaga norma-norma kesopanan menurut petunjuk agama, djangan melewati batas, djangan membunuh wanita, anak-anak dan orang tua. Lalu Tgk. Abdul Wahab memberi semangat *djihad*. (Panglima Polem, 1972: 3-4).

Selanjutnya Panglima Polem menjelaskan bahwa pada malam itu meletuslah pemberontakan melawan Belanda di Seulimeum. Controleur (Wedana) Seulimeum bernama Tegelman terbunuh pada malam itu. Besoknya tersiarlah berita bahwa Panglima Polem sudah berontak, maka berontaklah seluruh Sagi XXII Mukim, termasuk Padang Tidji, dan disusul oleh Sagi XXVI Mukim di bawah pimpinan Kepala Saginya T. Nyak Arif, dengan dibantu oleh para ulama, diantaranya termasuk Teungku Sulaiman Mahmud. Kemudian disusul oleh Uleebalang Lageuen (Tjalang), T. Sabi. Seluruh Uleebalang dan para ulama di Aceh Besar,

turut serta aktif memimpin sabotase yang membuat pemerintah Belanda di Aceh panik.

Teungku Syekh Ibrahim yang lebih terkenal dengan panggilan Ayahanda, bersama T. Main Uleebalang Montasiek, memimpin rakyat Montasiek dalam pemberontakan itu.

Menurut T.M.A. Panglima Polem, di Indrapuri, Uleebalang Empeara, pribadinya kurang bersemangat. Tetapi dengan dorongan ulama besar Teungku Haji Hasballah Indrapuri, disanapun hebat perjuangannya, melakukan serangan terhadap asrama Belanda, dekat jembatan Krueng Jreue. Van Sperling, kepala eksploitasi A.S.S. (Atjeh Staats Spoorwegen), terbunuh di jembatan Keumire, kena serangan Pang Rahman dalam perjalanan melarikan diri. Di kota Sigli, tempat kedudukan Hoofd Bestuur P.U.S.A. Asisten Residen-nya (Bupati), mati terbunuh dan mayatnya ditemukan di bawah jembatan kota Sigli.

Melihat keadaan demikian, Belanda dengan tentaranya, yang lengkap melarikan diri kearah timur menuju Takengon di Aceh Tengah. Melihat tentara Belanda lari, rakyat melapangkan jalan untuk menghindari korban yang tidak perlu. Karena tujuan mengusir Belanda sudah tercapai dengan jalan mereka lari. Tetapi oleh karena tentara Belanda itu lari sambil hendak meledakan jembatan Keumire, maka terpaksa rakyat bertindak menghalangi peledakan itu, sehingga jatuhlah tiga orang korban, yaitu: Hasan, Mae, dan Berahim. Tetapi jembatan selamat, tidak sempat lagi diledakan, karena dihalangi oleh rakyat yang diantaranya termasuk tiga orang yang korban itu. Dengan demikian, waktu Jepang memasuki Kutaraja (sekarang Banda Aceh) pada tanggal 12 Maret 1942, Aceh Besar, Pidie dan Aceh Utara sudah bersih dari Belanda dan tentaranya, bahkan kapal terbang sekutu dengan pilotnya bangsa Australia yang ditempatkan di lapangan terbang Lho' Nga, sudah lebih dahulu terbang lari entah kemana.

Sesudah beberapa hari Jepang menduduki Kutaraja, datanglah Kepala Fujiwara Kikan untuk Aceh, yaitu Tuan Matsu Buchi. Ia membentuk suatu komite untuk membentuk pemerintahan baru. Orang-orang yang aktif dalam gerakan "F" (Fujiwara Kikan), didudukan dalam pemerintahan. T. Nyak Arif diangkat menjadi Guntyo (wedana) Kutaraja, T.M.A. Panglima Polem diangkat menjadi Guntyo Seulimeum, Haji Abubakar Ibrahim Bireuen, diangkat menjadi Guntyo Bireuen, sedang Uleebalang-uleebalang lainnya diangkat menjadi Sontyo (Camat).

Tetapi setelah datang Tuan S. Iino, selaku Tyokan Atjeh Syu (Gubernur Daerah Atjeh), maka diadakannya perubahan besar-besaran. T. Nyak Arif diangkat menjadi penasehat Tyokan dan sebagai gantinya untuk Guntyo Kutaraja, diangkat T. Hasan Dick, tadinya Sontyo Teupin Raya, Pidie. T.M.A. Panglima Polem diangkat menjadi Kosei Kyokutyo (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat). (Panglima Polem, 1972: 4-8).

2. *Sesudah Jepang Berkuasa*

Kalau pada masa Belanda rakyat Aceh enggan menjadi pegawai Belanda dan menolak menjadi serdadu Belanda, maka pada zaman Jepang, hal ini berubah. Orang sudah suka menjadi pegawai pemerintah Jepang dan sudah banyak yang mau menjadi tentara, terutama yang bernama Gyu Gun, yang kira-kira sama dengan PETA, di Jawa. Hal ini juga disebabkan oleh pengaruh ulama. Para ulama tidak hanya menganjurkan anak orang lain untuk masuk *Gyu Gun*, tetapi ada juga yang anaknya sendiri disuruh memasukinya, atau saudara dekatnya. Oleh karenanya pemuda-pemuda dari kalangan rakyat biasa, berbondong-bondong mendaftarkan diri. Sebagai contoh kita kemukakan: Teungku Haji Di Garut (Pidie), memasukkan anaknya lulusan Normal Islam Instituut P.U.S.A. menjadi Gyu Gun, Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap, memasukan famili dekat-

nya menjadi Polisi Tokubetsu, Husin Yusuf, sekretaris Majelis Wakil Pengurus Besar Pemuda P.U.S.A. untuk Aceh Utara, disuruh masuk Gyu Gun, demikian pula guru Vorvolgsschool Matanggalumpang Dua, Syammaun Gaharu, Sayid Ali, Sayid Usman, T. Manyak, F. Hamzah dan masih banyak lagi. Mereka ini sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, memegang peranan penting dalam pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia di Aceh. Ada yang menjadi Panglima Divisi, Nomandan Resimen, Komandan Batalyon dan sebagainya.

Walaupun demikian, tidak berarti para ulama menutup mata terhadap kekejaman tentara Jepang, terutama pada masa menjelang mereka akan kalah perang. Mula-mula diusahakan menghilangkannya dengan jalan pembicaraan dan perundingan dengan orang-orang Jepang yang bertanggung jawab, baik secara lisan, maupun dengan tulisan. Tetapi karena ternyata tidak banyak membawa hasil, maka terjadilah dua kali pemberontakan terhadap Jepang di Aceh Utara. Pertama pada permulaan tahun 1944 di Bayu, di bawah pimpinan seorang ulama pemimpin dayah (pesantren), yaitu Teungku Abd. Djalil. Beliau bersama muridnya yang berjumlah kira-kira 200 orang, dapat menghabiskan satu kompi tentara Jepang, kecuali beberapa orang yang dapat melarikan diri dan melapor kepada induk pasukannya di Lho' Seumawe. Kejadian itu sudah tentu menimbulkan kemarahan yang amat sangat dari pihak Jepang. Maka dikirimkanlah tentara yang lebih banyak dengan persenjataan yang lebih lengkap, termasuk senjata berat. Tentara bantuan inilah yang menghabiskan tidak hanya nyawa Teungku bersama para muridnya, tetapi juga mesjid dan dayahnya dibakar habis. Nama beliau sekarang sudah diabadikan menjadi nama sebuah jalan dalam kota Banda Aceh, yaitu yang dahulu bernama jalan Air Wangi, sekarang bernama jalan Teungku Abd. Djalil.

Pemberontakan kedua terjadi di Pandrah, kecamatan

Jeunieb. Pemberontakan ini juga terjadi sesudah adanya fatwa seorang ulama yang bernama juga Teungku Abd. Djalil. (di Aceh banyak sekali nama yang sama). Duduk peristiwanya demikian:

Keutjihik Djohan, kepala kampung Gampong Lheue, bersama-sama anak buahnya sudah berkali-kali mendapat giliran kerja paksa. Pada suatu kali, rakyat kampungnya banyak yang belum hadir. Maka Jepang memanggil Keutjihik Djohan. Mula-mula dimarahi kemudian ia dipukul di hadapan orang banyak. Mau membalas, ia tidak berani. Tetapi ia sangat malu. Belum pernah ia merasa malu seperti itu. Kejadian semacam itu sebenarnya sudah seringkali terjadi terhadap orang lain, baik karena dianggap bersalah sendiri, maupun karena yang bersalah adalah anak buahnya yang berada di bawah pengawasannya. Kejadian itu tidak dapat hapus dari ingatan Keutjihik Djohan. Oleh karena itu ia sudah bertekad akan membalasnya, meskipun ia sudah yakin bahwa pembalasan itu akan membawa kematiannya. Kemudian timbul pertanyaan dalam hatinya: Bagaimana hukum kematiannya yang semacam itu? Apakah dapat termasuk dalam golongan mati syahid, atau hanya mati konyol saja? Hal ini tentu tidak dapat dijawabnya sendiri, karena menyangkut bidang agama, sedang ia bukan ulama. Oleh karena itu ia memerlukan penjelasan dari seorang ulama. Di kampungnya ada seorang ulama bernama Teungku Abd. Djalil. Tetapi ia tidak mempunyai dayah seperti Teungku Abd. Djalil Bayu yang sudah syahid itu.

Teungku Abd. Djalil memberi jawaban bahwa mati melawan kafir Jepang yang zhalim dan kejam itu adalah mati syahid. Jawaban Teungku inilah yang menyebabkan berkobarnya semangat Keutjihik Djohan untuk melaksanakan tekadnya. Tetapi oleh karena yang mengalami hal semacam itu bukan hanya dia saja, maka ia berusaha untuk menarik orang lain lagi untuk bersama-sama melaksanakan hal itu. Rupanya kejengkelan semacam itu sudah bersemi

dalam lubuk hati semua penduduk di Pandrah. Untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, Keutjhik Djohan menganggap perlu adanya persiapan sekedarnya. Diantaranya perlu ada latihan bagaimana cara menyerang, cara mempertahankan diri dan sebagainya.

Kebetulan, di dekat bukit kampung itu, ada seorang peladang bernama Muhammad Daud. Ia berasal dari Peudada. Waktu orang-orang banyak masuk Gyu Gun, iapun memasukinya. Kemudian ia tidak tahan menerima pukulan yang sering dialaminya. Maka ia lari dari asrama Gyu Gun. Tetapi ia tidak berani pulang ke kampungnya di Peudada, karena dikuatirkan akan ditangkap. Oleh karena itu ia memilih tempat tinggal di bukit dekat kampung Lheue, Pandrah, sambil berladang sebagai pencahariannya. Keutjhik Djohan mengajak ex Gyu Gun itu untuk melatih Keutjhik Djohan dan pengikut-pengikutnya yang sudah mendaftarkan diri sebanyak 80 orang termasuk Tgk. Abd. Djalil yang memberi fatwa tadi. Jadi beliau tidak hanya memberi fatwa saja, tetapi ingin pula melaksanakan fatwa itu. Untuk menambah semangat, tiap malam di Meunasah kampung itu, dibacakan *Hikayat Prang Sabi*.

Demikianlah sesudah berjalan empat bulan lamanya latihan-latihan yang diberikan oleh bekas Gyu Gun Muhammad Daud dan pengemblengan semangat, maka pada hari Rabu malam Kamis tanggal 2 Mei 1945, mereka menyerang asrama tentara Jepang di Pandrah. Pada malam itu dua orang tentara Jepang mati dan dari pihak penyerang tidak mengalami kerugian yang berarti, karena sesudah terbunuh dua orang tentara Jepang itu, mereka segera menghilang dalam gelap untuk menyelamatkan diri.

Kejadian itu segera disampaikan ke Bireuen. Besoknya datanglah bantuan dari Bireuen sebanyak satu kompi tentara Jepang dan satu kompi Gyu Gun. Mereka bersama-sama dengan tentara Jepang dari asrama Pandrah, segera menuju ke kampung Lheue, sedang para pemberontak su-

dah sembunyi di gunung-gunung dekatnya. Semua penduduk disekitar tempat itu, ketika ditanya di-manakah orang-orang itu bersembunyi, semua menjawab tidak tahu. Oleh karena itu banyak diantara mereka yang ditangkap. Akhirnya menjelang waktu zhuhur hari Kamis tanggal 3 Mei itu, dikirimlah satu team Penyelidik yang terdiri dari orang-orang Aceh sendiri, yaitu Teungku Yakob (Guntyo Bi-reuen), Husin Yusuf dari Gyu Gun, T.H. Zainul Abidin dan Teungku H. Syekh Abdul Hamid, dengan maksud supaya mereka menyerah dan persoalan itu, katanya, diselesaikan dengan cara damai. Menjelang Ashar, mereka menampakkan diri dengan memakai seragam hitam dan ikat kepala putih. Tetapi mereka tidak mau mendekati team tadi. Dari jauh di atas gunung berteriak kepada team yang berada di kaki gunung, antara lain berbunyi:

1. Kami tidak tahan menderita akibat kekejaman tentara Jepang.
2. Tentara Jepang memperkosa hak-hak agama Islam, dan kami orang-orang sukarelawan, tidak dibenarkan melakukan ibadat sembahyang.
3. Jepang melalui B.D.K. (semacam B.U.U.D. sekarang) merampas padi-padi rakyat, sedang rakyat tidak dapat makan apa-apa. Orang-orang B.D.K. tidak pernah memberikan apa-apa kepada rakyat, hanya untuk mereka sendiri semua, yang lebih, dijual menurut suka hatinya.
4. Semua orang yang dinamakan sukarelawan dan dipekerjakan dilapangan terbang Tambue dan tempat-tempat pertahanan Jepang lainnya, semuanya didera dan dianiaya secara sangat kejam.
5. Ketahuilah bahwa tentara sekutu akan segera mendarat di Aceh dan tentara Jepang akan ditangkap semua.

Kemudian mereka menghilang. Team penyelidik pulang ke kampung Lheue dan melapor kepada tentara Jepang. Tentara Jepang dan Gyu Gun bermalam di bawah Meunasah dan di bawah sebuah rumah penduduk.

Besok paginya, hari Jum'at tanggal 4 Mei 1945, sesudah shalat subuh pagi itu, para pemberontak turun dari gunung untuk menyerang Jepang di pagi hari, selagi tentara Jepang dan Gyu Gun/Tokubetu-Kei-satu Tai (Polisi Istimewa) semacam Brimob sekarang), asyik membersihkan senjata mereka masing-masing. Serbuan ini mengakibatkan 104 orang Jepang terbunuh dan seorang bangsa Indonesia, yaitu Guntyo T. Yakub. Di pihak pemberontak syahid 44 orang yaitu:

1. Keutjhik Djohan.
2. Keutjhik Oesman (ayah Keutjhik Djohan).
3. Tgk. Ibrahim Peudada.
4. Tgk. M. Akob Pang.
5. Tgk. Nyak Isa.
6. Tgk. Abd. Djalil.
7. Tgk. Imum Amin.
8. Tgk. Nyak Abu M. Amin.
9. Tgk. Mat Su'ud.
10. Sabon bin Ali.
11. Sulaiman bin Ali
12. Ibrahim bin Jusuf.
13. Tgk. Jusuf.
14. Amat Blang Djrok.
15. Mahmoe Iboh.
16. Oesman M. Ali.
17. Dalil bin Usman.
18. Saleh Imum Tulot.
19. Ibrahim Husin.
20. Zulkifli.
21. Apa Mat Usuh.
22. Abdullah Bengga.

23. Mahmud Beungga.
24. Tgk. Kasem Abdullah.
25. Ismail Peutua Amat.
26. M. Gam Meunasah Keutapang.
27. Ahmad Misa.
28. Oemar Adam.
29. A. Rahman Adam.
30. Abdullah Gampong Blang.
31. Ahmad Gampong Blang.
32. Ismail Arifin.
33. M. Adam.
34. Hasan Banta.
35. Hasan Meunasah Dayah.
36. Berahim Mat Ali.
37. M. Saleh Rahman.
38. Muhammad Amin.
39. Guru Reubi.
40. Beurahim Meulaboh.
41. Tgk. Ramli Ndjong.
42. Tgk. Meulabah.
43. Aminah binti Prang (hamil).
44. Anak yang dikandung Aminah (dalam hamil tua).

PERANAN ULAMA PADA MASA REVOLUSI

1. *Menyambut Proklamasi dan Menumpas Penghalangnya*

Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lambat sampai ke Aceh. Malahan berita menyerah kalahnya Jepang, baru pada tanggal 24 Agustus resmi diketahui rakyat, karena baru pada tanggal itulah Atjeh Syu Tyokan (Gubernur Aceh) mengumpulkan seluruh pegawai di halaman tempat kediamannya (Pendopo Gubernuran sekarang) dan memberi-tahukan bahwa berhubungan dengan jatuhnya boom atoom di Hiroshima, maka Tenno Heika, (Raja Jepang), karena sayangnya kepada rakyat, sudah berdamai dengan Sekutu. Dua hari sesudahnya sebuah kapal perang/terbang Sekutu melayang-layang di atas kota Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan terbang rendah sambil menjatuhkan surat selebaran. Semua orang rebutan untuk mendapatkan surat selebaran itu, didorong oleh ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ternyata surat selebaran itu berjudul: "Kepada Penduduk Indonesia". Isinya: "Perang telah selesai. Jepang sudah mengaku tunduk tidak dengan perjanjian". Pada penutupnya tertulis: "Hiduplah Seri Ratu!!, Hiduplah Indonesia!!".

Yang dimaksud dengan Seri Ratu, tidak lain dari Raja Belanda. Sejak saat itu, umum berpendapat bahwa yang akan datang atas nama sekutu adalah Belanda tidak Cina, seperti yang tersiar berita sebelumnya.

Dengan demikian, orang-orang perjuangan yang terang-terangan melawan Belanda waktu Jepang akan datang pada tahun 1942 merasa gelisah. Terutama mereka yang langsung tersangkut dengan pembunuhan Asisten Residen di Sigli, Controleur di Seulimeum dan kepala eksploitasi A.S.S. (Atjeh Staats Spoorwegen) di Banda Aceh. Sebaliknya adalah logis, bahwa orang-orang yang merasa rugi dengan kedatangan Jepang tiga setengah tahun yang lalu, kini sangat merasa gembira dan mengadakan persiapan-persiapan seperlunya untuk menyambut kedatangan Belanda kembali. (Ismuha, 1971: 6-7).

Mengenai hal ini, T.M.A. Panglima Polem menulis dalam Memoirnya sebagai berikut:

Pada tanggal 23 Agustus 1945, kami dipanggil Tyokan diantaranya saja, T. Njak Arif, Tgk. Moh. Daud Beureu-eh & yang lain-lain. Tyokan menerangkan bahwa Djepang sudah berdamai dengan Sekutu, lantaran didjatuhkan boom atoom. Achirnja kami mengetahui mereka sudah menjerah kalah. Setelah tersebar luas tentang kekalahan Djepang, maka keadaan mendjadi panas dingin. Kalau selama ini kami sudah panik, maka sekarang lebih panik lagi, terutama oknum-oknum yang sudah turut memberontak melawan Belanda, apalagi pemimpin-pemimpinnya, diantaranya saja dan T. Njak Arif. Betapa tidak djika kami hendak gerilja, maka kami tidak mempunyai sendjata lagi. Disamping itu *ada pula jang mendjadi senang mengharap kembali induk semangnja*. (Panglima Polem, 1972: 9).

Untunglah, suasana yang demikian tidak berjalan lama, hanya beberapa hari saja. Karena seorang pegawai bangsa Indonesia yang dipekerjakan pada kantor berita Jepang, *Domei*, bernama Gazali Yunus telah menangkap berita proklamasi. Mula-mula disampaikannya kepada Haji Ja-

min, pegawai kantor pos yang tertua, kemudian disampaikan juga kepada A. Hasmy, pemimpin redaksi surat kabar *Atjeh Sinbun*, sedang surat kabar pada waktu itu sudah tidak diperbolehkan terbit, tanpa diberitahukan alasannya. Haji Jamin menyampaikan berita itu kepada T. Nyak Arif.

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, disambut dengan penuh perasaan kegembiraan oleh seluruh rakyat Aceh, merupakan sitawar sidingin terhadap situasi yang sedang panik sesudah dijatuhkan surat selebaran yang berbunyi: "Hidup Seri Ratu!!"

Melihat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak disenangi oleh fihak Belanda, malahan mereka terang-terangan merongrongnya dengan kekuatan senjata, maka pada tanggal 15 Oktober 1945, ulama Aceh mengadakan rapat yang menghasilkan keluarnya *Makloemat Bersama* yang isi intinya menyatakan bahwa perjuangan melawan penjajah Belanda yang ingin kembali untuk menjajah Indonesia lagi, adalah *Perang Sabil* dan orang yang tewas dalam perang itu adalah mati syahid.

Lengkapnnya maklumat tersebut berbunyi sebagai berikut:

Perang Doenia kedoea jang mendahsjat telah tamat. Dan Indonesia tanah toempah darah kita telah dimakloemkan kemerdekaannja kepada seloeroeh doenia serta telah berdiri Repoebluk Indonesia di bawah pimpinan dari Padoeka Jang Moelia Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Belanda adalah satoe keradjaan jang kechil dan miskin, satoe negeri jang kechil, lebih kechil dari daerah Atjeh dan telah hanchoe leboer. Bangsa dari negeri yang seperti ini kini bertindak melakoekan kechianatannja terhadap tanah air kita Indonesia yang soedah merdeka itoe oentoek didjadjahnja kembali.

Kalaoe maksoed jang djahanam itoe berhasil, maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakyat,

merampas semoea harta benda negara dan harta rakyat dan segala kekajaan jang telah kita koempoelkan selama ini akan moesnah sama sekali. Mereka akan memperboedak rakjat Indonesia menjadi hamba sahjanja kembali dan mendjalankan *oesaha oentoek menghapus Agama Islam kita jang sutji*, serta menindas dan menghambat kemoeliaan dan kemakmoeran bangsa Indonesia.

Di Djawa bangsa Belanda serta kaki tangannja telah melakoekan keganasannja terhadap kemerdekaan Repeoblik Indonesia, hingga terjadi pertempoeran di beberapa tempat yang achirnya kemenangan di pihak kita. Sesoenggoehpoen begitoe mereka beloem djoega insaf.

Segenap lapisan rakyat jang telah bersatoe padoe, dengan patoeh berdiri di belakang kedoea pemimpin besar Soekarno—Hatta dan sedang menoenggoe perintah dan kewajiban jang akan didjalankan.

Menoeroet kejakinan kami adalah perdjoeangan seperti ini, perdjoeangan soetji jang diseboet Perang Sabil. Maka pertjajalah wahai bangsakoe, bahwa perdjoeangan ini adalah, sebagai samboengan perdjoeangan dahoeloe di Atjeh jang dipimpin oleh almarhoem *Teungkoe Tjhik Di Tiro* dan pahlawan-pahlawan kebangsaan jang lain. Dari sebab itoe, bangoenlah wahai bangsakoe sekalian, bersatoe padoe menjoesoen bahoe mengangkat langkah madjoe ke moeka, oentoek mengikoet djedjak perdjoeangan nenek-nenek kita dahoeloe. Toendoeklah dengan patoeh akan segala perintah-perintah pemimpin kita, oentoek keselamatan Tanah Air, Agama dan Bangsa.

Koetaradja, 15 Oktoeber 1945.

Atas nama Oelama Seloeroeh Atjeh,

ttd. Tgk. H. Hasan Kroeengkale.
ttd. Tgk. M. Daoed Beureu-eh.
ttd. Tgk. M. Dja'far Sidik Lamdjabat.
ttd. Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapoeri.
(Raliby, 1953: 57-58).

Maklumat bersama ini sangat penting bagi rakyat Aceh. Karena mereka tidak mau kalau hanya mati konyol. Mereka rela mati, kalau mati itu adalah mati syahid. Mati syahid hanya ada dalam perang sabil, seperti yang telah dijalankan oleh Teungku Chik Di Tiro. Orang yang dapat menetapkan mati syahid atau bukan, hanyalah para ulama.

2. *Membentuk Lasykar Mujahidin*

Melihat gentingnya suasana tanah air, lebih-lebih sesudah mendengar berita hebatnya pertempuran pada tanggal 10 Nopember 1945 di Surabaya, maka para ulama Aceh berpendapat bahwa Maklumat Bersama tanggal 15 Oktober saja belum cukup untuk menghadapi kegentingan negara pada waktu itu. Tetapi perlu mengambil langkah lebih jauh dan harus langsung terjun kedalam kancah perjuangan fisik. Oleh karena itu, sebagai kelanjutan Maklumat Bersama 15 Oktober itu, maka pada tanggal 17 Nopember 1945, bertempat di ruang belakang Mesjid Raya Baitur Rahman Kutaraja (sekarang Banda Aceh), dibentuklah Lasykar Mujahidin Pusat di bawah pimpinan salah seorang penandatangan Maklumat Bersama tanggal 15 Oktober 1945, yaitu Teungku Muhammad Daud Beureu-eh. Kemudian segera disusun pembentukan cabang-cabangnya ditiap Luhak (Kabupaten), di wilayah (Kewedanaan) dan di Kenegerian (Kecamatan). Kemudian Lasykar Mujahidin ini dinamakan Divisi Teungku Chik Di Tiro dan yang di Aceh Timur dinamakan Divisi Teungku Chik Paya Bakong. Divisi Teungku Chik Di Tiro di bawah pimpinan Teungku M. Daud Beureu-eh dan Cet Mat Rahmany, sedang Divisi Teungku Chik

Paya Bakong di bawah pimpinan Teungku Amir Husin Al Mujahid dan Ajd. Munsyi. (Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda, 1972: 1-8).

Sesudah agresi Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947, Pemerintah Republik Indonesia yang mengetahui betapa peranan dan pengaruh ulama di Aceh, telah mengangkat Teungku M. Daud Bereu-eh dari Lasykar Divisi Teungku Chik Di Tiro, menjadi *Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo.*, dengan pangkatnya, jenderal mayoor Tituler. Itu berdasarkan keputusan Wakil Presiden tanggal 26 Agustus 1947 No. 4/WKP/SUM/47. Kemudian diangkat pula pembantu-pembantu Gubernur Militer, selain dari tokoh-tokoh tentara, para cendekiawan, juga para ulama, yaitu H. Abd. Halim Hasan, dengan pangkat Letnan Kolonel Tituler, Teungku Abd. Wahab Keunaloe Seulimeum dengan pangkat Letnan Kolonel Tituler, A. Hasmy dengan pangkat Mayoor Tituler dan Sayid Abu Bakar dengan pangkat Mayoor Tituler.

Sebelum pengangkatan ini, dalam bulan Agustus juga, sesudah seluruh kota Medan jatuh ke tangan Belanda, ada sebuah radiogram dari Panglima Sumatra Mayoor Jendral Suharyo Haryawardoyo yang ditujukan kepada pemimpin-pemimpin rakyat Aceh. Radiogram itu berbunyi:

Pemimpin-pemimpin rakyat atjeh
pengembalian kota medan terletak di tangan
saudara-saudara segenap penduduk atjeh ttk
djangan sangsi ttk
alirkan terus kekuatan atjeh ke medan dan
djangan berhenti sebelum medan djatuh ttk hbs

panglima sumatera
(Dua Windu Kodam I/Iskandar
Muda 1972: 124 - 125).

Oleh karena itu dibentuk *Resimen Istimewa Medan Area* (RIMA) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hasballah Haji, putera Teungku Di Garut, yang sesudah lulus Perguruan Normal Islam PUSA pada tahun 1943, masuk Gyu Gun pada zaman Jepang. Resimen ini terdiri dari tiga batalyon T.R.I., dibantu oleh pasukan lasykar, rakyat divisi Teungku Chik Di Tiro, divisi Teungku Chik Paya Bakong, divisi rencong dan divisi Hizbullah.

Di samping itu, di Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie dan Aceh Besar, para ulama yang tidak turut langsung ke Medan area, aktif mengumpulkan bahan makanan untuk supply mereka yang bertempur di Medan Area. Bahan makanan yang perlu dikirimkan, selain dari beras ialah daging. Untuk itu banyak orang menyumbang sapi dan kerbau menurut kemampuannya. T.M.A. Panglima Polem yang kaya dengan kerbau, dua kali mengirimkannya. Kali pertama berjumlah 24 ekor dan kali kedua sebanyak 48 ekor. (Panglima Polem, 1972: 35). Untuk kebulatan tenaga dan kesatuan komando, maka pada tanggal 3 Juni 1947, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, yang maksud intinya, melebur Tentara Republik Indonesia (T.R.I.) dan segenap anggota lasykar yang bersenjata, menjadi *Tentara Nasional Indonesia* (T.N.I.). (Koesnodiprodjo, Cet. I, hal. 329 — 330).

Tetapi Penetapan Presiden itu tidak dapat dijalankan dengan segera. Bukan saja oleh karena pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi Belanda pertama, tetapi juga oleh karena hal itu, sangat sulit. Ibarat orang hendak menangkap sejumlah harimau yang bebas di rimba raya untuk dimasukkan ke dalam sebuah kerangkeng. Meskipun demikian dan meskipun Aceh adalah daerah yang paling jauh letaknya dari pemerintah pusat, tetapi berkat pengaruh ulama Teungku M. Daud Beureu-eh yang sesudah terjadi agresi Belanda pertama, telah diangkat menjadi Gubernur Militer

Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Aceh dapat mendahului daerah-daerah lain untuk merealisasikan Penetapan Presiden yang sangat penting tetapi gawat pelaksanaannya. Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, sudah berhasil menangani masalah itu dalam waktu enam bulan saja, sambil menangani pula serangan Belanda dan mengatur penyerangan untuk merebut kembali kota Medan. Penetapan Presiden itu sudah keluar sebelum beliau diangkat menjadi Gubernur Militer. Tiga bulan sesudah pengangkatannya, pada bulan Desember 1947 mulai digarapnya masalah yang pelik itu. Pada tanggal 13 Juni 1948, ia sudah mengeluarkan keputusan No. GM-59/5/Pers tentang pembentukan Divisi X TNI Komandemen Sumatera yang terdiri dari lima unsur, yaitu:

Divisi X T.R.I.

Divisi X Teungku Chik Di Tiro,

Divisi Teungku Chik Paya Bakong,

Divisi Rencong dan

Divisi Hizbullah.

Hasil ini adalah hasil perundingan antara kelima unsur, yaitu unsur T.N.I. dan empat unsur Lasykar Rakyat. Hasil penggodogan itu merupakan transfusi darah yang harmonis, tidak ada ekses-ekses yang merugikan sesudah itu, sebagai yang kadang-kadang terjadi di tempat-tempat lain. Ini menunjukkan bahwa penggarapnya mempunyai wibawa yang cukup dan kepandaian yang memadai.

Dengan aksi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda dapat menduduki ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta dan dapat menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan beberapa orang menteri lainnya.

Rupanya penyerbuan Belanda kali ini serentak untuk seluruh Indonesia, sehingga Mr. Syafruddin Prawiranegara

yang pada waktu itu berada di Bukittinggi, terpaksa mengungsi kekomplek perkebunan teh di Malaban, kabupaten 50 Kota.

Sesudah aksi Belanda kedua ini, satu-satunya daerah yang belum dapat dikuasai Belanda ialah Daerah Aceh. Sedang sebahagian besar daerah-daerah yang sudah dikuasainya, telah dijadikan negara-negara boneka, seperti *Negara Indonesia Timur*, *Negara Sumatera Timur*, *Negara Sumatera Selatan*, *Negara Pasundan*, *Negara Madura* dan entah apa lagi. Negara-negara boneka itu dimaksudkan sebagai persiapan untuk membentuk Negara Federal.

Situasi Indonesia yang menurut istilah Bung Karno tinggal sebesar payung lagi, yaitu daerah Aceh yang dinamakan daerah modal, menimbulkan inspirasi baru Belanda. Belanda ingin membujuk Aceh dengan menawarkan Negara Aceh yang berdiri sendiri dan kemudian akan menjadi Negara Bagian dari Negara Federal yang akan dibentuk. Belanda memperhitungkan bahwa karena Aceh dahulu pernah merupakan Negara yang berdaulat sendiri, tentu akan mau memilih Negara Bagian dari pada hanya merupakan suatu daerah yang berstatus residensi saja.

Siasat itu tidak dilaksanakan sendiri, karena kuatir akan gagal. Tetapi dilaksanakan dengan perantara orang Indonesia sendiri yang sudah lebih dahulu mau membentuk negara bahagian yang dimaksud. Orang itu ialah Dr. Tk. Mansur, Wali Negara Sumatera Timur. Dr. Mansur-lah yang bertindak mengundang 13 suku bangsa yang berada di Sumatera, untuk mengadakan suatu muktamar Sumatera yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 28 Maret 1949.

Suku-suku bangsa yang diundang ialah: Aceh, Tapanuli, Nias, Minangkabau, Bengkulu, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Indragiri, Jambi dan Riau.

Undangan untuk Aceh ditujukan kepada Gubernur Militer Tgk. M. Daud Beureu-eh. Surat undangan itu berbunyi sebagai berikut:

Kehadapan
Padoeka Jang Moelia Goeboernoer
Militer Atjeh
di
Koetaradja.

Perkembangan perdjalananan politik di Indonesia menoenjoekkan makin djelas, bahwa adalah berfaedah dan baik bagi soekoe-soekoe bangsa Soematera oentoek menjapai kerdja sama jang lebih erat dan rapat dan lebih baik, jaitoe soeatoe kerdja sama jang akan dapat terkoordinir boekan sadja dalam lapangan politik dan ekonomi, tetapi djoega dengan beberapa banyak tjara yang lain.

Itoelah sebabnya maka saja merasa boleh memoelai menggerakkan oentoek mengoendang wakil-wakil segala daerah Soematera boeat toeroet serta dalam soeatoe Moektamar Soematra jang akan dilangsoengkan di Medan pada tanggal 28 Maret ini.

Toedjoean Conferentie ini jang $\pm$ 5 hari lamanja, mengadakan perhoeboengan jang pertama di antara daerah-daerah dan soekoe-soekoe bangsa Soematera jang berbagai-bagai itoe, dan saja menjatakan penghargaan saja, mogamoga perhoeboengan jang pertama ini, ber-angsoer-angsoer menjadi pertalian jang ber-tambah-tambah eratnja oentoek kebahagiaan bangsa Soematera dan bangsa Indonesia seloeroehnya.

Negara Soematera Timoer akan merasa sebagai soeatoe kehormatan oentoek menerima peroetoesan Toeang sebagai tamoe selama moektamar itoe.

Jang dioendang ialah: Atjeh, Tapanoeli, Nias, Minangkabaoe, Bengkalis, Bangka, Belitoeng, Soematera Selatan, Lampoeng, Bengkoeloe, Indragiri, Djambi, Riaoe.

Terlepas dari segala perbedaan faham politik, saja menjatkan penghargaan saja, soepaja Atjeh Djoega akan menjoe-roeh soeatoe peroetoesan mewakilinja pada Moektamar pertama dari soekoe-soekoe Soematera ini.

Pembesar-pembesar di Sabang telah diperintahkan oentoek menjamboet peroetoesan Toean dan mengawani-nja ke Medan dengan kapal terbang Wali Negara Soematera Timoer Dr. T. Mansoer.

(Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda, 1972: 153—154).

Demikian bunyi surat undangan. Dari bunyi surat undangan ini dapat kita lihat maksud Belanda untuk mengoyak-ngoyak Indonesia menurut pulau-pulau besar, kemudian kepada suku-suku yang ada di pulau itu. Tetapi ternyata perkiraan Belanda itu meleset. Undangan itu ditolak mentah-mentah oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo Teungku M. Daud Beureu-eh. Cara menolaknya bukan dengan membalas surat undangan itu, melainkan dengan surat selebaran yang dimuat dalam surat kabar *Semangat Merdeka* tanggal 23 Maret 1949 dan disiarkan oleh R.R.I. setempat.-

Surat selebaran itu berbunyi sebagai berikut:

Perasaan ke-daerah-an di Atjeh tidak ada. Sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk satu Atjeh Raja dan lain-2, karena kita di sini adalah bersemangat Republikain. Sebab itu juga undangan dari Wali Negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada sadja, dari karena itulah tidak kita balas.

Di Atjeh tidak ada terdapat salah faham sebagaimana diterangkan oleh Belanda itu, bahkan kita mengerti betul

apa yang dimaksud oleh Belanda itu dengan Mukhtar Sumatera-nja. Maksud Belanda ialah hendak mendiktekan kepada Dr. Mansur supaya menjalankan politik devide et imperanja lagi. Sebab itu kita menolak adanya Mukhtar Sumatera tersebut dan kita sendiri telah sedia menanti segala kemungkinan yang bakal timbul dari sikap penolakan kita itu. Kita yakin, bahwa mereka yang telah menerima baik undangan Dr. Mansur tersebut, bukanlah orang Republik, tetapi adalah kaki tangan dan budak kolonialisme Belanda yang selama ini sudah diberi makan roti.

Ketiadaan rakjat Atjeh terhadap pemerintah R.I. di Jogjakarta, bukan dibuat-buat serta bukan diada-adakan, tetapi kesetiaan yang tulus dan ichlas yang keluar dari lubuk hati nurani dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti.

Rakjat Atjeh tahu pasti bahwa kemerdekaan setjara terpisah-pisah daerah-per-daerah, negara-per-negara, tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi.

(Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda, 1972: 154).

Demikianlah sikap Gubernur Militer Teungku M. Daud Beureu-eh. Kita tidak tahu bagaimana jadinya, andaikata beliau menerima undangan Dr. Mansur itu.

3. *Mengusahakan Adanya Kantor Urusan Agama.*

Di samping kemelaratan-kemelaratan yang ditimbulkan oleh Jepang, ada juga manfaatnya. Di antaranya ialah bangsa Indonesia sudah terlatih memanggul senjata, sehingga sangat berguna dalam perjuangan fisik melawan tentara Belanda dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Selain dari itu, ulama Aceh yang tergabung dalam P.U.S.A. telah berhasil memperjuangkan adanya kantor urusan agama di Aceh, dengan keluarnya Atjeh Syu Rei No. 12 Syowa 19 Ni—Gatu 15 Niti (15 Pebruari 1944) tentang susunan

Syukyo Hoein (Mahkamah Agama) dan Atjeh Syu Kokuzi No. 35 tentang peraturan pelaksanaan Atjeh Syu Rei tersebut. Menurut Atjeh Syu Rei No. 12 ini, di ibu kota daerah Aceh, diadakan Syukyo Hooiin (Mahkamah Agama), di tiap-tiap *Bunsyu* (Kabupaten), diadakan Qadlityo, dan di-tiap-tiap Son diadakan Qadli Son. (Kehakiman di Daerah Atjeh, 1944: 56—60). Meskipun namanya Hooiin (Mahkamah) tetapi wewenanganya tidak hanya terbatas mengenai peradilan saja, tetapi meliputi juga urusan agama lainnya.

Sesudah proklamasi kemerdekaan, Syukyo Hooiin itu disempurnakan dan di ubah namanya menjadi Pejabat Agama. Oleh karena pada waktu itu hubungan dengan pusat hanya via radio saja, dan masing-masing daerah mengurus sendiri-sendiri segala urusannya, sebagai akibat perjuangan fisik melawan Belanda, maka mengenai hal ini-pun Aceh mengurus sendiri. Kantor Pejabat Agama itu dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama), Urusan Agama dan Pendidikan Agama. Pada tanggal 1 Nopember 1946 dinegerikanlah 180 buah madrasah di seluruh Aceh dan diurus oleh Bagian Pendidikan Agama pada kantor Pejabat Agama tersebut. (*10 Tahun Darussalam*, 1969: 403).

SESUDAH PENYERAHAN KEDAULATAN

1. Aceh Menjadi Propinsi dan Penghapusannya Kembali

Sesudah penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, maka sejak tanggal 1 Januari 1950, Aceh dijadikan propinsi dan Teungku M. Daud Beureu-eh diangkat menjadi Gubernur Aceh, sesudah ia diperhentikan sebagai Gubernur Militer.

Sebagaimana diketahui, Belanda menyerahkan kembali kedaulatan atas Indonesia, kepada pemerintah R.I.S. (Republik Indonesia Serikat) sebagai hasil K.M.B. (Konperensi Meja Bundar) di negeri Belanda. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia, yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Negara Kesatuan, berubah menjadi Negara Bagian dari Republik Indonesia Serikat. Hal ini diterima demi berhasilnya perundingan kerja Belanda. Tetapi sesudah penyerahan kedaulatan, tokoh-tokoh penyerahan kedaulatan, tokoh-tokoh politik kita mengusahakan kembali supaya Negara Serikat R.I.S. berubah lagi menjadi Negara Kesatuan R.I. lalu diadakan perundingan-perundingan antara RIS, dan R.I. Perundingan itu berhasil dengan dicapai beberapa persetujuan yang terperinci. Di antaranya jumlah propinsi dalam negara kesatuan yang akan datang, yaitu 9 propinsi dan satu daerah Istimewa Jogjakarta. Dengan demikian, propinsi Aceh tidak termasuk, melainkan masuk menjadi satu dengan Propinsi Sumatera Utara, sebab di Sumatera hanya ada tiga propinsi saja, yaitu propinsi Suma-

tera Utara, propinsi Sumatera Tengah dan propinsi Sumatera Selatan. Hal ini menimbulkan reaksi di Aceh. Lalu datang ke Aceh. Lalu datang ke Aceh tokoh-tokoh berat dari pusat untuk menyelesaikan masalah itu, diantaranya Mr. Assaat dan Bung Hatta. Tetapi tidak juga menjer-nihkan suasana. Dalam pada itu, waktu yang ditetapkan untuk diresmikan Negara Kesatuan kembali, sudah tiba, yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Presiden menunjuk M. Natsir, ketua Masyumi menjadi formatur kabinet. Sesudah selesai membentuk kabinet dan dilantik menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ia segera ke Aceh untuk menyelesaikan penggabungan Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara. Beberapa hari diadakan perundingan dengan tokoh-tokoh Aceh yang datang dari seluruh Aceh. Pembicaraan tetap tegang. Akhirnya M. Natsir berjanji, akan memperjuangkan kembali sambil jalan. Tetapi jangan sekarang, karena sudah terlanjur ditetapkan hanya ada 10 daerah tingkat I. Para tokoh yang datang dari tiap kabupaten dalam daerah Aceh, tetap bertahan. Tetapi Teungku M. Daud Beureu-eh yang berwatak keras, kali ini merasa kasihan kepada M. Natsir yang sudah terjepit. Lalu beliau mulai lunak pendiriannya mengenai hal ini. Melihat ini, para tokoh lainnya, meskipun dalam hatinya masih tetap tidak setuju, tetapi tidak berbicara lagi. Akhirnya Aceh digabungkan ke dalam Sumatera Utara. Segala inventaris propinsi berangsur-angsur diangkut ke Medan, ibu kota propinsi Sumatera Utara.

Waktu berjalan terus, janji M. Natsir belum juga membayang realisasinya. Akhirnya kabinet Natsir jatuh, digantikan oleh kabinet Sukiman. Dalam masa kabinet ini, bukan saja janji Natsir tidak datang, malahan banyak tokoh-tokoh Islam ditangkap tidak terkecuali di Aceh. Melihat suasana yang demikian, para tokoh di-kabupaten-kabupaten Aceh, datang ke Kutaraja menemui Teungku M. Daud Beureu-eh menanyakan hal itu dan sebahagian ada pula

yang menimplak Teungku Beureu-eh yang mau mengalah dahulu. Hal ini menimbulkan suasana panas dan akhirnya meletuslah pemberontakan Aceh pada tanggal 21 September 1953.

2. *Usaha Pemulihan Kembali Keamanan di Aceh*

Sesudah meletusnya pemberontakan Aceh itu, maka pemerintah pusat berusaha untuk memadamkannya. Usaha pertama dengan jalan kekerasan yang sangat ditekankan oleh tokoh-tokoh Komunis yang berpengaruh dalam pemerintahan pada waktu itu. Tetapi ternyata tidak berhasil. Sebab pemberontakan itu secara frontal.

Mulai dari Residen Koordinator, Bupati-bupati, Wedana-wedana, Camat-camat dan sebagian kecil tentara, turut memberontak bersama rakyat. Oleh karena itu, mulai dicari jalan lain di samping cara kekerasan. Masyumi mengusulkan supaya status propinsi dikembalikan, tetapi jangan khusus untuk Aceh saja, melainkan secara integral, yaitu Indonesia dibagi menjadi 20 propinsi, di antaranya termasuk Aceh. Tetapi usul tersebut ditolak oleh pemerintah pada waktu itu.

Waktu berjalan terus, korban semakin bertambah. Akhirnya pemerintah pusat terhitung sejak tanggal 1 Januari 1957, Aceh diberi hak otonomi daerah dengan status propinsi, di samping pemberian hal yang sama kepada beberapa daerah lainnya, sehingga akhirnya Indonesia terdiri dari 26 Propinsi, lebih banyak dari yang diusulkan oleh Masyumi.

Sebagai gubernur Aceh, diangkat A. Hasjmy dan pada tanggal 27 Januari 1957, dilakukan serah terima antara Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Aceh. (Dua Setengah Tahun Propinsi Aceh, 1959: 4).

Gubernur A. Hasjmy bersama Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel Syamaun Gaharu, memikirkan bermacam-macam cara untuk mengamankan kembali Aceh.

Di-antaranya mengusahakan adanya suatu kota pelajar dan mahasiswa, dimana terkumpul tiga corak pendidikan tinggi. Pertama pendidikan tinggi bersifat umum, kedua pendidikan tinggi bersifat agama dan ketiga pendidikan tinggi yang mencakup kedua-duanya. Di samping itu juga mengadakan adanya kontak dengan tokoh-tokoh pemberontak, untuk merundingkan nasib Aceh di masa yang akan datang.

Mengenai usaha adanya kota pelajar yang dimaksud, maka pada tanggal 2 September 1959 diresmikanlah kota pelajar dan mahasiswa Darussalam, dengan peresmian Fakultas Ekonomi, selaku fakultas pertama dalam lingkungan Universitas Syiahkuala, sebagai pendidikan tinggi yang bersifat umum. Kemudian pada tanggal 2 September 1960, diresmikan Fakultas Syari'ah, sebagai fakultas pertama dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), sebagai pendidikan tinggi yang mencakup bidang agama dan bidang umum. Terakhir pada tahun 1968, diresmikan pula Dayah Teungku Chik Pante, sebagai pendidikan tinggi dalam bidang agama.

3. Aceh Menjadi Propinsi Daerah Istimewa

Sejarah mencatat bahwa saat yang paling menentukan pulihnya keamanan di Aceh ialah tanggal 26 Mei 1959, karena pada tanggal tersebut diakhirinya suatu musyawarah segi tiga, antara Missi Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Hardi, S.H., Penguasa Perang dan Pemerintah Daerah Aceh yang diwakili oleh Ka Staf Kodam I/Iskandar Muda, T. Hamzah dan Gubernur A. Hasjmy, dengan pimpinan DI/TII yang diwakili oleh Ayah Gani Usman.

Musyawarah ini menghasilkan status baru bagi Aceh, yaitu Daerah Istimewa dengan *Hak-hak otonomi yang luas dalam Bidang agama, Pendidikan dan Peradatan*. (Hasjmy, 1969: 15). Hasil musyawarah ini direalisasikan dengan

Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/ Missi/1953, tertanggal 26 Mei 1959. (Talsya, 1959: 41-42). Kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Penguasa Perang No. KPTS/PEPERDA-061/3/1962 tentang Kebijaksanaan Pelaksanaan Unsur-unsur Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh, tertanggal 7 April 1962. (Talsya, 1969: 55-57).

PERANAN ULAMA SEKARANG

Meskipun ulama sekarang tidak sekeramat ulama dahulu, namun pengaruhnya masih tetap terasa dalam masyarakat. Ucapan mereka lebih didengar oleh rakyat. Oleh karena itulah maka Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, telah membentuk Majelis Ulama Daerah Aceh pada tahun 1965, kemudian disusul dengan pembentukan Majelis Ulama Kabupaten dan Majelis Ulama Kecamatan, yang masing-masing menjadi penasehat Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah tk. II dan penasehat Camat kecamatan yang bersangkutan. Ini merupakan hasil musyawarah Alim Ulama sedaerah istimewa Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Desember 1965 di Banda Aceh. Musyawarah dihadiri oleh 57 orang ulama dari seluruh Aceh, dengan presidium musyawarah terdiri dari:

1. Teungku Haji Abdullah Ujung Rimba.
2. Teungku Haji Hasan.
3. Teungku Haji Ismuha.
4. Teungku Ibrahim Husein.
5. Teungku Muhammad Yasin.
6. Teungku Zamzamy Yahya.
7. Teungku Abdul Djalil Takengon.

Musyawarah tersebut telah mengambil beberapa keputusan. Antara lain:

- a. Ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram dianut oleh umat Islam.

- b. Menganut ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran, adalah kafir dan haram jenazahnya dikuburkan dipekuburan Islam.
- c. Mereka yang menganut komunisme bukan karena kesadaran, tetapi hanya ikut-ikutan wajib diperingatkan supaya kembali kepada yang benar.

Musyawarah para ulama Aceh yang pertama itu, telah membantu pemerintah dalam menanggulangi G.30.S./P.K.I. Dalam musyawarah-musyawarah selanjutnya, Majelis Ulama Aceh turut serta memberi penjelasan kepada rakyat mengenai pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Juga mengenai masalah keluarga berencana, Majelis Ulama Aceh telah mengeluarkan fatwanya.

1. Teungku Haji Abdullah Ujung Rimba.
2. Teungku Haji Hasan.
3. Teungku Haji Ismail.
4. Teungku Ibrahim Hussein.
5. Teungku Muhammad Yasin.
6. Teungku Zamzamy Yahya.
7. Teungku Abdul Djali Takengon.

Musyawarah tersebut telah mengambil beberapa keputusan.

Antara lain:

- a. Ajaran komunisme adalah kulir hukunya dan harus dihindari oleh umat Islam.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, kiranya dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama di Aceh, sebagai juga di daerah lainnya sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat.
2. Dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, para ulama cukup banyak jasanya, di samping jasa golongan lain dalam masyarakat.
3. Mengikut sertakan para ulama dalam pembangunan adalah mutlak perlu.
4. Para ulama adalah benteng yang paling ampuh dalam melawan komunisme.
5. Yang membuat ulama berpengaruh adalah ketaatannya kepada hukum agama, bukan hanya karena pengetahuannya. Tokoh-tokoh pemerintah yang taat kepada agama, akan jauh lebih berpengaruh dari mereka yang tidak taat.

CATATAN KAKI

1. Menurut suatu riwayat pepatah itu berbunyi: *Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiahkuala*. Yang dimaksud dengan Syiahkuala ialah Syekh Abd. Rauf Assinkily Alfansury yang kuburannya berada di Kuala, dua kilo meter dari kota Banda Aceh. Tetapi melihat bahwa Syekh Abd. Rauf Syiahkuala pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda berada di luar negeri selama 30 tahun dan ulama yang mendampingi Iskandar Muda adalah Syekh Syamsuddin Assumaterany yang oleh Dr. Van Nieuwenhujz disebutkan Syamsu 'l-Din Van Pasai, maka saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa pepatah itu yang betul ialah: *Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiahulama*. Mungkin perkataan Syiahulama berubah menjadi Syiahkuala, karena Syiahkuala adalah ulama yang paling masyhur di Aceh, sebagai sultan yang paling masyhur adalah Iskandar Muda.
2. *Kitab Jawoe* artinya kitab bahasa Melayu tulisan Arab. Imbangannya *Kitab Nahu* yaitu kitab dalam bahasa Arab.
3. *Teungku Di Bale*, ialah Teungku yang mengajar di suatu dayah & biasanya yang punya dayah itu sendiri. Imbangannya ialah *Teungku Di Rangkang*, yaitu pelajar tingkat tinggi yang sudah ditunjuk oleh Teungku Di Bale untuk mengajar di tingkat rendah.
4. Artinya subjek dari kalimat yang tersusun dari jumlah-jumlah *ismyah* (kalimat kata benda) diterjemahkan dengan *Bermula*. Tetapi subjek dari jumlah *fi liah* (kalimat kata kerja) diterjemahkan oleh *ataulah*. Predikat harus diterjemahkan dengan *itu* dan kalau objek harus diterjemahkan dengan *akan*.

5. Aceh pada umumnya adalah *Zelfbestuursgebied* (Daerah Swapraja) atau disebut juga *Inrechtstreeksch Bestuursgebied* (Daerah yang tidak diperintah langsung). Hanya Kabupaten Aceh Besar dan sebagian Kewedanaan Singkil saja yang termasuk *Rechtstreeksch Bestuursgebied* (Daerah yang diperintah langsung).
6. Wawancara dengan Teungku M. Daud Beureu-eh pada tahun 1974 dan wawancara dengan Teungku Haji Abdullah Ujung Rimba pada tahun 1975.
7. Wawancara dengan Teungku M. Husin Hitam pada tahun 1968.
8. Wawancara dengan Teungku M. Daud Beureu-eh pada tahun 1974.
9. *Sagi* atau *Sagoe* adalah istilah yang dipakai untuk bahagian dari Daerah Aceh Besar. Aceh Besar dibagi tiga Sagi atau tiga Sagoe, yang masing-masing diperintah oleh seorang Panglima, yaitu Sagi XXII Mukim, Sagi XXVI Mukim dan Sagi XXV atau *Sagoe Teungoh Lhee Ploh*. Di samping itu ada daerah-daerah kecil yang langsung takluk kepada Sultan, yaitu Mukim-mukim dan Gampong-gampong yang berada disekitar Kraton Sultan.
10. Di *Meulek* adalah Menteri Sekretaris Negara Aceh pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim Alauddin Mansur Syah dan waktu perang ia diangkat pula menjadi Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Aceh dengan pangkat Letnan Jenderal, di samping tugasnya sebagai Sekretaris Negara. (Hasjmy, 1976: 45).
11. Tiro adalah nama satu kemukiman di kabupaten Pidie. Nama ini menjadi masyhur, karena di situ ada ulama yang mempunyai dayah yang pelajarnya datang dari seluruh Aceh, bahkan ada dari luar Aceh. Kemudian lebih populer lagi waktu salah seorang ulamanya, yaitu Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman memimpin

perang melawan Belanda selama puluhan tahun.

12. Di Aceh dahulu dikenal istilah: *Daerah di bawah angin* dan *daerah di atas angin*. Yang dimaksud dengan *Daerah di bawah angin*, ialah kira-kira negeri-negeri yang sekarang disebut Asia Tenggara. Dan yang disebut *Daerah di atas angin* ialah: India, Timur Tengah dan Timur Dekat.

DAFTAR BACAAN

Alfian.

- 1975 *The Ulama in Acehnese Society: A Preliminary Observation*. Banda Aceh, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Aceh.

Arif, Abdullah.

- 1950 *Bingkisan Kenang-2-an Kongres Besar PUSA dan P. PUSA*, Kutaradja, Panitia Kongres.

Alwi b. Thair Al-Haddad, Sajed.

- 1957 *Sedjarah Perkembangan Islam di Timur Djauh*, Jakarta, Al Maktab Addaimi.

Balai Poestaka.

- 1940 *Mohammedaansch—Inlandsche Zaken*, Batavia-C, Balai Poestaka.

Berg. H.J. Van et. al.

- 1951 *Dari Panggung Peristiwa Sedjarah Dunia I*, Groningen, Djakarta, J.B. Wolters.

Boland, B.J.

- 1971 *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague, Martinus Nijhoff.

Djamil, M. Junus.

- 1961 "Perjuangan A. Rauf Syiahkuala Membangun Masyarakat Kemanusiaan yang Berpenge-

perang mela
12. Di Aceh
tahun", dalam *Darussalam dan Hari Pendidikan*, Kutaradja, Pemerintah Daerah/Panitya Persiapan Universitas Syiahkuala.

Gobee, E dan C. Adriaanse.

1957 *Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje*. 'S-Gravenhage, Martinus Nijhoff.

HAMKA

1945 *Sedjarah Islam di Soematera*. Medan, Badan Pembangoenan Semangat Islam.

1972 "Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Daerah Pesisir Sumatera" dalam *Risalah Seminar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia*. Medan, Panitya Seminar.

Hasjmy, A.

1969 "Apa dan Mengapa 26 Mei?" dalam T. Alibasyah Talsya, *Sepuluh Tahun Daerah Istimewa Atjeh*. Banda Aceh, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh.

1971 *Hikayah Prang Sabi Menjiwai Perang Atjeh Melawan Belanda*. Banda Aceh, Firma Pustaka Faraby.

1975. "Pendidikan Islam di Aceh dalam Perjalanan Sejarah", dalam *Sinar Darussalam* No. 63, Yayasan Pembina Darussalam.

1976 a. "Srikandi Teungku Fakinah", dalam *Sinar Darussalam*, No. 66.

b. "Peranan Agama Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia", dalam *Sinar Darussalam*, No. 68.

• Harahap, A.S.

1951 *Sedjarah Penjiaran Islam di Asia Tenggara*. Medan, Toko Buku Islamiyah.

Ismuha.

1949 *Ulama Atjeh Teungku A. Rahman Meunasah Meutjap*, Jogjakarta, Pustaka Awegeutah.

1969 "Mengenang Kembali Lahirnya PUSA 30 Tahun Yang Lalu", dalam *Sinar Darussalam*, No. 14 dan No. 15.

1971 "Pengetahuan Saya sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 di Atjeh", dalam majalah *Warta Pendidikan dan Kebudayaan* No. 7. Banda Aceh, Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

1975. a. "Adat dan Agama di Aceh", dalam *Sinar Darussalam*, No. 64.

b. "Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam di Indonesia" dalam majalah *Al-Djami'ah*, No. 9, Tahun ke-XIII. Jogjakarta, IAIN Sunankalijogo.

c. "Nilai-nilai Perjuangan 30 Tahun Kemerdekaan R.I. Mengenai Bidang Agama, dalam majalah *Gema Ar-Raniry*, No. 4, Agustus/September '75. Banda Aceh, IAIN Jami'ah-Ar-raniry.

Jarahdam I.

1972 *Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda*. Banda Aceh, Kodam I/Iskandar Muda.

Kehakiman.

1944 *Kehakiman di Daerah Atjeh*. Koetaradja, Kantor Kehakiman Daerah Atjeh.

Koesnodiprodjo.

Himpunan Undang2, Peraturan2 Pemerintah, Penetapan2 Pemerintah R.I. Tahun 1947, Cetakan pertama, Jogjakarta, Koesnodiprodjo.

Komisi Redaksi.

1969 *Sepuluh Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan.* Banda Aceh, Yayasan Pembina Darussalam.

Majlis Ulama.

1975 *Sumbangan Pikiran Untuk Musyawarah Majelis Ulama Se Indonesia.* Banda Aceh, Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Meuraxa, Dada.

1954 *Atjeh 100 Tahun.* Medan, Pustaka Sedar.

Nieuwenhujze, Dr. C.A.O. Van.

1945 *Samsu 'l-Din Van Pasai,* Leiden, E.J. Brill.

Pane, Sanusi.

1951 *Sedjarah Indonesia,* jilid II, Djakarta, Balai Pustaka.

Panglima Polem. T.M.A.

1972 *Memoir.* Kutaradja, Alhambra.

Pelita, Harian.

1975 "Kisah Bung Tomo", dalam *Harian Pelita* tanggal 11 Nopember 1975, Jakarta.

Pemerintah Daerah.

1949 *Revolusi Desember 1945 di Atjeh.* Kutaradja, Pemerintah Daerah Atjeh.

Propinsi Atjeh.

1959 *Dua Setengah Tahun Propinsi Atjeh.* Kutaradja, Pemerintah Daerah.

Raliby, Osman.

1953 *Documenta Historica*, Djakarta, Bulan Bintang.

Razi Peuseunu, T. Syahabuddin dan T. Anwar Nurdin.

1968 "Sultan Alauddin Mahmud Syah II", dalam *95 Tahun Tantangan Ultimatum Keradjaan Belanda Terhadap Kerajaan*. Medan, Panitia Peringatan Pahlawan Nasional.

Risalah Seminar.

1972 *Risalah Seminar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia*. Medan, Panitia Seminar.

Said, Mohammad.

1937 *De Zelfbestuurende Landschappen Buitengewesten*, Medan, N.V. Handelmaatschappij en Drukkerij "Sinar Deli".

Ujung Rimba, Tgk. H. Abdullah.

1964 "Sjeh Nuruddin Ar-raniry", dalam buku *Kenang2-an Dies Natalis ke I Djami'ah Ar-raniry*. Banda Atjeh, Panitia Perayaan Dies Natalis.

Yakub, Ismail.

1952 *Teungku Tjhik Di Tiro*. Djakarta, Bulan Bintang.

Zainuddin, H.M.

1961 *Tarich Atjeh dan Nusantara*. Medan, Pustaka Iskandar.

1966 *Srikandi Atjeh*. Medan, Pustaka Iskandar Muda.

DAFTAR KATA-KATA SINGKATAN

A.P.D.N.	=	Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.
A.S.S.	=	Atjeh Staatsspoorwegen.
DI/TH	=	Darul Islam./Tentara Islam Indonesia.
G.30.S/PKI	=	Gerakan Tiga Puluh September Partai Komunis Indonesia.
H.B.	=	Hoofdbestuur.
P.B.	=	Pengurus Besar.
I.A.I.N.	=	Institut Agama Islam Negeri.
K.M.B.	=	Konperensi Meja Bundar.
M.I.M.	=	Ma'had Iskandar Muda.
P.K.I.	=	Partai Komunis Indonesia.
P.Oe.S.A.	=	Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh.
P.U.S.A.	=	Persatuan Ulama Seluruh Aceh.
R.I.	=	Republik Indonesia.
R.I.S.	=	Republik Indonesia Serikat.
S.A.W.	=	Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

- S.I. = Sarekat Islam.
S.W.T. = Subhanahu Wa Ta'ala.
T.N.I. = Tentara Nasional Indonesia.
T.R.I. = Tentara Republik Indonesia.

DAN MADRASAH ACEH

Drs. Balhaqi A.K.

DAFTAR KATA-KATA SINGKATAN	=	Sarekat Islam.	I.S.
	=	Subhanahu Wa Ta'ala.	T.W.T.
	=	Tentara Nasional Indonesia.	T.N.I.
	=	Tentara Republik Indonesia.	T.R.I.

A.P.D.N.	=	Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.
A.S.S.	=	Ajien Staatspoortwegen.
DI/TII	=	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.
G.30.S/PKI	=	Gerakan Tiga Puluh September Partai Komunis Indonesia.
H.B.	=	Hoofdbestuur.
P.B.	=	Pengurus Besar.
I.A.I.N.	=	Institut Agama Islam Negeri.
K.M.B.	=	Konferensi Meja Bundar.
M.I.M.	=	Ma'had Iskandar Muda.
P.K.I.	=	Partai Komunis Indonesia.
P.Oe.S.A.	=	Persatoean Ulama Seleroeh Atjen.
P.U.S.A.	=	Persatuan Ulama Seluruh Aceh.
R.I.	=	Republik Indonesia.
R.I.S.	=	Republik Indonesia Serikat.
S.A.W.	=	Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

PENDAHULUAN

ULAMA DAN MADRASAH ACEH

Drs. Baihaqi A.K.

Salah satu pelajaran dari pelaksanaan REPELITA ialah dibenarkannya hipotesa ilmiah yang mengatakan bahwa kadar keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini menimbulkan patokan lainnya bahwa tingkat partisipasi terikat erat pula dengan sifat dari intensitas komunikasi antara yang menyampaikan pesan — katakanlah pejabat pemerintah atau pemimpin masyarakat, yang telah yakin akan kebaikan pesan — dengan yang menerima pesan, yaitu masyarakat, dan corak serta mekanisme dari komunikasi.

Antara pemerintah, sumber pesan, dan masyarakat, penerima pesan, diperlukan adanya pemimpin-pemimpin yang dapat diharapkan untuk membantu menyampaikan pesan yang dimaksud. Pemanfaatan mereka sangat penting karena masyarakat, kadang-kadang, tidak dapat memahami pesan atau malah mungkin mencurigainya. Tetapi apabila pesan itu disampaikan dengan "bahasa" yang dapat mereka pahami maka tidaklah terdapat masalah yang menjadi beban pemikiran.

Dimaksud dengan "bahasa" itu ialah isyarat, ucapan dan perbuatan yang telah menjadi bagian hidup kultural dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu maka sebaiknya pesan tersebut disampaikan melalui para pemimpin atau tokoh yang kedudukan mereka telah terkait erat se-

GLAMA DAN MADRASAH ACEH

Drs. Baihadi A.K.

PENDAHULUAN

Salah satu pelajaran dari pelaksanaan REPELITA ialah dibenarkannya hipotesa ilmiah yang mengatakan bahwa kadar keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini menimbulkan patokan lainnya bahwa tingkat partisipasi tergantung erat pula dengan sifat dari intensitas komunikasi antara yang menyampaikan pesan — katakanlah pejabat pemerintah atau pemimpin masyarakat yang telah yakin akan kebaikan pesan — dengan yang menerima pesan, yaitu masyarakat, dan corak serta mekanisme dari komunikasi.

Antara pemerintah, sumber pesan, dan masyarakat, penerima pesan, diperlukan adanya pemimpin-pemimpin yang dapat diharapkan untuk membantu menyampaikan pesan yang dimaksud. Pemanfaatan mereka sangat penting karena masyarakat, kadang-kadang, tidak dapat memahami pesan atau malah mungkin mencurigainya. Tetapi apabila pesan itu disampaikan dengan "bahasa" yang dapat mereka fahami maka tiadalah terdapat masalah yang menjadi beban pemikiran.

Dimaksud dengan "bahasa" itu ialah isyarah, ucapan dan perbuatan yang telah menjadi bagian hidup kulturil dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu maka sebaiknya pesan tersebut disampaikan melalui para pemimpin atau tokoh yang kedudukan mereka telah terkait erat se-

cara struktural dalam masyarakat. Kedudukan mereka telah diakui, dan malah mereka telah dianggap sebagai perumus yang syah dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dengan memakai cara atau mekanisme yang telah lazim dan berwibawa mereka dapat diharapkan untuk menjadi perantara, atau "broker" antara pesan yang bersumber dari luar masyarakat organik dengan masyarakat itu sendiri.

Di Aceh, mereka itu terutama adalah ulama dan guru agama, *Adat bak Poteu Meureuhom, hukom bak Syiah Kuala* (adat dari Sultan, hukum dari ulama), kata pepatah. Hal ini yang senantiasa kedengaran di Aceh kiranya dapat menjadi bukti yang kuat bahwa pada zaman Sultan ulama berperan sebagai pemberi fatwa atau begitulah sekurang-kurangnya secara idiil digambarkan. Syiah Kuala adalah gelar ulama besar Syekh Abdurrauf Singkil yang bermakam di Kuala Aceh. Namanya menjadi simbol dari ulama ahli hukum yang bertugas memberi fatwa kepada atau membuat undang-undang untuk diadatkan oleh Sultan.

Penelitian ini ingin mencari pola komunikasi antara ulama dengan masyarakat yang mengitarinya dan antara pemerintah, sumber dari pesan, dengan ulama sebagai calon penyampaikan pesan dan sebagai penerima kesan dari masyarakat. Sesuai dengan sasarannya maka penelitian ini akan lebih banyak dilakukan di daerah pedesaan.

Penelitian tentang ulama, tidak bisa terlepas dari prana pendidikan yang menghasilkannya dan yang membentuk serta membina "bahasa" dan dasar asumsi yang dipakai. Maka *sistem pendidikan dayah dan madrasah di Aceh*, struktur dan dinamikanya serta hubungan timbal balik antaranya dengan masyarakat sekitarnya merupakan masalah-masalah inti dari penelitian ini. Dalam pengertian dinamika dimaksud ialah perkembangan corak organisasi *dayah* dan madrasah. Umpamanya, dari milik pribadi menjadi kepunyaan yayasan atau pemerintah, perobahan sistem pengajaran dan, tak kurang pentingnya, peralihan pan-

dangan tentang cara mendekati pokok ajaran Islam yang terpencair dalam kurikulum dan syllabus.

Sering pula *dayah* dan madrasah di Aceh, dengan wibawa ulama yang memimpinya, menjadi sumber sesungguhnya dari legitimitasi bagi terjadinya perubahan sosial atau juga penahanan perubahan. Di samping itu, perguruan-perguruan tersebut, sebagai pranata sosialisasi lainnya, memberikan pengalaman historis yang fundamental dalam proses pertumbuhan pribadi para anak didiknya. Dengan demikian penelitian ini akan sangat luas dan menyeluruh. Karenanya perlu diarahkan kepada yang lebih bersifat *pendekatan sosiologis dari ulama dan madrasah di Aceh*. Dari pendekatan itu diharapkan akan dapat memberi indikator-indikator dari kecenderungan masyarakat yang berada dalam orbit pengaruhnya. Dan tak kurang pentingnya, sejalan dengan kebijaksanaan yang telah digariskan Menteri Agama, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu bagi usaha perubahan yang selaras dari *dayah* dan madrasah di Aceh untuk menjadi suatu unit yang, seperti halnya dengan pada zamannya yang silam, bersifat produktif secara langsung pada masa ini.

Penelitian ini direncanakan akan meluas (nantinya) untuk seluruh Aceh. Untuk pendahuluan maka Tanoh Abee dan Krueng Kalee (Aceh Besar), Kenawat dan Pasir (Aceh Teungku Chik di Bambi, Teungku Chik di Truncamplici, dan penelitian. Di daerah-daerah tersebut terdapat ulama-ulama besar yang berpengaruh. Mereka itu ialah Teungku Chik di Tanoh Abee, Teungku Chik di Kutakarang, Teungku Kadi Rampak dan Teungku Abdul Kadir Aman Siti Rani. Kecuali yang tersebut terakhir yang masih memimpin *dayah* sampai sekarang, semua yang tersebut sebelumnya telah berpulang kerahmatullah. *Dayah* Tanoh Abee sudah tidak ada lagi di Seulimum tetapi tumbuh *dayah* baru di desa yang berdekatan. Sedangkan *dayah* Krueng Kalee

telah tiada pula setelah pemimpinnya yang terakhir, Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, meninggalkannya karena menjabat tugas lain di kota. *Dayah* Teungku Kadli Rampak di Kenawat, setelah ia meninggal, disambung oleh muridnya, Teungku Abdul Kadis Aman Siti Rani yang kemudian dipindahkannya ke Pasir, Kebayakan (2½ kilometer dari Takengon), Aceh Tengah.

Dari sudut ilmu pengetahuan penelitian ini bermaksud untuk menyumbang pengetahuan tentang masyarakat di salah satu daerah di Indonesia dan ikut serta memulai penelitian dari sudut ilmu sosial tentang masalah yang menyangkut hubungan antara kenyataan spirituil dengan realita sosial. Tidak pula kurang pentingnya dari sudut peneliti sendiri yang dengan melaksanakan kewajiban ini diharapkan dapat mempertinggi ketrampilan meneliti dan menulis.

Dari sudut perencanaan, penelitian ini kiranya dapat menghasilkan pemikiran bagi perumusan perencanaan pembangunan sosial.

PERANAN ULAMA DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL ACEH

1. *Tingkah laku sosial*

Selain daripada membina lembaga-lembaga pendidikan sejak zaman kesultanan para ulama Aceh bergerak dalam usaha-usaha pembangunan, terutama di bidang-bidang sosial, pertanian dan pembinaan tingkah laku. Sebagai contoh dalam bidang pertanian adalah Teungku Chik di Pasi, Teungku Chik di Bambi, Teungku Chik di Trungcampi, Teungku Chik di Ribee, selain dari mempunyai keahlian dalam ilmu agama, ke empat mereka juga ahli dalam ilmu pertanian dan irigasi. Dari irigasi yang mereka bangun telah digali *lueng* (tali air) yang pada zamannya terhitung cukup panjang. Teungku Chik di Pasi membangun irigasi dengan tali airnya bernama *lueng* Bintang sepanjang 40 kilometer. Berikutnya Teungku Chik di Bambi: irigasi dengan *lueng* Guda Agam, 40 kilometer. Teungku Chik di Trungcampi: irigasi dengan *lueng* Trungcampi, 45 kilometer. Dan Teungku Chik di Ribee: irigasi dengan *lueng* Ribee, 35 kilometer. Dengan irigasi dan *lueng* itu areal persawahan rakyat yang luas di Pidie mendapat pengairan yang cukup.¹

Teungku Chik di Kutakarang (Aceh Besar) mempunyai keahlian, di samping ilmu agama, juga dalam ilmu *Thib* (kedokteran) dan karang-mengarang.² Teungku Chik di Tanoh Abee dan Teungku Haji Hasan Krueng Kalee dikabarkan mempunyai keahlian dalam bidang-bidang Ilmu

Falak dan Ilmu Hisab.³ Seorang ulama besar Aceh, Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh, yang diresmikan menjadi *teungku chik* oleh Gubernur Aceh, A. Muzakkir Walad, setelah pulangnyanya dari Mekkah tahun 1971, mempunyai keahlian tidak saja dalam ilmu agama tetapi juga memiliki kecakapan dan ketrampilan dalam politik, bangunan, pertanian dan irigasi. Ia menjadi Ketua Umum Pengurus Besar PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) sejak mulai berdirinya, ketua MAEBKATRA masa pendudukan Jepang, Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada saat-saat berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan terakhir Gubernur Kepala Daerah (pertama) Propinsi Aceh.

Suatu *lueng* yang telah tertutup yang sekiranya dikerjakan oleh P.U. (Pekerjaan Umum) Kabupaten Pidie diperkirakan akan memakan tempo setengah tahun dapat diselesaikan oleh *Teungku Chik* ini dalam waktu 28 hari. Dibanding antara panjangnya *lueng* dengan jumlah hari kerja maka berarti dalam satu hari dapat diselesaikannya 1½ kilometer termasuk membongkar rumpun bambu dan kelapa. Demikian juga 2 buah *lueng* lainnya dan pembersihan sungai dalam kota Sigli yang telah hampir tertutup muaranya ternyata bisa disiapkannya dalam waktu yang relatif amat singkat. Siegel menerangkan bahwa rakyat yang bekerja setiap harinya berkisar dalam jumlah antara 300 sampai 2.000 orang. Masing-masing membawa nasi dan perbekalan serta peralatan sendiri.⁴

Nilai dan tingkah laku kehidupan di Aceh memperlihatkan corak Islam dalam hampir segenap aspeknya. Hal ini terutama disebabkan adanya pranata-pranata sosialisasi yang umum berlaku, yaitu pendidikan *dayah* yang telah menghasilkan ulama-ulama militan, yang tidak jemu-jemu memimpin masyarakat ke arah pendalaman proses Islamisasi . . . Para penguasa, termasuk Sultan, sebagian besar pernah mendapat didikan para ulama atau

sekurang-kurangnya pernah menerima fatwa dari mereka.

Dalam usaha pendalaman dan penghayatan ke-Islaman para ulama kadang-kadang memakai media *hikayat*. Demikian meluasnya pemakaian hikayat dan cerita sehingga jenis tradisi sangat digemari rakyat dan malah terkait erat dengan kehidupan mereka. Sebagian mereka berhikayat secara lisan dan yang lainnya menyusunnya dalam bentuk tulisan.⁵ Yang tersebut akhir ini ada yang mereka tulis dalam bentuk puisi dan tidak sedikit pula dalam bentuk prosa. Di samping itu tidak pula kurang di antara mereka yang berdakwah menyampaikan seruan dan ajaran Islam secara umum atau khusus di kota atau di desa mereka masing-masing. Dakwah dalam bentuk karangan atau tulisan ilmiah tidak pula kurang jumlahnya.

Di dalam setiap kampung terdapat *meunasah*, tempat beribadat, mendidik anak-anak, mengurus atau merundingkan hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan kampung.⁶ *Meunasah* dibuat berbentuk empat segi dan rumah-rumah yang akan dibangun diharuskan mengikuti bentuk *meunasah*. Beda antara rumah dan *meunasah* hanya sedikit saja sehingga bagi orang-orang yang tidak memperhatikannya dengan sengaja akan lebih melihat kesamaannya daripada perbedaannya. Persamaannya terdapat pada bentuknya seperti *rumah Aceh*. Sedangkan perbedaannya kelihatan, pertama: pada posisinya, yaitu bahwa rumah tampak membujur ke arah *kiblat* (Mekkah) dan *meunasah* berdiri melintangnya. Dengan kata lain rumah kelihatan membujur arah Timur — Barat (karena Mekkah kurang lebih arah ke Barat dari Indonesia) dan *meunasah* tampak memanjang arah Utara — Selatan. Perbedaan ke dua terletak pada lantai *meunasah* yang kelihatan rata, sedangkan lantai rumah tampak tinggi di bagian tengahnya. Bagi mereka yang mengetahui hal ini tidak akan ragu-ragu lagi ke mana ia akan menghadap bilamana ia bermaksud akan sembahyang. Penyimpangan pembuatan rumah dari kons-

truksi semacam itu dianggap oleh masyarakat sebagai melanggar nilai-nilai keagamaan.

Sejak umur 4 tahun anak-anak diajar mengaji Al Qur'an. Anak laki-laki setelah berumur kurang lebih 10 tahun diharuskan tidur di *meunasah* untuk dididik dan diajar oleh *teungku meunasah* (di Pidie disebut *Peutua meunasah*). Mereka diajarkan do'a sembahyang, praktek sembahyang, pengetahuan dasar agama dan diberikan didikan dalam akhlak. Dibesarkan dengan kehidupan *meunasah* sehingga dalam hidupnya mereka merasakan datang dari *meunasah* dan kembali ke *meunasah*. Karena kehidupan di *meunasah* dibentuk dalam suasana keagamaan maka diharapkan anak-anak akan terdidik dan terbiasa dengan kehidupan beragama. Apa yang dilihatnya di *meunasah* seperti sembahyang berjamaah, pengajian, perayaan hari-hari besar Islam, penyelesaian persengketaan, musyawarah mengenai kepentingan masyarakat, upacara *peugatib* (menikahkan) dan lain-lainnya, menyebabkan kehidupan beragama dapat diharapkan semakin berkembang dalam diri anak-anak.⁷ Pemuda-pemuda di *meunasah* tidak kedengaran mempercakapkan gadis-gadis, bahkan mereka segan diajak berbicara tentang itu.⁸ Di samping merasa berdosa mempercakapkan perempuan mereka juga beranggapan bahwa yang bertanggung jawab memikirkan tentang perjodohan adalah orang tua.⁹

Dalam upacara perkawinan kelihatan tingkah laku agama secara lebih jelas. Jika dalam upacara-upacara peresmian yang bersifat lokal ada beberapa versi yang berbeda maka yang tampak selalu dipertimbangkan adalah persesuaiannya atau sejalanannya dengan hukum Islam. Sesaat sebelum nikah calon suami dituntun membaca *Bismillahir Rahmanir Rahim*, mengucapkan *Astagfirullahal 'azim* (mohon ampun dosa kepada Tuhan), membaca *shalawat* (do'a rahmat) kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan

dua *kalimah syahadat* (asyhadu alla ilaha ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah). Yang terakhir ini agar lebih mantap, selain daripada dibacakan dalam bahasa aslinya juga dituntun untuk diucapkan terjemahannya dalam bahasa Aceh atau bahasa Indonesia. Setelah semua itu selesai barulah dilakukan *ijab* (kata serah nikah dari pihak wali) dan *qabul* (kata terima nikah dari calon suami). Kemudian, manakala para saksi telah yakin nikah itu syah, disampaikan *khotbah nikah*, yang berisikan nasihat-nasihat agar kedua penganten senantiasa beriman dan beramal shalih, bergaul dengan baik, saling cinta dan menghargai. Untuk keperluan ini seringkali sengaja diundang seorang ulama yang terhormat dengan harapan agar khotbahnya lebih mantap. Penutup daripada itu semuanya adalah do'a yang dibacakan oleh ulama tadi agar kedua penganten diberi Tuhan keimanan, ketekunan beramal shalih, kebahagiaan dan anak keturunan yang baik-baik.

Kecuali di Gayo, khususnya Takengon (Aceh Tengah) di mana perkawinan di dalam satu *belah* (suku) menurut adat terlarang, di seluruh Aceh diikuti hukum Islam yang membolehkan seseorang kawin dengan saudara sepupunya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.¹⁰ Masyarakat Gayo, termasuk sebagian alim ulamanya, berpendapat bahwa adat perkawinan Gayo memperkuat hukum Islam. Alasan mereka, antara lain, ialah bahwa Islam tidak memerintahkan seseorang kawin dengan saudara sepupunya, tetapi hanya sekedar membolehkannya. Bahkan dalam ajaran Islam, menurut mereka, terdapat anjuran agar seseorang sebaiknya mencari jodoh dari kalangan yang lebih jauh. Oleh karena itu tidaklah salah kalau di Gayo diadatkan tidak boleh kawin dengan yang dekat-dekat dalam satu *belah*.¹¹

Tetapi dalam kalangan ulama-ulama lainnya terdapat pengertian yang menunjukkan kebalikannya. Mereka ini

mengatakan bahwa pelarangan perkawinan menurut adat semacam itu sudah terhitung keterlaluan. Misalnya, *belah Jalil* di Kebayakan tidak boleh mengambil jodoh dari *belah* yang serupa di Bintang walaupun jarak antara kedua kampung telah mencapai 24 kilometer. Contoh lainnya yang lebih menarik ialah *belah Mudo* di Kebayakan tidak boleh mengambil jodoh dari *belah* yang sama di Mosar, Bintang, Blangkeujeuren (Aceh Tenggara) yang jaraknya dari Kebayakan, masing-masing 18, 24 dan 180 kilometer. Yang terakhir malah melewati hutan belantara dan pegunungan yang tinggi-tinggi. Itulah sebagian sebabnya, barangkali, mengapa sejak saat merdeka pelanggaran terhadap adat perkawinan Gayo semakin sering kejadian. Bahkan di Kecamatan Bobasan dan sekitarnya adat itu telah ditinggalkan. Kecenderungan ini terang sejalan dengan perkembangan sosial-ekonomis, namun iapun memperlihatkan tendensi sosial bahwa sesuatu yang tak dilarang agama, tak ada salahnya untuk dilakukan.¹²

Tetapi hal-hal yang bersifat magis seperti *keumalon* (tenung) kelihatan menonjol antara lain, waktu mencari barang hilang dan pemilihan jodoh. Pada yang tersebut kedua ialah melihat cocok-tidaknya *pertemuan* antara sepasang pemuda dan gadis yang hendak dikawinkan. Demikian juga manakala kelihatan sepasang suami isteri selalu berselisih atau berkelahi. Untuk mengatasi hal itu dipanggillah dukun ahli yang pandai merukunkan keduanya. Di antara cara yang mereka tempuh kelihatan dengan menukar nama suami dan atau isteri sesuai dengan tuntutan ilmu mereka, lalu, pada beberapa daerah diulangi upacara akad nikahnya.¹³ Ada pula dengan cara memberi obat tertentu kepada kedua suami isteri yang sedang berselisih. Pada setiap usahanya itu para dukun selalu memulainya dengan jampi-jampi tertentu. Untuk sekedar memberi dasar agama maka setiap pembacaan jampi selalu dimulai dengan *Bismillahir Rahmanir Rahim* dan diakhiri

dengan berkat *do'a Lailaha Illallah*, sedangkan bacaan di tengah-tengahnya merupakan ucapan-ucapan magis yang tidak dapat difahami artinya.

Sesuai dengan perkembangan jiwa remaja di kalangan pemuda-pemudi, maka selain daripada sikap berpakaian rapi dan berhias, juga timbul dalam diri mereka keinginan untuk menghafal *do'a-do'a* yang bersifat magis seperti *do'a pengasih*, *pemanis* dan sebagainya. Kadang-kadang juga timbul perasaan khawatir akan penyakit-penyakit yang diduga disebabkan oleh manusia secara magis. Maka keinginanpun datang untuk mempelajari dan menghafal *do'a penolak bala* atau penghilang penyakit. Banyak lagi yang lain-lainnya seperti misalnya apa yang dinamakan *do'a sebengang* (supaya musuh tercengang), *do'a kebal* supaya tidak dimakan pisau dan sebagainya. Yang menarik daripada semua *do'a* itu ialah usaha pembungkusannya dengan Islam, yaitu pada memulainya dengan *Bismillahir Rahmanir Rahim* dan menutupnya dengan berkat *do'a Lailaha illallah*.

Dalam kehidupan orang-orang tua, di samping *do'a-do'a* yang tersebut tadi juga terdapat yang lainnya yang berhubungan dengan usaha atau ikhtiar supaya lebih sukses dalam mencari nafkah dan diharapkan terhindar dari bermacam-macam gangguan, baik dari manusia maupun syetan. Maka untuk kepentingan mencari ikan di laut terdapat apa yang dinamakan *pawang laut* atau *pawang pukat* yang ahli tentang laut, baik penjaganya maupun syetan jahat yang mengganggu didalamnya. Pawang itu selain daripada kuat dan berani juga menghafal beraneka *do'a* untuk melindungi dirinya dan kawan-kawannya waktu mencari ikan. Dan untuk mencari nafkah didalam hutan terdapat pula *pawang hutan* yang mengetahui tentang penjaga dan pengganggu di dalam hutan. Penjaga itu harus dihormati dan dimintakan izinnya sedangkan yang mengganggu harus di-

hindari atau sedapat mungkin dienyahkan. Karena itu kalau masuk hutan haruslah memberi salam dengan cara memberi isyarat-isyarat tertentu. Dan agar supaya lebih selamat dihafal pula do'a-do'a oleh *pawang hutan* itu. Juga do'a *pawang laut* maupun do'a *pawang hutan* itu semuanya dimulai dengan *Bismillahir Rahmanir Rahim* dan ditutup dengan berkat do'a *Lailaha illallah*.¹⁴

Dalam menghadapi orang sakit dan atau penyakit wabah (ta'un) terdapat dukun kampung yang pandai mengobati, menjampi dan menolak bala. Menurut faham mereka, di antara penyakit itu ada yang berasal daripada syetan, ada yang disebabkan oleh roh-roh jahat, ada yang disebabkan oleh manusia secara magis dan ada pula yang turunnya daripada Tuhan. Yang pertama, kedua dan ketiga harus dihadapi dengan do'a, jampi atau sihir, sedangkan yang keempat diusahakan dengan obat dan berdo'a kepada Yang Maha Kuasa.¹⁵ Bersamaan dengan itu ialah ketika menghadapi perempuan bersalin terutama jika terjadi kesukaran melahirkan. Biasanya *bideun* (bidan) akan mengusahakan pengatasannya dengan jampi atau do'a. Tertahannya kelahiran, menurut mereka, adalah karena gangguan manusia secara magis, syetan atau roh jahat. Maka di antara dukun itu ada yang mengatasinya dengan cara *teumamong* (kemasukan roh atau syetan) dan pada beberapa daerah kemasukan Nek Rabi,¹⁶ setelah mana ia dapat memberi petunjuk tentang obat-obatan. Baik do'a menghadapi orang sakit, mengusir syetan (wabah), mengatasi kesukaran bersalin maupun do'a *teumamong*, semuanya dimulai dengan *Bismillahir Rahmanir Rahim* dan ditutup dengan berkat do'a *Lailaha illallah*. Dan setelah anak lahir, sekalipun *bideun* yang membantu dan ibu yang melahirkan sendiri tidak pernah beribadat, namun mereka bermohon supaya anak itu segera di *azankan* ditelinga kanannya dan *diiqamahkan* ditelinga kirinya.¹⁷

Setelah anak bisa digendong atau ditidurkan dalam ayunan maka dengan gembira dan bahagia anak itu didendangkan dengan lagu-lagu yang meronok. Seperti halnya dengan do'a-doa tadi, dalam dendang inipun kelihatan nafas Islam dihembuskan. Ulama Aceh telah berusaha menyusun lagu-lagu itu sebaik-baiknya. Di Takengon lagu dendang anak hampir selalu disertakan dengan do'a (sekarang sudah banyak perubahan), seperti di bawah ini:

Laillaha ilallah

Anak ku ni jema mutuah (anakku ini orang bertuah)

Umurre gelah lanjut (ya Tuhan lanjutkan umurnya)

Rejekie gelah mudah (ya Tuhan mudahkan rezekinya)

Lagu dendang anak di bawah ini dinyanyikan ketika akan menidurkan atau menenangkan bayi, sungguhpun si pendendang sendiri kadang-kadang tidak mengerti artinya. Penyusunnya, tampaknya, tidak saja bertujuan seni semata tetapi mempunyai maksud berdo'a dan meningkatkan semangat perang.

Di antara dendang do'a:

Allah hai do doda idang

rangkang di blang tameh bangka

(dangan di sawah bertiang bangka)

beuri jang rayeuk putroe seudang

(laksalah besar buah hati)

tajak teubang perlak raya (pergi 'tebang hutan raya)

Allah hai do doda idang

Cicem subang jipho meugisa (burung subang terbang melayang)

Ngon tee rayeuk bungong keumang (setelah besar anak sayang)

kayee di simpang peugot keu bekhtera (kayu di simpang buat kapal).¹⁸

Di antara dendang perang:

Do - doda idang

rangkang di blang tameh bangka

beurijang rayeuk banta seudang (lekaslah besar buah hati)

beu eek ta prang nanggroo dumna (untuk menyerang semua negara)

Allah hai do - doda idi

anoe pasi riyeuk timpa (pasir pantai dihempas ombak)

Ngon tee rayeuk banta cutli (setelah besar buah hati)

ulee ili prang tapuga (ke segenap penjuru pergi berperang).¹⁹

Pada upacara kematian kelihatan tingkah laku Islam, antara lain, pada *menalkin* (mengajar) orang yang sedang sakrat, walaupun di waktu hidupnya tidak pernah beribadat, dengan *Lailaha ilallah*. Pada saat sakratnya seseorang, biasanya, segera dipanggil *teungku meunasah* atau, malah lebih baik lagi, seorang ulama besar untuk maksud *penalkinan* itu. Dengan mengucapkan *kalimah* itu si mait diharapkan akan diterima Tuhan dengan baik. Sebelum mait itu dikebumikan maka di antara upacara yang harus dilaksanakan adalah dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan. Kemudian setelah dikebumikan, oleh sebagian ulama Aceh *ditalkin* lagi dari atas kuburan mengenai jawaban si mait terhadap pertanyaan malaikat di dalam kubur. Oleh ahli waris, setelah itu, diadakan pula upacara *kenduri mait* (makan bersama dan berdo'a) yang kadang-kadang secara besar-besaran di samping ada pula yang secara sederhana. Dengan upacara itu ahli waris mengharapkan kiranya si mait dilepaskan Tuhan dari azab neraka. Kuburan dibuat melintang kiblat (Utara — Selatan) supaya waktu mait dibaringkan didalamnya dengan sendirinya menghadap kiblat. Dan jika si mait mempunyai anak dan harta

peninggalan maka pembagian hartanya dilakukan sesuai menurut hukum warisan Islam.

Di dalam pergaulan sehari-hari, pada waktu bertemu dan berpisah, bertamu ke rumah orang dan meninggalkannya tidak terdengar ucapan lain kecuali salam Islam, *Assalamu'alaikum*, dan jawabannya, *wa'alaikumussalam*. Jika pada waktu mengucapkan salam itu dirasakan perlu mengangkat tangan maka yang diangkat haruslah tangan kanan. Tangan kanan dianggap lebih mulia daripada tangan kiri. Memberi hormat atau memberi sesuatu dengan tangan kiri dianggap suatu penghinaan oleh orang Aceh. Orang kecil dan rendah sekalipun senantiasa merasa dihina atau dianggap enteng jika dihormati, dibalas hormat dan diberi dengan tangan kiri walau oleh orang besar dan mulia atau berpangkat.

Sesuatu pekerjaan yang biasanya dikerjakan secara bergotong-royong dengan sorak-sorai beramai-ramai maka yang terdengar diteriakkan bersama-sama adalah *selawat* kepada Nabi, yaitu *sa laaa wa leeeee* yang berasal dari ucapan bahasa Arab *wa salluuuuu alaiiiih* atau *wa shallu 'alaih* (ya Tuhan berilah rahmat kepada Nabi Muhammad). Di Takengon, sesuai dengan lidah Gayo, ucapan selawat itu berubah menjadi *waaa saaaaa luuuuu waaaa leeeee* (disingkatkan *wa sa lu wa le*, yang juga berasal dari *wa sallu 'alaih*).

Bilamana mendengar berita kematian, maka ucapan yang seponatan keluar dari mulut orang Aceh adalah *inna lillahi wa inna ilaihi raji'un* (kita semua milik Allah dan akan kembali kepadaNya). Dalam memulai sesuatu perbuatan yang baik orang Aceh diharapkan mengucapkan *Bismillah* (dengan nama Allah) dan manakala sudah selesai menutupnya dengan *Alhamdulillah* (segala puji milik Allah). Ketika terkejut atau tersentak, baik karena terantuk kaki ke batu maupun disebabkan yang lainnya, maka

yang terucap oleh mulut mereka adalah kata *alah* atau *ala he poe* (Takengon: *eleh*) yang berasal dari Allah atau Allah hai Poe (Allah ya Tuhan). Malah kadang-kadang terdengar Allah he Poe Lun (Allah hai Tuhanku). Rupanya, kecuali bagi mereka yang tidak terdidik sama sekali, baik pada waktu gembira maupun sedih ucapan Allah (lama-lama *alah*) telah merebut posisi penting dalam hati orang Aceh. Dan pada waktu berjanji kedengaran ucapan *insya Allah* (jika ada izin Allah) untuk tujuan lebih berhati-hati dan tidak tersalah janji.

Lebih jauh tingkah laku yang bernafaskan Islam dalam masyarakat Aceh kelihatan memasuki hampir segenap bentuk atau corak kesenian Aceh. Yang paling menonjol dan disukai daripadanya ialah *seudati* yang dimainkan oleh laki-laki dan *laweut* oleh perempuan. Sedangkan yang lainnya seperti *reufai*, *reubana*, *reubani*, *saman*, *dabuih* (dabus) dan yang lainnya, semuanya dimainkan oleh laki-laki. Ditinjau dari segi istilah namanya kata-kata yang diucapkan didalamnya tampak semuanya berasal dari kalimat bacaan ibadat dalam bahasa Arab. Jika ditinjau dari sudut asal kata terdapat perselisihan faham antara cendekiawan Aceh tentang *seudati*. Ada yang mengatakan berasal dari *syahadatain*, dua kalimat syahadat, yang sesuai dengan lidah Aceh, lama-lama berubah menjadi *seudati*. Jika dilihat dari ucapan-ucapan pertama yang dilagukan pada permulaan permainan *seudati* niscaya memang terdapat kemungkinan yang nampaknya membenarkan pendapat ini. Umpamanya ucapan yang dinyanyikan: *iiii ilallah astaghfirullah nyan hai euuuuuuuuu.....* dan *hum he allahum* yang diucapkan berulang-ulang adalah merupakan petunjuk bagi kebenaran pendapat ini.

Kalangan lainnya yang mengemukakan bahwa seni *seudati* itu berasal dari semacam ibadat berupa *zikir* utama, *Lailaha ilallah* yang dibaca beramai-ramai. Sampai sekarang

ibadat bentuk ini masih kelihatan banyak diamalkan. Kemudian, untuk menambah *khusyu'* (memusatkan ingatan kepada Tuhan), pada mulanya, diikuti dengan gerak kepala, lalu, untuk lebih *khusyu'* lagi ditambah dengan gerak badan dan, lama-lama, agar dirasakan lebih mantap, dilengkapi dengan gerak tangan dan akhirnya berdiri dengan gerak teratur seluruh badan. Dan supaya *zikir* ibadat itu lebih menarik maka pemainnya ditentukan 8 orang pemuda yang masing-masing mereka dihiasi dengan pakaian seragam yang indah.²⁰

Riwayat lainnya menjelaskan bahwa *seudati* itu berasal dari kata *sadati* yang dalam bahasa Arab ia berarti: Saudara-saudara atau tuan-tuan dan Bapak-bapak seperti lazim terdengar diucapkan oleh orang berpidato. Pendapat ini mendasarkan pendiriannya kepada isi seni *seudati* yang pada mulanya mengandung dakwah agama. *Seudati*, menurut mereka adalah semacam pementasan ajaran agama. Inipun dapat dimengerti karena di antara ucapan-ucapan yang terdengar dalam permainan itu terdapat: *salamu'alaikum*, *alaikum salam*, *allahumma neubi ampun* (hai Tuhan berilah keampunan), *hai rakan*, *beu tebat*..... (hai saudara tobatlah) dan sebagainya.²¹ Kini ucapan semacam itu tidak terdengar lagi dalam permainan *seudati*.

Sedangkan *laweut* berasal dari kata bahasa Arab *shalawat* yang kemudian, sesuai dengan lidah Aceh, berubah menjadi *silaweut*, lalu, *slaweut* dan akhirnya tinggal *laweut* saja. *Shalawat* adalah istilah untuk semacam bacaan yang mengandung tujuan berdo'a agar Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Secara teratur seni *laweut* bergerak dari bacaan *shalawat* yang berbunyi: *Shallallahu 'ala Muhammad, shallallahu 'alaihi wa sallam*. Bacaan ini diucapkan secara serentak dan berlagu oleh beberapa orang perempuan. Yang terbaik suaranya dari kalangan mereka dijadikan *ceh* (syekh) dan berfungsi membacakan do'a-

do'a dalam bahasa Arab atau bahasa Aceh. Bacaan-bacaan itu harus selalu berbentuk *nadham* (syair). Dengan suara merdu *ceh* membacakan satu bait, kemudian oleh kawan-kawannya diramaikan dengan membaca (reff.): *shallallahu 'ala Muhammad, shallallahu 'alaihi wa sallam*. Seperti halnya dengan perkembangan *seudati*, *laweut*-pun bergerak dengan cara dan arah serupa dari duduk sampai berdiri dengan gerak dan lagu teratur dan akhirnya ditetapkan pemainnya 8 orang gadis muda-muda. Masing-masing pemain dihiasi dengan pakaian seragam yang indah.²²

Dari uraian di atas kelihatanlah betapa Islam adalah merupakan bingkai utama penglihatan dan dasar utama bagi masyarakat dalam mengatur hidup sosial dan pribadi. Hal ini kelihatan sangat menonjol dan malah hampir total pada saat-saat kritis dari lingkaran kehidupan (*life-cycle*), seperti lahir, remaja, nikah dan maut. Walaupun tradisi lama yang bersumber dari sesuatu yang diluar Islam, namun bingkai atau bentuknya haruslah dibungkus oleh Islam. Dengan begini tampaknya diusahakan agar isi — substansi — secara berangsur di-Islam-kan pula. Perubahan yang total dari isi mungkin dirasakan sebagai terputusnya kontinuitas, tetapi dengan memulai dari *form* atau bentuk, mungkin isinya akan berubah secara berangsur.

2. Ulama dalam lintasan sejarah Aceh.

Adat bak Poteu Meureuhom, hukom bak Syiah Kuala,²³ (Adat pada Poteu Meureuhom, hukum pada Syiah Kuala), yang senantiasa kedengaran di Aceh kiranya dapat menjadi sebagian pertanda bahwa pada zaman Kesultanan Aceh ulama berperan sebagai pemberi *fatwa* (keputusan hukum). Peranan itu sejak zaman Kesultanan Aceh sampai saat berdekade demikian besar sehingga pada setiap periode adanya ulama mendampingi pemerintah dirasakan perlu. Syiah Kuala (ulama) pada zaman Kesultanan Aceh, *teungku Kadli*

(pemberi fatwa keputusan hukum Islam) pada masa penjajahan Belanda (MAEBKATRA) pada waktu pendudukan Jepang.²⁴ Majelis Permusyawaratan Ulama (kemudian Majelis Ulama) mendampingi Gubernur, Bupati, Camat dan *teungku meunasah* membantu keucik (Kepala) kampung di seluruh Aceh sampai dengan dewasa ini menjadi bukti atas kebenaran keterangan itu.²⁵

Ulama dapat dianggap sebagai teknokrat Aceh pada zaman Kesultanan. Mereka memiliki ilmu dalam berbagai disiplin dan memanfaatkannya untuk kepentingan pendidikan, kebudayaan, politik, sosial, ekonomi, pertanian dan lain-lainnya. Pada waktu itu adalah satu-satunya korp ilmuwan dan pendidik. Pusat-pusat pendidikan sejak dari tingkat *meunasah* (pendidikan rendah di surau), *ranggang* (pendidikan menengah) dan *balee* (pendidikan tinggi) mereka dirikan di seantero Aceh. Sebagian besar daripadanya adalah dengan usaha mereka sendiri dan kadang-kadang juga dengan bantuan penguasa. Sultan-sultan Aceh ada yang menjadi murid atau sekurang-kurangnya pernah memohon petunjuk dari para ulama. Sejak zaman itu sampai dengan masa penjajahan Belanda para ulamalah yang sering mengepalai pembukaan areal tanah persawahan baru, pembangunan irigasi, penyusunan kampung, jalan-jalan dan sebagainya.

Sebelum sesuatu kampung dibangun mereka lebih dulu mendirikan *meunasah* (walaupun pada mulanya secara darurat), tempat beribadat dan, sementara waktu, untuk memondok bersama. Kemudian setelah perkampungan siap dibangun, *meunasah* tetap sebagai tempat beribadat, pendidikan anak-anak, pengajian agama untuk orang tua-tua, merundingkan kepentingan kampung dan sebagainya. Beberapa lama kemudian, jika keadaan mengizinkan mereka dirikan pula *ranggang* untuk anak-anak yang ingin dan sanggup melanjutkan pelajaran setelah tamat pendidikan

meunasah. Apabila ulamanya cukup besar dan berilmu *rangrang* itu, biasanya — seperti terjadi pada beberapa kampung — ditingkatkannya menjadi *dayah* sehingga merupakan sebuah kompleks yang didalamnya tergabung *rangrang* dalam jumlah yang cukup dan sebuah atau beberapa buah *balee* (lihat sketsa denah *dayah*).

Dayah-dayah yang didirikan oleh mereka itulah yang melahirkan ulama yang tersebar di dan bahkan ke luar Aceh. Merekalah yang bekerja sebagai pendidik terus-menerus membuktikan pengorbanan mereka untuk membimbing rakyat membela kebenaran.²⁶ Bahkan pada waktu Kesultanan Aceh diserang Belanda, para ulama dengan gigih bertahan. Mula-mula bersama Sultan sebagai lambang kerajaan, kemudian setelah Sultan dan Polim terpaksa menyerah pada tahun 1903,²⁷ mereka melanjutkan perjuangan selama masa melebihi 30 tahun di bawah pimpinan ulama-ulama Tiro.²⁸ Para ulama selama masa perang itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak ingin kekuasaan. Akan tetapi setiap daerah yang telah dapat direbut kembali dari kekuasaan Belanda dengan ikhlas diserahkan kepada *uleebalang* yang sebelumnya sudah menguasainya.²⁹ Itulah di antara lain sebabnya mengapa banyak *uleebalang* yang membantu perjuangan ulama. Tetapi karena kekurangan-kekurangan dalam bidang persenjataan dan diplomat perang ditambah lagi dengan mundurnya semangat perang, terutama setelah meninggalnya Teungku Chik di Tiro maka perlawanan ulama lainnya bersama rakyat semakin lumpuh. Sungguhpun demikian gerilya secara kecil-kecilan masih tetap berjalan dan malah sampai dengan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, tahun 1945, masih ada pahlawan-pahlawan Aceh yang masih tetap dalam suasana gerilya. Mereka tidak lagi mengadakan perlawanan tetapi bertekad tidak menyerah kepada Belanda. Sebagian mereka terdapat di sebuah pegunungan yang tinggi dan lebar di daerah Sa-

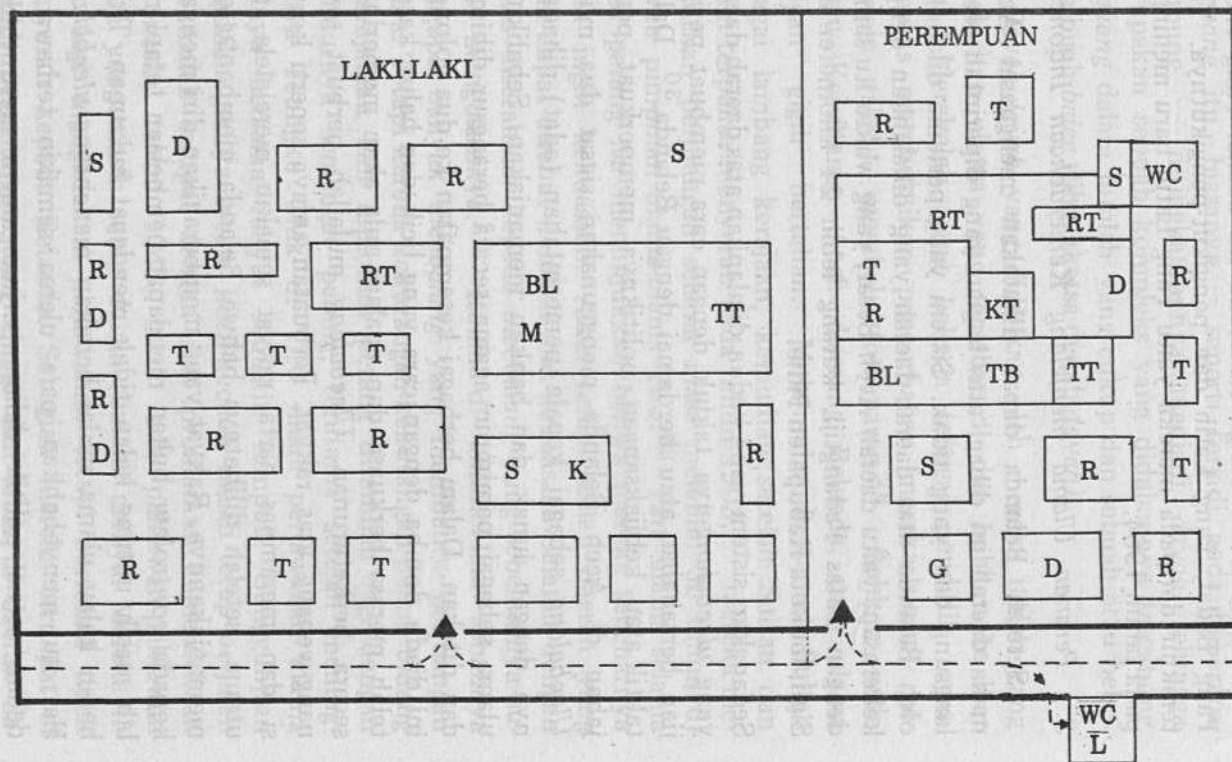
markilang, Aceh Tengah. Mereka itu adalah Pang Akub, Pang Badal, Pang Latih dan pengikut-pengikutnya. Yang terakhir daripada mereka yaitu Pang Latih baru meninggal pada tahun 1964.

3. *Peranan Ulama menjelang Kemerdekaan Indonesia.*

Setelah Belanda dapat dikatakan menguasai Aceh, maka daerah ini dibagi atas bagian yang diperintah secara langsung dan yang tidak. Sistem yang pertama dilakukan oleh Belanda atas daerah-daerah yang dikalahkan dengan kekerasan, yaitu daerah Aceh Besar, yang waktu itu sampai dengan batas Padangtiji, kurang lebih 24 kilometer dari Sigli, ibukota Kabupaten Pidie.

Sedangkan sistem yang kedua dijalankan atas daerah-daerah yang *uleebalang*-nya takluk dengan cara membuat perjanjian bersahabat atau berdamai dengan Belanda.³⁰ Dalam taktik atau kebijaksanaan politiknya memperkuat penjajahan di Aceh Belanda menggunakan siasat dua muka. *Uleebalang* sebagai kepala pemerintahan (adat) dihadapi dengan lunak dan bahkan memanjakan. Sebaliknya, ulama sebagai pemimpin agama secara berangsur dihipnotis dan ditekan. Dalam berbagai kesempatan ke dua golongan ini diadu domba dengan cara yang licik dan halus, karena telah merasa berkuasa dan apalagi pula akan memerintah secara berketurunan. *Uleebalang* mulailah berbuat sewenang-wenang atas rakyat. Perbuatan aniaya seperti korupsi dan merampas harta rakyat semakin merajalela, terutama, setelah dilihatnya bahwa Belanda membantu dan memanjakannya. Rakyat yang memberanikan diri mengadu kepada *controleur* bukan mendapat pembelaan tetapi malah masih untung kalau tidak mendapat hukuman. Tidak heran kalau ulama mulai bersikap menentang *uleebalang*. Hal itu menyebabkan para ulama semakin terbawa ke dalam arena politik dalam perjuangannya meruntuhkan

SKETS DAYAH PULOKITUN, BIREUEN, ACEH UTARA



Keterangan:

BL = Balee laki-laki; D = Dapur umum; G = gudang; K = kolam tempat wudlu'; R = rangkang; RD = rangkang dan dapur; RT = rangkang dan tempat tidur; T = tempat tidur; TT = tempat tidur tamu; BP = Balee perempuan; KT = kamar tidur Teungku; S = sumur/kamar mandi; WC = kakus perempuan; WCL = kakus laki-laki; TB tempat duduk teungku di bale ketika mengajar; BLM = balee dan mushalla.

Tempat duduk teungku di balee pada waktu mengajar kelihatan ditengah-tengah antara BL, balee laki-laki dan BP, balee perempuan. Di antara tujuannya ialah bahwa murid-murid laki-laki dan perempuan yang setingkat dapat diajar sekaligus.

kekuasaan *uleebalang*.³¹

Sikap Belanda dan sebagian *uleebalang* yang demikian menyebabkan kebencian ulama kepada mereka semakin memuncak. Maka ketika terdengar berita kekalahan Belanda dalam Perang Dunia II, mereka dengan gembira menanti kedatangan Jepang ke Aceh. Pada mulanya mereka mengharapkan akan dapat bekerjasama dengan Jepang dalam bidang pengembangan agama dan politik. Tetapi kemudian ternyata bahwa Jepang, seperti halnya dengan Belanda lebih percaya kepada *uleebalang* daripada ulama. *Uleebalang* diangkatnya sebagai Sunco (Camat), Gunco (Wedana) dan sebagai pegawai dalam pemerintahannya. Sedangkan ulama merasa bahwa mereka semakin dicurigai, diawasi dan karenanya semakin merasa terancam. Kecurigaan itu makin dipertebal sebab di beberapa tempat di Aceh Utara (di Bayu dan Pandrah) terjadi pemberontakan-pemberontakan terhadap Jepang.

Ulama PUSA adalah yang paling dicurigai sehingga dipenghujung 1944 mereka, termasuk Ketuanya Teungku Muhammad Dawud Beureueh, diundang oleh Jepang untuk menghadiri rapat penting di suatu tempat di Seutui, Kutaraja. Menurut keterangan salah seorang mereka, Jepang merencanakan akan menyergap para pemimpin ulama itu sekaligus untuk dibawa dan dibunuh di Takengon, Aceh Tengah. Tetapi untunlah pada malam itu kapal terbang Sekutu melayang-melayang di atas kota Kutaraja sehingga, mungkin karena takut, Jepang mengundurkan rencananya itu.³²) Rahasia Jepang ini kemudian diketahui oleh ulama-ulama Aceh sehingga sebagian besar mereka segera mengasingkan diri, bersembunyi atau pindah-pindah tidur malam hari. Tidaklah mengherankan kalau kebencian kepada Jepang-pun semakin memuncak pula. Maka pada waktu terdengar berita kekalahan Jepang pada tahun 1945 para ulama Aceh bersama rakyat segera bergerak mengusir mereka.

Setelah kelihatan pula bahwa Belanda ingin menjajah lagi, maka golongan *uleebalang*, sungguhpun tidak semua, merasakan akan mendapat kemenangan yang menguntungkan. Sedangkan pihak ulama merasakan seolah-olah terlepas dari mulut buaya lalu akan diterima oleh mulut harimau. Maka segera setelah tersiar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, yang kebetulan terlambat sampai ke Aceh, para ulama dengan penuh semangat menyambutnya. Rakyat Aceh pada waktu itu terpecah dua, sebagian di bawah pengaruh *uleebalang* dan yang lainnya, yang malah terbanyak, berada di bawah pimpinan para ulama. Sebagian besar *uleebalang* pada waktu itu, karena ingin mendapat kembali kedudukannya sebagai penguasa berketurunan, memihak secara halus dan terselebung kepada Belanda dan berusaha mengembalikannya ke Aceh. Tetapi pihak ulama bertekad bulat bersama rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia termasuk Aceh. Para ulamalah yang memimpin perjuangan waktu itu, sungguhpun tidak terlupakan beberapa orang *uleebalang* yang sejak zaman Belanda telah menunjukkan sikap nasionalismenya. Itulah sebabnya mengapa pada masa permulaan kemerdekaan yang memegang kendali pemerintahan di Aceh, baik sipil maupun militer, adalah golongan ulama.³³

Konsistensi atau keterusan dalam mengisi jenis peranan yang ingin dimainkan adalah kesan yang paling menonjol yang bisa dilihat dari lintasan sejarah ini. Ulama, karena tugas dan anggapan terhadap dirinya, selalu mencari identifikasi diri dengan rakyat Aceh. Karena itu mereka bukan saja muncul sebagai pendidikan atau pemimpin perjuangan tetapi lebih jelas lagi sebagai perumus keinginan dan hasrat rakyat.

Pemberontak atau perlawanan yang mereka pimpin, — terlepas dari kekerasan dan kekejamannya — adalah pantul-

an dari reaksi terhadap segala ketidakwajaran sosial dan kulturil yang dirasakan.

ULAMA DALAM MASYARAKAT ACEH DEWASA INI

1. *Panggilan dan tingkat pengakuan terhadap ulama*

Panggilan kepada seorang ulama di Aceh adalah *teungku*. Semula gelar *teungku* hanya diberikan kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama, berahlak mulia dan dalam waktu tertentu pergi *meudagang* (menuntut ilmu) ke salah sebuah *dayah* (pesantren) yang biasanya jauh dari kampungnya.³⁴

Karena *teungku* dianggap sebagai panggilan penghormatan, sekarang sudah sering dipakai dalam percakapan sehari-hari untuk orang-orang tua yang dianggap atau dirasakan perlu dihormati. Atau dalam bertutur kata dengan orang-orang yang belum dikenal.

Orang-orang yang mendapat panggilan *teungku*, apapun dasar panggilan tersebut, biasanya diikuti dengan menyebutkan namanya, seperti Teungku Amin, Teungku Ali dan sebagainya. Tetapi untuk ulama terhormat, berilmu dan berjasa di *dayah*, panggilan *teungku* itu diiringi dengan nama tempat di mana ia lahir atau berjasa, misalnya, Teungku di Pulokitun (mendirikan *dayah* di Pulokitun, Bireuen, Aceh Utara), Teungku di Beureu-eh (lahir di Beureu-eh dan mendirikan *dayah* di Usi Dayah, Pidie), Teungku di Kruengkalee (lahir dan mendirikan *dayah* di Kruengkalee, Aceh Besar). Ulama yang termasuk ke dalam golongan ini kadang-kadang disebut juga namanya di belakang *teungku* (sungguhpun dirasakan kurang hormat) di samping menyebut nama

tempatnyalahir atau berjasa. Misalnya, Teungku Muhammad Saleh (di) Pulokitun, Teungku Muhammad Dawud (di) Beureu-eh, Teungku Haji Hasballah (di) Inderapuri, Teungku Haji Abdullah (di) Ujong Rimba, Teungku Haji Hasan (di) Kruengkalee dan sebagainya.³⁵

Di Gayo, Aceh Tengah, terdapat perbedaan yang menarik mengenai panggilan terhadap seorang *teungku*. Di daerah *deret* (Jemat dan Lingga), kurang lebih 50 kilometer ke arah Timur Takengon, terdapat seorang ulama yang populer dengan panggilan Teungku Nasuh karena lahir dan berjasa di Nasuh. Di Blangkeujeuren (sekarang Aceh Tenggara) terdapat Teungku Pining (lahir di Pining) dan Teungku Seure (lahir di Seure). Kedua ulama yang tersebut terakhir, karena mulia dan keramat dalam pandangan masyarakat, dipanggil Datok Pining dan Datok Seure. Rakyat, paling kurang dalam daerah Blangkeujeuren, tidak berani bermain-main di hadapannya atau mempermainkannya dibelakangnya. Karena itu menyebut namanya dirasakan berdosa. Berbeda keadaannya dengan daerah-daerah sekitar danau Lauttawar, Takengon. Seorang ulama di daerah ini, betapapun alimnya dan walaupun setelah kawin, gelar *teungku* tetap diiringi dengan menyebut namanya tanpa nama tempatnya lahir atau berjasa. Misalnya Teungku Silang, Teungku Abdul Jalil, Teungku Ilyas Leube dan sebagainya. Jika berhadapan, panggilan kepadanya hanya *teungku* saja. Akan tetapi, sebaliknya, untuk orang yang dianggap awam atau katakanlah yang tidak berilmu, setelah kawin tidak boleh disebut-sebut namanya lagi kecuali pada saat-saat sangat perlu.³⁶

Di Labuhan Haji, Aceh Selatan, terkenal seorang ulama bernama Teungku Haji Muda Wali. Ia mendirikan *dayah* yang diberinya nama Darussalam Labuhan Haji. Demikian hormat muridnya kepadanya sehingga di muka atau dibelakangnya mereka memanggilnya *buya* saja tanpa menye-

but namanya. Bagi mereka panggilan itu cukup dimengerti dan bahkan dirasakan sebagai tidak sopan menyebut namanya. Kata *buya* itu mungkin sekali berasal dari Sumatera Barat yang pemakaiannya dimungkinkan oleh karena Haji Muda Wali sendiri berasal dari sana dan sebagian besar penduduk Aceh Selatan menggunakan bahasa Minang sebagai bahasa pengantar dalam pergaulan sehari-hari. Menghindari menyebut nama itu tampaknya merupakan salah satu daripada cara-cara penghormatan. Dalam kalangan yang bukan muridnya panggilan terhadap ulama ini kedengaran tetap Teungku Haji Muda Wali atau Teungku Muda Wali saja. Ulama yang paling dihormati dan disegani karena ketinggian ilmu dan keluhuran budi, digelar di Aceh *Teungku Chik*. Amatlah tidak sopan bahkan dianggap sebagai seolah-olah akan kualat, baik oleh mereka yang terdidik lebih-lebih lagi oleh orang awam terutama pada zaman lampau, bilamana seseorang berani atau dengan sengaja menyebut-nyebut nama seorang ulama yang telah mendapat gelar *Teungku Chik*. Sebagian orang Aceh menganggap menyebut namanya itu sebagai suatu dosa.³⁷ Oleh karena itu tidaklah mengherankan manakala nama asli seorang *teungku chik*, seperti Teungku Chik di Tiro, Teungku Chik di Tanoh Abee, Teungku Chik di Kutakarang dan lain-lainnya tidak diketahui oleh umum kecuali oleh keluarga, orang-orang terdekat atau para peneliti yang sengaja menyelidikinya.

2. Komunikasi antar ulama

Hubungan antar ulama *dayah*, tidak erat, jika tidak dapat dikatakan masing-masingnya berdiri sendiri. Surat-menyurat antara mereka dikatakan tidak ada. Malah kadang-kadang ada gejala-gejala di antara mereka untuk membiarkan atau merasa tidak rugi jika *dayah* yang lain tumbang. Ada yang lebih ekstrim lagi yaitu seorang ulama dari suatu *dayah* berusaha mempengaruhi dan menarik sebanyak

mungkin murid-murid dari *dayah* yang lain. Akibatnya, jika ketahuan, terjadilah pertentangan dan saling menjerit-jerit. Di zaman Kesultanan situasi semacam itu mungkin tidak begitu tajam, tetapi kampanye memperbanyak murid untuk *dayah* sendiri senantiasa ada.

Hubungan antar ulama yang selalu memperlihatkan kekuatannya terdapat pada pertalian batin di bawah satu akidah Islamiah dan sistem kerja, misalnya pada mendirikan *dayah*, mengajar dan dalam tehnik membimbing masyarakat. Hubungan hierarkis antara ulama tidaklah ditentukan oleh struktur stratifikasi yang jelas tetapi oleh untai guru dan murid. Bekas guru tetap akan selalu dianggap lebih tinggi oleh bekas muridnya walaupun si murid telah pula mempunyai nama yang harum. Antara *dayah* sesama juga tidak ada hubungan yang tetap, lebih-lebih dengan apa yang dinamakan hubungan administratif, kecuali apabila ulama pada *dayah* yang satu adalah murid daripada ulama pada *dayah* yang lain. Sekalipun demikian, dari segi pelajaran didapat persamaan rencana pelajaran dan buku pegangan. Persamaan semacam itu mungkin disebabkan saling berkaitnya beberapa untai hubungan guru — dan — murid antara ulama dan antara *dayah* mereka. Dan tak pula kurang pentingnya faktor kekuasaan Sultan, yang biasanya selalu dikelilingi oleh ulama-ulama.

Apabila sesuatu hubungan antara ulama terjadi karena ikatan guru dan murid maka realisasinya biasanya terlihat dalam bentuk patuh, hormat, setia, bersedekah dan senantiasa mengikuti aliran (mazhab) yang dianut oleh guru. Murid, sungguhpun telah menjadi ulama, dapat diperintah oleh guru, lebih-lebih jika ikatan itu dalam bentuk hubungan tasawwuf, tarikat, tawajuh atau suluk. Kewajiban membayangkan wajah guru sebagai *wasilah* (perantara) dengan Tuhan pada setiap kali beribadat dan berdo'a menyebabkan kesetiaan dan kepatuhan kepada guru (diusahakan oleh

pihak murid agar) semakin kuat dan rapat. Jika tidak, murid khawatir kalau-kalau do'a atau ibadatnya tidak segera dikabulkan oleh Tuhan. Dalam hal seperti ini, jika guru berkehendak sesuatu terutama pembangunan *dayah* atau lain-lainnya maka muridnya segera merasa terpanggil untuk memberi sedekah sebagai bantuan. Selain daripada itu pihak murid, walaupun sudah berdiri sendiri, senantiasa merasa berkewajiban mengunjungi gurunya pada waktu-waktu tertentu. Dan dalam kunjungan yang demikian sudah tentu membawa bahan-bahan sedekah yang akan diberikan kepada gurunya.

Antara ulama yang berlainan aliran, baik tasawwuf maupun mazhab, terdapat jurang pemisah batin (sepintas lalu tidak kelihatan) yang kadang-kadang begitu tajam sehingga bisa menimbulkan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, yang dekat dengan penguasalah biasanya yang akan menggondol kemenangan. Misalnya, golongan penganut aliran tasawwuf *wujudiah* yang dikembangkan oleh Syekh Hamzah Fansuri mendapat kemenangan karena dekat dengan penguasa selama tiga zaman pemerintahan yaitu Sultan Alaidin Ri'ayat Syah IV Saidil Mukammil (997—1011 H = 1589 - 1604 M.), Sultan Muda Alaidin Ali Ri'ayat Syah V (1011-1015 H = 1604-1607 M). dan Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam (1016-1045 H = 1607-1636M).³⁸ Kemudian dikalahkan oleh golongan penganut tasawwuf ahlussunnah wal jama'ah, karena dekat dengan penguasa, pada zaman pemerintahan Sultan Alaidin Mughayat Syah Iskandar Tsani (1045 — 1050 H = 1641 — 1645 M)³⁹ dan zaman-zaman seterusnya. Di zaman penjajahan Belanda pertentangan itu bergeser kepada masalah-masalah hukum Islam (fikih) dan pendekatan mengenai pokok ajaran Islam, sehingga para ulama terpecah ke dalam apa yang dinamakan kaum tua dan kaum muda. Pertentangan ini tidak pula kurang hebatnya sehingga Belanda, secara licik, dapat menggunakannya sebagai alat untuk memecah

belah dan mengadu domba. Barulah hubungan antar sebagian besar ulama Aceh erat kembali setelah berdirinya organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939.

Setelah Indonesia merdeka pertentangan dalam aliran hukum Islam atau mazhab berangsur berkurang, sungguhpun tidak dapat dikatakan hilang sama sekali. Ulama-ulama Perti atau yang tergabung ke dalam organisasi *Inshafuddin* di Aceh menganut mazhab Syafi'ie dan sebagian besar mengikuti sesuatu aliran dalam tasawwuf. Mereka tampak tidak sefaham dengan ulama Muhammadiyah yang tidak menganut sesuatu mazhab apalagi aliran tasawwuf. Sedangkan ulama PUSA, walaupun tidak secara tajam bertentangan dengan ulama Perti dalam hal mazhab, dalam banyak hal lebih cenderung dekat dengan ulama Muhammadiyah.

Di zaman Kesultanan, yang dapat dikatakan sebagai masa jaya ulama, terdapat hanya satu mazhab resmi dalam pengamalan *fikih* (hukum Islam) untuk daerah Kesultanan Aceh, yaitu mazhab Syafi'ie.⁴⁰ Mazhab-mazhab lainnya, Hanafi, Maliki dan Hambali untuk diamalkan secara individu tidak dilarang. Penetapan mazhab itu mungkin bertujuan antara lain untuk memelihara persatuan dan kesatuan umat. Tetapi dalam penganutan dan pengalaman ilmu *tasawwuf* (mistik) terdapat beberapa aliran. Diantaranya yang tampak lebih menonjol adalah aliran *ahlus sunnah wal jamaah* (dalam tasawwuf) dan *wujudiyah*. Penganut aliran pertama berkeyakinan bahwa Tuhan dan alam, masing-masing mempunyai substansi yang berbeda, yaitu yang satu *Al Khaliq* (Yang Menjadikan) dan yang kedua adalah *makhluk* (yang dijadikan). *Al Khaliq* berbeda dengan *makhluk*, baik zat dan sifat maupun perbuatan.⁴¹ Sedangkan penganut aliran kedua berpendapat bahwa Tuhan tajalli (menyatakan diri) dalam wujud alam. Dengan demikian, menurut mereka, wujud Tuhan ber-

satu dengan wujud alam, lalu, kedua wujud itu menjadi Esa. Maka wujud alam seluruhnya menjadi Esa pula. Dan akhirnya sampai kepada tingkat Tuhan bersatu dengan alam dan alam bersatu dengan Tuhan.⁴² Di dalam tingkat yang lebih tinggi mereka ini menganggap dirinya berada dalam suatu keadaan berpadu sehingga sampai kepada suatu kesimpulan *anta hua wa hua anta* (engkau adalah DIA dan DIA adalah engkau).⁴³

Antara kedua aliran ini kadang-kadang terjadi pertentangan dan bahkan persaingan yang tajam. Akan tetapi sejauh yang telah diketahui tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Hal ini mungkin disebabkan karena Sultan sendiri menganut atau, sekurang-kurangnya, memihak salah satu aliran sehingga yang lainnya tidak berani bergerak. Sultan Iskandar Muda dikabarkan mengikuti aliran tasawwuf gurunya, Syekh Syamsuddin As-Asumatrani (murid Hamzah Fansuri) yang menganut aliran *wujudiyah*.⁴⁴ Maka Syekh Nurudin Ar Raniry yang pada masa itu telah pernah datang ke Aceh, karena menganut aliran tasawwuf *ahlus sunnah wal jamaah*, tidak mendapat sambutan. Ia pulang ke Mekah dan barulah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani ia datang lagi ke Aceh dan berhasil menyebarkan ajaran tasawwuf yang dianutnya.⁴⁵ Ini memberi petunjuk bahwa pertentangan antara aliran-aliran itu pernah tegang dan tajam sehingga mungkin membahayakan ketenteraman pribadi atau keamanan masyarakat.

Pada kurang lebih pertengahan akhir masa penjajahan Belanda, pertentangan antara aliran-aliran tasawwuf bergeser kepada perselisihan antara ulama aliran tradisional (kaum tua) dengan ulama reformist (kaum muda). Dalam penganutan dan pengamalan tasawwuf, mungkin karena telah meluasnya pengaruh Syekh Nurudin Ar Raniri dan Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, sebagian besar ulama Aceh cenderung berpegang atau memihak kepada aliran *ahlus*

sunnah wal jamaah. Perbedaan antara kedua aliran ulama, tradisional dan reformist, seperti yang akan kita lihat nanti, menonjol dalam mengambil ketetapan keputusan hukum Islam (fikih). Kelompok pertama menamakan dirinya *ahlus sunnah wal jamaah* (dalam hukum Islam) atau lebih populer dengan julukan kaum tua, sementara yang kedua menyebut dirinya *ahlus sunnah wal jamaah* (dalam hukum Islam) atau lebih populer dengan julukan kaum tua, sementara yang kedua menyebut dirinya *ahlus sunnah* atau kaum muda (reformist).

Pertentangan antara kedua kelompok ini, seperti halnya dengan kedua aliran tasawwuf pada zaman Sultan, terjadi dalam bentuk perdebatan, perorangan atau berkelompok, hampir di seluruh Aceh. Setelah selesai berdebat muncullah tuduh-menuduh dalam bentuk saling menyalahkan, dan bahkan saling menganggap sesat. Sedangkan aliran-aliran tasawwuf dalam berbagai versinya masih kelihatan ada diamalkan dalam masyarakat. Dengan demikian telah terdapat tiga aliran amal keagamaan di Aceh, yaitu: (1) aliran tasawwuf dengan berbagai versinya, (2) kaum tua (tradisionil) dan (3) kaum muda (reformist). Perbedaan antara golongan kedua dan ketiga menonjol dalam segi pendekatan mengenai pokok ajaran Islam. Kaum tua mempunyai kecenderungan yang ketat untuk mendekatinya mulai dari kitab-kitab fikih dari sesuatu mazhab (di Aceh mazhab Syafi'ie), lalu meningkat secara bertahap menuju sumber pokok ajaran, yaitu Al Qur'an dan Hadis Nabi. Kaum muda berusaha mendekati ajaran itu mulai langsung dari Al Qur'an dan Hadis. Kemudian, jika dirasa perlu umpamanya terdapat kesukaran dalam memecahkan masalah, secara bertahap menurun meneliti pendekatan ulama-ulama terkemuka atau pemuka-pemuka mazhab di masa lampau mengenai masalah yang sedang didekati.

Cara pendekatan yang berbeda sekian jauh menyebab-

kan perbedaan karakter dan kecenderungan dalam tingkah laku kehidupan. Kaum tua dalam geraknya kelihatan lebih lamban dan bertahan pada tradisi, sedangkan kaum muda lebih dinamis dan menginginkan perubahan kehidupan sepanjang tidak bertentangan dengan kandungan Al Qur'an dan Hadis. Hal itu kiranya mudah difahami karena kaum tua masih asyik dengan mendalami pertentangan-pertentangan yang cukup rumit dalam mazhab yang dianut (karena antara ulama-ulama penganut mazhabpun terdapat perselisihan-perselisihan pendapat) sehingga tidak sedikit terbuang waktu untuk itu. Sedangkan kaum muda langsung saja berpegang kepada isi Al Qur'an dan Hadis. Maka kelihatannya — dan barangkali disitulah letak sebagian kedynamisannya — bahwa jalan yang mereka tempuh sering mempunyai jarak yang lebih pendek. Mereka cepat sampai kepada yang dituju dan karena itu lebih berkesempatan untuk memikirkan masalah lain yang berhubungan dengan situasi, perkembangan zaman dan ilmu dan pembangunan dunia sekitarnya.

Selain daripada itu pendekatan secara langsung pokok ajaran Islam, Al Qur'an dan Hadis, menyebabkan orang akan berfikir lebih luas daripada semata-mata terkurung dalam skope hukum Islam yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih. Sebab yang kelihatan menonjol dipertentangkan dan diperdalam dalam kalangan ulama-ulama kaum tua ialah masalah-masalah hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih itu. Ini berarti bahwa yang diperbincangkan adalah salah satu sudut saja daripada ajaran Islam, yaitu bidang hukum. Ajaran-ajaran lainnya, kelihatannya, diabaikan atau, sekurang-kurangnya, tidak begitu menarik untuk digali selama beberapa ratus tahun. Bagian yang terabaikan inilah yang menjadi sorotan dari pihak ulama-ulama kaum muda. Itu pulalah sebabnya mengapa mereka tidak lagi merasa begitu terpukau dengan masalah-masalah fikih saja. Mereka tertarik dengan yang lebih luas mencakup masalah

sosial dan manusia pada umumnya. Mereka telah menemukan bahwa Al Qur'an tidak hanya mengandung isi hukum atau fikih saja tetapi mencakup berbagai ajaran mengenai segenap aspek kehidupan yang sudah dan yang akan ditempuh oleh manusia sepanjang zaman. Buat mereka ajaran bagian ini lebih penting menjadi pemikiran dan pendalaman karena sifatnya yang berkembang, sedangkan bidang fikih karena sifatnya yang agak lebih tetap maka yang senantiasa harus difikirkan hanyalah metode penyampaiannya yang serasi sehingga diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶

3. Organisasi ulama

Ulama-ulama Aceh pada umumnya memasuki organisasi-organisasi Perti, Muhammadiyah dan PUSA. Ulama-ulama *dayah* sebagian besar menggabungkan diri ke dalam organisasi Perti.⁴⁷ Di antara kegiatan Perti yang kelihatan menonjol (tidak termasuk politik) ialah mendidik murid-murid di dalam *dayah* di samping mengamalkan tasawwuf dengan praktek *tarikat*, *tawajjuh* atau *suluk*. Tujuan yang sering dikemukakan untuk dicapai, antara lain, membawa manusia ke arah ilmu agama, akhlak ulama, kesucian batin, suka mengajar dan zuhud (tidak mementingkan kehidupan dunia kecuali sekedarnya). Oleh karena itu pusat kegiatan harus ditempatkan di kampung-kampung atau desa-desa yang jauh dari kesibukan-kesibukan kota yang menurut mereka telah penuh dengan maksiat. Sejak tahun 1960-an ulama-ulama *dayah* di Aceh, sungguhpun tampak tidak meninggalkan Perti, menggabungkan diri ke dalam satu organisasi baru yang mereka namakan "Inshafuddin".

Kelanjutan kehidupan Perti di Aceh kelihatannya sebagian besar tergantung kepada ketahanan *dayah* yang untuk masa ini (1970 an) ditinjau dari jumlah murid dan tingkah laku belajarnya menunjukkan gejala-gejala menurun. Murid-murid sebagian besar berada dalam umur belasan

tahun dan suka pindah ke *dayah* lain yang diduga lebih maju (dan kemudian mungkin pula pindah lagi) sebelum pelajaran yang ditargetkan selesai. Salah seorang murid di *dayah* BUDI Lamno mengatakan bahwa kepindahannya kesana adalah karena telah bosan pada *dayah* tempat belajarnya semula di Aceh Utara. Dalam wawancara dengan beberapa orang ulama *dayah* kelihatan bahwa mereka amat sungguh-sungguh sekali memperbincangkan masalah itu dan mencari jalan bagaimana supaya murid-murid *dayah* percaya kepada dirinya dan yakin akan kebaikan hari depannya sebagai ulama *warasatul anbiya*.⁴⁸ Akan tetapi sejauh tanda-tanda yang dapat dibaca ialah adanya gejala-gejala yang memperlihatkan adanya rasa kurang percaya dari pihak murid kepada *dayah* (kecuali yang jauh terisolir) bagi jaminan masa depan yang lebih cerah. Sungguhpun kelanjutan kehidupan Perti, seperti kita singgung tadi, bergantung sebagian besar kepada *dayah* namun tidak berarti bahwa semua *dayah* di Aceh berorientasi kepada Perti. Pengaruh Perti mulai terasa terutama setelah zaman kemerdekaan. Umpamanya murid-murid Teungku Haji Muda Wali dari *dayah* Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan, setelah kurang lebih 10 tahun Indonesia merdeka mendirikan *dayah-dayah* yang sebagian besarnya berorientasi kepada Perti.

Suatu ajaran yang umumnya terdapat pada setiap *dayah* ialah bahwa menuntut ilmu dan mengajar adalah ibadah. Setiap ulama *dayah* harus mempunyai prinsip yang ketat mengenai itu serta berusaha menanamkannya sedalam-dalamnya ke dalam jiwa murid-muridnya. Untuk kepentingan kelanjutan ajaran itu maka setiap murid, setelah tamat, dianjurkan mendirikan *dayah* dimana mungkin. Dalam hal yang berhubungan dengan kehidupan dan rezeki mereka menanamkan keyakinan bahwa: (1) orang-orang yang menjadi ulama dan mendirikan *dayah* dijamin oleh Allah rezekinya asalkan senantiasa menjalankan tugas sebagai

warasatul anbiya. (2) hidup haruslah sederhana sebab mementingkan kehidupan dunia terhitung perbuatan tercela. Sungguhpun memang ada kelihatan para ulama memperlihatkan kehidupan yang baik namun mereka tidaklah mementingkan kehidupan dunia, (3) ulama yang mendirikan *dayah* akan senantiasa dibantu oleh para dermawan dan murid-murid yang telah tamat, (4) sebagian dari zakat (harta dan fitrah) dapat dimanfaatkan oleh para ulama untuk keperluan dirinya sebagai *pembina dayah* dan pengembang ajaran agama. Dalam kenyataan ada juga ulama yang hidup lebih mewah di tengah-tengah rakyat melarat dengan cara menarik sedekah sebanyak mungkin. Penarikan-nya tentu saja dengan menggunakan dalil-dalil agama atau kadang-kadang dengan cerita-cerita "keagamaan" yang membayangkan pahala yang amat besar "didunia" dan lebih-lebih lagi di akhirat, (5) untuk "menyelamatkan" agama Islam dari berbagai gangguan, para ulama hendaknya menjauhkan diri dari kehidupan kota (kecuali yang imannya telah cukup kuat) yang telah penuh dengan beraneka maksiat dan kejahatan.

Suatu hal yang sukar dipertimbangkan tampaknya adalah jumlah hasil pertanian yang semakin berkurang akibat jumlah penduduk yang semakin banyak dan terpecahnya daerah-daerah kantong ke dalam tangan-tangan yang semakin banyak pula. Hal ini menyebabkan menurunnya kwantita zakat dan berkurangnya kedermawanan bersedekah. Dibanding dengan jumlah ulama yang akan selesai dari *dayah* maka kehidupan mereka dimasa depan, jika digantungkan kepada itu saja, kelihatan kabur jika tidak dapat dikatakan suram. Karena itu sebagian ulama *dayah* mengerjakan sawah, ladang atau kebun sendiri yang pada waktu turun bekerja dibantu oleh murid-muridnya. Tata kehidupan semacam ini biasanya mendapat penilaian yang baik dari masyarakat. Menjawab pertanyaan berapa orang yang akan menjadi ulama dari 250 orang murid yang se-

dang dididiknya di *dayah* BUDI Lamno, Teungku Ibrahim Ishak mengatakan bahwa tujuan pendidikan *dayah* ialah membina ulama. Berapa banyak yang mungkin akan berhasil tidaklah menjadi masalah atau beban pikiran. *Dayah*, menurut dia, secara minimal berusaha mendidik manusia agar gemar mengamalkan agama sekurang-kurangnya untuk dirinya sendiri dan secara maksimal berilmu agama yang tinggi, maka beramal dan mengajarkannya kepada orang lain.⁴⁹

Muhammadiyah, dalam usaha mempertahankan kelanjutan hidupnya, memusatkan kegiatannya di kota dan di pusat-pusat pemerintahan. Dari jurusan lainnya mereka memperluas daerah pengaruhnya dengan mendirikan berbagai kegiatan di desa-desa yang kadang-kadang sampai mendekati atau malah memasuki daerah orbit pengaruh ulama *dayah*. Di antara usaha Muhammadiyah, selain daripada mendirikan rumah santunan, klinik-klinik, BKIA Muhammadiyah dan kantor-kantor, yang kelihatan lebih menonjol ialah membangun sekolah-sekolah dalam bentuk modern dengan kurikulum serupa dengan sekolah negeri dan pengetahuan agama. Setiap pelajaran yang diberikan diharuskan menjiwainya dengan ajaran agama. Dengan demikian pemimpinnya mengharapkan kiranya berhasil menelorkan manusia-manusia berilmu dalam arti yang seluas-luasnya dan mengamalkan ajaran agama dalam segenap aspek kehidupannya. Menurut mereka agama dan ilmu tidak boleh dipertentangkan tetapi sehaluan dan sejalan untuk mencapai tujuan dari hikmah penurunan agama itu sendiri, yaitu kebahagiaan manusia di dunia dan kemenangannya di akhirat. Dalam segi gerakan, Muhammadiyah termasuk reformasi dalam pendekatan terhadap agama dan pendidikan. Dari segi pengamalan agama, khususnya ibadah suat, mereka berbeda dengan ulama *dayah* sehingga kadang-kadang yang satu segan berimam sembahyang kepada yang lain.

Sejak saat kehadirannya ke Aceh Muhammadiyah tidak pernah melibatkan dirinya ke dalam arena politik. Ia senantiasa bergerak dalam bidang sosial—pendidikan dan pembinaan kader muslim yang militan. Dalam aspirasi politik Muhammadiyah menganjurkan anggotanya yang berminat untuk bergerak dalam salah satu Partai Islam seperti, pada mulanya setelah Indonesia merdeka, MASJUMI, kemudian Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) dan sekarang Partai Persatuan Pembangunan. Ulama Muhammadiyah berusaha agar lebih murni sekurang-kurangnya menurut anggapan mereka sendiri — dalam pendekatannya terhadap pokok ajaran Islam. Mereka menamakan dirinya *ahlus sunnah* karena dalam cara pendekatan tersebut mereka bergerak dari *sunnah*, yaitu Al Qur'an (sunnah Allah) dan Hadis (sunnah Rasul). Tetapi tidaklah berarti bahwa mereka meninggalkan sama sekali faham ulama-ulama terdahulu — karena toh mereka ulama juga — terutama pada waktu mereka memerlukan bantuan dalam memahami hal-hal yang sulit dalam ayat-ayat Al Qur'an ataupun Hadis.

Apa yang dialami oleh Perti di dalam *dayah* tidak dirasakan sebagai masalah oleh Muhammadiyah. Jika murid-murid *dayah* sebagian besar pindah-pindah atau meninggalkan pelajarannya sebelum selesai maka pelajar-pelajar Muhammadiyah, termasuk Aisyiah, pada umumnya tertarik untuk melanjutkan studinya ke sekolah Muhammadiyah yang seurutan sampai dengan perguruan tinggi, kecuali sekolah yang dimaksud belum diadakan oleh Muhammadiyah. Hal itu kiranya mudah difahami karena pelajar-pelajar Muhammadiyah umumnya merasakan adanya harapan masa depan yang lebih cerah bagi dirinya. Sistem pelajaran yang mengikuti sekolah negeri (dengan tambahan pelajaran agama) memungkinkan pelajar-pelajarnya untuk lebih mudah mengikuti ujian-ujian atau melanjutkan studinya ke sekolah-sekolah lanjutan dan perguruan tinggi negeri. Itulah sebabnya mengapa pelajar-pelajar Muhammadiyah ba-

nyak yang menjadi mahasiswa pada berbagai Fakultas negeri dan setelah selesai, sarjana apapun ia adanya, tetap setia sebagai anggota Muhammadiyah yang baik.

Sebab lainnya yang menarik bagi kelanjutan kehidupan Muhammadiyah terletak pada caranya menuruti sistim dan nama sekolah negeri dengan memberi predikat Muhammadiyah, seperti SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SKP Muhammadiyah (di zaman Belanda MULO Muhammadiyah, HIK Muhammadiyah) serta senantiasa berubah sesuai dengan sekolah-sekolah negeri. Perbedaan sistim pelajarannya dengan sistim pendidikan negeri, antara lain, terdapat pada: (1) pelajaran agama yang relatif lebih banyak, (2) penjiwaan seluruh mata pelajaran dengan agama dan (3) pendidikan agama yang lebih ketat dengan pembinaan amal sholih, mengadakan mushalla untuk sha'at jamaah dan pengajian dalam kompleks pendidikan. Pelajar Muhammadiyah merasakan dirinya sebagai sama dengan murid sekolah negeri, satu perasaan yang mungkin tidak dinikmati oleh anak MIN, MTsAIN dan lanjutannya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang banyak coraknya itu menyebabkan alumninya dapat bekerja pada berbagai Yayasan sesuai dengan tujuannya. Itulah sebab yang terpenting daripada ketahanan kelanjutan kehidupan Muhammadiyah dari sejak mula tumbuhnya sampai sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang.

PUSA yang sebagian besar pemimpinnya adalah hasil *dayah* menampakkan kegiatannya dalam pembinaan generasi muda Islam melalui pendidikan. Di samping itu, seperti yang pernah disinggung dalam tulisan ini, mereka berjuang untuk menggulingkan kekuasaan *uleebalang*. Karena itu mereka semakin terbawa kedalam arena politik. Dalam usaha pendidikan mereka mendirikan madrasah-madrasah dalam bentuk modern dengan kurikulum yang bersifat integrasi antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum.

Sekolah-sekolah PUSA, pada zamannya, berkembang dengan pesatnya melebihi *dayah-dayah* dan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Madrasah-madrasah yang sebelumnya telah berdiri sebagian besar menggabungkan diri kedalam organisasi ini ditambah dengan madrasah-madrasah baru. Pada masa itu kelihatan hari depan yang cerah bagi kelanjutan kehidupan PUSA dan pemudanya. Tetapi pada tahun 1946 timbul pemikiran untuk menegerikan madrasah-madrasah PUSA yang selama masa yang lama berstatus swasta. Dengan suatu piagam yang bernama "*Kanun Penyerahan Sekolah-sekolah Agama kepada Pemerintah*" yang bertanggal 1 Nopember 1946 maka lebih kurang 180 buah madrasah dengan kira-kira 36.000 orang murid diserahkan kepada Pemerintah Daerah Aceh dengan resmi.⁵⁰ Dengan demikian resmilah madrasah-madrasah itu menjadi milik negeri.

Barangkali salah satu sebab yang mendorong bagi cepatnya penegerian itu ialah karena Aceh pada masa mula-mula merdeka berada di bawah pimpinan ulama-ulama PUSA. Maka diduga (mungkin kurang memperhitungkan masa depan) ialah bahwa karena pendiri-pendirinya telah menguasai negeri, dengan sendirinyalah madrasah-madrasahnyanya menjadi sekolah negeri pula. Dan pemerintahlah, sebagai konsekwensi logis daripadanya, yang memikul beban pembiayaannya. Sejak masa itu berobahlah wajah madrasah di Aceh, seperti yang akan kita lihat nanti, menjadi SRI (Sekolah Rendah Islam), SGI (Sekolah Guru Islam), SMI (Sekolah Menengah Islam), dan SMIA (Sekolah Menengah Islam Atas).

Tetapi dari segi kelanjutan kehidupannya, berbeda halnya dengan Perti dan Muhammadiyah, PUSA pada saat ini memperlihatkan masa depan yang suram jika tidak berani mengatakan akan mati. Ulama-ulama PUSA sudah banyak yang meninggal dan yang masih hidup sudah tua-tua. Ketua Umumnya, Tengku Muhammad Dawud Beureu-

eh, sungguhpun kelihatan masih sehat namun kini sudah berumur lebih dari 84 tahun. Sedangkan pemuda-pemuda PUSA sebagian besar sudah tua pula. Madrasah-madrasah-nya sudah diserap oleh negeri sehingga pembinaan generasi penerusnya terputus. Semangat untuk mengembalikan PUSA ke alam kenyataan dengan gerakannya seperti semula kelihatan lesu kalau segan mengatakan sudah mati. Hal itu mungkin disebabkan oleh antara lain: (1) asumsi yang membayangkan-bayangi bahwa menghidupkan kembali PUSAT membuat assosiasi kepada menyusun lagi gerakan pemberontakan DI/TII di Aceh, (2) sifatnya yang terbatas hanya dalam daerah Aceh saja, sesuai dengan namanya, tidak memungkinkannya bergerak lebih luas dan leluasa di seluruh Indonesia, (3) keraguan dalam kalangan bekas pemuda PUSA sendiri mengenai manfaat yang mungkin akan diperoleh daripada reorganisasinya persatuan ini, (4) anggapan lainnya bahwa organisasi lokal semacam itu tidak diperlukan lagi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini.

4. *Pengaruh ulama terhadap lingkungannya.*

Ada tiga katagori pola dasar persyaratan kepemimpinan formil yang kelihatan menonjol dalam masyarakat Aceh, yaitu keagamaan (orang-orang beragama atau ulama), kecakapan (orang berilmu atau *ureung carong*) dan keturunan. Pola dasar yang tersebut belakangan (keturunan raja atau *uleebalang*) sampai dengan tumbang-nya Belanda dari Aceh tetap merupakan persyaratan yang paling dominan bagi seseorang untuk menjadi penguasa formil. Perkembangan pemikiran menuju kepada dua pola dasar persyaratan kepemimpinan formil yang sebelumnya terutama pada zaman penjajahan masih tetap tertekan. Akan tetapi dalam perjuangan keduanya senantiasa laten dan menunggu saat-saat kesempatan meledak mencari jalan keluar untuk menjelma kedalam alam kenyataan.

Setelah Indonesia merdeka katagori pola dasar keturunan diengkari secara revolusi dan pada beberapa daerah, terutama di Pidie, dengan pertumpahan darah.⁵¹ Pada taraf pertama setelah itu, menonjollah pola dasar keagamaan (ulama) sehingga pada masa mula-mula merdeka sampai dengan tahun 1953 para ulamalah yang memegang kendali pimpinan kekuasaan di Aceh. Akan tetapi pada bulan September tahun itu terjadilah pemberontakan DI/TII di Aceh. Sebagian besar ulama Aceh meninggalkan jabatannya dan ikut menggabungkan diri kedalam pemberontakan. Dengan sendirinya jabatan mereka yang telah lowong diisi oleh golongan lain seperti PNI, PKI dan beberapa orang ulama yang tidak ikut memberontak.

Perkembangan pemikiran yang senantiasa berubah sebagai akibat peralihan lingkungan dan situasi sosial-ekonomis, memperlihatkan kecenderungan untuk meninggalkan keagamaan menuju keilmuan (*ureung carong*) sebagai persyaratan bagi menentukan pimpinan penguasa. Hal ini tampak di kota-kota dan daerah-daerah proyek. Karena itu apa yang dinamakan golongan teknokrat semakin mendapat angin bagi penetapannya sebagai pimpinan. Mereka yang tergabung kedalam pola keagamaan hampir ketinggalan, dipisahkan atau sekurang-kurangnya ada kecenderungan untuk tidak dihiraukan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Namun di dalam masyarakat buat dewasa ini, pengaruh ulama masih besar dan dalam beberapa hal menentukan. Partisipasi masyarakat di desa dalam pembangunan dirasakan sangat tergantung kepada ikut sertanya ulama masing-masing. Tanpa partisipasi para ulama jalannya pembangunan tampak tertegun-tegun atau kurang lancar.

Apalagi kalau diingat bahwa sesungguhnya di desa-desa Aceh belum pernah terjadi pemisahan antara penguasa dan

ulama. Apa yang terkenal sampai sekarang sebagai *keucik* (kepala kampung) dan *teungku meunasah* (ulama mendampingi *keucik*) yang senantiasa merupakan unsur pimpinan kampung merupakan bukti daripada perpaduan kedua potensi itu. *Keucik* adalah pelaksana adat (pemerintah) sedangkan *teungku meunasah* adalah penasehat hukum atau pemberi keputusan keagamaan kepada *keucik* di samping tugasnya sebagai guru mengaji, mendidik anak-anak dan mengatur upacara atau amal keagamaan. Kedua unsur itu tetap terasa sebagai mempunyai wibawa yang kuat selama mereka selalu bersatu, searah dan senada di depan rakyat.

Itulah antara lain sebabnya mengapa berkembang pula pemikiran kearah menggabungkan kedua potensi, pemerintah dan ulama, cendekiawan dan agamawan (*umara* dan *ulama*), yang masing-masingnya memiliki teknokrat-teknokrat dalam berbagai bidang, guna bersama-sama mensukseskan pembangunan, baik fisik-materiel maupun mental-spirituil. Pembentukan Majelis Ulama sejak dari Tingkat Pusat, daerah Tingkat I, Tingkat II sampai dengan Kecamatan, kiranya merupakan realisasi daripada perkembangan ide semacam itu di Indonesia. Di Aceh Majelis Ulama telah berdiri sejak tahun 1963.

ULAMA DAN PENDIDIKAN

1. Hubungan ulama dengan dayah

Dari segi tugasnya, seperti yang telah disinggung dalam tulisan ini, ulama Aceh terbagi kepada: (1) *teungku meunasah*, (2) *teungku diranghang*, (3) *teungku di balee*, dan (4) *teungku chik* (guru besar). Yang pertama, *teungku meunasah*, bertugas memimpin dan mengajar anak-anak tingkat *ibtidaiyah* (*muftadi* atau dasar) di *meunasah* di samping mengurus perkara atau kepentingan masyarakat kampung. Pelajaran disini adalah: tulis-baca Jawoe (tulis Arab bahasa Melayu), juz 'amma (Qur'an kecil), do'a dan praktek sembahyang, akidah Islamiyah. Kitab yang terkenal mengenai akidah untuk tingkat ini ialah *Masailul Muftadi li ikhwanil Muftadi* karangan Teungku Chik di Leupeu (Syekh Dawud Rumi atau Baba Dawud), sebuah kitab yang terkenal dan dibaca oleh hampir semua umat beragama Islam di seluruh Nusantara sampai sekarang.⁵² Kitab yang mengenai hukum Islam adalah *Bidayatul Hidayah*, karangan Syekh Muhammad Zain bin Al Faqih Jalaludin "bangsa" Aceh (tanda kutip dari penyalin). Pada sebagian *Meunasah*, sesuai dengan kemampuan teungku, ada yang diajarkan dasar-dasar bahasa Arab.⁵³

Yang kedua, *teungku di rangkang*, mengajar murid-murid tamatan *meunasah*. A. Hasjmy dalam *Sinar Darussalam* No. 63/1975 menjelaskan bahwa *meunasah*, dari segi pendidikan, kira-kira sama dengan SD sekarang, *rangkang*

sama dengan SMP, *dayah* sama dengan SMA, *balee* dapat disamakan dengan akademi, sedangkan perguruan tinggi berada di Jami'ah Baiturrahman Banda Aceh. Tetapi penelitian ini menunjukkan sedikit perbedaan yaitu bahwa *ranggang* adalah pendidikan tingkat menengah dan lanjutan sedangkan *balee* adalah pendidikan tinggi. *Ranggang* dan *balee* berkumpul dalam suatu kompleks yang diberi nama *dayah* dibawah pimpinan seorang *teungku di balee*. Mungkin diantara *balee* itu ada yang dapat disamakan sifatnya dengan akademi.

Di tingkat *ranggang* semua kitab pelajaran dalam bahasa Arab. Di antara mata pelajarannya adalah: (1) *Nahwu* dengan kitab-kitabnya: *Tahrirul Aqwal*, *Matan Al Ajurru-miyah* dan *Mutammimah*, (2) *Sharaf*: *Matan Bina Salsalul Mudkhal*, *Al Kailani* dan kadang-kadang sampai dengan *Al Mathlub*, (3) *Fikih*: *Matan Taqrieab*, *Fathul Qarieb* atau *Al Bajuri*, *Fathul Mu'in* atau *I'anatut Thalibien*, (4) *Tauhid*: *Matan as Sanusi*, *Kifayatul Awam* dan *Hudhudi*, (5) *Ushul Fiqh*: *Al Waraqat*, *Lathaiful Isyarah* dan kadang-kadang sampai dengan *Ghayatul Wushul*, (6) *Manthiq*: *Matan As Sullam* dan *Idhahul Mubham*, (7) *Al Balaghah*: *Majmu' Khamsir Rassail* dan *Al Bayan*, (8) *Tasawwuf/Akhlaq*: *Maraqi Al 'Ubudiyah* dan *Tanbih Al Ghafilin*, (9) Kitab-kitab lainnya sesuai dengan petunjuk *teungku* setempat. Semua kitab itu dipelajari menurut urutannya yang tetap. Setelah tammat dan mengerti yang satu barulah pindah kepada yang lainnya (kadang-kadang banyak murid yang menjadi pendengar pada pelajaran yang lebih tinggi). Jangka waktu belajar tidak ditetapkan dengan tahun (sekarang sudah ada perubahan) tetapi didasarkan kepada tamatnya kitab yang dipelajari.⁵⁴

Yang ketiga, *teungku di balee* (lama-lama menjadi *teungku chik*), mengajar di *balee* yang dikelilingi oleh *ranggang-ranggang*.⁵⁵ Secara berangsur dalam jangka wak-

tu sesuai dengan kemampuan menamatkan kitab yang telah ditentukan (ada yang lebih dari 10 tahun) murid-murid di *rangkang* meningkat menjadi murid di *balee*. Mereka inilah yang diangkat oleh *teungku di balee* menjadi guru-guru bantu yang mengajar di *rangkang* dan sejak itu mereka diberi gelar *teungku di rangkang* (guru pendidikan menengah). Tidak juga terdapat ketentuan berapa tahun seorang murid harus belajar di *balee* sebab selesainya tergantung kepada kemampuan menamatkan kitab yang telah ditentukan. Walaupun demikian, sesuai dengan pengakuan *teungku di balee*, ada juga murid yang dapat menyelesaikan pelajarannya dalam waktu 5 tahun. Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh dikabarkan termasuk kedalam golongan ini. Murid yang seperti ini terdengar diberi julukan mendapat *lailatul qadar* (satu malam paling istimewa dalam bulan Ramadhan), dan atau telah dido'akan oleh *teungku Chik*.

Di antara mata pelajaran di *balee* ialah: (1) *Nahwu* dengan kitab-kitabnya: *Alfiah* dan *Khudri*, (2) *Sharaf: Mirahul Arwah*, (3) *Fikih: Al Mahalli* dan *Fathul Wahhab*, (4) *Tauhid: Ad Dasuqi*, (5) *Ushul Fiqh: Jam'ul Jawami'*, (6) *Manthiq: Isaghuji*, *As Shabban* dan *As Syamsiyah*, (7) *Al Balaghah: Jawahir Al Maknun*, (8) *Tasawwuf: Ihya Ulumuddin*, (9) Kitab-kitab lainnya yang ditetapkan oleh *teungku di balee*.⁵⁶ Murid-murid keluaran *balee* sudah diberi gelar *teungku* dengan predikat ulama. Karenanya ia telah mendapat kepercayaan untuk mendirikan *dayah* sendiri. Barangkali, jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan modern dewasa ini, murid-murid alumni *balee*, kira-kira dapat dipersamakan dengan tingkat sarjana lengkap lulusan Fakultas.

Yang keempat, *teungku chik* (*dayah*-nya bernama *dayah teungku chik*) adalah ulama besar (guru besar pada zaman-mannya) dan tokoh yang di samping masih mengajar di se-

buah atau memimpin beberapa buah *balee* juga sudah banyak jasanya kepada rakyat.⁵⁷ Belajar dengan *teungku chik* adalah merupakan pendalaman berbagai ilmu agama atau lain. Oleh karena itu metode belajarnya lebih mendedikasikan diskusi, debat, bertukar pikiran dan tidak lagi terikat dengan hanya satu kitab sebagai buku pegangan. Dengan cara begitu murid-murid (sebagiannya *teungku di balee*) mempelajari kitab-kitab besar mengenai: (1) hukum Islam seperti *Tuhfatul Muhtaj*, *Nihayatul Muhtaj* (masing-masing 10 jilid besar), (2) Hadis, seperti *Fathul Bari*, *Qustallani* (13 dan 10 jilid), (3) Tasawwuf, seperti *Syarah Ihya Ulu-muddin Ibnu Arbi* (10 jilid), (4) Tafsir, seperti *Ibnu Jarir At Thabari*, dan (5) kitab-kitab besar atau pengetahuan khusus lainnya. Di antara murid ada yang mendalami secara khusus beberapa buah kitab, katakanlah untuk mengambil sesuatu keahlian, misalnya Ilmu Hukum, Ilmu Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Tasawwuf atau ilmu-ilmu vak lainnya. Dalam perdebatan *teungku chik* bertindak sebagai moderator. Pendapatnya, dalam masalah-masalah yang rumit, adalah menentukan. Metode yang demikian mendorong murid-murid untuk membaca dan mendalami secara teliti sekian banyak buku-buku yang berhubungan dengan ilmu yang sedang dipelajarinya.

Di samping itu, sesuai dengan keahlian *teungku chik*, diajarkan pula vak tertentu mengenai sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Di antara mereka ada yang ahli dalam Ilmu Falak, yang lainnya menonjol dalam Ilmu Hisab, ada lagi yang pintar dalam Ilmu Thib (kedokteran), di samping ada juga yang cakap dalam Ilmu Bangunan, Pertanian, Irrigasi dan lain-lain. Untuk memperdalam vak-vak khusus itulah sebagian *teungku di balee* belajar kepada *teungku chik*. Dan para *teungku chik*, pada umumnya, memperoleh keahliannya itu di luar negeri seperti di Mekkah, Mesir, Turki, India dan negara-negara lainnya.⁵⁸

2. | Hubungan *dayah* dengan masyarakat sekitarnya

Dayah pada umumnya berdiri terpisah dari kampung⁵⁹ dan biasanya di bawah kekuasaan ulama yang mendirikan-nya bahkan kadang-kadang sebagai miliknya sendiri. Namun di zaman Kesultanan hubungan antaranya dengan masyarakat sekitarnya adalah erat. Rakyat merasa sebagai bergantung nasib kepada *dayah* karena daripadanyalah muncul ide-ide pembaruan, terutama *teungku chik* yang merupakan "teknokrat" pada zamannya, rakyat mengharapkan bimbingan rohaniah dan jasmaniah, perbaikan di bidang fisik-materiel dan mental-spirituil. Ajaran *teungku chik*, karena kadang-kadang ia dianggap keramat, merupakan sesuatu yang dirasakan tidak boleh dibantah dan karenanya rakyat merasa wajib taat dan setia kepadanya. Sultan atau penguasa setempat, bilamana ingin hendak melaksanakan sesuatu rencana pembangunan ataupun lainnya, merasa senantiasa sukses jika disalurkan melalui ulama atau *teungku chik* setempat. Ini kiranya dapat dimengerti karena ulama sendiri, selain daripada mempunyai hubungan religi yang cukup ketat dan sumber legitimasi yang cukup mengikat, juga turut bekerja sama dengan rakyat dengan ikhlas. Kerjasama yang demikian, menurut mereka, adalah ibadah yang akan mendapat balasan yang baik daripada Allah.⁶⁰

Di zaman penjajahan Belanda *dayah* tampak semakin mengisolir diri, sehingga seolah-olah tidak mau tahu dengan perubahan sekelilingnya. Para ulama *dayah* mempertahankan dengan kuat kondisi dan kurikulum tradisional serta mengharamkan segala perubahan yang diperkirakannya sebagai pembaharuan, lebih-lebih yang berbau Belanda. Isolasi itu pada mulanya disebabkan oleh karena kebencian para ulama kepada Belanda sebagai penjajah yang kafir. Maka mereka mendidik murid-murid agar benci kepada Belanda berikut masyarakat yang telah takluk kepadanya.

Mereka bertekad "lebih baik mengasingkan diri daripada takluk lahir-batin kepada Belanda".⁶¹ Lama-lama isolasi itu menjadi ide yang semakin terpaku sehingga sampai kepada taraf menghindari campur tangan masyarakat terhadap *dayah*. Sebab campur tangan itu, menurut mereka, akan ikut mempengaruhi, misalnya, perubahan kurikulum dan mungkin wibawa *teungku* akan dikurangi juga, padahal kelanjutan kehidupan *dayah* bergantung kepada tetapnya kurikulum, buku pegangan dan wibawa *teungku*. Hal ini hanya mungkin bilamana *dayah* terpisah dan berdiri sendiri.⁶²

Beberapa *dayah* di Aceh Besar, isolasinya sedemikian ketat sehingga mengharamkan semua perubahan dan memustahilkan semua penemuan yang sifatnya baru. Mereka mengatakan bahwa penemuan-penemuan baru itu hanyalah untuk orang kafir sedangkan umat Islam harus senantiasa berpegang kepada apa yang terdapat dalam kitab-kitab karangan ulama-ulama terdahulu yang, menurut mereka, telah mencapai derajat keramat dan mulia di sisi Allah. Semakin kelihatan terjadi perubahan dalam masyarakat semakin bulat pula tekad mereka untuk mengasingkan diri terutama pada sikap-sikap batin. Tempat *dayah* mereka usahakan sedapat mungkin terhindar dari kesibukan kota. Dan setelah berkembangnya madrasah dalam bentuknya yang modern dan bertambah banyak ulama-ulama reformist Aceh sikap isolasi *dayah* semakin bertambah keras.

Dewasa ini hubungan *dayah* dengan masyarakat sekitar dapat dikatakan tidak erat, sebab murid yang belajar di dalam *dayah* biasanya datang dari kampung-kampung yang jauh. Masyarakat sekitar pada umumnya memasukkan anaknya ke madrasah atau sekolah negeri. Dan kalau pun ada diantaranya yang memasukkan anak ke *dayah* hanyalah sekedar untuk mendapat pendidikan agama yang

lebih ketat. Mereka yang memasukkan anaknya ke *dayah* biasanya memberikan zakat fitrah dan sebagian zakat hartanya kepada *teungku* untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunannya. Selainnya hanya memberi bantuan manakala ada permohonan derma dari *teungku*. Berbicara mengenai bantuan masyarakat, terutama yang berupa dana, ulama *dayah* tampaknya agak mengeluh karena bantuan hanya bisa diperoleh dengan susah payah. Itulah sebagian sebabnya maka *rangkang-rangkang* di sekeliling *balee*, misalnya, di *dayah Nurul Huda* Seulimum, kelihatannya, jauh dari sempurna. Sebagian besar berdingding bambu dan beratap rumbia dan sebagian lainnya, secara berangsur dan dengan usaha gotong royong murid-murid, sedang dibangun. *Dayah-dayah* lainnya tidak akan jauh berbeda daripada yang kelihatan di Seulimum (Aceh Besar) itu. Sungguhpun demikian, berkat ketabahan *teungku* di *balee* dan murid-murid *dayah* tetap dapat bertahan sampai sekarang. Kepala *dayah Nurul Huda* hanya menjawab singkat "*tawakkal 'alallah*" (berserah kepada Allah) terhadap pertanyaan mengenai biaya yang dimajukan kepadanya. *Dayah* tetap hidup dan makmur atau susut sesuai dengan bertambah atau berkurangnya murid. Bila muridnya bertambah banyak maka masyarakat, pemerintah setempat dan bahkan pemerintah pusatpun memperhatikannya.

3. Pendidikan di Madrasah.

Para ulama yang sudah dapat kembali ke kampung, sungguhpun perang melawan Belanda belum dapat dikatakan berakhir sepenuhnya, dengan segera mendirikan *dayah-dayah* di mana mungkin. Banyak *dayah* yang sudah menjadi puing reruntuhan perang puluhan tahun itu. *Teungku chik* dapat dikatakan tidak ada lagi. Mereka telah *syahid* (mati suci) dalam perang. Kekurangan tenaga ilmiah dan guru sudah sangat terasa. Namun yang masih hidup tidak

berputus asa mendidik anak-anak dan mendirikan *dayah-dayah*.

Kekurangan tenaga guru itu mendorong para ulama dan masyarakat Aceh untuk mengirim anak dan pemuda mereka ke luar daerah/negeri, seperti ke Sumatra Barat (terbanyak), Jawa, Mekah dan, yang terjauh, Mesir. Dari kalangan anak *uleebalang* ada yang sampai ke negeri Belanda.

Di tempat-tempat itu pemuda-pemuda Aceh, terutama yang bukan dari kalangan *uleebalang*, sebagian besar memasuki sekolah-sekolah yang dipimpin oleh reformist-reformist muslim. Sebagian kecil memasuki madrasah tradisional yang, kecuali mata pelajaran dan buku pegangan, cara belajarnya sudah ikut mengalami perubahan menuju modernisasi. Thawalib dan Normal School yang banyak dimasuki oleh putera-putera Aceh di Sumatra Barat merupakan sekolah-sekolah reformist yang membimbing pemuda-pemudi kearah modernisasi pemikiran dalam Islam. Di Mesir pemuda-pemuda Aceh mengikuti aliran Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh dan reformist-reformist lainnya.

Setelah menamatkan pelajaran di sana mereka pulang ke Aceh membawa pembaharuan pemikiran dan pendekatan mengenai pokok ajaran Islam, yaitu Al Qur'an dan Hadis. Pembaharuan yang mereka bawa yang pada mulanya terutama ditujukan kepada perubahan sistim pendidikan secara besar-besaran di Aceh menyebabkan timbulnya kecurigaan pihak pemerintah kolonialisme Belanda terhadap mereka. Kecurigaan itu semakin besar setelah pemuda-pemuda terpelajar Aceh mulai menggabungkan diri ke dalam organisasi-organisasi yang menampakkan kecenderungan ke arah nasionalisme yang semakin jelas. Akan tetapi gerakan mereka yang kelihatan semakin gencar adalah dalam bidang pendidikan.

Muhammadiyah yang masuk ke Aceh sejak tahun 1920-an,⁶³ sekalipun pada mulanya kurang mendapat sambutan, secara berangsur memperoleh pasaran yang baik dan tanah yang subur. PUSA yang didirikan pada tahun 1939 atas inisiatif Teungku Abdurrachman Meunasah Meucap dan dengan Ketua Umumnya Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh,⁶⁴ mendapat sambutan hangat dari seluruh ulama dan pemuda Aceh. Dalam gerakannya, PUSA semakin memperlihatkan corak nasionalisme Indonesia-nya dan karenanya semakin erat hubungannya dengan gerakan-gerakan nasional lainnya di Indonesia. Dengan demikian kecurigaan pihak pemerintah Belanda dan *ulee-balang* semakin bertambah kepadanya.

Satu peristiwa penting yang mendahului (atau mungkin juga sejalan dengan aspirasi yang telah ada di Aceh pada waktu itu) usaha modernisasi pendidikan di Aceh ialah bahwa pada tahun 1920-an Syarikat Islam (SI) memasuki Aceh dan ternyata mendapat sambutan yang baik. Di antara pemimpinnya yang terkemuka dan disegani adalah Teungku Syekh Abdul Hamid Samalanga (ayah Hamid) dan Teungku Raja Bujang Lhokseumawe. Karena mencurigakan bagi pemerintah Belanda maka pemimpin-pemimpin itu ditangkap. Tetapi Syekh Abdul Hamid dapat meloloskan diri ke Pulau Pinang dan dari sana ia melanjutkan pengasingan dirinya ke Mekah. Jiwa Islam dan nasionalisme yang bersemi di dalam dirinya menyebabkannya berusaha mencari hubungan ke Aceh. Akan tetapi karena surat-surat ke Aceh, terutama dari orang-orang yang dicurigai tidak lolos sensor, maka jalan satu-satunya bagi Syekh Hamid ialah mengirim surat kabar *Ummul Qura* (surat kabar berbahasa Arab di Mekah) ke Aceh. Di celah-celah tulisan surat kabar itu ia menulis surat kepada Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba yang berisi pesan penting, antara lain, supaya di Aceh diadakan pembaharuan sistem pendidikan Islam.⁶⁵

Haji Abdullah Ujong Rimba menyampaikan pesan itu, tentunya secara rahasia, kepada teman-temannya terutama Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh. Akhirnya di bawah pimpinan yang tersebut terakhir ini, ulama-ulama Aceh mengadakan pembaruan di bidang pendidikan. Maka mulailah berdiri sekolah-sekolah agama dalam bentuk modern, baik peralatannya maupun mata pelajarannya. Suatu hal yang cukup menarik tentang kebijaksanaan ulama-ulama reformist Aceh pada waktu itu ialah bahwa karena masyarakat Aceh, pada umumnya, masih benci kepada pengetahuan bertulisan Latin yang mereka rasakan berbau Belanda, maka mata pelajaran umum diberi nama Arab dan diajarkan dalam bahasa Arab. Asumsi yang kuat pada waktu itu ialah bahwa setiap yang berbahasa Arab adalah pelajaran agama. Maka Ilmu Bumi diberi nama *Al Joghrafiyah*, Ilmu Alam: *Ilmu At Thabi'i*, selanjutnya *At Tarikh Al'am* (Sejarah Umum), *At Tarikh Al Indunisi* (Sejarah Indonesia), *Ilmu An Nafs* (Ilmu Jiwa), *Al Lughah Al Hulandiyah* (bahasa Belanda), *Al Lughah Al Injeliziyah* (bahasa Inggris), *Ilmu Aljib* (Aljabar), (*Ilmu Al Handasah* (Ilmu Ukur), *Ilmu Hisab* (Berhitung) dan sebagainya.

Di antara sekolah agama yang terkenal ialah Madrasah Al Muslim, Matang Geulumpang Dua, Aceh Utara (didirikan oleh Teungku Abdur Rahman Meunasah Meucap tahun 1930), Madrasah Saadah Abadiyah, Blangpaseh, Sigli Pidie (didirikan oleh Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh tahun 1931). Sebelumnya, tahun 1927, telah berdiri Madrasah Al Irsyad oleh Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqie di Lhokseumawe, Aceh Utara. Di Tapaktuan, Aceh Selatan telah berdiri Madrasah Thawalib yang mungkin merupakan cabang dari Thawalib School Sumatra Barat. Sezaman dengan itu semuanya adalah Madrasah Iskandar Muda (MIM) Lampaku yang didirikan oleh *uleebalang* terkenal, Teungku Muhammad Dawud Panglima Polem, walaupun bukan ia sendiri yang memimpinnya.⁶⁶ Berikutnya, sekalipun dalam

keadaan yang sangat merana bila dibanding sekolah-sekolah Belanda, namun bagai cendawan tumbuh di musim hujan, berdirilah sekolah-sekolah agama dalam bentuk modern. Menurut data-data yang ada, daerah Aceh Utara dan Pidie adalah yang terbanyak sekolah agamanya.⁶⁷ Di Takengon, Aceh Tengah, sekolah agama berdiri hampir disetiap kampung, sekalipun sebagiannya hanya mempunyai beberapa kelas saja. Sekolah-sekolah itu semuanya didirikan oleh rakyat dan, kemudian, sebagian besar daripadanya menggabungkan diri ke dalam organisasi PUSA.

Sistim sekolah PUSA merupakan penjelmaan daripada suatu ide integrasi kurikulum (yang sekarang dikumandangkan oleh sementara sarjana seolah-olah suatu ide baru) antara dua jenis sekolah atau dua corak pendidikan yang ada pada waktu itu ialah pendidikan *dayah* pengemban agama dan sekolah-sekolah Belanda beraliran Barat. Para ulama Aceh menyadari bahwa antara kedua jenis pendidikan itu terdapat jurang pemisah yang amat dalam. Pemuda-pemuda keluaran *dayah* akan sangat fanatik agama tetapi buta pengetahuan umum. Padahal pengetahuan ini sangat diperlukan buat pembangunan fisik-materiel yang merupakan syarat mutlak untuk mencapai kemakmuran hidup. Sebaliknya, pemuda-pemuda tamatan sekolah Belanda akan mahir dan merasa bangga dengan pengetahuan umum yang telah dimilikinya tetapi buta agama malah mungkin sekali membencinya. Padahal pengetahuan ini sangat dibutuhkan untuk pembinaan ilmu dan amal, kepribadian dan akhlak untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Para ulama menyadari bahwa kedua jenis ilmu agama dan umum itu sama pentingnya buat manusia. Ajaran agama yang senantiasa mereka kumandangkan adalah, antara lain, "bekerjalah untuk (kepentingan) dunia seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya dan beramal-

lah untuk (mencapai kemenangan) akhirat seakan-akan engkau akan mati besok".⁶⁸ Berdasarkan ajaran itu maka perlu dibina manusia-manusia yang di dalam dirinya terdapat ilmu-ilmu yang bukan saja dapat menuntun mereka untuk memenangkan kehidupan akhirat, tetapi yang malah lebih penting, memungkinkan mereka menghadapi dan bahkan mengatasi problema kehidupan dunia. Inisiatif dan kreatif mereka yang demikian menyebabkan mereka mendapat julukan ulama reformist untuk Aceh.

Bagi mereka ini kedua jenis ilmu itu adalah satu yaitu Ilmu Islam, sebab dalam Al Qur'an tidak hanya terdapat ajaran ibadat saja (seperti sembahyang, zakat, puasa, haji, nikah)⁶⁹ tetapi juga berbagai ilmu pengetahuan alam atau pengetahuan umum dalam pengertiannya yang luas. Mereka ini bermaksud menerapkan ide semacam itu ke dalam madrasah yang mereka dirikan. Pemuda-pemuda lulusan madrasah mereka harapkan mampu menghadapi pelajar-pelajar didikan Belanda dan murid-murid tamatan *dayah*. Pada waktu itu juga tersebar semacam issue dalam kalangan ulama *dayah* bahwa pemuda-pemuda lulusan sekolah PUSA adalah calon kaum muda yang menurut mereka kebenaran akidah Islamiyahnya atau diragukan kemurnian keimanannya. Bahkan sering terjadi perdebatan sengit antara kedua golongan ulama ini atau antara murid-muridnya, hal mana oleh Belanda digunakan pula sebagai alat untuk memecah-belah umat Islam. Di samping memperdalam jurang antara kedua golongan ulama ini, Belanda, melalui pendidikan yang dibinanya, membina pemuda-pemuda Aceh golongan ketiga yang akan berse-dia, dengan segala ilmu yang dimilikinya menghantam ulama-ulama, kaum tua dan kaum muda sekaligus.

Masalah lainnya yang harus dihadapi oleh ulama Aceh ialah bahwa sungguhpun madrasah-madrasah modern sudah berdiri hampir di seluruh Aceh, namun masing-masing

ulama masih mengatur sendiri kurikulum sehingga perbedaan-perbedaan yang menyolok masih diketemukan. Oleh karena itu penyatuan kurikulum untuk semua madrasah itu merupakan masalah yang dirasakan sangat mendesak. Pendapat ini disepakati oleh semua ulama reformist Aceh. Tetapi masalah lainnya yang malah lebih berat ialah pengadaaan guru-guru yang memenuhi syarat untuk itu. Salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mendidik pemuda-pemuda Aceh dalam suatu sekolah guru yang sesuai dan cukup mantap untuk mencapai cita-cita itu.

Maka pada penghujung tahun 1939, ulama PUSA di bawah pimpinan Teungku Muhammad Dawud Beureueh mendidikan Normal Islam Institut di Bireuen, Aceh Utara, dengan Direktornya Al Ustaz Muhammad Nur Al Ibrahimy, didikan Mesir⁷⁰ yang termasuk dicurigai oleh pemerintah Belanda. Sekolah yang lama belajarnya 4 tahun ini mendapat sambutan hangat dan membangun semangat rakyat Aceh serta sempat memproduksi aluminya dalam jumlah relatif banyak. Sebagian besar daripada alumninya berhasil menjadi pemimpin-pemimpin perjuangan, besar atau kecil, mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Aceh. Dan, selanjutnya, menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan, baik sipil maupun militer. Sebagian besar mereka ini, menurut anggapan masyarakat Aceh, terhitung ulama. Pandangan sebaliknya mungkin dari sebagian ulama *dayah* tradisional yang menganggap bahwa yang sesungguhnya ulama adalah keluaran *dayah* saja.

Sekolah-sekolah PUSA dengan segala macam namanya, setelah Indonesia merdeka, mula-mula — setelah penyerahannya kepada Pemerintah — bertukar nama menjadi SRI (Sekolah Rendah Islam), Normal Islam menjadi SGI (Sekolah Guru Islam) dan dipindahkan ke Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Beriringan dengan itu didirikan pula beberapa SMI (Sekolah Menengah Islam) dan sebuah SMIA (Sekolah

Menengah Islam Atas) di Kutaraja. Ide integrasi kurikulum pada madrasah diteruskan kepada penyusunan kurikulum pada SRI, SMI dan SMIA, dengan mengadakan perubahan yang perlu. Di SRI mata pelajaran agama dan umum berbanding sekitar 60 : 40, di SMI 40 : 60, sedangkan di SMIA penjurusan diatur sedemikian rupa sehingga terbagi kepada beberapa *afdeeling* (jurusan) F, B, C dan D (bahasa, pasti alam, agama dan ekonomi).⁷¹ *Afdeeling* bisa ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan, demikian juga dengan perubahan kurikulum dan syllabus.

Pada *afdeeling* A, B dan D terdapat hanya 10 sampai 15% pengetahuan agama sedangkan selebihnya diajarkan mata pelajaran yang sesuai dengan tuntutan jurusannya. Pada *afdeeling* C terdapat 20 sampai 30% pengetahuan umum yang dianggap erat hubungannya dengan pengembangan pemikiran terhadap agama. Ide ini, dengan beberapa perubahan, ditampung oleh pihak Kementerian Agama pada tahun 1950 dan dituang ke dalam suatu bentuk SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama) untuk seluruh Indonesia.

Sesuai dengan ide pembinaannya maka ke dalam kurikulum mata pelajaran bagian A, B, C ditambah dengan ilmu kegu-ruan, sedangkan bagian D (hukum) yang hanya ada di Yogyakarta, dikhususkan untuk menjadi pegawai Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Lulusan SGHA bagian A, B dan C diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga pengajar bagi berbagai mata pelajaran umum dan agama pada sekolah-sekolah menengah Islam dan mata pelajaran agama bagi sekolah-sekolah menengah umum di seluruh Indonesia.⁷²

Pada tahun 1954 Kementerian Agama memutuskan menutup SGHA dan menggantikannya dengan PGA 6 tahun.⁷³ Dewasa ini tingkat-tingkat pendidikan Agama di Aceh adalah: (1) tingkat rendah: Madrasah Ibtidaiyah Ne-

geri (MIN, semula SRI), (2) tingkat menengah pertama: Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN, semula SMI), (3) tingkat menengah atas: Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN, semula SMIA). Untuk menampung kebutuhan pengajaran tinggi Kementerian Agama mendirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atau Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah untuk seluruh Indonesia.⁷⁴ IAIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh mempunyai 4 Fakultas, yaitu Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin dan Dakwah. *Fakultas pertama* mempunyai 1 jurusan, yaitu *Qadla* (hukum Islam), *yang kedua*, semula, mempunyai 4 jurusan, yaitu: Ilmu Pendidikan (IP), Ilmu Agama (IA), Bahasa Arab (BA) dan Bahasa Inggeris (BI), kemudian, tahun 1975, mempunyai 2 jurusan saja, yaitu: Pendidikan Agama (PA) dan Bahasa Arab (BA). *Yang ketiga* mempunyai 2 jurusan, yaitu Falsafah dan Perbandingan Agama, sedangkan *yang keempat* mempunyai 2 jurusan, yaitu: Umum dan Publisistik.

4. Hubungan Madrasah dengan lingkungannya

Dalam suatu ceramah pendidikan agama di depan kurang lebih 35 orang ibu-ibu di Banda Aceh saya menanyakan dimana-mana ada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dalam Kotamadya Banda Aceh, ternyata seorangpun diantara mereka tidak ada yang tahu. Tetapi ketika saya menanyakan SD tampak mereka menghafal dari No. 1 sampai dengan sekurang-kurangnya No. 16 dari 23 SD tahun 1969. Sedangkan MIN di Banda Aceh pada waktu itu hanya ada 4 buah. Tahun 1975, seperti terlihat dalam daftar, SD dalam Kotamadya Banda Aceh sebanyak 39 (termasuk SD bantuan dan SD swasta) sedangkan MIN sebanyak 6 (termasuk MIN Teladan dan MIN Latihan PGA).

Ada beberapa jenis sekolah dasar di Banda Aceh, yaitu SD Negeri, SD Muhammadiyah, MIN, Darusyasyari'ah tingkat Ibtidaiyah, dan pendidikan Al Misbah (juga mempunyai

tingkat dasarnya). (Perbandingan antara SD dan MIN lihat Tabel 1). SD Muhammadiyah, Darussyari'ah dan Al Misbah, masing-masing, hanya sebuah saja dalam Kotamadya Banda Aceh. Pelajar SD Muhammadiyah merasakan dirinya sebagai sama dengan murid-murid SD Negeri, suatu perasaan yang mungkin tidak dinikmati oleh anak MIN, MTsAIN dan lanjutannya, SD Muhammadiyah, seperti yang telah kita singgung sedikit di muka, dengan banyaknya corak pendidikan menengah Negeri, menyebabkan alumninya dapat bekerja dalam berbagai lapangan sesuai dengan keahlian dan kecakapannya masing-masing. Hal ini menyebabkan pula bahwa pelajar Muhammadiyah merasakan harapan adanya masa depan yang cerah.

Ada tamatan MIN dan lanjutannya, termasuk IAIN, pada umumnya akan menjadi pegawai dalam lingkungan Departemen Agama saja. Itupun jika beruntung dapat diangkat. Dalam hal seperti ini kesukaran yang akan diderita ialah ke atas tidak bisa naik ke bawah tidak mungkin turun. Berbagai hal yang kedengaran menjadi sebab keraguan orang untuk memasukkan anak ke madrasah-madrasah Departemen Agama, seperti kelambatan pengangkatan, kesukaran kenaikan pangkat dan sebagainya. Di luar Departemen Agama, jika ada lowongan, kemungkinan penerimaan hanyalah untuk menjadi imam/rohaniawan dalam lingkungan ABRI dan, kalau kebetulan ada, proyek-proyek tertentu saja. Jika kelihatan ada penerimaan dari pihak lain adalah sesudah melalui perjuangan yang berat karena pelajaran pada madrasah-madrasah dianggap tidak sesuai dengan pengetahuan yang diperlukan pada kantor-kantor lain.

Bukti keraguan orang tua terhadap madrasah-madrasah Departemen Agama, antara lain, terlihat dalam kalangan dosen di Darussalam, Banda Aceh. Hanya 2 atau 3 orang dari dosen IAIN dan 1 atau 2 orang dari dosen Universitas Syiah

Kuala yang memasukkan anaknya, setelah selesai Taman Kanak-kanak, ke MIN. Selainnya semua memasukkan anaknya ke SD. Seorang ibu dosen ketika diajak oleh suaminya (kebetulan keduanya orang IAIN) memasukkan anaknya ke MIN Tungkep, Darussalam menjawab dalam bentuk pernyataan apakah anak kita akan dijadikan pembaca do'a atau pengaji kenduri. Pernyataan ibu itu ke luar tampaknya disebabkan oleh karena kejengkelannya kepada nasib suaminya berupa kelambatan kenaikan pangkat dan kelambatan pengangkatan dan sempitnya lapangan pekerjaan.

Kecenderungan kearah meninggalkan MIN, termasuk MTsAIN, MAAIN, IAIN dan madrasah-madrasah lainnya memperlihatkan tanda-tanda yang jelas terutama di kota-kota. Di kampung-kampung kecenderungan itu telah menampakkan dirinya juga. Di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, sudah lama berdiri sebuah MTsAIN yang dapat dikatakan baik dari sudut guru dan jumlah murid tetapi merana di bidang gedungnya. Pada tahun 1974 berdirilah sebuah SMP di Kecamatan itu dan ternyata 75% dari jumlah murid MIN Tungkep dan Imbaro Angan mendaftarkan diri kesana. Sebelumnya, dalam Kecamatan Darussalam MTsAIN adalah satu-satunya sekolah menengah.

Kecenderungan yang demikian mungkin dirangsang pula oleh, selain daripada yang telah tersebut tadi, keadaan gedung MIN dan MTsAIN yang pada umumnya kelihatan lebih merana atau merosot bila dibanding dengan gedung-gedung sekolah Kementerian P & K. Hal itu dapat difahami karena gedung MIN semuanya didirikan dengan swadaya rakyat, sedang pihak Departemen hanya dapat memberi guru-guru yang berstatus pegawai negeri. Sementara itu ada juga terdengar dalam masyarakat semacam issue yang mungkin ada segi-segi kebenarannya bahwa guru-guru MIN, selain daripada mengajar seenaknya saja, juga tidak qualified sebagai guru di samping kelihatan banyak MIN

yang masih kekurangan guru. Akhir-akhir ini segi ini sudah banyak dapat diatasi.

Ada juga kecenderungan asosiasi ke arah negatif terhadap madrasah-madrasah. Jika kita naik bus sepanjang jalan raya Banda Aceh — Medan atau Banda Aceh — Meulaboh akan terlihat banyak sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah dekat dengan jalan. Bilamana kelihatan gedung-gedung yang bobrok atau cenderung rubuh orang akan berkata bahwa itu adalah sekolah agama. Kenyataannya buat sekarang memang begitu. Sebaliknya, bila tampak gedung yang baik dan rapi mereka akan berkata bahwa itu adalah sekolah umum sungguhpun kenyataannya adalah lain, sebab ada juga atau dua sekolah agama (madrasah) yang baik. Dalam pun demikian gedung MTsAIN, MAAIN termasuk aula, IAIN dan beberapa gedung PGA di Kabupaten, baik dari segi gedung, guru maupun pelajarannya sudah dapat dibanggakan karena mendapat bantuan biaya pembangunan dari Departemen Agama. Sepanjang keterangan pemimpinnya MAAIN tahun depan ini akan dibagi ke dalam dua jurusan, yaitu *Sosial* dan *Pasti Alam*. Alat untuk itu dikatakannya telah cukup. Dan sesuai dengan nama sekolahnya semua pelajaran, tentu saja, dijiwai dengan didikan agama. Tujuan daripada penjurusan ini ialah bahwa jika ada murid-murid yang berbakat Pesti Alam nantinya dapat disalurkan ke Fakultas-fakultas Teknik, Pertanian, Kedokteran Hewan atau lain-lainnya. Dengan demikian akan terbinalah manusia-manusia yang berilmu (dibidangnya masing-masing) tetapi senantiasa berjiwa dan beramal agama.

Hal lainnya lagi yang dianggap orang sebagai kekurangan madrasah terlihat pada kelemahan guru-guru dan murid-muridnya dalam hal menampakkan diri dalam masyarakat (dewasa ini!) kecuali dalam satu bidang saja, yaitu: dakwah Islamiyah. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan rencana dan pelaksanaan pembangunan fisik-materiel mere-

ka tidak mampu angkat bicara. Namun demikian peranan ulama dan guru agama senantiasa dirasakan sebagai kuat sehingga partisipasi mereka dalam melaksanakan pembangunan sangat diperlukan.

Hubungan madrasah dengan masyarakat di kampung-kampung terasa masih amat kuat. Kecenderungan meninggalkannya baru ada manakala sekolah P & K telah ada didirikan di tempat yang sama. Keeratan hubungan itu terlihat pada kenyataan bahwa kalau ada rencana rakyat mendirikan sekolah maka yang akan mendapat prioritas pertama dari swadaya mereka pada umumnya adalah sekolah agama. Swadaya rakyat ke arah ide mendirikan sekolah umum dapat dikatakan baru berkembang (dengan grafik mengarah tinggi) pada tahun 1970-an. Sebagian besar rakyat berpendapat bahwa dari MIN dapat disambung ke sekolah lanjutan umum, sedangkan sebaliknya tidak. Dari MIN ketika menempuh ujian SMP kadang-kadang mencapai 90% dari jumlah murid berhasil memperoleh kemenangan. Begitu juga dari MTsAIN ke SMA dan dari MAAIN ke Perguruan Tinggi P & K. Sedangkan dari SD, SMP, SMA atau sekolah-sekolah umum lainnya dapat dikatakan tidak ada yang mau kembali memasuki sekolah agama.

5. *Intesitas daripada pengaruh ulama dan pergeseran nilai*

Pengaruh ulama dalam masyarakat dewasa ini, sungguhpun dapat dikatakan tetap besar, terbatas dalam hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan keagamaan, seperti pengajian di *meunasah*, pendidikan agama, pengaturan jamaah ibadat, urusan perkawinan, mendamaikan suami-isteri jika terjadi persengketaan, urusan perdamaian dan kemaslahatan kampung, perceraian, upacara-upacara kelahiran dan peresmian/pemberian nama anak, kenduri selamatan, pembacaan do'a, meluruskan hak dalam pembagian

harta warisan, mengetuai gotong royong, dakwah Islamiyah dan lain-lain. Dalam usaha-usaha pembangunan tampak rakyat lebih terdorong apabila mereka diikuti sertakan. Keterbatasan pengaruh itu kiranya dapat difahami karena pembagian kerja atau profesi yang kelihatan semakin jelas dan terpencar, seperti jawatan pertanian, perkebunan, sosial, penerangan, perindustrian, irrigasi, ramalan cuaca dan sebagainya. Dengan sendirinya tugas-tugas yang dahulunya seluruhnya berada di tangan ulama bergeser kepada jawatan-jawatan tersebut. Konsekwensi logis daripadanya ialah berkurangnya pengaruh ulama dalam hal-hal itu dan yang lain-lainnya lagi yang mungkin akan bergeser kepada jawatan tertentu.

Agam sedikit khusus mengenai pengaruh ulama *dayah*, terutama dari segi hubungan batin dengan murid dan masyarakat (dalam hal hubungan batin dengan masyarakat kurang lebih sama dengan ulama lainnya) senantiasa kelihatan kuat, sekurang-kurangnya dengan rakyat yang berada dalam orbit pengaruhnya. Ulama *dayah* mempunyai murid-murid yang bakal menjadi pengikut yang setia, dan, biasanya, kalau sudah mencapai tingkat ulama akan mendirikan *dayah* dan mempunyai murid pula. Demikian seterusnya. Murid-murid itu, betapapun banyak dan kuatnya, tidak akan mengadakan perlawanan, baik perseorangan maupun berkelompok. Sebab murid dengan guru mempunyai ikatan batin yang amat kuat. Seorang murid walaupun sudah tua dan alim pada galibnya akan selalu mengutamakan pendapat atau faham gurunya. Oleh karena itu rencana atau ide-ide yang (dianggapnya) datang dari luar lingkungannya, hatta dari pemerintah sekalipun, akan sangat kurang menggugah hati apalagi menarik perhatian kecuali bilamana disampaikan melalui guru atau ulama mereka. Sebab mereka belum mengiakan sebelum diiakan oleh guru.

Ikatan batin itu lebih erat lagi manakala terjadi dalam

bentuk hubungan *tarik*, *tawajjuh* atau *suluk*. Hubungan semacam ini membentuk sikap fanatik, sekurang-kurangnya pada tingkah laku batin. Karena itu tidak mudah menerima ide, pesan, faham atau apa saja yang datang dari luar. Maka dalam hal menyampaikan ide (pesan) diperlukan memahami "bahasa" dan dasar asumsi yang dipakai. Di antara garis yang kiranya dapat ditarik bahwa kekuatan ulama baik ia dari *dayah*, Muhammadiyah maupun dari madrasah, pada intinya kelihatan terletak pada hubungan religi dengan masyarakat.

Nilai, legimitasi atau asumsi yang dipakai untuk melihat atau mendekati sesuatu adalah mengukurnya dengan kaca mata agama. Nilai estetik dalam pembuatan rumah, umpamanya, tidak mendapat perhatian. Tiang sudut rumah bisa saja menyentuh pinggir jalan raya asalkan rumah yang dibangun tetap membujur ke kiblat (Mekah). Orang boleh saja menjadi papa dan menderita karena *kenduri mait* asal perbuatan itu tidak bertentangan dengan agama. Orang kampung boleh saja tidak sembahyang tetapi *meunasah* dan mesjid harus dibangun bersama.

Dewasa ini kelihatan adanya pergeseran nilai dari agama kepada lainnya, sungguhpun sebagiannya tidak bertentangan, mislanya nilai ilmiah, nilai ekonomi, nilai keindahan, nilai sosial dan sebagainya. Orang Aceh sudah mulai membuat rumah model baru dengan memperhitungkan nilai keindahan. Penyesuaian rumah dengan situasi dan kondisi tempat sudah mendapat perhatian sepenuhnya. Dalam KOPELMA Darussalam yang kelihatan menghadap kiblat di antara bangunan yang ada hanyalah mesjid dan musalla. Dalam hal bersedekah orang Aceh sudah memperhitungkan benar kemampuan ekonominya. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh pidato-pidato yang menganjurkan untuk itu. Dalam hal berpakaian puteri-puteri Aceh sudah meninggalkan ukuran agama tetapi yang diperhitungkan ialah ke-

indahan, kewajaran dan nilai sosial. Pergeseran itu akan jalan terus sampai entah kemana nantinya.

x) daerah penelitian									
No. Kerp	Kota	Desa	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
10	Wong	Leung	Wong	30	10	30	3	—	—
2	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
3	Wong	Balah	105	60	18	20	4	—	—
4	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
5	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
6	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
7	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
8	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
9	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
10	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
11	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
12	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
13	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
14	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
15	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
16	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
17	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
18	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
19	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
20	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
21	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
22	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
23	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
24	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
25	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
26	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
27	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
28	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
29	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
30	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
31	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
32	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
33	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
34	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
35	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
36	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
37	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
38	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
39	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
40	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
41	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
42	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
43	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
44	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
45	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
46	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
47	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
48	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
49	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
50	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
51	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
52	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
53	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
54	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
55	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
56	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
57	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
58	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
59	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
60	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
61	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
62	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
63	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
64	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
65	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
66	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
67	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
68	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
69	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
70	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
71	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
72	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
73	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
74	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
75	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
76	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
77	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
78	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
79	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
80	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
81	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
82	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
83	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
84	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
85	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
86	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
87	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
88	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
89	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
90	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
91	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
92	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
93	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
94	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
95	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
96	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
97	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
98	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
99	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—
100	Wong	Sejarsu	105	60	18	20	4	—	—

(terjemah penelitian dan data)

Isabel

Tabel 1
Perbandingan Madrasah dan Sekolah Umum di Aceh⁷⁵
(termasuk berbantuan dan Swasta)

No.Kab./Kodya	SD	MIN	SMP	MTsAIN	SMA	MAAIN	Ket.
1. Sabang	14	6	2	1	1	—	
2. Banda Aceh	39	10	11	2	6	2	x)
3. Aceh Besar	84	52	10	8	2	—	x)
4. Pidie	154	80	14	8	4	1	
5. Aceh Utara	230	102	26	11	8	2	
6. Aceh Timur	128	74	13	14	3	4	
7. Aceh Tengah	77	43	11	5	2	—	xx)
8. Aceh Barat	162	84	15	13	4	2	
9. Aceh Selatan	162	60	18	9	4	—	
10. Aceh Tenggara	92	36	10	2	2	—	
Jumlah	1.142	547	127	73	36	11	

xx) daerah perbandingan

Jumlah lembaga pendidikan yang berbentuk sekolah di Aceh, sesuai dengan tabel adalah 2.020, yaitu madrasah 547 dan sekolah umum 1.305, tidak termasuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Jumlah sekolah-sekolah umum kelihatan jauh lebih banyak daripada madrasah. Hal itu mungkin disebabkan oleh, antara lain, karena madrasah, kecuali MTsAIN dan MAAIN Banda Aceh, dibangun semata-mata dengan swadaya rakyat. Sedangkan sekolah-sekolah umum sebagian terbesar didirikan oleh Departemen P & K, dan yang terakhir, Inpres.

ԾԵԼԱՅՐ

Tabel 1
Perbandingan Madrasah dan Sekolah Umum di Aceh⁷⁵
Perbandingan Dayah dan Madrasah di Aceh⁷⁶,

No.Kab./Kodya	MIN	MTsAIN	MAAIN	Jum. Mdrs.	Dayah	Ket.
1. Sabang	6	1	—	7	1	
2. B. Aceh	10	2	2	14	2	x)
3. A. Besar	52	8	—	60	34	x)
4. Pidie	80	8	1	89	46	
5. A. Utara	102	11	2	115	65	
6. A. Timur	74	14	4	92	42	
7. A. Tengah	43	5	—	48	22	xx)
8. A. Barat	84	13	2	99	17	
9. A. Selatan	60	9	—	69	12	
10. A. Tenggara	36	2	—	38	3	
Jumlah	547	73	11	631	243	

Keterangan:

x) daerah penelitian

xx) daerah perbandingan

Sampai dengan saat penulisan laporan ini, belum dapat diteliti mengenai tingkat-tingkat pendidikan *dayah* seperti halnya dengan madrasah. Di dalam *dayah*, biasanya, tingkat itu tidak begitu jelas. Murid-murid kadang-kadang, dibenarkan mengikuti pelajaran pada semua tingkat sebagai pendengar. Oleh karena itu ada sementara keterangan di dalam *dayah* bahwa belajar dimulai habis sembahyang subuh sampai dengan pukul 12.00 (24.00) malam.

Angka 631 bagi madrasah, dalam semua tingkatnya, tidaklah begitu menyolok bila dibanding dengan 243 jumlah *dayah*. Jika diurutkan maka kelihatan bahwa *dayah*: madrasah: sekolah umum adalah 243 : 631 : 1.305. Dan jika dijumlah pendidikan yang bercorak agama dengan umum maka jumlah itu akan berbanding 874 dengan 1.305, belum termasuk pendidikan guru.

Tabel 3

Perbandingan Pendidikan Guru Agama dan Umum di Aceh⁷⁷
(termasuk yang berbantuan dan Swasta)

No.Kab./Kodya	PGA 4	PGA 6	Jumlah SPG	KPG	PGSLP	Jumlah	Ket.
1. Sabang	—	—	—	—	—	1	—
2. B. Aceh	—	1	1	2	1	4	x)
3. A. Besar	1	—	1	—	—	—	x)
4. Pidie	2	2	4	—	—	—	—
5. A. Utara	10	9	19	1	—	1	—
6. A. Timur	5	3	8	—	—	—	—
7. A. Tengah	2	1	3	1	—	1	xx)
8. A. Barat	2	3	5	1	—	1	—
9. A. Selatan	2	1	3	1	—	1	—
10. A. Tenggara	2	1	3	1	—	1	—
Jumlah	26	21	47	7	1	9	—

Keterangan:

- x) daerah penelitian
- xx) daerah perbandingan

Tabel menunjukkan bahwa dari segi pendidikan guru, kelihatan yang bercorak agama lebih banyak daripada yang bersifat umum. Tetapi penelitian angka menunjukkan bahwa dari 26 buah PGA 4 tahun itu hanya sebuah saja yang negeri. Berarti sebanyak 25 yang lainnya didirikan oleh Swasta. Dari 21 PGA 6 tahun 7 buah negeri, 14 buah didirikan oleh rakyat. Sedangkan 9 buah sekolah pendidikan guru umum, semuanya negeri.

Sejauh itu tabel hanya menunjukkan sekolah agama dan umum yang dapat dibanding. Sampai dengan sekian maka pendidikan yang bercorak agama adalah: 243 (dayah), 631 (madrasah) dan 47 (pendidikan guru) atau 921 buah. Sedangkan sekolah umum: 1.305 dengan 9 atau 1.314. Harus diingat bahwa sekolah umum masih banyak sekali yang belum dicatat disini, seperti STP, STM, SMP Pembangunan, SMOA, SKP, SKKA dan banyak lagi.

KESIMPULAN

Ulama, terutama *teungku chik*, adalah satu-satunya korps teknokrat Aceh pada zaman Kesultanan. Karena itu tidaklah mengherankan manakala Sultan dan rakyat memohon nasehat dan pertimbangan dari hampir segenap aspek kehidupan pada mereka. Mulai dari susunan kampung, bentuk rumah, tata pergaulan, cara-cara mencari nafkah, perkawinan, kelahiran, perceraian, kematian, turun ke sawah, penyesuaian musim, membuka areal persawahan atau perkebunan baru, pembangunan irigasi, dan saluran air, kenduri selamat, do'a dan restu sampai kepada urusan perhubungan dan pengaturan jaringan jalan-jalan di dalam kampung ditanyakan kepada ulama dan sering dilaksanakan di bawah pimpinan mereka.

Ulama memperlihatkan peranannya yang lebih besar lagi pada saat meletusnya perang Aceh melawan serangan Belanda. Setelah Sultan dan Panglima Polem terpaksa menyerah, ulama-ulama Aceh, terutama di bawah pimpinan ulama-ulama Tiro meneruskan perjuangan selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Dan setelah Teungku Chik di Tiro meninggal, sungguhpun semangat dan perlawanan menjurus menurun, namun perang Aceh masih tetap diteruskan oleh ulama-ulama lainnya. Sampai dengan masa Belanda dikalahkan oleh Jepang, tahun 1942, masih ada beberapa ulama Aceh yang tidak mau menyerah dan tetap hidup dalam suasana gerilya.

Sesudah perang dengan Belanda dapat dikatakan usai, para *teungku chik* sudah tidak ada lagi. Mereka semua telah *syahid* (mati suci) dalam pertempuran sebab selain ulama mereka adalah pemimpin rakyat, politikus dan komandan atau panglima perang. Yang berusaha mendirikan *dayah* atau usaha pendidikan lainnya di belakang mereka adalah para ulama tingkat *teungku di balee* atau tingkat *teungku di rangkang*, sisa-sisa perang. *Dayah* yang mereka dirikan, seperti halnya dengan sebelum perang, merupakan suatu kompleks yang didalamnya terkumpul *rangkang* dan *balee*. Yang mengajar di *rangkang* diberi gelar *teungku di rangkang* sedangkan yang mengajar di *balee* diberi gelar *teungku di balee*. *Teungku di rangkang* adalah murid *teungku di rangkang* adalah murid *teungku di balee*. Dalam setiap *dayah* di Aceh guru besarnya hanya satu dengan gelar *teungku di balee* dan dalam tugas mengajar mereka dibantu oleh muridnya yang telah pandai, yaitu *teungku di rangkang*.

Sistem jajahan yang berlaku menyebabkan hubungan antar ulama menjadi semakin renggang dan, lama-lama, sudah dapat dikatakan putus. Masing-masing berdiri sendiri, baik dalam usaha mendirikan *dayah* maupun dalam memimpin masyarakat. Barulah hubungan terjalin dan erat kembali setelah berkembangnya madrasah dan berdirinya organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939. Pada masa itu sudah mulai terbuka mata terhadap kejahatan penjajah dan perbuatan *uleebalang* sehingga para ulama merasa terpanggil untuk bersatu.

Pada masa pendudukan Jepang (1942 — 1945) ulama Aceh telah berusaha untuk bekerja sama dengan baik tetapi ternyata usaha itu semakin jauh dari berhasil. Bahkan para ulama, terutama setelah terjadinya pemberontakan Bayu dan Pandrah (Aceh Utara) yang memang dipimpin oleh ulama setempat, semakin dicurigai dan diawasi dan

beberapa orang daripada mereka malah mendapat ancaman. Yang mendapat angin adalah golongan *uleebalang* yang oleh Jepang diangkat menjadi Sunco (Camat), Gunco (Wedana) dan sebagainya. Maka ketika terdengar berita kekalahan Jepang (1945) para ulama segera bergerak mengusir mereka. Tetapi Belanda segera pula menyerang untuk menduduki Aceh kembali. Para ulama merasa terancam. Lalu ketika terdengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17-8-1945, para ulama Aceh segera menyusun perjuangan untuk mempertahankannya. Kekuasaan *uleebalang*, dengan alasan sebagian besar mereka secara terselubung membantu Belanda, dapat mereka tumbangkan bersama rakyat. Karena itu maka pada masa permulaan kemerdekaan para ulamalah yang memegang kendali pemerintahan, baik sipil maupun militer, di Aceh.

Pengaruh ulama Aceh dalam masyarakat dewasa ini, sungguhpun dapat dikatakan masih besar, terbatas dalam hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan keagamaan, seperti pendidikan agama, pengaturan jamaah ibadat, perkawinan, perceraian, kelahiran dan pemberian nama, kematian, upacara kenduri selamatan, pembacaan do'a, pembagian harta warisan, dakwah Islamiyah dan lain-lainnya. Keterbatasan itu dapat difahami karena sudah adanya pembagian kerja yang kelihatan semakin tajam dan terpecar, seperti jawatan pertanian, perkebunan, peternakan, sosial, penerangan, perindustrian, irrigasi, ramalan cuaca (hujan) dan sebagainya. Dengan sendirinya tugas-tugas yang dahulunya seluruhnya berada ditangan ulama bergeser kepada jawatan-jawatan tersebut.

Khusus mengenai pengaruh ulama *dayah*, terutama dalam segi hubungan batin dengan murid dan masyarakat yang berada dalam orbit pengaruhnya, senantiasa tampak kuat. Mereka mempunyai murid-murid yang bakal menjadi pengikut yang setia. Dan, biasanya, kalau sudah men-

capai tingkat ulama akan mendirikan *dayah* dan mempunyai murid pula. Demikianlah seterusnya. Murid dengan guru mempunyai ikatan batin yang sangat kuat.

Dalam usaha-usaha meningkatkan pendidikan, selain daripada mendirikan *dayah-dayah*, para ulama Aceh, terutama ketika merasakan kekurangan tenaga pengajar pada masa telah usainya perang melawan Belanda, mengirim putera-putera Aceh ke luar daerah/negeri, seperti ke Sumatera Barat, Jawa, Mekah dan Mesir. Sementara itu pendidikan *dayah* tetap dalam sistimnya semula tanpa perubahan. Tetapi sebagian ulama Aceh, kemudian, menganggap sistim itu tidak memadai lagi bagi usaha pembinaan generasi muda. Maka sistim baru pendidikan mulai disusun. Pengetahuan umum mulai diajarkan disamping pengetahuan agama. Sejalan dengan itu berkembanglah sistim pendidikan madrasah di Aceh dengan caranya yang lebih modern. Perkembangan sistim madrasah yang kelihatan semakin maju itu menimbulkan akibat gejala-gejala kebalikannya dari *dayah*, lebih-lebih setelah pulangnya putera-putera Aceh dari luar. Namun demikian *dayah* senantiasa dapat bertahan sampai sekarang.

Di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, madrasah yang berhasil didirikan oleh ulama-ulama PUSA hanya sampai dengan tingkat menengah pertama saja (namun mutu pengetahuan muridnya kelihatannya lebih tinggi dari sebagian besar sarjana IAIN dewasa ini), yaitu Normal Islam Institut Bireuen, Aceh Utara. Setelah Indonesia merdeka pendidikan madrasah, mula-mula ditingkatkan sampai dengan menengah atas, kemudian mulai tahun 1959 dilanjutkan dengan mendirikan perguruan tinggi (sekarang MIN, MTsAIN, MAAIN dan IAIN).

Kecenderungan meninggalkan *dayah* karena berkembangnya madrasah pada zaman penjajahan, dewasa ini

7) Berbeda sedikit dengan yang berlaku di Gayo, Aceh

bergeser kepada kecenderungan meninggalkan madrasah karena berkembangnya secara menyolok sekolah-sekolah umum Departemen P & K. Di Darussalam hanya 1 atau 2 orang dari dosen Universitas Syiah Kuala dan 2 atau 3 orang dari dosen IAIN yang memasukkan 1, 2 atau semua anaknya ke MIN. Sedangkan selainnya, yang ratusan jumlahnya itu, semuanya memasukkan anaknya ke SD.

Kecenderungan yang demikian disebabkan oleh antara lain: (1) sikap keterbukaan orang Aceh terhadap segala macam ilmu pengetahuan (kecuali mungkin ulama-ulama *dayah*) dan corak pendidikan sehingga tidak juga dapat dikatakan sedikit yang memasukkan anak ke sekolah-sekolah agama lain (Kristen), (2) adanya sementara anggapan bahwa guru-guru MIN kurang aktif di samping sebagian lainnya kurang memenuhi syarat, (3) semakin berkembangnya issue bahwa lulusan madrasah hanya akan menjadi manusia-manusia *spirituil*, (4) masa depan yang kurang cerah karena lulusan madrasah hanya akan bekerja dalam lingkungan Departemen Agama dengan berbagai masalahnya pula, (5) bila lulusan madrasah, termasuk IAIN, melamar pekerjaan kepada jawatan-jawatan lain selalu mengalami kemacetan karena, dikatakan, ilmunya tidak cocok dengan tuntutan jawatan tersebut.

CATATAN KAKI

- 1) Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh, *Wawancara*, 1975, Penulis sendiri dengan sengaja pergi menyaksikannya di lapangan.
- 2) Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba, *Wawancara*, 1975. Karangan Teungku Chik di Kutakarang mengenai obat-obatan terdapat dalam sebuah kitab bernama "Tajul Muluk".
- 3) Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh, *Wawancara*, 1974. Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba, *Wawancara*, 1975.
- 4) James Siegel, *The Rope of God*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1969,, halaman 61 — 67.
- 5) U.U. Hamidy, *Islamisasi Melalui Hikayat Aceh*, Bukittinggi, Kertas yang disampaikan dalam Symposium Aceh di Kongres I Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, 1975, halaman 2.
- 6) Di Aceh Tengah *meunasah* (bahasa Gayo: mersah) malah terdapat pada setiap *belah* (suku) sehingga dalam satu kampung, kadang-kadang ada 4 sampai 5 *meunasah*.
- 7) Berbeda sedikit dengan yang berlaku di Gayo, Aceh

Tengah, khususnya Takengon dan daerah sekitar danau Lauttawar, sekitar Simpang Tiga Redelang dan sekitarnya, dimana kelihatan bahwa pemuda-pemuda tidak tidur di *meunasah*, tetapi dalam sebuah pondok (atau bilik) yang disana dinamakan *serami*. Kedalam *serami* ini tidak dibenarkan orang tua-tua memondok atau menumpang tidur, kecuali umpamanya duda-duda yang masih muda. Di dalam *serami* para pemuda seolah-olah diizinkan membentuk adat sendiri, seperti: (1) bebas meniup *bensi*, *salung*, *serune* (semuanya semacam suling dari bambu atau kayu berlubang), (2) bebas *berdidong* (lagu asli Gayo dinyanyikan beramai-ramai; dibeberapa daerah ada yang terlarang kecuali secara resmi pada acara-acara tertentu), (3) bebas berbicara sekalipun agak porno, (4) mencuri kayu api di malam hari buat kepentingan menghidupkan api penghangat tidur, (5) jam 1 atau 2 malam mereka pergi *merojok* atau *mendere*, yaitu mencari tempat dimana sekumpulan gadis tidur untuk bercakap-cakap secara berbisik dari bawah rumah dengan tujuan menghibur hati atau mengikat janji kawin (perbuatan ini jika ketahuan akan dipukul atau terjadi perkelahian dengan pemuda-pemuda dari *belah* gadis), (6) merundingkan kepentingan mereka sesama pemuda, (7) mematangkan rencana perkelahian dengan pemuda-pemuda *belah* lain (sekarang sudah kurang atau dalam bentuk lain) dan (8) mematangkan rencana gotong royong yang diusulkan oleh orang tua atau pemimpin kampung. Kehidupan di *serami* tampaknya tidak memperlihatkan ciri-ciri tingkah laku keagamaan. Segi positifnya, antara lain, ialah memudahkan orang tua mengontrol, mengajak bergotong royong dan mengisolir mereka agar tidak membuat gaduh di luar *serami*. Sejak tahun 1945 (Indonesia merdeka) kehidupan *berserami*, kelihatannya, semakin ditinggalkan.

- 8) James Siegel, *op. cit.*, halaman 165.
- 9) Tetapi di Takengon, karena adanya adat *merojok* maka percakapan mengenai gadis menjadi aktif dan dinamis dalam kalangan pemuda. Hal itu didorong oleh pengalaman yang menyenangkan sepulangnya *merojok* yang dirasakan amat menarik untuk diceritakan kepada kawan-kawan. Demikian juga halnya dengan para gadis menjadi terdorong mempercakapkan pemuda yang disenanginya, setelah adanya pengalaman itu, kepada teman-temannya. Tetapi untuk bercakap atau bergaul bebas amatlah terlarang (sekarang sudah banyak perubahan) malah jika terjadi pelanggaran perkelahan segera terjadi. Mungkin pada tingkah laku inilah terlihatnya ciri keagamaan dalam kehidupan pemuda di daerah Takengon.
- 10) Ismuha, *Adat dan Agama di Aceh*, Bukittinggi, Kertas yang disampaikan dalam Symposium Aceh di Kongres I Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, 1975, halaman 9.
- 11) Teungku Muhammad Saleh Adri, *Wawancara*, 1974.
- 12) Teungku Ilyas Leube, tokoh Aceh Tengah, *Wawancara*, 1974.
- 13) Pengulangan nikah karena menukar nama suami dan atau isteri pernah terjadi di Takengon (di Kenawat sekitar tahun 1936). Saya belum tahu adakah pengulangan semacam itu terjadi di daerah-daerah lain di Aceh. Dalam karangan dukun cerita mengenai itu masih terdengar sampai sekarang.
- 14) Teungku Ilyas Leube, *Wawancara*, 1975.
- 15) Teungku Haji Rayeuk Lamno, *Wawancara*, 1974.
- 16) Seorang bidan di Seulimum, *Wawancara*, 1975.

- 17) Pelaksanaan *azan* di telinga kanan dan *iqamah* di telinga kiri bayi yang baru lahir adalah karena mengikuti perintah Nabi.
- 18) H.M. Zainuddin, *Bungong Rampoe*, Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1965, halaman 9.
- 19) *Ibid*, *op. cit.* halaman 11.
- 20) Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh, *Wawancara*, 1974.
- 21) Teungku Ibrahim Na'in, seorang ulama, *Wawancara*, 1975.
- 22) Talsya, *Atjeh Yang Kaja Budaja*, Banda Atjeh, Pustaka Meutia, 1970, halaman 11.
- 23) Beberapa orang ulama dan sarjana di Aceh mengatakan bahwa Syiah Kuala itu seharusnya atau sebenarnya berbunyi Syiah Ulama, kira-kira semacam Dewan Ulama yang berfungsi kurang-lebih sebagai DPR dewasa ini.
- 24) Piekaar, A.J., *Atjeh en De Oorlog Met Japan*, N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 's Gravenhage, 1949, halaman 220.
- 25) Di desa-desa Aceh, *keucik* dan *teungku meunasah* belum pernah absen atau terpisah dalam tugasnya memimpin rakyat.
- 26) Dada Meuraksa, *Atjeh 1000 tahun dan Peristiwa Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh cs.*, Medan, Pustaka Hasmar, 1953, halaman 45.
- 27) M. Said, *Atjeh Sepandjang Abad*, Medan, Diterbitkan sendiri, 1961, halaman 634.

- 28) Ismail Jakob, *Teungku Chik di Tiro, Hidup dan Perjuangannja*, Djakarta Bulan Bintang, 1952, halaman 16, 67, 143.
- 29) *Ibid.*, *op. cit.*, halaman 102. Lihat juga James Siegel, *op. cit.*, halaman 71.
- 30) Bachtiar Effendi Panglima Polem, *Perubahan Sosial dan Pergeseran Norma-norma di Aceh Besar*, Bukittinggi, Kertas yang disampaikan dalam Symposium Aceh di Kongres I Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, 1975, halaman 5.
- 31) Alfian, *The Ulama in Acehnese Society: A Preliminary Observation*, Banda Aceh, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Aceh, 1975, halaman 8. Lihat juga Ismuha, *Lahirnja Peraturan Ulama Seluruh Atjeh, 30 tahun jang lalu*, Majallah Sinas Darussalam, No. 15 dan 15 Djuni dan Djuli 1969.
- 32) Zaini Bakri, salah seorang tokoh Pemuda PUSA, *Wawancara*, 1975.
- 33) Insider, *Atjeh Sepintas Lalu*, Djakarta, Archapada, 1950, halaman 14.
- 34) Alfian, *op. cit.*, halaman 2.
- 35) Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh, *Wawancara*, 1974. Teungku Haji Ujong Rimba, *Wawancara*, 1975.
- 36) Pemuda dan gadis yang baru kawin di daerah sekitar Danau Lauttawar, Simpang Tiga Redelong dan sekitarnya (Aceh Tengah), dipanggil *Aman Manyak* (suami) dan *Inen Manyak* (isteri). Jika mereka sudah mendapat anak maka panggilan *Aman* dan *Inen* itu diikuti oleh nama anak mereka yang pertama. Mereka dipanggil *Aman Ali* dan *Inen Ali* jika anak mereka yang

pertama bernama Ali. Atau *Aman Ratna* dan *Inen Ratna* jika anak mereka yang pertama bernama Ratna. Oleh ayah bunda dan keluarga yang terdekat (untuk menunjukkan kesayangan) *Aman Ali* dan *Inen Ali* dipanggil *Aman Win* dan *Inen Win* (Bapak si buyung dan Mak si Buyung), sedangkan *Aman Ratna* dan *Inen Ratna* dipanggil *Aman Ipak* dan *Inen Ipak* (Bapak si Upik dan Mak si Upik).

37) Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh dan Teungku haji Abdullah Ujong Rimba, *Wawancara*, 1975.

38) A. Hasjmy, *op. cit.*, halaman 16.

39) *Ibid.*, *op. cit.*, halaman 47.

40) Peristiwa pengkhianatan Teungku Muhammad Dawud Cumbok yang memakan korban tidak sedikit di Pidie, termasuk yang paling diketahui di Aceh. Banyak Ulee-balang dibunuh setelah itu. Lihat Insider, *Atjeh Sepintas Lalu*, Djakarta, Fa. Archapada, 1950, halaman 10. Lihat juga Abdullah Arif, *Sekitar Peristiwa Cumbok*, Kutaradja, Abdullah Arif — Semangat Merdeka, 1946, halaman 8.

41) Abul Hamid, Muhammad Muhyiddin, Abdul Qadir bin Thahir Al Baghdadi, Al Asfirayini At Tamimi, Al Farqu Baina Firaq, Mesir, Maktabah Muhammad Ali wa Auladuh (tidak ada tahun), halaman 26 dan 323-337.

42) Afifi, Abul 'Ala', *Fushushul Hikam Lisy Syaikh Muhyiddin bin Arbi wat Ta'liqat 'Alaihi*, Mesir, Daru Ihya ilKutubil Arabiyyah, 1365 H./1946 M., halaman 31-32.

43) *Ibid.*, *op. cit.*, halaman 33. Lihat juga Encyclopaedia Britanica *Pantheism*, vol. 17, halaman 190. Lihat H.A.

- R. Gibb and Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden, E.J. Brill, London, Luzac & Co., 1961, halaman 146. Lihat juga Muhammad Farid Wajdi, *Dairah Ma'arif Al Qarni X wa XX*, Mesir, Maktabah Dairah Ma'arif Al Qarni XX, 1303 H./1903 M., Jilid X, halaman 678 — 690.
- 44) A. Hasjmy, *op. cit.*, halaman 16.
 - 45) Amir Hasan Nasution, *Nuruddin Ar Raniri, Mysticism*, Yogyakarta, Paper SPS, 1975, halaman 15. Teungku Muhammad Dawud Zamzani, *Wawancara*, 1975.
 - 46) Ustaz Razali Amna, Ketua Muhammadiyah Aceh, *Wawancara*, 1975.
 - 47) Perti adalah satu organisasi yang pada mulanya didirikan bertujuan untuk bersifat sosial-pendidikan, kemudian dalam gerakan politik (di zaman merdeka) menggabungkan diri ke dalam MASYUMI. Setelah beberapa tahun memisahkan diri menjadi partai politik yang berdiri sendiri. Dan terakhir kembali menjadi organisasi sosial yang dalam kegiatan politik meleburkan diri ke dalam Partai Persatuan Pembangunan.
 - 48) Teungku Abdul Wahab, Kepala Dayah Nurul Huda Seulimum, *Wawancara*, 1975. Teungku Jamaluddin Wali, putera Teungku Haji Muhammad Wali (Alm.) menjelaskan ciri murid *dayah* adalah pergi 50 orang datang 60 orang, sedangkan yang berhasil menamatkan pelajaran biasanya sedikit. Tetapi ada juga pada sesuatu *dayah* yang datangnya 50 orang keluarnya 60 orang sehingga murid yang ada semakin susut sampai ada yang terpaksa gulung tikar.
 - 49) Teungku Ibrahim Ishaq, Kepala Dayah BUDI (Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah) Lamno, Aceh Barat, *wawancara*, 1975.

- 50) A. Hasjmy, *op. cit.*, halaman 35.
- 51) Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba, A. Hasjmy dan Teungku Ilyas Leube, *Wawancara*, 1975. Petunjuk yang kuat untuk itu adalah kitab fikih karangan Syekh Nuruddin Ar Raniri bernama *Shiratal Mustaqiem*. Kitab ini disusunnya dalam Mazhab Sjafi'ie, sebagai tertulis didalamnya, dan telah menjadi pegangan bagi keputusan hukum di Aceh. Karangan Syekh Abdurrauf Syiah Kuala yang bernama *Mir'atut Thullab* yang dipedomani oleh Sultan dan ulama dalam menetapkan keputusan hukum adalah dalam Mazhab Sjafi'ie juga.
- 52) A. Hasjmy, *op. cit.*, halaman 13.
- 53) Teungku Muhammad Dawud Zamzami, *wawancara*, 1975.
- 54) Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh, *Wawancara*, 1974, Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba, *Wawancara*, 1975, dan Teungku Muhammad Dawud Zamzami, *Wawancara*, 1975.
- 55) Diantara *ranggang* ada yang terdapat hanya untuk tempat tidur pemuda saja. Misalnya *ranggang* disekitar mesjid, dikeliling *meunasah* (ada juga diantara *ranggang* semacam ini merupakan tempat pendidikan).
- 56) Teungku Muhammad Dawud Zamzami, *Wawancara*, 1975.
- 57) Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh dan Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba, *Wawancara*, 1975.
- 58) *Ibid.*, *Wawancara*, 1975.
- 59) James Siegel, *op. cit.*, halaman 48.
- 60) Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh, *Wawancara*, 1975.

- 61) *Ibid.*, Wawancara, 1975.
- 62) Teungku Muhammad Dawud Zamzami, Wawancara, 1975.
- 63) Alfian, *op. cit.*, halaman 7. Lihat juga A. Hasjmy, *op. cit.*, halaman 31.
- 64) Alfian, *op. cit.*, halaman 6.
- 65) A. Hasjmy, *op. cit.*, halaman 26 — 27.
- 66) Alfian, *op. cit.*, halaman 8. Lihat juga Ismuha, *Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Aceh 30 tahun yang Lalu*, Sinar Darussalam, No. 14 dan 15, Juni — Juli 1969.
- 67) A. Hasjmy, *op. cit.*, halaman 29 — 31.
- 68) Hadis Nabi. Sebagian ulama, misalnya Prof. Mahmud Junus, mengatakannya, *atsar* yang bersamaan kedudukannya dengan hadis.
- 69) Kebanyakan orang apabila mendengar kata "Agama" maka asosiasi yang timbul di dalam dirinya adalah artinya yang sempit yaitu ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, sedekah dan sebagainya. Pengertian semacam ini tidak cocok apabila agama itu dikaitkan dengan Islam.
- 70) A. Hasjmy, *op. cit.*, halaman 32 — 33. Lihat juga Alfian, *op. cit.*, halaman 9.
- 71) Zaini Bakri, Wawancara, 1975. Penulis sendiri adalah salah seorang murid SMIA Afdeeling B waktu itu.
- 72) Mahmud Junus, *Sedjarah Pendidikan Islam*, Djakarta, Mutiara, 1966, halaman 311 — 315.
- 73) *Keputusan Menteri Agama*, tanggal 21 Nopember 1953.

- 74) Peraturan Presiden R.I. No. 11 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 61), mengenai pembentukan IAIN. Penetapan Menteri Agama No. 43 Tahun 1960 tentang penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri dan Peraturan Menteri Agama R.I. No. 8 Tahun 1961 tentang pelaksanaan Penyelenggaraan IAIN.
- 75) Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh dan Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba, A. Hasjmy, *Wawancara*, 1975.
- 76) Data tahun 1975. Data mengenai SD, SMP dan SMA diperoleh dari Bagian Pengumpulan Data Kanwil Perwakilan Departemen P & K Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Data MIN, MTsAIN dan MAAIN didapat dari Bagian Pendidikan Kanwil Perwakilan Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 77) Data Tahun 1975 mengenai *dayah* diperoleh dari Bagian Pendidikan Kanwil Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 78) Data tahun 1975. Data mengenai PGA 4 Tahun dan PGA 6 Tahun diperoleh dari Bagian Pendidikan Kanwil Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Data mengenai SPG, KPG dan PGSLP didapat dari Bagian Pengumpulan Data Kanwil Departemen P & K Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DAFTAR BACAAN

KHUSUS

Ahmad, Abdullah, *Pengaruh Nilai-nilai Sosial dalam Pembangunan*, Banda Aceh, Paper untuk Seminar Nilai-nilai dan Pembangunan, Universitas Syiah Kuala, 1974.

Ahamad, Zakaria, *Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Tahun 1520 — 1675*, Medan Menora, 1972.

A.K. Baihaqi, *Masalah Perceraian di Aceh: Kasus Studi di dua Kecamatan*, Banda Aceh, Ringkasan Hasil Penelitian, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Aceh, Darussalam, 1974.

Alfian, *Agama, Pembangunan dan Horizon Pemikiran*, Banda Aceh, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Aceh, Darussalam, 1974.

—, *Cendekiawan dan Ulama dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh, Paper untuk Seminar Peranan Pemimpin-pemimpin Agama dalam Pembangunan Nasional, Sekretariat Seminar, 1974.

—, *The Ulama in Acehnese Society: A Preliminary Observation*, Banda Aceh, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Aceh, Darussalam, 1975.

Ali, A.M., *An Introduction to the Government of Aceh's Sultanate*, Jogjakarta, Jajasan Nida, 1970.

- Amin, S.M., *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, Djakarta, Soeroengan, 1956.
- Djamil, M. Junus, *Gadjah Putih*, Kutaradja, Iskandar Muda, Lembaga Kebudayaan Atjeh, 1958.
- Effendi, Bachtiar Panglima Polem, *Perubahan Sosial dan Pergeseran Norma-norma di Aceh Besar*, Bukittinggi, Kertas yang disampaikan dalam Symposium Aceh pada Kongres I Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, 1975.
- Hanafiah, Sulaiman, *Peranan Pesantren dalam Pembangunan*, Banda Aceh, Paper bandingan dalam Seminar Nilai-nilai dan Pembangunan, Universitas Syiah Kuala, 1974.
- Hasballah, Karimuddin, *Uroe Gantoe (Pasar Minggu) di Aceh Besar*, Banda Aceh, Ringkasan Hasil Penelitian, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Aceh, Darussalam, 1974.
- Hasjmy, A., *Hikajat Perang Sabi Mendjiwai Perang Atjeh lawan Belanda*, Banda Atjeh, Firma Faraby, 1971.
- Hoesin, Moehammad, *Adat Atjeh*, Banda Atjeh, Dinas Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1956.
- Husin, M. Thaib, *Peranan Pesantren dalam Pembangunan*, Banda Aceh, Paper untuk Seminar Nilai-nilai dan Pembangunan, Universitas Syiah Kuala, 1974.
- Hurgronje, C. Snouck, *The Achehnese*, translated from Dutch by the late A.W.S.O. Sullivan, Late E.J. Brill, Leyden, 1906.
- Insider, *Atjeh Sepintas Lalu*, Djakarta, Fa. Archapada, 1950.

Ismuha, *Adat dan Agama di Aceh*, Bukittinggi, Kertas yang disampaikan dalam Symposium Aceh di Kongres I Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, 1975.

Jajasan Kesedjahteraan Pegawai Djapenda, *Rentjana Peladjaran SRI Negeri/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari halaman 125 — 253*, Djakarta, C.V. Inderadjaja, 1972.

Jakub, Ismail, *Teungku Chik di Tiro, Hidup dan Perjuangannja*, Djakarta, Bulan Bintang, 1952.

, *Teungku Chik di Tiro (Muhammad Saman), Pahlawan Besar dalam Perang Atjeh*, Djakarta, Bulan Bintang, 1960.

Karim, A. Gani, *Peranan Agama dalam Pembangunan, Banda Aceh*. Paper untuk Seminar Nilai-nilai dan Pembangunan, Universitas Syiah Kuala, 1974.

Khursyid, Ibrahim Zaki, dkk, *Dairah Maarif Al Islami*, bab Atsyiah, jilid I, Cetakan 2, Al Qahirah, Asy Sya'bu, 1969.

Natsir, M., *Tugas Ulama*, Jakarta, Serial Dakwah, 1975.

Piekaar, A.J., *Atjeh en De Oorlog Met Japan*, N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 's Gravenhage — Bandung, 1949.

Reid, Anthony, *The Contest for North Sumatra, Aceh, Netherlands and Britain, 1858 — 1898*, London, New York, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1969.

Said, Muhammad, *Atjeh Sepandjang Abad*, Jilid I, Medan, Diterbitkan sendiri, 1961.

Siegel, James T., *The Rope of God*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1969.

Jajasan Pembina Darussalam/Studi Klub Islam, *Sinar Da-*

- russalam*, Majallah Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, Banda Aceh.
- Soelaiman, A. Darwis, *Integrasi antara MIN dan SD: Sebuah Problema Pendidikan*, Paper untuk Panel Discussion IKIP Bandung Cabang Banda Aceh, Sekretariat Team Ahli Penjatuan Kurikulum, 1967.
- Suyatno, *Gerakan Faham Pembaharuan Agama di Pedesaan Aceh Besar*, Kertas yang disampaikan dalam Symposium Aceh di Kongres I Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, Bukittinggi, 1975.
- Talsya, *Atjeh Jang Kaja Budaja*, Banda Atjeh, Pustaka Meutia, 1970.
- Team Ahli Penyatuan Kurikulum, *Laporan Perumusan Team Ahli Penyatuan Kurikulum SD dan MIN*, Banda Aceh, Sekretariat Team, 1973.
- Tjoetje, *Perkuburan Belanda "Peutjoet" Membuka Tabir Sedjarah Kepahlawanan Rakjat Atjeh*, Jajasan Kesejahteraan Karyawan Deppen Perwakilan Atjeh, Banda Atjeh, 1972.
- U.U. Hamidy, *Islamisasi Melalui Hikayat Aceh*, Bukittinggi, Kertas yang disampaikan dalam Symposium Aceh di Kongres I Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, 1975.
- Zainuddin, H.M., *Tarech Atjeh dan Nusantara*, Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1961.
- , *Bungong Rampoe*, Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1965.
- , *Srikandi Atjeh*, Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1966.

U M U M

Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Abdul Qadir di Thahir Al Baghdadi, Al Asfirayini, At Tamimi, Al Farqu bainal Firaq*, Mesir, Maktabah Muhammad Ali wa Auladuh.... (tidak ada tahun).

Afifi, Abul 'Ala', *Fushushul Hikam Lisy Syaikh Muhyidin bin Arbi wat Ta'liqat 'alaihi*, Mesir, Daru Ihyail Kutubil 'Arabiyah, 1365 H./1946 M.

A.K. Baihaqi, *Pendidikan dan Keluarga dalam Islam*, Banda Atjeh, Paper untuk penataran BP4 Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, Sekretariat Penataran, 1973.

Benda, Harry J., *The Crescent and The Rising Sun, Indonesian Islam Under The Japanese Occupation, 1942—1945*, W. van Hoeve Ltd., The Hague and Bandung, Distributed in the U.S.A. by Institute of Pacific Relation, New York, 1958.

Brown, L.B., *Psychology of Religion*, Selected Readings, Penguin Education, New York, 1973.

Chizantullah (Steunfond) dengan Jajasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern, *Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor*, Penggal III, Ponorogo, Diterbitkan oleh Jajasan sendiri..... (tidak ada tahun).

Encyclopaedia Britanica, *Pantheism*, Vol. 17.

Geertz, Clifford, *Islam Observed, Religious Development in Marokko and Indonesia*, New Haven and London, Yale University Press, 1968.

Gibb, H.A. R. and J.H. Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden, E.J. Brill, London, Luzac & Co., 1961.

- Goode, A., *Ajaran-ajaran Islam dan Pembangunan Indonesia*, Banda Aceh, Paper untuk Seminar Peranan Pemimpin-pemimpin Agama dalam Pembangunan Nasional, Sekretariat Seminar, 1974.
- Koentjaraningrat, *Methodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta, LIPI, 1973.
- Mulia, T.S.G., K.A.H. Hidding dan M. Natsir, *Ensiklopaedia Indonesia, Pantheism*, Jilid III, Bandung, N.V. Penerbitan W. van Hoeve 's Gravenhage,... (tidak ada tahun).
- Natsir, M., *Capita Selecta*, Jilid I, Bandung, N.V. Penerbitan W. van Hoeve Bandung, 's Gravenhage..... (tidak ada tahun).
- ..., *Fiqhud Dakwah, Djedjak Risalah dan Dasar-dasar Dakwah*, Djakarta, Cetakan II, Majalah Islam Kiblat, 1389 H./1969 M.
- Niewenhuyze, C.A.O. van, *Aspects of Islam in Post Colonial Indonesia*, The Hague and Bandung, W. van Hoeve Ltd., 1958.
- Noer, Deliar, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 — 1942, East Asian Historical Monograph*, Singapore, Kuala Lumpur, Oxford University Press London, New York, 1973.
- Prasodjo, Sudjoko, dkk., *Profil Pesantren, Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al Falak & Delapan Pesantren Lainnya di Bogor*, LP3ES, Djakarta,..... (tidak ada tahun).
- Proyek Peningkatan Penelitian/Survey Keagamaan Departemen Agama R.I. 1969 — 1970, *Laporan Survey dan Seminar Pendidikan Agama pada Perguruan Umum*, Djakarta, Departemen Agama R.I., 1970.

Proyek Peningkatan Penelitian Keagamaan Departemen Agama R.I. 1970 — 1971, *Laporan Survey dan Seminar Pendidikan Agama pada Perguruan Umum*, Djakarta, Departemen Agama R.I., 1971.

Robertson, Ronald, *Sociology of Religion*, Selected Readings, Penguin Books, 1969.

Saleh, H., *Revolusi Islam di Indonesia*, Darussalam, Banda Aceh, 1956.

Sekretariat Panitia Pelaksana, *Symposium Pelaksanaan Keputusan-keputusan KIAA 30 Djuni s/d 2 Djuli 1965 & Seminar Pondok Pesantren Seluruh Indonesia Tahap Pertama*, 4 s/d 7 Djuli 1965, Jogjakarta, IAIN Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah "Sunan Kalidjogo", 1965.

Wadjdi, Muhammad Farid, *Dairah Al Maarif Al Qarni X wa XX*, Mesir, Maktabah Dairah Ma'arif Al Qarnil 'Isyirin, Jilid X, 1303 H./1904 M.

Proyek Peningkatan Penelitian/Survey Keagamaan Departemen Agama R.I. 1969 — 1970, Laporan Survey dan Seminar Pendidikan Agama pada Perguruan Unam, Jakarta, Departemen Agama R.I. 1970.

Robinson, Ronald, *Sociology of Religion*, London, Pinguin Books, 1969.

Saifuddin Zuhri, *Islam di Indonesia*, Jakarta, Pustaka V. 1955.

Sejarah & Geografi, *Penelitian Keagamaan*, Jakarta, Departemen Agama R.I. 1969.

Fiqih Dakwah, *Diadakan dan Dasar-dasar*, Jakarta, Departemen Agama R.I. 1969.

Nieuwenhuys, C.A.G. van, *Aspects of Islam in Post Colonial Indonesia*, The Hague and Bandung, W. van Hoeve Ltd., 1958.

Noer, Deliar, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 — 1942*, East Asian Historical Monograph, Singapore, Kuala Lumpur, Oxford University Press London, New York, 1973.

Prasodjo, Sudjoko, dkk., *Profil Pesantren, Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al Falah & Delapan Pesantren Lainnya di Bogor*, EP3ES, Jakarta, (tidak ada tahun).

Proyek Peningkatan Penelitian/Survey Keagamaan Departemen Agama R.I. 1969 — 1970, Laporan Survey dan Seminar Pendidikan Agama pada Perguruan Unam, Jakarta, Departemen Agama R.I., 1970.

PRAKATA

ISLAM DI SULAWESI SELATAN

Dr. Mattulada

Laporan ini adalah merupakan bagian tersendiri dari satu laporan tersendiri lainnya yang akan disusun oleh Saudara Abu Hamid yang bersama-sama saya, merupakan satu team pelaksana "Proyek Penelitian Peranan Ulama dan Sistem Pendidikan Islam" untuk daerah Sulawesi Selatan, sesuai dengan perjanjian kerjasama penelitian antara Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (LEKNAS) dengan Fakultas Sastra UNHAS, tanggal 20 Juni 1975, No. 366/A/Lek/Dir/SB/K/1975.

Laporan ini sebagai hasil dari satu rangkaian penelitian pustaka dan lapangan yang mengarahkan perhatian kepada: (1) masalah historis dan sosiologis, kaitan Islam dan struktur masyarakat Sulawesi Selatan; (2) mencari identifikasi dan dasar legitimasi kultural serta pelopor-pelopor pembaharuan dalam masyarakat, dan (3) pengamatan umum tentang sistem pendidikan di *Madrasah* dan *Pesantren* dan pikiran-pikiran yang mendukungnya, baik secara historis maupun secara struktural, untuk memberikan satu lukisan dari landasan sosial dari sistem tersebut.

Berkenaan dengan pengarahannya perhatian tersebut maka laporan ini diberi judul: AGAMA ISLAM DI SULAWESI SELATAN, sedangkan laporan yang akan diajukan tersendiri oleh Saudara Abu Hamid akan menekankan perhatiannya kepada: (1) Mencari pola komunikasi antara satu unit

ISLAM DI SULAWESI SELATAN

Dr. Mattulada

PRAKATA

Laporan ini adalah merupakan bagian tersendiri dari satu laporan tersendiri lainnya yang akan disusun oleh Saudara Abu Hamid yang bersama-sama saya, merupakan satu team pelaksana "*Proyek Penelitian Peranan Ulama dan Sistim Pendidikan Islam*" untuk daerah Sulawesi Selatan, sesuai dengan perjanjian kerjasama penelitian antara Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (LEKNAS) dengan Fakultas Sastra UNHAS, tanggal 20 Juni 1975, No. 366/A/Lek/Dir/SB/K/1975.

Laporan ini sebagai hasil dari satu rangkaian penelitian pustaka dan lapangan yang mengarahkan perhatian kepada: (1) masalah historis dan sosiologis, kaitan Islam dan struktur masyarakat Sulawesi Selatan; (2) mencari identifikasi dan dasar legitimasi kulturil serta pelopor-pelopor pembaharuan dalam masyarakat, dan (3) pengamatan umum tentang sistim pendidikan di *Madrasah* dan *Pesantren* dan pikiran-pikiran yang mendukungnya, baik secara historis maupun secara struktural, untuk memberikan satu lukisan dari landasan sosial dari sistim tersebut.

Berkenaan dengan pengarahan perhatian tersebut maka laporan ini diberi judul: AGAMA ISLAM DI SULAWESI SELATAN, sedangkan laporan yang akan diajukan tersendiri oleh Saudara Abu Hamid akan menekankan perhatiannya kepada: (1) Mencari pola komunikasi antara satu unit

masyarakat tradisional dan/atau administratif dengan unit lainnya serta sumber utama integrasi antara mereka. Di samping kemungkinan adanya ikatan adat dan kesatuan administratif dalam pengembangan sistim pendidikan agama Islam di Sulawesi Selatan; (2) jangkauan (scope) dan corak pengaruh ulama sebagai pemimpin informil dalam masyarakat, melalui usaha pengumpulan biografi para ulama dan (3) menyelusuri sistim pendidikan di *Madrasah* dan *Pesantren* dan isi pengajaran dan pendidikan yang disajikannya.

Pembagian berdasar tekanan perhatian itu dilakukan sesuai dengan *Terms of Reference* Pimpinan Proyek, bahwa tiap-tiap anggota team akan menulis laporan, hasil penelitian sendiri-sendiri, sesuai dengan perhatian dan latar belakang keahlian masing-masing.

Penelitian lapangan di Sulawesi Selatan yang meliputi 23 buah Kabupaten/Kotamadya, dilakukan selama kurang lebih 8 bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan Desember 1975.

Team Sulawesi Selatan pada mulanya terdiri atas 3 (tiga) orang, yaitu Mattulada, Abu Hamid dan Robert Conkling. Robert Conkling sesuai dengan surat Sekretaris Kabinet R.I. No. 2833/Set. Kab/LN/E/6/1975, tanggal 25 Juni 1975, tak dapat melakukan penelitian lebih lanjut. Beliau meninggalkan Ujung Pandang menuju Amerika Serikat dalam bulan Juni 1975. Demikianlah maka laporan dari team Sulawesi Selatan hanya akan terdiri atas dua buah (bagian), dengan tidak mengurangi tujuan yang terkandung dalam *Terms of Reference* Pimpinan Proyek.

Di samping hal-hal yang dapat dijangkau oleh laporan ini, mengingat waktu dan biaya yang terbatas, maka berbagai hal yang penting yang ditemukan dalam penelitian ini, hanya dikemukakan sebagai saran atau perhatian khusus

yang dapat dijadikan bahan guna penelitian lebih lanjut pada kesempatan yang lain.

Moga-moga laporan ini dapat mencapai tujuannya.

Ujung Pandang, 31 Januari 1976.

MATTULADA

KEDATANGAN AGAMA ISLAM

Pada permulaan abad ke XVI, terutama setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis (1511), kerajaan-kerajaan orang Bugis—Makassar di Sulawesi Selatan, khususnya Gowa—Tallo telah membuka hubungan dagang dengan berbagai daerah di kepulauan Nusantara. Perahu-perahu niaga Bugis—Makassar telah mengunjungi kerajaan-kerajaan Melayu dibagian Barat dan kerajaan-kerajaan Maluku dibagian Timur.

Tome Pires, seorang pengembara Portugis yang mengunjungi Malaka dan pulau Jawa dalam tahun 1512 — 1515, memberitakan tentang keramaian pelabuhan Makassar, ibukota kerajaan Gowa-Tallo pada zaman itu. Dijumpainya orang-orang Bugis—Makassar sebagai pedagang-pedagang yang cekatan, mempergunakan perahu-perahu dagang yang besar dan bagus bentuknya. (Armando Cortesao, 1944).

Sebuah lontara orang Makassar, yaitu *patturioloanga ri Tugoaya* (= Sejarah Gowa), termuat dalam *Makassarsche Chrestomathie* (Matthes, 1860; hal. 137 — 175), dan telah diterbitkan dalam wujud transkripsi dan terjemahan oleh Wolhoff dan Abdurrahim (1956), dalam Bingkisan dengan judul *Sejarah Goa*, tercatat bahwa dalam masa pemerintahan raja Gowa ke X (1546 — 1565) yang bernama Tunipalangga, I Mariogau Daeng Bonto, Karaeng Lakiung, telah terjadi berbagai hal yang erat hubungannya dengan keadaan perkembangan masyarakat Sulawesi Selatan, menjelang

masuknya Islam di Sulawesi Selatan.

Dikatakan antara lain, bahwa setelah Tumaparigi Kal-lonna (Raja Gowa ke IV) mangkat, maka Tunipalangga yang mewarisi pemerintahan kerajaan Gowa. Baginda ketika itu berusia 36 tahun. Walaupun Baginda tidak terpuji karena kejujuran dan ketinggian ilmunya, namun ia dikenal sebagai raja yang amat berani, kenamaan dimana-mana dan cerdas disegala lapangan. Ia menaklukkan Bajeng, Lengcese, Lamuru sampai ke dekat Sungai Walanae, Cenrana, Salo' mekko, Cina, Kacci, Bulu-Bulu, Kajang, Lamatti, Suppa', Sawitto dan beberapa negeri lainnya di Sulawesi Selatan. Hanya Bone yang tak berhasil ditaklukkannya. Terhadap negeri yang ditaklukkannya Baginda memaksakan perjanjian: *makkanama' numammio* (= aku bertitah dan engkau membenarkannya), artinya hanya Gowa-lah yang memerintah, adapun negeri-negeri yang ditaklukkannya wajib mentaatinya.

Berbagai jabatan kerajaan diadakan seperti *Tamakka-jannangang anaburane*, yaitu pejabat kerajaan urusan pembelaan dan ketertiban dalam negeri dan jabatan syahbandar, yang sebelumnya dirangkap oleh *Tumailalang*, dipisahkan dan masing-masing jabatan dipangku oleh seorang pembesar kerajaan. Dikembangkannya pertukangan besi, emas, bangunan rumah dan perahu, persenjataan dan pertenunan dan sebagainya. Baginda pula yang pertama-tama menempatkan segala sesuatu dalam benteng, diperbuatnya timbangan, dacin, anak timbangan dan takaran. Benteng-benteng diperlengkapi dengan meriam-meriam. Dicatat juga bahwa pada zamannya, seorang bernama nakoda Bonang yang memimpin pedagang-pedagang Melayu, yang berasal dari Pahang, Patani, Johor, Campa dan Minangkabau, mendapat izin berdiam di Gowa dan kepada mereka diberikan beberapa hak istimewa, seperti tak akan dirampas mereka dengan sewenang-wenang.

Pada zaman pemerintahan Raja Gowa ke XII (1565 — 1590), yang bernama Tunijallo', Baginda mendirikan mesjid bagi pedagang-pedagang itu di Mangallekana, kampung tempat kediaman pedagang-pedagang itu di Makassar.

Menurut Noorduyn (1964, hal. 88), seorang Portugis bernama Pinto yang berkunjung ke Sulawesi Selatan sekitar tahun 1544, memberitakan dalam suatu surat kirimannya, bahwa ia telah bertemu disana dengan pedagang-pedagang yang beragama Islam dari Johor, Patani dan Pahang. Diberitakannya juga bahwa beberapa orang Bugis telah menerima agama Kristen dan mau dibaptiskan, dan dimintanya supaya dikirim padri kesana untuk melanjutkan penyebaran agama Katholik itu. Noorduyn berkesimpulan bahwa pada pertengahan abad ke XVI baik agama Islam maupun agama Kristen sudah datang ke Sulawesi Selatan. Tetapi penyebaran agama Katholik sesudah itu tidak diteruskan lagi oleh orang Portugis, sehingga pengaruhnya hilang lagi, sedangkan pada zaman itu belum ada orang Bugis-Makassar yang masuk Islam.

Dalam tahun 1565, Sultan Ternate, Baabullah, mengadakan kunjungan ke Makassar dan diterima sebagai sahabat oleh raja Gowa Tunijallo'. Kesultanan Ternate telah lebih dahulu menerima Islam sebagai agama kerajaan. Sebagian besar penduduknyapun telah memeluk agama Islam. Dari sebab pedagang-pedagang Melayu beragama Islam yang berdiam di Makassar bergaul amat akrab dengan penduduk asli orang Makassar, maka pengaruh agama Islam dikalangan orang Bugis-Makassar pada zaman pemerintahan Tunijallo' mulai menyebar dan tidaklah mustahil dikalangan penduduk orang Bugis-Makassar telah terdapat pemeluk agama Islam. Pedagang-pedagang Bugis-Makassar yang melayari perairan Nusantara ke negeri-negeri orang Islam di Jawa, Sumatra dan Malayu Utara, tentu saja telah mendapat pengetahuan tentang Islam. Malahan dalam ka-

langu orang Bugis—Luwu terdapat keterangan bahwa orang Luwu'lah yang pertama-tama memeluk agama Islam di kalangan orang Bugis di Sulawesi Selatan. Agama Islam dibawa ke Luwu' oleh pedagang-pedagang dan pelayar-pelayar mereka yang melakukan perjalanan ke Ternate dan pulau-pulau yang penduduknya sudah memeluk agama Islam.

Kira-kira dalam tahun 1600 (v.d. Brink, 1943, hal. 24), kerajaan Makassar mengirim utusan ke Johor, Pahang dan Malaka untuk mengundang ulama Islam, karena raja Makassar berkeinginan untuk memeluk agama Islam. Mendahului kedatangan Islam di Sulawesi Selatan, dengan kedatangan bangsa Portugis, agama Katholik pun tiba di negeri ini. Dalam tahun 1537, beberapa orang utusan dari Makassar datang ke benteng orang Portugis di Ternate yang dipimpin oleh Antonio Galvao, mereka menyatakan diri bersedia memeluk agama Katholik. Sekembalinya di Makassar mereka menganjurkan agama baru itu. Orang Makassar-pun mengirim utusan ke Galvao di Ternate, meminta dikirim pendeta. Di bawah pimpinan De Castro dikirimlah sebuah kapal yang memuat beberapa orang pendeta ke Makassar. Akan tetapi kapal itu terdampar ke kepulauan Filipina. Enam tahun kemudian seorang pedagang Portugis bernama Antonio De Paiva dari Malaka tiba di Makassar untuk memuat kayu cendana. Ia mendarat di Suppa dekat Pare-Pare, Raja Suppa dan Siang meminta memeluk agama Katholik dan mengharapka agar dikirimkan pendeta untuk menyebarkan agama itu. Franciscus Xaverius yang terkenal itu, acapkali memperkatakan tentang Makassar dan berhasrat untuk mengunjunginya. Dia berlayar sampai ke Ambon, akan tetapi tidak singgah di Makassar (v.d. Brink, 1943, hal. 24). Setelah itu agama Katholik tidak mengalami perkembangan dan kehilangan pengaruh. Lambat laun pengaruh agama Islam semakin tersebar di kalangan penduduk dan keluarga bangsawan dalam istana raja-raja. Agama Islam tersebar melalui jalan-jalan perdagangan.

Pedagang-pedagang yang sudah beragama Islam menyebarkan agama itu ke negeri-negeri yang penduduknya belum memeluk agama Islam. Dengan demikian maka agama Islam itu mula-mulanya tiba di negeri-negeri yang mempunyai pelabuhan niaga yang ramai dikunjungi oleh Pedagang-pedagang Islam. Pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota perdagangan yang penting, yang terlibat dalam pergaulan dagang dari Malaya dan Sumatra di sebelah Barat sampai ke Maluku di sebelah Timur Nusantara. Pada kuala maupun pelabuhan itu peranan Syahbandar sangat penting (Sidjabat, 1961, hal. 111). Para Syahbandar baik yang berasal dari Arabia maupun dari Gujarat juga berperanan besar dalam meletakkan landasan peng-Islam-an. Berkat pengetahuan bahasa asing, antara lain bahasa Arab dan Gujerati, syahbandar itu dapat menjadi perantara antara penduduk asli dengan pedagang luar negeri dari Barat (= India) dan beberapa negeri di Asia Barat Daya serta dari Asia Timur. Lebih-lebih sesudah akhir abad ke XIII, ketika route perdagangan dari kepulauan Indonesia ke Mesir melalui Bombay dan Aden. (Schrieke, 1959, hal. 238), bertambah maka jumlah syahbandar-syahbandar yang beragama Islam bertambah banyak.

Syahbandar bertugas memungut biaya dermaga dari pedagang-pedagang yang melabuhkan perahu-perahunya, dan menyerahkannya kepada kerajaan. Syahbandar merupakan pegawai atau pembesar kerajaan setempat mempunyai pengaruh besar, karena kekayaan dan kepandaiannya dalam menyebarkan agama Islam. Untuk menghempang ekspansi kekuasaan bangsa Portugis Syahbandar berhasil menunjukkan bahwa agama Islam dapat dijadikan benteng pertahanan kekuasaan raja setempat. Dalam usaha mendatangkan ulama-ulama dari tempat lainpun, seringkali para syahbandar ini pulalah memegang peranan penting. Bersama-sama dengan para pembesar kerajaan lainnya, syahbandar menjadi mubaligh Islam yang meletakkan sendi-

sendi dari lembaga-lembaga kerajaan Islam diberbagai negeri pesisir Nusantara.

Dalam hal penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, kemungkinan besar terdapat kekecualian dari pendapat-pendapat seperti diuraikan di atas. Para pedagang Bugis-Makassar yang berlayar dengan perahu-perahu mengunjungi pelabuhan dagang baik di bagian Barat, maupun di bagian Timur Nusantara.

Banyak di antara pedagang-pedagang pelayar itu juga penguasa di perairan dalam kelompok perahu-perahu niaga mereka yang bersenjata. Adakalanya mereka dianggap juga bajak laut yang ditakuti. Dalam peraturan pelayaran niaga, orang Bugis-Makassar menjadikan perahu mereka yang umumnya dinakhodai oleh orang-orang terkemuka sebagai negeri yang berlayar dengan segenap kelengkapannya. Mendatangi suatu pelabuhan, berarti negeri mereka lah yang mendatangi negeri itu. Maka merekapun berlaku sebagai berada dinegerinya sendiri. Mereka kawin dengan perempuan-perempuan negeri yang didatanginya. Mereka melahirkan keturunan dirantau dan adakalanya membawa pulang isteri-isteri dan anak-anaknya kembali ke negeri asalnya di Sulawesi Selatan. Mereka yang kawin dengan wanita wanita Islam dirantau, menerima agama Islam sebagai agamanya. Pada hemat kami sudah banyaklah orang Bugis-Makassar terkemuka di Makassar dan tempat-tempat lain di Sulawesi Selatan memeluk agama Islam, sebelum agama Islam itu dijadikan agama resmi dari kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar pada permulaan abad ke XVII.

Pemuka-pemuka agama Islam yang terdiri dari orang Bugis-Makassar sudah ada lebih dahulu, sebelum kedatangan ulama-ulama Islam dari luar daerah ini untuk menambah kepesatan perkembangan agama Islam, setelah agama itu dijadikan agama resmi kerajaan pada permulaan abad ke XVII. Orang Bugis-Makassar yang menjadi ulama Is-

lam, pergi kerantau berdagang, dan mempelajari agama itu di negeri-negeri yang penduduknya lebih dahulu telah memeluk agama Islam pada ulama-ulama terkemuka di negeri itu. Hal itu akan nyata kebenarannya apabila kita memperhatikan sejarah pertumbuhan aliran tarekat-tarekat yang terdapat di Sulawesi Selatan sampai pada hari ini, yang pada mulanya dibawa oleh ulama Bugis—Makassar sendiri dari perantauannya baik dari Malaya dan Sumatra, maupun dari Jawa dan Maluku.

Kerajaan yang mula-mula menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan (1605) adalah kerajaan kembar Makassar yaitu Gowa dan Tallo. Kerajaan Gowa dan Tallo pada waktu itu sudah menjadi kerajaan yang terkuat di Sulawesi Selatan.

Raja yang memeluk agama Islam pada waktu itu ialah Raja Tallo, yang juga menjabat Mangkubumi Kerajaan Gowa. Baginda bernama I Mallinggaang Daeng Mannyonri, dan diberi nama Sultan Abdullah Awalul Islam. Beberapa saat kemudian Raja Gowa yang bernama I Manganrangi Daeng Manyonri, dan diberi nama Sultan Abdullah Awalul Islam. Beberapa saat kemudian Raja Gowa yang bernama I Manngaranngi Daeng Manrabbia menerima juga peng-Islaman dan Bagindapun memperoleh gelar Sultan Alaud-din. Baginda adalah Raja Gowa ke XIV dan yang pertama memeluk agama Islam dalam usia lebih kurang 19 tahun, yaitu setelah baginda duduk di atas takhta lebih kurang 12 tahun lamanya. (Wolhoff, 1964, hal. 57).

Ada berbagai versi dalam ceritera rakyat di Makassar mengenai peng-Islam-an raja Gowa dan Tallo, disamping catatan-catatan ringkas yang terdapat dalam *lontara' bilang* dan *lontara' patturioloanga ri Tugowaya*.¹

1. Menurut *lontara' patturioloanga ri Tugowaya* (Wolhoff, 1964, hal. 56, 57), Raja Gowa dan Tallo di-Islam-kan

dengan mengucapkan syahadat oleh orang Minangkabau berasal dari kota Wanga (Tengah?), Khatib Tunggal, yang kemudian digelar Dato' ri Bandang, setelah ia berdiam di Ujung Kampung Pamatoang. Hanya itu saja yang tercatat dalam *lontara* tersebut.

2. Menurut ceritera rakyat Makassar (Noorduyn, 1964, hal. 90), seorang ulama dari Minangkabau Tengah, Sumatra Barat, bernama Abdul Makmur Khatib Tunggal, tiba di pelabuhan Tallo dalam tahun 1605, dengan menumpang sebuah perahu yang ajaib. Setibanya di pantai ia terus melakukan solat yang mengherankan rakyat. Ia menyatakan keinginannya untuk menghadap raja. Raja Tallo yang mendengar berita kedatangan orang ajaib itu bergegas pergi ke pantai.

Di tengah perjalanan ke pantai itu, di pintu gerbang halaman istana Tallo, baginda bertemu dengan seorang tua yang menanyakan tentang tujuan perjalanan baginda. Orang tua itu menulis sesuatu di atas kuku ibu jari Raja Tallo, dan mengirimkan salam kepada orang ajaib yang ada di pantai (Khatib Tunggal). Waktu khatib Tunggal diberitahu tentang pertemuan Raja dengan orang tua itu, ia melihat bahwa yang tertulis di atas kuku ibu jari Raja Tallo itu, ialah surah *Al Fatihah*. Khatib Tunggal menyatakan bahwa orang tua yang menjumpai baginda itu adalah penjelmaan Nabi Muhammad S.A.W. sendiri.

Orang Makassar menamakan penjelmaan Nabi Muhammad itu "Makkasaraki nabbi Muhamma". Sebagian orang Makassar menginterpretasi kalimat itu sebagai asal mula nama kota "Makassar".²

Segera setelah pertemuan Raja Tallo dan Khatib Tunggal maka bagindapun memeluk agama Islam dan menyebarkannya ke semua orang Makassar. Khatib Tunggal lah yang memegang peranan dalam mengajarkan agama Islam itu. Sampai sekarang apa yang dianggap tempat

pertemuan Raja Tallo dan (penjelmaan) nabi Muhammad masih ada, dan dijadikan tempat keramat yang diziarahi. Begitu juga kuburan Khatib Tunggal atau Dato'ri Bandang dalam kota Makassar masih terpelihara dengan baik.

3. Menurut ceritera rakyat versi lain, yang diceriterakan oleh mereka yang mempunyai cara interpretasi lain terhadap ceritera rakyat tersebut pada 2) di atas adalah sebagai berikut: Bahwa tokoh Abdul Makmur Khatib Tunggal, memang pernah ada, dan menjadi guru agama dalam istana Raja Gowa dan Tallo. Ia adalah salah seorang di antara tiga orang ulama yang didatangkan oleh kerajaan untuk menjalankan da'wah Islamiah di negeri ini. Ketiga mereka itu ialah: (1) Khatib Tunggal atau Dato'ri Bandang, (2) Khatib Sulung atau Dato'ri Patimang, dan (3) Khatib Bungsu atau Dato'ri Tiro. Ketika baginda raja Tallo, menyongsong kedatangan Khatib Tunggal di pintu gerbang istana Tallo (tempat yang dikeramatkan orang sampai sekarang), Raja Tallo, telah mengucapkan salam, sebagai lazimnya orang Islam mengucapkan salam, yaitu "*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*". Hal itu menunjukkan bahwa baginda sudah Islam, ketika Khatib Tunggal menemui baginda. Oleh karena itu maka orang Makassar membenarkan ujar Khatib Tunggal, bahwa (ajaran) Muhammad sudah menjelma di negeri ini. (*Makkasara' mi kanabianna Muhamma'*). Sama sekali tak ada hubungan kata *Makasara'* dalam ceritera ini dengan nama negeri atau suku bangsa *Makassar* atau *Mangkasara'*.

Versi yang ketiga ini, mencoba menunjukkan bahwa agama Islam sudah ada di Sulawesi Selatan dan dianut oleh perorangan-perorangan yang telah mempelajarinya, sebelum agama itu dengan resmi dinyatakan sebagai agama kerajaan Gowa dan Tallo pada tanggal 9 Nopember 1607.

Walaupun terdapat berbagai versi mengenai ceritera penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, dalam hubungan kedatangan Khatib Tunggal dan penerimaan Raja Gowa dan Tallo agama Islam sebagai agamanya, namun adalah satu hal yang tak dapat diragukan lagi kebenarannya, bahwa kedua orang raja itu, dengan ulama Khatib Tunggal telah memainkan peranan penting dalam penyebaran ajaran Islam, khususnya dalam lapangan pengajaran tentang hukum syariat dan ilmu Kalam. Besar dugaan, bahwa ajaran yang dikembangkan pada tahap itu, bersumber dari ajaran salah seorang wali dari Jawa yang tersohor yaitu Sunan Giri. Sangat mungkin bahwa Khatib Tunggal adalah murid dari Sunan Giri tersebut di Jawa Timur.

PENYEBARAN AGAMA ISLAM

Walaupun mungkin agama Islam telah tersebar di kerajaan Luwu (1603) (Makkarausu, 1975, hal. 1) lebih dahulu daripada di Gowa dan Tallo, namun kerajaan Gowa-Tallo yang menjadi pusat penyebaran Islam untuk seluruh jazirah Sulawesi Selatan. Tanggal resmi penerimaan Islam itu, ditandai dengan penerimaan Islam oleh raja Gowa yang bernama I Manngarangi Daeng Manrabbia, Sultan Alauddin, menurut *Lontara Patturioloanga ri Tugoaya*, ialah tanggal 9 hari bulan Jumadil-awal, pada hari Jum'at, menurut tanggal Masehi 22 September. (Wolhoff, 1964, hal. 57), tidak menyebut tahunnya. Sumber lain yaitu *Lontara Bilang Gowa-Tallo* (Koleksi Perpustakaan Museum Pusat di Jakarta), menyebut tanggal itu lebih lengkap dengan mengatakan/*namantama Islam karaengarua sisari' battang/* (= maka masuklah Islam kedua (orang) Raja itu bersaudara) 22 September 1603 atau 9 Jumadil-awal 1014 (H), malam Jum'at. Menurut perhitungan tahun yang lebih tepat, dikemukakan oleh Noorduyt (1955, hal. 93), ialah tanggal 22 September 1605, sesuai dengan 9 Jumadil-awal 1014 (H.), malam Jum'at (1964, hal. 88). Raja yang menerima Islam sebagai agamanya pada hari itu, ialah Raja Tallo bernama I Mallinkaang Daeng Mannyonri, Kara-Eng Tumenanga ri Bontobiraeng. Baginda juga merangkap jabatan Tumabbicara Butta (Mangkubumi) Kerajaan Gowa. Sebagai Raja yang mula-mula memeluk agama Islam, diberilah baginda nama Sultan Abdullah Awalul Islam.

Kira-kira pada waktu itu juga Raja Gowa dan Tallo sudah selesai di-Islam-kan dengan diadakannya sembahyang Jum'at pertama di Tallo, pada tanggal 9 Nopember 1607, setuju pada tanggal 19 Rajab 1606 (H.) Politik peng-Islam-an dijalankan oleh Raja Gowa dan Tallo dengan kuatnya. Keadaan itu didasarkan kepada perjanjian yang pernah disepakati pada waktu yang lalu oleh Gowa dan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan: "... bahwa barang siapa menemukan jalan yang lebih baik, maka ia berjanji akan memberitahukan (tentang jalan yang lebih baik itu) kepada raja-raja sekutunya".

Seruan peng-Islam-an itu oleh beberapa kerajaan kecil diterima dengan baik dan berlangsunglah peng-Islam-an ditempat itu dengan damai. Akan tetapi kerajaan Bugis yang kuat, seperti Tana Bone, Wajo dan Soppeng, menolak ajakan Gowa tersebut dengan keras, sehingga Gowa memaklumkan perang terhadap mereka. Empat kali Gowa mengirimkan pasukannya ke Tana Bugis. Pertama kalinya dalam tahun 1608. Tentara Gowa dikalahkan oleh lasykar Tana Bugis yang bergabung. Akan tetapi tahun-tahun berikutnya, kerajaan-kerajaan Bugis itu ditaklukkan satu demi satu. Tersebarlah Islam di Tana Bugis. Sidenreng dan Soppeng dalam tahun 1609, Wajo dalam tahun 1610, dan terakhir Tana Bone dalam tahun 1611. Raja Bone yang pertamanya memeluk agama Islam, ialah raja Bone ke-11, yang bernama La Tenripala, *Matinroe ri Tallo*'. (Mattulada, 1975, hal. 74).

Fase peng-Islam-an Sulawesi Selatan secara politis dan militer dapat dianggap selesai setelah kerajaan Bone menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Fase berikutnya adalah: (1) pengembangan ajaran Islam dan pemantapannya dalam pelaksanaan kekuasaan politik tiap-tiap kerajaan, dan (2) pemantapan integrasi ajaran Islam ke dalam adat istiadat dan kehidupan masyarakat.

Kedua hal itu menjadi pokok perhatian dalam penelitian ini.

(1) *Pengembangan ajaran Islam dalam pelaksanaan kekuasaan politik kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar.*

Kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar dalam abad ke XV dan XVI telah berkembang sebagai kerajaan-kerajaan lokal yang merdeka berdiri sendiri sebagai kerajaan berdaulat. Kerajaan-kerajaan yang pada zaman itu terpendang sebagai kerajaan berpengaruh, adalah kerajaan Luwu', Bone, Soppeng, Wajo, sebagai kerajaan orang Bugis, dan kerajaan Gowa-Tallo bagi orang Makassar.

Dikalangan orang Bugis, kerajaan Bone pada zaman itu dianggap sebagai yang terdepan mengendalikan pengaruh kekuasaan politik dikalangan mereka. Dilain pihak bagi orang Makakassar, kerajaan Gowa yang dipandang sebagai pemegang inisiatif dari segenap kegiatan politik dan kekuasaan dikalangan mereka. Kegiatan kepeloporan dari kedua kerajaan itu menyebabkan timbulnya usaha kedua fihak untuk saling atas mengatasi dalam rangka perebutan kepemimpinan politik di Sulawesi Selatan. Persaingan-persaingan itu seringkali meningkat menjadi sengketa politik yang dinyatakan dengan peperangan. Kerajaan Gowa yang menguasai hampir segenap negeri pesisir Selatan jazirah Sulawesi Selatan sangat bersikap ekspansif terhadap negeri-negeri tetangganya. Oleh karena itu dalam tahun 1582 tiga buah kerajaan Bugis yang bertetangga, yaitu Bone, Wajo dan Soppeng, menggalang persekutuan untuk bersama-sama menghadapi ekspansi kerajaan Gowa. Tiga kerajaan Bugis itu bersama-sama disebut: "*Tellumpoccoe*" (= Tiga puncak). Perjanjian-perjanjian mereka disebut *lanumpatue ri Timurung* (= penanaman batu di Timurung).

Berbagai lontara Bugis-Makassar mencatat tentang berbagai kegiatan politik dan peperangan yang telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Bone dan Gowa, dengan

maksud untuk memperebutkan kedudukan kepemimpinan di Sulawesi Selatan semenjak abad ke XVI, antara lain sebagai berikut:

1. Raja Gowa ke IX, Karaeng Tumapa'risi' Kallonna, yang memerintah lebih kurang 1511 — 1547, menaklukkan Garassi', Katingang, Parigi, Siang, Sidenreng dan Lembangang. Dipungutnya *sabbukati* (upeti) dari Bulukumba dan Selayar, dikalahkannya Panaikang, Mandalle dan Geubaga dan diadakannya perjanjian dengan raja Maros, yang bernama Karaeng LoE ri Ekkere, dengan raja Polombangkeng, yang bernama Karaeng LoE ri Bajeng, dengan raja Bone yang bernama *La Ulio Boto'E, MatinroE ri Terrung* (Raja Bone ke VI yang memerintah lebih kurang 1535—1560), dengan raja Lu' (Luwu'), yang bergelar Datu MatinroE ri Wajo, dan dengan raja Salo' mekko yang bernama "Magajaya".
2. Raja Gowa ke X, I Mario Gau' Daeng Bonto, *Karaeng Tunipalangga*, yang memerintah kira-kira tahun 1547—1565, melanjutkan politik perluasan wilayah seperti yang telah disebut pada bagian depan. Ditaklukkannya Bajeng, Lengkese dan sekalian orang Polombangkeng. Raja ini pula yang mula-mula melakukan peperangan dengan kerajaan Bone dan negeri-negeri Bugis sekitarnya. Ditaklukkannya Lamuru sampai di dekat (sungai) Walanae. Dipungutnya upeti perang, diramasnya "sonri" pedang pusaka orang Lamuru. Dipaksanya raja kerajaan Soppeng, yang bernama Puang ri Jamma menandatangani perjanjian yang menguntungkan Kerajaan Gowa, serta diambilnya pedang pusaka Kerajaan Soppeng yang dinamakan *I Lapauttuli*. Dikalahkannya negeri-negeri bawahan kerajaan Bone, Salomekko, Cina, Kacci, Patuku(ng), Kalubinibing, Bulu-Bulu, Kajang, Lamatti, di daerah pantai; Samanggi, Cernana, dan Bengo di pegunungan. Dijadikannya Sauma-

ta dan Camba negeri bawahan dan dipungutnya upeti. Dikalahkannya negeri-negeri Otting, Bulu' Cenrana dan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya seperti Wajo', Suppa', Sawitto. Dijadikannya negeri bawahan Alitta, Duri, Panaikang (Enrekang). Orang Bugis sekaliannya, ada yang dijadikannya hamba sahaya, ada yang dijadikan negeri-negeri takluk. Dikalahkannya Bulukumba, Ujung LoE, Panyikkokang, Palioi, Gantarang, Wero dan Selayar. Dipungutnya upeti perang dari orang Bira dan menjadikan daerah takluk negeri-negeri pegunungan sebelah atas. Demikian pula atas kerajaan Mandar di bagian Utara.

Hampir segenap daerah Sulawesi Selatan dan Tengah berada di bawah kekuasaan atau pengaruh Kerajaan Gowa. Setelah berperang dengan orang Bone, lebih enam tahun lamanya, maka bagindapun mangkat, ketika telah tiba kembali di Gowa.

3. Raja Gowa ke XI yang bernama I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng ri Data, yang setelah wafatnya digelarkan Tunibatta; memerintah lebih kurang tahun 1565, selama hanya 40 hari saja. Ketika baginda sudah 23 hari/malam di atas takhta, maka berangkatlah baginda untuk melanjutkan peperangan dengan orang Bone. Diserangnya orang Bone, mulai di Papolong, orang Bone-pun terpukul mundur sampai ke benteng-benteng pertahanan mereka dan negeri Bukaka di bumi hanguskan. Menjelang sore hari, pasukan-pasukan Gowa terpukul mundur. Peperangan itu berakhir dengan terpenggalnya batang leher Raja Gowa ke XI.

Itulah sebabnya maka Raja itu ketika wafatnya disebut Tunnibatta (= orang yang ditetak). Gowa mengalami kekalahan, sehingga negeri-negeri Bugis yang pernah ditaklukkan dibebaskan oleh kerajaan Bone.

4. Setelah Tunibatta mangkat, maka *Tunijallo'* yang naik takhta di Gowa lebih kurang tahun 1565 — 1570. Nama lengkapnya ialah I Manggorai Daeng Mammeta, Karaeng Bontolangkasa. Baginda merintis kembali perdamaian Bone dan Gowa. Untuk melakukan perdamaian itu, kerajaan Gowa mengutus Raja Tallo, Tumenga ri Makkoayang, bersama-sama Gallarang Manngasa dan Lo' mo ri Manrimisi, menemui raja Bone ke-7 *La Tenrirawe Bongkanngae* yang didampingi oleh Kajao Laliddo. Dalam pertemuan itu, tercapai persetujuan perdamaian yang disebut *Cappae ri Caleppa* (Perjanjian di Caleppa), dalam tahun 1565, yang amat menguntungkan pihak Bone.

Berkat perjanjian itu, terjadilah masa damai antara dua kerajaan selama kurang lebih sepuluh tahun (Noor-duyn, 1955, hal. 80).

5. Masa damai antara dua kerajaan tak dapat dipelihara lebih lama, karena dalam tahun 1585, meletus kembali peperangan antara Gowa dan Bone selama beberapa tahun. Dendam bertumbuh dan berkembang yang berkelanjutan dengan perang-perang yang seolah-olah tak ada henti-hentinya (Mattulada, 1975, hal. 73).

Keadaan seperti itulah terjadi mendahului datangnya Islam di Sulawesi Selatan. Satu keadaan kacau balau. Masing-masing kerajaan dan persekutuan hidup masyarakat berusaha mempertahankan diri untuk dapat melanjutkan hidupnya. Sebenarnya secara damai pengaruh Islam sebelum perang itu sudah mulai masuk ke daerah Bugis, dan kerajaan Luwu, yang telah menerima Islam itu lebih dahulu (1603). Cara penerimaan Islam yang dikembangkan dari kerajaan Luwu itu lebih bersifat lunak dan damai. Konsep Tuhan Yang Mahaesa atau ke-Esa-an Allah, disebar-kan dengan mempergunakan istilah dari kepercayaan pra-Islam yang bersumber dari Ephos Galigo, yaitu *Dewata-*

seuae (Dewata yang Tunggal),³ *Topalanroe* (Khalik); *Patoto'e* (Penentu nasib), dan sebagainya.

Arung Matoa Wajo To-U' damang La Mungkace Matinroe ri Kannana sebelum Wajo menerima Islam, sebagai agama Kerajaan (1610) dan meninggal dunia setahun sebelum peng-Islam-an itu, telah menganut konsepsi kepercayaan Islam tentang ke-Esa-an Allah. Kepercayaan seperti yang dianut itu merupakan pra kondisi yang menopang penerimaan Islam di negeri-negeri Bugis. Oleh karena itu peperangan yang dilancarkan oleh Gowa ke negeri-negeri Bugis dengan dalih penyebaran Islam, ditanggapi oleh kerajaan-kerajaan Bugis sebagai kelanjutan perang-perang masa lalu yang sama sekali tidak mempunyai alasan keagamaan, melainkan tujuan perebutan kekuasaan tunggal di Sulawesi Selatan semata-mata. Sebab itu pula penolakan Tellumpoccoe (Bone, Wajo dan Soppeng) atas ajakan peng-Islam-an dari kerajaan Gowa, yang memperingatkan tentang perjanjian "lama" seperti telah disebutkan di atas, ditolak.

Dari sumber lontara Luwu dan Wajo diperoleh keterangan bahwa sebelum ketiga Mubaligh (Abdul Makmur Khatib Tunggal, Sulaiman Khatib Sulung dan Abdul Jawad Khatib Bungsu) memulai penyebaran agama Islam di Gowa, mereka lebih dahulu ke Luwu melalui Selat Bone. Mungkin sekali yang menjadi pertimbangan mereka untuk lebih dahulu ke Luwu, karena raja Luwu-lah yang dianggap oleh masyarakat Bugis-Makassar sebagai raja atau kerajaan tertua yang diakui kemuliaannya dikalangan raja dan kerajaan Bugis-Makassar.

Ketiga orang Mubaligh Islam itu diterima baik oleh Datu (Raja) Luwu yang bernama La Patiware' Daeng Parabu. Raja Luwu menerima Islam sebagai agamanya pada tanggal 15 Ramadhan 1013 H. (1603 M.). Baginda diberi nama Islam Sultan Muhammad Waliyul Mudharuddin, setelah mangkat digelarkan Mantiroe ri Ware'. Raja Luwu La Patiware' menerima Islam sebagai agamanya bersama-sama

dengan segenap anggota keluarga istana kerajaan Luwu. Atas permintaan para Mubaligh itu agar kerajaan Luwu dapat memberikan bantuan untuk penyebaran agama itu ke negeri-negeri Bugis—Makassar lainnya, dijawab oleh Datu Luwu bahwa baginda ingin sekali memberikan bantuan, akan tetapi yang amat perlu didekati adalah kerajaan Gowa dan Tallo, karena kerajaan kembar orang Makassar itulah yang memiliki kekuatan. "*Alebbiremmani engka ri-luwu', awatangeng engkai ri Gowa*". (Hanya kemuliaan saja yang ada di Luwu, sedangkan kekuatan terdapat di Gowa).

Maka bersepakatliah ketiga orang ulama itu untuk berpisah dan masing-masing menurut caranya menyebarkan agama Islam ditempat yang mereka tinggali.

1. Abdul Makmur, Khatib Tunggal Dato' Ibadah yang kemudian terkenal dengan nama Dato' ri Bandang, meneruskan perjalanan ke Gowa (Makassar), dengan mempergunakan ajaran syariat Islam sebagai pokok ajarannya.
2. Sulaiman, Khatib Sulung, yang kemudian terkenal dengan nama Dato' Patimang, mula-mula bersama Abdul Makmur Khatib Tunggal ke Gowa, kemudian kembali dan tinggal di Luwu' dan menyebarkan Islam dengan cara pengutamaan ajaran Tauhid, dengan menggunakan kepercayaan lama (Kepercayaan Sawerigading, De'wa-tasseuae) sebagai cara pendekatan.
3. Abdul Jawad, Khatib Bungsu, singgah dan berdiam di daerah Tiro (Bulukumba), sehingga untuk selanjutnya ia terkenal dengan nama Dato' ri Tiro. Beliau mengembangkan Islam dengan ajaran Tasauf ke daerah sekitarnya.

Demikianlah mula-mula tersebarnya agama Islam di Sulawesi Selatan. Usaha kerajaan Gowa selanjutnya menyebarkan agama itu di samping dengan jalan damai, juga di-

iringi dengan penerangan ke negeri-negeri Bugis, seperti telah disebut, adalah pada hakekatnya untuk memperebutkan kekuasaan dan pengaruh keunggulan politik dikalangan kerajaan-kerajaan Bugis—Makassar di Sulawesi Selatan, yang selalu berada dalam keadaan persaingan antara satu sama lainnya. Pada akhirnya segenap kerajaan orang Bugis—Makassar (Gowa, Luwu', Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng sampai ke Tana Toraja), menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Periode penerimaan Islam itu berlangsung dari tahun 1603 sampai dengan tahun 1612. Setelah itu, dimulailah proses sosialisasi dan enkulturasi Islam kedalam peradaban Bugis—Makassar, yang disebut *Panngaderreng*⁴, dimana syariat Islam dijadikan salah satu unsurnya, seperti yang akan dijelaskan di bawah.

(2). *Pemantapan integrasi ajaran Islam kedalam Adat—Is-tiadat dan kehidupan masyarakat.*

Dalam lontara' *Latoa* (Mattulada, 1975, hal. 114—116), disebut:

".... eppa' mi uangenna pedecengie tana, iami nagenne' limampuangeng, narapi' mani asellengeng, naripattama tona sara'e, seuani adee', maduanna rapanngge, matellunna wari'e, maepa'na bicarae, malimanna sara'e. Naia adee ianappedecengiwi tau maegae naia rapanngge, ianappeutangiwi arajanngge, naia wari'e ianappeessekiwi asseajingenna tana masseajinngge, naia bicarae ianassappoi gaubawanna tau maggau' bawanngge ritu, nain sara'e, iana sanresenna to-madodonge namalempu'. Nakko tenripogau'ni ade'e masolanni tau maegae, nakko tenripogau'ni rapanngge, madodonni arajange, nakko de'ni wari'e tessituru' ni tau tabbe'e, nakko de'ni sara'e, mangkau' bawammanenni taue, nakko de'ni bicarae, masura'ni asseajingenna tana masseajinngge, ianamatti mancaji gaga'. Naia gaga'e naccappari musu',

na ia-iannani taullesangiwi rapanngé, iana ripapoleang ri alla-taala bali pasau', nakko tenriolani bicaræ, sianre-baleni taue, apa' tenripatau'ni gau' mawatanngé, maku-niro naelorenngi taurioloe ripeasseri ade'e, na-riatutui rapanngé, nariassiturusi ttaroi magetteng bicaræ, bara' kuammenngi nariribba tomawatanngé, naripeuatangi to-madodonngé".

Artinya:

"empat macam saja yang memperbaiki negara, barulah dicukupkan lima macamnya, ketika sampai kepada ke-Islam-an dan dimasukkan juga *sara'* (=syareat) Islam itu, pertama *ade*, kedua *rapang*, ketiga *wari'*, ke empat *bicara*. Adapun *ade* itu, ialah yang memperbaiki rakyat dan adapun *rapang* itu, ialah yang mengokohkan kerajaan, dan adapun *wari'* itu, memperkuat kekeluargaan negara (yang sekeluarga, dan adapun *bicara* itu ialah yang memagari perbuatan sewenang-wenang dari orang yang berbuat sewenang-wenang adanya, dan adapun *sara'* itu, ialah sandarannya orang lemah yang jujur, apabila tidak dipelihara lagi *rapang* itu maka lemahlah kerajaan, apabila hilanglah *wari'* itu tak bersepakatlah rakyat, dan apabila tak ada lagi *sara'* itu, maka berbuat sewenang-wenang semua orang, apabila tiada lagi *bicara* itu, maka rusaklah hubungan kekeluargaan negara-negara (yang) sekeluarga, ialah nanti menjadi (sumber) pertikaian, dan adapun pertikaian itu, berujung pada perang, dan barang siapapun orang (yang mengingkari *rapang* itu, ialah didatangkan baginya oleh Allah Taala lawan yang kuat, apabila tak dijalani lagi *bicara* itu, maka saling binasa membinasakanlah orang, karena tidak ditakutinya lagi perbuatan (yang bersumber) dari kekuatan (untuk diperbuatnya), begitulah maka dikehendaki oleh *to-riolo* agar diperteguh *ade'*, dipelihara dengan cermat *rapang*, dan bersama-sama menegakkan kepastian *bicara*, agar dirobokkanlah orang (yang memper-

gunakan orang) kekuatan (= kekerasan) dan diperkuatlah (perlindungan) terhadap orang lemah itu”.

Dengan diterimanya Islam dan dijadikannya *sara'* (syariat Islam bagian integral dari *panngaderreng*, maka pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Bugis-Makassar memperoleh warna baru, karena *sara'* (sebagaimana adanya yang sampai pada kehidupan orang Bugis) memberikan peranannya dalam berbagai tingkah laku kehidupan sosial budaya. Ketaatan orang Bugis-Makassar kepada *sara'* sama dengan ketaatan mereka kepada aspek *panngaderreng* lainnya. Keadaan seperti itu terjadi karena penerimaan mereka kepada Islam (sebagai agama), tidak terlalu banyak mengubah nilai-nilai, kaidah-kaidah kemasyarakatan dan kebudayaan yang telah ada. Apa yang dibawa oleh Islam pada mula datangnya, hanyalah urusan *ubudiah* (= ibadah) dan tidak mengubah lembaga-lembaga dalam kehidupan masyarakat yang ada, utamanya lembaga-lembaga sosial yang menyangkut kehidupan politik sesuai dengan *panngaderreng*. Islam mengisi sesuatu dari aspek kultural mereka, karena sasaran utama daripada para penyebar Islam (pada permulaan datangnya) hanya tertuju kepada soal iman dan kebenaran tauhid. Sendi kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai kesusilaan yang bertujuan menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia menurut fitrah ajaran Islam, memperoleh bentuk dalam konsep *siri*;⁵ yang disesuaikan dengan nilai terdalam dari kemanusiaan menurut Islam, yaitu rahasia kejadian atau *sirrun* (asrar) yang dalam istilah tasauf berarti kebahagiaan hati manusia yang paling dalam.

Karena sifat-sifat penyesuaian, maka penerimaan *sara'* kedalam *panngaderreng* menjadi sarana utama berlangsungnya proses sosialisasi dan enkulturasi Islam kedalam kebudayaan orang Bugis-Makassar. Proses itu berlangsung demikian intensifnya sehingga dikalangan mereka terjadi

peng-identikkan diri dengan Islam. Sangat janggal bagi bagian terbesar orang Bugis—Makksar, apabila dikatakan ada diantara mereka yang bukan Islam, karena orang yang demikian itu berarti menyalahi panngaderreng. Karena panngaderreng memberikan identitas kepada mereka, maka orang seperti itu (biasanya) dianggap bukan orang Bugis—Makassar lagi. Dia akan diperlakukan sebagai orang asing dalam kehidupan sosial budaya dalam lingkungan panngaderreng.

Sesungguhnya berbagai hal dalam tingkah laku dan tata nilai masyarakat pra-Islam masih berkelanjutan pada saat Islam mulai diterima sebagai agama baru. Dapat dikatakan bahwa tingkah laku itu mendapat perlindungan penguasa dan adat istiadat yang diakui oleh panngaderreng, seperti masalah asal keturunan yang mengatur pelapisan sosial yang ditentukan dalam *wuri*'; pandangan suci (sakral) terhadap *orajang* (alat-alat kerajaan); penjudian besar-besaran yang menjadi kegemaran kaum bangsawan; beristri sebanyak-banyaknya yang menjadi atribut kemuliaan bagi hartawan; pemujaan kepada benda-benda pusaka dan lain-lain yang pada hakekatnya bertentangan dengan syariat Islam.

Kelihatannya dapat terjadi berbagai pertentangan antara syariat (Islam) dengan panngaderreng. Akan tetapi sejak dari permulaannya telah dijaga agar perbedaan-perbedaan yang memungkinkan timbulnya pertentangan tidak terjadi dan agar sistim sosial tidak mengalami gangguan. Penjagaan itu rupanya dapat berhasil karena sejak semula, penyebaran agama Islam dilakukan atas prakarsa dan perlindungan kekuasaan raja-raja, sehingga perkembangan agama baru itu memperoleh tempat yang layak dalam rangka perkembangan masyarakat dan kebudayaan seluruhnya yang disebut panngaderreng itu.

Dimasukkannya *sara'* sebagai salah satu unsur panngaderreng memungkinkan perbedaan-perbedaan itu dapat diperkecil pengaruhnya. Pejabat-pejabat *sara'* (*parewa sara'*) dan pejabat-pejabat adat (*parewa ade'*) mempunyai kedudukan yang sama dalam panngaderreng, walaupun masing-masing jabatan itu mempunyai fungsi yang berlainan dan adakalanya (dapat dipandang) berlawanan. Akan tetapi tokoh raja yang ditempatkan sebagai orang tertinggi kekuasaannya dalam panngaderreng adalah tempat untuk mendamaikan setiap perbedaan dan pertentangan.

Pejabat *sara'* bertanggungjawab dalam hal pengembangan ajaran Islam dalam masyarakat ibadat, upacara-upacara keagamaan, pembinaan tempat-tempat ibadat (mesjid), pendapatnya dalam perkara pernikahan dan warisan, sangat menentukan meskipun dalam hal terakhir itu (pernikahan dan warisan) harus disesuaikan kepada adat-istiadat lama, seperti misalnya sistim pelapisan sosial dan kedudukan adat dalam pewarisan.

Perpaduan antara *sara'* dan *ade'* menurut panngaderreng nyata dalam berbagai hal. Susunan organisasi *sara'* dalam banyak seluk beluknya mengikuti saja susunan organisasi *ade'*. Dalam tiap kerajaan terdapat seorang pejabat *sara'* tertinggi yang disebut *kali* (*kadhi*). Pejabat-pejabat bawahan dari *kali* ini mengikuti jenjang pejabat *ade'* yang terdapat sampai ke desa-desa.

POLA PERKEMBANGAN ISLAM DALAM KERAJAAN-KERAJAAN BUGIS-MAKASSAR

1. Kerajaan Gowa

Seperti telah disebut pada bagian depan, pada zaman pemerintahan Raja Gowa ke-XII (1565—1590), yang bernama I Manggorai Daeng Mammata KaraEng Bontolangkasa, nama wafatnya Tunijallo', kerajaan Gowa telah mempunyai hubungan persahabatan dengan berbagai kerajaan di Nusantara yang lebih dahulu sudah menerima Islam. Dalam lontara Gowa disebut bahwa kerajaan Gowa mengadakan persahabatan dengan Mataram, Banjarmasin, kerajaan-kerajaan kecil di kepulauan Maluku dan Timor, Johor dan sebagainya. Salah seorang sahabat raja Gowa ke-XII, Sultan Ternate yang bernama Baalullah pernah melakukan kunjungan ke Somba-Opu, ibu negeri kerajaan Gowa dalam tahun 1580. Diriwayatkan bahwa dalam per-kunjungan ke Sulawesi Selatan dan Tengah itu juga diikuti sertakan pemuka-pemuka agama Islam. Ia juga mengadakan dakwah Islam di tempat-tempat yang dikunjungi. Demikian pula ketika Sultan menjadi tamu Raja Gowa di Somba-Opu, maka dakwah Islam dilakukan dikalangan orang Islam yang berdiam di Manngallekana (kampong sekitar benteng Somba-Opu). Adapun orang Islam yang telah menetap di Gowa, pada umumnya terdiri dari orang-orang pedagang Melayu yang berasal dari Pahang, Patani, Johor dan negeri-negeri di Sumatra. Untuk mereka didirikan mesjid oleh raja Gowa di kampong Manngallekana itu. Ketika

kerajaan Gowa belum menerima agama itu sebagai agama resmi kerajaan dan rakyat Gowa, mesjid inilah yang menjadi tempat dakwah Islam yang pertama di Sulawesi Selatan. Jadi keadaan lebih matang untuk penyebaran agama itu kedalam kalangan penduduk.

Pada tanggal 9 Nopember 1607, kerajaan kembar orang Gowa—Tallo, dengan resmi menerima Islam sebagai agama kerajaan. Rakyat Gowa-pun dinyatakan sebagai pemeluk agama Islam. Kerajaan orang Makassar inilah yang mengembangkan politik peng-Islam-an ke seluruh daerah Sulawesi Selatan. Abdul Makmur Khatib Tunggal (Dato' ri Bandeng), menjadi ulama yang mengajarkan agama itu dikalangan kaum bangsawan Gowa. Didirikannya mesjid Kalukubodda (Tallo—Gowa), sebagai pusat pengajian Islam yang dikunjungi oleh murid-murid selain berasal dari Gowa, juga dari segenap negeri-negeri Bugis—Makassar lainnya yang telah menerima agama Islam. Pokok-pokok ajaran Islam yang dikembangkan di pusat pengajian Kalukubodda (Gowa—Tallo), adalah ajaran syariat Islam, yang bersasaran kepada rukun Islam, rukun iman, tentang hukum-hukum wajib, harus, makruh, mubah dan haram, tentang hukum perkawinan, pewarisan dan upacara-upacara hari besar Islam.

Sejak awal pengembangan dakwah Islam, orang-orang Melayu yang berdiam di Makassar telah memegang peranan penting, terutama dalam penulisan dan penyalinan buku-buku agama Islam dari Bahasa Melayu ke bahasa Makassar (lontara). Berbagai lontara yang asalnya dari bahasa Melayu, diduga berasal dari zaman permulaan perkembangan Islam di Sulawesi Selatan (abad XVII — XVIII), yang sampai sekarang masih populer dikalangan orang tua-tua Bugis—Makassar, antara lain:

(1) Lontara perkawinan antara Saidini Ali dengan Fatimah, puteri Rasulullah, (2) Lontara Nabi Jusuf dan percintaan Laila dan Majnun, (3) *Sura' bukkuru'* yang dalam bahasa

Bugis dikenal dengan lontara pau-paunna Sultanul Injilai, (4) Budi Istihara, (5) Kitta Paraid (Hukum Pewarisan Islam), (6) Kitta nika (Hukum Pernikahan), (7) Lontara'-na Sehe-Maradang, (8) Lontara tentang peperangan Nabi Muhammad dengan Raja Hindi, (9) Berbagai mu'jizat Nabi Muhammad, (10) Lontara tentang wewenang kali (kadhi) menurut sara' dan banyak lainnya lagi. (lihat *Kert Verslag*, Dr. B.F. Matthes, 1875).

Di dalam naskah-naskah lama (lontara) Makassar, tidak dijumpai keterangan tentang pengangkatan kali (kadhi) sebagai pejabat sara' tertinggi dalam kerajaan Gowa. Hanya disebut bahwa Abdul Makmur Khatib Tunggal, menjadi guru agama dalam istana raja Gowa-Tallo. Ulama itu berdiam di ujung kampung Pammatoang, mengajarkan syariat dan ilmu kalam.

Pada mulanya raja Gowa sendirilah yang menjadi Hakim agama Islam dalam kerajaan dan menjadi pelindung agama Islam dalam kerajaannya (keterangan dari lapangan). Barulah pada saat pemerintahan raja Gowa ke-XV (kurang lebih 1637 — 1653) Sultan Malikkusaid (I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung), organisasi sara' dalam kerajaan Gowa memperoleh bentuknya yang jelas. Mesjid kerajaan didirikan di Lakiung dan diangkat kali dengan sebutan *Daengta Kali Gowa*, mengepalai segenap pejabat sara', yaitu Imam, Khatib, Bilal, Mukim dan lain-lainnya, yang tersebar ke segenap pelosok kerajaan.

Daengta Kali Gowa, duduk mendampingi raja Gowa dalam segenap musyawarah kerajaan. Mesjid-mesjid didirikan di tiap-tiap negeri (*Bate*)⁶ dan *langgara'* (langgar), di tiap-tiap kampung. Mesjid dan langgar itu ditempati penduduk selain untuk bersolat, juga dipergunakan untuk pengajian agama bagi anak-anak muda di tempat itu. Guru mengaji itu dinamakan juga *Anrong-gurunta* atau *gurunta*. Di tempat itu diajarkan mengaji Qur'an, dan dasar-dasar pengetahuan

agama yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam.

Walaupun dalam kerajaan Gowa sejak pada mulanya dikembangkan ajaran syariat Islam, namun adat kebiasaan yang menyangkut lapangan kehidupan yang penting, seperti memberi sesajen pada *saukung* (rumah pemujaan roh)⁷ pada waktu panen, dan lain-lain kebiasaan yang berasal dari zaman pra-Islam, yang pada hakekatnya bertentangan dengan syariat Islam, tidaklah dengan keras dan segera diberantas. Ajaran para ulama mulai dari Dato' ri Bandang, sampai beberapa puluh tahun sesudah itu, tidak sebagai larangan yang mutlak diberantas. Di Gowa pada umumnya *panngadakkang* (adat) dan *sara'* telah hidup berdampingan dan damai sebagai dua aspek dari kebudayaan.

Terdapat beberapa petunjuk bahwa pada zaman pemerintahan raja Gowa ke-XV Sultan Malikkussaid ini yang konon mendapat gelar "Sultan Muhammad Said" dari Mufti Mekkah, pengaruh tasauf dan tarekat sudah ada pula di Gowa. Petunjuk ini menjadi lebih kentara dalam pemerintahan raja Gowa ke-XVI, Sultan Hasanuddin, yang berperang melawan Speelman dalam tahun 1666 — 1669. Pada waktu itu di Makassar sudah ada orang yang mengetahui tentang tasauf yang diajarkan di Aceh oleh Hamzah Pansuri, yaitu mistik heterodox yang bersifat panteistik yang disebut *wujudiah*.

Mungkin sekali Sultan Hasanuddin sendiri juga seorang anggota tarekat, seperti terpantul dari syair Perang Makassar yang dikarang dalam bahasa Melayu oleh seorang Sekretaris Sultan Hasanuddin. Sultan dipuji sebagai orang arif dan mukamil yang sudah mencapai martabat yang tinggi. Dalam syair itu termuat juga suatu kutipan dari karangan mistik Hamzah Pansuri (Noorduyn, 1964, hal. 92). Apakah ajaran tarekat tasauf ini, berasal dari ajaran Abdul Jawad, Khatib Bungsu, Dato' Tiro, yang bermukim di Tiro

(Bulukumba), masih memerlukan penelitian tersendiri. (Menurut catatan tahun 1974, sekurang-kurangnya ada 28 buah aliran tarekat dan kebatinan di Sulawesi Selatan, lihat Lampiran).⁸ Namun demikian untuk kelengkapan laporan ini dirasa perlu dikemukakan ala kadarnya peranan seorang tokoh yang berasal dari Gowa dalam perkembangan Islam di daerah ini, tokoh itu ialah Syekh Yusuf.

Kira-kira pada zaman itu juga datang pengaruh mistik melalui murid-murid *Tuanta Salamaka*, Syekh Yusuf. Meskipun Syekh Yusuf itu berasal dari Gowa, sebahagian besar hidupnya berdiam dan mengajar di Banten, yang pada zaman itu telah menjadi pusat penyiaran Islam yang terkemuka. Dalam tahun 1645, tanggal 22 September, Syekh Yusuf meninggalkan Gowa (Makassar) menuju ke Mekkah. Beliau kabarnya pernah kembali ke Gowa sesudah itu, tetapi kecewa melihat keadaan negerinya, maka beliauapun meninggalkannya. Beliau menetap di Banten, menjadi pemimpin tarekat *Khalwatiah* dan guru tasauf yang masyhur, sehingga banyak orang berguru ke sana menjadi muridnya, antara lain orang Bugis—Makassar dari Sulawesi Selatan.

Ketika pecah perang Saudara di Banten antara Sultan Banten dengan anaknya, Sultan Haji yang dibantu oleh Kompeni, Syekh Yusuf memihak kepada Sultan Banten. Ia ditawan Kompeni dan dibuang ke pulau Sailan dalam tahun 1683. Pada waktu itu sebagian murid-muridnya yang berasal dari Sulawesi Selatan yang mengikutinya dalam peperangan kembali ke daerah asal mereka. Sepuluh tahun kemudian Syekh Yusuf dibuang ke Afrika Selatan, disanalah ia berpulang dan dimakamkan. Setelah itu jenazahnya diangkut ke Gowa dan dikuburkan kembali di desa Lakiung, dekat kota Makasar dalam tahun 1705. Pemindahan jenazah ini diusahakan oleh raja Gowa pada waktu itu Sultan Abdul Jalil yang amat menghormati

Syekh Yusuf. Sampai sekarang, makam Syekh Yusuf di Lakiung itu menjadi tempat berziarah yang ramai, tempat orang melepas nazar dan memohon berkat.

Syekh Yusuf juga dikenal sebagai pengarang berbagai buku tasauf dalam bahasa Makassar, Bugis, Arab, Melayu dan Jawa. Karangannya yang memakai bahasa Jawa berjudul "*Barkah Syekh Yusuf Saking Banten*" yang mengajarkan antara lain bahwa manusia itu walaupun menurut badannya berasal dari Adam, tetapi menurut jiwanya dari dasar dunia, yaitu Roh Muhammad. Diajarkan juga tentang jalan mistik yang membawa orang kepada kesatuan dengan Allah. Bukunya yang berbahasa Bugis, Makassar dan Arab, berjudul "*Al-Nur al-Hadi*", yaitu "Terang yang Membimbing ke Jalan Lurus". Syekh Yusuf yang disebut juga "Tuanta Salamaka" digelarkan "*Tajul Khalwatiah*".

Dalam perjalanannya ke Mekkah Syekh Yusuf singgah untuk beberapa lama di Banten. Dari Banten beliau ke Aceh dan berguru pada ulama besar, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, di zaman pemerintahan Ratu Tajul Alam Syarifuddin Syah, puteri Iskandar Muda, Mahkota Alam. Dari ulama besar Aceh itu, beliau mendapat ijazah Tarekat "*Al-Kabiriah*". Dari Aceh beliau ke Yaman, berguru pada Syekh Abi' Abdillah Muhammad Abdul Baqi, tarekat "*Naqsyabandiah*". Selanjutnya di negeri Zubaid (Yaman) beliau berguru tentang tarekat "*Assadah Al-Ba' Alwiyyah*" dari Sayid Ali. Dari Yaman beliau ke Mekkah menunaikan ibadah Haji. Di Medinah Al-Munawarah beliau tinggal sementara menuntut ilmu dan menerima ijazah tarekat "*Syattariah*" dari Syekh Burhanuddin Al-Malla bin Syekh Ibrahim bin Al-Husain bin Syihabuddin Al-Kurdi Al-Karrani Al-Madani. Dari Madinah beliau ke negeri Syam (Damaskus). Di sana beliau memperoleh ijazah tarekat "*Khalwatiah*" dari gurunya yang bernama Syekh Abdul Barakat Ayub bin Ahmad

bin Ayub Al -Khalwati Al-Qurasi. Ulama ini adalah Imam pada Mesjid Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi di Damaskus. Ulama inilah yang memberikan kepada Syekh Yusuf⁸ gelar "*Tajul Khalwati Khadiyatullah*". (HAMKA, 1961).

Setelah mendalami berbagai ilmu tasauf dan ajaran Islam lainnya, kembalilah beliau ke Gowa. Tetapi alangkah kecewa hatinya, karena didapatinya Kerajaan Gowa sudah lain dari Gowa yang dahulu ditinggalkannya. Didapatinya ajaran Syareat Islam sudah mengendur, dan mengabur di mana-mana. Suasana perang menghadapi Belanda semakin menghangat, tetapi justru dalam keadaan seperti itulah orang Gowa menggoyahkan sendi-sendi kekuatan Iman. Kebiasaan-kebiasaan pra-Islam yang menjadi kesenangan kaum bangsawan dihidup-hidupkan kembali. Jadi diselenggarakan secara besar-besaran; *ballo' Sarru* (minuman keras) menjadi minuman yang digemari dan terdapat di mana-mana; pemadatan atau candu, berjangkit dikalangan bangsawan dan cendekiawan dan pemujaan kepada *Pantasa* dan *saukang*⁹ berkembang di mana-mana. Hal semacam itulah yang dijumpai oleh Syekh Yusuf di negerinya. Syareat Islam sudah terdesak mundur dalam perkembangannya.

Syekh Yusuf mengajukan permohonan dengan keras kepada pembesar-pembesar kerajaan dan kepada Raja Gowa sendiri, agar segera ditegakkan kembali Syareat Islam, dengan penghapusan perjudian; larangan minuman keras; pemberantasan pemadatan (candu) dan pemusnahan *pantasa* dan *saukang*, agar kerajaan dapat tegak menghadapi tantangan yang amat besar. Akan tetapi permohonan Syekh Yusuf itu ditolak oleh pembesar-pembesar kerajaan Gowa, dengan dalih: Apabila perjudian dihapuskan, maka matilah pasar-pasar, berarti menutup sumber pendapatan kerajaan (sussung dan baratu).¹⁰ Apabila *ballo' sarru* (Minuman

keras) dilarang, maka akan hilanglah keberanian para prajurit menghadapi musuh dalam perang. Apabila madat dan candu diberantas, maka akan habislah inspirasi para ahli pikir dan apabila *pantasa* dan *saukang* dimusnahkan, maka akan hilanglah yang membedakan antara bangsawan dan bukan bangsawan. Dengan jawaban para pembesar kerajaan itu, maka Syekh Yusuf-pun berkata: "Inilah pangkal kejatuhan Kerajaan Gowa. Gowa akan runtuh karena itu". (*Lontara Syekh Yusuf*).

Sebelum meninggalkan Gowa untuk selama-lamanya, beliau sempat menamatkan dan memberi ijazah kepada murid-muridnya yang terkemuka, yaitu: Syekh Nuruddin Abdul Fattah, Abdul Bashir Adlarir Ar-Rafani (dari Rappang) dan Abdul Kadir Karaeng Jeno'. Kepada murid-muridnya itu dikuasakannya untuk melanjutkan ajarannya untuk dikembangkan di Sulawesi Selatan. Setelah itu beliaupun berangkatlah ke Banten.

Di Gowa, terutama dalam dua desa dekat kota Makassar, yaitu desa Antang dan Tetabatu, ada dua golongan penduduk (Tarekat?) yang beranggapan bahwa Gowa, sama derajatnya dengan Tanah Suci Mekkah dan Madinah. Apa-apa yang terdapat di tanah Arab itu, terdapat juga di Gowa. Malahan kepercayaan mereka itu seolah-olah mendasar apa-apa yang terdapat dalam Islam. Misalnya tentang air zam-zam itu ditimba dari sumur "*bungung barania*" di istana raja Gowa di Kale Gowa (istana tua Gowa abad XVI) pada tanggal 9 Zulhijah, sehari sebelum orang di Mekkah menimba air zam-zam. Mereka memulai puasa bulan Ramadhan, sehari sebelum orang lain dengan resmi melakukannya. Baitullah bagi mereka adalah puncak gunung Bawakaraeng, karena itu dalam bersalat kiblat mereka ke Timur arah gunung itu. Bagi mereka yang pernah berziarah ke Bawakaraeng sama dengan yang pernah ke Mekkah untuk ibadat Haji. Dalam penelitian lapangan (akhir tahun 1975), penganut kepercayaan ini (lomo'ri Antang) masih

ada. Mereka mengaku beragama Islam yang taat. Penyelenggaraan upacara-upacara kepercayaan mereka, dilakukan dengan berkelompok-kelompok yang disembunyikan tempat dan waktunya.

2. Kerajaan Bone

Raja Bone yang pertama-tama memeluk agama Islam (sesudah musu'selleng), ialah raja Bone ke-12, La Tenripala Mationroe ri Tallo', (memerintah lebih kurang 1606—1631), pada hari 23 Ramadhan 1021 H. (1610 M). Akan tetapi menurut sumber *lontara Wajo* (Andi Paramata cs., 1975, hal. 18), Raja Bone ke-11 yang bernama La Tenriruwe Matinroe ri Bantaeng (memerintah lebih kurang 1605—1606) secara pribadi lebih dahulu telah menerima Islam, sebelum perang agama Islam (*musu' selleng*) dilancarkan oleh kerajaan Gowa. Baginda menyerukan Islam untuk dianut oleh para pembesar kerajaan dan rakyat Bone. Akan tetapi seruannya itu ditolak. Maka bagindapun turun takhta dan pindah ke Pattiro. Raja Gowa memberinya nama La Tenriruwe Arung Pattiro, Adamulmarhum Kalinul Awalul Islam. Sesudah Gowa menangani peperangan atas Kerajaan Bone, maka La Tentiruwe bermukim ke Bantaeng dan wafat di sana.

Setahun kemudian Raja Bone, La Tenripala dan rakyatnya menerima Islam sebagai agama resmi dalam Kerajaan Bone, maka bagindapun berangkat ke Gowa mempelajari agama Islam pada Khatib Tunggal Dato' ri Bandang. Baginda diberi gelar Sultan Abdullah. Tiap-tiap tiga tahun sekali, baginda bersama orang-orang terkemuka kerajaannya melakukan perjalanan ke Gowa. Di samping urusan kenegaraan, diperdalamnya pengetahuan tentang Islam, setiap kali baginda berkunjung ke Gowa. Baginda akhirnya wafat di Tallo, maka dinamakanlah baginda setelah wafatnya La Tenripala Toakappeang Matinroe ri Tallo'.

Pokok-pokok ajaran Islam yang dikembangkan dalam

kerajaan Bone sejak awalnya, bersumber dari ajaran Khatib Tunggal Dato'ri Bandang, yang menekankan pada ajaran syareat dan ilmu kalam. Seperti halnya di Gowa, maka baru kemudian organisasi pejabat-pejabat *sara'* yang termasuk dalam aspek panngaderreng mendapat bentuknya yang konkrit dan diperlakukan dengan amat intensif, terutama dalam masa pemerintahan Raja Bone ke-13, yang bernama La Maddaremmeng, Matinroe ri Bukaka (lebih kurang 1631 — 1640). Diduga pada zaman pemerintahan La Maddaremmeng inilah diangkat pejabat-pejabat *sara'*, mulai dari kali sampai pejabat bawahannya yang terdiri dari orang-orang bangsawan keluarga raja semuanya. Karena itu parapejabat *sara'* di Bone mendapat gelar bangsawan juga, seperti: *Petta Kali-e*, *Petta Imang*, dan lain-lainnya. *Petta* adalah sebutan bagi orang-orang bangsawan, yang berarti "Tuan-ku".

Pejabat-pejabat *sara'* yang disebut "Parewa Sara' " itu terdiri atas seorang Kali untuk seluruh Kerajaan, beberapa Imam, beberapa Khatib, beberapa Bilal, beberapa Mukim dan beberapa Amil sesuai dengan jumlah mesjid pada tiap-tiap daerah kerajaan. Mereka berperanan penting dan resmi baik dalam urusan keagamaan maupun dalam urusan politik, di samping para penguasa adat atau kerajaan, menurut jenjangnya masing-masing.

Para pejabat *sara'* mengatur urusan upacara-upacara keagamaan, seperti Maulid, Isra' dan Mi'raj dan Ied dan di istana Raja. Mereka sangat berperanan dalam urusan pernikahan raja-raja dan kaum bangsawan lainnya, serta penyelenggaraan upacara-upacara dalam kematian raja dan pembesar.

Pendidikan agama bagi orang-orang muda dan anak-anak pada umumnya dilakukan di mesjid-mesjid dan langgar-langgar yang diurus oleh guru-guru agama yang biasanya dirangkap oleh orang-orang pejabat *sara* itu. Selain itu di mesjid-mesjid dan langgar-langgar itu, rumah-rumah kediaman

mereka ditempati juga untuk pengajian dan pendidikan agama.

Dalam lontara' Bone disebut bahwa pada zaman pemerintahan Raja Bone ke-13 La Maddaremmeng, syareat Islam dijalankan dengan amat keras. Baginda menghapuskan segala sesuatu yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Berhubung karena sikap raja itu yang keras dalam usaha untuk menghapuskan segala sesuatu yang berbau musyrik, Ibundanya melarikan diri dan meminta perlindungan pada raja Gowa, Raja inilah yang memaksakan pembebasan semua *Ata* (sahaya),¹¹ dan semua tempat pemujaan dari zaman pra-Islam dilenyapkan.

Raja-raja kawan dan lawan dicelanya apabila mereka menurut pandangannya tidak menjalankan syareat Islam sebagaimana mestinya. Daerah-daerah perbatasan kerajaan yang tidak mentaati aturan keagamaan juga diperangnya. Demikianlah terjadi bahwa daerah Peneki, bagian dari Kerajaan Wajo didudukinya dalam tahun 1643. Maka terjadilah perang antara Bone dan Wajo, yang mendapat bantuan dari kerajaan Gowa. Perang Bone melawan Wajo-Gowa ini, membawa kekalahan pihak kerajaan Bone yang amat parah. Raja Bone La Maddaremmeng, ditawan dan dibawa ke Gowa. Baginda tiba ditempat penawanannya di Gowa pada tanggal 23 Juli 1644.

La Maddaremmeng dikalahkan dalam peperangan, malahan dia ditawan, akan tetapi dinegerinya sudah tertanam syareat Islam. Sara' sudah dipadukannya kedalam Panngaderreng, sebagai pola dalam tata kehidupan kerajaan dan rakyat Bone.

Tujuh belas tahun lamanya kerajaan Bone dikuasai oleh kerajaan Gowa, sampai pada akhirnya La Tenritatta', Arupalakka Petta Malampe-e Gemme'na, atas bantuan Kompeni Belanda, di bawah pimpinan Admiral Speelman berhasil merebut kembali takhta kerajaan Bone dan menjadi raja

Bone ke-14 (1667-1696). Peperangan Gowa melawan Bone yang dibantu oleh Kompeni Belanda itu diakhiri dengan perjanjian yang terkenal *Cappaya ri Bungaya*, tanggal 18 November 1667.

Ketika menguasai Bone, raja Gowa mengangkat Kara-Engta Sumanna (dari Gowa) menjalankan pemerintahan atas nama Raja Gowa. Ditunjuk pula I Tobala (orang Bone) menjadi Kadhi. Setelah kerajaan Bone melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Gowa dan La Tenritatta menjadi Rajanya, mulailah dipulihkan kembali lembaga-lembaga Kerajaan Bone, dan berfungsi dengan lebih efisien dan angadereng, yang didalamnya termasuk sara', dengan kelengkapan pejabat-pejabatnya. Pada zaman pemerintahan La Tenritatta yang dibantu oleh kekuasaan Kompeni Belanda, dapat dikatakan seluruh Sulawesi Selatan berada di bawah kekuasaannya atau sekurang-kurangnya di bawah pengaruhnya. La Tenritatta berkediaman di Bontotala (Makassar), oleh karena itu banyaklah pemuka masyarakat Bugis dari Bone, Wajo, Soppeng, dan lain-lainnya yang kerap berkunjung ke Makassar. Dalam kunjungan ke Makassar itu terjadilah hubungan-hubungan yang lebih luas dengan orang-orang terkemuka yang berasal dari segenap penjuru Sulawesi Selatan, juga yang berasal dari luar Sulawesi Selatan. Mubaligh atau ulama-ulama¹² asal Sulawesi selatan sendiri, seperti murid-murid Syekh Yusuf, Syekh Nuruddin Abdul Fatah, Abdul Bashir dari Rappang dan Abdul Kadir Karaeng Jenong lebih leluasa mengembangkan dakwah Islam ke negeri-negeri Bugis-Makassar, karena batas-batas kerajaan yang tadinya saling bermusuhan, lambat laun tidak menjadi penghalang lagi. Dibagian Selatan jazirah Sulawesi Selatan, mulai dari pegunungan Lompobatang di Bantaeng sampai ke batas Selatan kerajaan Bone, dakwah Islam dikembangkan oleh Khatib Bungsu Dato' Tiro dengan murid-muridnya.

Ulama-ulama itu dalam gerakan dakwahnya membawa semangat persatuan dikalangan orang Muslim dan merintis adanya tempat-tempat perguruan atau pengajian Islam seperti di Bone, Wajo, Rappang, Sinjai dan lain-lain. Mulai pulalah hubungan ke Jawa untuk berniaga dan berlayar lebih terbuka. Orang Bugis-Makassar yang menunaikan ibadah Haji atau berlayar ke Mekkah dan Madinah semakin bertambah-tambah pula jumlahnya.

Ulama-ulama lainnya, baik yang berasal dari Jawa dan Sumatra, maupun orang-orang Arab, diundang oleh penguasa-penguasa daerah untuk menyebarkan dakwah Islam. Banyak di antara mereka terutama keturunan Arab dan Melayu, yang menetap di negeri-negeri Bugis dan beranak cucu di negeri-negeri itu.

Ada dua cara yang dikenal paling umum, yaitu: (1) untuk pendidikan dasar agama (mengaji Qur'an, belajar salat dan lain-lain) bagi anak-anak. Mereka mengunjungi guru-guru mengaji yang biasanya dilakukan di mesjid-mesjid atau di rumah guru-guru mengaji itu. Guru-guru mengaji itu pada umumnya adalah juga parewa sara', yaitu Imam, Khatib, dan lain-lain. (2) untuk pendidikan lanjutan agama bagi para pemuda-pemuda, mereka mengunjungi ulama tertentu yang memberikan pendidikan itu. Di tempat kediaman ulama itu berkumpul puluhan pemuda yang mengikuti pengajian. Pengajian cara ini dikenal dengan istilah Bugis-Makassar "*panngaji kitta*". Pada tempat-tempat pengajian yang terkenal, murid-muridnya yang disebut *santari*,¹³ adakalanya berasal dari daerah atau negeri lain. Maka *santari* itu berdiamlah dalam pondokan yang dibangun disekitar rumah tempat kediaman ulama atau guru itu.

Di samping dua cara yang umum itu, terdapat lagi satu cara penyiaran yang dilakukan oleh para ulama yang mengunjungi para pemuka adat yang berpengaruh di negeri

itu. Diundang untuk beberapa hari para ulama itu menginap di rumah pemuka adat dan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada mereka dan keluarganya. Tiap-tiap ilmu yang diajarkan diberi imbalan dengan sedekah berupa ringgit dan atau barang berharga lainnya. Biasanya ulama yang melakukan cara ini adalah mereka yang disebut *Saiye*, dipercaya sebagai orang Arab yang masih mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Pengajian menurut cara ini melahirkan adanya pemuka-pemuka adat atau orang bangsawan Bugis—Makassar yang dipercaya sebagai orang-orang sakti yang mempunyai ilmu gaib dan dalam pengetahuan agamanya.

3. Kerajaan Wajo

Arung Matoa Wajo, yang mula-mula memeluk agama Islam sesudah "Perang peng-Islam-an", adalah Arung Mato Majo yang ke-12, yang bernama La Sangkuru' Mulalaji. Setelah menerima Islam, diberikan nama La Sangkuru' Patau Sultan Abdurrahman. Tanggal penerimaan agama Islam oleh raja dan rakyat Wajo menurut *Lontara Wajo*, disebut taggal 15 Syafar 1020 H., atau dalam tahun 1610 M. hari Selasa. (Andi Paramata dkk., 1975, hal. 17).

Segera setelah Wajo menerima Islam, maka raja Gowa mengirim ke Wajo, Khatib Sulung, Dato' Sulaiman untuk mengajarkan kepada orang Wajo dasar-dasar ajaran Islam. *Lontara Wajo* mencatat, bahwa adapun yang menjadi tekanan ajaran agama Islam yang dikembangkan oleh Dato' Sulaiman:

- (1) Tentang keimanan kepada Allah, Tuhan Yang Mahaesa.
- (2) Tentang larangan-larangan disebut:
 - a. Dilarang *mappinang rakka'* (memberi sesajen kepada siapapun, seperti kepada setan dan jin, dan benda-

benda pujaan lainnya, seperti *pantasa'* dan *saukang*.

- b. Dilarang *mammanu'* — *manu'* (bertenung tentang alamat baik dan alamat tidak baik untuk melakukan sesuatu pekerjaan).
- c. Dilarang *mappolo-bea'* (bertenung untuk mengetahui nasib).
- d. Dilarang *mappakkere'* (mempercayai bahwa sesuatu benda itu keramat).
- e. Dilarang makan *cammugu-mugu* (babi).
- f. Dilarang minum *pakkunesse* (minuman keras).
- g. Dilarang *mappanngaddi* (berzina).
- h. Dilarang makan *riba* (bunga piutang).
- i. Dilarang *boto'* (judi).

Setelah Dato' Sulaiman menjelaskan tentang sekalian larangan itu, maka Arung Matoa Wajo bersama rakyat Wajo, berjanji tidak akan melanggar larangan itu. Selaku simbol bahwa mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, Yang Tidak Berserikat, Tidak Dilahirkan, Tidak Ada Samanya, Tidak Ada Yang Disembah Selain Dia, Dia-lah yang menghidupkan dan Dia pulalah yang mematikan, Dia yang berkuasa di langit dan di bumi, Berkuasa dan Menguasai segala-galanya, serta menjauhi sekalian laranganNya, maka merekapun beramai-ramai turun ke sungai, mensucikan diri (mandi). Ketika mensucikan diri itu, Arung Matoa Wajo berseru:

"Arengkalinga manekko ri-ase' ri-awa; orai' alau, maniang, manorang; Lesuga panngali patolaku natudduanngge, solo', nalesu gau' maja'ku, natudduanngge solo' sininna gau' nappesangkanngge puang allahu-taala, naharangonngge muhamma'".

(Dengarkanlah semuanya, di atas di bawah, di Barat dan

di Timur, di Utara dan di Selatan. Adakah akan kembali cawatku yang telah dihanyutkan oleh arus? Begitu pulalah sekalian perbuatanku yang tidak baik tidak mungkin akan kembali lagi. (demikian pulalah) tidak akan saya lakukan lagi sekalian perbuatan yang dilarang oleh Allah Taala, dan yang diharamkan oleh Muhammad).

Ucapan Arung Matoa Wajo itu disambut dengan riuh oleh rakyat Wajo dengan *mappaio* (mengiakkan). Mereka diajarlah berwudhu, mengucapkan kalimat Syahadat; melakukan salat. Merekapun diajarkan tentang puasa; kewajiban mengeluarkan zakat fitrah dan zakat harta benda; kewajiban melakukan ibadah Haji ke Mekkah bagi yang mampu.

Setelah sekalian ajaran dasar tentang agama Islam tersebar dikalangan rakyat Wajo, maka kerajaan Wajo pun mempercayakan kepada Dato' Sulaiman untuk menangani dan mengorganisasi urusan sara' di Tana Wajo. Pejabat-pejabat sara' ditetapkan oleh Dato' Sulaiman, dengan menjabarkannya kepada pejabat-pejabat pemerintahan kerajaan dan daerah-daerahnya.

Organisasi sosial di Wajo itu, baik pemerintahannya maupun seluruh rakyatnya, terbagi atas tiga bagian yang disebut limpo¹⁴ masing-masing dengan raja dan pejabat-pejabat lainnya sendiri. Jumlah semua pejabat adat itu dalam kerajaan Wajo, 39 orang, sedangkan seorang Raja (Arung Matoa) yang dipilih oleh mereka menggenapkan pejabat-pejabat Tana Wajo itu 40 orang jumlahnya. Ke-40 orang pejabat kerajaan Wajo itulah yang disebut *Puang ri Wajo*¹⁵ (Pertuanan di Wajo). Sesuai dengan organisasi itu, maka organisasi sara' juga terbagi 3 (tiga) mengikuti ketiga limpo.

Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban pejabat-pejabat sara selanjutnya Puang ri Wajo bersepakat untuk meng-

angkat seorang kali. Dalam lontara tidak disebut siapa Kali Wajo yang pertama itu, tetapi disebut urusan itu diserahkan kepada Dato' Sulaiman (Andi Paramata, 1975, hal. 28).

Dato' Sulaiman menunjuk pejabat-pejabat sara untuk tiap-tiap limpo, dua orang khatib, dua orang bilal, seorang penghulu dan seorang amil, dan untuk seluruh Wajo seorang Kali (Kadhi).

Untuk menyatakan dengan jelas bagaimana kedudukan sara' ini terhadap pemerintahan, maka dalam rapat-rapat bersama, tempat mereka diatur demikian rupa sehingga Arung Matoa di tengah. Pada sisinya yang satu duduk para pejabat ade' (pemerintahan) dalam urutan derajat masing-masing. Pada sisinya yang lain, para pejabat sara' juga menurut urutan derajat masing-masing.

Selain pejabat-pejabat sara' tersebut ditunjuk juga 20 orang calon pejabat sara' dari Tosara, ibu negeri Wajo dan 40 orang dari dua limpo lainnya, sehingga berjumlah 60 orang. Mereka ini disebut *mukim* yang bertugas selalu hadir dalam upacara sembahyang Jum'at di mesjid, dan mempelajari segenap seluk beluk ilmu agama Islam yang diperlukan dalam perkembangan. Menurut lontara Wajo, satu angkatan mukim mendapat pendidikan langsung dari Dato' Sulaiman, dan bahan-bahan pelajaran yang diberikan meliputi: (1) Hukum dan peraturan-peraturan perwalian pernikahan, (2) Hukum dan peraturan-peraturan Talak, Rujuk, Iddah, (3) Penyelenggaraan mayat, yaitu cara memandikan, mengafani, menyembahyangkan, menguburkan dan sebagainya, (4) hukum *faraid*, yakni tentang hukum pewarisan.

Tiap-tiap limpo dapat mengadakan sembahyang Jum'at dengan izin puang ri Wajo. Limpo yang telah mendapat izin untuk mengadakan sembahyang Jum'at, tetapi tak mengadakannya secara tetap akan dikenakan denda oleh Puang

ri Wajo. Tiap-tiap limpo diperkenankan menetapkan Imamanya sendiri.

Selanjutnya ditetapkan berbagai hal tentang organisasi sara' antara lain, bahwa: Limpo yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan salat Jum'at di negerinya, diwajibkan mengamati segala perilaku penduduk dalam menyelenggarakan ibadah. Bersama-sama limpo menentukan permulaan bulan Ramadhan dan hari raya Ied. Tiap-tiap pejabat sara' mengamati terbitnya bulan Ramadhan dan bulan Syawal. Bila seseorang di antara mereka melihat terbitnya bulan, maka hendaklah segera dilaporkannya kepada Kali. Selanjutnya ditentukan pula tata tertib tempat duduk Puang ri Wajo dan pejabat sara' di dalam upacara-upacara resmi Kerajaan, di mesjid dan upacara lainnya sebagai berikut: (a) Pada sisi sebelah kanan Kali Wajo, adalah tempat duduk Arung Matoa Wajo, disusul Paddanreng Bet-tengpola, Paddanreng Talottenreng dan Paddanreng Tuwa'. Setelah itu ketiga Bota Lompo (Pilla', Pattola, Cakkuridi), selanjutnya 30 orang Arung Mabbicara (10 orang dari tiap-tiap Limpo), 3 orang Suro ri Bateng (seorang dari setiap Limpo), menyusul 3 orang Bate Caddi (masing-masing seorang dari tiap-tiap limpo), 3 orang Pajjuku, menyusul para Matoa dan Ulu Anang. (b) Pada sisi sebelah kiri Arung Matoa adalah tempat duduk Kali Wajo, menyusul sesuai dengan urutan kepangkatannya berturut-turut Khatib dari tiga limpo, Bilal dari tiga limpo, penghulu dari tiga limpo, setelah itu para mukim dari tiga limpo.

Tempat duduk para Amil tidak ditentukan, karena mereka yang mengatur tempat duduk Puang ri Wajo dan tempat duduk pejabat sara'. Mereka berhak memilih tempat duduk sendiri asal saja di bawah urutan para Khatib.

Adapun nafkah para pejabat sara' ditetapkannya sebagai berikut:

a. Dari Zakat Fitrah dan Zakat Harta, diatur pembagiannya:

(1) Kali Wajo, mendapat dua bahagian dari masing-masing Khatib, dari tiga limpo.

(2) Khatib mendapat dua bagian dari masing-masing Bilal, dalam limpo-nya.

(3) Bilal mendapat dua bagian dari masing-masing Penghulu dalam limpo-nya.

(4) Penghulu Limpo dan Amil sama bagiannya.

Pada waktu hanya seorang Amil di Wajo pembagian nafkahnya sama banyaknya dengan bagian untuk Kali, karena Amil-lah yang mengumpulkan zakat dan membaginya.

b. Dari sedekah pada Hari Idul Fitri, Idul Adha, kenduri kerajaan, dan penyelenggaraan urusan mayat sampai pada penguburannya, dilakukan pembagian seperti pada a) di atas.

c. Dari penyelenggaraan pernikahan (*lise' nikka*), ditentukan 10% dari *sunreng* (mas kawin), diserahkan kepada Kali yang menjadi Wali Hakim.

Dato' Sulaiman juga menetapkan pembagian pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pejabat sara' sesuai dengan jenjang kedudukan sosial yang dijabarkan ke dalam panngaderreng.

Kali Wajo berkewajiban menangani tugas-tugas: menikahkan, menyelenggarakan rangkaian upacara kematian dari Arung Matoa Wajo dan isi istana Arung Matoa Wajo (Keluarga dan Sahayanya).

Khatib berkewajiban menangani tugas-tugas menikahkan, menyelenggarakan rangkaian upacara kematian dari Padanreng (Raja dari Limpo) dan isi istana Paddanreng. Bilal, berkewajiban menangani tugas-tugas: menikahkan,

menyelenggarakan rangkaian upacara kematian Bate Lompo dari Limpo-nya masing-masing.

Panngulu Limpo menangani urusan pernikahan dan penyelenggaraan urusan kematian para Arung Mabbicara dalam limpo-nya serta isi rumahnya.

Adapun Arung Mabbicarayang boleh dikawinkan atau diselenggarakan mayatnya oleh Panngulu Limpo, hanyalah Arung Mabbicara yang tidak mempunyai wilayah kekuasaan, dan bukan *ana' mattola paddanreng*,¹⁶ dan *anak-mattola Bate-Lompo*.

Guru Pampawa, yaitu Guru agama yang ada di tiap-tiap kampung, dialah yang menyelenggarakan perwalian pernikahan penduduk "maradeka" dalam kampungnya. Dia jugalah yang menyelenggarakan urusan kematian dan membacakan talkin bagi penduduk "maradeka" atau orang kebanyakan. Pada pejabat sara' di Wajo memperoleh hak istimewa antara lain dibebaskan dari sekalian pajak (hasil bumi, harta benda), dari kerja umum, gotong royong dan semacamnya dari tugas pelayanan dalam pesta-pesta kerajaan dan dari segala jenis solo¹⁷ (pemberian bingkisan kepada pengantin). Apabila mereka melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaan jabatan, mereka tidak dikenakan hukuman atau denda. Mereka yang melakukan kesalahan itu hanya dipecat dari jabatan. Apabila seorang pejabat sara' melakukan pencurian, perzinahan, meminum minuman keras dan lain-lain perbuatan yang melanggar hukum agama maka ia dipecat dari jabatan, sebagai hukuman utama.

Sepeninggal Dato' Sulaiman ke Luwu, dan kemudian meninggal di desa Pattimang, maka Arung Mato Wajo meminta pada Raja Gowa untuk mengirimkan ulama lain untuk mengembangkan ajaran Islam yang sudah dirintis oleh Dato' Sulaiman. Raja Gowa memenuhi permintaan itu dan mengutus Abdul Makmur, Dato' Ibadah (kemudian

lebih dikenal dengan gelaran Dato' ri Bandang). Setelah Puang ri Wajo mengangkat Dato' Ibadah menjadi Kadhi Wajo, maka terjadilah suatu peristiwa perpecahan di kalangan pejabat sara' Wajo.

Peristiwa itu terjadi ketika diadakan upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad di mesjid Tosora (Ibu negeri Wajo). Soalnya ialah pada tata penempatan pejabat-pejabat pemerintahan (adat) dalam upacara. Sengketa itu menimbulkan dua kelompok besar yang masing-masing dipimpin oleh Amil Limpo Tuwa' dan Bilal Limpo Betengpola Kadhi Wajo (Dato' Ibadah) menganggap ini sebagai suatu keadaan yang membahayakan keutuhan umat. Oleh karena itu atas persetujuan Puang ri Wajo ia memecat sekalian pejabat sara' yang ada, karena dianggapnya mereka kurang menghayati perpaduan antara ade' dan sara' dalam panngaderreng.

Selanjutnya atas persetujuan Puang ri Wajo, diangkat pejabat-pejabat sara' yang baru, disertai syarat bahwa pejabat-pejabat sara' itu selanjutnya, adalah keluarga bangsawan yang mempunyai hubungan darah dengan para penguasa kerajaan Wajo. Pola umum dari syarat pengangkatan ialah sebagai berikut: (1) Untuk jabatan Khatib, diambil dari keturunan Paddanreng, (2) Untuk jabatan Bilal, diambil dari keturunan *Bate-Lompo*, (3) untuk jabatan *Guru Pampawa*, diambil dari keturunan Arung Mabbicara, dan (4) untuk jabatan *Amil*, diambil dari keturunan Raja (sama dengan di Gowa). Ketika itu diangkat hanya seorang Amil di Wajo, sehingga pembagian nafkah bagi Amil itu sama besarnya dengan yang diterima oleh Kadhi Wajo.

Dengan demikian maka kemungkinan terjadinya sengketa antara para pejabat pemerintahan (ade') dan sara' mengenai tata penempatan para pejabat menurut derajatnya masing-masing dalam upacara-upacara diperkecil. Juga para Khatib yang berdiri di atas mimbar tidak lagi perlu

merasa akan dicela oleh para pejabat kaum bangsawan yang duduk bersila dihadapan mimbar, karena dia sebagai Khatib adalah dari kalangan mereka juga.

Walaupun penyebaran ajaran agama di Wajo sejak zaman Dato' Sulaiman, Dato' Ibadah dan Khadi-khadi Wajo berikutnya dapat dikatakan berhasil, menciptakan perpaduan yang kokoh antara ade' dan sara' sesuai dengan panngaderreng, namun adat kebiasaan yang berasal dari zaman pra-Islam sebagiannya masih dijalankan juga dengan penyesuaian-penyesuaian, walaupun pada hakekatnya bertentangan dengan syareat Islam. Barulah kemudian keadaan itu mulai dilawan oleh beberapa golongan dalam kalangan umat Islam Wajo. Contoh yang terkenal mengenai perlawanan terhadap kebiasaan lama itu, adalah ketika La Mamang Toapamadeng Tuanta Raden Gallo, menjadi Arung Matoa Wajo ke-40 (memerintah lebih kurang tahun 1821 — 1825). Baginda berusaha keras dan kuat untuk menegakkan hukum syareat. Diperbaikinya mesjid-mesjid. Diperintahkan kaum wanita memakai kerudung. Pohon-pohon besar dan rumah-rumah tempat pemujaan berhala ditumbangkannya. Baginda jugalah yang melaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri. Menurut Noorduyt (1964, hal. 95), mungkin kejadian ini disebabkan oleh pengaruh dari luar, yang berasal dari aliran Wahabiah yang pada masa itu berkuasa di Tanah Arab. Karena ada diceriterakan bahwa pada waktu itu seorang ulama bernama Syekh Madina datang ke Wajo dan menjadi guru agama di sana.

Demikianlah pada garis besarnya perkembangan agama Islam di tiga buah kerajaan terkemuka Sulawesi Selatan, sejak awal abad ke XVII sampai dengan bertambah kuatnya pengaruh politik *Pax Neerlandica*, pemerintahan kolonial Belanda. Pergolakan-pergolakan politik kolonial Belanda yang dari hari ke hari memperkokoh kedudukannya di Sulawesi Selatan berjalan seiring dengan semakin mendalamnya perasaan perpaduan identitas Bugis-Makassar sa-

ma dengan Islam atau Muslim. Semangat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda dari permulaan abad ke XVII sampai dengan abad ke XX, memperoleh warna sentimen keagamaan yang kuat.

MASYARAKAT ISLAM

Daerah Sulawesi Selatan menjadi satu kesatuan administratif yang mempunyai penduduknya (bagi orang Makassar) dapat bergerak ke seluruh daerah luar daerah Sulawesi Selatan. Daerah ini makin terbuka pula bagi pendatang.

Daerah Sulawesi Selatan menjadi satu kesatuan administratif yang mempunyai penduduknya (bagi orang Makassar) dapat bergerak ke seluruh daerah luar daerah Sulawesi Selatan. Daerah ini makin terbuka pula bagi pendatang.

GERAKAN PEMBAHARUAN MASYARAKAT ISLAM

Seperti telah disebutkan di bagian depan hampir bersamaan waktu diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan-kerajaan Bugis—Makassar, datanglah juga Kompeni Belanda memulai usahanya untuk menguasai Sulawesi Selatan. Perjanjian Bungaya, yang ditanda tangani pada tanggal 18 Nopember 1667, menentukan mulai melebarnya kekuasaan kolonial Belanda di daerah Sulawesi Selatan secara berangsur-angsur. Kerajaan-kerajaan Bugis—Makassar, terutama Gowa dan Wajo, mengalami masa kemerosotan dan kekalahan. Kerajaan Bone di bawah pimpinan Raja Bone ke-14, La Tenritatta To Erung, Aruppalakka, Maampe'e Gemme'na, Datu Tungke'na Tana Ugi dengan persekutuannya dengan Kompeni Belanda, berhasil mengkonsolidasi dirinya kembali dan mengungguli kepemimpinannya dalam masyarakat Sulawesi Selatan.

Dinamika kerajaan-kerajaan Bugis—Makassar yang selalu terlibat dalam perebutan keunggulan di Sulawesi selatan secara berangsur-angsur mulai terhenti. Batas-batas kerajaan menjadi kabur dan semangat persatuan umat Islam mulai kelihatan menghapuskan batas-batas kerajaan yang tadinya selalu dalam keadaan permusuhan. Batas-batas itu menjadi lebih kabur lagi setelah raja Belanda menyatakan seluruh Sulawesi Selatan berada di bawah kedaulatan kerajaan Belanda dalam bulan Nopember 1846. Sejak itu Gouverneur van Makassar, disebut Gouverneur van Celebes en

Onder horigheden (Arsip Nasional R.I., 1973, hal. 264). Secara berangsur raja-raja dijadikan sebagai *selfbestuurden* yang secara langsung diawasi dan dikuasai oleh pemerintah Belanda.

Daerah Sulawesi Selatan menjadi satu kesatuan administratif yang memungkinkan penduduknya orang (Bugis—Makassar) dapat bergerak ke seluruh daerah dan ke luar daerah Sulawesi Selatan. Daerah ini makin terbuka pula bagi pendatang.

Makin banyak orang Bugis—Makassar yang dapat menuaikan ibadah Haji ke Mekkah, demikianpun yang bermukim di Tanah Arab, untuk memperdalam ilmu agama, bertambah banyak pula. Ulama-ulama dari pulau Jawa dan Sumatra, serta pedagang-pedagang orang Arab yang merangkap sebagai penyiar agama, mengunjungi negeri pedalaman Sulawesi Selatan. Mereka mengajarkan ilmu agama pada pemuka-pemuka masyarakat dengan caranya masing-masing.

Pengajian-pengajian Islam yang disponsori oleh pemerintah *Zelfbestuur* (bekas kerajaan-kerajaan Bugis—Makassar) diselenggarakan oleh para ulama baik yang berasal dari negeri itu sendiri, maupun guru-guru agama yang didatangkan dari Jawa, Sumatra dan Tanah Arab, bertumbuh menjadi tempat pendidikan kader Islam di Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1929 di Bone didirikan atas inisiatif *Zelfbestuurden* (Raja Bone) sebuah Madrasah yang diberi nama "Madrasah Amiriah" dan memberi bantuan kepada "Al-Madrasah Masriah". Para pengasuh madrasah itu, selain orang Bone sendiri yang datang belajar di Mekkah, juga didatangkan orang Arab dari Tanah Arab, seperti Abdul Aziz Al Hasyimi Al-Murabbi dan Abdul Hamid dari Mesir. Mesjid-mesjid menjadi tempat pengajian yang resmi

dikunjungi penduduk untuk mendengar uraian-uraian dari para ulama.

Di tempat-tempat lain seperti di Singkang (Wajo), bibit pengembangan pendidikan formil (Madrasah), dimulai dengan datangnya ulama-ulama asal daerah itu sendiri dari penuntutan ilmu di Tanah Arab, H. Makkatu, yang membuka pengajian di Tosora merintis pengembangan pendidikan Islam formil.

Disamping bertumbuhnya bibit-bibit pendidikan formil Islam yang menekankan pemurnian ajaran Islam dan melepaskan pengaruh kepercayaan pra-Islam yang masih terdapat di banyak tempat di negeri-negeri Bugis-Makassar berkembang jugalah kelompok-kelompok tarekat. Kelompok-kelompok tarekat itu pada umumnya mengisolasi diri dari perkembangan yang merintis pendidikan formil. Tarekat-tarekat itu umumnya bertolak pendekatan yang lebih bersifat kepercayaan lama. Keadaan seperti itu menambah subur tumbuhnya kembali kepercayaan-kepercayaan pra-Islam yang mendapat dukungan dari kalangan orang-orang bangsawan yang tersisih dari kekuasaan politik yang sedang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sementara itu ulama-ulama ahlu-sunnah,¹⁸ dengan mendekati penguasa-penguasa Bumiputera atau Raja-raja (Zelfbestuur) yang masih berpengaruh, harus tetap menyesuaikan diri dengan sisa-sisa *penngaderreng* yang masih dipegang dan dijalankan oleh Raja-raja itu.

1. *Perkembangan Muhammadiyah*

Muhammadiyah mulai menyebar di Sulawesi Selatan pada tahun 1926, ketika konsul pertama di Makassar dipilih. Konsul itu ialah K.H. Abdullah, lahir di kampung Labuang-Maros, anak dari Abdurrahman, Kepala Desa Labuang. Pada masa kanak-kanak, Abdullah belajar mengaji Qur'an, Nahwu, Syaraf dari ayahnya sendiri. Pada usia

menanjak dewasa ia ke Mekkah, dan bermukim untuk kurang lebih 10 tahun lamanya di Tanah Arab, untuk belajar. Beliau kembali ke Indonesia pada saat Raja Ibnu Saud memerintah di Tanah Arab Saudi. Setiba di Makassar, beliau membuka pengajian, di samping menjadi pengusaha (pedagang) beras. Beliaulah ulama Sulawesi Selatan yang pertama-tama menyatakan secara terbuka, bahwa kalau hari Jum'at tak ada shalat dhohor. Pernyataannya itu menggemparkan kota Makassar, sehingga Khadi Makassar, Maknun Dg. Marangka' mengadukannya ke pengadilan. Dalam pengadilan hakim memutuskan K.H. Abdullah bebas dari segala tuduhan. Maka semakin termasyhurlah namanya ke seluruh pelosok Sulawesi Selatan.

Dalam tahun 1923, didirikannya perkumpulan yang menghimpun orang-orang yang sefaham dengan dirinya. Perkumpulan itu bernama *Assiratal Mustaqiem*. Beliau sendiri menjadi ketua perkumpulan itu dan beberapa orang ulama lainnya menjadi anggota pengurus, seperti H. Abd. Razak, Muh. Said Dg. Massikki, Mansyur Al Yamani, H. Jakariah, H. Nunung, H. Baba Tahir dan beberapa orang terkemuka lainnya, yang kemudian menjadi pelopor-pelopor Gerakan Islam Muhammadiyah.

Dalam bulan April 1926, atas inisiatif Mansyur Al Yamani, seorang Arab, pedagang batik dari Surabaya bersama K.H. Abdullah dimulailah prakarsa pembentukan Gerakan Islam Muhammadiyah. K.H. Abdullah menjadi Ketua dan Mansyur Al Yamani menjadi Wakil Ketua Muhammadiyah, pada mula didirikannya di Makassar. Dalam gerakan Islam Muhammadiyah, K.H. Abdullah dan kawan-kawannya bekerja keras memberantas kemusyrikan, bid'ah, hurafat dan tahyul. Mereka mendirikan tempat-tempat ibadat, sekolah-sekolah dan rumah-rumah pemeliharaan anak-anak yatim. Diselenggarakannya berbagai pertemuan Tabligh dan kegiatan dakwah di tempat-tempat

umum, walaupun diawasi dengan keras oleh PID, Polisi Hindia Belanda.

Sejak permulaan Gerakan Muhammadiyah itu ditangani oleh K.H. Abdullah, beliau senantiasa memperoleh hambatan dari kaum adat (raja-raja), karena beliau dituduh hendak merobah agama Islam serta adat-istiadat orang Bugis—Makassar yang sudah berakar.

Zelfbestuur Bone umpamanya, sangat sekali anti Muhammadiyah, — ia terkenal dengan larangan-larangannya yang sangat menghambat Muhammadiyah. Tetapi secara perseorangan ada juga pemuka-pemuka yang masuk. Demikian pula halnya dengan zelfbestuur Gowa. Walaupun di ibukota, Sungguminasa, tidak ada penyokong Muhammadiyah dikalangan para pejabat, tetapi di wilayah Gowa sebelah Selatan, jadi di distrik Limbung dan Bontonompo, organisasi Islam ini mendapat kemajuan-kemajuan yang sama terjadi pula di daerah Utara Makassar seperti Maros, Pangkajene, Pare-Pare, Rappang dan Palopo (Luwu). Dalam penyebaran ini sering terjadi satu cabang melahirkan cabang lain.

K.H. Abdullah sangat tabah dalam perjuangannya, keras dalam pendiriannya yang dianggap benar menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, beliau tak pernah merasa gentar menghadapi tantangan dari manapun datangnya. Beliau kerap kali harus berhadapan dengan alat-alat kekuasaan Belanda, PID dan orang-orang bajingan yang diperalat untuk menganiayanya.

Beliau dengan teman-temannya memasuki daerah-daerah pedalaman Sulawesi Selatan, mendirikan cabang dan group Muhammadiyah yang segera dibuka tempat-tempat pendidikan dan tempat-tempat ibadat yang disebut Musholla.

Dalam permulaan pembentukan cabang di tiap-tiap negeri yang didatanginya, Muhammadiyah di Sulawesi Selatan memulai pekerjaannya dengan mendirikan Musholla (Mesjid). Musholla itu menjadi tempat pengembangan usaha-usaha selanjutnya, seperti pertemuan-pertemuan pengembangan organisasi. Di ibu negeri Kabupaten (zaman itu disebut Afdeling) Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah seperti Standard-School, Schakel-School, Vervolg-School yang struktur dan kurikulumnya sama dengan sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi dilengkapi dengan mata pelajaran untuk pendidikan agama Islam. Sekolah-sekolah Muhammadiyah seperti itu pada saat Muhammadiyah mulai berdiri di Sulawesi Selatan (tahun 1926 — 1928), terdapat di ibu negeri Afdeling Makassar, Bonthain, Pare-Pare, Luwu. Guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah itu, selain terdiri atas tenaga-tenaga guru yang terdapat di negeri itu, kebanyakannya juga didatangkan dari pulau Jawa dan Sumatra. Nafkah guru-guru itu diperoleh dari pembayaran uang sekolah murid-muridnya dan dari masyarakat anggauta Muhammadiyah setempat. Di samping itu Muhammadiyah juga mendirikan madrasah-madrasah yang khusus memberikan pendidikan agama seperti madrasah Diniah, dibeberapa ibu negeri onder-afdeling.

Madrasah Muallimin yang mendidik guru-guru, didirikan di kota Makassar. Tamatan Muallimin Muhammadiyah ini sebahagian yang terbesar di pedalaman Sulawesi Selatan. Sebahagian lainnya ada yang melanjutkan pendidikannya ke pulau Jawa dan Sumatra, untuk sekolah-sekolah tingkat lanjutan atas, atau Sekolah Guru Lanjutan.

Di samping memperoleh pendidikan formil di sekolah-sekolah, murid-murid Sekolah Muhammadiyah itu memasuki kepanduan Muhammadiyah yang dinamakan Hizbul-Wathan (HW). Dalam kepanduan itu mereka memperoleh

latihan-latihan ketrampilan dan bimbingan semangat persatuan dan kebangsaan.

Baru kira-kira pada tahun tigapuluhan Muhammadiyah berhasil sedikit demi sedikit mendekati kaum wanita Bugis—Makassar, dengan mendirikan organisasi bagi mereka yang disebut Aisyiah. Kalangan wanita Bugis—Makassar yang pertama-tama ikut mengembangkan organisasi Aisyiah itu, terutama dari daerah-daerah yang diperintah langsung oleh Gubernemen, seperti Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai.

Di antara kerajaan-kerajaan Zelfbestuur yang berkembang usaha pembaharuan masyarakat Islamnya, sejak tahun duapuluhan adalah Zelfbestuur Wajo. Orang yang memelopori pertumbuhan Muhammadiyah di tempat itu ialah Syekh Ahmad Balahmar (kemudian menjadi Kadhi Wajo). Beliau lebih dahulu mengadakan pertemuan dengan pemuka Muhammadiyah di Makassar, Mansyur Alyamani. Sekembalinya ke Singkang diadakannya pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat Wajo, diantaranya hadir pula Kadhi Wajo (ketika itu), Haji Makkah, Amil Wajo, Haji Ibrahim, dan pemuka-pemuka dari kalangan bangsawan Wajo, seperti Andi Juranga, Andi Toppo dan Andi Nure. Pertemuan itu bersepakat dan mendirikan Muhammadiyah di Wajo. Pada tanggal 15 Juli 1928, berdirilah Muhammadiyah di Singkang, ibu negeri Zelfbestuur Wajo, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1. Haji andi Muri : Ketua
2. Andi Juranga : Wakil Ketua
3. Abd. Muttalib : Sekretaris
4. Ahmad Nur : Bendahara
5. Andi Toppo : Komisaris

6. Haji La Ummung : Komisaris

7. Abdurrahman : Komisaris

Peresmian berdirinya Muhammadiyah di Wajo itu, dihadiri pula oleh para pemuka Muhammadiyah dari Makassar, diantaranya Kyai Haji Abdullah (Konsul Muhammadiyah Sulawesi Selatan), Raden Himan, Haji Nuruddin Dg. Gas-sing, Sangaji Kusumo.

Sehari sesudah peresmian berdirinya Muhammadiyah di Wajo maka dibentuklah bahagian organisasi yang mengurus pendidikan dan pengajaran. Bahagian itu disebut Ba-hagian Pengajaran Muhammadiyah yang mempunyai susun-an pengurus sendiri, yang diketuai oleh Abdullatif, dan di-bantu oleh Daeng Madimeng, Andi Baso Mele dan Daeng Mattata. Dalam bulan Juli 1928 itu juga, dibukalah kur-sus Tabligh. Dari kursus ini dikembangkan usaha pendidik-an yang lebih teratur. Atas anugrah 'Ranreng Tua' Wajo, Haji Andi Ninong dan suami beliau Andi Mallinggaang Karaenta ri Bura'ne, dengan penyerahan tanah (wakaf) didirikanlah di atas tanah itu bangunan sekolah Muham-madiyah pertama di Wajo. Sekolah itu adalah Standard-School Muhammadiyah. Kedua orang bangsawan terkemu-ka Wajo itu senantiasa memberikan dorongan kepada ke-giatan-kegiatan pendidikan Muhammadiyah di Wajo, sampai pada akhir hayat mereka. Setahun kemudian, yaitu tang-gal 20 Mei 1929, Muhammadiyah Wajo menerima penye-lenggaraaan Konferensi Daerah Muhammadiyah se Sulawesi Selatan yang pertama di kota Singkang.

Konferensi Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang per-tama itu, menambah gairah umat Islam di Wajo untuk me-majukan pendidikan dan usaha-usaha kesejahteraan sosial lainnya. Maka tak berapa lama kemudian Sekolah Muham-madiyah pertama tak dapat lagi menampung murid yang berhasrat memasuki sekolah itu. Dengan bantuan Arung Matoa Wajo dan Andi Oddang, yang mewakafkan tanah-

nya, berhasillah sekolah Muhammadiyah yang kedua dibuka pada tanggal 15 Juli 1930.

Karena kemajuan Muhammadiyah di Wajo, berkat bantuan pembesar Zelfbestuur, maka pada tanggal 30 Agustus 1930, berkunjung ke Singkang pimpinan pusat Muhammadiyah dari Yogyakarta, yaitu Haji Wasir Nuri, bersama Sitti Hayyinah, dari pimpinan pusat Aisyiah. Ketika itu Muhammadiyah Wajo ditetapkan statusnya sebagai Cabang Muhammadiyah. Berkat kunjungan Pengurus Pusat Aisyiah itu, maka pada tanggal 29 Nopember 1930, diresmikan berdirinya Aisyiah di Singkang, di bawah pimpinan seorang wanita bangsawan Wajo, Andi Coma.

Menurut kebiasaan lama di kalangan orang Bugis-Makassar, wanita sebaiknya berdiam di rumah saja. Tetapi dengan berdirinya Aisyiah itu, maka kebiasaan lama mulai dirombak. Pertemuan-pertemuan kaum wanita mulai digalakkan, sehingga kebiasaan lama lambat laun dilupakan.

Muhammadiyah cabang Wajo mengembangkan usahanya memasuki daerah Zelfbestuur Soppeng dan membentuk group Muhammadiyah di Batu-Batu (Soppeng), dalam tahun 1930. Kegiatan itu dilanjutkan ke Luwu dan berdiri pulalah Muhammadiyah di daerah Zelfbestuur Luwu. Semua usahanya dimulai dengan merintis usaha-usaha pendidikan, mendirikan sekolah-sekolah dan mengorganisasi secara lebih baik hasil-hasil pemungutan zakat dari kalangan anggota-anggotanya.

Sejak berdirinya dalam tahun 1926 sampai pada saat pendudukan Jepang, Muhammadiyah mencatat banyak usaha yang dapat digolongkan ke dalam kegiatan pembaharuan masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Semangat persatuan umat Islam, pemberantasan kelakuan-kelakuan musyrik di kalangan umat Islam, timbulnya semangat kebangsaan Indonesia, dorongan kemajuan kaum wanita dan

lain-lain, sebagian besar adalah jasa organisasi Muhammadiyah.

2. Perguruan agama non-Muhammadiyah

Dalam hal pengembangan pendidikan Islam, Wajo, selain usaha-usaha yang dirintis oleh Muhammadiyah, maka golongan umat Islam yang tidak menyatukan diri ke dalam organisasi Muhammadiyah, memikirkan juga bagaimana usaha memberikan bimbingan kepada umat, yang umumnya disebut golongan kolot. Mereka menghubungi ulama-ulama asal Wajo yang sudah lama bermukim di Mekkah, seperti Haji Abdul Rasyid dan istrinya, Haji Sitti Saleha. Kedua orang suami-istri ini telah lama bermukim di Mekkah dan memperoleh pendidikan secukupnya di Tanah Arab, untuk dapat digolongkan kepada orang berilmu yang disebut ulama. Suami istri Haji Abdul Rasyid melahirkan 9 orang anak, 4 laki-laki dan 5 perempuan, semuanya dibesarkan dan memperoleh pendidikan di Tanah Arab. Salah seorang diantaranya, Kiyai Haji M. As'ad bin Abdul Rasyid, dikirim orang tuanya untuk memenuhi panggilan kembali ke Tana Wajo, guna mengabdikan diri pada pengembangan pendidikan Islam. Yang paling keras mendatangkannya ialah Kiyai Haji Ambo Emme, yang lebih dulu telah merintis pendidikan dirumahnya sendiri. Haji Ambo Emme adalah ipar Haji As'ad, ia kawin dengan salah seorang saudara perempuan Haji As'ad.

Setelah Haji As'ad tiba di Wajo, beliauapun membantu Haji Ambo Emme dalam pengajian tradisional yang telah ada. Akan tetapi lambat laun tempat pengajian di rumah Haji Ambo Emme tidak lagi dapat menampung jumlah murid yang bertambah besar. Mereka kemudian mendirikan *Madrasatul Arabiah Islamiyah* (MAI) dalam tahun 1932.

Pengaruh Haji As'ad mulai tersebar ke seluruh pelosok

Sulawesi Selatan. Beliau lebih populer di kalangan umat Islam Sulawesi Selatan dengan nama "*Anregurutta Haji Sa-de*".¹⁹ Banyak pemuda dari luar Tana Wajo berkumpul di Singkang untuk menjadi murid beliau. Popularitasnya itu bertambah besarnya ketika dalam tahun 1932, atas inisiatif Raja Bone Andi Mappanyukki diadakan musyawarah ulama Sulawesi Selatan yang ketika itu disebut "*Pertemoean Oelama Celebes Selatan*".

Pertemuan itu diadakan di Watampone, ibu negeri Zelfbestuur Bone dan dihadiri oleh 26 orang ulama dari segenap daerah di Sulawesi Selatan, serta dipimpin oleh Kiyai Haji Abdullah Dahlan. Pertemuan membahas tentang cara-cara pendidikan Islam bagi masyarakat umum. Karena pemerintah Zelfbestuur Bone terkenal amat keras menjalankan larangannya kepada kegiatan Muhammadiyah didaerahnya, maka pertemuan ulama ini (non-Muhammadiyah) harus sangat berhati-hati dengan gagasan-gagasannya.

Muncullah Haji As'ad dengan gagasan-gagasan yang membawa pertemuan kepada keputusan-keputusan yang dapat diterima oleh sekalian fihak, termasuk Raja Bone Andi Mappanyukki. Gagasan itu antara lain: (1) Mengembangkan pendidikan Islam melalui Madrasah, di samping melanjutkan usaha para ulama yang masih ada dengan pengajian sistim tradisional, (2) Madrasah mendapat dana pengembangannya dari sumber-sumber zakat fitrah dan harta dari masyarakat, (3) Madrasah bebas dari segenap aliran politik, tidak menekankan ikatan pada salah satu mazhab, (4) Madrasah yang berkembang dapat membuka cabang-cabangnya di mana saja, atas permintaan masyarakat, dan (5) Para ulama menghindari sejauh mungkin persengketaan dalam perkara hilafiah.

Gagasan ini dikembangkan oleh Haji As'ad dengan amat kuatnya dan dengan kerja keras. Murid-murid beliau dari daerah-daerah Bone, Soppeng, Sidenreng, Sinjai, Bulukumba dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan,

bahkan dari Kalimantan, meramaikan kota Singkang. Madrasah-madrasah Muhammadiyah yang terdapat di kota Singkang berkembang bersama dengan Madrasah yang dipupuk oleh Haji As'ad. Kota Singkang mulai saat itu menjadi tempat pendidikan Islam yang terkenal.

Murid-murid Haji As'ad yang terkemuka, yang mengembangkan gagasannya sesudah beliau berpulang ke Rahmatullah, antara lain dapat disebut: (1) Kiyai Haji Muh. Daud Ismail dari Soppeng, (2) Kiyai Haji Muh. Yunus Maratan dari Wajo, (3) Kiyai Haji Ambo Dalle dari Pallanro, (4) Kiyai Haji Muh. Abduh Pabbaja dari Pare-Pare, (5) Kiyai Haji Abd. Kadir Khalid dari Makassar.

Di samping mengajar, Haji As'ad banyak menulis buku dalam bahasa Bugis dan Arab. Majallah, brosur dan tulisan-tulisan yang berkenaan dengan pendidikan Islam, digemari oleh masyarakat, sebagian tersebar ke seluruh daerah Sulawesi Selatan.

Setelah beliau mengabdikan hidupnya dalam pendidikan Islam di Sulawesi Selatan selama kurang lebih 23 tahun (1929—1952), beliau meninggal dunia dalam usia 45 tahun, pada tanggal 29 Desember 1952, atau 12 Rabiul Akhir 1372 H. di kota Singkang.

Di Watampone pada tahun tigapuluhan, selaku kelanjutan dari Madrasah Amiriah yang telah ada sejak tahun 1929, disusun kembali sistim pendidikan yang lebih sesuai dengan perkembangan seperti digagaskan oleh pertemuan ulama tersebut di atas. Madrasah Amiriyyatul Islamiyah, mendapat tenaga baru, yaitu Syekh Mahmud Al Jawad, (bekas Walikota Madinah). Sebelum ke Watampone, beliau mengajar di Singkang. Beliau ini merintis madrasah itu ke arah sistim pendidikan klasikal, seperti yang dikembangkan di Singkang (Wajo).

Di kota Makassar sendiri, sistim pengajaran Madrasah

seperti yang dikembangkan di Wajo, Bone dan Soppeng, rupa-rupanya tidak dapat berkembang. Sekolah-sekolah Muhammadiyah lebih menarik pemuda-pemuda dari daerah-daerah sebelah Selatan kota Makassar.

Pusat pendidikan non-Muhammadiyah yang ada di negeri-negeri sebelah Utara kota Makassar, yaitu di daerah Maros—Pangkajene, terletak di pulau Salemo. Perguruan mempergunakan sistim tradisional, di mana guru dan santri tinggal bersama-sama, dipelopori dan dipimpin oleh seorang ulama yang terkenal. Ulama itu dikenal dengan nama "Anregurutta ri Salemo" Haji Muhammad. Banyak ulama orang Pangkajene yang kemudian menjadi orang-orang agama terkemuka, berasal dari perguruan Islam pulau Salemo itu. Perguruan Islam di pulau Salemo, dapat dikatakan berakhir setelah pendudukan Jepang, karena ulama-ulamanya sudah meninggalkan tempat itu dan bermukim ke kota Makassar atau Pangkajene.

Perguruan-perguruan Islam, baik Muhammadiyah maupun non-Muhammadiyah yang berkembang sejak tahun 1930-an pada zaman pendudukan bala tentara Jepang (1941—1945) mengalami kemunduran, atau ditutup sama sekali. Namun demikian, kader-kader Islam sudah mulai tahu melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dilarang oleh kekuasaan Jepang.

Pada zaman Jepang itu, kembalilah pengajian-pengajian tradisional bermunculan di mana-mana. Murid-murid para ulama dari pusatpusat pendidikan di Wajo, Bone, Sinjai, Salemo dan lain-lain kembali ke kampung halamannya masing-masing dan mendirikan pengajian cara lama, yaitu pengajian di rumah masing-masing yang didatangi oleh murid-murid dari kampung-kampung yang dekat. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang pada mulanya dapat melakukan kegiatan sebagaimana biasa, akhirnya juga harus ditutup oleh kekuasaan Jepang.

Pemerintah pendudukan Jepang membuka di Makassar Perguruan Islam yang dinamakan Madrasah Jamiatul Islamiyah (Kokyo Gakuin), di bawah pimpinan Haji Umar Faisal (orang Jepang) dibantu oleh tenaga-tenaga ulama Islam orang Indonesia, seperti Kiyai Haji Muh. Akib dan K.H. Darwis Zakariah. Ke sekolah itulah bekas-bekas murid Muallimin Muhammadiyah dan Perguruan Islam lainnya melanjutkan pelajarannya.

PENDIDIKAN ISLAM SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Sesudah Jepang kalah dan suasana proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945) mewarnai kegiatan hidup sebagian terbesar rakyat Indonesia, maka keadaan pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam pada khususnya, mengalami semacam ketidaktentuan. Guru-guru agama terutama mereka yang selama pendudukan Jepang mengajar di sekolah-sekolah agama yang diurus oleh Muhammadiyah dan pemerintah pendudukan Jepang, sebagian besar mengundurkan diri dari dunia pendidikan dan beralih ke lapangan pekerjaan lain, yang ada hubungannya dengan suasana proklamasi kemerdekaan itu. Mereka menjadi pelopor organisasi pemuda, yang kemudian menjadi organisasi kelasykaran. Tokoh-tokoh pemuka Muhammadiyah seperti Ahmad Makkarasu, Makkarang Dg. Jarung, Makkatang Dg. Siballi, Mohammad Noor, Gazali Syahlan, Nasaruddin Rachmat dan lain-lain pada saat-saat itu berperan sangat penting dalam menggelorakan suasana kemerdekaan. Sebagian mereka terjun dalam lapangan politik dan sebagian besar lainnya terjun ke lapangan kelasykaran atau perlawanan bersenjata menghadapi kedatangan NICA (Belanda).

Dalam kesibukan menghadapi gelora kemerdekaan dan kekurangan tenaga yang berpengalaman untuk mengorganisasi kembali sekolah-sekolah Islam, masih juga terdapat tenaga-tenaga yang tidak melepaskan sama sekali ke-

giatannya dalam lapangan pendidikan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang pada zaman pendudukan Jepang ditutup atau diambil alih oleh kekuasaan Jepang dengan pembentukan sekolah-sekolah Kokyo Gakuin Jamiatul Islamiah, dibuka kembali dengan tenaga-tenaga guru yang masih ada. Satu perguruan Islam yang mengambil alih Kokyo Gakuin didirikan dan diberi nama Perguruan Islam,²⁰ di bawah pimpinan K.H. Darwis Zakariah. Sekolah-sekolah itu, yang berkedudukan di kota Makassar, pada umumnya juga menjadi tempat pertemuan pemuda-pemuda kelasykaran. Di negeri-negeri pedalaman, di mana Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang kuat sejak sebelum perang, para pemukanya menjadi pejoang-pejoang kemerdekaan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah tingkat sekolah dasar dibangun atau dibuka kembali dengan semangat yang lebih kuat karena dorongan suasana kemerdekaan. Pemuda-pemuda kepanduan Hizbul-Wathan, berperanan amat aktif dalam organisasi pemuda dan kelasykaran.

1. *Parewa Sara' dan Pembangunan Islam*

Tetapi di samping itu terdapat juga usaha-usaha para ulama yang masih terikat pada keadaan zaman kerajaan Bugis-Makassar zaman lampau. Mereka itu terutama para Kadhi dengan bawahannya, yang disebut *parewa sara'* di negeri Zelfbestuur (Bone, Gowa, Soppeng, Sidenreng dan lain-lain). Mereka bersikap pasif terhadap gelora kemerdekaan proklamasi 17 Agustus 1945. Mereka pada umumnya mengikuti sikap Raja-raja Zelfbestuur setempat, yang pada mulanya tidak atau kurang bersimpati kepada Republik Indonesia, kecuali Raja Bone Andi Mappanyukki dan Datu Luwu Andi Jemma, yang pro Republik. (Kedua Raja ini ketika NICA dapat mengembalikan kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan dipecat dari jabatannya).

Para ulama yang tergolong dalam apa yang disebut *parewa sara'* itu dalam lapangan pendidikan agama Islam,

tetap juga berusaha mengembangkan dakwah Islam menurut cara zaman lampau, yaitu menggunakan sarana mesjid dan tempat kediaman mereka untuk mendidik murid-murid yang mendatanginya.

Setelah NICA dapat mengembalikan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, dengan mempergunakan tenaga-tenaga bumiputera Bugis—Makassar, maka bahagian terbesar pemuka-pemuka masyarakat, terutama kalangan pemimpin Muhammadiyah ditangkap atau ditawan. Mereka yang tidak tertawan, menggabungkan diri ke dalam kubu perlawanan seperti di Polombangkeng atau berangkat ke pulau Jawa, menggabungkan diri ke badan-badan perjuangan di sana.

Raja-raja Zelfbestuur Bone dan Lawu (Andi Mappa-nyukki dan Andi Jemma) seperti disebut di bagian depan dipecat dari jabatannya. Andi Pabbenteng diangkat sebagai Raja Bone dan segera memihak NICA (Belanda). Dengan raja-raja Zelfbestuur lainnya yang pro Belanda|dirintislah pembentukan Hadat Tinggi Sulawesi Selatan dalam rangka ketata-negaraan NIT (Negara Indonesia Timur). Raja Bone Andi Pabbenteng, menjadi Ketua Hadat Tinggi dan Raja Gowa, Andi Ijo menjadi Wakil Ketuanya. Adapun negeri-negeri yang pada zaman Hindia Belanda bukan negeri Zelfbestuur, pada zaman itu dijadikannya juga negeri Kesatuan Adat. Kepala negerinya disebut *Ketua Hadat*, dan menjadi anggota Hadat Tinggi.

Arung Matoa Wajo, Datu Soppeng dan Addatuang Sidenreng, menyusun kembali aparat adat dengan berpedoman kepada struktur kekuasaan zaman kerajaan Bugis—Makassar, abad XVI — XVII yang lalu. Pada zaman ini Bone dan Gowa nampak menjadi pemegang peranan kepeloporan.

Dengan terbentuknya Hadat Tinggi untuk seluruh daerah Sulawesi Selatan dan Kesatuan Adat sebagai negeri-

negeri bawahannya, maka organisasi sara'pun direncanakan untuk mengikuti struktur organisasi adat itu. Parewa sara' atau pejabat-pejabat sara', yang terdiri atas Kadhi sebagai penghulu, Khatib, Imam, Amil dan sebagainya sebagai bawahan organiknya, diadakan pada tiap-tiap Kesatuan Adat negeri. Dalam tahun 1947, Hadat Tinggi Sulawesi Selatan mengambil prakarsa untuk membentuk *Sara' Tinggi* Sulawesi Selatan. Organisasi *Sara' Tinggi* Sulawesi Selatan itu, akan mendampingi Hadat Tinggi dalam mengurus hal-hal yang bertalian dengan urusan keagamaan di Sulawesi Selatan, seperti Pengadilan *Sara' Tinggi* dan sebagainya. Seorang Ketua *Sara' Tinggi* akan membawahi segenap Parewa *Sara'* yang terdapat di negeri-negeri adat bawahan, sebagaimana adanya dengan organisasi Hadat Tinggi, yang membawahi segenap Ketua Adat negeri di Sulawesi Selatan.

Sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para Kadhi dan Ulama dari semua negeri Kesatuan Adat Sulawesi Selatan diadakan pada tahun 1948, maksudnya untuk merealisasi gagasan pembentukan *Sara' Tinggi* itu. Pertemuan yang juga dihadiri oleh para Ketua Adat dan Pimpinan Hadat Tinggi mendapat tantangan yang kuat dari para ulama yang tidak tergolong dalam parewa sara' atau pejabat sara'. Gagasan untuk membentuk organisasi *Sara' Tinggi* atau Majelis Islam Tinggi, yang meliputi seluruh negeri di Sulawesi Selatan tidak dapat terwujud, karena sebahagian besar ulama terkemuka di Sulawesi Selatan yang tidak terikat pada kedudukan parewa sara' tidak sependapat dengan gagasan itu. Ulama-ulama dari kalangan Muhammadiyah dan yang pro Republik Indonesia, mulai memusatkan perhatiannya kepada pengembangan pendidikan Islam dan pembangunan sarana-sarana untuk tempat pendidikan dan ibadat.

Seorang ulama yang berasal dari Sumatra Barat yang dibawa Belanda ke Australia pada masa pendudukan Jepang

(ia masih dalam pembuangan) kembali ke Indonesia dengan bantuan NICA dan menetap di Makassar, dapat dianggap seorang di antara banyak ulama di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, yang memelopori kembali kegiatan pendidikan dan dakwah Islam pada zaman NIT. Ulama itu ialah Haji Mokhtar Luthfi. Beliau menjadi tenaga yang kuat dalam pembangunan Mesjid Raya Makassar dan bersama-sama dengan para pengasuh Perguruan Islam di Makassar, serta para pemuka Muhammadiyah menggembeng mubaligh-mubaligh Islam.

Usaha-usaha pendidikan melalui sekolah-sekolah Muhammadiyah dan perguruan-perguruan Islam lainnya, mulai dibangun kembali baik di kota Makassar, maupun di beberapa tempat di Sulawesi Selatan. Ulama-ulama dari Jawa dan Sumatra didatangkan untuk mengajar pada sekolah-sekolah Muallimin Muhammadiyah baik di kota Makassar, maupun di pedalaman Sulawesi Selatan. Nama-nama ulama seperti S.S. Majidi, yang pada masa sulit-sulitnya keadaan politik di daerah ini, dengan segala kemampuannya mencurahkan perhatian dalam lapangan pendidikan Islam di pedalaman Sulawesi Selatan. Beliau berdiam di desa Ponre (Bulukumba) tempat madrasahnyadirikan bersama-sama masyarakat setempat.

Di Gowa, atas inisiatif Daengta Kalia ri Gowa (Kadhi Gowa) dengan mendapat dukungan dari Kerajaan Gowa dan pegawai-pegawai sara' dalam kerajaan Gowa, berhasil mendirikan persatuan pegawai sara' Gowa. Organisasi ini berhasil mendirikan Madrasah di beberapa tempat dalam daerah Gowa, yang sejajar dengan Sekolah Dasar Umum. Pada madrasah-madrasah itu diberikan pendidikan dasar agama. Sebahagian besar muridnya adalah juga murid-murid Sekolah Dasar Umum yang bersekolah pada pagi hari. Pada sore harinya mereka memperoleh pendidikan agama dari madrasah-madrasah. Pengajian-pengajian di rumah-rumah guru

agama dan di mesjid-mesjid, berlangsung terus sebagai biasa.

Di Singkang (Wajo), walaupun Arung Matoa Wajo termasuk anggota Hadat Tinggi Sulawesi Selatan yang terkemuka, orang-orang bangsawan Wajo lainnya yang tidak terikat dalam struktur baru kekuasaan Tana Wajo masih dapat mengembangkan usaha-usahanya untuk mengembangkan pendidikan Islam yang bebas dari sekalian pengaruh politik. Haji As'ad, ulama paling terkemuka di Sulawesi Selatan pada waktu itu tetap melanjutkan usahanya membina murid-muridnya dalam Madrasatul Arabiah Islamiah (MAI) yang bebas dari pengaruh aliran-aliran politik yang sedang berkecamuk memperebutkan pengaruh di kalangan masyarakat. Pendidikan agama yang diselenggarakan oleh Haji As'ad dengan murid-muridnya yang terkemuka, menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh pemuda-pemuda dari segenap pelosok Sulawesi Selatan, bahkan ada yang datang dari kepulauan Indonesia lainnya, terutama Kalimantan.

2. Jawatan agama dan perkembangan Madrasah

Pada tahun limapuluhan, ketika terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulailah Partai Politik Islam MASJUMI memasuki kegiatan umat Islam di Sulawesi Selatan. Partai ini mendapat pengikut yang amat besar, dan dapat mempersatukan sekalian golongan umat Islam, yang tadinya disebut golongan Muhammadiyah, golongan Ahlu-sunnah, golongan sara' dan golongan ulama bebas. Usaha-usaha pendidikan dari masing-masing golongan itu dikembangkan sendiri-sendiri tanpa campur tangan partai.²¹ Di antara usaha-usaha pendidikan yang diselenggarakan oleh golongan-golongan ulama itu, maka usaha pendidikan Muhammadiyah dan madrasah asuhan Haji As'ad di Wajo yang dapat dikatakan berhasil berkembang lebih pesat daripada yang lain-lainnya.

Dengan terbentuknya Jawatan Agama, maka keba-

nyakan pegawainya diambil dari para ulama daerah ini sendiri yang tadinya adalah pejabat atau parewa sara' setempat. Ulama-ulama yang menjadi pegawai negeri itu, mulai meninggalkan hubungannya yang intim dengan masyarakat sekitarnya, dan membentuk hubungan-hubungan formil dengan lingkungannya. Jabatan-jabatan kepenghuluan yang tadinya dipangku oleh para Kadhi, dialihkan menjadi kegiatan Kantor Jawatan Agama. Pendidikan agama yang diselenggarakan oleh yayasan-yayasan pendidikan swasta dalam bentuk madrasah-madrasah, mulai pada tingkat Taman Kanak-kanak hingga sekolah lanjutan, mulai ditata melalui badan resmi, yaitu Inspeksi Pendidikan Agama.

Departemen Agama mengangkat guru-guru agama untuk memberikan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, dan menempatkannya pada berbagai sekolah agama swasta sebagai tenaga bantuan, juga didirikan sekolah-sekolah: (1) Madrasah Ibtidaiyah, (2) Madrasah Tsanawiyah, (3) Madrasah Aliyah, (4) Madrasah Diniyah, (5) Raudatul Athfal. Di samping sekolah-sekolah atau madrasah yang bersifat umum itu, didirikan juga sekolah kejuruan untuk pendidikan guru yang dinamakan Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun dan 6 tahun.

Sekolah-sekolah agama seperti disebut di atas itu baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Departemen Agama) maupun oleh Yayasan Pendidikan Swasta, menurut data terakhir (1975) seluruhnya berjumlah 1.099 buah sekolah, dengan jumlah murid 115.662 orang, dengan menggunakan tenaga guru Agama Negeri 4.513 orang dan 1.371 orang tenaga guru swasta (lihat Tabel I).

Adapun jumlah tenaga guru agama (Pegawai Negeri) yang ditempatkan di sekolah-sekolah umum yang berjumlah 4.406 buah (SD, SLP, SLA dan STK, baik negeri maupun swasta) 3.141 orang dan Guru Agama swasta

138 orang, untuk jumlah 559.438 orang murid (lihat Tabel II).

Lembaga pendidikan agama lainnya yang masih berkembang sampai sekarang, ialah yang disebut *manngaji* (pengajian) dilakukan di tempat-tempat ibadat (mesjid atau langgar) atau di rumah-rumah guru mengaji yang didatangi oleh murid-murid untuk memperoleh pendidikan agama (mengaji tafsir Qur'an, Hadits, Nahwu, Syaraf, Tajwid, dan lain-lain). Jenis pengajian semacam ini biasanya disebut *manngaji kitta*. Ada kurang lebih 52 buah dengan jumlah murid kurang lebih 2.000 orang dan diselenggarakan oleh 67 orang ulama terdaftar untuk seluruh Sulawesi Selatan. Ulama yang menyelenggarakan pengajian semacam ini, adalah ulama bebas dari ikatan kepegawaian pemerintah atau sesuatu yayasan pendidikan. Adapun pengajian Qur'an biasa, dan mendidik dasar-dasar ibadat Islam, untuk anak-anak (5 sampai dengan 12 tahun) terdapat di hampir semua desa dan kampung-kampung yang lebih kecil. Biasanya guru mengaji jenis ini, terdiri dari Imam-imam desa atau ulama-ulama yang sudah tua.

3. *Pesantren-pesantren terkemuka*

Di antara apa yang disebut pendidikan agama dengan sistem pesantren, yaitu tempat pendidikan agama Islam yang murid dan gurunya tinggal bersama-sama dalam satu tempat dengan tanah pertanian atau usaha lain yang dilakukan bersama-sama untuk membiayai hidup dan pendidikannya, terdaftar 21 buah dengan jumlah murid kurang

Tabel I
DATA MADRASAH SEKOLAH AGAMA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 1974²²

No.	Jenis Sekolah	Jumlah	Guru Negeri	Guru Swasta	Murid
1.	Madr. Ibtidaiyah Negeri	6	59	—	1.274
2.	Madr. Tsanawiyah Negeri	3	60	3	613
3.	Madr. Aliyah Negeri	2	26	4	300
4.	Raudaturl Athfal	77	87	40	3.165
5.	Madrasah Diniyah	325	770	89	19.860
6.	Madrasah Wajib Belajar	2	14	1	210
7.	Madr. Ibtidaiyah swasta	539	1.686	458	50.848
8.	Madr. Tsanawiyah swasta	58	220	89	3.933
9.	Madr. Aliyah swasta	18	23	46	745
10.	Pondok Pesantren	21	9	59	3.317
11.	Pengajian	52	10	57	1.505
12.	Madrasah Menengah I	1	3	—	73
13.	PGA Negeri 4 tahun	4	64	17	1.401
14.	PGA negeri 6 Tahun	5	173	1	4.480
15.	PGA Swasta 4 Tahun	197	835	284	14.458
16.	PGA Swasta 6 Tahun	85	462	212	9.273
17.	PGA Swasta 6 Tahun Putri	2	5	11	202
18.	PUPPA	1	7	—	—
Jumlah		1.099	4.513	1.371	115.662

Tabel II

**DATA JUMLAH GURU AGAMA NEGERI YANG DITEMPATKAN²² MENGAJAR
AGAMA DI SEKOLAH-SEKOLAH UMUM SULAWESI SELATAN**

No.	Jenis Sekolah	Jumlah	Guru Negeri	Guru Swasta	Murid
1.	Sekolah Dasar Negeri	3.256	2.574	2	441.177
2.	Sekolah Dasar Swasta	234	71	51	37.210
3.	STK Negeri	—	—	—	—
4.	STK Swasta	112	47	50	4.522
5.	SLP Negeri	285	299	—	45.300
6.	SLP Swasta	45	29	12	6.616
7.	SLA Negeri	112	104	6	19.291
8.	SLA Swasta	38	17	7	5.422
Jumlah		4.406	3.141	138	559.438

lebih 3.500 orang yang diasuh oleh 67 orang ulama. Jenis pendidikan seperti ini yang paling terkemuka dan mendapat-pengakuan masyarakat di Sulawesi Selatan. Perguruan itu ialah:

1. Yayasan Perguruan As'adiyah di Singkang (Wajo), adalah lanjutan usaha pendidikan Islam yang dirintis oleh K.H. M.As'ad. Setelah beliau meninggal dunia, maka murid-murid/beliau yang terkemuka antara lain K.H.M. Daud Ismail melanjutkan usaha itu. Untuk mengenangkan jasa-jasa Haji As'ad maka nama perguruan Madrasah Arabiah Islamiah (MAI) dirobah menjadi Madrasah As'adiyah, yang diurus oleh Yayasan K.H.M. Daud Ismail memimpin Madrasah ini sampai tahun 1961, dan dilanjutkan oleh K.H.M. Yunus Maratan sampai sekarang. Dalam statuta Yayasan Pendidikan As'adiyah tercatat tujuannya antara lain: Memelihara dan mempertinggi Syariat Islam berhidmad dan mengembangkan Islam, agama Islam yang suci serta melahirkan dan mengusahakan kader-kader pendidikan masyarakat guna pembangunan agama, negara dan bangsa.

Dalam kegiatan pembinaan pendidikan Yayasan ini telah mendirikan 76 buah cabang dan 6 buah ranting, dalam Kabupaten Wajo, dan mendirikan SD Agama 3 buah, Madrasah Ibtidaiyah 174 buah, Tsanawiyah 3 buah, PGA (Pendidikan Guru Agama) 7 buah, Pendidikan Tinggi Islam 1 buah dan Pesantren 1 buah. Murid sekolah As'adiyah terdaftar pada tahun terakhir: 4.177 orang laki-laki dan 2.940 orang perempuan, yang dilayani oleh 107 orang guru laki-laki dan 30 orang guru perempuan.

Di samping usaha pendidikan, Yayasan Perguruan As'adiyah-pun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan koperasi (Toko Kesejahteraan), Badan Wakaf (Baitulmal), Balai pengobatan dan Badan Amal (Sinoman).

Adapun guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah Yayasan As'adiyah pada umumnya adalah tamatan Madrasah sendiri yang disebarkan ke segenap cabang dan sekolah-sekolah yang didirikannya. Nafkah guru-guru dan biaya pelaksanaan pendidikan diperoleh dari dana yang dikumpulkan oleh Yayasan dari masyarakat dan sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat. Yayasan ini tetap memegang pendiriannya sejak semula untuk tidak berafiliasi kepada sesuatu golongan tertentu dalam menjalankan usaha pendidikan.

2. Darud Da'wah wal Irsyad (DDI), yang sampai sekarang berpusat di kota Pare-Pare, di bawah pimpinan seorang ulama yang kesohor di Sulawesi Selatan, yaitu K.H. Abdurrahman Ambodalle. Pada mulanya DDI didirikan di kota Watansoppeng (Soppeng) dalam tahun 1946, oleh beberapa orang ulama keluaran perguruan Ad'adiyah di Wajo. Mereka itu ialah K.H. Abdurrahman Ambo Dallo dan K.H. Muh. Daud Ismail, murid-murid terkemuka K.H.M. As'ad di Wajo. DDI berkedudukan di Watan Soppeng tidak lama karena kepindahan K.H. Abdurrahman Ambo Dalle ke Mangkoso' (Kabupaten Barru), yang mengetuai DDI, maka pindah pulalah kegiatan DDI ke Mangkoso'. Dari tempat kedudukan baru DDI mengembangkan diri dengan mendirikan sekolah-sekolah diberbagai tempat. Cabang-cabang yang mengurus sekolah-sekolah atau Madrasahpun dibentuk, mula-mula di sekitar Pare-Pare, Pinrang dan lain-lain. Dalam Mukhtamar — DDI se Indonesia dalam bulan Maret 1975 di kota Pare-Pare, dilaporkan bahwa DDI telah mempunyai cabang sejumlah 1.200 buah, yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra. Pengurus Besar DDI/Majelis Pembina DDI yang sekarang berkedudukan di kota Pare-Pare, diketuai oleh K.H. Abdurrahman Ambo Dalle

dibantu oleh ulama-ulama terkemuka lainnya seperti K.H. Muh. Amin Nashir, K.H. Harunurasyid, K.H. Muh. Abduh Pabbadjah, K.H. Abdul Khalid, M.A., K.H. Khalid Hussain, K.H. As'ad Al Yafiet, dan lainnya lagi.

Kegiatan utama DDI adalah dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama, dengan mengadakan Madrasah-madrasah tingkat dasar, menengah dan tinggi, sebagaimana ternyata dalam Tabel di bawah ini.

Tabel III

**PERKEMBANGAN SEKOLAH-SEKOLAH
DDI 1968 -- 1975²²**

No.	Jenis Sekolah	Jumlah	
		1968-1970	1970-1975
1.	Taman Kanak-kanak	3 buah	49 buah
2.	Ibtidaiyah	67 buah	442 buah
3.	Diniyah Awaliah	200 buah	447 buah
4.	Tsanawiah	18 buah	74 buah
5.	Pendidikan Guru		
	Agama	13 buah	61 buah
6.	Aliyah	5 buah	27 buah
7.	Pesantren	6 buah	60 buah
Jumlah		288 buah	1.160 buah

DDI juga menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang diberi nama Universitas Islam DDI Ad-Dariyah. Saat ini

mempunyai Fakultas: (1) Ushuluddin di Pare-Pare dan Ma'rang (Pangkep), (2) Syari'ah di Mangkoso, (3) Tarbiyah di Pinrang, Sidrap dan Polmas, dan (4) FKIS di Polmas. Jumlah mahasiswa Universitas DDI yang terdengar tempat kedudukan fakultas-fakultasnya tahun 1975 572 orang. Pengaturan penyelenggaraan Perguruan Tinggi DDI disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Perguruan Tinggi (IAIN). Hal tersebut tercermin dalam Pengaturan Dasar Universitas Islam DDI Ad-Dariyah, No. 21/Kep/PB/73, tanggal 1 Nopember 1973.

Sampai tahun Akademi 1975, Universitas ini telah menghasilkan 66 orang Sarjana Muda (Ujian Negeri), masing-masing dari Fakultas Ushuluddin Pare-Pare, 32 orang Fakultas Syari'ah Mangkoso', 19 orang dan Fakultas Tarbiyah Pinrang, 15 orang.

Universitas DDI Ad-Dariyah berkedudukan pusat di Pare-Pare dengan pimpinan sebagai berikut:

Rector Universitas	: K.H. Abdurrahman Ambo Dalle
Wakil Rector I	: K.H. Abeduh Pabbadja
Wakil Rector II	: K.H.M. Amin Nashir
Wakil Rector III	: Drs. H. Busyairi Juddah
Sekretaris	: Drs. Abd. Muis Kabry

Pengaruh DDI yang terkuat terdapat di daerah-daerah Kabupaten Barru, Pangkajene, Pinrang, Sidrap dan Polmas. Pengaruh itu tidak terlalu kentara di daerah-daerah Kabupaten yang terletak di sebelah Selatan kota Makassar. Pada waktu pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, banyak pemuka DDI termasuk K.H. Abdurrahman Ambo Dalle bergabung kedalamnya (karena diculik). Kebanyakan pemuka DDI tadinya bergabung dalam Partai Nadhatul Ulama.

3. Tiga buah tempat pendidikan lainnya yang berasal dari cara-cara pendidikan tradisional yang dikembangkan menjadi semacam Pesantren yang dipimpin oleh seorang atau beberapa ulama sebagai tokohnya, terdapat di Watampone (Bone), di Soppeng dan Maccope' (Makassar).

Di Watampone, sebuah pesantren diberi nama *Ma'had Haditz* dengan tokohnya seorang ulama bernama K.H. Junaid Sulaiman. Beliau mendapat pendidikan agama bertahun-tahun lamanya di Tanah Arab. Untuk mengembangkan dan memelihara pesantren yang diasuhnya, beliau mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Dati II Bone. Secara organisatoris pesantren ini berada di bawah perlindungan GUPPI (Golkar). Murid-murid pesantren ini selain mendapat pelajaran Agama Islam, pengetahuan umum praktis, juga menjadi kebanggaannya untuk akhirnya menjadi penghafal Al Qur'an. Jumlah muridnya adalah sekitar 150 orang dan tinggal dalam asrama yang disediakan.

Ulama-ulama di Bone lainnya yang tidak memberikan pelajaran di pesantren itu, tetap mengadakan pengajian (Majelis Taklim) tetap di Mesjid Raya Watampone. Pengajian di mesjid itu, sama halnya dengan yang dilakukan oleh para ulama dari Perguruan As'adiyah diikuti selain oleh para murid pesantren, juga oleh masyarakat umum yang berminat. Pengajian dilakukan pada waktu antara salat Magrib dan Isya. Seorang ulama duduk di tengah-tengah lingkaran yang dikerumuni oleh peserta pengajian yang masing-masing membawa kitab yang diajarkan. Ulama yang mengajar itu membaca kitab dalam bahasa Arab dan menterjemahkan, menerangkannya dalam bahasa Bugis.

Kadhi Bone yang masih digelar *Petta Kali Bone*, biasanya ikut memberikan pelajaran di Mesjid Raya. Jabatan *Kali* sesungguhnya sejak tahun 1953, ketika Jawatan Agama

dari Departemen Agama R.I. sudah diadakan disemua daerah sampai ke daerah-daerah Kabupaten, tidak ada lagi secara institusionil. Akan tetapi Kabupaten Bone, satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang masih resmi mempunyai Kadhi, walaupun di dalam administrasi kekuasaan Kadhi Bone tidak mempunyai tugas resmi. Pemerintah Kabupaten Bone, hanya memberikan kepada Kadhi itu sekedar honorarium. Kadhi Bone masih mempunyai pengaruh yang besar dalam kalangan kaum bangsawan Bone dan para petugas kantor agama. Imam-imam di desa-desa menganggap *Petta Kali Bone* sebagai pemimpin mereka. Kantor-kantor Agama kurang mempunyai kewibawaan dibandingkan dengan kewibawaan pribadi yang dipunyai oleh Kadhi Bone. Kantor-kantor Agama boleh melakukan pencatatan nikah dalam pernikahan orang-orang bangsawan, akan tetapi yang menjadi Wali Hakim, tidak boleh lain daripada *Petta Kali Bone*. Demikian pula dalam hal upacara-upacara keagamaan lainnya yang masih dikaitkan dengan tradisi lama seperti Perayaan Maulid Nabi, Isra' Mi'raj dan sebagainya, Kadhi Bone masih harus diberikan tempat yang secara protokoler harus diperhitungkan. Kadhi Bone masih dianggap tokoh *Parewa sara'* yang tertinggi di Bone, sehingga kantor agama Kabupaten pada anggapan umum hanyalah petugas-petugas atau pegawai-pegawai biasa yang tidak mempunyai peranan sebagai *opinion leader*.

Di Bone inilah sangat terasa adanya pandangan masyarakat yang membedakan antara ulama pegawai dan ulama bebas. Ulama pegawai ialah ulama yang menjadi pegawai, menerima gaji (nafkah) dari Departemen Agama, dan ulama bebas ialah ulama yang mengabdikan diri kepada agama dan umat tanpa ikatan kepegawaian pada pemerintah. Penghargaan masyarakat kepada ulama bebas dianggap lebih tinggi secara kualitatif dibandingkan penghargaan mereka terhadap ulama pegawai. Hal ini ternyata dalam berbagai hal seperti: (1) Menganggap keterangan keagamaan dari

ulama bebas lebih afdhol, (2) Ulama bebas dianggap memiliki berkah (charisma), (3) Ulama bebas memiliki daya tarik untuk cepat dicontohi sikap dan tingkah lakunya.

Dalam mencari hubungan sikap masyarakat itu dengan penghargaan mereka kepada apa yang dahulu disebut Parewa sara' sebagai bahagian dari kekuasaan kerajaan dan pegawai Departemen Agama pada waktu sekarang, dikatakan sama sekali berbeda. Pada zaman dahulu Parewa sara' berkedudukan sederajat dengan *Ade'* (pemerintah), sedangkan sekarang pegawai Departemen Agama, semata-mata adalah pegawai yang tidak menentukan kehidupan politik negara. Lagi pula Parewa sara' sebagai ulama zaman lalu, tidak digaji dan mempunyai pengaruh yang amat besar di kalangan masyarakat. Selain daripada itu Parewa sara' dalam strata sosial ditempatkan sama dengan lapisan *Ana-karung* (bangsawan).

Di Soppeng terdapat sebuah pengajian yang juga dapat digolongkan ke dalam jenis pesantren. Pesantren itu bernama Pesantren YASRIP dipimpin oleh K.H. Muh. Daud Ismail. Beliau seorang ulama yang disegani dalam masyarakat, dan salah seorang di antara murid terkemuka K.H. Muh. As'ad di Wajo. Pengaruh pesantren ini, tidaklah sebesar pengaruh Perguruan As'ad di Wajo, atau DDI di Pare-Pare. Namun demikian, para ulama yang memberikan pendidikan pada madrasah ini cukup besar pengaruhnya di kalangan umat Islam di Sulawesi Selatan. Hal ini antara lain disebabkan karena anggapan bahwa pesantren itu adalah satu dengan Yayasan As'adiah di Wajo. Selain mengadakan pendidikan pengajian, kegiatan utama ialah menyelenggarakan majelis taklim di mesjid Watan Soppeng yang biasanya diikuti oleh banyak peminat.

Di Maccopé' (Kabupaten Maros), kira-kira 15 kilometer dari kota Ujung Pandang, terdapat sebuah pesantren bernama Pesantren *Darul Istiqamah* yang dibina oleh K.H. Ahmad

Marzuki Hasan, seorang pemuka Islam yang berasal dari Sinjai. Beliau pernah ikut DI/TII dan menjabat Menteri Kehakiman selama kurang lebih 12 tahun. Menurut Kiyai ini, beliau mengikuti pemberontakan DI/TII karena timbulnya ketidak puasan dalam masyarakat, melihat perkembangan umat Islam, sedangkan lawan-lawan Islam semakin memperoleh kedudukan yang menentukan jalannya politik negara. Umat Islam tidak dapat lagi mempersatukan diri, sehingga menjadi umat yang besar jumlah, tetapi tidak mempunyai kekuatan. Menurut Kiyai Marzuki hal itu disebabkan antara lain karena tidak tepatnya cara dakwah di kalangan umat Islam. Itulah juga antara lain menjadi motifnya setelah menggagalkan DI/TII ia berusaha mempepori media dakwah melalui pembinaan pendidikan pesantren yang telah dimusyawaratkan dalam kalangan para ulama Sulawesi Selatan yang disponsori oleh Panglima Kodam XIV/HN dalam tahun 1969.

Pesantren Darul Istiqamah, mulai didirikan dalam tahun 1970 dengan 7 orang murid (santri)nya. Satu tahun kemudian menjadi 20 orang. Kelambatan perkembangannya menurut Kiyai Marzuki karena para pembinaanya tidak tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya dalam pesantren. Dalam tahun 1971 K.H.A. Marzuki Hasan, mulai tinggal menetap di dalam pondok pesantren bersama murid-muridnya. Mulai saat itulah orang tua datang membawa anak-anaknya untuk menjadi murid pesantren. Orang tua sendiri membuatkan anak-anaknya pondok untuk didiami.

Materi pendidikan yang diberikan pada tahap pertama adalah pendidikan agama, untuk memberikan kekuatan iman, agar iman itulah yang menjiwai segenap tingkah lakunya. Pada tahap kedua diberikan pendidikan ketrampilan, untuk dapat bekerja dan tahu menangani hidupnya sendiri. Pada umumnya kerawanan pra orang tua dalam masyarakat kita sekarang, katanya, adalah karena merasakan dan meli-

hat iman anak-anaknya sudah sangat lemah. Kebanyakan orang tua yang membawa anak-anaknya ke pesantren ini mengemukakan alasan agar iman anak-anaknya itu dapat dibina. Mulai tahun 1972 murid pesantren ini menjadi 180 orang, terdiri dari anak-anak orang yang berasal dari berbagai golongan organisasi Islam (NU, Muhammadiyah, malah dari Tarekat Khalwatiah). Murid-murid pesantren ini, terdiri atas laki-laki dan murid perempuan. Pemisahan tempat tinggal antara murid wanita dan murid laki-laki dipertahankan dengan keras, karena disinilah hendak ditunjukkan keutamaan dalam pendidikan, agar kaum wanita itu mendapat penghargaan semestinya dari kaum laki-laki. Di dalam masyarakat kita sekarang justru kaum wanita itu sendiri yang menurunkan martabatnya, katanya lagi, sehingga kaum pria tak dapat memberikan penghormatan kepada mereka. Di antara murid-murid pesantren Darul Istiqamah telah beberapa kali terjadi pernikahan. Upacara pernikahan (atas persetujuan orang tua kedua pihak), diselenggarakan dengan sederhana dan mereka yang sudah berumah tangga itu meneruskan hidupnya di pesantren. Menurut K.H. A. Marzuki, dewasa ini kita harus berusaha sekeras-kerasnya untuk menciptakan satu cara hidup yang sesuai dengan pendidikan Islam, yaitu satu masyarakat Islam yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan tenaganya sendiri.

Pesantren ini didirikan oleh Yayasan Dakwah Islamiah yang seharusnya memberikan support materiil kepada pesantren akan tetapi dana yang dapat dikumpulkannya amat terbatas jumlahnya, sehingga setiap warga pesantren harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sekarang pesantren ini mempunyai murid 275 orang.

Hal yang menarik pada pesantren Darul Istiqamah ini, ialah letaknya yang dikelilingi oleh pengikut-pengikut fana-tik dari aliran Tarekat Khalwatiah. Anak-anak dari keluarga

pengikut Tarekat Khalwatiah yang menjadi murid-murid pesantren ini, mengatakan bahwa orang tua mereka sama sekali tidak menanyakan kepada mereka tentang iman yang dipelajarinya dari pesantren. Orang tua mereka pada umumnya bersikap hormat kepada pesantren dan tidak ada gejala-gejala bahwa mereka akan menimbulkan kerusakan dengan adanya pesantren di dekat pusat gerakan Tarekat Khalwatiah. Sebaliknya keinginan tahu tentang usaha pendidikan iman dan cara-cara ibadat semakin besar juga dengan adanya anak-anak mereka menjadi murid pesantren itu.

Tidak jauh dari situ dalam Kabupaten Maros juga terdapat pesantren yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Pesantren ini membangun tempat tinggal dan tempat pendidikannya di atas tanah seluas 2½ hektar dan mempunyai murid kurang lebih 70 orang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Pesantren Muhammadiyah ini dinamakan pesantren Gombara, yang mendidik anak-anak untuk tingkat pendidikan yang setaraf dengan PGA. Oleh karena itu maka pendidikannyapun dinamakan Kulliatul Muallimin, di bawah pimpinan Ustadz H. Jabbar Asiri.²⁴

4. *Perguruan Tinggi Islam*

Selain dari usaha-usaha pendidikan agama Islam seperti yang disebutkan dibahagian depan, maka sejak tahun 1950-an oleh berbagai kalangan dalam masyarakat telah dirintis pengadaan Perguruan Tinggi atau Universitas Islam. Usaha-usaha mendirikan Perguruan Tinggi itu di kalangan umat Islam, sejalan dengan timbulnya berbagai desakan dalam masyarakat pada umumnya untuk mendirikan Perguruan Tinggi, baik Negeri maupun Swasta, yang bersifat umum. Dalam kalangan umat Islam, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh dalam Partai-partai Islam dan organisasi-organisasi Islam, usaha mendirikan Pendidikan Tinggi Islam diwujudkan sebagai berikut:

a. *Universitas Muslimin Indonesia*

Atas prakarsa beberapa orang cendekiawan (ulama dan sarjana) di Makassar, maka pada tanggal 23 Juni 1945, ditanda tangani lah Piagam berdirinya Universitas Muslimin Indonesia (UMI) di kota Makassar. Gedung (kampus) UMI yang kemudian dibangun dan ditempati pada tahun 1958 terletak di Jalan Kakatua No. 27, adalah satu-satunya gedung universitas yang dapat dipunyai sendiri oleh sebuah Universitas Swasta di Ujung Pandang. Universitas Swasta lainnya, kebanyakan menumpang pada gedung-gedung sekolah negeri.

Pada mulanya UMI membuka dua buah Fakultas Agama Islam dan Ilmu Masyarakat dan Fakultas Hukum, Sosial dan Politik. Kemudian Fakultas-fakultas itu berubah dan bertambah, menjadi Fakultas-fakultas Syari'ah, Tarbiah dan Ushuluddin, dengan tenaga-tenaga pengajar yang terdiri dari sarjana-sarjana yang menjadi pejabat di daerah Sulawesi Selatan, ulama-ulama dan tenaga-tenaga dosen Universitas Negeri yang telah ada lebih dahulu di kota Makassar.

Ketika Institut Agama Islam Negeri dibuka di Makassar dengan mempergunakan gedung UMI sebagai tempat menumpang sementara, maka modal pertama IAIN dalam perkembangannya adalah mengintegrasikan ketiga Fakultas UMI yang ada menjadi Fakultas dalam lingkungan IAIN, berturut-turut Fakultas Syari'ah dalam tahun 1962, Fakultas Tarbiah dalam tahun 1964 dan Fakultas Ushuluddin dalam tahun 1975.

Setelah Fakultas-fakultas UMI dimasukkan ke IAIN, maka Badan Wakaf UMI membentuk fakultas-fakultas baru, yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Kemudian dibuka juga Akademi Bahasa Asing,

Jurusan Bahasa Inggris dan Jurusan Bahasa Arab. Menurut data terakhir UMI dengan Fakultas-fakultasnya yang ada mempunyai mahasiswa sejumlah 513 orang. Sejak berdirinya sampai sekarang telah menghasilkan 17 orang Sarjana Muda (Ujian Negara) dari Fakultas Ushuluddin 16 orang Sarjana Muda (Ujian Negara) dari Fakultas Ekonomi dan 6 orang Sarjana Muda (Ujian Negara) ABA Jurusan Inggris. Fakultas dan Akademi lainnya masih dalam perkembangan untuk program Sarjana Muda.

Tenaga pengajar yang membantu UMI menyelenggarakan pendidikannya, sebahagian besarnya adalah dosen-dosen dari Universitas Hasanuddin, IKIP Ujung Pandang dan IAIN Alauddin, atas dasar kerja sama dan izin dari pimpinan masing-masing Perguruan Tinggi tersebut. Malahan Rektor UMI sekarang, yaitu H. Muh. Ridwan Saleh, SH, adalah dosen senior Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sesuai dengan perkembangan dan kurikulum yang disajikannya rupa-rupanya Fakultas-fakultas UMI, lebih cenderung disebut memberikan pendidikan tinggi yang bersifat umum. Sifat khasnya sebagai lembaga pendidikan Islam, hanya ternyata pada Piagam Pendirian UMI yang menetapkan tujuannya sebagai berikut:

- (1). Membentuk Sarjana Muslim berilmu amaliah dan beramal ilmiah serta berbudi luhur dan berbakti pada Nusa dan Bangsa.
- (2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan yang tercakup dalam bidang-bidang Fakultas masing-masing.
- (3) Memecahkan problema-problema yang terdapat dalam masyarakat dan memberikan jalan keluar dalam rangka pengabdian terhadap masyarakat dan Negara.

b. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al-Jamiah Alauddin.*

IAIN Alauddin didirikan di Ujung Pandang (Makassar) pada tanggal 10 Nopember 1965. Pada mulanya Fakultas yang ada dalam IAIN Alauddin adalah fakultas cabang dari IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Fakultas itu ialah Fakultas Syari'ah yang diresmikan pada tanggal 30 Oktober 1962, dan fakultas Tarbiah, diresmikan pada tanggal 7 Nopember 1964. Kedua Fakultas itu sebelum dimasukkan menjadi Fakultas IAIN Alauddin adalah Fakultas dalam lingkungan UMI. Pada tanggal 28 Oktober 1965 Fakultas Ushuluddin didirikan. Dengan berdirinya IAIN Alauddin pada tanggal 10 Nopember 1965, maka berakhirilah status Fakultas-fakultas itu sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijogo.

Dengan modal 3 buah Fakultas tersebut IAIN mengembangkan diri dengan membuka Fakultas-fakultas cabang dipelbagai daerah dalam wilayah Indonesia Bahagian Timur. Dibukanya Fakultas Tarbiah cabang Ternate (31 Agustus 1966), Fakultas Adab di Ujung Pandang (23 Nopember 1967), Fakultas Tarbiah cabang Kendari (18 April 1968), Fakultas Tarbiah cabang Pare-Pare (18 April 1968), Fakultas Tarbiah cabang Palu (18 April 1968), Fakultas Syariah cabang Watampone (6 April 1968), Fakultas Ushuluddin cabang Palu (6 Agustus 1968), Fakultas Tarbiah cabang Bau-Bau Buton (30 September 1970), Fakultas Dakwah cabang Bulukumba (30 September 1970), dan Fakultas Tarbiah Filial Gorontalo. Dengan demikian IAIN di Ujung Pandang mempunyai 4 Fakultas induk dan 9 Fakultas Cabang dan 1 Filial.

Di samping Fakultas-fakultas cabang yang bersebaran dibanyak tempat, juga mempunyai 7 Sekolah Persiapan IAIN (sederajat dengan SMA) yang juga tersebar tempat-

nya, yaitu di Ujung Pandang, Bone, Bulukumba, Polmas, Bau-Bau dan Ternate.

Menurut Prof. K.H. Abdurrahman Syihab, Rektor IAIN Alauddin (1974, hal. 2) dilihat dari sudut kwantitas Fakultas-fakultas IAIN Alauddin cukup besar. Berdirinya Fakultas-fakultas cabang yang banyak itu, adalah karena permintaan dan desakan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Mengingat betapa besar perhatian masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pembinaan pendidikan agama, hal ini cukup menggembirakan. Akan tetapi pada segi lain, dengan memenuhi segenap hasrat dan keinginan masyarakat, maka akan terjadi kerawanan karena sulitnya dicapai keseimbangan yang memadai antara perkembangan segi kwantitas dan segi kualitas. Peningkatan pengembangan kualitas sangat terhambat oleh kurangnya tenaga, baik tehnik edukatif, maupun administratif. Kekurangan dalam sarana dan fasilitas pendidikan dan pengajaran, tak dapat ditanggulangi dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu kata Rektor IAIN Alauddin, maka eksistensi Fakultas-fakultas cabang sedang dipikirkan kembali dan mungkin dalam waktu dekat akan diadakan rasionalisasi, sejalan dengan hasil rapat kerja para Rektor IAIN se-Indonesia di Bandung pada bulan Agustus 1974.

Adapun tenaga-tenaga pengajar yang melayani segenap mahasiswa IAIN yang berjumlah 2.182 orang (laki-laki 1.506, perempuan 676)²³ yang tersebar pada semua Fakultas induk dan cabang-cabangnya, terdiri atas 54 orang tenaga Dosen Tetap dan 40 orang tenaga Asisten Tetap. Untuk memenuhi kekurangan tenaga Dosen Tetap itu, maka IAIN Alauddin mengerahkan 530 orang tenaga Dosen dan Asisten Luar Biasa. Tenaga Dosen dan Asisten Luar Biasa itu pada umumnya adalah Sarjana-sarjana lulusan IAIN, alim ulama, Sarjana-sarjana lulusan Perguruan Tinggi, seperti Universitas Hasanuddin, IKIP, dan lain-la-

in, yang bertugas di tempat Fakultas IAIN itu berkedudukan.

Jumlah murid Sekolah Persiapan IAIN seperti disebutkan di atas, adalah 1.004 orang (laki-laki 567, perempuan 437).²⁵ Murid-murid tamatan Sekolah Persiapan ini, pada bahagian terbesarnya tersalur ke IAIN baik di pusat maupun di cabang-cabangnya.

c. *Universitas Muhammadiyah (UNISMUH)*

UNISMUH didirikan di kota Watan Soppeng (Soppeng) dalam tahun Akademi 1962-1963, dengan Fakultas Pendidikan. Pada tahun 1966-1967, UNISMUH memindahkan pusatnya ke Ujung Pandang dengan menempati sebuah gedung sekolah Cina yang ditutup oleh Pemerintah dalam tahun 1966. Gedung itu dipakai bersama dengan SD, yang mempergunakannya pagi hari.

UNISMUH mempunyai dua buah Fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, yang kurikulumnya sama dengan IKIP, dan Fakultas Tarbiah, yang kurikulumnya sama dengan Fakultas Tarbiah IAIN. Kedua Fakultas itu mengadakan cabang-cabang keberbagai ibu negeri Kabupaten se-Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

- (1) Cabang Fakultas Pendidikan di Bone, Bulukumba, Rappang, Enrekang dan Pare-Pare.
- (2) Cabang Fakultas Tarbiah di Jeneponto, Sinjai, Enrekang, Maros dan Pangkep.

Kalau di Ujung Pandang para mahasiswa UNISMUH mendapat kuliah-kuliah dari Dosen atau Asisten Dosen yang terdiri pada umumnya dari Dosen atau Asisten Tetap dari Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Ujung Pandang, maka mahasiswa pada cabang-cabang Fakultas UNISMUH yang terdapat di pedalaman Sulawesi Selatan mendapat

kuliah-kuliah dari Dosen atau Asisten yang datang bergiliran secara berombongan 2 a' 3 orang dari Ujung Pandang dan tinggal di tempat selama 2 atau 3 hari, lalu digantikan oleh rombongan berikutnya yang datang dan pergi dengan naik bis umum.

Selama bertahun-tahun, Dosen dan Asisten yang mengajar di UNISMUH sama sekali tidak memperhitungkan honorarium mengajarnya. Mereka pada umumnya adalah warga Muhammadiyah yang penuh rasa pengabdian. Mahasiswa UNISMUH baik yang belajar di Ujung Pandang maupun di pedalaman, pada umumnya adalah pegawai negeri yang bekerja di tempat itu.

Sejak berdirinya sampai waktu terakhir ini, Fakultas-fakultas UNISMUH telah menghasilkan kurang lebih 50 orang Sarjana Muda (Ujian Negara). Pada akhir-akhir ini UNISMUH kurang berkembang, karena berbagai Universitas atau Perguruan Tinggi yang ada di kota Ujung Pandang telah dapat memberikan tempat bagi mereka yang ingin belajar di Perguruan Tinggi dengan layanan yang lebih baik.

Ada beberapa buah Perguruan Tinggi atau Universitas Islam yang dibuka pada tahun 1960-an, seperti Universitas Nahdlatul Ulama, dan Universitas Cokroaminoto, sekarang tidak aktif lagi dan diduga tidak akan melanjutkan usahanya dalam bidang Pendidikan Tinggi.

d. *Ikatan Mesjid dan Mushalla Indonesia "Muttahidah" (IMMIM)*

Dalam tahun 1960-an atas prakarsa beberapa orang pemuka masyarakat Islam di kota Makassar (Ujung Pandang) dengan pelopor utama H. Fadeli Luran, seorang bekas TNI, dibentuklah Ikatan Mesjid dan Mushalla Indonesia Makassar (IMMIM). Organisasi ini dalam rencana-

nya akan bergerak dalam lapangan dakwah, melalui mesjid-mesjid dan musholla-musholla yang terdapat dalam kota, dan menghimpun tenaga-tenaga da'i (pendakwah dan mubaligh) dan melaksanakan dakwah yang lebih sistematis dengan tenaga-tenaga yang lebih teratur. Direncanakan pula adanya suatu tempat pertemuan dan studi Islam yang melayani para Sarjana dan ulama yang hendak melakukan penelitian tentang Islam. Dalam tahun 1971 atas usaha dari H. Fadeli Luran dengan modal pribadinya, dibeli sebuah gedung yang cukup besar dan baik letaknya. Gedung itu diperbaiki dan diberi kelengkapan seperlunya untuk menampung kegiatan-kegiatan pertemuan, fasilitas Perpustakaan dan Poliklinik.

Dalam tahun 1971 IMMIM yang tadinya hanya beroperasi di Ujung Pandang, membuka diri dengan menerima mesjid-mesjid yang ada di luar kota menjadi anggotanya. Secara langsung di tiap Kabupaten mulai berdiri cabang-cabang IMMIM. Kepada mesjid-mesjid yang menjadi anggotanya itu selain diberikan bantuan-bantuan keuangan dan barang-barang yang berguna serta kitab-kitab agama yang dapat dikumpulkan oleh IMMIM, juga dikunjungi secara berkala oleh para mubaligh, yang diatur oleh IMMIM. Dengan bertambah luas dan giatnya kegiatan itu, ditambah dengan adanya gedung pertemuan yang disebut *Islamic Center*, maka makin populerlah IMMIM, sehingga IMMIM terpaksa merobah kepanjangan namanya menjadi *Ikatan Mesjid dan Musholla Indonesia "Muttahidah"*. Dalam *Islamic Centre* itu ditampung kegiatan-kegiatan pertemuan, perpustakaan dan poliklinik. Gedung itu mempunyai pula aula yang cukup besar yang dapat dipergunakan untuk pertemuan seperti Konperensi yang dapat dihadiri oleh lebih dari 100 orang. Aula itu juga dipersewakan untuk melakukan resepsi-resepsi perkawinan dan sebagainya.

Satu kelompok sarjana dan ulama di kota Ujung Pandang menyelenggarakan Islam Study Club yang secara berkala melakukan pertemuan dan diskusi untuk menemukan metoda dakwah yang lebih baik dan yang selalu disempurnakan. Diatur juga kuliah subuh di mesjid-mesjid di dalam dan di luar kota Ujung Pandang yang disajikan oleh para mubaligh yang sudah dilatih dan dengan tema dakwah yang lebih terarah kepada pembangunan umat dan pemantapan iman.

Usaha IMMIM mengirimkan mubaligh-mubaligh ke mesjid-mesjid di luar kota dapat dikatakan suatu sukses.

Mubaligh-mubaligh tersebut dilarang menyinggung kebijaksanaan pemerintah dalam dakwahnya dan dianjurkan untuk tidak berpihak kepada salah satu golongan Islam. Mereka harus mengutamakan kejujuran dan pengabdian yang tinggi kepada agama.

Di samping itu dimulai pula kegiatan dalam lapangan pendidikan dengan model pesantren. Salah satu pesantrennya yang terletak 10 kilometer dari kota Ujung Pandang oleh H. Fadeli Luran dikatakan sebagai model pesantren yang terbaru.

Kurikulum pendidikannya adalah hasil godokan dari para sarjana dan ulama yang dapat dikerahkan oleh IMMIM. Titik berat kurikulum itu diletakkan pada pendidikan Agama yang ditopang oleh pengetahuan umum dan pengetahuan bahasa. Bahasa-bahasa yang utama diajarkan adalah bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Murid-murid pesantren IMMIM itu diajari juga ketrampilan bekerja dalam lapangan pertanian, pertukangan dan peternakan. Murid-murid yang diterima oleh pesantren ini sebagai muridnya, adalah anak-anak tamatan sekolah Dasar. Dalam tahun 1975 dimulai dengan 49 orang murid. Untuk tahun 1976 direncanakan untuk menerima sebanyak 120 orang.

Tiap-tiap orang murid diminta membayar setiap bulan Rp.3.500,- untuk pembayaran pemondokan termasuk makan dan biaya pendidikan.

Pelajaran dimulai pada jam 05.00 subuh di mesjid. Setelah itu mempersiapkan diri ke ruangan-ruangan belajar biasa sampai jam 13.00. Pada sore hari mereka diberikan pelajaran praktis dan kegiatan-kegiatan lain seperti olahraga dan kesenian.

Menurut H. Fadeli Luran pesantren ini dibangun oleh IMMIM atas bantuan Menteri Besar Sabah, Datuk H. Mustafa sejumlah U.S. \$ 50.000 dalam tahun 1973. Mesjid pesantren yang sudah permanen dibangun dengan biaya Rp.7.000.000,- sumbangan dari Andi Sose, seorang pengusaha di Jakarta. Tanah yang ditempati membangun pesantren itu dibeli dari rakyat seharga Rp. 8.000.000,- Pada waktu ini murid-murid pesantren IMMIM didekat kota Makassar ini, terdiri atas murid-murid lelaki semuanya. Pesantren IMMIM untuk kaum puteri sudah dibangun di Minasa-te'ne dalam Kabupaten Pangkep, yang diasuh oleh ulama-ulama setempat.

PENUTUP

Dalam bab penutup ini, disebutkan sebagai hal yang ditemukan dalam penelitian lapangan yang dapat dijadikan masalah untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Masalah-masalah itu rupanya umum terdapat di hampir semua tempat yang dikunjungi untuk penelitian. Adapun masalah-masalah itu yang dilaporkan di sini semata-mata yang menyangkut soal pendidikan dan sikap masyarakat terhadapnya, antara lain sebagai berikut:

1. *Masalah Pendidikan Agama di Sekolah-sekolah Umum*

Seperti ternyata dalam bab yang lalu tentang jumlah guru agama (pegawai Departemen Agama) yang ditempatkan di sekolah-sekolah umum (SD, SLP, SLA dan sekolah-sekolah kejuruan) menurut pendapat berbagai kalangan terutama kalangan Guru Sekolah Umum (Departemen P & K) sesungguhnya cukup memadai, malahan ada yang berpendapat terlalu banyak. Bahwa pihak orang tua murid pada umumnya kurang puas terhadap hasil pendidikan agama yang diperoleh anak-anaknya di sekolah itu dikondisikan karena beberapa penyebab (yang masih perlu diteliti lebih lanjut), antara lain: (1) Kurikulum dan silabus dalam pendidikan agama kurang mantap memberikan pertumbuhan rasa keimanan kepada anak didik usia peka (6-10 tahun), kurang menarik bagi anak didik usia penuh dengan daya fantasi (10-15 tahun) dan kurang berasosiasi kepada

orientasi umum bagi anak didik usia remaja di Sekolah Menengah. Keadaan kurikulum yang kurang relevant itu, ditangani oleh guru-guru agama yang rata-rata merasa kurang mendapat bimbingan dari para pejabat atasannya. Mereka, umpamanya, tak pernah mendapat penataran untuk melayani tiap-tiap perobahan yang hendak dijalankan di sekolah. (2) Status guru agama yang selalu dianggap pendatang (orang lain) di sesuatu sekolah tempat ia mengajar, menyebabkan timbulnya berbagai kepincangan dalam pergaulan antara sesama guru. Pada umumnya guru-guru agama merasa cara pelayanan Departemen P & K terhadap guru-guru dalam lingkungannya lebih baik daripada yang mereka alami dari Departemen Agama, (3) Tanggapan bahagian terbesar murid-murid sekolah umum terhadap mata pelajaran agama adalah bahwa mata pelajaran agama itu tidak penting (walaupun sudah diumumkan bahwa hasil ujian mata pelajaran agama ikut menentukan kenaikan tingkat atau kelulusan), karena pada kenyataannya sangat jarang anak didik tidak naik kelas atau lulus, karena pendidikan agama atau mata pelajaran agama kurang serius diikutinya, (4) Menghadapi anak didik (terutama di kota-kota) yang dalam kehidupan keluarganya kurang atau sama sekali tidak memperoleh bimbingan keagamaan, kurang mendapat cara-cara pendekatan yang lebih intim yang diharapkan dapat dilakukan oleh para guru agama.

Ada terdapat semacam keluhan umum di kalangan guru agama, bahwa waktu untuk menyelesaikan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah umum tidak cukup. Kecenderungan untuk meminta jam pelajaran lebih banyak akan bertabrakan dengan keperluan pendidikan umum yang semakin menuntut peningkatan kualitas, dengan menggunakan jam pelajaran yang tersedia lebih banyak.

Di beberapa tempat, seperti di Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bulukumba dan Sinjai, cara masyarakat meng-

atasi keluhan tentang kurangnya waktu untuk mata pelajaran agama itu, dengan: (a) memberikan kesempatan kepada madrasah Diniah untuk mempergunakan sekolah-sekolah dasar pada waktu sore untuk pelajaran agama bagi anak-anak SD dari sekolah itu sendiri, (b) mengusahakan adanya guru-guru agama memberikan pelajaran agama privat, dan kesanalah anak-anak mereka disuruh belajar dengan sistim tradisionil tetapi dengan metode baru. Di Kabupaten Takalar sendiri dengan keputusan pemerintah dan DPRD-nya ditetapkan semua Sekolah Dasar Negeri, dipergunakan untuk Sekolah Agama (Madrasah Diniah) baik negeri maupun swasta, pada waktu sore dan semua gedung sekolah agama kepunyaan swasta dapat juga dipergunakan oleh SD Negeri secara berganti sore atau pagi.

2. Sekolah-sekolah Agama, Sarana dan Murid-muridnya

Sekolah-sekolah agama yang semata-mata memberikan pelajaran agama, terutama Madrasah Diniah bagi anak-anak antara usia 6-10 tahun dan Madrasah-madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiah dan Aliah, baik Negeri (Departemen Agama) maupun swasta yang jumlahnya cukup banyak (lihat Tabel I), mempunyai sarana pendidikan bagi gedung dan peralatan pendidikan, rata-rata jauh daripada memuaskan. Madrasah-madrasah yang tidak punya bangunan sendiri menempati kolong-kolong rumah penduduk. Keadaan sarana yang demikian buruknya membawa pengaruh yang tidak menguntungkan bagi terselenggaranya pendidikan agama dengan baik.

Ada satu hal yang amat mengesankan juga, bahwa sampai pada tingkat menengah, Aliah dan Muallimin baik Negeri maupun swasta, madrasah mempunyai jumlah murid perempuan jauh lebih banyak daripada murid laki-laki, terutama di negeri-negeri yang terletak di sebelah Selatan kota Ujung Pandang. Perbandingan jumlah itu, menurut perkiraan kasar adalah kurang lebih 10 berbanding 3.

Perbandingan jumlah itu menjadi menarik jika diketahui bahwa sikap orang tua terhadap pendidikan yang sebaiknya diberikan kepada anak-anak perempuan berbeda dengan yang mereka harapkan untuk diberikan kepada anak laki-laki. Sikap umum orang tua di Sulawesi Selatan, yang tentu masih harus diteliti lebih mendalam, adalah bahwa untuk anak-anak perempuan sebaiknya diberikan pendidikan agama yang lebih intensif daripada yang diberikan kepada kaum laki-laki. Alasannya adalah karena perempuan itu lebih cepat menjadi dewasa sehingga waktunya yang singkat itu, sebaiknya dipergunakan untuk pendidikan agama, baru setelah itu diberikan pendidikan umum atau ketrampilan.

Pendidikan agama yang diberikan kepada anak didik di sekolah-sekolah umum (SD, SLTP, SLTA, dan sebagainya) dianggap tidak dapat menggantikan pendidikan agama secara tradisional yaitu sistem pengajian di tempat-tempat atau rumah-rumah guru mengaji, yang jumlahnya cepat sekali merosot dari hari ke hari. Oleh karena itu penyatuan gedung SD dan Madrasah Diniyah sebagai tempat belajar anak-anak usia 6 — 10 tahun dalam satu administrasi pendidikan dan di bawah satu Kepala Sekolah dianggap ideal. Hal itu juga dapat menjadi salah satu jalan pemecahan mengenai adanya gejala perlombaan membuka sekolah-sekolah umum dan sekolah-sekolah agama yang bersaing mencari murid di desa-desa, yang berakibat keduanya tidak sampai pada taraf memuaskan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

3. *Majelis Ulama dan Perayaan Hari-hari Besar Keagamaan.*

Adanya Majelis Ulama yang terorganisasi dari tingkat Pusat (Jakarta) sampai ke tingkat daerah Kabupaten Tingkat II rupa-rupanya mendapat sambutan baik. Organisasi Majelis Ulama, dalam pengalamannya dua tahun terakhir,

umumnya berhasil menggunakan Perayaan-perayaan Hari Besar Islam, seperti Isra' Mi'raj untuk mempertemukan golongan-golongan dalam masyarakat Islam, seperti terbukti pada Perayaan Isra' Mi'raj tahun 1975, yang dilakukan di Pinrang, dihadiri oleh ribuan umat Islam dari berbagai Kabupaten, dan dimanfaatkan untuk mempertemukan para ulama di Sulawesi Selatan guna membicarakan usaha pembinaan pesantren yang sesuai dengan tuntutan jaman moderen.

Kerukunan hidup antara umat Islam yang selama ini bergolong-golongan menjadi sasaran utama dari dakwah yang dianjurkan oleh para ulama yang dipelopori oleh Majelis Ulama tiap-tiap Kabupaten, demikian juga usaha peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama, senantiasa dirintis untuk terselenggaranya dengan memuaskan.

Keterampilan para ulama dalam menggairahkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pembangunan, terutama dalam pembinaan Generasi Muda belum nyata. Tetapi intensifikasi pengikut sertaan para ulama, yang diharapkan dapat digalakkan oleh Majelis Ulama setempat, niscaya akan membawa manfaat yang besar.

4. *Mesjid dan Mushalla sebagai sarana berkomunikasi yang efisien*

Tempat pertemuan umat Islam yang paling utama sejak jaman lalu sampai sekarang, adalah Masjid dan Mushalla. Bantuan-bantuan materiil untuk mengadakan serambi-serambi pada tiap-tiap mesjid guna peningkatan sarana untuk berkomunikasi dalam kalangan umat Islam adalah cara yang pada waktu ini dianggap paling tepat. Segala macam kegiatan, seperti penerangan kemasyarakatan, pendidikan dan tuntunan bagi pelaksanaan sesuatu program dapat dilakukan di serambi mesjid itu.

Beberapa buah mesjid di Sulawesi Selatan, malahan di samping serambinya, diadakan pula penginapan yang disediakan bagi mubaligh-mubaligh yang datang dan kedatangannya itu langsung bermanfaat bagi masyarakat yang ramai mengunjungi mesjid-mesjid di kampongnya.

Pada akhirnya beberapa kesimpulan laporan ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Islam masuk (permulaan abad ke-XVII) ketika masyarakat Sulawesi Selatan dilanda guncangan-guncangan sosial politik, kulturil dan ketidak pastian norma-norma, yang disebabkan oleh: (1) Persengketaan yang berlarut-larut antara kerajaan-kerajaan dan kelompok-kelompok kaum, (2) Peperangan menghadapi kedatangan VOC (Belanda), (3) Norma-norma adat yang bersandar kepada kepercayaan lama mulai goyah. Dalam keadaan demikian itu, Islam diterima melalui pimpinan masyarakat yang paling atas dan kemudian melalui lapisan atas itu sampai pada lapisan masyarakat yang lebih luas.
2. Ulama-ulama, yaitu orang-orang yang tinggi dan dalam pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi contoh atau teladan dalam mengamalkan agama itu dalam kehidupannya, sejak pada permulaan diterimanya agama itu di Sulawesi Selatan terdiri dari kalangan bangsawan dan pemuka-pemuka masyarakat yang berkuasa dalam masyarakat (kerajaan). Oleh karena itu dalam pertumbuhan agama Islam di Sulawesi Selatan, sebelum masuknya organisasi-organisasi yang hendak melakukan pembaharuan, membersihkan agama Islam dari segala macam khurafat dan tahyul yang buruk serta mengembalikan syariat agama kepada sumbernya yaitu Qur'an dan Hadits, seperti Muhammadiyah dan lain-lain tidak pernah terjadi bentrokan antara

agama (sara') dan penguasa (kerajaan-adat). Kaum adat (bangsawan) dan kaum agama (sara') sebenarnya sukar dipisahkan.

3. Pendidikan agama di Sulawesi Selatan dalam sejarahnya berlangsung melalui beberapa cara sebagai berikut:

(1) Cara penyebaran oleh para penyebar pertama (Dato'ri Bandang, Dato' Patimang, Dato' Tiro) kepada pucuk pimpinan kekuasaan adat (kerajaan) dan pengendali kekuasaan lainnya. Pada tahap penyebaran menurut cara ini ditekankan tentang ajaran Iman kepada Allah SWT, Fiqhi dan Ilmu kalam.

(2) Cara penyebaran melalui lembaga *Panngaderreng* yang disebut sara' dengan aparat atau pejabat sara' yang disebut *Parewa Sara'* yang mempunyai hierarkhis dari *Kali* di pusat kerajaan sampai ke Imam-imam mesjid dan guru-guru agama di desa-desa.

Pengajian dilakukan di mesjid-mesjid dan rumah-rumah pejabat sara' atau guru-guru mengaji. Pada tahap ini penyiaran agama Islam ditekankan tentang Ilmu Agama dan pemantapannya yang disesuaikan dengan organisasi *Ade'*.

Urusan agama dalam rangka penyesuaian itu diselenggarakan oleh sara' yang diintegrasikan ke dalam *Panngaderreng* (Bugis), *Panngadakkang* (Makassar) sebagai salah satu unsurnya.

(3) Cara penyebaran yang mempergunakan sistim klasikal dengan pembukaan sekolah-sekolah agama atau yang sejenisnya. Cara penyiaran atau pendidikan agama pada tahap ini, telah menghasilkan ulama-ulama Islam yang mulai melepaskan diri dari tradisi perpaduan adat dan sara'.

Cara pendidikan agama tradisional yang bersandar pada kekuatan adat dan tradisi mulai dikritik dan beralih kepada pembinaan pribadi Muslim yang sadar dan berpandangan lebih luas. Batas-batas kerajaan lokal (Bugis—Makassar) ditinggalkan dan pengutamaan persatuan Muslimin dalam kesadaran kebangsaan Indonesia mulai memperoleh perhatian.

Dengan pentahapan cara penyiaran ini tidak berarti bahwa cara pada tahap yang lebih dahulu dengan sendirinya akan berakhir setelah cara berikutnya dimulai. Sesuatu cara pada tahap tertentu disini hanya berarti sesuatu keadaan yang paling umum dan menonjol. Tiap-tiap cara yang berlangsung secara umum itu, masih mempunyai kelanjutannya sampai jaman mutakhir dengan berbagai perubahan sesuai dengan keadaan jaman.

4. Sarana-sarana penyiaran atau pendidikan agama yang dikenal dalam sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan adalah:

- (1) Mesjid atau Musholla. Adanya mesjid atau musholla pada tiap-tiap negeri dan desa-desa pada umumnya dijadikan ukuran tentang syiar agama di tempat itu. Mesjid yang besar, indah dan terpelihara dengan baik, ramai dikunjungi untuk bershalat dan mengikuti pengajian oleh penduduk setempat, dianggap syiar kehidupan agama di tempat itu tinggi potensinya.
- (2) Adanya tempat-tempat pengajian (dasar dan lanjutan) yang dilaksanakan oleh para ulama atau guru mengaji pada sesuatu negeri atau desa, juga dijadikan ukuran tentang besar kecilnya potensi umat Islam di tempat itu.

(3) Adanya sekolah-sekolah agama, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta dipandang oleh penduduk sebagai suatu yang harus dipenuhi oleh masyarakat Islam setempat. Oleh karena itu perlombaan masyarakat untuk mengadakan atau menuntut adanya sekolah-sekolah agama menjadi ciri umum dari kehendak mengembangkan masyarakat yang melaksanakan kehidupan umat yang taat kepada agamanya.

5. Kekurang puasan orang tua terhadap pendidikan agama yang diperoleh anak-anak (terutama di Sekolah Dasar Umum) dikemukakan berbagai sebab, antara lain:

- (1) Anggapan bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah umum itu kurang menanamkan rasa keimanan kepada anak didiknya, dibandingkan dengan pendidikan agama (pengajian tradisional) yang pernah dialami oleh orang tua mereka di masa lalu.
- (2) Anggapan bahwa orang tua (terutama di kota-kota) kurang memberikan peranan keagamaan dalam pendidikan rumah tangga yang dapat membantu pendidikan agama yang didapatkan anak didik dari sekolah-sekolah umum.
- (3) Kurikulum-kurikulum pendidikan agama di samping pendidikan umum kurang berkorelasi, sehingga dirasakan oleh anak didik sebagai dua beban yang masing-masing memberatkan.
- (4) Anggapan bahwa pendidikan agama bagi anak didik usia 6 — 9 tahun tidak cukup intensifnya di sekolah-sekolah umum pada waktu pagi. Hal itu masih dapat diintensifkan dengan jalan memberikan kepada mereka kesempatan mengikuti Madrasah Diniyah pada waktu sore mengganti sistem pengajian tradisional yang sudah berangsur-angsur hilang, yang pada

waktu yang lalu juga ramai diikuti oleh anak-anak yang bersekolah umum pada waktu pagi. Madrasah Diniah yang demikian, sebaiknya berintegrasi ke dalam organisasi SD tempat anak-anak itu belajar.

CATATAN KAKI

- 1). Orang Bugis—Makassar sejak lebih kurang abad ke XV sudah menulis sejarahnya dalam lontara, khususnya adalah *lontarabilang* (= catatan harian) dan *lontara-attoriolong* (= catatan silsilah). Lontara-lontara itulah antara lain dapat dipergunakan untuk memberikan gambaran tentang zaman lampau itu.

Noorduyn (1964, hal. 86) mengatakan bahwa buku-buku harian dan buku-buku catatan lainnya dari orang Bugis—Makassar memberikan satu gambaran yang jelas dan teliti mengenai perkembangan-perkembangan dan kejadian-kejadian dalam sejarah berbagai-bagai kerajaan yang telah ada di Sulawesi Selatan. Dalam tulisan-tulisan lontara itu, agama Islam mendapat tempat yang sangat besar. Sejarah perkembangan Islam di Sulawesi Selatan diceritakan secara panjang lebar. Malahan berbagai ajaran Islam acapkali dituliskan dalam konteks cerita sejarah juga.

- 2). *Makkasaraki nabbi Muhamma'*; artinya Nabi Muhammad memperlihatkan diri. Sebahagian orang Makassar berpendapat, kalimat itu adalah ungkapan yang berarti: "Ajaran Nabi Muhammad, yaitu Islam telah menyatakan diri, hidup di dalam kalbu orang Makassar".

- 3). *Dewatassuae*; menurut ahli *Galigo*, kata itu sesungguhnya berarti: "Yang tak berwujud yang tunggal". Lihat juga Mattulada, 1975, hal. 311.
- 4) *Panngaderreng*; wujud kebudayaan orang Bugis—Makassar, hal ikhwal mengenai *ade*, yang mempunyai aspek *ade*, *wari*', *rapang*, *bicara* dan *sara*'. *Siri*; harga diri, martabat diri, perasaan malu yang mendalam.
- 5). *Mukim*; kata *mukim* sebetulnya berarti "Penduduk", akan tetapi di Sulawesi Selatan kata itu mendapat arti tambahan yaitu sejumlah 40 orang penduduk yang berkediaman dalam daerah tempat mesjid berdiri, ditunjuk untuk selalu menghadiri shalat Jum'at. Mereka dimasukkan ke dalam organisasi *sara*'.
- 6). *Bate*; adalah daerah-daerah kerajaan Gowa yang mempunyai bendera sendiri. Daerah *Bate* yang asli Gowa pada mulanya ada 9 (sembilan).
- 7). *Saukang*; rumah-rumah kecil, tidak didiami oleh manusia. Biasanya ditempatkan di bawah pohon besar, ditempati melepaskan nazar.
- 8). Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ikhtisar Aliran-aliran Kepercayaan di Sulawesi Selatan, tahun 1974.
- 9). *Pantasa*'; benda-benda yang dipuja, dianggap keramat, ditempatkan pada tempat-tempat tertentu dalam rumah, biasanya di bagian depan, loteng rumah. *Pantasa*' dapat disebut bermacam berhala.
- 10). *Sussung* dan *Baratu*; *Sussung* adalah pajak yang dipungut dari hasil penjualan (di pasar); *baratu* adalah pajak yang dipungut dari perjudian.

- 11). *Ata*; sahaya, abdi; pengabdian kepada raja, bawahan dalam tugas yang bersangkutan paut dengan keturunan.
- 12). *Ulama*; kata ini diterjemahkan dari kata Bugis—Makassar *panrita*, yaitu orang ahli agama, orang alim.
- 13). *Santari*, kata ini besar kemungkinan berasal dari kata *santri* yang dikenal umum di pulau Jawa, yaitu murid dari seorang ulama atau guru agama Islam yang melakukan pengajian atau pendidikan agama Islam di pesantren.
- 14). *Limpo*, adalah nama daerah bawahan kerajaan Wajo. Tiga buah limpo (daerah) yang bersama-sama membentuk kerajaan itu. Kepala dari Limpo itu disebut *ranreng* atau *paddanreng*, yang bersama-sama Arung Mato Wajo memerintah kerajaan. Ketiga ranreng itu ialah ranreng Battempola, Talatenreng dan renreng Tua.
- 15). *Puang ri Wajo*, adalah penguasa tertinggi (pemegang kedaulatan Tana Wajo yang terdiri atas 40 orang pejabat Tana Wajo, yaitu 1 orang Matoa, 3 orang ranreng, 3 Batelompo, 3 suro ribateng dan 30 Arung Mabbicara.
- 16). *Ana' Mattola*, putera-puteri mahkota, yaitu anak raja yang bakal menjadi pewaris takhta kerajaan. *Ana' Mattola Paddanreng*, ialah putera/puteri raja dari Limpo di Tana Wajo yang berhak mewarisi kekuasaan dalam Limpo.
- 17). *Solo'*, adalah semacam hadiah atau pemberian seorang kepada mempelai. Pemberian atau hadiah perkawinan itu dahulu kala seolah-olah menjadi kewajiban untuk balas-membalas pemberian hadiah.

- 18). *Ahlu-sunnah*, istilah ini walaupun berarti pengikut sunnah Rasulullah, namun di Sulawesi Selatan yang dimaksud golongan *ahlu-sunnah*, adalah mereka yang tidak tergolong Muhammadiyah. Orang Bugis—Makassar pada umumnya menganggap Muhammadiyah tidak termasuk dalam golongan Ahlu-sunnah.
- 19). *Anregurutta*, adalah panggilan orang Bugis kepada seseorang ulama atau orang pandai yang memberikan pengajaran, dan Anrong-gurutta dalam bahasa Makassar. Adapun guru agama Islam yang disebut *Anregurutta* itu niscaya dikwalifikasi sebagai *pan-rita*.
- 20). Perguruan Islam, sejak itu menyelenggarakan pendidikan umum, SD, SMP, SMA dengan tambahan pendidikan agama yang lebih efisien dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum biasa. Pusat pendidikan Perguruan Islam, terletak di Jalan Maipa Ujung Pandang. Tidak mempunyai cabang.
- 21). Ketika pada tahun 1950-an, Partai Islam NU, PSII, PERTI, melepaskan diri dari MASJUMI, maka tiap-tiap Partai itu mengurus lembaga-lembaga pendidikannya masing-masing. NU dan PSII masing-masing mendirikan universitas, cabang dari universitas yang ada di pusat Partai, seperti Universitas Nahdlatul Ulama, dan Universitas Cokroaminoto dari PSII. MASJUMI tidak menyelenggarakan pendidikan formil, akan tetapi Muhammadiyah yang dianggap penduduk utama MASJUMI, tetap berkecimpung dalam pembinaan pendidikan, juga menyelenggarakan pendidikan universitas Universitas Muhammadiyah.

- 22). Data perkembangan Sekolah-sekolah DDI diperoleh dari Dokumen Mukhtar ke XIII DDI di Pare-Pare. Jumlah sekolah tersebut tidak seluruhnya berkedudukan di Sulawesi Selatan, tetapi juga terdapat di Sumatera dan Kalimantan.
- 23). Data Sekolah Agama di Sulawesi Selatan diperoleh dari Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
- 24). *Ustaz*, adalah panggilan untuk guru agama Islam, untuk menterjemahkan istilah Bugis—Makassar "*an-regurutta*". Guru-guru agama di kalangan Muhammadiyah lebih umum dipergunakan panggilan *Ustaz*.
- 25). Data IAIN Alauddin, tahun 1973.

DAFTAR BACAAN

1. Andi Paramata, dkk., *Masuknya Agama Islam, Lontara Wajo Nauttama Selleng To WajoE*, belum dipublikasikan, 1975.
2. Brink, Ds. H.v.d., *Dr. Benjamin Frederik Matthes, zijn level en arbeid in Dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap*, Amsterdam, 1943.
3. HAMKA, *Syekh Yusuf*, Express Minggu, Mei — Juni, Makassar, 1961.
4. IAIN Al-Jamiah Alauddin, *Laporan Rektor dan Pidato Dies Natalis ke VIII (Sewindu) IAIN Al-Jamiah Alauddin Ujung Pandang*.
5. Lontar; Lontara' Patturioloanga ri Tu Gowaya, Koleksi Fakultas Sastra UNHAS, Ujung Pandang.
6. Lontara', Lontara' Bilang, Dagboek van Gowa en Tallo, Koleksi Fakultas Sastra UNHAS, Ujung Pandang.
7. Lontara', Lontara Syekh Yusuf, Koleksi Fakultas Sastra UNHAS, Ujung Pandang.
8. Matthes, Dr. B.F., *Makassarsche Chrestomatic*, Spin & Zoon, Amsterdam, 1860.

9. Matthes, Dr. B.F., *Boeginesche Chrestomatie*, Spin & Zoon, Amsterdam, 1872.
- 10) Matthes, Dr. B.F., *Kort Verslag*, Aangaanden Allemij in Erupe Bekende Makasarsche en Boeginesche Handschriften, C.A. Spin & Zoon, Amsterdam, 1875.
11. Mattulada, *Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Disertasi, Jakarta, 1975.
12. Makkarasu Amansyah, *Tentang Lontara' Syekh Yusuf*, Tajul Halwatiah, Perpustakaan UNHAS, Ujung Pandang, 1975.
13. Noorduyn, J., *De Achttiende Eeuwse Kroniek van Wajo*, Buginesche Historiografi, Proefschrift, Leiden, 1955.
14. Noorduyn, J., *Pengislaman Makassar*, Panggilan Kita di Indonesia Dewasa Ini, 1964.
15. Pimpinan Pusat Perguruan As'adiyah, *Pertumbuhan dan Perkembangan Perguruan As'adiyah*, Singkang-Wajo, 1975.
16. Panitia Mukhtar ke XII DDI, *Dokumentasi Mukhtar ke XII DDI se Indonesia*, Pare-Pare, 1975.
17. Sidjabat, *Latar Belakang Sosial dan Kulturil Gereja-gereja Kristen di Indonesia*, Panggilan Kita Di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta, 1964.
18. Tudjimah, *Asrar Al Insan Fi Ma'rifa Al-Ruh wal Rahman*, P.T. Penerbit Universitas, Jakarta, 1960.
19. UMI, *Laporan Rektor Universitas Muslimin Indonesia*, YASPUMI, Ujung Pandang, 1975.

LAMPIRAN I

ALIRAN—ALIRAN KEPERCAYAAN/TAREKAT
DI SULAWESI SELATAN

No.	Nama Aliran	Daerah Pengaruh		Jumlah pe- ngikut	Sumber ajaran
		Pusat	Cabang		
1.	Khalwatiah	Maros	Ujung Pan- dang, Bone, Sunggumina- sa, Palopo, Pinrang, Sengkang, Soppeng, Polewali, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, Pangkep, Enrekang, Barru dan Rappang	157.417	Islam
2.	Naksabandiah	Jakarta	Ujung Pan- dang, Sung-	9.748	Islam

			guminasa, Polewali, Pinrang, Majene, Takalar, Pengkep, Palopo dan Maros		
3.	Qadariah	Majene	Maros dan Polewali	4.500	Islam
4.	Muhammadiyah ^{x)}	Mekkah (Saudi- Arabia)	Bone, Sung- guminasa, Pangkep, Maros.	42.270	Islam
5.	WAKTU (Wajib Atas Kepercayaan Tuhan)	Ujung Pandang	Pare-Pare Pinrang, Sengkang, Soppeng, Sinjai, Rappang, Palopo dan Maros	9.380	Islam

KATA PENGANTAR

SISTEM PENDIDIKAN MADRASAH DAN PESANTREN DI SULAWESI SELATAN

Drs. Abu Hamid

Laporan Penelitian ini merupakan bagian tersendiri dari Proyek Penelitian Peranan Ulama dan Sistem Pendidikan Islam untuk daerah Sulawesi Selatan, sesuai dengan perjanjian kerja sama antara LEKNAS-LIPI dengan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, tanggal 20 Juni 1975, No. 366/A/Lek/Du/Sp/K/1975.

Tulisan ini sebagai laporan dari satu rangkaian penelitian pustaka dan lapangan yang diarahkan pada obyek, yaitu:

- Mencari pola komunikasi antara satu unit masyarakat tradisional dan atau administratif dengan unit lainnya serta sumber utama integrasi antara mereka. Di samping kemungkinan adanya ikatan adat dan kesatuan administratif dalam pengembangan sistem pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.
- Jangkauan dan corak pengaruh ulama sebagai pemimpin informal dalam masyarakat, melalui usaha pengumpulan biografi para ulama.
- Menyelusuri sistem pendidikan di Madrasah dan Pesantren dan isi pengajaran dan pendidikan yang disajikan.

Sesuai dengan term of Reference Pimpinan Proyek, bahwa tiap-tiap anggota team akan menulis laporan sendiri

SISTEM PENDIDIKAN MADRASAH
DAN PESANTREN
DI SULAWESI SELATAN

Drs. Abu Hamid

KATA PENGANTAR

Laporan Penelitian ini merupakan bagian tersendiri dari *Proyek Penelitian Peranan Ulama dan Sistem Pendidikan Islam* untuk daerah Sulawesi Selatan, sesuai dengan perjanjian kerja sama antara LEKNAS-LIPI dengan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, tanggal 20 Juni 1975, No. 366/A/Lek/Dir/Sp/K/1975.

Tulisan ini sebagai laporan dari satu rangkaian penelitian pustaka dan lapangan yang diarahkan pada obyek, yaitu:

- Mencari pola komunikasi antara satu unit masyarakat tradisional dan atau administratif dengan unit lainnya serta sumber utama integrasi antara mereka. Di samping kemungkinan adanya ikatan adat dan kesatuan administratif dalam pengembangan sistem pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.
- Jangkauan dan corak pengaruh ulama sebagai pemimpin informil dalam masyarakat, melalui usaha pengumpulan biografi para ulama.
- Menyelusuri sistem pendidikan di Madrasah dan Pesantren dan isi pengajaran dan pendidikan yang disajikannya.

Sesuai dengan term of Reference Pimpinan Proyek, bahwa tiap-tiap anggota team akan menulis laporan sendiri

menurut perhatian dan latar belakang keahlian masing-masing. Berkenaan dengan itu, maka laporan ini diberi judul: SISTEM PENDIDIKAN MADRASAH DAN PESANTREN DI SULAWESI SELATAN.

Penelitian lapangan dilakukan selama kurang lebih 6 bulan yang meliputi 23 Kabupaten dan Kota Madya di Sulawesi Selatan. Di samping hal-hal yang dapat dijangkau oleh laporan ini mengingat waktu dan pembiayaan yang terbatas, maka berbagai hal sesungguhnya belum termuat karena memerlukan penelitian lebih mendalam. Tulisan ini adalah hasil perbaikan dari buku laporan pertama yang telah ditinjau secara menyeluruh.

Mudah-mudahan laporan ini dapat memenuhi hajat secara minimal tujuan yang akan dicapai. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data, sehingga laporan ini dapat terwujud.

15 Februari 1978.

Abu Hamid.

PENDAHULUAN

A. *Pengertian Sistem Pendidikan*

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan sistem adalah meliputi alam kebendaan, alam biologi dan alam kemasyarakatan. Batas pengertian yang dimaksud "sistem" di sini ialah suatu kesatuan menyeluruh dan terorganisasi, terdiri dari dua atau lebih bagian komponen atau sub-sistem yang dibedakan oleh suatu batas yang dapat diidentifikasi dari supra sistem lingkungan yang memiliki spatial yang lebih luas.

Pengertian "pendidikan" ialah segala usaha untuk membina kepribadian dan kemampuan manusia, kemampuan jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan dalam rumah tangga, sekolah dan dalam masyarakat, agar dengan kemampuannya dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya serta kelangsungan hidup masyarakatnya.

Sistem Madrasah dan Pesantren termasuk salah satu organisasi sosial yang tunduk pada sistem sosial dan budaya lingkungannya, yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat serta mendapat pengakuan dan dukungan. Jadi fungsi-fungsi Madrasah dan Pesantren diselenggarakan menurut norma-norma dan aturan-aturan masyarakat. Orientasi sistem hubungan antar sub-sistem, dengan demikian pula tersangkut inter-dependensi dan inter-komunikasi di antara berbagai sistem sosial.

Sebagai suatu lembaga pendidikan, maka Pesantren merupakan sistem yang dinamis, senantiasa berubah dan menyesuaikan dirinya terhadap pengaruh-pengaruh intern dan ekstern dalam proses yang berkesambungan melalui seleksi sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan sistem yang dianutnya.

B. Pengertian Madrasah Dan Pesantren

Perkataan Madrasah berasal dari bahasa Arab *madrasatun* (mufrad) dari kata kerja dasar *darasa* (past tense). Dari kata dasar ini berubah menjadi *dirasatun* (to study), *mudarrisun* (teacher), akhirnya menjadi *madrasatun* (makan al-ta'lim) artinya sekolah, yaitu mengajarkan ilmu. Dalam bahasa Indonesia madrasatun disebut saja madrasah. Yang mengajar kepada sekolah agama Islam dengan sistem klasikal dan biasanya mengajarkan pula ilmu pengetahuan umum di samping pengetahuan agama Islam, meskipun terdapat madrasah yang seluruhnya mengajarkan pengetahuan agama Islam (disebut madrasah Diniyah).

"Kelas" menurut batas pengertian di sini adalah sekelompok pelajar yang mengikuti pendidikan dalam suatu ruang dan waktu yang sama dalam mata-pelajaran yang sama pula serta umur mereka kurang lebih sebaya. Satu tahun adalah jangka waktu yang harus dilalui sebagai syarat menempuh ujian dan untuk pindah ke kelas yang lebih tinggi. Selanjutnya jenjang-jenjang kelas harus dilalui untuk mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar.

Perkataan "Pesantren" berasal dari bahasa Sanskerta yang memperoleh wujud dan pengertian tersendiri dalam bahasa Indonesia. Asal kata *sant* = orang baik (lk) disambung *tra* = suka menolong. *Santra* berarti orang baik yang suka menolong. Pesantren berarti tempat untuk membina manusia menjadi orang baik. Pesantren sebagai lembaga

pendidikan berkembang semenjak masa-masa permulaan Islam di negeri kita ini. Lembaga seperti ini sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam dan pada masanya merupakan lembaga pendidikan bagi agama Hindu dan juga agama Budha. Ide kelembagaan agama Hindu/Budha seperti ini ditransformir oleh Islam, kemudian diberi isi menurut tujuan pengembangan Islam.

Pesantren adalah sekolah berasrama untuk mempelajari agama Islam. Kadang-kadang lembaga demikian itu mencakup ruang gerak yang luas sekali dan mata-pelajaran yang diberikan dapat meliputi Tafsir, Hadist, Ilmu Kalam, Fiqh, Tauhid dan Tasauf. Beberapa orang siswa ada yang pergi dari pesantren satu ke pesantren lain untuk mengikuti pelajaran guru yang kenamaan dan setengahnya ada yang melanjutkan pelajarannya ke Mekkah atau ke Mesir¹.

Pusat-pusat pendidikan Islam di Sulawesi Selatan dewasa ini mengembangkan sistem pendidikan campuran, yakni sistem pendidikan Madrasah dan Pesantren, meskipun nama pusat pendidikan tersebut menyebut dirinya "Perguruan Islam" atau "Pesantren Modern". Apapun namanya lembaga pendidikan itu di dalamnya terdapat Madrasah dan Pesantren. Melihat keadaan kurikulum, tampaknya sistem pendidikan madrasah pada umumnya sama, yaitu sistem klasikal yang mengajarkan pengetahuan agama di samping pengetahuan umum dengan perbandingan tertentu. Sedang sistem pendidikan Pesantren diselenggarakan di rumah-rumah Kiyai atau di mesjid dengan kitab-kitab tertentu yang biasanya berbeda dengan buku-buku yang berdiri sendiri tanpa suatu pengurus pusat, mengatur kurikulumnya sendiri dan pembiayaannya, akan tetapi cenderung sama sistemnya dengan sistem Madrasah pada umumnya.

Madrasah yang menjadi obyek penulisan adalah Madra-

sah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang terdapat pada sejarah lembaga pendidikan di Sulawesi Selatan. Dari sekian banyak Madrasah itu akan ditarik generalisasi sistem yang digunakannya, pola pertumbuhannya dan organisasinya. Sedangkan sistem pesantren akan terlihat penyelenggaraannya pada pusat-pusat pendidikan yang masih tetap berkembang sampai kini.

C. Selayang Pandang Daerah Sulawesi Selatan

Berhubung karena ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini adalah sistem pendidikan di Sulawesi Selatan dan bukan mengkhusus pada salah satu lembaga pendidikan di suatu kabupaten, maka di bawah ini secara selayang pandang akan dilukiskan keadaan sumber daya alam dan daya manusia Sulawesi Selatan.

Sulawesi Selatan adalah salah satu dari empat propinsi di Sulawesi. Ibu kotanya Ujung Pandang yang sebelumnya bernama Makassar. Terbentuknya Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Perpu. No. 2 tahun 1964 yang diundangkan dalam Undang-undang No. 13/1964. Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan berbatasan sebelah Selatan dengan Laut Flores, di sebelah Barat dengan Selat Makassar, di sebelah Timur dengan Teluk Bone dan di sebelah Utara dengan Propinsi Sulawesi Tengah. Propinsi Sulawesi Selatan terletak antara 0°55 dan 70° Lintang Selatan serta 118°30 dan 121°40 Bujur Timur.

Secara administratif wilayah Sulawesi Selatan, dibagi dalam 23 Kabupaten/Kotamadya, yang membawahi 169 buah Kecamatan yang terdiri atas 1.163 buah Desa. Menurut Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Sulawesi Selatan, tahun 1975 yakni terdiri atas Desa Swadaya 527 buah, Desa Swakarya 523 buah dan Desa Swasembada 113 buah.

Luas seluruh wilayah Sulawesi Selatan $\pm$ 77.636.83 Km² atau 42% dari luas seluruh Pulau Sulawesi. Luas Pulau Sulawesi sendiri 9.93% dari luas seluruh Indonesia. Sebanyak 20 buah Kabupaten dan Kotamadya terletak di pinggir pantai dan 3 buah terletak di daerah pegunungan, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Kabupaten Soppeng. Dataran luas di pesisir pantai terdiri dari dataran rendah Walennae (sekitar danau Tempe), Masamba (Kabupaten Luwu) dan dataran rendah sungai Lariang (Kabupaten Mamuju). Pada umumnya dataran rendah ini merupakan dataran alluvial. Pegunungan Latimojong yang panjangnya lebih kurang 30 Km membentang dari Barat Laut ke Tenggara, puncaknya merupakan yang tertinggi di Sulawesi, yaitu lebih kurang 3.412 meter di atas permukaan laut. Pegunungan lainnya adalah pegunungan Querles (3.107 meter), pegunungan Verbeek, pegunungan Maros dan pegunungan Bone. Pada umumnya pegunungan bagian Utara lebih tinggi daripada bagian Selatan jazirah Sulawesi Selatan, kecuali puncak gunung Lampobattang.

Sebagai daerah tropis, temperatur udaranya rata-rata tinggi dalam bulan Agustus, September dan Oktober, terutama di daerah pantai. Kotamadya Ujung Pandang mencatat temperatur maksimum 31°C setahun. Musim tercatat hanya musim penghujan dan musim kemarau untuk wilayah Barat dan Timur. Musim penghujan bagian wilayah Barat dalam bulan-bulan Oktober sampai dengan April dan sebaliknya bagian wilayah Timur pada waktu itu mengalami musim Timur. Apabila di bagian wilayah Timur musim hujan, maka di bagian sebelah Barat berada dalam musim kemarau.

Dua Kabupaten penghasil beras tertinggi jumlahnya ialah Kabupaten Pinrang dan Sidenreng-Rappang, berhubungan karena kedua Kabupaten tersebut tanah persawahannya diairi dengan pengairan teknik secara teratur. Kabupaten

Wajo dan Bone termasuk dua Kabupaten yang terluas tanah persawahannya yang memperoleh air dari tadah hujan. Kecuali Kabupaten Luwu termasuk Kabupaten yang terluas juga, akan tetapi terdiri dari daerah hutan yang masih lebat.

Menurut data dari Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk pada tahun 1976 adalah sebanyak 5.565.759 orang dengan perbandingan luas daerah 77.637,67 Km², sehingga kepadatan penduduk 72 orang per Km². Kenaikan penduduk dihitung antara tahun 1971 dengan tahun 1976, maka selama 6 tahun terakhir itu hanya naik 7,5%. Penduduk Sulawesi Selatan terdiri dari empat suku bangsa, yaitu suku bangsa Bugis, Makassar, Toraja dan suku bangsa Mandar.

Orang Toraja mendiami daerah pegunungan bagian Utara Sulawesi Selatan, sedang orang Bugis, Makassar dan Mandar mendiami hampir seluruh bagian pesisir pantai. Orang Bugis, Makassar dan Mandar umumnya menganut agama Islam dan orang Toraja mayoritas menganut agama Kristen Katholik dan sebagiannya lagi masih menganut kepercayaan lama *Aluk Todolo*. Pusat-pusat pemukiman orang Makassar adalah Kabupaten Gowa, Takalar dan Jene-ponto dan orang Mandar mendiami Kabupaten Majene, Mamuju dan sebagian Polewali-Mamasa, sedang orang Toraja mendiami Kabupaten Tana Toraja dan sebagian di Kabupaten Luwu. Kabupaten lainnya didiami oleh orang Bugis yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding dengan tiga suku bangsa lainnya.

Empat suku bangsa di Sulawesi Selatan ini termasuk memiliki watak perantau. Apakah perantauan mereka ke propinsi lain di pulau Sulawesi atau ke propinsi lain di Indonesia ataukah ke kabupaten lain di Sulawesi Selatan sendiri, melalui transmigrasi spontan, suka rela dan atas biayanya sendiri.

Orang Bugis dan Makassar mempunyai sejarah migrasi yang sudah amat tua dengan menggunakan perahu yang disebutnya *pinisik*. Suku bangsa ini dikenal sebagai pelaut yang tangkas dan berani mengarungi lautan sampai ke Asia Tenggara dan Australia, berlayar sebagai pedagang dan pengangkut hasil-hasil bumi. Sejak jauh sebelum masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan pada awal abad ke XVII, mereka sudah mengenal pantai Malaysia, Aceh, Borneo, Jambi, Banten, Nusa Tenggara, Maluku dan Australia. Mereka sebagai pelaut dan pedagang, dituntun oleh suatu hukum pelayaran yang dibuatnya sendiri dalam mengatur perjanjian kontrak sewa-beli, mengatur hubungan *Ponggawa* dan *Sawi* (anak perahu) waktu berada di lautan atau waktu berada di daratan. Hukum itu disebut *Adek alloping-loping* (adat istiadat berlayar).

Lapangan penghidupan utama bagi penduduk Sulawesi Selatan adalah pertanian dan nelayan, di samping sebagian bekerja di bidang perdagangan, perusahaan, pengangkutan, pertukangan, pegawai negeri/ABRI, buruh kasar dan lain-lain. Makanan pokok adalah beras di samping jagung, kemudian makanan sampingan terdiri dari umbi-umbian dan kacang-kacangan. Mereka pemakan ikan dan sayur-mayur yang senantiasa hadir dalam hidangan. Hewan dan unggas dipelihara, tetapi tidak untuk keperluan sehari-hari, dijual sebagai ternak potong dan juga dipotong untuk keperluan upacara keagamaan.

D. Masuknya Islam Di Sulawesi Selatan

Menurut pendapat yang sudah lama diakui kebenarannya, agama Islam tersebar melalui jalan-jalan perdagangan, baik pedagang luar negeri maupun pedagang antar pulau di Indonesia. Lebih-lebih lagi dalam abad ke XVI ketika kota Malaka jatuh ke tangan Portugis (1511). Kerajaan-kerajaan waktu itu di Sulawesi Selatan, seperti halnya Gowa dan

Tallo telah mempunyai hubungan dagang dengan berbagai daerah di Nusantara sekitar tahun kejatuhan Malaka tersebut, bahkan berbagai pendapat bahwa suku bangsa Bugis-Makassar telah melakukan perdagangan ke berbagai tempat di Asia Tenggara. Perahu-perahu Bugis-Makassar telah silih berganti mengunjungi Kerajaan-kerajaan Melayu di bagian Barat dan Kerajaan-kerajaan Maluku di bagian Timur.

Seorang pengembara bangsa Portugis yang bernama Tome Pires dalam tahun 1512-1515 pernah mengunjungi Malaka dan pulau Jawa. Dalam kunjungannya itu ia memberitakan tentang keramaian pelabuhan Makassar². Lontara *Patturioloanga ritugowaya* memberitakan, bahwa dalam masa pemerintahan raja Tunipalangga, raja Gowa yang ke X (1546-1565), telah terjadi berbagai hal yang erat hubungannya dengan keadaan perkembangan masyarakat Sulawesi Selatan menjelang masuknya agama Islam. Disebutkan bahwa setelah raja Gowa Karaeng Tumapa'risi Kallonna mangkat, maka Tunipalangga-lah yang berhak mewarisi kerajaan. Beliau diangkat menjadi raja dalam usia 36 tahun. Baginda tidak terpuji dalam kejujuran dan dalam ilmu pengetahuan, meskipun beliau terkenal dalam keberanian dan kecerdasannya menjalankan pemerintahan.

Di bawah pemerintahan Karaeng Tunipalangga, menetap seorang Jawa yang bernama Nakhoda Bonang yang mendapat beberapa hak istimewa dari raja. Kemudian hak-hak istimewa itu diperlakukan pula kepada para pendatang asing (pedagang-pedagang), seperti orang-orang dari Pahang, Patani, Campa, Minangkabau dan Johor. Hal ini menunjukkan bahwa dalam zaman itu ada hubungan dengan berbagai daerah di Sumatera dan Malaka, bahkan sampai ke daratan Asia Tenggara.

Karaeng Tunijallo sebagai raja Gowa yang ke XII (lahir tahun 1545) memerintah pada tahun 1565-1590 dan telah

Tabel 1

Jumlah Penduduk dan Perkembangan tiap Kabupaten/Kotamadya di Propinsi Sulawesi Selatan. (keadaan tahun 1976)

No.	Kabupaten dan Kotamadya	Jumlah Penduduk		Kenaikan selama 6 tahun; % 1971/1976	Luas Daerah	Kepa- datan 1976
		1971	1976			
1.	Bantaeng	89.607	103.623	15.6	470.00	220
2.	Barru	132.718	138.173	4.1	924.00	150
3.	Bone	596.943	587.974	1.5	4.555.00	129
4.	Bulukumba	260.841	284.440	9.0	1.280.00	222
5.	Enrekang	121.140	127.992	5.6	1.941.00	66
6.	Gowa	385.616	327.517	—	1.695.22	193
7.	Jeneponto	200.605	218.645	9.0	790.00	277
8.	Luwu	326.062	420.608	29.0	24.349.00	17
9.	Majene	78.925	92.256	16.9	1.932.00	48
10.	Mamuju	69.668	82.891	18.9	12.407.00	7
11.	Maros	197.424	186.462	—	1.531.90	122
12.	Pangkep	205.169	204.543	0.3	797.65	256
13.	Pinrang	258.214	260.479	44.0	2.508.00	106
14.	Polmas	313.559	338.831	8.1	9.985.00	34
15.	Selayar	92.342	94.591	2.4	224.00	422
16.	Sidrap	181.588	191.388	5.4	2.339.74	82
17.	Sinjai	149.394	159.294	6.6	1.025.39	148
18.	Soppeng	230.625	235.226	2.0	1.500.00	157
19.	Takalar	152.553	160.822	5.4	450.00	357
20.	Tana Toraja	308.054	311.559	1.1	4.233.60	74
21.	Wajo	322.225	369.342	14.6	2.422.02	152
22.	Pare-Pare (Kodya)	72.471	79.448	9.6	110.77	717
23.	Ujung Pandang (Kodya)	434.168	589.343	—	115.87	5.036
Jumlah		5.179.911	5.565.759	7.5	77.637.67	72

- Sumber : a. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
 b. Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Selatan.
 c. Sulawesi Regional Development Study, Volume 3.

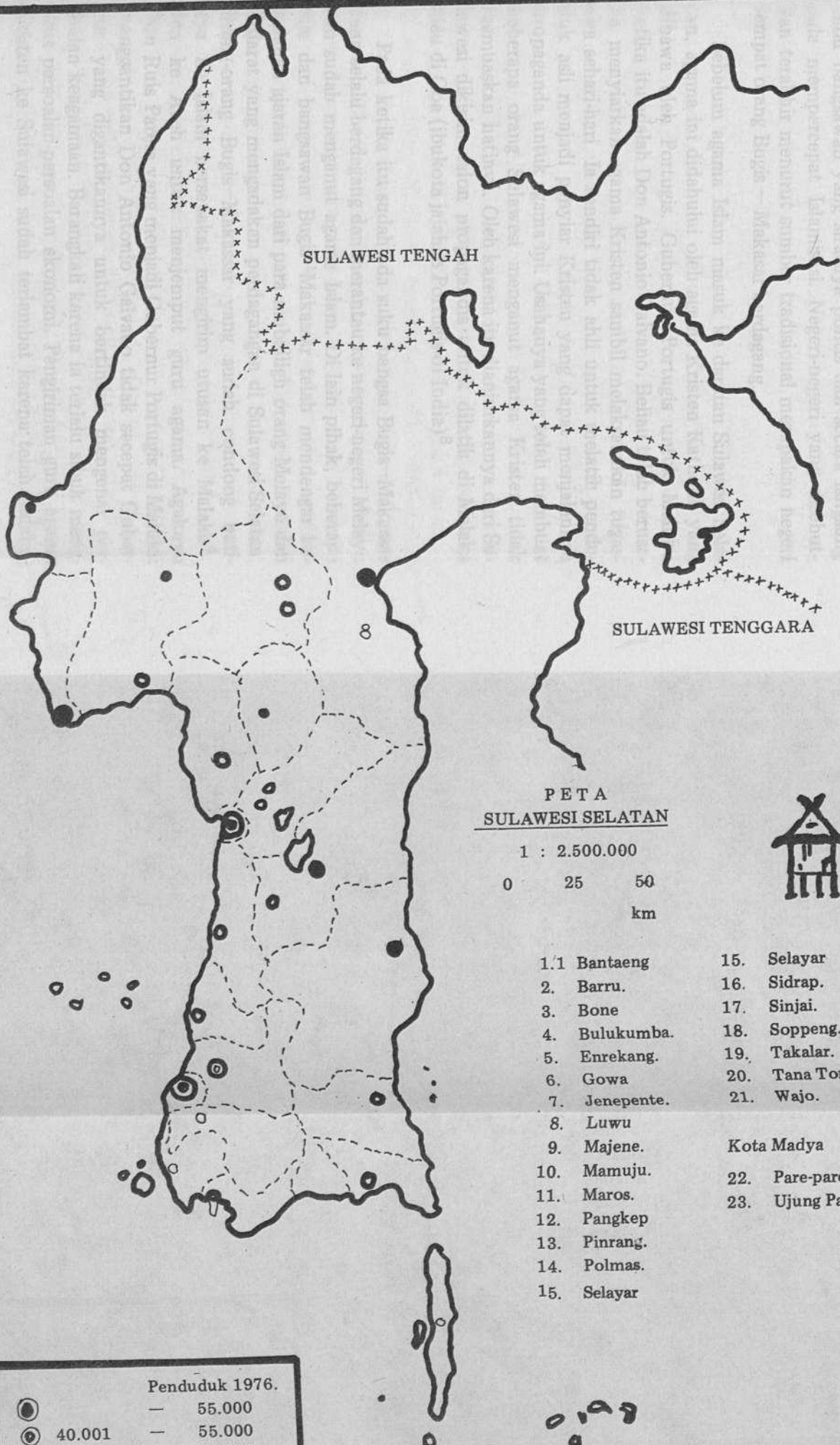
Catatan : Kenaikan penduduk dalam 6 tahun di daerah Ujung Pandang, Gowa dan Maros tidak dapat diperoleh akibat perluasan Kota Ujung Pandang dengan mengambil sebagian daerah Gowa dan Maros.

banyak mengadakan hubungan ke luar negeri. Dalam lontara disebutkan bahwa beliau bersahabat dengan raja-raja di Jawa. Pengertian "Jawa" di sini ialah daerah-daerah seberang termasuk Sumatera, Malaka, Maluku dan sebagainya.

Masa pemerintahan Tunijallo erat hubungannya dengan permulaan masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Disebutkan pula bahwa raja ini mendirikan mesjid di Mangallekana untuk para pedagang asing agar dapat tenteram menetap di Gowa. Hubungan dengan Ternate dipererat pula, dikenal dengan kunjungan Sultan Ternate Baabullah ke Gowa yang diterima dengan penuh keramah-tamahan oleh raja Gowa. Kesultanan Ternate lebih dahulu menerima Islam sebagai agama Kerajaan, dan waktu sebagian besar penduduknya sudah memeluk agama Islam.

Suku bangsa Bugis—Makassar yang terkenal berani berlayar serta dapat bergaul dengan amat akrabnya bersama penduduk yang dikunjunginya, sehingga dengan pergaulan yang akrab mereka saling berintegrasi dalam berbagai lapangan penghidupan. Pergaulannya di negeri Malaka dan Aceh dengan penduduk yang sudah memeluk Islam jauh sebelum negerinya sendiri menerima Islam, menunjukkan bahwa suku bangsa Bugis—Makassar sudah tertarik hatinya kepada Islam sejak masa pemerintahan Tunijallo (1546 — 1565)

Selain sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara abad ke XVI Malaka sekaligus juga menjadi pusat penyebaran Islam untuk Asia Tenggara, kedua faktor tersebut telah memperkuat ide ekspansi Kerajaan Malaka. Sebagai contoh perluasan daerah pada masa Sultan Mansyur Shah ke daerah Kedah, Trenggano, Pahang, Jambi, Bengkalis, pulau Karimun dan Bintang. Ekspansi Malaka ke daerah sekitarnya bukan bersifat agama, tetapi berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan perdagangan timah dan lada. Secara



SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGGARA

PETA
SULAWESI SELATAN

1 : 2.500.000

0 25 50
km



- | | |
|---------------|-------------------|
| 1.1 Bantaeng | 15. Selayar |
| 2. Barru. | 16. Sidrap. |
| 3. Bone | 17. Sinjai. |
| 4. Bulukumba. | 18. Soppeng. |
| 5. Enrekang. | 19. Takalar. |
| 6. Gowa | 20. Tana Toraja. |
| 7. Jenepente. | 21. Wajo. |
| 8. Luwu | |
| 9. Majene. | Kota Madya |
| 10. Mamuju. | 22. Pare-pare |
| 11. Maros. | 23. Ujung Pandang |
| 12. Pangkep | |
| 13. Pinrang. | |
| 14. Polmas. | |
| 15. Selayar | |

Penduduk 1976.

- | | |
|---|----------|
| ● | — 55.000 |
| ○ | — 55.000 |
| ○ | — 40.000 |
| ○ | — 25.000 |
| ○ | — 10.000 |

langsung ekspansi ini telah memperluas penyebaran Islam. Pengaruh Malaka sampai ke daerah Siam, seperti Patani, Sengora dan Ligor. Ekspansi ini sering diikuti perkawinan antar bangsawan yang sifatnya politis dan secara langsung pula mempercepat Islamisasi. Negeri-negeri yang disebutkan terakhir menurut sumber tradisional merupakan negeri tempat orang Bugis -- Makassar berdagang.

Sebelum agama Islam masuk ke daratan Sulawesi Selatan, agama ini didahului oleh agama Kristen Katholik yang dibawa oleh Portugis. Gubernur Portugis untuk Maluku ketika itu adalah Don Antonio Galvano. Beliau telah berusaha menyiarkan agama Kristen sambil melaksanakan tugasnya sehari-hari. Ia sendiri tidak ahli untuk melatih penduduk asli menjadi penyiar Kristen yang dapat menjalankan propaganda untuk agama ini. Usahnya yang telah membuat beberapa orang Sulawesi menganut agama Kristen tidak memuaskan hatinya. Oleh karena itu dianjurkannya dari Sulawesi dikirim calon propagandis untuk dilatih di Malaka atau di Goa (ibukota jajahan Portugis di India)³.

Pada ketika itu sudah ada suku bangsa Bugis-Makassar yang selalu berdagang dan merantau ke negeri-negeri Melayu dan sudah menganut agama Islam. Di lain pihak, beberapa raja dan bangsawan Bugis-Makassar telah mendengar keindahan ajaran Islam dari para muballigh orang Melayu dan Gujarat yang mengadakan perdagangan di Sulawesi Selatan. Orang-orang Bugis-Makassar yang sudah condong hatinya ke Islam bersepakat mengirim utusan ke Malaka⁴ dan ke Aceh untuk menjemput guru agama. Agaknya Don Ruis Parera yang menjadi Gubernur Portugis di Maluku menggantikan Don Antonio Galvano tidak secepat Gubernur yang digantikannya untuk bertindak mengenai persoalan keagamaan. Barangkali karena ia terlalu sibuk mengurus persoalan-persoalan ekonomi. Pengiriman guru agama Kristen ke Sulawesi sudah terlambat karena telah didahu-

lui oleh guru agama Islam. Seri Ratu Aceh, seorang muslimat yang memperhatikan kepentingan Islam, dengan segera mengirimkan muballighnya ke Sulawesi.

Kerajaan yang mula-mula menerima Islam dengan resmi di Sulawesi Selatan ialah Tallo kemudian Gowa yang pada waktu itu sudah menjadi kerajaan yang kuat di seluruh daratan. Gowa dan Tallo merupakan kerajaan kembar dan amat ditaati oleh rakyat Makassar. Tersebut dalam Lontara *se'reji ata narua karaeng* (hanya satu rakyat dan dua raja). Raja di sini berarti pertuanan yang merupakan tradisi masyarakat bahwa raja Tallo senantiasa menjabat Mangkubumi pada kerajaan Gowa. Menurut *lontara bilang* Kerajaan Gowa, tanggal resmi penerimaan Islam ialah malam Jum'at 22 September 1605, bertepatan dengan 9 Jumadil Awal 1014 H. Raja yang mula-mula masuk Islam pada tanggal itu ialah raja Tallo I Mallingkaang Daeng Manyonri. Sebagai raja yang pertama masuk Islam, ia diberi gelar Arab Sultan Abdullah Awalul Islam. Raja Tallo ini menjabat Mangkubumi kerajaan Gowa dan akhirnya dapat mempengaruhi raja Gowa I Mangngarangngi Daeng Manra'bia masuk Islam, kemudian diberi gelar Sultan Alauddin. Raja Gowa ini adalah nenek-moyang raja-raja Makassar dan Bugis menurut silsilahnya. Beliau adalah kakek Sultan Hasanuddin yang terkenal dan mertua dari Syekh Yusuf Tajul Khalwatiy, seorang ulama besar pada saat-saat pengembangan Islam di Sulawesi Selatan abad ke XVII⁵. Menjelang dua tahun kemudian seluruh rakyat Gowa dan Tallo sebagai di-Islamkan, ditandai dengan diadakannya sembahyang Jum'at pertama pada tanggal 9 Nopember 1607, bertepatan dengan 19 Rajab 1016 H.

Setelah raja Gowa dan Tallo memeluk Islam dan agama baru ini dimaklumkan sebagai agama resmi kerajaan, maka kedua kerajaan Makassar itu menjadi pusat penyiaran Islam ke seluruh daerah-daerah di Sulawesi Selatan. Menurut

syariat Islam, setiap orang Islam adalah penda'wah. Kewajiban ini dipenuhi oleh raja Gowa dengan mengirim seruan kepada raja-raja di tana Bugis, supaya masuk Islam sebagai jalan yang baik. Seruan yang dilakukan oleh Gowa berdasarkan perjanjian yang sudah lama disepakati oleh mereka, bahwa barangsiapa yang mendapatkan jalan yang benar, ia harus menyampaikan kepada kerajaan tetangganya. Penerimaan Islam oleh Gowa dianggap sesuatu yang benar, oleh karena ajaran Islam bertujuan mengangkat derajat suatu suku bangsa dari lembah kepercayaan berhala kepada derajat yang lebih tinggi, mempercayai Tuhan Allah Yang Maha Esa. Agama Islam yang diserukan oleh raja Gowa adalah jalan yang lebih baik sebagaimana dimaksud dalam perjanjian lama itu, oleh karena itu diserukan kepada raja-raja lain. Seruan Gowa diterima dengan baik oleh beberapa kerajaan-kerajaan kecil, sehingga peng-Islam-an berjalan lancar dan secara damai.⁶

Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan senantiasa dihubungkan dengan nama tiga orang Datok, yaitu Datok ri Bandang, Datok Pattimang dan Datok ri Tiro. Mereka ini bukan orang Makassar, tetapi orang Minangkabau yang datang ke Sulawesi Selatan setelah memperdalam pengetahuan keagamaannya di Aceh. Rupanya mereka diutus oleh Sri Ratu Aceh waktu itu setelah datang permohonan dari penduduk Sulawesi Selatan agar mengirim guru agama untuk menyiarkan Islam di sana.

Menurut catatan lontara Makassar, ada seorang ulama yang telah membawa Islam ke Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Makmur Khatib Tunggal Datok ri Bandang. Pemberitaan lontara ini kedengarannya bersifat dongeng, namun tak dapat disangkal bahwa ulama ini telah memainkan peranan dalam peng-Islam-an.

Apabila lontara Luwu dan Wajo dapat dipercaya, sebelum ketiga ulama tersebut memulai tugasnya menyiar-

kan agama Islam di Gowa, mereka lebih dahulu pergi ke Luwu melalui Teluk Bone, oleh karena adanya anggapan di dalam masyarakat Bugis—Makassar, yaitu menganggap raja Luwu dan kerajaannya sebagai yang tertua dan padanya masih melekat kemuliaan dan kewibawaan di kalangan raja-raja⁷. Ketiga ulama yang akan memulai menyebarkan agama baru bagi penduduk memandang perlu menggunakan pengaruh raja Luwu. Raja Luwu La Pattiwaro' Daeng Parabbung menerima baik ketiga ulama dan beliau sendiri langsung menganut agama Islam pada tanggal 15 Ramadhan 1013 H. (1603 M). Baginda diberi gelar Arab, yaitu Sultan Muhammad Mudharuddin dan sesudah beliau mangkat diberi gelar Matinroe ri Ware. Baginda menerima Islam sebagai agama bersama-sama dengan anggota keluarga istana dan para menteri. Raja Luwu bersedia membantu dalam penyebaran Islam ke daerah-daerah Bugis lainnya, akan tetapi beliau menganjurkan kepada ulama agar memulai usahanya melalui Gowa, karena kekuatan ada padanya dan supremasi politik di Sulawesi Selatan berada dalam tangannya.

Maka bersepakatliah ketiga ulama tersebut untuk mengunjungi Gowa dan berhasil meng-Islam-kan kerajaan kembar orang Makassar : Gowa dan Tallo. Pengajaran Islam dilanjutkan oleh ketiga ulama ini dengan memilih lokasi tertentu yang dianggapnya kuat berpegang pada tradisi. Datok ri Bandang mengunjungi daerah-daerah Makassar dan Bugis yang kuat melakukan perjudian, minum *ballo'* (tuak), banyak melakukan perzinahan dan banyak makan riba. Bagi penduduk demikian, Datok ri Bandang melakukan pendekatan syariat, yaitu da'wah lebih banyak diberikan kepada mereka tentang hukum syariat Islam yang mengharamkan minum-minuman keras, haramnya perjudian dan haramnya makan babi. Pendekatan syariat pula diberikan kepada mereka tentang hari pembalasan, tentang neraka dan syurga, oleh karena itu Datok ri Bandang diju-

luki ahli Hukum Syariat (Fiqh) oleh beberapa penulis.

Rekannya yang lain, Sulaiman Khatib Sulung Datok Patimang (dimakamkan di Desa Pattimang, Luwu), mengunjungi daerah Bugis dan Makassar dan kemudian menetap di Luwu. Beliau mengadakan pendekatan kepada penduduk yang kuat berpegang pada kepercayaan lama yang menganggap Tuhan itu adalah *Dewata Seuwae*. Mula-mula beliau mengajarkan Tauhid, yaitu pengetahuan tentang sifat-sifat Allah yang terdiri dari 20 sifat wajibnya, 20 sifat mustahilnya dan 1 sifat harusnya. Tujuan utama ialah untuk mengganti kepercayaan *Dewasa Seuwae* menjadi kepercayaan kepada Allah SWT, yang tercermin dalam dua kalimat syahadat sebagai ucapan pertama bagi seorang yang akan masuk Islam.

Ulama lain, Abdul Jawad Khatib Bungsu yang kemudian digelar Datok ri Tiro (dimakamkan di Tiro, Bulukumba), beliau mengunjungi daerah Bugis—Makassar kemudian menetap di Tiro. Beliau mendatangi penduduk yang kuat berpegang kepada ilmu kebatinan, ilmu sihir dengan segala manteranya. Pengajaran beliau melalui pendekatan Tasauif, yaitu pengajaran yang pertama-tama harus didalami ialah pengetahuan Syariat, lalu Tharikat, Hakekat dan Ma'rifah. Pendekatan Tasauif menempuh cara-caranya sendiri menurut mazhab Ahlus Sunnah. Kesenangan orang-orang Tiro menggunakan ilmu hitam yang disebutnya *doti*, adalah suatu ilmu kebatinan yang menggunakan kekuatan sakti untuk membinasakan musuh-musuhnya melalui usaha batin dan metode semadi. Usaha batin ini digantikan oleh Datok Tiro dengan usaha batin mendekatkan diri kepada Allah pencipta alam gaib dan alam nyata.

Kerajaan-kerajaan Bugis yang kuat seperti Bone, Wajo, Soppeng dan Sidenreng menolak keras ajakan Gowa. Terutama Bone menolak keras ajakan tersebut karena suatu

anggapan bahwa hal itu adalah semata-mata siasat raja Gowa untuk menguasai daerah-daerah Bugis, mengingat perang yang telah terjadi sebelumnya, silih berganti perang dan damai (ingat Cappae di Caleppa dan perang antara Bone dan Gowa dalam tahun 1585)⁸. Seruan Gowa yang ditolak oleh raja-raja Bugis disambut oleh Gowa dengan mengangkat senjata terhadap mereka. Empat kali Gowa mengirim lasyarnya ke tanah Bugis. Pertama kalinya dalam tahun 1608, lasykar Gowa ditundukkan oleh lasykar Bugis yang bergabung, yaitu gabungan lasykar Tellumpocoe (Bone, Wajo dan Soppeng). Akan tetapi dengan pengiriman lasykar dalam tahun-tahun berikutnya, semua kerajaan Bugis satu demi satu ditundukkan, lalu menerima Islam, seperti Sidenreng dan Soppeng dalam tahun 1609, Wajo dalam tahun 1610 dan Bone dalam tahun 1611. Perang peng-Islam-an oleh Gowa yang berlangsung selama empat tahun ini dikenal di daerah Bugis dengan nama *musu' asel-lengeng* (peperangan Islam). Setelah raja-raja Bugis menerima Islam, maka Gowa merubah siasatnya terhadap mereka dan kembali menjalin hubungan persahabatan yang dinafasi oleh Islam. Kerajaan Bone paling terakhir menerima Islam, akan tetapi sesudah Islam merebut hatinya, maka raja Bone ke XI La Tenriruwa Matinroë ri Bantaeng yang mula-mula menganut Islam dan digelar Sultan Adam itulah yang paling gigih menyiarkan Islam pada kerajaan-kerajaan kecil yang terletak sekitarnya. Hal ini berarti seluruh kerajaan besar dan kecil sudah selesai di Islam-kan dan berakhirlah babak peng-Islam-an di Sulawesi Selatan.

Pengajaran ketiga ulama tidak menitik beratkan pada perombakkan pranata-pranata adat, akan tetapi diusahakan mengisi batin dan merubah perbuatan-perbuatan serta tingkah-laku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apabila terdapat lembaga sosial yang bertentangan dengan Islam tidak sekaligus dirombak, akan tetapi dicari gantinya dan secara berangsur-angsur diselipkan masuk dalam lembaga

atau pranata masyarakat. Seperti halnya *sikkirik Juma'* (zikir Jum'at) yang dilakukan setiap malam Jum'at di istana, dimaksudkan untuk mengganti nyanyian *Bissu* yang sebelum Islam selalu diadakan sekali sepekan di istana sebagai pemujaan kepada alat-alat kerajaan. Sama halnya Barzanji (sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Barzanji dengan bahasa Arab yang indah dan berisi sejarah kehidupan Nabi Muhammad), dimaksudkan untuk mengganti pranata masyarakat yang sebelum Islam dalam upacara-upacara keagamaan anggota masyarakat berkumpul mendengarkan bacaan *Surek Sellēyang*, yaitu suatu bacaan tentang pemujaan kepada Patotoē (yang memberi nasib baik dan buruk), digantikan dengan membaca Barzanji pada setiap upacara keagamaan dan upacara yang berhubungan dengan *life cycle*. Perhatian utama para muballigh bukanlah perubahan total sekaligus, akan tetapi perubahan berencana dan secara berangsur-angsur.

Berbagai hal dalam pranata sosial terlihat kemudian percampuran antara adat dan syariat tak dapat dibedakan lagi oleh orang awam, tetapi di berbagai hal pula bahwa Islam telah menawan orang-orang Bugis-Makassar sehingga mereka menjadi orang Islam yang paling taat. Keke-
rasan hati orang Bugis-Makassar yang tadinya menon-
jolkan tabiat keras kepala, kini telah dituntun oleh etik
dan moral Islam.

ISLAM DAN MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR

A. Penggolongan Masyarakat

Pembagian golongan di bawah ini tidak secara mutlak didasarkan pada tinggi rendahnya *abbatireng* (keturunan), akan tetapi berdasarkan pada posisi sosial dan peranannya dalam struktur sosial orang Bugis-Makassar yang dinilai menurut pandangan budaya sebelum dihapuskannya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Golongan *Anakarung*; adalah golongan bangsawan yang menduduki jabatan pemerintahan negeri. Golongan ini menjadi bangsawan karena mempunyai silsilah keturunan dari seorang raja yang memerintah atau yang pernah memerintah dan jika diusut lebih jauh ada hubungannya dengan *To Manurung* (raja pertama yang dianggap turun dari kayangan). Untuk diangkat menduduki jabatan negeri dipilih pertamanya dari keturunan bangsawan atau yang berdarah campuran bangsawan. Menjadi bangsawan berarti tidak mempunyai campuran darah dari lapisan hamba sahaya. Meskipun statusnya sebagai bangsawan, tetapi di dalam peranannya tidak menonjolkan apa-apa, maka tidak akan dipilih menduduki jabatan kecuali keturunan langsung dari raja. Orang bangsawan kebanyakan memilih lapangan pekerjaan sebagai pegawai/cen-

dekiawan, ulama dan petani dan amat jarang di antara mereka terjun ke dunia usaha atau perdagangan.

2. Golongan *Topanrita*; adalah golongan ulama dalam arti ahli ilmu agama Islam. Golongan ini berasal dari lapisan mana saja dalam stratifikasi sosial, karena Islam tidak mengenal perbedaan asal keturunan manusia. Oleh karena kesungguhan dan ketekunannya menuntut ilmu agama, ia berhasil menjadi Topanrita. Topanrita yang luas pengetahuannya, di samping ahli ilmu pengetahuan syariat, menguasai pula ilmu tasawuf dan bidang-bidang lainnya, bahkan ada yang ahli pencak silat, ilmu ketabiban dan *falakiyah* (ilmu falak). Topanrita seperti ini dinilai lebih tinggi daripada yang lainnya, memiliki reputasi dan pengaruh yang luas di kalangan masyarakat. Bidang usaha yang disukai oleh ulama adalah menjadi petani dan perdagangan, selain tugas pokoknya memberi pengajian, pendidikan, memberi petunjuk dan nasehat-nasehat. Ulama masa kini sekurang-kurangnya terbagi dalam: (a). Ulama pegawai negeri, (b). Ulama wiraswasta, dan (c). Ulama yang mengabdikan dalam lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta.
3. Golongan *Tosugi*; adalah golongan saudagar, orang kaya yang selalu menunjukkan dharma-baktinya kepada masyarakat, memberi sumbangan kepada usaha-usaha sosial atau badan-badan sosial. Golongan ini berasal dari lapisan menengah atau dari rakyat biasa yang memang turun-temurun bernasib baik mempunyai harta kekayaan. Amat jarang dari golongan ini berasal dari golongan bangsawan. Orang menjadi kaya dalam pekerjaannya sebagai pengusaha (N.V. dan C.V.), sebagai pedagang hasil bumi dan dalam usaha transportasi darat dan laut.
4. Golongan pegawai/cendekiawan; adalah golongan ma-

syarakat yang terdidik kemudian menjadi pegawai negeri. Pada waktu pemerintahan Belanda yang menjadi pegawai kebanyakan adalah orang-orang bangsawan tinggi atau menengah, karena mereka diberi kesempatan memasuki pendidikan Barat, sedang golongan rakyat biasa menerima pendidikan agama dari para Topanrita atau guru mengaji.

5. Golongan *Pallaonruma* dan *Pakkaja*; adalah golongan petani dan nelayan. Golongan *Pallaonruma* (petani sawah) berasal dari golongan rakyat biasa dan banyak jumlahnya, sedang petani kelapa terdapat di antaranya berasal dari golongan bangsawan. Golongan *Pakkaja* kebanyakan berasal dari rakyat biasa, dan mereka berdiam di pesisir pantai.
6. Golongan buruh kasar; adalah golongan yang tidak termasuk golongan yang lima di atas. Golongan ini terdiri dari rakyat biasa termasuk para pengrajin.

B. *Adat Dan Syariat Islam*

Sejak semula peng-Islam-an dan penyebaran ajaran agama Islam senantiasa mendapat pengawasan dari raja-raja, sehingga hubungan antara adat dan pelaksanaan syariat Islam berjalan bersama-sama. Para ulama penyiara ajaran Islam menda'wahkan haram dan halalnya suatu perbuatan, tetapi tidak sampai menempuh cara-cara ekstrim yang dapat menggoyahkan sendi-sendi masyarakat. Penyiara Islam memang mendapat perlindungan dari raja, tetapi di lain pihak mereka mendapat pengawasan supaya perbedaan-perbedaan antara adat dan Sara' (syariat) tidak menjadi pertentangan yang dapat mengganggu sistem sosial. Apabila pada suatu ketika terjadi pertentangan atau muncul suatu gejala di mana anggota masyarakat harus memilih alternatif yang paling sesuai untuk diteruskan menjadi adat-kebiasaan, maka raja sebagai tempat mempertemukan

semua pendapat, mengambil keputusan sesudah musyawarah dengan pembantu-pembantunya bersama dengan para ahli agama. Titik tolak pengambilan keputusan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dengan tidak mengorbankan nilai-nilai adat dan agama.

Sejak dikembangkanya ajaran Islam, hal-hal yang menyangkut adat-istiadat yang penting, seperti pemujaan kepada *Arajang*⁹, pemberian sesajen kepada *Saukang* dan *pantasak* sesudah panen dan lain-lain kebiasaan yang berasal dari zaman pra-Islam dan pada hakekatnya bertentangan dengan Sarak, tidaklah merupakan larangan yang keras dan harus diberantas segera oleh ulama. Pesta-pesta panen yang mengambil tempat pada *Saukang* (dapat berupa pemujaan pada suatu tempat tertentu dimana terdapat pohon besar), menurut adat masih perlu dipertahankan, karena merupakan tanda kesyukuran penduduk atas keberhasilan panennya. Demikian pula pemujaan kepada *Arajang* masih dipertahankan oleh adat, berhubung karena pemujaan kepada benda-benda tersebut memperkuat kewibawaan raja, meskipun hal itu bertentangan dengan *Sara'*. Dalam perkembangan berikutnya, lambat laun pemujaan kepada *Arajang* diperkecil penyelenggaraannya dan hanya dilakukan oleh kelompok *Bissu*¹⁰, digantikan dengan *sikkiri' Juma'* oleh ulama. Hingga runtuhnya kerajaan-kerajaan Bugis—Makassar *sikkiri' Juma'* merupakan acara tetap di istana tiap malam *Jum'at* karena di samping mengingat nama Allah dan Nabi Muhammad, juga merupakan acara pertemuan pejabat adat dengan pejabat *Sara'* untuk berbincang-bincang mengenai masalah adat dan Syariat Islam.

Kebiasaan-kebiasaan penduduk minum *ballo'* (tuak), khususnya bagi orang-orang Makassar tetap dipertahankan oleh raja karena dianggap berguna untuk membangkitkan semangat joang bagi lasykar-lasykar. Demikian juga perju-

dian secara besar-besaran di suatu tempat tertentu diluaskan sepanjang kericuhan dapat dijaga karena merupakan tempat memungut *baratu* (pajak judi) bagi perbelanjaan kerajaan. Bagi *parewa Sara'* (pejabat Syara), keadaan perbuatan demikian dianggap sebagai tanggung jawab raja, sepanjang raja dapat menjamin keimanan anggota masyarakat sehingga tidak ingkar dari kepercayaan kepada Allah dan Rasulullah.

Pejabat Sara' bertanggung jawab dalam hal pengembangan Islam dalam masyarakat, seperti pelaksanaan ibadah, upacara-upacara keagamaan, pembinaan dan perawatan bangunan-bangunan agama dan melayani upacara pernikahan serta kematian, bahkan turut campur pula dalam perkara-perkara warisan, sampai di mana hukum Islam dapat digunakan berdampingan dengan hukum adat mengenai warisan.

Sistem kemasyarakatan yang menyangkut masalah pelapisan sosial (social stratification) tidak disinggung oleh para muballigh, karena hal ini terjaring luas dalam masyarakat. Pelapisan sosial menyangkut hubungan perkawinan, pengangkatan pejabat adat dan soal status dalam masyarakat, bahkan tipe-tipe rumah panggung orang Bugis Makassar banyak ditentukan oleh sistem pelapisan ini. Para ulama tidak menyebut sistem pelapisan ini karena mungkin sekali dalam berbagai terjemahan Hadist yang menyebutkan keutamaan seorang keturunan Sayyid atau keutamaan kaum Quraisy daripada kabilah-kabilah lainnya dan dianggap wajar ada bagi kebudayaan manusia di samping tidak merusak keimanan. Pada hakekatnya, Islam tidak mengenal perbedaan derajat manusia yang satu dengan yang lainnya, perbedaan terletak pada takwanya. Masa pengembangan Islam pada paruh kedua abad ke VII khusus mengenai tata nilai yang mendukung status sosial ini tidak dilarang oleh para muballigh,

tetapi disebut pula bahwa keutamaan di sisi Tuhan adalah manusia yang bertakwa.

Mengenai sistem perkawinan dan pelaksanaannya, sebagaimana lazimnya dalam adat-kebiasaan orang Bugis-Makassar, pelaksanaan perkawinan melalui cara-cara yang rumit serta adanya sistem Somp¹¹ (uang mahar) ditambah uang belanja yang begitu tinggi, nampaknya tidak diapa-apakan oleh para muballigh. Tuntutan adat, jika seorang pria meminang seorang gadis, oleh keluarga dari pihak wanita lebih dahulu menyusuri stamboom (silsilah) si pria, apakah ia dari golongan bangsawan ataukah dari golongan hamba sahaya. Pihak wanita cenderung mencari suami dari lapisan yang lebih tinggi daripada lapisannya, berbeda halnya dengan kaum pria yang dalam mencari calon isteri tidak terlalu terikat pada norma-norma stratifikasi. Somp bagi golongan bangsawan disebut *somp kati*, yakni selain harta benda yang diserahkan kepada keluarga wanita, sering diikutkan pula seorang atau beberapa orang hambanya, sehingga menunjukkan bahwa dalam kawin mawin melalui sistem somp itu seolah-olah tercermin martabat keluarga dan ketinggian status sosial. Peranan Sara' dalam perkawinan adalah memasukkan unsur-unsur Islam dalam pernikahan dengan cara nikah menurut syariat Islam dan dilakukan oleh seorang ahli agama atau Imam/Kadhi, menggantikan doa-doa pernikahan yang lazim dilakukan oleh *Sanro* (dukun) sebelumnya. Masih ada sisa adat perkawinan pada saat pertemuan pertama kedua mempelai, yakni persentuhan pertama antara ibu jari pria dengan ibu jari wanita sebagai tanda nikah menurut tradisi. Pesta perkawinan yang diramalkan dengan makan-minum antara kedua belah pihak dianggap oleh ulama tidak merusak syariat. Sepanjang dalam keramaian tersebut diijaukan makanan babi dan minuman ballo serta perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, bagi syariat tetap diperbolehkan. Oleh karena itu atas inisiatif para ulama dan muballigh menyelengi pesta itu de-

ngan bacaan Barzanji yang biasanya dilakukan pada waktu malam hari sehari sebelum mata acara pesta perkawinan.

Upacara yang menyertai kematian, utamanya kematian seorang bangsawan, sebagaimana lazimnya adat-kebiasaan Bugis-Makassar diadakan beberapa kali setelah mayat sudah berada dalam kubur. Berbilang kali diadakan upacara, seperti hari ke tujuh, hari ke sembilan dan sering diadakan hari ke empat puluhnya. Pada masa pra-Islam upacara seperti itu diatur dan diselenggarakan oleh Sanro atau Bissu. Kini Syariat Islam menganjurkan membaca Al-Qur'an 30 juz sampai tammat, dimulai setelah mayat diturunkan dan dianjurkan adalah lebih banyak pahalanya jika ditamatkan Al-Qur'an beberapa kali. Apabila orang yang kematian tidak sanggup mengundang orang pembaca Al-Qur'an, cukuplah jika ia membaca Surat Al-Ikhlâs beberapa kali. Perbuatan anggota masyarakat mengenai upacara kematian ini dikerjakan bersama-sama berdasarkan anjuran adat dan anjuran Sara', yaitu bahwa setelah tammat Al-Qur'an diadakanlah upacara menurut adat yang berlaku. Pemotongan hewan pada tiap upacara menjadi syariat menurut adat, dan syariat Islam menganjurkan bacaan yang mengingat pada Allah, misalnya membaca doa-doa agama atau bacaan Barzanji. Bagi muballigh, upacara kematian ini pada hakekatnya tidak mengikuti anjuran Al-Qur'an, oleh karena seseorang yang sudah meninggal akan memperoleh pahala di hari kemudian sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi keadaan ini tidak diapa-apakan, mengingat bahwa dengan melakukan upacara kematian sedikit banyaknya orang juga turut mengingat kematian itu, dan itu berarti soal martabat, harta benda dan pangkat, soal dunia tidak begitu penting lagi. Syariat Islam berperanan dalam upacara seperti ini dengan melakukan sembahyang mayat, bacaan Talqin di atas kuburan serta ingatan-ingatan kepada Allah pada saat-saat ditimpa kesusahan. Media seperti inilah yang sering digunakan oleh para muballigh

guna memantapkan Islam dalam hati masyarakat. Setelah Gerakan Islam Muhammadiyah menonjol kegiatannya, maka bacaan Talqin di atas kuburan, bacaan Barzanji dan sebagainya yang mengotori iman ummat Islam, mulai dikurangi.

Para ulama sangat hati-hati menghadapi perkara warisan, berhubung masalah ini bersangkut-paut dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan orang Bugis—Makassar mengenal garis keturunan bilineal, yaitu menganut garis keturunan ayah dan ibu secara bersama-sama, bukan secara sendiri-sendiri. Orang Bugis-Makassar tidak mengenal adanya marga atau klan, tetapi mengenal kelompok keluarga dan yang lebih besar lagi, yakni suku-bangsa. Sesuai dengan sistem kekerabatan, maka dalam hukum adat pewarisan dikenal adanya "pembagian yang sama" antara pria dan wanita. Sedang menurut syariat, pria diberi lebih daripada wanita dengan perbandingan 2 : 1. Dikenal ungkapan "*mallēmpak orowanē, Majjujung makkunraiye*" yang maksudnya, pria memikul pada sebelah-menyebelah bahunya dan wanita menjunjung pada kepalanya. Dalam hubungan ini, tidak terjadi perselisihan antara adat dan Sara'. Pembagian warisan diatur dalam kelompok keluarga oleh orang-orang tua, misalnya wanita diberi warisan rumah, perhiasan emas dan kalau perlu diberi juga kebun/sawah, sedang pria diberi warisan berupa sawah, tanah empang dan alat-alat mata pencaharian hidup. Kalau menurut Sara' warisan diberikan lebih banyak kepada pria dengan alasan kaum pria menanggung hidup keluarganya, sedang wanita ditanggung oleh suaminya, maka hukum adat mendamaikannya sebagai konsekwensi garis keturunan bilineal, yaitu bahwa semua harta yang memang oleh adat dipandang berharga bagi wanita adalah miliknya dan semua harta yang berguna bagi lelaki untuk menghidupkan keluarganya adalah miliknya pula. Rumah diberikan kepada wanita karena menurut adat seorang wanita yang sudah kawin barulah meru-

pakan satu keluarga bila telah mempunyai sebuah rumah. Demikian pula menurut adat seorang lelaki yang ingin kawin harus menyerahkan sebidang tanah (sawah/kebun) sebagai bagian dari Sompā untuk calon isterinya, yang nantinya akan menjadi dasar atau modal untuk memulai penghidupannya.

Demikianlah, adat dan Sara' terjalin luas dalam kebudayaan masyarakat dan perselisihan di bidang Sara', akan diselesaikan oleh Imam atau Kali (sekarang Pengadilan Agama) dan perselisihan di bidang adat diselesaikan oleh pejabat adat. Akan tetapi tidak dapat disangkal adanya peranan kelompok keluarga dalam penyelesaian sengketa warisan. Dan bila sengketa tidak dapat selesai dalam kelompok keluarga, barulah diajukan kepada Imam/Kali.

C. Organisasi Sosial

Sehubungan dengan pengembangan masyarakat dan kemandapan ajaran Islam dalam struktur masyarakat, maka para ahli agama diberi kedudukan sama dengan pejabat adat. Ahli agama yang dipilih untuk mengurus kemandapan ajaran Islam, didudukkan dalam suatu organisasi yang disebut *parewa Sarak* (pejabat Syariat) yang kedudukannya dalam kerajaan sama dengan *parewa adek* (pejabat adat). *Parewa Sarak* dipimpin oleh seorang *Kali* (kadhi) yaitu pejabat tertinggi di bidang hukum syariat Islam dan berkedudukan di pusat kerajaan. Tiap palili (onderafdeling) diangkat pejabat bawahan yang disebut *Imam* serta dibantu oleh seorang *Khatib* dan seorang *Bilal*. Dengan adanya pertambahan penduduk, terbentuk pulalah kampung-kampung atau pemukiman di berbagai tempat. Salah satu syarat berdirinya kampung adalah terdapatnya mesjid atau *langgar* (sebuah bangunan rumah ibadah yang sederhana). Salah seorang penduduk yang ahli agama ditunjuk menjadi Imam untuk melayani jamaah

sembahyang di kampungnya, namun Imam bersama pembantunya yang telah diangkat oleh masyarakat dalam menjalankan tugasnya langsung menjadi aparat Kali di pusat kerajaan. Dengan kata lain, organisasi *parēwa sara'* mengikuti organisasi pejabat adat, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kampung.

Keadaan pemerintahan (tradisionil) di daerah Wajo jelas menunjukkan pelaksanaan *sara'* dan *ade'* secara berdampingan dalam masyarakat. Organisasi pemerintahan dan seluruh anggota masyarakat terbagi dalam tiga bagian, tiap bagian disebut *Limpo*, yaitu *Limpo Bentempola*, *Limpo Tua'* dan *Limpo Talotenreng*. Tiap *Limpo* dikepalai oleh seorang raja dan mempunyai wilayah kekuasaan tertentu. Pada tiap *Limpo* terdapat 10 orang *Pabicara* (semacam hakim yang mengurus semua persoalan adat-istiadat), seorang *Suro ribatengeng* (semacam duta terpercaya untuk menyampaikan berita dan seorang penghulu lasykar. Jumlah pejabat adat pada tiap *Limpo* adalah 13 orang, sehingga pada ketiga *Limpo* itu terdapat 39 orang pejabat adat. Selanjutnya diangkatlah seorang Kepala pemerintahan tertinggi yang disebut *Arung Matowa*. Keseluruhan pejabat adat di Wajo berjumlah 40 orang.

Organisasi pejabat *sara'* diatur pula seperti pejabat adat, yaitu dibagi dalam tiga bagian menurut jumlah *Limpo*. Akan tetapi tiap *Limpo* diangkat oleh seorang Imam, dua orang Khatib, dua orang Bilal dan Seorang *Amil*. Pejabat *Sara'* tertinggi ialah Kali yang berkedudukan di pusat pemerintahan berdampingan dengan *Arung Matowa*.

Sebagai kenyataan, dalam musyawarah besar Dewan Adat kedudukan pejabat *sara'* disamakan dengan pejabat adat yang terbukti dari komposisi tempat duduk, sebelah kanan raja duduk berdampingan pejabat-pejabat *sara'* dan pada sisi sebelah kiri duduk pejabat-pejabat adat secara berdampingan pula berhadap-hadapan dengan pejabat

sara', sedang Arung Matowa duduk di tengah berdampingan pula dengan Kali, sehingga kelihatan membentuk segi empat. Musyawarah besar Dewan Adat diadakan jika sewaktu-waktu dipandang perlu berbicara mengenai situasi umum pemerintahan, seperti mengenai perjanjian damai atau pengumuman perang dan menyangkut masalah penghidupan masyarakat. Diadakan pula Musyawarah besar dalam hal pergantian Arung Matowa ataupun perkawinan putera mahkota.

Organisasi rumah-rumah ibadah pula diatur sedemikian rupa, bahwa di pusat kerajaan harus terdapat sebuah Mesjid yang dapat digunakan sebagai tempat sembahyang Jum'at. Demikian pula pada tiap Limpo, sebuah mesjid yang memenuhi syarat sebagai tempat sembahyang Jum'at. Adapun ditingkat Distrik atau kampung diusahakan agar sekurang-kurangnya dibangun sebuah langgar (tempat untuk sembahyang lima waktu). Syarat berdirinya suatu langgar atau mesjid diatur demikian rupa, agar bunyi beduk dari satu langgar tidak kedengaran oleh langgar lainnya yang berada di sekitarnya. Salah satu dari rumah-rumah ibadah dalam Distrik itu dipilih sebagai tempat sembahyang Jum'at dan rumah ibadah lainnya hanya sebagai tempat sembahyang lima waktu. Oleh karena itu, di sekitar mesjid tempat sembahyang Jum'at harus ada *mukim*, yaitu 40 orang penduduk yang tidak pernah bermigrasi ke daerah lain untuk jangka waktu lama. Kehadiran ke 40 orang mukim ini merupakan syarat sahnya sembahyang Jum'at. Empat puluh orang mukim dalam lidah Bugis-Makassar disebut *Musthaoteng*, dari bahasa Arab *musthaothin*, dari akar kata *wathana* yang berarti negeri. *Musthaoteng* berarti penduduk asli dan artinya sama dengan mukim.

Apabila tidak cukup empat puluh mukim yang menghadiri sembahyang, maka sembahyang Jum'at dilanjutkan dengan syarat harus mengulangi dengan mendirikan sembah-

yang dhohor. Seseorang yang ingin agar sembahyang Jum'atnya selalu sah, akan mengunjungi mesjid yang diperkirakan mukimnya cukup. Keadaan mengulang sembahyang Jum'at dengan sembahyang dhohor yang kebanyakan dilakukan oleh ulama tradisional berlanjut terus sampai munculnya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan dalam tahun 1926. Barulah sekitar tahun 50-an keadaan sah tidaknya sembahyang Jum'at dengan syarat kehadiran mukim itu tidak dipersoalkan lagi. Mungkin sekali ada alasan mengatakan bahwa pejabat sara' harus diperbanyak agar selalu menghadiri sembahyang Jum'at sebagai tanda sahnya sembahyang dan oleh karena jabatannya mereka terikat untuk selalu berada di tempatnya. Musthaoteng atau mukim di sini bukanlah nama jabatan, tetapi karena jabatannya mereka senantiasa harus bermukim di kampungnya guna melayani sembahyang dan lebih penting lagi guna melayani keperluan upacara keagamaan masyarakat.

Organisasi pejabat Sara' di Gowa juga mengikuti susunan pejabat adat. Struktur pemerintahan kerajaan Gowa terdiri dari sebuah lembaga yang disebut *Batē Salapang*, beranggotakan 9 orang dan berfungsi membantu raja dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Masyarakat ramai menyebut raja Sombaya ri Gowa (Tuan yang disembah di Gowa). Lembaga *Batē Salapang* merupakan lembaga tertinggi dalam kerajaan dalam membawakan suara rakyat dan dapat meminta pertanggungjawaban raja atas suatu kebijaksanaan yang telah dijalkannya. Di pusat kerajaan diangkat seorang Kali yang disebut *Daengta Kaliya*, yang bertugas mendampingi raja dalam urusan keagamaan. Kali dibantu oleh Imam dari daerah Distrik. Pada mulanya, orang yang diangkat menjadi Kali adalah bangsawan keluarga raja sendiri, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya jabatan Kali dan Imam diangkat dari kalangan lapisan *Tobaji* (orang baik-baik) yang ahli agama.

Sama halnya pejabat adat di daerah Bone terdiri dari tujuh orang yang menjadi anggota dalam lembaga adat tertinggi dalam kerajaan dan disebut *Ade' pitu*. Seorang Kali diangkat sebagai pejabat sara' tertinggi yang mendampingi raja dalam urusan keagamaan. Dalam ucapan sehari-hari, raja disebut *Petta Mangkauē ri Bone* dan Kali disebut *Petta Kaliye*. Meskipun orang yang diangkat menjadi Kali bukan lagi dari golongan bangsawan, akan tetapi untuk sebutannya tetap digunakan *Petta* yang lazim diberikan kepada orang bangsawan. Hal ini menunjukkan bahwa siapa saja yang menduduki jabatan itu, ia harus diperlakukan sebagai bangsawan.

Karena dipadukannya sara' dengan adat dalam kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, agak wajarlah kiranya bila di antara raja-raja terdapat ahli mengenai agama di samping ahli dalam urusan pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan kerajaan Bone, Kali adalah kepala segala pejabat sara' dan juga kepala peradilan agama tertinggi serta kedudukannya merupakan salah satu kelengkapan kerajaan yang penting. Meskipun demikian raja adalah penghulu agama tertinggi (syaiikhul Islam) dalam kerajaan. Kedudukan ini menjamin kekuasaan tertinggi di tangan raja di bidang keagamaan.

Ajaran Tasauf diperkirakan masuk di Sulawesi Selatan sejak Abdul Jawad, Khatib Bungsu Datok ri Tiro menyiarkan Islam di Sulawesi Selatan. Sampai sekarang belum ada kesepakatan pendapat tentang jenis Tasauf yang dibawakannya, hanya sedikit perkiraan bahwa mungkin sekali beliau mengajarkan aliran Wihdatul Wujud yang diperolehnya dari gurunya Syamsuddin As-Sumatrany di Aceh. Organisasi Tharikat, kalau hal ini dapat disebut organisasi, melihat sifatnya orang-orang yang masuk di dalam salah satu aliran Tasauf, diharuskan taat dan mengabdikan kepada mursyidnya. Semua murid menyerahkan dirinya kepada

Khalifah untuk dibimbing mendekatkan diri pada Tuhan. Ketaatan murid dan kewenangan Khalifah seolah-olah merupakan suatu organisasi keagamaan yang berdasar atas ikatan batin antara guru dan murid.

Ajaran Tasauf Islam baru nampak jelas di Sulawesi Selatan setelah murid Syekh Yusuf Tajul Khalwatiy (Tuanta Salamaka) yang bernama Syekh Nuruddin Abdul Fattah Abdul Bashir Ar-Raffani dan Abdul Kadir Karaeng Jenok mengajarkan tarikat di kalangan masyarakat. Kedua murid Syekh Yusuf yang terkemuka ini diberi kuasa untuk melanjutkan ajarannya di Sulawesi Selatan, karena beliau sendiri akan kembali ke Banten. Abdul Bashir, demikian singkatan namanya dan terkenal pula dengan sebutan Tuang Rappang I Wodi, seorang buta yang telah menerima ijazah tharikat dari gurunya Syekh Yusuf hasil ketekunannya dan kezuhudannya, ikut bersama dengan gurunya di Banten. Penyebaran ajaran Tasauf ini yang lazim disebut tharikat Khalwatiyah Yusuf, sekitar paruh kedua abad ke XVII. Diduga keras raja-raja dan golongan bangsawan sekitar abad itu menganut tharikat ini.

Syekh Yusuf seorang bangsawan Gowa¹² meninggalkan daerahnya pada masa perintisan Islam di Sulawesi Selatan menuju Mekkah berdasarkan anjuran guru-gurunya agar ia ke luar negeri menambah ilmu dan menunaikan Rukun Islam kelima. Dalam catatan harian raja-raja Gowa terlukis bahwa beliau dilahirkan 8 Syawal 1036 H, bertepatan dengan 8 Juli 1626. Setelah mencapai usia 18 tahun, bertepatan dengan 22 September 1644 berangkatlah beliau meninggalkan pelabuhan Tallo, menumpang kapal dagang Portugis berlayar menuju Banten. Setelah beberapa lama beliau berada di Banten diteruskannya pelayarannya menuju Aceh, di sanalah beliau menemui ulama besar waktu itu yang bernama Syekh Nuruddin Ar-Raniry. Daripada Syekh-nya ini beliau memperoleh ijazah Tharikat al-Qadiriyyah.

Dari Aceh ia terus berlayar ke negeri Yaman untuk menemui ulama Tharikat kenamaan Syekh Abi Abdullah Muhammad Abdul Baqi dan dari padanya beliau menerima ijazah Tharikat Naqsyabandiyah. Kemudian iapun meneruskan ziarah ke makam Nabi Muhammad di Medinah. Setelah selesai mengerjakan ibadah haji, Syekh Yusuf melanjutkan perjalanannya ke Syam (Damaskus). Di sanalah beliau belajar dan menerima ijazah Tharikat Khalwatiyah dari Syeknya Abul Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub al-Khalwatiy al-Qurasyi. Syekh tersebut adalah Imam pada Mesjid Syaikhul Akbar Muhyiddin Ibnul Arabi di Damaskus¹³. Gurunya inilah yang memberikan gelar kepada Yusuf "Tajul Khalwatiy Hadiyatullah". Dengan demikian nama lengkapnya: Syekh Haji Muhammad Yusuf Abul Mahasin Hadiyatullah Tajul Khalwatiy al-Makassariy.

Setelah Syekh Yusuf mendalami berbagai ilmu Tasawuf dan ajaran Islam lainnya, kembalilah beliau ke Gowa melalui Banten. Tetapi alangkah kecewa hatinya karena didapitinya kerajaan Gowa sudah lain dari Gowa dahulu yang ditinggalkannya tatkala syariat Islam masih tersebar di mana-mana. Sekarang ia mendapati Sultan Hasanuddin sedang berperang dengan Belanda di mana Aru Palakka Malampe'e Gemme'na dari Bone memihak pada Belanda, dan itu berarti ia berperang dengan familinya sendiri. Syariat Islam tidak diperhatikan lagi, kemungkaran dan kemaksiatan merajalela. Perang berakhir dengan kekalahan Gowa dan dengan ditanda-tanganinya perjanjian Bongaya 18 Nopember 1667.

Pada suatu ketika Syekh Yusuf datang menghadap raja bermohon agar segera dimurnikan kembali syariat Islam dengan menghapuskan perjudian, sabung ayam, minuman keras, pemujaan kepada Arajang dan Saukang, supaya kerajaan dapat menghadapi tantangan dari berbagai pihak. Permohonan Syekh Yusuf ditolak oleh pembesar-pembesar

kerajaan dengan alasan tidak membantu syariat Islam. Kebiasaan pembesar-pembesar kerajaan yang berasal dari zaman pra-Islam diteruskan kembali. Syekh Yusuf kecewa melihat tanah tumpah darahnya dan ia berjanji akan meninggalkan Gowa untuk selama-lamanya. Sebelum meninggalkan negerinya beliau ke Banten lebih dahulu mengamanatkan kepada muridnya Abdul Bashir Tuang Rappang untuk melanjutkan ajarannya kepada penduduk.

Dalam paruh kedua abad ke XVII dan paruh pertama abad ke XVIII perkembangan Tharikat Khalwatiah Yusuf cukup pesat dan dapat dikatakan hampir semua golongan bangsawan sekurang-kurangnya memahami ajaran ini dalam melakukan ibadahnya. Pada masa itu pulastabilitas Islam, baik sebagai agama masyarakat maupun sebagai agama kerajaan mencapai puncak-puncak kejayaannya. Buku-buku lontara yang dahulunya ditulis dalam aksara Bugis-Makassar, kini umumnya ditulis dalam huruf Arab dengan tetap menggunakan bahasa Bugis Makassar. Tulisan tersebut disebut *ukiserang*. Lontara yang berasal dari abad ini ditandai dengan campuran huruf Arab dan huruf daerah. Bahkan buku-buku lontara yang berisi hukum-hukum Islam, Tauhid dan Tasauf banyak ditulis dengan huruf Arab bahasa Bugis. Stempel kerajaan dibuat dari besi atau kuningan dalam huruf Arab dan bahasa daerah.

Organisasi Tharikat tidaklah berupa organisasi menurut ukuran modern, akan tetapi -betapapun- seorang yang menganut suatu aliran tharikat selalu berkelompok dan mengembangkan nilai-nilai tertentu dalam kelompoknya, berbeda dengan orang awam. Anggota-anggota kelompok Tharikat ini, selalu mendapat bimbingan dan pengawasan dari khalifahnyanya.

Golongan bangsawan memegang suatu ajaran Tasauf, sebagai misal, Raja Bone ke 22 La Tenritappu Sultan Ah-

mad Shaleh Syamsuddin Matinroe ri Rompegading (1775-1812) amat ahli di bidang Tasauf. Sebuah kitab yang ditulisnya sendiri berjudul "An Nurul Hadi" dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkannya ke dalam bahasa Bugis. Kitab tersebut ditulisnya pada waktu usianya mencapai 32 tahun, ditulis di daerah Maros ketika beliau berada di sana bersama sahabatnya Kali Bone yang bernama Arab Harun. Pada halaman pertama dari kitabnya itu jelas dikatakan bahwa inisiatif penulisan kitab tersebut adalah karena hasil pembacaan dari risalah-risalah (artikel) gurunya Syekh Yusuf al-Taj ditambah dengan hasil perenungannya sendiri mengenai hakekat Islam, kemudian dilengkapi dari hasil diskusi dengan beberapa ulama kenamaan. Jelas sekali dari uraian-uraian bahwa La Tenritappu adalah penganut dan murid dari Syekh Yusuf. Kitabnya ini masih dapat kita peroleh pada oknum-oknum tertentu di pedalaman Sulawesi Selatan, di antaranya ada yang ditulis dalam bahasa Bugis dan sebagainya dalam bahasa Arab. Diduga pada zamannya, Tharikat ini tersebar di tengah-tengah para anggota masyarakat.

Organisasi Tharikat lain yang masuk ke Sulawesi Selatan pada tahun 1240 H, bertepatan dengan tahun 1820 M., ialah Tharikat Khalwatiyah Samman yang dibawa oleh Syekh Abdul Munir Syamsul Arifin. Tharikat ini mempunyai sumber silsilah dari seorang Syekh termasyhur tahun ke 12 H., bernama Syekh Muhammad Ibnu Syekh Abdul Karim as-Samman Al-Qadiri al-Khalwati al-Madaniy, disingkat namanya Syekh Muhammad Samman. Murid-muridnya yang berasal dari Indonesia dan telah menamatkan pelajarannya ialah: (a) Syekh Abdul Samad Palembang, (b) Syekh Abdul Rahman Masri dari Jakarta, (c) Syekh Muhammad Banjar dari Banjarmasin, dan (d) Syekh Abdul Wahab Bugis dari Pangkajene.

Penganut Khalwatiyah Samman berbeda dengan Khal-

watiyah Yusuf yang kebanyakan penganutnya terdiri dari golongan bangsawan, pada mulanya pengikut Khalwatiyah Samman kebanyakan berasal dari golongan rakyat biasa, tetapi pada perkembangan selanjutnya penganut kedua aliran tharikat ini tidak dapat dibedakan lagi. Jumlah penganut tharikat Khalwatiyah Samman dewasa ini berjumlah 259.982 orang (Sumber: Kejaksaan Tinggi Propinsi Sulawesi Selatan; tahun 1976). Pada mulanya pusat gerakan Tasauf Islam ini di Kabupaten Pangkajene, kemudian pindah di Desa Leppakomae dan sekarang di Desa Patte'ne, Kabupaten Maros. Cabang dan rantingnya terdapat di kabupaten-kabupaten yang penduduknya orang Bugis dan sebagian orang Makassar dan Mandar, sedang Khalwatiyah Yusuf dianut oleh sebagian besar orang Makassar dan sebagian orang Bugis di Maros dan Pangkajene, akan tetapi tokoh Syekh Yusuf tetap menjadi tokoh legendaris bagi ummat Islam Sulawesi Selatan. Penganut Khalwatiyah Samman membentuk kelompok yang berjiwa Islam, mereka turut serta bergotong-royong membangun Desanya di mana mereka berada. Ikatan bathin sesama murid dan kepada khalifahnyanya sangat kuat. Saling bantu-membantu baik dalam kesedihan maupun dalam kegembiraan. Kefanatikan kepada khalifahnyanya demikian kuatnya, sehingga kunjungan tiap tahun kepada khalifah besarnya di Maros merupakan acara tetap dan keharusan. Petuah-petuah ataupun wasiat-wasiat dari khalifah merupakan pegangan yang diterima tanpa bantahan. Kesederhanaan dan kesalehan pengikut tharikat ini adalah atribut dalam semua tingkah lakunya. Pada tiap pemukiman di mana mereka mayoritas, di sana pula mereka membentuk organisasi Jamaah, selain bermaksud untuk melakukan jamaah sembahyang lima waktu, juga untuk saling isi-mengisi faham yang dianutnya dan dalam rangka mengurus kesejahteraan hidupnya sehari-hari.

Rupanya penganut tharikat Khalwatiyah tidak disenangi oleh ulama Ahlus Sunnah, apalagi Muhammadiyah

tidak senang terhadap cara-cara pelaksanaan ibadah dan fahamnya itu sendiri, meskipun mereka pengikut mazhab Syafii juga dan amat langka didapati anak-anak mereka dimasukkan dalam Pesantren atau Madrasah.

D. Sikap Orang Bugis — Makassar Terhadap Islam

Hasil-hasil metode da'wah yang dilakukan oleh para muballigh pada masa permulaan tersebarnya Islam di Sulawesi Selatan, ditambah dengan masa stabilisasi Islam abad ke XVIII dan kemudian persentuhan dengan pengaruh kebudayaan Barat, menyusul keadaan masa perjuangan kemerdekaan, semuanya itu merupakan rentetan sejarah perkembangan masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan yang turut memberi warna kepada bangunan sikap sosial orang Bugis—Makassar terhadap Islam.

Seorang Bugis ataupun seorang Makassar takut pada dua hal, yaitu takut dikawinkan kalau bukan secara Islam dan takut dikuburkan kalau bukan dengan upacara Islam. Imbasan pengaruh dari dua hal ini, sikap sehari-hari seorang Bugis—Makassar tidak disebut ia bukan orang Islam. Apabila disebut demikian sama halnya melanggar martabat dirinya yang konsekwensinya adalah nyawa. Sederajat dengan itu, jika seorang Bugis—Makassar dikatai "kau tak punya *Siri'*" juga dirasakan sebagai suatu penghinaan. *Siri'* amat luas pengertiannya, pada berbagai situasi dapat diartikan "martabat diri" dan di lain situasi diartikan "malu". Sebutan bukan Islam kepada seseorang adalah identifikasi sara' dan sebutan tidak ada *Siri'* identifikasi adat. Apabila dua hal yang sederajat ini serentak disebutkan kepada seseorang, itu pastilah merupakan suatu penghinaan yang berat. Nasehat orang tua yang diterimanya dari muballigh, kemudian diajarkan kepada anak cucunya bahwa orang yang bukan Islam itu adalah laksana binatang, begitu pula orang

yang tidak ada Siri'-nya, karena binatang tidak tahu siri' dan tidak beragama. Demikian ucapan orang-orang tua kepada anaknya apabila diinginkan anaknya rajin sembahyang.

Imam yang mengurus pelaksanaan penguburan mayat atau pernikahan tidak pernah bertanya, apakah yang bersangkutan rajin melakukan sembahyang atau tidak, pelaksanaannya terus dilangsungkan dengan suatu keyakinan bahwa orang-tuanya orang Bugis atau orang Makassar, meskipun yang bersangkutan tidak pernah atau kurang melakukan sembahyang. Mungkin hal ini akibat dari dawah yang mengatakan bahwa asal orang sudah mengucapkan kedua kalimat syahadat, itu sudah orang Islam. Dilain pihak, ada juga identifikasi suku; jika dikatakan "karena kau bukan orang Islam, kau bukan orang Bugis-Makassar", ini dirasakan pula sebagai suatu penghinaan. Agaknya akhir-akhir ini identifikasi suku sudah mulai menipis akibat peningkatan pendidikan bagi semua golongan.

Dalam sebuah rumah tangga Bugis-Makassar, anak-anak mulai usia peka antara 5 — 10 tahun diajar mengaji Al-Qur'an oleh orang tuanya atau dikirim kepada salah seorang guru mengaji di desanya, keadaan ini mulai pada abad-abad permulaan Islam di Sulawesi Selatan. Seseorang merasa tercela jika tidak tahu membaca Al-Qur'an, meskipun sekedar yang perlu dibaca dalam sembahyang. Sejak semula, tidak ada orang Bugis-Makassar yang buta huruf Arab dengan mengaji Al-Qur'an atau buta huruf lontara, bahkan sebagainya tahu menulis dalam huruf tersebut.

Daerah-daerah pedalaman menganut kebiasaan memperingati sekadarnya tanggal 10 Muharram, yaitu hari mati syahidnya Husain, suatu kebiasaan yang diturunkan oleh golongan Syiah. Pada waktu itu banyak sekali keluarga memasak hidangan yang disebut *buburuk pitunrupa* (semacam bubur Sura di Jawa), dan dibuat dari tujuh macam buah-buahan dicampur dengan gula-merah sehingga merupakan

masakan yang lezat. Acara sederhana ini dilakukan tiap keluarga tanpa undangan. Pada umumnya mereka tidak mengerti apa latar belakang bulan Muharram itu. Sikap keagamaan ini semata-mata didasarkan pada kemuliaan bulan itu sebagai bulan Islam.

Bulan Ramadhan dipahami sebagai bulan suci, dan karena itu orang menyiapkan segala perlengkapan untuk memasukinya dan juga menjelang hari raya Idul Fithri. Waktu siang di bulan puasa nampak kegiatan menurun, berbeda dengan di luar bulan puasa, menunjukkan ibadah puasa dilakukan oleh sebagian besar oleh anggota masyarakat. Wanita lebih patuh melakukan puasa dibanding dengan lelaki yang pekerjaannya selalu di luar rumah di mana banyak kesempatan untuk tidak melakukan puasa. Hari raya Idul Fithri disambut dengan segala kegembiraan, segalanya diperbaharui untuk menyambut tamu berziarah, saling kunjungan rumah antar tetangga dan sahabat. Tidak membalas kunjungan rumah akan dirasakan sebagai suatu beban utang yang harus dilunasi. Akhir-akhir ini sering diadakan halal bi halal di mana semua teman sejawat bertemu satu sama lainnya dengan maksud untuk mengganti kunjungan rumah, akan tetapi kunjungan rumah dirasakan lebih afdhal.

Sampai sekarang masih ada faham di kalangan orang Makassar yang mengatakan "tak usah naik Haji ke Mekkah karena sudah dilakukan oleh Syekh Yusuf atas nama kita semua". Seolah-olah ada sistem perwakilan mengenai urusan haji, sehingga orang Makassar kurang memperhatikan naik haji. Syekh Yusuf Tajul Khalwatiy naik haji pada abad ke XVII dan tetap menjadi tokoh legendaris di kalangan orang Makassar dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.

PENDIDIKAN ISLAM DI SULAWESI SELATAN

Pendidikan Islam tidak terbatas hanya pada lingkungan Madrasah atau Pesantren, tetapi juga dan terutama di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Tidak pula terbatas pada salah satu golongan atau lapisan masyarakat, atau hanya untuk lelaki saja. Akan tetapi lembaga pendidikan Islam memenuhi fungsinya karena tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan turut mengembangkan nilai-nilai kultural lingkungannya, memperoleh *input* dari keluarga dan memberikan *output* kepada masyarakat. Azas pendidikan Islam ialah pendidikan seumur hidup sejak lahir sampai meninggal¹⁴. Azas ini bersumber dari sebuah Hadist "uthlubul ilma minal mahdi ilal lahdi" (tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahad). Pendidikan Islam termasuk salah satu jaringan Pendidikan Nasional, maka dasar pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan ialah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Madrasah dan Pesantren merupakan wadah pendidikan Islam, maka azas pendidikan juga mengatur sistem pembinaan melalui tauladan dan persuasi, musyawarah dengan azas kekeluargaan, komunikasi dan kebersamaan dalam kegiatan sehingga tiap orang merasa saling memiliki (*senso of belonging*).

Menurut para ahli pendidikan Islam, tujuan pendidikan bukanlah untuk memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu, akan tetapi terutama untuk mendidik budi pekerti, mengisi jiwanya dengan akhlak yang mulia sesuai

dengan prinsip-prinsip ajaran Islam¹⁵

Sesuai dengan batas pengertian yang telah dimajukan pada bagian lain di depan, maka tujuan pendidikan Islam harus mampu membudayakan alam sekitarnya. Dalam hubungan ini, diperoleh pengertian bahwa pendidikan Islam bukan semata-mata memperhatikan agama, akan tetapi sekaligus bekerja mengolah alam untuk kehidupan manusia.

Di bawah ini akan digambarkan tujuan pendidikan lembaga pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, sebagai hasil wawancara dengan Kiyai dan pembina lembaga tersebut.

A. Tujuan Pendidikan.

Salah seorang pembina Pesantren Putri IMMIM (Ikatan Mesjid Mushalla Indonesia Mujtahidah) di Pangkajene, yaitu K.H.M. Nur mengatakan bahwa motif didirikannya Pesantren antara lain untuk mengembangkan pendidikan Islam, mewujudkan manusia muslim yang utuh. Pesantren hendaknya bertujuan mendidik anak-anak untuk menjadi ahli agama yang berpandangan luas dan mengamalkan ilmunya sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut beliau, kita perlu sekarang membentuk manusia muslim yang dapat memelihara dan mengembangkan persatuan di kalangan ummat, seorang muslim yang dapat bekerja untuk dunia dan akhirat. Lain halnya, H. Fadeli Luran, seorang zuama' dan Ketua Umum Pesantren Modern IMMIM, mengatakan bahwa tujuan pendidikannya ialah untuk mencetak Ulama-Intelek dan Intelek-Ulama. Agaknya tujuan ini idealistis dan mungkin yang dimaksudkan adalah manusia yang ahli agama dan sekaligus ahli pengetahuan umum.

K.H.M. Marzuki Hasan, pemimpin Pesantren Darul Istiqamah di Maccope (Maros), melihat tidak tepatnya

cara da'wah Islamiyah di kalangan umat Islam. Dalam kata lain, da'wah yang dilakukan sekarang tidak memberi manfaat dan tidak dapat merubah keadaan umat Islam. Hal inilah yang mendorong beliau berusaha mendirikan media da'wah melalui pembinaan pendidikan Pesantren. Pendidikan harus bertujuan memberikan materi pelajaran agama untuk memberikan kekuatan iman kepada anak-anak, agar imanlah yang menjiwai segenap tingkah lakunya. Sesudah diberikan pendidikan keimanan barulah diberikan pendidikan akhlak, kemudian diberikan pendidikan ketrampilan untuk dapat bekerja dan tahu mengatasi hidup sendiri.

Menurut pandangan beliau, kekhawatiran orang tua sekarang adalah karena melihat iman anak-anaknya sudah sangat menipis. Perhatian melakukan ibadah sembahyang sudah berkurang dan pergaulan muda-mudi mengarah pada pergaulan bebas dan tanpa batas. Lebih lanjut dikatakan bahwa orang tua yang mengantarkan anaknya masuk di Pesantren, menitipkan pesan, "Kami bawa anak ini untuk diajar menjadi orang yang baik-baik", dan ada pula di antara mereka mengatakan "Kami bawa anak ini agar dapat menjadi manusia yang taat beragama". Berbagai macam harapan orang tua kepada Kiyai dan hal ini dapat dipahami, oleh karena sebagian tujuan Pesantren ditentukan oleh harapan anggota masyarakat sebagai pendukungnya.

Kiyai H.M. Marzuki Hasan, seorang ulama ahli Fiqh dan huffaz dengan penuh pengabdian memimpin Pesantrennya. Ia sendiri berusaha keras melaksanakan tujuan dan cita-cita Pesantrennya, yaitu mengutamakan pendidikan budi pekerti, pendidikan moral di antara pada santrinya. Oleh karena itu, pembangunan pondok santri lelaki diletakkan berjauhan dengan pondok santri wanita. Pemisahan ini, baik tempat pendidikannya (kelas) maupun ruang bacanya, dipertahankan dengan keras.

Perguruan As'adiyah di Wajo adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang tergolong modern, diurus oleh suatu Yayasan yang kuat. Dalam mukaddimah Anggaran Dasarnya hasil keputusan Mukhtar ke VI yang berlangsung di Sengkang (Wajo) pada tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 1975 tertulis bahwa As'adiyah sebagai organisasi pendidikan Islam profesional, dan fungsional swasta bertujuan meningkatkan iman, amal shaleh dan taqwa ummat Islam serta mempersiapkan kader-kader Muslim pembangunan yang bertaqwa kepada Allah S.W.T. Kemudian dalam azas dan tujuannya tercantum tekad untuk melaksanakan amanah ibadah dan amanah khilafah. Formulasi ini jelas mencerminkan tujuan untuk membentuk manusia muslim yang dapat berguna bagi masyarakat dan yang bertaqwa kepada Allah. Rupanya tujuan yang dicita-citakan adalah menitik-beratkan kepada pembinaan manusia. Adapun masalah pengelolaan hidup, akan dicari sendiri oleh manusia yang telah dipersenjatai dengan alat iman serta ilmu-ilmu agama.

Yayasan Perguruan As'adiyah bergerak di bidang usaha pendidikan da'wah dan Amaliyah-sosial Islam dengan jalan:

- a). Memajukan pendidikan Madrasah dan Pesantren.
- b). Menggiatkan prasarana dan sarana Da'wah Islamiyah dan
- c). Memelihara dan mendirikan Madrasah-madrasah, tempat-tempat ibadah serta badan-badan sosial.

K.H.M. Yunus Martan, pemimpin As'adiyah lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan pendidikan As'adiyah yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum, dibagi dalam dua dasar, yakni: a). Dasar yang bersifat umum, yaitu untuk mencetak kader-kader yang bertaqwa kepada Allah, cakap dan trampil bekerja untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara Pancasila menurut redha Allah serta menempatkan Lembaga Pendidikan dalam mata rantai keseluruhan sistem Pendidikan Nasional, berorientasi pada

pembangunan manusia seutuhnya di dalam wadah Negara Indonesia. b). Dasar yang bersifat khusus, adalah untuk mendidik tenaga-tenaga instruktur, penyuluh dan pelaksana pembangunan masyarakat. Mendidik dan melatih siswa/santri sehingga menjadi mahir dalam berbagai sektor pembangunan dan meratakan ajaran Islam dalam masyarakat untuk pengembangan Amal-shaleh.

Sama halnya dengan As'adiyah, Darud Da'wah wal Irsyad (D.D.I.) di Pare-pare, menurut almukarram K.H. Ambo Dallo, pemimpin perguruan ini, bertujuan untuk mencetak kader ulama dan kader pemimpin Islam. Di lain pihak, tujuan pendidikan Madrasah khususnya pendidikan yang sederajat dengan Pendidikan Guru Agama (P. G.A.), ialah untuk membina calon guru agama. Hal ini dapat dimengerti karena pendidikan Islam juga memperhatikan segi-segi kegunaan ilmu dan pendidikan kejuruan untuk mencari rezeki.

Perlu pula dilihat secara tersendiri Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah di Gombara (Maros) yang menekankan perlunya pendidikan ilmu agama lebih banyak diberikan, misalnya perbandingan agama dan pengetahuan umum berbanding 80 : 20. Pesantren Gombara menetapkan tujuan pendidikannya ialah untuk mendidik pemuda-pemudi muslim agar alim dan cakap memimpin ummat ke jalan yang diridhai oleh Allah. Membina siswa/santri yang dapat berdiri sendiri tanpa menggantungkan hidupnya pada orang lain. K.H. Abd. Jabbar Asyiri, adalah pemimpin Pesantren Gombara, seorang ulama yang hidup sederhana, dalam sikap dan tingkah-laku sehari-hari. Beliau menganggap perlu tujuan pendidikan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Islam, karena hanya dengan jalan ini generasi mendatang dapat diperbaiki. Menurut pandangan K.H. Abd. Jabbar Asyiri, di Sulawesi Selatan makin hari makin berkurang orang yang bisa disebut ulama, sehingga

perlu ada pembinaan kader ulama yang dapat melayani hidup keagamaan masyarakat. Ini pulalah yang mendorong beliau membangun pesantren.

Formulasi tujuan pendidikan pesantren secara terperinci sesungguhnya belum ada. Berdasarkan jawaban para pembinanya tujuan pesantren ialah untuk membentuk manusia yang ahli agama dan mampu berdiri sendiri. Kalau pesantren itu sendiri dilihat secara tersendiri yang merupakan suatu lembaga sosial dan membina sub-kultur dalam lingkungan masyarakatnya, maka tujuannya sekurang-kurangnya turut ditentukan oleh harapan-harapan masyarakatnya. Harapan-harapan orang tua sewaktu menyerahkan anaknya menjadi santri pada kiyai, tujuan untuk suatu jabatan dikemudian hari bagi anaknya tidak pernah disebut-sebut.

B. Sistem Pendidikan

Sesuai dengan bentuk-bentuk pendidikan Islam di Sulawesi Selatan pada umumnya telah memakai sistem pendidikan campuran antara sistem madrasa dan sistem pesantren. Pemakaian sistem campuran ini tidak tergantung dari nama Lembaga Pendidikan itu, apakah namanya Perguruan Islam atau namanya Pesantren Modern, kedua-duanya digunakan.

Sistem madrasa yang digunakan di Madrasah mempunyai jenjang kelas yang sama dengan madrasah-madrasah di Mesir. Selanjutnya lama belajar pada Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun sama dengan pada Sekolah Dasar Negeri, Tsanawiyah 3 tahun sama dengan Sekolah Menengah Pertama (S.M.P.) dan Aliyah 3 tahun sama dengan S.M.A. Tingkatan Madrasah sekarang adalah perkembangan tingkatan kelas sebelumnya, misalnya Madrasah Arabiyatul Islamiyah (M.A.I.)

yang dibangun oleh Haji Sade Wajo tahun 1930 dengan tingkat-tingkat kelas sebagai berikut :

Takhdiriyah 3 tahun, Ibtidaiyah 4 tahun, Tsanawiyah 3 tahun, I'dadaiyah 1 tahun dan Aliyah 3 tahun. Selanjutnya sampai hari ini, tingkat dan jenjang madrasah mengikuti madrasah yang berada di bawah asuhan Departemen Agama. Ciri sistem madrasah adalah klasikal. Pemakaian klasikal bagi madrasah merupakan satu langkah lebih maju daripada sistem kitab bagi pesantren. Sistem kitab adalah ciri bagi pesantren tradisional yang masih tetap dipertahankan sampai sekarang.

Kelas, dalam pengertian kita ialah sekelompok pelajar yang mengikuti pendidikan dalam suatu ruang dan waktu yang sama, mengikuti mata pelajaran yang sama pula serta umur mereka kurang lebih sama. Pendidikan klasikal mengacu kepada masa pendidikan yang harus dilalui oleh pelajar (misalnya satu tahun) sebagai syarat untuk pindah kelas yang lebih tinggi.

Beberapa kalangan agak keberatan untuk menamai Darul Istiqamah sebagai sebuah pesantren, apabila hanya melihat penyelenggaraan pendidikan dengan sistem madrasah. Akan tetapi ada alasan-alasan yang memperkuat pendirian, bila sesuatu lembaga pendidikan mengandung unsur-unsur untuk disebut sebagai pesantren. Sebagaimana halnya Pesantren Darul Istiqamah memiliki unsur-unsur: a). Pesantren ini dibangun dan dipimpin oleh seorang Kiyai (K.H. Marzuki Hasan). b). Pendidikannya dan pengembangannya bertolak dari dasar agama. c). Keseluruhan gaya hidup dan kegiatan dalam pondok senantiasa bersifat agamawi yang dasarnya adalah "karena" dan "untuk" Allah. d). Santri dan Kiyai hidup bersama dalam kampus pesantren, berhubungan satu dengan lainnya secara akrab sepanjang tahun akademis. e). Menggunakan sistem klasikal bagi madrasahnyanya dan sistem kitab bagi pesantrennya.

Sistem kitab yang digunakan dalam pesantren adalah lanjutan dari sistem pesantren tradisional, dan masih digunakan oleh Kiyai dengan alasan untuk membantu siswa madrasah memperdalam dan memperluas cakrawala pengetahuan keagamaannya, berhubungan dengan adanya anggapan bahwa penyampaian ilmu dengan sistem madrasah, tidak cukup memadai. Lagi pula buku-buku yang dipakai kebanyakan dalam bahasa Indonesia kitab *Safinah an-Naja'* oleh Syekh Salim bin Samir, kemudian kitab *Riyadul Badih* oleh Syekh Muhammad Nawawi, selanjutnya kitab *Fathul Qarib* oleh Syekh Muhammad Ibn Qasim. Setelah itu barulah pengembangan pengetahuan Fiqh dengan membaca kitab-kitab lanjutan, biasanya kitab yang mengandung pendapat keempat Imam mazhab.

Darud Da'wah wal Irsyad (D.D.I.) di Pare-pare mendekatkan sistem kitab dengan sistem madrasah, kemudian mengembangkan suatu sistem "ujian kitab" bagi pendidikan pesantrennya, yaitu semacam sistem penilaian yang dilakukan oleh para kiyai dan ulama pengasuh pesantren terhadap pengetahuan santri dalam satu fan dengan memilih sebuah kitab menjadi bahan ujian. Santri yang sudah menjalani proses pendidikan selama jangka waktu tertentu, diuji untuk beberapa fan saja dan apabila ia dinyatakan lulus, ia akan diberi gelar "Kiyai Muda", seolah-olah sama dengan Sarjana Muda di Perguruan Tinggi. Pemberian gelar ini, mungkin karena terdorong oleh kesadaran akan pentingnya daya hasil dan masa depan santrinya, dirasa perlu untuk memberikan simbol-simbol sosial sebagai identitas santri dengan tidak mengurangi daya guna ilmu pengetahuan. Berbeda halnya dengan Perguruan As'adiyah, Pesantren Ma'hadul Hadist di Bone, Darul Istiqamah di Maros dan lain-lainnya, sistem kitab bagi pendidikan pesantrennya masih dipertahankan, tanpa adanya ujian kiyai.

Seorang santri pesantren dari pusat-pusat perguruan,

terutama yang tinggal dalam pondok atau yang berdiam dekat perguruan dapat saja menempuh dua jalur pendidikan, seperti menjadi siswa madrasah di waktu pagi dan menjadi santri pada pesantren di waktu sore. Pengajian diwaktu sore diadakan oleh kiyai untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin menambah ilmunya di bidang ilmu agama, dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengikutinya. Meskipun waktu shalat fardhu lima kali sehari semalam, namun pada umumnya waktu Magrib, Isya dan Subuh merupakan jemaah yang ramai. Di sinilah kiyai atau badalnya (penggantinya) melakukan pengajian kitab secara umum yang dapat diikuti oleh anggota masyarakat. Dalam pengajian tersebut diberikan pelajaran Tafsir dengan kitab Fathul wahab Abi Yahya Zakaria dan pelajaran Hadist dengan kitab Bulughul Muram oleh al-Hafiz Abi Hajr. Pada waktu-waktu tertentu beberapa pengasuh pesantren, terdiri dari santri-santri senior, secara bergilir mengadakan forum pengajian, semacam "majlis ta'lim" di mesjid-mesjid desa. Majlis ta'lim merupakan media da'wah bagi ulama-ulama untuk menyampaikan pelajaran agama kepada masyarakat.

Ilmu-ilmu yang diajarkan, baik kepada santri maupun kepada masyarakat, pada umumnya sama di semua tempat, demikian pula kitab-kitab yang digunakan oleh hampir semua ulama. Perbedaannya terletak pada kualitas ilmu yang dimiliki oleh ulama. Di samping kadar ilmu yang dimiliki, perbedaan pengajaran terletak pula pada orientasi keagamaan dan kedalaman ilmu kiyai dalam memahami suatu masalah keagamaan. Disinilah nampak perbedaan "ulama terkemuka" dan "ulama biasa".

Madrasah-madrasah yang merupakan cabang dari pusat-pusat pendidikan Islam seperti, As'adiyah Wajo, Darud Da'wah wal Irsyad di Pare-pare. Pesantren Darul Istiqamah di Maros dan madrasah-madrasah yang di bawah asuhan

Muhammadiyah, sistem pendidikannya begitu pula pengaturan jadwal mata-pelajaran cenderung mengikuti madrasah-madrasah negeri. Kemudian masing-masing menambah satu atau dua mata-pelajaran sesuai dengan penekanan tujuan yang akan dicapainya. Misalnya Madrasah Muhammadiyah menambah mata-pelajaran ke-Muhammadiyah-an dan mata-pelajaran umum yang memungkinkan murid-muridnya bisa masuk ujian sekolah-sekolah atau universitas negeri, dan itu berarti orientasinya bukan saja untuk ke I.A.I.N. Demikian pula, Pesantren Modern Gombara dan Darul Istiqamah menambahkan mata-pelajaran agama sesuai dengan tekanan tujuan untuk mencetak kader ulama.

Sejak tahun 1975, Perguruan Islam di Sulawesi Selatan telah berusaha mengintensipkan mata-pelajaran madrasah yang meliputi: a). Penggunaan literatur mutakhir, b). Memakai metode-metode mengajar yang efektif, dan c). Melengkapi fan-fan yang ada menurut kebutuhan masyarakat. Isi kurikulum diatur dalam komposisi kurikulum yang dibagi dalam 4 kelompok yang terdiri dari:

- a) Kelompok dasar, seperti Tafsir, Hadist, Fiqh, dan pengetahuan bahasa (Arab dan Inggris)
- b) Kelompok khusus, menurut tingkat/jurusan
- c) Kelompok pelengkap
- d) Kelompok praktis termasuk ekstra kurikuler.

Apabila ditinjau komposisi kurikulum itu, maka yang nampak tercakup di dalamnya adalah: a. Mata pelajaran yang terdiri dari mata-pelajaran agama dan umum, b. Kurikulum ekstra, seperti kepramukaan, perkoperasian, pertanian, peternakan serta pertukangan dan, c. Seluruh pengalaman anak didik yang diterimanya atas pertanggung-jawaban madrasah dan sarana-sarannya.

Perbedaan pengertian antara pelajaran "agama" dan

"umum" di sini, digunakan semata-mata untuk kepentingan analisa sistem pendidikan saja, berhubung adanya anggapan bahwa semua itu termasuk anjuran Islam. Seolah-olah ada pengertian bahwa semua perbuatan baik tercakup dalam ajaran agama. Mengenai pelajaran ketrampilan, meskipun dicantumkan dalam kurikulum, namun pelaksanaannya seringkali ternyata tidak menurut adanya dan yang seharusnya. Hal ini dapat dipahami berhubung karena kesulitan mengenai biaya dan alat-alat ketrampilan untuk digunakan secara intensip oleh para siswa. Mungkin antara lain karena sebab-sebab inilah maka mereka mengikuti kurikulum negeri untuk mendapatkan guru bantuan dari Departemen Agama agar pembiayaan dapat diperhemat supaya sedikit demi sedikit sarana-sarana diperlengkapi.

Penyusunan jadwal pelajaran pada pondok-pondok pesantren disesuaikan dengan jadwal kegiatan sehari-hari para santri dan nampaknya terdiri dari sistem campuran antara sistem pesantren dan sistem madrasah. Di bawah ini dipetik satu contoh jadwal dari pondok Pesantren Darul Istiqamah, pondok Pesantren Gombara dan Pesantren IMMIM. Setelah ketiga sumber data itu diolah nampaklah pola sebagai berikut:

Tabel : 2. Jadwal kegiatan sehari-hari pondok pesantren

No.	J a m	Jenis kegiatan
1.	05.00-05.15	Jamah Subuh di mesjid.
2.	05.15-06.00	Mengaji atau tadarus di kamar masing-masing
3.	06.00-06.30	Senam pagi atau olah raga kelompok.
4.	06.30-07.00	Persiapan ke sekolah.

- | | | |
|-----|-------------|---|
| 5. | 07.00-07.30 | Makan pagi |
| 6. | 07.30-12.15 | Masuk Sekolah |
| 7. | 12.15-12.30 | Sembahyang Dhohor di Mesjid. |
| 8. | 12.30-13.00 | Makan Siang |
| 9. | 13.00-15.30 | Tidur Siang |
| 10. | 15.30-16.00 | Sembahyang Ashar. |
| 11. | 16.00-17.45 | Mengaji kitab/olah raga |
| 12. | 17.45-18.00 | Persiapan sembahyang Maghrib. |
| 13. | 18.00-18.15 | Sembahyang Maghrib. |
| 14. | 18.15-19.15 | Mengaji kitab/menghafal Al-Qur'an. |
| 15. | 19.15-19.30 | Sembahyang Isya. |
| 16. | 19.30-20.00 | Makan malam. |
| 17. | 20.00-22.00 | Tadarus/beyajar di kamar masing-masing. |
| 18. | 22.00-05.00 | Istirahat - tidur. |
-

Madrasah-madrasah yang tidak tergabung dalam suatu pondok pesantren atau perguruan, tetapi merupakan cabang dari salah satu pusat pendidikan dan berada di daerah-daerah pedesaan, maka mereka mengatur sendiri jadwal pelajarannya dengan berpedoman pada kurikulum induknya.

Perbandingan antara mata-pelajaran agama dan umum bervariasi menurut tujuan pendidikan yang akan dicapai, misalnya:

- Perguruan As'adiyah dengan D.D.I. berbanding
60 : 40
- Pesantren Gombara dengan Darul Istiqamah
80 : 20
- Madrasah-madrasah Muhammadiyah
50 : 50

Rupanya kurikulum madrasah-madrasah tersebut tetap mengarah pada pembentukan intelektualisme. Meskipun madrasah swasta mendapat bantuan guru negeri dari Departemen Agama, namun penyelenggaraan pendidikan banyak tergantung pada keadaan alat perlengkapan pendidikan dan sarana gedung yang serba sederhana. Guru bantuan itu termasuk salah satu faktor yang menghemat pembiayaan madrasah swasta.

Faktor ustaz dan guru memegang peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum dan kelulusan di samping faktor lainnya, seperti faktor pimpinan madrasah, faktor murid dan faktor perlengkapan pendidikan serta perpustakaan. Pada umumnya waktu belajar di madrasah swasta (Ibtidaiyah dan Tsanawiyah) diadakan pada waktu sore hari (antara jam 13.00 s/d 18.00). Dengan demikian sebagian murid yang diterimanya adalah mereka yang pada waktu pagi belajar di S.D. dan S.L.P. negeri, sebagian lagi adalah murid-murid yang mengharapkan madrasah sebagai tempat satu-satunya untuk menerima ilmu. Mereka itu adalah anak-anak yang tadinya tidak tertampung di S.D./S.L.P. negeri, terutama karena desanya terletak jauh dari kota.

Kecenderungan lain yang nampak pada keadaan murid-murid di Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah ialah menonjolnya jumlah murid-murid wanita dibanding dengan murid-murid lelaki hampir di semua kabupaten di Sulawesi Selatan¹⁶. Barangkali hal ini ada benarnya apabila kita kembali kepada paham tradisi masyarakat, bahwa wanita adalah pendukung nilai-nilai moral dan perlu dijaga, diberi perlengkapan pendidikan agama untuk membimbing budi pekertinya, agar tidak terjatuh pada perbuatan maksiat. Adat yang bersendi Sara' ini sangat dipertahankan dengan keras dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu wanita mendapat tempat terhormat, dan masyarakat

- | | | |
|-----|-------------|---|
| 5. | 07.00-07.30 | Makan pagi |
| 6. | 07.30-12.15 | Masuk Sekolah |
| 7. | 12.15-12.30 | Sembahyang Dhohor di Mesjid. |
| 8. | 12.30-13.00 | Makan Siang |
| 9. | 13.00-15.30 | Tidur Siang |
| 10. | 15.30-16.00 | Sembahyang Ashar. |
| 11. | 16.00-17.45 | Mengaji kitab/olah raga |
| 12. | 17.45-18.00 | Persiapan sembahyang Maghrib. |
| 13. | 18.00-18.15 | Sembahyang Maghrib. |
| 14. | 18.15-19.15 | Mengaji kitab/menghafal Al-Qur'an. |
| 15. | 19.15-19.30 | Sembahyang Isya. |
| 16. | 19.30-20.00 | Makan malam. |
| 17. | 20.00-22.00 | Tadarus/beyajar di kamar masing-masing. |
| 18. | 22.00-05.00 | Istirahat - tidur. |
-

Madrasah-madrasah yang tidak tergabung dalam suatu pondok pesantren atau perguruan, tetapi merupakan cabang dari salah satu pusat pendidikan dan berada di daerah-daerah pedesaan, maka mereka mengatur sendiri jadwal pelajarannya dengan berpedoman pada kurikulum induknya.

Perbandingan antara mata-pelajaran agama dan umum bervariasi menurut tujuan pendidikan yang akan dicapai, misalnya:

- Perguruan As'adiyah dengan D.D.I. berbanding
60 : 40
- Pesantren Gombara dengan Darul Istiqamah
80 : 20
- Madrasah-madrasah Muhammadiyah
50 : 50

Rupanya kurikulum madrasah-madrasah tersebut tetap mengarah pada pembentukan intelektualisme. Meskipun madrasah swasta mendapat bantuan guru negeri dari Departemen Agama, namun penyelenggaraan pendidikan banyak tergantung pada keadaan alat perlengkapan pendidikan dan sarana gedung yang serba sederhana. Guru bantuan itu termasuk salah satu faktor yang menghemat pembiayaan madrasah swasta.

Faktor ustaz dan guru memegang peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum dan kelulusan di samping faktor lainnya, seperti faktor pimpinan madrasah, faktor murid dan faktor perlengkapan pendidikan serta perpustakaan. Pada umumnya waktu belajar di madrasah swasta (Ibtidaiyah dan Tsanawiyah) diadakan pada waktu sore hari (antara jam 13.00 s/d 18.00). Dengan demikian sebagian murid yang diterimanya adalah mereka yang pada waktu pagi belajar di S.D. dan S.L.P. negeri, sebagian lagi adalah murid-murid yang mengharapkan madrasah sebagai tempat satu-satunya untuk menerima ilmu. Mereka itu adalah anak-anak yang tadinya tidak tertampung di S.D./S.L.P. negeri, terutama karena desanya terletak jauh dari kota.

Kecenderungan lain yang nampak pada keadaan murid-murid di Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah ialah menonjolnya jumlah murid-murid wanita dibanding dengan murid-murid lelaki hampir di semua kabupaten di Sulawesi Selatan¹⁶. Barangkali hal ini ada benarnya apabila kita kembali kepada paham tradisi masyarakat, bahwa wanita adalah pendukung nilai-nilai moral dan perlu dijaga, diberi perlengkapan pendidikan agama untuk membimbing budi pekertinya, agar tidak terjatuh pada perbuatan maksiat. Adat yang bersendi Sara' ini sangat dipertahankan dengan keras dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu wanita mendapat tempat terhormat, dan masyarakat

memandang mulia bila lapangan kerja sebagai guru atau guru agama dilakukan oleh kaum wanita.

Usaha mencatat secara terperinci buku-buku dan kitab-kitab di madrasah dan pesantren belum memuaskan. Perpustakaan madrasah juga amat miskin. Agaknya kitab-kitab tetap tersimpan pada sejumlah kiyai-kiyai atau guru tertentu dan merupakan koleksi sendiri. Usaha pusat-pusat perguruan untuk memperbaiki perpustakaan madrasah di cabang-cabangnya sudah mulai nampak dengan perpustakawan yang keahliannya masih sederhana. Sillabus mata-pelajaran di madrasah mirip dengan buku pedoman dari Departemen Agama, kemudian ditambah dan dikurangi menurut keadaan lingkungan masing-masing. Apabila ditanyakan buku atau kitab yang menjadi pegangan siswa dan guru, pada umumnya hanya mengingat judul kitab tanpa menyebutkan pengarang atau penyusunnya. Hal ini menyukarkan kita untuk menyusun daftar buku, oleh karena sering pengarang berlainan dengan judul kitab yang sama atau pengarang yang sama dengan judul kitab yang berbeda.

Beberapa kitab yang digunakan di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah digunakan pula di pesantren, misalnya: Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Jalalain. Sedang Tafsir Tanthawi Jauhari, Tafsir al-Manar dan Tafsir Ibnu Katsir hanya menjadi bacaan santri, tidak dijadikan bacaan wajib. Pelajaran hadist dipakai oleh madrasah dan pesantren ialah Bulughul Muram, Riyadus Shalihin dan Miftahul Khitabah. Pelajaran Fiqh ialah Kifayatul Akhyar, sedang yang khusus dipakai oleh pesantren adalah Fathul Qarib. Pelajaran Tauhid ialah al-Husunul Hamidiyah dan al-Jawahirul Kalamiyah. Pelajaran Tauhid khusus pesantren adalah Tanwirul Qulub, Risalatul Qusyair dan al-Hikam. Untuk pengetahuan bahasa Arab di pesantren dipakai kitab, Syarah al-Jurumiyah, kemudian al-Jumiyah, lalu Mutammimah dan kemudian untuk kitab tertinggi dalam pengetahuan ini dipa-

kai kitab Alfiah, yaitu terdiri dari 1000 bait syair-syair yang mengandung pokok-pokok dan pola pengetahuan Bahasa Arab (Nahwu/Syaraf dan Balaghah). Untuk kemahiran bahasa Arab ditambah dengan pelajaran Muthalaah, Muhadasah dan Mahfuzat.

Kitab-kitab yang dipakai di madrasah-madrasah negeri maupun swasta pada prinsipnya sama, akan tetapi bobot ilmu yang diberikan banyak ditentukan oleh kadar ilmu dan penguasaan yang dimiliki ustaz/guru. Umumnya kekurangan yang dialami oleh ustaz dan guru agama tamatan P.G.A.N. adalah ketidak-mampuan mereka berbahasa Arab, lebih-lebih dalam mengajarkan Nahwu/Sharaf, dan berbeda dengan mereka yang tammat dari pesantren, yang sudah dibiasakan membaca kitab-kitab gundul (tanpa harakat) dan kemampuannya untuk studi sendiri mempelajari kitab-kitab tinggi dapat terjamin melalui penguasaan bahasa Arab.

C. *Pembaharuan Pendidikan*

Pembaharuan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan dimulai pada awal abad ke XX sejalan dengan kebangkitan Nasional. Pada umumnya dikatakan bahwa pembaharuan sistem pendidikan Islam dibawa oleh Gerakan Islam Muhammadiyah dalam tahun 1926. Akan tetapi baiklah kita meninjau latar belakang perkembangan pendidikan sebelumnya untuk mendapatkan dasar-dasar pengertian mengenai masalah ini.

Untuk berbicara mengenai keadaan di Sulawesi Selatan pada akhir abad ke XIX yang menyangkut masalah pendidikan pada umumnya, baiklah kita bagi Sulawesi Selatan dalam dua daerah yaitu:

- Daerah Kerajaan dan
- Daerah Pemerintahan Hindia Belanda.

Dalam wilayah ini yang meliputi 24 Kerajaan besar dan kecil belum terdapat pendidikan formil yang berbentuk sekolah untuk mengajarkan pengetahuan umum atau agama seperti membaca, menulis, berhitung dan sebagainya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kerajaan maupun yang diselenggarakan oleh penduduk atau oleh badan-badan asing, misalnya zending Kristen atau misi Katholik. Anak-anak, remaja dan orang dewasa belajar ilmu pengetahuan secara perorangan kepada seorang yang ahli dan mahir di kampungnya sendiri atau di kampung lain. Selain itu, anak-anak dididik dalam lingkungan keluarga diajar membaca, menulis atau ilmu lain seperti ilmu bela diri (pencak-silat) dan ilmu kekebalan oleh orang tua sendiri.

Sejak semula diterimanya Islam sebagai agama kerajaan, pemantapan ajaran Islam di dalam masyarakat melalui pendidikan juga digalakkan. Pendidikan agama masa itu masih berkisar pada lingkungan keluarga. Ulama dan mualligh menyiapkan waktu di rumahnya mengajar anak-anak dan remaja, mula-mula diajar membaca al-Qur'an, sedang orang dewasa diajar pengetahuan agama dengan cara da'wah di rumah ulama pula. Penduduk yang berdiam di sekitar rumah ulama datang bersembahyang (waktu Ashar atau Maghrib) di rumah ulama. Pada saat selesai sembahyang ulama menyampaikan nasehat keagamaan yang berkisar pada masalah Rukun Islam dan Rukun Iman.

Kaum bangsawan atau hartawan, biasanya mengundang ulama pada waktu-waktu tertentu untuk memberikan pelajaran agama kepada keluarga dan famili-familinya. Mereka yang mengundang guru mengaji untuk mengajar anak-anaknya mengaji al-Qur'an bersama anak-anak tetangganya.

Pelajaran membaca al-Qur'an bagi anak-anak umur 5-10 tahun diberikan secara berkelompok di rumah guru

mengaji. Bagi anak-anak yang sudah lancar membaca kalimat demi kalimat guru mengaji biasanya menyelenggarakan upacara penamatan. Mereka yang ingin melanjutkan pelajarannya, berangkat pergi mencari ulama lain yang mungkin ada di kampungnya ataupun di kampung lain.

Pada akhir abad ke XIX banyak pemuda pergi mengaji di pulau Salemo, pulau Karanrang, Balanipa (Mandar), Palopo, Wajo dan Bone, karena di tempat-tempat itu terdapat ulama yang masyhur. Tempat yang amat terkenal waktu itu adalah di pulau Salemo. Di pulau ini datang seorang ulama dari Gresik kemudian berdiam di Salemo sambil berda'wah keliling pulau-pulau yang terletak di Selat Makassar. Pesantrennya banyak menarik pemuda-pemuda dari daratan Sulawesi Selatan. Pemuda-pemuda itu pada umumnya hanya dibekali oleh orang tua atau keluarganya pada waktu mulai berangkat. Hal ini berarti bahwa di samping pemuda-pemuda itu mencari di tempatnya ilmu ia harus pula berusaha sendiri mencari nafkah hidupnya.

Di daerah Pemerintahan Hindia Belanda, seperti Bantaong, Makassar dan Maros dalam akhir abad ke XIX di masa Dr. B.P. Matthes bekerja sebagai pegawai pada Beybel genootschap di Sulawesi Selatan telah ada Sekolah Dasar untuk pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja orang Belanda. Gurunya hanya seorang pada setiap sekolah, yaitu pendeta gereja Belanda. Sekolah-sekolah itu diperuntukkan bagi anak-anak Kristen, yaitu anak-anak pegawai dan serdadu-serdadu Pemerintah Hindia Belanda setempat. Akan tetapi anak-anak lain yang bukan Kristen dapat pula diterima sepanjang tempat mengizinkan¹⁷.

Dalam tahun 1876 atas desakan B.P. Matthes, pemerintah kerajaan Belanda membuka Sekolah Guru (Kweek School) yang pertama di Makassar, lamanya 3 tahun. Pada tahun 1879 sekolah guru tersebut menamatkan muridnya

yang pertama sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan adanya guru-guru baru ini Pemerintah Hindia Belanda membuka tiga Sekolah Rakyat. Dalam tahun 1883 jumlah Sekolah Rakyat sudah mencapai 10 buah¹⁸. Sementara Pemerintah Hindia Belanda membangun sekolah-sekolah umum, keadaan pendidikan Islam masih terus berjalan sebagaimana halnya dari dahulu, yaitu sistem pesantren atau mengaji pondok kepada ulama-ulama yang terkenal di berbagai tempat.

Pada akhir abad ke XIX dan permulaan abad ke XX arah politik kolonial Belanda di Indonesia diperbaiki dengan adanya apa yang dikenal dengan Politik Etisch. Arah politik kolonial itu pertama-tama diucapkan secara resmi oleh Van Dedem di dalam Parlemen. Ia menekankan tentang keharusan memisahkan keuangan Indonesia dari keuangan Negara Belanda. Hal ini pula yang dikecam oleh Van Deventer dalam karangannya yang berjudul "Een Eereschuld" (hutang kehormatan). Kolonialis Belanda telah mengambil berjuta-juta rupiah dari penghasilan rakyat. Oleh karena itu kaum Etisch menuntut supaya keuntungan itu dikembalikan kepada Indonesia dengan jalan memajukan kesejahteraan rakyat umum, memperjuangkan desentralisasi pemerintahan serta penggunaan tenaga pribumi dalam administrasi pemerintahan dan itu dikenal dengan Trilogi Van Deventer, yaitu Irigasi, migrasi dan Edukasi. Ketiga unsur itulah yang dikenal sebagai pangkal pelaksanaan politik Etika Belanda di Indonesia.

Hampir bersamaan waktunya pemerintah menghapuskan perbudakan di Sulawesi Selatan dan selanjutnya berusaha menegakkan hukum peradilan. Golongan bangsawan dan raja-raja di tempatkan kembali untuk memerintah daerahnya dengan kedudukan sebagai kepala Distrik (Regen) atau pun sebagai Kepala Adat Gemeenschap. Maksud Belanda ialah agar supaya golongan pribumi ikut bertanggung jawab atas pemerintahan daerahnya dan Belanda

bermaksud mengikat golongan pejabat-pejabat adat ini untuk melaksanakan kepentingannya.

Dalam rangka memenuhi keperluan tenaga administrasi pemerintahan, maka dibukalah sekolah-sekolah di ibu kota afdeling atau onderafdeling. Mulai dari *Volkschool*, *Vervolkschool*, *Normaalschool* dan Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, seperti H.I.S., E.L.S., MULO dan Osvia.

Raja-raja dan bangsawan yang ditempatkan memerintah bangsanya sendiri, pada hakekatnya menjalankan kepentingan Belanda, dan harus menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Timbullah keresahan di kalangan raja-raja dan bangsawan terhadap cara-cara dan sikap orang Belanda. Para Ulama, sejak kembalinya Indonesia dari tangan Inggeris ke tangan Belanda tidak pernah memberi hati terlalu banyak kepada Belanda dan tetap memantapkan ajaran Islam di kalangan masyarakat melalui pendidikan dalam bentuk pesantren, bahkan turut pula tidak senang kepada raja-raja dan bangsawan yang taat kepada perintah Belanda. Awal abad ke XX itu ditandai dengan ketegangan di mana-mana dan setiap saat dapat menjelma menjadi perlawanan bersenjata.

Sementara belum sembuh benar luka-luka akibat perang saudara antara kerajaan-kerajaan Bugis di satu pihak dan kerajaan-kerajaan Makassar di lain pihak sejak abad ke XVI s/d XIX, sudah muncul musuh yang harus dilawannya. Adanya musuh yang dianggap dari luar, yaitu Belanda yang membuat mereka tidak puas dengan tingkah-laku mereka di negerinya sendiri, maka kerajaan-kerajaan Bugis yang dipelopori oleh Raja Bone dan kerajaan-kerajaan Makassar yang dipimpin oleh Raja Gowa kembali sadar dan bersatu. Mereka memaklumkan perang kepada Belanda dalam tahun 1905 — 1906. Ulama dan para Santri menjadikan lembaga

pesantren sebagai basis perjuangannya dengan tema untuk memerangi orang kafir.

Peperangan ini merupakan perang yang besar, karena itu Belanda membentuk Zuid-Celebes expeditie. Ekspedisi ini dibentuk setelah ekspedisi ke satu dan ke dua mengalami kegagalan. Dalam ekspedisi ke tiga (tahun 1906) inilah Belanda memperoleh kemenangan setelah melalui pertarungan yang hebat dan menelan banyak korban. Meskipun lasykar-lasykar Bugis—Makassar yang bergabung telah kalah, namun perlawanan di berbagai tempat oleh lasykar yang mengundurkan diri tetap berjalan terus sampai pada tahun 1914. Kemenangan Belanda ini mengakibatkan penyusupan kekuasaan sampai jauh ke pedalaman Sulawesi Selatan dan mencampuri urusan-urusan tidak saja di bidang keamanan dan perekonomian rakyat, tetapi hampir di semua bidang kehidupan.

Perubahan pandangan dan peningkatan kecerdasan rakyat banyak disebabkan oleh masuknya organisasi dan Gerakan Islam di Sulawesi Selatan, di samping juga karena sebagian besar putera Sulawesi Selatan pernah belajar di Mekkah untuk beberapa tahun, kini telah kembali di negerinya. Kedatangannya sebagai ulama dan pengalamannya di Mekkah mengenai situasi keagamaan dan sistem pendidikan Islam akan turut mempengaruhi dalam mengamalkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Partai dan organisasi Islam turut pula mempercepat kecerdasan rakyat dan kesadaran tentang arti kemerdekaan dari penjajahan. Partai dan organisasi Islam itu mencari simpati rakyat melalui tabligh dan membuka lembaga-lembaga pendidikan.

Keadaan umum di Sulawesi Selatan pada awal abad ke XX hampir sama di seluruh Indonesia, yaitu ditandai dengan munculnya organisasi perjuangan untuk menyongsong Indonesia merdeka. Demikianlah di kota Solo dalam tahun

1911 muncul suatu perkumpulan yang dinamai "Sarekat Dagang Islam" yang didirikan oleh Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik dari Solo. Setahun kemudian (1912) H.O.S. Tjokroaminoto merubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi "Sarekat Islam", anggotanya tidak lagi terbatas pada pedagang batik, tetapi dapat menerima anggota dari segala lapisan masyarakat. Dengan dasar kerakyatan, Sarekat Islam berkembang dengan pesatnya, akhirnya sampai ke Sulawesi Selatan.

Sarekat Islam mendirikan cabangnya di Makassar dalam tahun 1916 atas usaha beberapa orang pedagang, dan di antaranya ialah Ince Abdul Rahim, Ince Tajuddin dan Baharuddin. Perkumpulan ini adalah yang pertama dan satu-satunya di Sulawesi Selatan dalam tahun itu. Pengaruhnya bertambah pesat sampai ke pedalaman dan banyak mendapat simpati dari anggota masyarakat. Ulama dan sebagian besar orang yang telah memperoleh pendidikan agama yang selama ini tidak senang melihat syariat Islam dikotori oleh perbuatan perjudian, minum tuak, perzinahan dan sebagainya, di samping bencinya kepada penjajahan, maka dengan datangnya Sarekat Islam mereka segera menyambutnya. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pengurus organisasi baru ini, baik dengan tabligh maupun melalui saluran-saluran penerangan di mesjid-mesjid dan tempat-tempat ibadah lainnya, mengobarkan perjuangan rakyat menuju Indonesia merdeka.

Dalam tahun 1917 di Makassar berdiri suatu perkumpulan yang bernama Assiratal Mustakim, didirikan oleh M. Kasim, Bidal dan Haji Abd. Razak. Kemudian dalam waktu yang singkat ia mendirikan cabang-cabangnya di Gowa, Pangkajene dan Maros. Perkumpulan ini bergerak di bidang pendidikan dan da'wah Islamiyah. Dalam bidang pendidikan, perkumpulan ini mendirikan Madrasah Diniyah, satu-satunya sekolah waktu itu yang berkedudukan di kampung

Pisang, Makassar. Pemerintah Belanda senantiasa mengawasi gerak-gerik perkumpulan baru itu, demi menjaga kemenangannya yang telah susah payah diperolehnya dalam tahun 1906 atas raja-raja Bugis-Makassar. K.H. Abdullah Dahlan yang kemudian menjadi Pengurus Perkumpulan bersama-sama dengan H. Mahmud, H. Jafar, H.M. Amin dan H. Yahya, kemudian menjadi pelopor berdirinya Gerakan Islam Muhammadiyah di Makassar dalam tahun 1926. Mula-mula Muhammadiyah diperkenalkan oleh Mansyur al-Yamani pada tahun 1923, seorang pedagang batik dari Surabaya dan telah mempelajari Muhammadiyah di Yogya. Perkumpulan Assiratal Mustakim merupakan batu loncatan terbentuknya Muhammadiyah. K.H. Abdullah adalah seorang ulama asal Sulawesi Selatan yang pernah belajar agama Islam di Mekkah selama 10 tahun. Dalam tahun 1914 ia kembali ke Makassar, bertepatan dengan masa pemerintahan Raja Ibnu Suud di Mekkah. Ia menyiarkan agama Islam dengan membuka pesantren di rumahnya dan mengadakan tabligh. Dari uraian-uraian mengenai ajaran Islam, nampak bahwa K.H. Abdullah sudah terpengaruh faham Wahabi di Mekkah. Pada tahun 1921 saat beliau memimpin Assiratal Mustakim, ia menyerukan secara terbuka bahwa tak ada shalat Dhohor setelah sembahyang Jum'at. Pernyataan itu menggemparkan kota Makassar, sehingga Kali Makassar Makmun Dg. Rakka mengadukannya ke pengadilan. Akan tetapi pengadilan memutuskan K.H. Abdullah bebas dari segala tuntutan, maka makin masyhurlah namanya ke seantero pelosok Sulawesi Selatan¹⁹.

Setelah kegiatan Muhammadiyah menonjol dalam masyarakat, perjuangannya ditujukan untuk menghapuskan segala macam kemusyrikan dalam segala jenis, bentuk dan perwujudannya, muncullah tantangan dari dua arah. Pertama datangnya dari ulama-ulama tradisional, yang bekerja

sama dengan golongan cendekiawan yang berpendidikan barat dan pejabat adat yang sudah merasa puas dengan suasana keagamaan. Ulama tradisional yang umumnya pejabat Sara' melemparkan tuduhan bahwa Muhammadiyah berusaha merubah agama, karena melarang mengulangi shalat dhohor sesudah sembahyang Jum'at, melarang membaca talqin di atas kuburan, tidak melakukan sembahyang Tarwih 20 rakaat, tidak mau makan makanan upacara kematian dan melarang ziarah kuburan serta tempat-tempat keramat. Kedua, tuduhan yang datang dari golongan cendekiawan (Nasionalist), melemparkan tuduhan bahwa Muhammadiyah adalah pemecah belah persatuan bangsa, membuat anggota masyarakat gelisah dan hilang pegangan. Sebagian ulama Sulawesi Selatan yang tidak tergabung dalam dua golongan tersebut menyatakan diri mendukung Muhammadiyah setelah mereka menyelidiki bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam.

Perhatian utama Muhammadiyah tertuju kepada usaha pembangunan tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah agama, rumah-rumah pemeliharaan anak-anak yatim serta mendirikan kursus-kursus keagamaan dan pengajian.

Pokok-pokok ajaran yang dibawakan ialah memberantas kemusyrikan, khurafat dan tahyul. Mengajak ummat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang asli yang berdasar al-Qur'an dan Hadist. Di bidang pengajaran Muhammadiyah, berusaha mendirikan lembaga-lembaga pendidikan model klasikal, baik yang berwujud Madrasah modern Mesir (kurikulum sekuler di samping kurikulum ilmu-ilmu agama), maupun sekolah-sekolah umum dan kejuruan model Belanda, seperti Standard School, Schakel School.

Sejak berdirinya Muhammadiyah di Makassar tidak sedikit rintangan yang dihadapinya, baik dari pihak yang berkuasa maupun dari masyarakat Islam sendiri. Raja-raja

Zelfbestuur melarang Muhammadiyah berdiri dalam daerah kekuasaannya. Terkenal Zelfbestuur Bone yang paling keras melarang Muhammadiyah masuk ke dalam daerahnya, namun ulama yang tidak tergabung dalam pejabat Sara' secara perorangan masuk menjadi anggota Muhammadiyah.

Beberapa daerah pedalaman memohon dari Konsul Muhammadiyah di Makassar agar mendirikan cabang-cabangnya di daerah pedalaman, seperti permohonan dari daerah Sengkang (Wajo), Rappang, Pangkajene, Maros, Majene dan Bantaeng. Konferensi Muhammadiyah yang pertama se-Sulawesi Selatan mengambil tempat penyelenggaraannya di kota Sengkang, ibu negeri onderafdeling Wajo dalam tahun 1928. Musyawarah dilangsungkan atas perlindungan Arung Matowa Wajo dan dibantu oleh *Anregurutta* Haji Sade yang banyak memegang peranan dalam konferensi tersebut. Konferensi berjalan lancar dan berhasil merumuskan beberapa pokok-pokok pikiran mengenai masalah sosial dan keagamaan, terutama di bidang pembaharuan sistem pendidikan Islam.

Anregurutta Haji Sade, demikian nama yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, seorang ulama Sulawesi Selatan asal Wajo lahir di Mekkah dalam tahun 1907. Beliau kembali ke Indonesia setelah gerakan Wahabi berkuasa di Mekkah. Mula-mula beliau mendirikan pesantren di Wajo dan dari pesantren inilah beliau melancarkan pelajaran dan da'wah Islamiyah ke seluruh lapisan masyarakat untuk membe-rantas penyembahan berhala dan khurafat. Kemudian dalam bulan Mei 1930 pesantren tersebut dikembangkan dengan mendirikan Madrasah Arabiyatul Islamiyah (M.A.I.) sebagai bagian dari pendidikan pesantren. Dalam madrasah tersebut mulai digunakan sistem klasikal.

Dari uraian-uraian di muka nampak jelas bahwa pembaharuan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan dimulai

sejak berdirinya Gerakan Islam Muhammadiyah. Pembaharuan pendidikan Islam dipelopori oleh dua orang ulama besar, yaitu K.H. Abdullah Dahlan dan K.H.M. As'ad (Haji Sade). Keduanya mempunyai latar-belakang pendidikan yang sama, yakni sama-sama pernah belajar di Mekkah dan kembali ke Indonesia setelah mendapat pengaruh aliran pendidikan modern di Mekkah (Darul Falah dan Darul Ulum di Mekkah). Demikian pula dua kota yang menjadi pusat penyebaran pembaharuan ialah kota Makassar dengan Perguruan Muhammadiyah dan kota Sengkang (Wajo) dengan Perguruan As'adiyah. Pembaharuan yang dimaksud ialah pembaharuan sistem kurikulum serta kitab-kitab dan organisasi lembaga pendidikan yang teratur dan pembagian tugas yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sementara Muhammadiyah membangun madrasah-madrasah dengan sistim klasikal dan Haji Sade menyelenggarakan pendidikan pesantren dan madrasah dalam tahun 30-an, di berbagai tempat tetap bertahan pesantren tradisional (gaya lama), seperti yang dipimpin oleh Haji M. Tahir Imam Lapeo di Majene, Haji M. Ramli Kali Palopo di Palopo (Luwu), Haji Husein bin Umar di Bone, Haji Katu di Soppeng dan Haji M. Tahir di Sinjai. Pesantren-pesantren tersebut kini sudah tidak ada lagi sejak tahun 50-an, antara lain karena sebagian ulama pembinanya sudah meninggal dan sebagian lagi karena ulama pembina dan kader-kadernya terserap oleh Jawatan Agama, menjadi pegawai atau menjadi guru agama di sekolah-sekolah umum.

Mengenai keadaan Islam sesudah tahun 1950, maka sebagian ulama yang masih tetap bertahan dalam lembaga pendidikannya, seperti halnya Perguruan As'adiyah, melebarkan sayapnya dengan pembukaan cabang-cabangnya untuk menggantikan pesantren-pesantren gaya lama yang sudah mati. Dalam waktu 20 tahun, yaitu antara 1950 s/d 1970 Perguruan As'adiyah telah membuka cabang-ca-

bangnya sejumlah 198 buah dari jenjang Ibtidaiyah, Tsanawiyah, P.G.A. dan Sekolah-sekolah Dasar Islam hampir di semua Kabupaten Sulawesi Selatan.

Pembangunan madrasah-madrasah yang menggunakan sistem klasikal makin ramai setelah Darul Da'wah wal Irsyad (D.D.I.) yang didirikan pada 17 Pebruari 1947 di daerah Swapraja Soppeng, membuka cabang-cabangnya di Kecamatan-kecamatan Sulawesi Selatan. Di samping itu Gerakan Islam Muhammadiyah dalam periode ini tidak ketinggalan membuka juga cabang-cabangnya di Kabupaten-kabupaten di mana terdapat pengurus Muhammadiyah.

Ketiga Perguruan Islam, yaitu As'adiyah, D.D.I. dan Muhammadiyah sama-sama merupakan pusat pendidikan Islam yang cabang-cabangnya terdapat di desa-desa, sebagai pusat pendidikan yang tergolong maju dan modern. Lebih pesat lagi majunya sejak tahun 1970 dengan pembukaan Fakultas-fakultas di Kabupaten-kabupaten yang memintanya sebagai Filial dari Fakultas induknya. Kecenderungan lain dalam pendidikan Islam di Sulawesi Selatan sekitar tahun 70-an ialah hampir tak adanya minat tammatan Aliyah untuk memperdalam pengetahuan keagamaannya di pesantren karena terpengaruh oleh kegunaan praktis ilmu agama yaitu menjadi guru agama di Sekolah-sekolah umum yang memang banyak dibutuhkan oleh Jawatan Agama. Para ulama cepat menyadari keadaan ini dan berusaha untuk kader-kader ulama. Sadar akan pentingnya hal ini, maka dalam periode 70-an berdirilah Pondok Pesantren Darul Istiqamah, Pesantren Modern Muhammadiyah Gombara, Pesantren Ma'hadul Hadist di Bone dan Pesantren Al-Qamar di Takalar.

D. Perbedaan Aliran Dalam Pendidikan

Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan kepada ulama pembina Lembaga Pendidikan Islam mengenai

aliran apa yang dianut hampir semua orang memberi jawaban yang sama: Ahlus Sunnah wal Jamaah dan aliran Muhammadiyah. Kedua istilah ini merupakan anutan yang dipegang teguh dan turut mewarnai kehidupan pendidikan di Sulawesi Selatan.

Dalam lingkungan pesantren dan madrasah serta masyarakat tertentu, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai pengertian yang khusus. Pengertian-pengertian itu sedemikian khasnya, sehingga perkataan itu kadang-kadang lebih merupakan istilah ideologis yang menggambarkan secara menyeluruh pandangan hidup ummat Islam dan dunia pendidikan dari pada sekedar istilah ilmu Tauhid atau ilmu Aqidah.

Ajaran Islam didukung oleh empat macam cabang ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai ilmu pengetahuan Syariat (Sara' = Bugis/Makassar), yaitu Ilmu Tafsir, Hadist, Tauhid dan Ilmu Fiqh. Ilmu Tafsir dan Hadist menjadi sumber pembahasan bagi ilmu Tauhid dan ilmu Fiqh. Sekarang ini jika disebutkan Syariat, maka pada umumnya yang dimaksud ialah tekanannya kepada Fiqh. Dunia Islam mengenal adanya empat aliran Fiqh (hukum), yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali yang telah terbentuk sekitar abad kedua Hijrah. Di Indonesia, umumnya dianut mazhab Syafi'i. Perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu dihubungkan dengan Syafi'i karena menjadi mazhabnya.

Dasar dan sumber pengambilan hukum menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah al-Qur'an, al-Hadist, al-Qiyas dan al-Ijma'. Keempat sumber hukum ini harus dilihat dan dipegang bersama-sama dan secara utuh. Golongan Islam yang tidak berpegang kepada keutuhan empat sumber hukum ini, tidak terhitung masuk Ahlus Sunnah Wal Jamaah seperti aliran yang dianut oleh Muhammadiyah dan golongan yang sefaham dengan mereka. Muhammadiyah cenderung

tidak mengakui al-Ijma' dan al-Qiyas sebagai sumber hukum dan mengembangkan sistem sendiri yang disebutnya Ijtihad. Menurut Muhammadiyah pintu Ijtihad belum tertutup berbeda dengan golongan yang menganggap pintu Ijtihad sudah ditutup karena oleh para Imam Mazhab. Betapapun juga, agak sulit membedakan secara mendasar antara aliran yang menganut doktrin Ijtihad dan aliran yang menganut Ijma'/Qiyas di dalam kenyataan masyarakat.

Pada mulanya di Sulawesi Selatan tidak ada perbedaan antara aliran Fiqh yang dianut oleh para ulama dan yang dianut oleh masyarakat umum, meskipun dalam tahun 1820 masuk aliran Suluk yang menganut Aqidah Wihdatul Wujud. Aliran ini dibawa oleh Syekh Abdul Munir dalam satu wadah Suluk yaitu Tharikat Khalwatiyah Samman yang silsilahnya berasal dari seorang ahli tharikat bernama Syekh Muhammad Ibnu Syekh Abdul Karim as-Samman al-Qadiriyy al-Khalwatiy al-Madaniy, disingkat Syekh Muhammad Samman. Tharikat ini adalah cabang dari Tharikat Suhrawardi Shiddiqiyah. Tharikat ini mengakui Syafi'i sebagai mazhabnya dan mengakui pula empat sumber hukum tersebut di atas. Dengan demikian, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dengan teologi (alqidah) yang berbeda.

Setelah Muhammadiyah masuk ke Sulawesi Selatan pada tahun 1926, mulai timbul perbedaan aliran, dalam arti sudah ada golongan dalam masyarakat yang menganut aliran lain selain mazhab Syafi'i. Muhammadiyah tidak terikat pada salah satu mazhab yang sudah diakui oleh dunia Islam itu, akan tetapi mereka menempuh jalan Ijtihad. Bagi setiap gejala sosial yang muncul dicarinya dalil-dalil yang kuat. Pertama-tama dicarinya sumber-sumber dari al-Quranul Karim bersama Hadist. Apabila dalil-dalil itu cukup kuat, itulah yang akan dipegang dan disampaikan kepada semua warga Muhammadiyah sebagai pegangan dan amalan.

Untuk melanjutkan amalan-amalan ke-Muhammadiyah-an ke dalam masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan, didirikanlah Lembaga Pendidikan sebagai media da'wah yang berbentuk Madrasah dengan sistem klasikal yang berbeda dengan bentuk pesantren waktu itu. Memang pada mulanya Muhammadiyah mendapat tantangan dari berbagai pihak termasuk ulama Ahlus Sunnah yang kuat berpegang kepada doktrin mazhab Syafi'i, akan tetapi lambat laun Muhammadiyah disenangi oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena pelopor berdirinya adalah seorang ulama bekas pendidikan Mekkah K.H. Abdullah Dahlan, yang kemudian dibantu oleh Anregurutta Haji Sade, seorang ulama asli putera Sulawesi Selatan, bekas pendidikan Mekkah juga yang amat disegani oleh anggota masyarakat.

Anregurutta Haji Sade, pembangun pertama Perguruan As'adiyah yang namanya dinisbahkan menjadi nama Perguruan tersebut, tetap menjadi tokoh legendaris di kalangan masyarakat Islam Sulawesi Selatan. Beliau bukanlah seorang Muhammadiyah dan pesantrennya tetap dibina menurut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi di dalam pengajarannya ia menempuh cara-cara moderat untuk mendamaikan semua prinsip-prinsip aliran yang sedang berkembang. Betapapun, Perguruan As'adiyah turut membentuk dan memberi pola pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Datangnya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan dianggap juga mendatangkan pembaharuan sistim pendidikan Islam.

Prinsip-prinsip moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam harus dipertahankan. Hal itu nyata dalam pemakaian kitab-kitab dalam madrasah dan pesantren, di mana kitab yang dipilih adalah yang secepat mungkin tidak terlalu ekstrim menganut salah satu mazhab. Oleh karena itu pada tingkat tinggi dari madrasah atau di pesantren Tinggi diberikan pelajaran perbandingan mazhab. Karena santri yang dapat sampai pada tingkat tertinggi sangat kurang, maka relatif pelajaran ini jarang sekali.

Prinsip moderat itu digunakan pula dalam pemberian pelajaran kepada masyarakat umum (majlis Ta'lim) di mesjid dengan menggunakan Tafsir al-Jalalain, Riyadhus Salihin dan Bulughul Muram dan kepada santri-santri dianjurkan membaca Tafsir al-Manar, Tafsir al-Maragi dan Bi-dayatul Mujtahid, karena kitab-kitab tersebut agak netral mengenai mazhab.

POLA UMUM PERTUMBUHAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Di bagian depan telah disinggung proses perkembangan Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan yang melihatannya mengalami perkembangan pasang surut mengikuti keadaan sosial-politik daerah. Banyak tempat-tempat pengajian dan pesantren yang pernah tumbuh, kemudian hilang karena berbagai sebab dan muncul lagi pesantren sejenisnya di tempat lain. Tidak diketahui pasti, kapan muncul pendidikan Islam model pengajian atau pesantren. Pengetahuan kita terbatas pada perkiraan bahwa tempat-tempat pengajian itu muncul sejak dimulainya usaha memantapkan ajaran Islam oleh ulama pelopor masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Demikian pula, usaha-usaha untuk memberikan batasan pengertian tentang pesantren atau pengajian selalu tidak memuaskan. Dalam uraian ini akan dicoba digambarkan secara umum pertumbuhan Lembaga Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Nampak bahwa bentuk Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan mempunyai banyak ragam dan variasi dalam pertumbuhannya, namun dalam proses pertumbuhan itu terdapat suatu pola umum.

A. *Tingkat - Tingkat Pertumbuhan Pendidikan*

Sejak Islam diterima sebagai agama kerajaan pada permulaan abad ke XVII, maka melalui perlindungan raja aga-

ma Islam disebarkan ke dalam masyarakat oleh para ulama dan muballigh sampai ke pedalaman. Segera pula dibentuk parewa Sara' untuk mengurus masalah keagamaan masyarakat.

Tingkat pertama ialah pendidikan di lingkungan rumah tangga (keluarga). Anak-anak dalam usia peka (antara 5 - 10) diajarkan membaca al-Qur'an oleh orang tuanya atau mengirimnya kepada seorang guru mengaji. Mula anak-anak diajar membaca huruf-huruf Arab (harfu hijaiyah) dengan cara mengeja satu demi satu huruf kemudian merangkai-kannya kata dengan kata sehingga terbentuk satu satuan kalimat. Tiga huruf yang dieja disambung dengan huruf lainnya sampai terbentuk satu kata. Bacaan pertama diulangi lagi beberapa kali sampai si anak setengah hafal dan mengenal harakat tiap kata. Mengaji dilakukan di waktu pagi dan sore. Tiap memulai mengaji lebih dahulu dibaca bacaan yang baru dilalui untuk terus menghubungkan ingatan si anak dengan bacaan. Sebagai misal, di bawah ini dicantumkan cara mengeja dalam bahasa Bugis:

Tabel : 3. Cara mengeja huruf-huruf Arab dalam bahasa Bugis.

Misal	إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
alefu riawana i	ا
nun saddu riwawona nna	ن
lameng saddu lēpana lla, ha riwawona ha	لله
aing riwawona 'a	ع
lameng lēpana la	لني
kefek dapenna ku	ك
lameng saddu riawana lli	ل
syinumpuno ya riwawona syae	ش

amsa dua riawana ing
qapu riwawona qa
dalempuno ya riawana diy
ra dua dapenna rung

"Inna llaha ala kulli syaing qadiyrung"

ي
ق
دي
ر

Apabila huruf-huruf ini sudah dikenal, barulah pindah membaca juz Amma, yaitu juz ke 30 dari al-Qur'an yang biasanya dibukukan tersendiri, dan disebut pula *korang baiccu* (Bugis), *kerang caddi* (Makassar) yang terdiri dari Surah-surah pendek. Surah-surah ini dibaca oleh anak-anak secara turutan dengan diantar oleh gurunya. Lama-kelamaan anak-anak akan mengertinya, bahkan dapat pula menghafalnya. Akhirnya semua Surah dalam juz ke 30 itu tammat dibaca. Pengajian dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 5 sampai dengan 10 orang anak di rumah guru mengaji. Guru mengaji tidak menerima upah dari orang tua anak-anak. Akan tetapi selain anak-anak membantu gurunya mengambil kayu bakar dan lain-lain pekerjaan rumah tangga, menjadi kebiasaan pula bahwa bila anak-anak sudah tammat juz ke 30 itu diadakanlah upacara penammatan di mana masing-masing orang tua mengantarkan hadiah berupa beras, kelapa, kain-kain kepada guru. Besar kecilnya pemberian dan upacara banyak tergantung dari kemampuan orang tua.

Selanjutnya bila anak-anak pindah membaca juz pertama dari al-Qur'an, mereka diantar sekali atau dua kali oleh guru, lalu mengulang beberapa kali sampai licin. Akhirnya anak-anak mampu membaca sendiri tanpa diantar. Dalam hal demikian anak-anak disebut *maddupa*, artinya sudah terbukti mengerti dan tahu membaca. Pengetahuan membaca seperti ini akan ditingkatkan lagi dengan memberikan pe-

ngetahuan tentang seni baca. Anak-anak, di samping membaca diperkenalkan dengan hukum-hukum *Tajwid* (fonologi), dengan cara sebutan, hukum-hukum asimilasi bunyi, tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Penggunaan hukum-hukum bunyi dalam bacaan disebut *sarabbaca*. Waktu yang diperlukan untuk menamatkan seluruh-surah-surah al-Qur'an tidak ditentukan tergantung dari kemampuan *sarabbaca* yang dimiliki tiap anak. Seorang guru mengaji dapat menghadapi satu atau lebih kelompok mengaji, yaitu kelompok pemuda dan kelompok anak mengaji lanjutan. Dalam kata lain ada kelompok al-Qur'an kecil dan kelompok al-Qur'an besar. Guru mengaji dapat terdiri dari seorang ulama atau ustaz yang memang ahli di bidangnya. Apabila anak-anak sudah lancar membaca al-Qur'an dan dianggap oleh guru sudah dapat melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi, maka diadakanlah upacara penammatan. Cara pelaksanaan upacara sama dengan penammatan korang baiccu (al-Qur'an kecil = Juz Amma).

Tingkat kedua dari pertumbuhan lembaga pendidikan ialah adanya pengakuan anggota masyarakat terhadap kelebihan seorang ulama, ustaz di bidang ilmu agama, sehingga anggota masyarakat mengirimkan anaknya untuk memperdalam pengetahuannya.

Mula-mula anak-anak remaja diajarkan dasar-dasar pengetahuan ilmu *Sharaf* dengan memakai sebuah kitab yang disebutnya *Sarafe galappo*, yaitu sebuah kitab (semacam diktat yang tidak dikenal pengarangnya) yang amat praktis susunannya. Kitab itu mulai memperkenalkan bentuk kata kerja dasar (*verb*), *Tsulasi Mujarrad*, lalu *Tsulasi maziyd* dan *Rubai mujarrad*. Kemudian isim (noun), mulai *isim mashdar*, *isim fail*, *isim maf'ul*, *isim zaman*, *isim makān* dan *isim alat*. Tiap kata kerja, *fiel madhi* (past tense), *fiel mudhari* (present and future tense) dan *fiel amar* (im-

perative), demikian pula bentuk isim (noun) dieja menurut fungsinya, seperti di bawah ini:

Tabel 4. Dasar-dasar pengetahuan Sharaf dieja dalam bahasa Bugis.

1. Faala fele madhi gauklalo, purai mabbiru	فَعَلَ
2. Feele mudhare gauk mangguju, mattipi mabbiru	يَفْعَلُ
3. Ismudareng aseng omporeng, omporong mabbiru	فَعْلًا
4. Isimpaileng aseng tomabbiru, iyanaritu topanwiru	فَاعِلٌ
5. Isimmafeulung aseng toriwinru, iyanaritu riwinru	وَذَلِكَ مَفْعُولٌ
6. Fèllung amareng gauk passurong, abbinrukko siyo	إِفْعَالٌ
7. Fele nahi gauk pappesangka, aja siyo muabbiru	لَا تَفْعَلْ
8. Ismu zamang aseng wettu, wettu mabbiru	مَفْعَلٌ
9. Ismu makang aseng onrong, onrong mabbiru	مَفْعَلٌ
10. Ismu alate aseng parewa, parewa mabbiru	مَفْعَلٌ

Kata-kata Arab di atas merupakan pola bagi pembentukan kata kerja dan kata benda lainnya, seperti bentuk kata

mudha'af, ajwaf, mitsal, nāqish, dan bentuk kata *latif*. Masing-masing kata ini dieja seperti di atas menurut fungsinya dan perubahan-perubahan bentuk itu dihafal luar kepala.

Kemudian mulai menghafal perubahan-perubahan bentuk kata menurut jumlahnya (mufrad = singularis, mutsan-na = dualis, jama' = pluralis) dan jenis kelamin (muzakkar = masculin, muannast = feminin) serta *dhamir gaib, muk-hātab* dan *mutakallin*. Misalnya 'past tense' *nashara* (menolong); *Nashara, nasharaa, nasharuw, nasharat, nasharataa, nasharna, nasharta, nashartuma, nashartum, nasharti, nashartuma, nashartunna, nashartu, nasharna*. Demikianlah perubahan-perubahan kata kerja dan kata benda yang seluruhnya berjumlah kurang-lebih 500 kata yang harus dihafal luar kepala, bahkan jika dilanjutkan akan sampai 1.200 kata. Apabila sudah dianggap mahir dalam ilmu sharaf ini, barulah diberikan dasar-dasar Nahwu dengan menggunakan kitab *al-Jurumiyah*, dibaca *matan* dan *syarahnya*. Mula-mula diperkenalkan apa itu kalimat. Kalimat itu ialah *al-Lafzhu al-murakkabu al-mufidu bil wadi', waaqsamuhu tsalasatun, isimun wa fielun wa harfun jaa limaenan*. Kemudian diperkenalkan tanda-tanda *ierab* (analisa kata) dengan menggunakan empat macam kasus (harakaat), yaitu *rafaa', fatha, kasra* dan *jazam*. Demikian seterusnya pelajaran Nahwu dipermahir dengan meng-ierab tiap kalimat, ditentukan posisi tiap kata seperti *muftada* dan *khabar, fiel lazim* dan *mutaaddiy*. Kalimat-kalimat di-ierab dalam bahasa Arab; misalnya:

= *dharaba zaidun Amran* =

— *dharaba fiel madhi manshubun wa alamatu nasbihi fathatun zhahiratun fi akhirihi.*

— *zaidun failun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun shahiratun fi akhirihi.*

— *Amran mafulun bihi wa alamatu nashbihi fathatun zhahiratun fi akhirihi.*

Apabila kitab al-Jurumiyah selesai dibaca dan mahir meng-
ierab, barulah pindah kitab al-*Mutammimah*. Dalam kitab
ini mulai pendalaman ilmu Nahwu dan pengetahuan tentang
ilmu kalimat secara terperinci. Setelah tammat kitab ini
pindah lagi ke kitab *Alfiah* karangan Ibnu Aqil dan Sya-
rah *Alfiah* yang disusun oleh Jamaluddin bin Malik. Kitab
ini terdiri dari 1000 bait pola-pola ilmu Nahwu dan con-
toh-contohnya dilukiskan dalam syarahnya. Demikian pula
ilmu Sharaf dilanjutkan dengan membaca *Al-Kaelani* yang
dikarang oleh Abi Hasan Ali Ibnu Hisyam. Pengetahuan
Sharaf dan Nahwu dilengkapi dengan ilmu *Balaghah*, *Bayan*
dan *Maani* merupakan titik tolak untuk mempelajari kitab-
kitab yang lebih tinggi.

Kitab-kitab tersebut di atas diajarkan oleh ulama di-
rumahnya sendiri, akan tetapi ketika santri cukup banyak,
maka dibangunlah Mesjid yang biasanya berdampingan
dengan rumah ulama. Sekarang tempat kegiatan pendidikan
beralih dari rumah ulama ke Mesjid. Ulama sekaligus ber-
fungsi sebagai pembimbing bagi santri-santrinya dan Imam
jamaah di waktu sembahyang. Penduduk yang berdiam se-
kitar mesjid disunnahkan untuk selalu mendirikan shalat
jamaah di Mesjid dan dalam peringatan hari-hari besar
Islam, maka Mesjid merupakan pusat kegiatan masyarakat.
Ulama menggunakan waktu shalat antara Maghrib dan
Isya mengisi acara Da'wah Islamiyah bagi masyarakat
umum. Mesjid pula merupakan kegiatan pendidikan, me-
nimba ilmu dari ulama. Di samping diajarkan pengetahuan
bahasa Arab, diberikan pula dasar-dasar pengetahuan Fiqh
dengan menggunakan kitab *Safinat an-Naja* dan Tafsir
al-Qur'an serta Hadist dengan kitab *Haditsul Arbain*.

Santri yang berasal dari desa yang jauh, tinggal di ru-
mah ulama, bekerja membantu ulama dalam mengurus ru-
mah tangganya. Cara penyampaian pelajaran dilakukan
dengan metodik *mangngaji tudang*, secara bersama, duduk

berlingkar dengan ulama di tengah-tengah. Dilakukan pula seorang demi seorang, terutama bagi mereka yang sudah lanjut pembacaannya. Dalam pengajian bersama-sama nampak kitab yang sama dipegang pula oleh para santri. Tidak ditentukan batas waktu bagi santri dalam mengikuti pelajaran pada tingkat kedua ini. Di sini kelihatan, sampai di mana kemampuan seorang ulama dan kitab setingkat apa yang dapat diajarkan kepada santri untuk dapat disebut tammat belajar pada base ini. Kalau dasar pendidikan ulama memang tinggi, maka kitab-kitab rendah dapat dilanjutkan ke kitab-kitab lanjutannya. Dalam keadaan demikian, apabila ulama mempunyai dasar pendidikan menengah, maka ulama menganjurkan kepada santrinya melanjutkan pelajarannya di tempat lain jika si santri menghendakinya. Lokasi Pendidikan Islam yang mempunyai pondok-pondok bagi si santri, disebut pondok pesantren. Ulama yang memimpin pesantren dengan pengaruhnya yang sudah meluas serta berakar dalam masyarakat, disebut *gurutta*, dan dapat digolongkan dalam kategori ulama. Santri yang berasal dari suatu tempat pengajian, bila masih bermaksud menambah ilmunya, dapat mengembara mencari ulama di tempat lain. Perkembangan seperti ini dalam pertumbuhan pendidikan Islam termasuk proses tingkat ketiga.

Tingkat ketiga dalam pertumbuhan Pendidikan Islam, ialah pengakuan lingkungan masyarakat terhadap kelebihan dan keshalehan seorang ulama, sehingga anggota masyarakat baik dari dekat maupun dari jauh datang untuk belajar mengaji kitab. Mereka menyebut ulama itu *anregurutta* (kurang lebih sama dengan Kiyai) dan orang yang belajar pada ulama disebut *santari* (santri). Lembaga pendidikan tempat bertemunya orang-orang yang ingin menimba ilmu agama dari seorang ulama termasyhur yang berada pada suatu lingkungan (desa) disebutlah pesan-

tren. Acapkali nama desa disebut bersamaan dengan nama ulama atau nama ulama diikuti dengan nama desanya di mana ia berada. Maksudnya untuk membedakan nama ulama di tempat lain yang juga mempunyai pesantren. Desa itu juga lambat laun menjadi ramai, oleh karena para santri berdatangan dari jauh dengan membawa perbekalan sendiri. Bila tidak cukup tertampung di rumah-rumah penduduk setempat, dibangunlah pondok-pondok sekitar rumah kiyai. Pada tingkat pertumbuhan ini, mesjid merupakan pusat kegiatan pendidikan selain rumah kiyai. Di samping itu, mesjid juga menjadi pusat peribadatan dan pusat kegiatan agama masyarakat desa yang mendapat pengaruh dari kiyai. Kelebihan seorang ulama dalam hal ilmu Tharikat (Tasauf) atau ilmu bathiniyah, menarik orang datang kepadanya minta *barakkah* (berkat) untuk memperoleh hikmat keagamaan dan untuk kesejahteraan hidup mereka. Adakalanya orang datang karena didorong oleh cita-cita keagamaan yang mendalam yang tercermin dalam keshalehan kiyai dan pengabdianya terhadap agama. Oleh karena itu acapkali ia menerima hadiah-hadiah atau sumbangan sukarela untuk kepentingan Lembaga Pendidikan yang dipimpinnya.

Pada dasarnya kiyai tidak memungut pembayaran dari santri-santrinya, akan tetapi para santri membantu pekerjaan yang diusahakan oleh gurunya. Dapat saja santri bekerja di sawah jika gurunya memiliki tanah persawahan, dapat juga bekerja sebagai tukang jika rumah atau pondok-pondok akan dibangun. Pekerjaan dikerjakan secara bergotong-royong. Kalau hal ini, pekerjaan pertanian atau pertukangan boleh disebut pendidikan ketrampilan, nampaknya ketrampilan ini tidak dikaitkan dengan kurikulum. Akan tetapi betapa pun pekerjaan bertani atau tukang dan yang lain-lainnya merupakan pengalaman santri dan menjadi bekal di kemudian hari untuk mengelola hidupnya sendiri. Sistem pendidikan pada tingkat ketiga ini,

kurang lebih sama sistemnya dengan tingkat pertumbuhan kedua. Perbedaannya terletak pada tingkat kitab yang digunakan dan kadar ilmu yang dimiliki oleh kiyai. Suatu pesantren dalam keadaannya yang biasa, mulai mengajarkan membaca al-Qur'an, pengetahuan dasar ilmu Sharaf dan Nahwu, pelajaran Fiqh, Tafsir, Hadist dan Tauhid, sebagaimana yang disebutkan pada tingkat pertumbuhan pertama dan kedua.

Tingkat keempat dari pertumbuhan Lembaga Pendidikan Islam adalah setelah mengadopsi sistem madrasa yang memasukkan mata pelajaran umum di samping mata pelajaran agama. Besar kemungkinan ada pengaruh sistem pendidikan dari Madrasah Darul Ulum atau Madrasah Shaulatiah di Mekkah, yang dibawa oleh ulama-ulama yang pernah belajar di Madrasah tersebut. Pengaturan jenjang kelas, agaknya meniru jenjang kelas model "Sekolah" Belanda. Pada mulanya sistem baru ini belum seluruhnya diikuti, tetapi sedikit demi sedikit, dipergunakan pula kitab-kitab yang dahulunya dipakai di pesantren atau kitab-kitab yang dipakai di madrasah dan di pesantren, dibawa masuk dalam sistem pendidikan madrasah. Lambat laun, dengan timbulnya buku-buku mutakhir, maka kitab-kitab kembali digunakan hanya di pesantren. Pada tingkat pertumbuhan periode ini, tumbuh dengan pesatnya madrasah-madrasah yang didirikan oleh pusat-pusat pendidikan Islam sampai di daerah-daerah pedesaan, seperti As'adiyah dan D.D.I. Dengan demikian, pusat-pusat pendidikan itu karena mempunyai banyak cabang-cabangnya, merasa perlu memperbaiki administrasi dan organisasinya, agar koordinasi terhadap madrasah-madrasah itu dapat diatur dengan saksama. Pada umumnya madrasah-madrasah muncul atas permintaan masyarakat, yang didorong oleh keharusan terhadap ilmu keagamaan. Ada pula madrasah yang berdiri di suatu desa, diusahakan oleh pemuka-pemuka masyarakat setempat dan sis-

tem pendidikannya mengikuti pedoman dari Departemen Agama.

Pada awal pertumbuhan, kiyai adalah pembangun pertama pesantren dan fungsionaris tunggal dalam Lembaga Pendidikan itu. Dalam perkembangannya kemudian jumlah santri makin bertambah. Ia mengangkat pembantu atau wakilnya yang terdiri dari santri senior. Sejak dibentuknya madrasah dalam lingkungan pesantren, maka diperlukan sejumlah guru untuk memberikan berbagai jenis mata pelajaran baru yang tidak semuanya dikuasai oleh kiyai. Dalam hal demikian, peranan guru menjadi penting karena mereka mempunyai keahlian lain dari pada ulama atau kiyai yang diperolehnya di luar pendidikan pesantren. Sekalipun kiyai harus melimpahkan wewenangnya kepada para guru madrasah, namun peranan dan pengaruhnya masih tetap penting dan sejak itu kiyai tidak lagi sepenuhnya menjadi fungsionaris tunggal dalam pesantren.

Dalam tingkat pertumbuhan Lembaga Pendidikan periode ini, nampak adanya kecenderungan yang muncul, yaitu terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam yang merupakan "induk" dan menjadi sumber penyebaran berbagai jenis madrasah. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sejalan pula dengan masuknya guru yang memiliki keahlian yang berbeda-beda, maka dirasa perlu penyempurnaan organisasi induk agar dapat mengkoordinasi madrasah-madrasah yang merupakan cabang-cabangnya di daerah-daerah. Nampak pula keinginan lain, yaitu penyusunan kurikulum madrasah yang berorientasi ke arah Madrasah Negeri atau P.G.A.N. dengan suatu harapan agar siswanya nanti dapat menempuh ujian negeri dan melanjutkan pelajarannya ke Perguruan Tinggi. Sebagian siswa-siswa madrasah yang tidak tertampung di Perguruan Tinggi Negeri menjadi alasan bagi pusat Lembaga Pendidikan tersebut untuk mendirikan Perguruan Tinggi yang langsung di-

asuhnya sendiri. Terbentuknya Perguruan Tinggi di kalangan Lembaga Pendidikan Islam merupakan selangkah lebih maju dari periode sebelumnya.

Tingkat kelima dalam pertumbuhan Lembaga Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, sudah mempunyai banyak variasi. Perguruan Tinggi yang terbentuk itu, cenderung menyesuaikan kurikulumnya dengan fakultas-fakultas I. A.I.N. atau Fakultas dari Universitas Negeri. Demikian pula dosen-dosennya diperoleh dari I.A.I.N. atau Universitas Negeri.

Meskipun pertumbuhan pesantren sudah begitu lanjut, namun pengaruh kiyai dalam pendidikan masih tetap penting. Kiyai dijadikan simbol atau "orang tua" yang disegani karena wibawanya serta pengaruhnya dalam masyarakat. Pengurus Perguruan Tinggi dibedakan dari pengurus Madrasah-madrasah, tetapi dipimpin langsung oleh kiyai sebagai *Mudirul'Am*. Pengurus menurut hirarki terdiri dari pengurus pusat dan pengurus cabang, kemudian dibantu oleh Yayasan untuk mengurus pengadaan dananya.

Lebih jelas kelihatan pertumbuhan Lembaga Pendidikan Islam jika gambaran fisiknya dibuat secara sketsa, seperti:

Penjelasan.

Pola I

Rumah Kiyai

Sifat Pesantren ini masih sederhana dan tempat mengajar digunakan Rumah Kiyai sendiri. Santri datang dari lingkungan masyarakat desa Kiyai sendiri, dapat disebut tempat pengajian.

Pola II

Rumah Kiyai

Mesjid

Pesantren ini didatangi oleh santri baik dari dekat maupun dari tempat jauh. Kitab-kitab yang dipelajari masih rendahan dan mesjid dijadikan pusat kegiatan pendidikan di samping Rumah Kiyai.

Pola III

Rumah Kiyai

Mesjid

Pondok

Pesantren ini lebih berkembang dari bentuk pesantren sebelumnya. Santri mendirikan pondok-pondok sekitar Rumah Kiyai.

Mesjid dijadikan tempat pengajian di samping Rumah Kiyai

Pola IV

Rumah Kiyai

Mesjid

Pondok

Madrasah

Pesantren ini sudah lebih berkembang di mana santri mengikuti pelajaran dengan metodik mengaji tudang. Santri dapat pula mengikuti pelajaran di madrasah dengan sistem klasikal.

Guru-guru Madrasah sebagiannya berasal dari luar Pesantren dan mempunyai keahlian lain dari pada Kiyai.

Pola V

Rumah Kiyai

Lembaga Pendidikan Islam ini sudah jauh berkembang dan dapat digolongkan modern, mempunyai Ya-

Mesjid

yan untuk mengurus pengadaan dana. Selain bangunan yang diadkan ukuran, terdapat pula:

Pondok

- a. Perpustakaan.
- b. Dapur umum dan ruang makan.
- c. Kantor administrasi.
- d. Ruang pertemuan.

Madrasah

- e. Radio amatir.
- f. Toko koperasi.
- g. Poliklinik.

Universitas

- h. Percetakan.
- i. Tempat ketrampilan.

Pertumbuhan Lembaga Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan tidak semuanya menempuh perjalanan secara normal mengikuti pola-pola perkembangan sebagaimana yang tersebut di atas. Adakalanya suatu tempat pengajian bertumbuh dan mengalami perkembangan, tetapi kemudian mati, sedang di lain tempat bertumbuh dan berkembang terus sampai mencapai puncak kemajuannya untuk disebut sebagai Lembaga Pendidikan Islam yang modern. Betapapun lembaga-lembaga pendidikan yang namanya Pesantren mempunyai fungsi tertentu dalam proses perkembangan masyarakat, sekurang-kurangnya membantu proses anggota-anggota masyarakat yang berada di sekitarnya. Anggota masyarakat yang berada di sekitar pesantren dan di bawah pengaruh ulama, sedikit banyaknya mendapat pendidikan dasar tulis-baca untuk tidak disebut buta huruf. Lebih jauh lagi, anak muda yang belajar pada Lembaga Pendidikan Islam itu, akan anak muda yang belajar pada Lembaga Pendidikan Islam itu, akan merasakan manfaat ilmu yang diterimanya dalam menghadapi persoalan hidupnya dan bermanfaat membimbing budi pekertinya dalam pergaulan dengan kawan, rumah tangga dan

masyarakat. Apabila kita kembali meninjau sejarah pertumbuhan pesantren atau madrasah, maka nampak adanya pengaruh yang bersumber dari ulama, mempengaruhi anggota masyarakat karena kemantapan kediriannya dan wibawanya, sehingga tumbuh kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anaknya memasuki kehidupan pesantren. Kebanyakan dari mereka, terdiri dari golongan petani dan pedagang. Mereka tertarik pada kehidupan pesantren, oleh karena Lemcaga Pendidikan itu merupakan pendukung nilai-nilai keagamaan yang di kalangan petani dan pedagang ternyata memang sangat dibutuhkan. Adanya kepercayaan bahwa orang harus tetap berpegang kepada "jalan agama" dalam menjembatani ketergantungan nasib manusia terhadap Tuhan, pemberi rezeki. Anggota masyarakat melihat ulama sebagai simbol dan pemangku nilai-nilai agama yang mendidik dan membimbing budi pekerti manusia ke arah keselamatan.

Di antara Lembaga Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan yang tergolong maju (lebih kurang masuk pola V), yaitu yang mempunyai struktur organisasi, Yayasan, cabang-cabang yang tersebar, usaha-usaha sosial yang berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dan menjadi pendukung kelancaran pendidikan, dengan ulama yang seluruh waktunya digunakan untuk pembinaan pendidikan, adalah Perguruan As'adiyah di Wajo dan Darud Da'wah wal Irsyad (D. D.I.) di Pare-pare. Dengan tidak mengesampingkan yang lainnya, kedua Lembaga Pendidikan ini sesungguhnya bertumbuh dari satu pokok dan dari seorang ulama, yaitu anregurutta Haji Sade,

Perguruan As'adiyah bertumbuh dari sebuah pesantren (pola I) yang diadakan oleh anregurutta Haji Sade, seorang ulama yang lahir dan memperoleh pendidikan ilmu agama Islam di Mekkah. Beliau masuk ke Indonesia sekitar tahun 1928 dan langsung membuka pesantren di Wajo. Pada mu-

lanya, pendidikan diselenggarakan di rumah mertuanya (karena belum mempunyai rumah sendiri) di mana beliau berdiam. Pesantren ini makin hari makin dibanjiri oleh anak-anak muda bukan saja dari lingkungan desanya, tetapi datang pula anak muda dari Bone, Sinjai, Sidenreng dan sebagainya. Dalam keadaan demikian, rumah beliau tidak cukup luas menjadi tempat pendidikan. Maka dibangun sebuah Mesjid tidak jauh dari rumahnya. Kini, penyelenggaraan pendidikan beralih dari rumah ulama ke mesjid (pola II). Nama ulama bersama nama pesantrennya makin tersohor di mana-mana. Anak muda, lelaki dan wanita tidak dapat dibendung mendatangi pesantren ini untuk menuntut ilmu pengetahuan. Rumah penduduk yang terletak sekitar pesantren, kini tidak cukup lagi menampung anak muda yang datang dari jauh, maka diusahakanlah oleh mereka mendirikan pondok-pondok terletak tidak jauh dari Mesjid sebagai pusat kegiatan pesantren (pola III). Sampai pada periode ini, nampaklah gambaran fisik pendidikan yang kegiatannya bertumpu pada mesjid. Mesjid, bukan semata-mata bangunan yang berfungsi menunaikan ibadah sembahyang, akan tetapi lebih menonjolkan fungsinya sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Pejabat Sara' yang disertai tugas mengurus dan melayani hidup keagamaan masyarakat, memilih mesjid sebagai tempat kegiatannya.

Dalam tahun 1929, di lingkungan pesantren didirikan sebuah Madrasah Arabiyatul Islamiyah (M.A.I.) (pola IV), dengan jenjangnya, yaitu Tahdhiriyah 3 tahun, Ibtidaiyah 4 tahun, Tsanawiyah 3 tahun, I'dadiyah 1 tahun dan Aliyah 3 tahun. Agaknya jenjang ini mengikuti Madrasah Darul Ulum di Mekkah di mana Haji Sade pernah memperoleh pendidikan. Beliau dibantu oleh dua orang ulama lainnya, ialah Sayyid Abdullah Dahlan Garut dan Syekh Mahmud Abdul Jawad (bekas walikota dan Mufti besar kota Mekkah). Di samping pendidikan Madrasah, dilan-

jutkan pula pendidikan pesantren. Khusus pendidikan Huffaz (hafal al-Qur'an) beliau dibantu oleh Sayyid Ahmad Afifi. Dalam waktu relatif singkat Haji Sade sudah menamatkan kader-kader ulama yang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Nama M.A.I. bersama Kiyai pembinaanya Haji Sade menjadi tersohor ke mana-mana. Secara berangsur-angsur Lembaga Pendidikan ini dibanjiri oleh anak-anak muda yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Setelah pendirian M.A.I., anregurutta Haji Sade wafat, maka kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh muridnya yang cakap, yakni Haji Daud Ismail dan Haji M. Yunus Martan. Kemudian nama pesantren diubah menjadi Madrasah As'adiyah (M.A.) suatu nama yang dinisbahkan kepada pendirinya As'ad (orang Bugis sebut Sade) dalam tahun 1953. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, Perguruan ini membentuk sebuah Yayasan untuk mengurus segala kebutuhan yang diperlukan. Berdirinya Yayasan Madrasah As'adiyah, selangkah lebih maju mengalami perkembangan pesat dan bertambah lebih pesat lagi setelah di bidang pendidikan diadakan penyesuaian kurikulum dengan Madrasah negeri dengan memasukkan mata pelajaran umum di samping mata pelajaran agama ke dalam Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dengan proporsi pelajaran 60% agama dan 40% umum. Dalam Mukhtamar ke IV pada tahun 1966, diputuskan perubahan nama Madrasah menjadi Perguruan As'adiyah, berhubung karena cabang-cabang sudah terbentuk di beberapa daerah pedesaan. Disusunlah organisasi menjadi pengurus pusat dan pengurus cabang. Sekarang perguruan dipimpin oleh K.H.M. Yunus Martan, seorang murid Anregurutta Haji Sade yang cakap. K.H.M. Yunus Martan penuh pengabdian membina As'adiyah dan hasilnya Lembaga Pendidikan ini berkembang sebagai Perguruan yang modern. Mulai dari

jenjang Sekolah Taman Kanak-kanak sampai jenjang Fakultas ada dalam Perguruan ini (pola V).

Adapun pertumbuhan Darud Da'wah wal Irsyad (D.D.I.) dimulai dari kegiatan K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle (murid Haji Sade). Pada mulanya beliau mengadakan pendidikan pesantren di rumahnya sendiri di daerah Soppeng. Lambat laun anak muda yang datang dari lingkungan desanya makin bertambah banyak, maka disepakatilah bersama dengan para tokoh masyarakat setempat untuk mendirikan Madrasah. Oleh karena Haji Abd. Rahman Ambo Dalle adalah tammatan Madrasah Arabiyatul Islamiyah di Wajo, maka disepakati akan mengadakan cabang M.A.I. di daerah Soppeng (Mangkoso). Tahun 1939 didirikan cabang M.A.I. di Mangkoso dengan mendapat bantuan dari pemerintah daerah Soppeng.

Pengakuan anggota masyarakat Soppeng terhadap keahlian di bidang ilmu agama K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle, didorong pula oleh keinginan masyarakat untuk memperluas lembaga pendidikan ini, dalam tahun 1947 sesuai kesepakatan para ulama Soppeng, didirikanlah Darud Da'wah wal Irsyad dengan mengambil M.A.I. sebagai dasarnya. Dalam musyawarah pembentukan D.D.I., diputuskan pula bahwa K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle ditunjuk untuk langsung memimpinnya (Midirul A'm). Segera segala sesuatunya diusahakan, seperti perbaikan organisasi pendidikan dan Yayasan, perbaikan metodik mengajar dan sebagainya. Rumah ulama dan mesjid tetap merupakan tempat kegiatan pesantren.

Situasi Sulawesi Selatan dalam tahun 50-an (D.I./T.I.I.) dianggap mengharuskan pemindahan pusat kegiatan pesantren dari desa Mangkoso ke kota Pare-pare. Di tempat yang baru ini D.D.I. memulai perkembangan baru pula. Kini yang dihadapi bukanlah masyarakat desa, tetapi masya-

rakat semi-kota. Kota Pare-pare adalah kota pelabuhan kedua dari Makassar. Kehadiran D.D.I. di Pare-pare segera mendapat sambutan dari ummat Islam dan tokoh-tokoh masyarakat. D.D.I. mengalami perkembangan yang amat pesat, ternyata dari permintaan anggota masyarakat. Hampir semua Kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan, meminta untuk mendirikan cabang-cabang Madrasah; Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Bahkan dewasa ini cabang-cabangnya terdapat di Sulawesi Tengah, Propinsi Jambi dan Kalimantan. Satuan-satuan pendidikannya sama dengan As'adiyah, yaitu Pondok Pesantren, Madrasah dan Fakultas. Berhubung karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan menyangkut berbagai bidang, maka organisasi pendidikannya dan Yayasannya menunjukkan suatu perguruan yang modern (pola V).

B. Organisasi Dan Dana

Menurut pengamatan kita lebih lanjut, maka susunan organisasi Lembaga Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan, sudah tentu menunjukkan kompleksitas yang berbeda-beda tergantung dari: a). Banyaknya jenis kegiatan yang dilakukan. b). Besar kecilnya jumlah santri/siswa dan jumlah cabang-cabangnya sebagai unit afiliasi dan c). Adanya kesadaran dari pembina Lembaga Pendidikan untuk memperbaiki usahanya melalui cara organisasi.

Berdasar atas pengamatan kita terhadap organisasi Lembaga Pendidikan, nampak adanya pola umum dalam tingkat-tingkat perkembangan organisasi, sebagai berikut:

- a. Organisasi yang dipimpin langsung oleh ulama pendiri pertama Pesantren/Perguruan, dengan seluruh kegiatan dalam lembaga yang ditentukan oleh kebijaksanaannya.
- b. Organisasi yang dipimpin langsung oleh Kiyai, tetapi sebagian kegiatan pendidikan turut melibatkan bebe-

rapa orang ulama dan ustaz, termasuk orang-orang dari pihak keluarga kiyai sendiri.

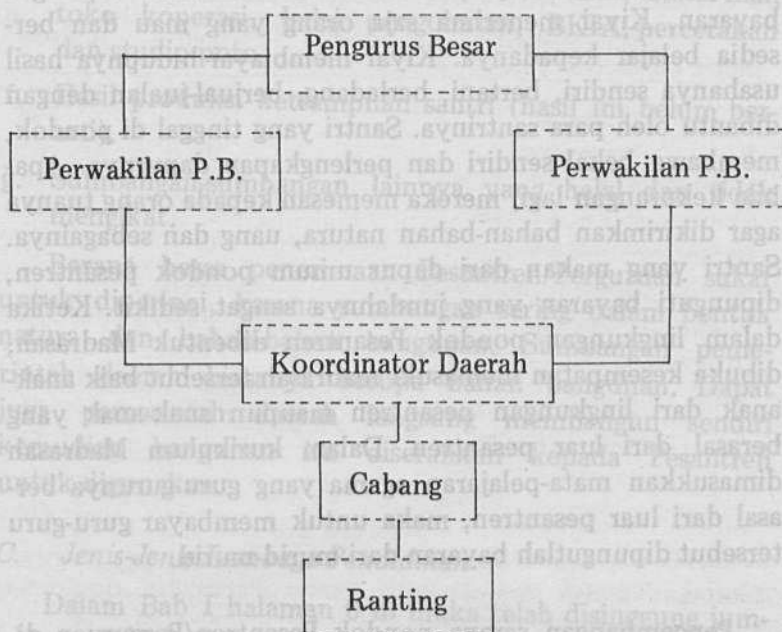
- c. Organisasi Lembaga Pendidikan yang sudah mempunyai Yayasan untuk membantu kiyai dalam pengadaan dana, namun peranan dan pengaruh kiyai masih tetap penting.
- d. Organisasi Lembaga yang sudah kompleks, memiliki Yayasan untuk membantu kiyai mencari dana dengan jalan mendirikan unit-unit usaha yang sifatnya komersil. Semua aturan-aturan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah diatur dalam Anggaran Dasar (A.D.) dan Anggaran Rumah Tangga (A.R.T.). Sekalipun demikian, wibawa kiyai masih dipandang memegang pengaruh yang amat besar.

Organisasi Lembaga Pendidikan pada tingkat pertama, umumnya masih sederhana dan terbanyak didapati, sedang tingkat kedua dan ketiga adalah bentuk lembaga yang sudah tergolong maju. Organisasi pada tingkat keempat tergolong modern dan sangat sedikit jumlahnya.

Betapapun, eksistensi Lembaga Pendidikan Islam bertumpu pada kehadiran kiyai sebagai ulama di tengah-tengah Lembaga Pendidikan, dan betapapun kompleksnya organisasi sebuah lembaga, kiyai masih tetap dianggap penting. Oleh karena bobot ilmu dan keshalehan yang dimilikinya menjadi jembatan bagi kelangsungan hidup lembaga. Lembaga Pendidikan Islam memperoleh dukungan dari masyarakat karena adanya ulama yang mempunyai wibawa dan ikatan bathin dengan anggota masyarakat. Organisasi dan susunan pengurus ingin digambarkan di sini sebagai misal. Hal itu dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4.

Skema susunan vertikal Organisasi Lembaga Pendidikan Islam yang sudah tergolong maju, sebagaimana halnya

As'adiyah dan D.D.I., berwujud sebagai berikut:



Skema susunan vertikal organisasi tersebut, diterangkan sebagai berikut: Pengurus besar adalah pengurus yang berkedudukan di pusat Perguruan dan terdiri dari Ketua Umum dan beberapa Ketua-ketua, lalu Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh Wakil-wakil Sekretaris. Pengurus besar, dengan majlis-majlis seperti Majlis Ta'lim, majlis Da'wah/Fatwa, Majlis Perencanaan/Pembangunan, Majlis Pemuda dan Majlis Kewanitaan. Jumlah majlis-majlis ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di daerah-daerah diangkat seorang koordinator daerah di tempat cabang dan ranting perguruan. Apabila di suatu propinsi terdapat banyak cabang dan ranting, maka diangkat seorang Perwakilan Pengurus Besar. Susunan Pengurus pada Perwakilan itu dapat mengikuti susunan Pengurus Pusat atau disesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing.

Sudah beberapa kali disinggung di muka bahwa santri yang belajar pada pesantren tradisional tidak dipungut bayaran, Kiyai menerima saja orang yang mau dan bersedia belajar kepadanya. Kiyai membiayai hidupnya hasil usahanya sendiri, bertani, berladang, berjual-jualan dengan dibantu oleh para santrinya. Santri yang tinggal di pondok, membawa bekal sendiri dan perlengkapan dapurnya. Apabila kekurangan lagi, mereka memesan kepada orang tuanya agar dikirimkan bahan-bahan natura, uang dan sebagainya. Santri yang makan dari dapur umum pondok pesantren, dipunguti bayaran yang jumlahnya sangat sedikit. Ketika dalam lingkungan pondok Pesantren dibentuk Madrasah, dibuka kesempatan memasuki madrasah tersebut baik anak-anak dari lingkungan pesantren maupun anak-anak yang berasal dari luar pesantren. Dalam kurikulum Madrasah dimasukkan mata-pelajaran agama yang guru-gurunya berasal dari luar pesantren, maka untuk membayar guru-guru tersebut dipungutlah bayaran dari murid-murid.

Pengembangan sarana pondok Pesantren/Perguruan diusahakan oleh sebuah Yayasan yang membantu kiyai dalam mencari dana. Keterangan-keterangan yang berhasil dikumpulkan menyatakan antara lain bahwa sumber penerimaan Pesantren/Perguruan adalah:

- a. Iuran dari murid-murid Madrasah dan dari santri yang makan di dapur umum.
- b. Sumbangan-sumbangan sukarela dari orang tua santri yang biasanya dalam bentuk natura.
- c. Sumbangan dari pemerintah daerah, akhir-akhir ini datang pula sumbangan dari Presiden.
- d. Sumbangan dari para dermawan yang biasanya berupa bahan-bahan bangunan atau alat-alat pertanian, pertukangan dan alat-alat ketrampilan lain.

- e. Sumber-sumber dana yang diusahakan oleh Yayasan yang mempunyai unit-unit seperti, wakaf, baital-mal, toko koperasi, balai pengobatan, BKIA, percetakan dan studio foto.
- f. Hasil produksi ketrampilan santri (hasil ini belum berarti).
- g. Sumbangan-sumbangan lainnya yang halal dan tidak mengikat.

Berapa besar penerimaan Pesantren/Perguruan sukar untuk diperinci, karena sumbangan sering dalam bentuk natura dan bahan-bahan bangunan. Sumbangan pemerintah daerah biasanya berupa bahan bangunan. Dapat juga pemerintah daerah langsung membangun sendiri kemudian bangunan itu diserahkan kepada Pesantren untuk digunakan.

C. *Jenis-Jenis Lembaga Pendidikan*

Dalam Bab I halaman 6 di muka telah disinggung jumlah penduduk Sulawesi Selatan yang terdiri dari 4 suku bangsa, yaitu suku-bangsa Bugis, suku-bangsa Makassar, Mandar dan suku-bangsa Toraja. Tiga suku-bangsa yang pertama sebahagian terbesar menganut agama Islam. Kepadatan penduduk 72 orang per km² masih terhitung kurang dibanding dengan pulau Jawa.

Demikian pula apabila dilihat sepintas lalu nampak akan pusat-pusat Lembaga Pendidikan Islam jumlahnya sedikit. Akan tetapi banyak tersebar Madrasah-madrasah di pedesaan sebagai cabang dari pusat-pusat pendidikan itu. Selain itu masih terdapat banyak madrasah-madrasah (umumnya Ibtidaiyah) yang diselenggarakan (tanpa induk) oleh pemuka-pemuka masyarakat desa.

Gambaran umum jenis-jenis dan jumlah madrasah dan pesantren di Sulawesi Selatan secara terperinci dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Madrasah dan Pesantren di Propinsi Sulawesi Selatan

No.	Jenis Madrasah dan Pesantren	Negeri	Swasta
1.	Ibtidaiyah	6	539
2.	Tsanawiyah	3	58
3.	Aliyah	2	18
4.	P.G.A. 4 tahun	5	197
5.	P.G.A. 6 tahun	5	85
6.	P.G.A. 6 tahun puteri	—	2
7.	Madrasah Diniyah	—	325
8.	Madrasah Wajib belajar	2	—
9.	Madrasah Menengah Pertama	—	1
10.	Pondok Pesantren	—	21
11.	Tempat Pengajian	—	51
Jumlah		23	1.297

Sumber : Diolah dari Statistik Kantor Perwakilan Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan, tahun 1974.

Tabel 6. Jumlah Perguruan Tinggi Islam di Propinsi Sulawesi Selatan

No.	Jenis Fakultas	Negeri	Swasta
1.	Syariah	2	3
2.	Tarbiyah	6	4
3.	Ushuluddin	3	5
4.	Da'wah	1	—
5.	Adab	1	—
6.	Pesantren Tinggi	—	2
Jumlah		23	24

Sumber : a. Diolah dari Statistik I.A.I.N. Alauddin, tahun 1974
b. Diolah dari Statistik Perguruan As'adiyah dan D.D.I. tahun 1975.

Selain jenis madrasah/Pesantren dan Fakultas sebagaimana terlihat pada Tabel tersebut di atas, kiranya perlu dilukiskan pula gambaran umum Lembaga Pendidikan Islam yang menjadi pusat-pusat pengembangan Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

Tabel 7. Pusat-pusat Lembaga Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan

No.	Jenis Lembaga Pendidikan Islam	Madrasah	Pesantren	Fakultas
1.	I.A.I.N. Alauddin	—	—	13
2.	Universitas Muslimin Indonesia (UMI)	—	—	3
3.	Perguruan As'adiyah	240	3	2
4.	Darud Da'wah wal Irsyad (D.D.I.)	1.015	60	7
5.	Muhammadiyah	25	—	10
6.	Darul Istiqamah	7	1	—
7.	Ma'hadul Hadist	1	1	—
8.	Pesantren Modern Gombara	2	1	—
9.	Pesantren Modern IMMIM	2	2	—
10.	Pesantren YASRIB	3	1	—
11.	Pesantren al-Qamar	1	1	—
12.	Perguruan Islam Datu Museng	3	—	—
13.	Ma'hadul Dirasatil Islamiyah (MDIA)	5	1	—
Jumlah		1.304	71	35

Sumber: a. Statistik I.A.I.N. Alauddin, tahun 1974.
b. Laporan Dies UMI, tahun 1975.

- c. Statistik As'adiyah tahun 1975.
- d. Dokumen Muktamar XIII DDI tahun 1975.
- e. Statistik Universitas Muhammadiyah tahun 1975.
- f. Hasil field note.

Diperkirakan bahwa mungkin masih ada Madrasah dan Pesantren. Khususnya tempat pengajian yang belum terjangkau dalam Tabel 7 di atas. Tetapi sebagai gambaran umum jenis Lembaga Pendidikan Islam kiranya cukup memadai. Dalam tabel tersebut, khususnya D.D.I., termasuk pula Madrasah/Pesantren yang berada di luar Sulawesi Selatan.

Adalah hal yang tidak mungkin bahwa Madrasah-madrasah swasta menunjukkan kuantitas yang tinggi, akan tetapi dari segi kualitas (isi pendidikan) mengalami kemunduran jika dibanding dengan Madrasah-madrasah negeri. Sekalipun harus diakui, peranan Lembaga Pendidikan Islam amat besar pengaruhnya dalam pengembangan kecerdasan masyarakat, membantu ummat Islam Indonesia lebih-lebih masyarakat pedesaan yang membutuhkan pelayanan keagamaan, membantu dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial akibat pembangunan.

Pendidikan Islam memenuhi tugasnya sebagai penyimpan dan pewaris, sekaligus pelanjut tradisi keagamaan masyarakat, bukan semata-mata harus dilihat sebagai salah satu pernyataan keislaman, tetapi juga harus dilihat sebagai Lembaga Sosial yang mempengaruhi kegiatan sosial dari berbagai segi. Ulama-ulama yang berada dalam lingkungan Pendidikan Islam senantiasa menjaga keseimbangan nilai-nilai tradisi masyarakat dengan nilai-nilai yang harus dikembangkan melalui lembaganya, lebih-lebih lagi mereka harus menjaga wibawa yang diperolehnya dari dukungan masyarakat atas dasar "persepakatan bersama" menganut dan men-

taati nilai-nilai sosial di mana mereka berada. Pada umumnya ulama tidak rela berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tata nilai lingkungannya. Adalah hal yang ditanggung sendiri oleh ulama apabila ia berani mengambil suatu tindakan tanpa didukung oleh anggota masyarakat dalam hal urusan sosial.

Di sinilah biasanya timbul dilemma bila wibawa dan pengaruh ulama diperlukan untuk mengantarkan anggota masyarakat pengikutnya ke arah pembaharuan, terutama untuk perubahan tata nilai yang berlaku. Ulama sendiri harus mengetahui dan menyadari bahwa Islam tidak pernah menolak kemajuan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Walaupun demikian, pada kenyataannya mereka sering tidak dapat membedakan mana hal-hal yang menyangkut nilai tradisi dan mana hal yang menyangkut syariat Islam yang sudah mentradisi. Adakalanya seorang ulama tidak dapat menerima suatu gagasan, tetapi penolakannya tidak berdasarkan alasan-alasan yang kuat karena sesuatu itu dianggapnya bertentangan dengan rasa keagamaannya, melainkan karena ia ia tidak mampu mengerti daya guna gagasan itu berhubung latar belakang pendidikannya berkisar pada pembacaan kitab-kitab lama dalam suatu fan saja. Apabila ia berhadapan dengan hal baru, maka kalau ia tidak menolaknya ia setidaknya akan mengadakan interpretasi sesuai dengan pandangan alam pikirannya yang belum tentu sesuai dengan yang dimaksud.

Di lain pihak, para ulama pembina Lembaga Pendidikan Islam sesungguhnya sudah pula membuat rencana-rencana tertentu untuk menyongsong kehidupan baru, hanya saja mereka ditentukan oleh sarana dan fasilitas yang terbatas, sehingga kita mengatakan mereka terlambat.

D. Hubungan Lembaga Pendidikan Dengan Lingkungannya.

Lembaga Pendidikan Islam yang berupa Madrasah dan

Pesantren tumbuh di tengah-tengah masyarakat, sekaligus mendapat pengakuan dan dukungan. Sudah dijelaskan pada bab pendahuluan di depan bahwa sistem Madrasa dan Pesantren termasuk salah satu organisasi sosial yang tunduk pada sistem sosial dan budaya lingkungannya. Dengan demikian terjalin hubungan erat antara lembaga dengan lingkungan masyarakatnya. Lembaga Pendidikan menerima input dan memberi output pada lingkungannya.

Lembaga Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan yang berbagai jenis itu berhubungan dengan lingkungan masyarakatnya menurut caranya masing-masing. Hubungan itu berbeda pada tiap lembaga pendidikan karena adanya perbedaan dalam:

- a. Bobot ilmu dan keahlian yang dimiliki oleh Kiyai dan Ulama pengasuh pendidikan serta kegiatannya dalam memperanankan statusnya sebagai ulama.
- b. Pengaruh ulama pengasuh pendidikan pada masyarakat dan tanggapan masyarakat terhadap Pesantren dan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan.
- c. Peranan siswa/santri yang menonjol dalam masyarakat.
- d. Gedung dan alat-alat madrasah yang bisa digunakan oleh masyarakat.

Lembaga Pendidikan berhubungan dengan masyarakat melalui salah satu dari unsur di atas. Boleh jadi sebuah lembaga mempunyai gedung yang bisa digunakan oleh masyarakat dan ulama pembina lembaga cukup pula berpengaruh, akan tetapi kalau santri-santri kurang membina hubungan-hubungan dan tidak menonjol kegiatannya, maka masyarakat hanya menghormati ulama tanpa melihat kualitas pembinaan dalam lembaga tersebut. Seperti halnya Pesantren Ma'hadul Hadist di Bone yang dipimpin oleh ulama yang ahli banyak fan, K.H.M. Junaid Suleman tammatan Madrasah Shaulatiah di Mekkah dan mungkin salah seorang

yang tertinggi pendidikannya di Sulawesi Selatan, gedung pesantrennya cukup memadai, akan tetapi kegiatannya lebih banyak dilakukan oleh dan menjadi menonjol karena kiyai tersebut. Anggota masyarakat hanya menilai keahlian ulama dan sering mengeluh tentang pembina pendidikan dalam pesantren, sehingga orang tua kurang berkeinginan menyerahkan anaknya. K.H.M. Junaid giat mengadakan ceramah-ceramah di Mesjid-mesjid desa, mengadakan pendidikan hafal al-Qur'an (huffaz), mengadakan Majelis Ta'lim di Mesjid Raya Kabupaten setelah selesai sembahyang Maghrib, membuat tulisan yang dapat dibaca oleh anggota masyarakat yang berisi pelajaran Fiqh, Tauhid dan sebagainya.

Berbeda dengan As'adiyah dan D.D.I. yang mempunyai banyak cabang, mempunyai banyak unit-unit usaha seperti Toko Koperasi, Studio photo, Poliklinik, BKIA, Peternakan Sapi yang diurus oleh santri-santri, kiyai sendiri sewaktu-waktu berceramah di Mesjid-mesjid kalau diperlukan dan lebih banyak mengerahkan ulama lain dan santri-santri seniornya memberikan pelajaran agama di kalangan pemuda dan anggota masyarakat. Santri-santri di D.D.I. mempunyai grup kesenian Rebana, mereka mengadakan pertunjukan pada hari-hari besar Islam atau di dalam pesta-pesta kawin.

Kedua kiyai dari kedua lembaga pendidikan ini mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat Sulawesi Selatan, bukan saja karena keahlian dan kegiatan kiyai, tetapi juga karena alumni yang dihasilkannya kebanyakan menjadi ulama juga. Alumni As'adiyah dan D.D.I. mengisi lowongan sejak terbentuknya Jawatan Agama pada tahun 1950. Sampai sekarang mereka banyak berperan di Jawatan tersebut, di samping berperan dalam mengisi acara-acara Jum'at di mesjid, acara dalam hari-hari besar Islam dan membuka Madrasah-madrasah di desa di mana mereka berada.

Sedikit berlainan dengan Pesantren Darul Istiqamah yang dipimpin oleh K.H. Marzuki Hasan, pesantren ini yang terletak di tengah-tengah masyarakat yang fanatik menganut Tharikat Khalwatiyah Samman, mulanya menerima murid bukan dari lingkungan desanya, tetapi murid-murid dari jauh atau dari desa lain, seolah-olah pesantren ini steril terhadap lingkungannya. Adanya santri yang berasal dari tempat jauh mempercepat terbentuknya pondok-pondok dalam kampus pesantren. Ada anggapan penganut Tharikat Khalwatiyah bahwa melakukan ibadah secara tekun untuk mendekatkan diri pada Tuhan sama halnya dengan memiliki ilmu agama, sehingga mereka tidak mendidik anaknya untuk menjadi ahli agama, cukup mengetahui baca al-Qur'an, mengetahui dasar-dasar hukum Islam dan mengetahui syarat-syarat sahnya sembahyang. Mungkin hal ini merupakan alasan saja yang sesungguhnya didasari oleh latar belakang sejarah perkembangan golongan ini. Pernah dalam bulan Oktober 1931 (Jumadil Awal 1350 H) ulama Sulawesi Selatan di Bone bersepakat melarang Tharikat ini beredar dan mengfirkannya.

K.H. Marzuki Hasan seorang ulama Muhammadiyah, ahli hukum Islam yang menjadi juga Haffaz, rajin memberi ceramah, tabligh antara lain pada beberapa desa di Kabupaten Maros dan lebih banyak kegiatannya di arahkan ke Kabupaten Gowa dan Sinjai di mana terletak cabang Madrasah nya. Pengajian-pengajiannya di hadapan masyarakat umum lebih banyak menekankan pembinaan akhlak dan perlunya pendidikan. Beliau memobilisir santri-santri nya secara bergiliran menggarap tanah perkebunan cengkeh di Sinjai dan Gowa. Penyuluhan pertanian dilakukan oleh santri-santri yang dibantu oleh ahli-ahli dari Jawatan Pertanian bagi masyarakat petani yang berdiam di sekitar tanah perkebunannya. Santri senior yang ditugaskan memimpin cabang Madrasah di desa mengusahakan juga mem-

buka kursus buta huruf dan kursus-kursus keagamaan bagi pemuda-pemuda desa.

Sebagai Lembaga Pendidikan Islam yang baru muncul, Pesantren Darul Istiqamah (berdiri tahun 1970) belum banyak menghasilkan alumni. Alumni Takhassus baru sekitar 10 orang yang semuanya bertugas kembali menjadi ustaz di Madrasah atau kepala Madrasah di cabang-cabangnya. Peranan pesantren sebagai Lembaga Pendidikan belum nampak. Penonjolan peranan lebih banyak dilakukan oleh kiyai dan santri-santri senior. Sarana gedung baru terdiri dari dua bangunan permanen, yaitu mesjid dan dua ruangan Madrasah, sedang pondok-pondok santri terbuat dari tiang bambu, atap dan dindingnya terbuat dari daun nipa, terletak di seputar kampus pesantren.

Dalam pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan setelah selesai pemberontakan D.I./T.I.I., As'adiyah turut membantu pemerintah. Rakyat tidak dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagaimana mestinya. Perekonomian rakyat, pertanian dan perhubungan menjadi lumpuh dan ini berarti kerugian bagi masyarakat. Dalam keadaan demikian As'adiyah sebagai Lembaga Pendidikan dan Da'wah Islamiyah tetap membantu pemerintah dalam arti tetap berada di pihak pemerintah dan tidak pernah melibatkan diri pada pihak pemberontak.

Melalui radio amatir As'adiyah, ceramah-ceramah keagamaan waktu siang hari dan malam dilakukan berganti-ganti oleh ulama dan muballigh. Pengajian Maghrib dan Subuh langsung dilakukan di Mesjid Raya Wajo oleh kiyai dan ulama As'adiyah. Tidak ketinggalan pula dilakukan pengajian dan Tabligh di asrama Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan Instansi-instansi pemerintah. Demikian pula Tabligh di tempat-tempat perkawinan, kematian dan pada hari-hari besar Islam. Di samping tabligh dan ceramah, K.H.M. Yunus Martan membuat tulisan-tulisan yang berisi pelajar-

an agama dalam bahasa Bugis dan agak mudah dipelajari oleh anggota masyarakat.

As'adiyah membangun pula kerja sama dengan pemerintah daerah dalam bentuk panitia pengumpulan zakat, kerja sama di bidang penyiaran dan pengumuman pemerintah melalui Radio, tentang program keluarga berencana, kebersihan pemukiman dan pembangunan masyarakat desa. Khususnya dalam memelihara dan meningkatkan kesadaran beragama bagi masyarakat dalam rangka memperbaiki ketahanan mental masyarakat, As'adiyah banyak berperan di dalamnya, sebagaimana halnya pula yang dilakukan oleh D.D.I. dan Lembaga-lembaga Pendidikan lainnya.

BEBERAPA PENDAPAT TENTANG MADRASAH DAN PESANTREN

Agaknya, tidak semua pendapat tentang Madrasah dan Pesantren merupakan kritikan, tetapi pendapat-pendapat itu sebagiannya berguna dan perlu diinventarisasi lebih lanjut untuk digunakan sebagai bahan diskusi yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan Islam. Ternyata datangnya pendapat-pendapat itu bukan saja semata-mata berasal dari masyarakat umum, tetapi antara lain datang pula dari para alim ulama asal Madrasah itu sendiri, bahkan berasal dari ulama lingkungan pesantren itu sendiri.

Lebih dahulu dijelaskan bahwa metode penelitian yang digunakan dalam menginventarisasi pendapat ini, adalah metode interview yang mendalam menyangkut berbagai segi, kemudian hasil interview itu dituangkan dalam *field note* untuk menjadi bahan pemikiran selanjutnya. Ada tiga Lembaga Pendidikan Islam yang dipilih menjadi lokasi sample, karena ketiga lembaga itu dianggap maju dan berpengaruh di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, ialah As'adiyah di Wajo, DDI di Pare-pare dan Pesantren Darul Istiqamah di Maros. Dengan tidak mengesampingkan yang lain-lainnya, ketiga lembaga tersebut dipilih dengan alasan, a). As'adiyah adalah Lembaga Pendidikan yang tertua umurnya yang masih hidup sampai sekarang, didirikan mulai dari tempat pengajian berkembang sampai mempunyai Perguruan Tinggi, sebagaimana halnya seka-

rang. b). D.D.I. dipilih karena perkembangannya yang begitu pesat, mempunyai cabang-cabang hampir di seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan, bahkan terdapat di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, DDI mempunyai organisasi yang tersusun rapi dan Yayasan yang kuat. c). Pesantren Darul Istiqamah karena umurnya yang relatif masih muda, tetapi mempunyai perkembangan yang pesat, bertempat tidak jauh dari kota besar Ujung Pandang dan berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat Tharikat Khalwatiyah yang fanatik. Ketiganya dipimpin oleh seorang tokoh ulama yang disegani dan berpengaruh.

A. *Pendapat Kiyai, Ustaz Dan Santri*

Kalangan ulama pesantren, sebagaimana halnya ulama pengasuh D.D.I. mengatakan, bahwa kalangan masyarakat terutama simpatisan DDI bertanya, mengapa santri-santri sekarang ini tidak sama kualitasnya dengan santri-santri dahulu, tidak sama baik dari segi akhlaknya, suluknya, ibadatnya maupun dari segi ilmunya. Santri-santri sekarang nampaknya seolah-olah tidak menaruh perhatian terhadap pengamalan ilmunya dan seolah-olah tidak memiliki rasa tanggung-jawab terhadap agama. Pertanyaan ini dibenarkan sendiri oleh ulama Pesantren (K.H. Abdullah Pabbaja). Beliau sendiri menjawab, bahwa kemerosotan tersebut bila diteliti sebab-musababnya akan menunjukkan beberapa kesimpulan, antara lain:

- a. Tidak sahnya niat santri atau orang tuanya terhadap ilmu.
- b. Tidak adanya pemeliharaan santri-santri terhadap ilmu yang telah diperolehnya
- c. Tidak adanya pengawasan para kiyai-kiyai dan ustaz terhadap ilmu yang telah diajarkan.

Lebih lanjut diceritakan oleh kiyai itu bahwa dari pengamatan terhadap santri-santri tampak bahwa mereka menuntut ilmu bukan untuk ilmu yang akan diamalkan, melainkan karena niat menjadikan ilmu itu sebagai batu loncatan untuk memperoleh kedudukan keduniaan. Ilmu tidak menjadi tujuannya. Akibatnya mereka menempuh segala macam jalan untuk mendapatkan syahadah (ijazah). Apabila ditinjau kualitas santri-santri, maka ada tiga golongan santri:

- a.) Santri yang betul-betul santri, menuntut ilmu untuk diamalkan sebagaimana lazimnya.
- b.) Santri yang diantar oleh orang Tuanya atau walinya ke pesantren dengan maksud semata-mata untuk melepaskan dirinya dari kenakalan anaknya, sekalipun ia memberikan belanja tiap bulan.
- c.) Santri yang hanya ikut-ikutan saja, yang melihat kawan-kawan sebayanya ke pesantren, kemudian turut masuk tanpa mempunyai niat yang sah terhadap ilmu pengetahuan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh kiyai tersebut, bahwa kekosongan otak yang dialami oleh para santri akhir-akhir ini, salah satu sebabnya ialah adanya santri-santri yang memiliki sifat takabbur (takbur), tidak mau belajar pada orang alim yang tidak bertitel, sekalipun ulama itu adalah pembina orang bertitel. Kemudian disarankan oleh beliau untuk memperbaiki kemerosotan pendidikan pesantren dengan jalan mengikuti metode pendidikan yang pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad berdasarkan al-Qur'an, Hadist, Ilmiyah dan Amaliyah.

Jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan kepada pimpinan Darud Da'wah wal Irsyad (D.D.I.) mengatakan bahwa memang terdapat banyak sorotan-sorotan anggota

masyarakat terhadap D.D.I. sebagai satu Perguruan Islam, yang dipandang sebagai:

- a. Organisasi Pendidikan Islam yang bersifat kolot.
- b. Afiliasi dari suatu organisasi tertentu.
- c. Sistem pendidikan yang masih menganut sistem tradisional yang tidak membuka pintu bagi sistem modern.

Menurut pimpinan D.D.I. dikatakan bahwa semua sorotan itu sesungguhnya tidak begitu benar. Mungkin mereka yang menilai itu masih melihat D.D.I. dua puluh tahun yang lalu. D.D.I sebagai perguruan sama sekali tidak berafiliasi dengan organisasi tertentu. Perguruan ini berkembang mengikuti perkembangan masa, tiap 5 tahun (satu periode) diadakan Mukhtar untuk menilai semua hasil-hasil yang telah dicapai, termasuk perbaikan organisasinya. Organisasi D.D.I. cukup kompleks dalam ukuran kita, jabatan-jabatan sudah dibagi-bagi sedemikian rupa menurut kebutuhan perkembangan, melibatkan beberapa orang alim ulama, sarjana, ustaz dan guru-guru untuk menjalankan organisasi dan pendidikan.

Memang para ulama pembina perguruan merasa puas dengan bentuk pendidikan berupa Pesantren (gaya lama), karena dalam wadah ini santri-santri diberi pelajaran ilmu agama dan pengetahuan bahasa Arab secara mendalam. Tetapi diakui pula kekurangannya. Kekurangannya ialah di bidang pengetahuan umum, terutama ilmu-ilmu sosial. Tambahan pengetahuan ini dirasakan perlu dalam mengamati gejala-gejala sosial dan dalam melakukan tugas kemasyarakatan dengan sebaik-baiknya.

Pendapat ulama di atas, apabila kita kaji kembali akan menimbulkan dua pertanyaan, ialah apa yang dimaksud oleh mereka dengan konsep "amal" dan apa "tujuan ilmu" yang

dikehendaki. Ada kesan bahwa yang dimaksud amal adalah semua perbuatan yang berkisar pada persoalan ibadah sembahyang, puasa dan zakat, berbuat shaleh dan senantiasa memikirkan Tuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan ilmu ialah menuntut ilmu untuk ilmu itu sendiri. Pendapat ulama ada benarnya kalau dilihat santri-santrinya yang lebih suka membaca buku-buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia daripada membaca kitab-kitab gundul. Ada benarnya pula, karena para murid/santri, setelah tammat belajar selalu ingin menjadi pegawai negeri, apakah menjadi guru agama negeri di Sekolah-sekolah Dasar atau di S.M.P. Sedang pelajaran di sekolah-sekolah umum tidak terlalu memerlukan pendalaman ilmu agama seperti halnya di Madrasah.

Para ustaz, baik guru agama swasta maupun guru agama yang diperbantukan dari Departemen Agama, sering mengeluh tentang kurangnya fasilitas pendidikan dan perpustakaan, di samping menyarankan perlunya pendidikan ke-trampilan dan perbaikan metodik mengajar. Mereka juga memberi pendapat tentang pendidikan pesantren gaya lama yang masih diteruskan sampai sekarang. Mereka berpendapat bahwa metode penyampaian pelajaran belum dibuat secara praktis, lagi pula kebanyakan kitab-kitab yang dianjurkan tidak dapat diperoleh lagi oleh para santri. Kitab-kitab itu hanya dimiliki oleh kiyai atau pembantu-nya. Ustaz dan guru-guru ini rata-rata umurnya lebih muda dari pada kiyai. Mereka sebenarnya adalah calon-calon ulama juga, sering berbicara mengenai keahlian seorang ulama, hanya menguasai satu bidang fan saja, kaku menghadapi masalah sosial, hanya tahu menolong (memberi nasehat dan pengajaran) dan tidak suka dialog mengenai masalah tertentu.

Menanggapi kepemimpinan kiyai pembina Lembaga Pendidikan Islam, dikatakannya kiyai sebagai pemimpin

menjadikan dirinya sebagai "orang tua" dalam lembaga. Ketaatan para santri kepadanya bukan saja karena bobot ilmu yang dimilikinya, akan tetapi nampak juga dalam usaha menjauhkan kedurhakaan daripadanya sedapat mungkin. Doktrin agama yang bersumber dari Hadist mengatakan "al-Ulamau Waritsatul Anbiyai" (para ulama adalah pewaris Nabi-nabi), tetap dipegang oleh mereka. Jawaban atas pertanyaan santri di Pesantren Darul Istiqamah mengatakan maju dan mundurnya pesantren ini banyak ditentukan oleh kiyai. Beliau pemimpin Pesantren dan sekaligus juga ketua Yayasan. Beliau dibantu oleh anak kandungnya sendiri yang sekarang sedang dididik untuk menguasai beberapa fan dari ilmu agama. Anaknya itu sudah tammat hafal al-Qur'an. Orang luar dari keluarga Kiyai diangkat untuk membantu beliau seperti Kepala Madrasah di cabang-cabang, tetapi mereka sekedar pelaksana dan memang diangkat dari kalangan santri senior yang sudah mendapat kepercayaan. Mereka tunduk kepada petunjuk-petunjuk Kiyai. Cabang-cabang madrasahnyapun tidak luput dari pengawasan kiyai, didatangi secara bergilir tiap bulan oleh kiyai, memberi pelajaran dan pengarahan. Penerimaan pesantren dari sumbangan masyarakat atau dari orang-orang kaya dan Pemerintah, semua pada tangan kiyai. Kepemimpinan tunggal kiyai cenderung dikatakan masih otoriter dalam arti yang luas, dengan tidak melupakan dasarnya ialah kekerabatan pesantren.

Lain halnya kepemimpinan As'adiyah dengan organisasi yang teratur. Tiap lima tahun diadakan Mukhtamar untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai, akan tetapi pemilihan pemimpin selalu jatuh ke tangan kiyai (K.H.M. Yunus Martan). Sebagai Kepala Madrasah di cabang-cabang pada umumnya diangkat abituren As'adiyah sendiri. Pendirian cabang harus atas dasar permintaan masyarakat yang biasanya dipelopori oleh abituren itu sendiri. Peranan keluarga Kiyai turut menentukan jalannya perguruan. Kepala

unit-unit komersil seperti Koperasi, Poliklinik, BKIA, dan sebagainya selalu ada hubungan kekerabatan dengan Kiyai, demikian pula keuangan yang diterima senantiasa mendapat pengawasan dari Kiyai. Keluarga Kiyai nampak amat dihormati. Hal ini terutama disebabkan karena masyarakat melihat pengorbanan dan usaha yang diberikan oleh keluarga kiyai untuk pengembangan perguruan. Hal ini wajar karena As'adiyah sejak berdirinya berjalan atas usaha sendiri yang berpusat pada kegiatan kiyai. Melihat struktur organisasinya, kepemimpinan kiyai cenderung dikatakan bersifat demokratis dan berdasar atas kebijaksanaan.

Penelitian lebih lanjut atas D.D.I. menunjukkan bahwa seperti juga di As'adiyah maka tiap lima tahun diadakan Mukhtar di mana hadir semua pengurus-pengurus cabang dan simpatisan D.D.I. untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai. Agaknya penilaian itu hanya memperbaiki yang kurang dan memajukan persoalan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pemilihan Ketua Umum selalu jatuh ke tangan kiyai, Lembaga Pendidikan ini sungguh-sungguh berjalan atas keampuhan organisasi. Kiyai merupakan simbol pemersatu di antara pengurus pusat dan cabang, karena bobot ilmu yang dimilikinya dan namanya selalu dikaitkan dengan sejarah berdirinya D.D.I. berkat kegiatan kiyai (K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle) yang mendapat dukungan dari masyarakat. Anggota pengurus tidak ada hubungan dengan kiyai, tetapi di dalam kepengurusan selalu terjalin prinsip-prinsip kekerabatan.

Kehadiran ustaz dan guru di Madrasah disebabkan karena itulah satu-satunya pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya, seperti tammatan P.G.A. 6 tahun atau Aliyah yang mengajar di Ibtidaiyah. Sebagian ustaz itu yang adalah santri di Pesantren Tinggi ditugaskan mengajar agama di Madrasah Tsanawiyah atau Madrasah Aliyah. Kebanyakan mereka tidak puas dengan jabatannya sekarang, sering

disebut-sebutnya pekerjaan lain seperti, menjadi pegawai negeri, kalau tidak disebutnya pula pekerjaan berdagang, pengusaha dan bertani. Apa yang menjadikan mereka tidak puas pada tugasnya sulit untuk diterka, akan tetapi ada kesan bahwa mereka menerima imbalan tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan.

B. Pendapat Para Alim Ulama

Para alim ulama dewasa ini di Sulawesi Selatan yang bekerja di Departemen Agama, baik di Jawatan Agama, Pengadilan Agama, Penerangan Agama, Dosen I.A.I.N., maupun Kepala Madrasah yang menerima gaji dari Jawatan Agama, pada umumnya adalah alumni dari As'adiyah atau D.D.I.²⁰ Mereka itu sudah tergolong ulama juga. Apabila ditanya alim ulama keluaran Madrasah atau Pesantren yang bekerja di luar lingkungan Lembaga Pendidikan Islam, mereka mengatakan bahwa Pendidikan Islam dengan bentuk pesantren tradisional tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pesantren harus dilengkapi dengan pendidikan ketrampilan dan pengetahuan umum yang langsung bisa menunjukkan jasanya kepada masyarakat. Masyarakat sekarang masih mendukung pesantren karena atas dasar kepercayaan Islam yang dibina oleh pesantren, namun jumlah anak muda yang ingin menempuh hidup sebagai santri makin hari makin berkurang. Sebaiknya pesantren menunjukkan jasanya kepada masyarakat seperti, mengadakan kursus-kursus kepemudaan di mana bisa dimasukkan pelajaran agama. Santri harus terjun membimbing kebersihan dan pengaturan hidup secara Islam ke tengah-tengah masyarakat. Tidak saja mengandalkan bobot doanya dalam upacara-upacara keagamaan dan bobot pidatonya di Mesjid-mesjid. Selanjutnya disarankan oleh para alim ulama, sebaiknya pesantren memilih satu bidang ketrampilan sebagai pola pembangunannya yang khas, seperti pesantren pertanian, pesantren peternak-

an, Pesantren pertenunan sutera dan sebagainya, agar mudah-mudahan santri yang tammat dapat mengisi lapangan kerja menengah dengan tidak menutup kemungkinannya untuk berkembang.

Akan tetapi siapa yang akan melakukan perencanaan pengembangan pesantren seperti yang disarankan itu? Apabila diharapkan dari lingkungan pesantren sendiri sukar diperoleh, kecuali bila bantuan diminta dari luar untuk membuat semacam *master plan* pengembangan. Dari pihak pesantren, diketahui adanya keinginan untuk berkembang, akan tetapi cara-cara untuk mencapai hal itu kurang dijejaki, kecuali menunggu uluran tangan pemerintah daerah. Pihak pesantren selalu menahan diri meminta bantuan masyarakat, karena adanya prinsip berdiri di atas kaki sendiri.

Mengenai pendidikan Madrasah, para alim ulama memberikan pendapatnya bahwa kita lihat sekarang murid-murid Ibtidaiyah dan Tsanawiyah swasta, sebagiannya masuk di Madrasah tersebut, karena tidak tertampung di Sekolah-sekolah Negeri. Masyarakat tetap menganggap penting kehadiran Madrasah, tetapi madrasah tak dapat diharapkan penuh untuk memberikan pendidikan dasar kepada murid-murid sebagai landasan hidupnya nanti. Mungkin ini pula sebabnya mengapa jumlah murid perempuan lebih banyak di Madrasah Ibtidaiyah dari pada di S.D. Umum dari hampir semua Kabupaten. (lihat catatan kaki no. 16).

Agaknya pengaruh adat juga berperan terhadap soal pola pendidikan anak perempuan. Orang tua lebih suka mendidik anak perempuannya di bidang agama untuk melindungi diri dari perbuatan maksiat. Meskipun orang tua selalu ingin dan berharap akan memberikan pendidikan yang sama terhadap anak lelakinya dan anak perempuannya, namun pada kenyataannya statistik Madrasah dan Sekolah menunjukkan perbedaan tersebut.

Apabila kita perhatikan pendapat para alim ulama mengenai pandangannya tentang Madrasah dan Pesantren, maka pandangan mereka agaknya berkisar pada perebutan lapangan kerja bagi tammatan Lembaga Pendidikan ini. Kalau hal ini benar, maksud menuntut ilmu untuk kepentingan ilmu-ilmu itu sendiri, sebagaimana yang dimaksudkan dalam sistem pendidikan pesantren, rupanya tidak berlaku lagi.

Pandangan para alim ulama penting untuk diketahui, oleh karena mereka sekurang-kurangnya pernah menjalani pendidikan agama dan sekarang merasakan sendiri berbagai macam pengalaman hidup sambil mengalami pada dirinya sendiri transformasi pengalaman yang membuahkan pertimbangan. Sebagian mereka menganggap, bahwa pendidikan agama yang diselenggarakan di Madrasah atau Pesantren amat perlu, mengingat pembentukan kepribadian anak muda harus diberi modal agama sebagai kemudi dalam perjalanan hidupnya. Sekarang kelihatannya makin hari makin menipis sikap dan tingkah-laku keagamaan. Perhatian masyarakat terhadap pendidikan Islam masih tetap besar.

C. Pendapat Anggota Masyarakat

Seperti yang telah disinggung di muka, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dari masyarakat. Demikian pula Madrasah didirikan di suatu daerah karena adanya permintaan dari masyarakat. Suatu pesantren selalu mempunyai di dalamnya satu atau dua buah madrasah. Pesantren bertumbuh karena adanya seorang ulama yang disegani dan menjadi sandaran kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Sebagai sebuah Lembaga Pendidikan Islam, pesantren juga mempunyai pengaruh kepada masyarakat karena menyediakan kesempatan pendidikan kepada anak muda yang berminat.

Dalam wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tidak terkecuali dengan pejabat-pejabat desa dan kecamatan di mana terletak sebuah Madrasah atau Pesantren dikatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat sekarang kepada pesantren tidak sama seperti pada masa-masa lalu. Pada masa yang lalu, masyarakat memberikan bantuan dan sumbangan kepada pesantren atas dasar kepercayaan kepada kiyai. Masyarakat memberikan bantuan begitu saja tanpa diminta, lebih-lebih kalau diminta oleh kiyai, uang dan bahan, zakat fithrah dan harta, sumbangan tenaga dan pemikiran. Semuanya diberikan dengan penuh keikhlasan. Kini, orang yang akan memberi sumbangan hendak lebih dahulu mengetahui kegunaan sumbangannya. Oleh karena disarankan, Madrasah dan Pesantren membuat program perencanaan yang terperinci. Apabila sudah ada perencanaan demikian, maka masyarakat akan lebih rela memberi bantuan.

Dikatakan pula, metode mengajar dan disiplin ustaz dan guru-guru perlu diperbaiki dan ditingkatkan, bukan saja yang dari madrasah negeri atau guru agama bantuan negeri, akan tetapi hampir untuk semua baik negeri maupun swasta. Memang ada kesempatan bagi siswa-siswa Aliyah untuk memasuki Universitas/Institut Negeri, akan tetapi yang lulus test-masuk di Perguruan Tinggi tersebut sangat terbatas jumlahnya. Hal ini membuktikan bobot ilmu yang diberikan tidak memenuhi target yang diharapkan. Anggota masyarakat mengharapkan pendidikan di Madrasah dapat menyamai Sekolah-sekolah umum.

Jawaban atas pertanyaan orang tua santri, pada umumnya menyatakan bahwa mereka merasa puas atas keberhasilan anaknya menimba ilmu dari ulama atau ustaz dan bahwa mereka melihat anaknya memiliki sifat-sifat mulia. Akan tetapi ketika ditanya ke mana akan melanjutkan pelajarannya, mulailah mereka pikir-pikir. Di antaranya ada yang

menjawab akan melanjutkan pelajarannya ke I.A.I.N. atau IKIP, selanjutnya lagi merencanakan pendidikan anaknya ke Pesantren Tinggi untuk menjadi ulama.

Para pejabat Pemerintah yang terdiri dari Kepala Kecamatan dan Kepala Desa, selalu menghubungkan jawaban-jawabannya dengan tugasnya dan kepentingan masyarakat. Pendidikan agama sangat perlu untuk melayani bidang keagamaan masyarakat, setidaknya-tidaknya anak muda yang memiliki pengetahuan agama tidak akan membuat kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Mereka tentu tidak akan memuja batu atau pohon atau menjadi anti Tuhan yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu Kepala Kecamatan atau Desa senantiasa memberi bantuan dan fasilitas berupa perbaikan gedung, sarana pendidikan maupun bantuan perlindungan kepada Madrasah. Dikatakan pula bahwa pesantren dalam hal ini perlu menunjukkan juga kegiatannya dalam masyarakat dengan membuka kursus-kursus, penyuluhan pada salah satu bidang tertentu, konsultasi di bidang hukum Islam dan lain sebagainya yang dapat dilakukan oleh ulama atau ustaz, selain memberi khotbah dan ceramah.

PENUTUP

Pesantren adalah Lembaga Pendidikan Islam, yang sifat "tradisional"nya makin hari makin berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun 20-an. Demikian pula, apa yang kita kenal dengan "tempat pengajian" di mana anak-anak mulai membaca al-Qur'an, hampir-hampir tidak diketemukan lagi. Pelajaran membaca al-Qur'an bagi anak-anak dewasa ini pada umumnya diberikan oleh orang tua sendiri. Bila orang tua tidak tahu mengajar anaknya, maka satu-satunya harapan bagi si anak adalah menerima pelajaran tersebut di Sekolah Dasar yang diajarkan oleh Guru Agama.

Pusat-pusat Pendidikan Islam seperti halnya As'adiyah, DDI dan Darul Istiqamah mendirikan madrasah dengan jenjang-jenjangnya mulai Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah dengan sistem klasikal. Cabang-cabang dari ketiga pusat pendidikan ini terdapat di desa-desa hampir di semua Kabupaten Sulawesi Selatan, terutama DDI yang cabang-cabangnya terdapat pula di luar Sulawesi Selatan. Pendidikan madrasah dan perguruan, sistem pendidikan pesantren gaya lama masih tetap dipertahankan. Dengan demikian dikatakan Lembaga Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan menempuh dua macam sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan madrasah dan pesantren. Sistem madrasah adalah klasikal, sedang metode pelajaran pesantren adalah sistem kitab. Pendidikan pesantren masih diteruskan karena di-

anggap masih relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekurang-kurangnya masih dibutuhkan oleh siswa-siswa madrasah untuk memperdalam ilmu agama dan pengetahuan bahasa Arab-nya. Lembaga Pendidikan Islam lainnya seperti yang diasuh oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebar pula di pedalaman di mana terdapat pengurus Muhammadiyah. Pendidikan Madrasah Muhammadiyah semata-mata menggunakan sistem klasikal.

Sejak tahun 1970 muncul kecenderungan baru dalam dunia pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, yaitu munculnya Lembaga Pendidikan Islam yang memilih nama "Pesantren Modern", seperti Pesantren Modern IMMIM, Pesantren Modern Muhammadiyah Gombara, Pesantren Modern Pembangunan Darul Falah di Enrekang dan Pesantren Modern Al-Qamar di Takalar. Bagaimana bentuk dan isi Pesantren Modern itu, sama saja seperti yang terdapat di Perguruan As'adiyah dan DDI, yaitu yang mempunyai madrasah dengan sistem klasikal dan pendidikan pesantren gaya lama. Jadi nama berbeda, tetapi unit-unitnya sama. Apa yang menyebabkan orang kembali merindui istilah pesantren atau sistem pendidikan pesantren, perlu diteliti lebih dalam dari segi perkembangan nilai-nilai keagamaan yang sejalan dengan proses perubahan masyarakat.

Kemantapan pendidikan ilmu agama dan pengetahuan bahasa Arab yang dipertahankan oleh pesantren merupakan kelebihanannya dari pada madrasah. Di lain pihak pesantren mempunyai kekurangan dari segi pengetahuan umum. Sistem pendidikan klasikal di madrasah merupakan selangkah lebih maju dari pesantren, karena adanya perencanaan yang terwujud dalam kurikulum dan syllabus, adanya mata pelajaran umum, pelajaran kemahiran bahasa Inggris yang semuanya dianggap mencerminkan image modern. Keinginan masyarakat terhadap pendidikan pesantren disebabkan oleh adanya kebebasan belajar, adanya ke-

inginan belajar ilmu agama secara mendalam, adanya sistem pondok di mana santri ditempa kepribadiannya untuk menjadi ulama dan pemimpin ummat. Kedua sistem ini memilih nama "Perguruan" dan "Pesantren Modern".

Apabila anggota masyarakat melihat tammatan Madrasah dan Pesantren menjadi rebutan dalam pasaran tenaga di Instansi-instansi pemerintah atau swasta maka keluaran Madrasah dan Pesantren nampaknya tidak memperoleh pasaran, kecuali dalam lingkungan Departemen Agama. Akan tetapi, bila pandangan dialihkan kepada pertimbangan kekuatan sosial di bidang etik dan moral masyarakat maka merekalah yang memiliki potensi yang besar dan hal ini penting bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu Lembaga Pendidikan Islam yang bagaimanapun bentuknya penting kehadirannya dalam masyarakat. Dewasa ini keadaan fisik secara keseluruhannya amat menyedihkan. Dalam keadaan fisik yang demikian ditambah lagi oleh guru-guru/ustaz yang tidak terseleksi baik, menjadi semakin parahlah kualitas pendidikan. Apa yang dapat diharapkan oleh masyarakat di kemudian hari terhadap kelangsungan hidup madrasah dan pesantren, sukar dibayangkan.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian di atas, kiranya dapat kita ambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Madrasah dan Pesantren adalah tempat mencetak ulama-ulama dan membina kader-kader pemimpin bangsa sebagaimana halnya di daerah lain kehadirannya mutlak dipolakan di tengah-tengah masyarakat. Madrasah dan Pesantren turut mempercepat kecerdasan rakyat dan membantu proses perubahan sosial.
2. Perlawanan terhadap penjajahan pada masa-masa perintisan kemerdekaan yang banyak dari antaranya dilakukan oleh ulama dan santri, jelas menunjukkan peranan madrasah dan pesantren sebagai basis perjuangan.
3. Dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, para ulama keluaran madrasah dan pesantren tidak sedikit jasanya, di samping jasa golongan-golongan sosial lainnya.
4. Dalam keadaannya sekarang, sistem pendidikan madrasah dan pesantren perlu ditingkatkan untuk mendapatkan mutu ilmu hidup bagi generasi mendatang.
5. Dalam rangka ketahanan nasional, amat dibutuhkan ketahanan mental yang berlandaskan moral dan budi pekerti luhur. Untuk itu, pendidikan pondok Pesantren merupakan salah satu jalan, karena dalam lem-

baga ini dipertemukan sistem penempatan ilmu dan sistem penempatan kepribadian para santri.

6. Pendidikan di dalam Madrasah dan Pesantren bertujuan membentuk manusia yang akan menjadi benteng yang ampuh untuk melawan komunisme.

CATATAN KAKI

- 1). P.A. Hoesain Djajadiningrat; *Islam di Indonesia*, Islam Jalan Mutlak, Pembangunan, 1963, Jakarta, hal. 125.
- 2). Dr. J. Noorduyn; *Sejarah Agama Islam di Sulawesi Selatan*, Panggilan kita di Indonesia Dewasa ini, Penerbit Keristen, Jakarta, 1964, hal. 88.
- 3). A.S. Harahap; *Sejarah Penyiaran Islam di Asia Tenggara*, Islamiyah, 1951, Medan, hal. 45.
- 4). A.S. Harahap; *loc. cit.*
- 5). Prof. Andi Zainal Abidin S.H.; *Lontara sebagai sumber Sejarah Terpendam*, Lembaga Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 1970, hal. 29.
- 6). Prof. Andi Zainal Abidin S.H.; *op. cit.*, hal.35.
- 7). Mattulada; *Islam di Sulawesi Selatan*, (monografi) LEKNAS, Jakarta, 1976, hal. 18.
- 8). Abd. Razak Daeng Patunru; *Sejarah Gowa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1969, Makassar, hal. 20. Kemudian bandingkan tulisan Noorduyn, *op. cit.*, hal. 89.

9). *Arajang*, adalah alat-alat kerajaan yang menjadi atribut Raja, terdiri dari benda-benda keris, tombak, guci, mahkota sebagai benda-benda yang mempunyai nilai sejarah dan dihormati oleh masyarakat. Upacara yang diselenggarakan di istana untuk menghormati benda-benda ini disebut upacara *Arajang* yang dilakukan atas nama kerajaan. Upacara *Saukang* adalah upacara kemasyarakatan yang dilakukan atas nama masyarakat, dilakukan setelah selesai panen, bertempat biasanya di bawah pohon besar di mana didirikan sebuah rumah-rumahan kecil. Upacara *Pantasak*, adalah upacara yang dilakukan atas nama keluarga atau kelompok keluarga. Sebuah benda pusaka keluarga yang disimpan pada sebuah rumah-rumahan kecil yang diletakkan di atas loteng.

10). *Bissu*, adalah laki-laki banci yang menjalani hidup dan berpakaian seperti wanita. Tugasnya melayani dan merawat *Arajang* di Istana. Pada hari-hari tertentu dalam sepekan mereka mengadakan sajian dan nyanyian pemujaan kepada *Arajang*. *Bissu* di Bone sebanyak 40 orang yang dipimpin oleh seorang yang disebut Puang Mato-wa.

11). *Sompa*, adalah mahar. Di Sulawesi Selatan dinilai sejumlah raal (mata uang Mekkah). Berbeda-beda jumlahnya menurut tinggi rendahnya strata sosial wanita.

12). I.D. du Plessis; *The Cape Malays*, Maskew Miller Lim, Cape town, 1944, hal. 4. Lebih lanjut diuraikan: Syekh Yusuf, brother of the King of Goa, in Macassar, was born in 1626. In 1646 he went

to Bantam of the island of Java, where he spread the Muslim faith amongst the Javanese and married the daughter of the Bantamese Sultan Ageng. Regarded as a man of great piety and culture, a friend of the ruling House of Bantam. Syekh Yusuf exercised a great influence over the Bantamese and was an ally not to be despised.

- 13). Hamka; *Dari Perbendaharaan Lama*, Maju, Medan, 1963, hal. 40.
- 14). Bandingkan juga dengan penerbitan Departemen P dan K; Kebijakan-sanaan dan langkah-langkah Pembaharuan Pendidikan, 1973, halaman 15.
- 15). Prof. Dr. Mohd. Athiyah al-Abrasyi; *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 15.
- 16). Sulawesi Regional Development Study (kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kanada), Interim Report, Volume 3 July 1977, halaman 215. Penelitiannya menggunakan perbandingan Statistik dari Kanwil Agama dengan Kanwil P & K dan berbagai instansi lainnya. Perbandingan prosentase antara jumlah penduduk dengan jumlah S.D./Ibtidaiyah. Tsanawiyah. Jumlah prosentase antara jumlah murid wanita Ibtidaiyah. Untuk 23 Kabupaten/Kota Madya di Sulawesi Selatan diperoleh jumlah murid wanita di S.D. Umum 47.9% dengan jumlah murid wanita Ibtidaiyah 53.7% (Statistik tahun 1975).
- 17). Ds Van den Brink; *Dr Benyamin Frederik Matthes*, zyn leven en arbeid in dienst van het Ned. Beybelgenootschap, Jakarta, 1970, halaman 243.

- 18). Ds Van den Brink; *op. cit.*
- 19). H. Fathul Muin Dg. Maggading, pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara, tahun 1969 (dokumen Muhammadiyah), membuat riwayat hidup K.H. Abdullah Konsul Muhammadiyah Sulawesi Selatan.
- 20). Pimpinan Pusat Perguruan As'adiyah Sengkang, Wajo Sulawesi Selatan; Pertumbuhan dan Perkembangan Perguruan As'adiyah serta Peranannya dalam Revolusi dan Pembangunan, tahun 1975, halaman 9. Di dalam halaman ini dicantumkan nama-nama alumni As'adiyah yang bekerja di berbagai instansi. (Agaknya hanya mencantumkan nama-nama alum-ninya yang bekerja sebagai pegawai negeri dan memegang posisi/jabatan tertentu, barangkali dija-dikan sebagai kebanggaan perguruan ini. Sedang yang lainnya yang tidak ada jabatannya tidak di-cantumkan).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

UMUM.

Alfian;

1975—*The Ulama in Acehnese society*; A Preliminary Observation, Banda Aceh, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Darussalam.

Athijah al-Abrasyi, Mohd, Dr Prof;

1970—*Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Brink, Ds H.V.d;

1943—*De Benyamin F. Matthes, zijn leven en arbeid in Dienst van het Nederland Bijbelgenootschap*, Amsterdam.

Clock, Charles;

1977—"Images of God and Man", *Journal for the scientific study of Religion*, Vol. 11, N. 1 March, hal. 1.

Dewan Rahardjo, M (editor);

1974—*Pesantren dan Pembangunan*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta.

Geertz, Clifford;

1973—*The Interpretation of Culture*, Basic Book, Inc, New York.

Hamka;

1961 — *Sejarah Ummat Islam*, jilid IV, N.V. Nusantara, Bukit Tinggi, Djakarta.

Mahmud Yunus, H, Prof;

1966 — *Sejarah Pendidikan Islam*, Mutiara, Djakarta.

Noorduyn, J,

1955 — *De Achte Eeuwse Kroniek van Wajo, Boegineshe Historiografi*, Proefschrift, Leiden.

idem

1964 — *Sejarah Agama Islam di Sulawesi Selatan*, Panggilan kita di Indonesia Dewasa ini, Fasco, Djakarta.

Noer, Deliar;

1973 — *The modernist Muslim Movement in Indonesia 1900–1942*, East Asian Historical Monograph, Singapura, Oxford Univ. Press.

Taufik Abdullah (editor);

1974 — *Islam di Indonesia*, Tintamas, Jakarta.

Relly, Mary, E.;

1975 — "Perception of the Priest Role", *Sociological Analysis*, a Journal in the Sociological Religion, Vol. 36, N.4, hal. 347.

Stoddard, L;

1966 — *Pasang naik kulit berwarna*, (terjemahan), Kata Pengantar Presiden Soekarno.

Shapiro, Sheldon;

1973 — *Pattern of Religious Reformation, Comp. Studies in Societies and History*, Vol. 15, N.2 March, Cambridge Univ. Press, hal. 143.

Schweitzer, Arthur;

1974—*Theory of Political Charisma, Comp. Studies in Societies and History*, Vol. 16, N.1 January, hal. 150.

Weber, Max;

1964—*The Sociology of Religion*, Beacon Press, Boston.

KHUSUS

1. Dirjen Bimasa Islam Direktorat Pendidikan Agama; 1973—Kurikulum Madrasah Aliyah Agama Islam (MAAIN)
2. idem—Kurikulum Guru Agama Negeri (P.G.A.N.)
3. Almanak Muhammadiyah tahun 1974.
4. Pimpinan Pusat Perguruan As'adiyah; 1975—Pertumbuhan dan Perkembangan Perguruan As'adiyah.
5. Pimpinan D.D.I.; 1975—Dokumentasi Muktamar ke XII tahun 1975 di Pare-pare.
6. Darud Da'wah wal Irsyad (D.D.I.); 1975—Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga D.D.I.
7. Pimpinan D.D.I.; 1975—Majalah Risalah Addariyah, tahun I No. 1, 2, 3.
8. Laporan Rektor I.A.I.N. Alauddin dalam Dies Natalis ke VII, tahun 1975.
9. Laporan Rektor Univ. Muslimin Indonesia (UMI) pada hari ulang tahun ke XX tahun 1975.

10. Lembaran, jadwal pelajaran Pesantren Muhammadiyah
Gombara, tahun 1975.

11. Lembaran, Jadwal Pelajaran Pesantren Darul Istiqamah, tahun 1975.

LAMPIRAN

Jumlah Sekolah Negeri/Swasta, Murid dan Guru di Provinsi Sulawesi Selatan (headcan 1974)

No	Nama Sekolah	Sekolah	Murid	Guru
1	Madrasah Tsanawiyah Negeri	58	3.933	311
2	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	58	50.848	2.148
3	Madrasah Aliyah Negeri	2	1.886	85
4	Madrasah Diniyah	2	319	55
5	Madrasah Wajidiyah	2	319	55
6	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	58	50.848	2.148
7	Madrasah Tsanawiyah Swasta	58	3.933	311
8	Madrasah Aliyah Swasta	18	745	73
9	Ponok Pesantren	317	1.506	67
10	Tempat Pengajian	52	1.506	67
11	Madrasah Menengah Pertama	1	73	8
Jumlah :		727	83.628	3.227

Sumber: Diolah dari Statistik Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN

Jumlah Madrasah, Murid dan Guru di Propinsi Sulawesi Selatan (keadaan tahun 1974)

No.	Nama Madrasah	Sekolah	Murid	Guru
1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	6	1.274	64
2.	Madrasah Tsanawiyah Negeri	6	613	81
3.	Madrasah Aliyah Negeri	2	300	39
4.	Madrasah Diniyah	325	19.860	859
5.	Madrasah Wajib Belajar	2	210	15
6.	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	539	50.848	2.148
7.	Madrasah Tsanawiyah Swasta	58	3.933	311
8.	Madrasah Aliyah Swasta	18	745	72
9.	Ponmok Pesantren	21	3.317	68
10.	Tempat Pengajian	52	1.505	67
11.	Madrasah Menengah Pertama	1	73	3
Jumlah :		727	82.628	3.227

Sumber: Diolah dari Statistik Kantor Perwakilan Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN

Jumlah Sekolah Negeri/Swasta, Murid dan Guru di Propinsi Sulawesi Selatan (keadaan tahun 1974)

No.	Nama Sekolah	Sekolah	Murid	Guru
1.	Sekolah Dasar Negeri	3.256	441.177	2.578
2.	Sekolah Dasar Swata	234	37.210	122
3.	S.L.P. Negeri	285	45.300	318
4.	S.L.A. Negeri	112	19.291	133
5.	S.L.P. Swasta	45	6.616	84
6.	S.L.A. Swasta	38	5.422	43
Jumlah :		3.970	554.916	3.278

Sumber: Diolah dari Statistik Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN

Daftar Kitab-Kitab Pelajaran Agama di Madrasah : a). Ibtidaiyah (I). b). Tsanawiyah (T). c). Aliyah (A). d). P.G.A.N. (G). e). Majlis Ta'lim (M). f). Pesantren (P)

No.Mata pelajaran	Nama Kitab	Pengarang/Penyusun	Madrasah
1. Tafsir	Al-Jalalain Al-Maraghi An-Nur Tafsir al-Qur'an Pelajaran Tafsir Tafsir al-Qur'an Tafsir al-Manar Tanthawi Jauhari Tafsir Ibnu Katsir	Jalaluddin Musthafa al-Maraghi Hasby as-Shiddhiqy M. Jafar Zainal Arifin Zainal Arifin Muhammad Abduh al-Jauhariy	TAM A T GTA AT A P P
2. Hadist	Pelajaran Hadist Pelajaran Hadist Miftahul Khitabah Bulughul Muram Mukhtarul Ahadist Riyadhus Shalihin Matnu Arbain Subulus Salam Jawahirul Buhari Hadist Muntakhabat Hadist Arbain	J.Z. Abidin J.Z. Abidin Ahmad al-Hilaby Ibnu Hajar Ahmad al-Hasymy Abu Zakaria an-Nawawi Abu Zakaria an-Nawawi M. bin Ismail Musthafa M. M. Yunus Martan Imam Yahya	T A T TAM GA AM IT GT TA I IT

3. Fiqh	Pelajaran Ibadah Mabadiul Fiqhiyah Durusul Fiqhiyah Muinul Mubin :	Zainal Abidin Abd. Rahman Ambo Dalle Abd. Ramhan Ambo Dalle Abdul Hamid Hakim	I I I TA I TC
	Sullamud Diyanah Fiqhus Sunnah Kifayatul Akhyar	Ibnu Hajar Sayid Sabiq Abu Bakar Taqiuddin	TAP P
	Fathul Qarib Fathul Muin	M. Ibnu Kasim Zainuddi Abdul Aziz	P P
	Fathul Wahab Fiqhul Wadhih	Abi Yahya Zakaria Mahmud Yunus	GTA
4. Tauhid	Ikhtisar Ilmu Tauhid	M.T. Thahir	GT
	Risalah Tauhid	Muhammad Abduh	A
	Sullamut Tauhid	Abi Abd. Hamid	I
	Jawahir Kalamiyah Aqidatul Islamiyah	Husein al-Jisri Abd. Rahman Ambo Dalle	GT I
	Ilmu Tauhid Teologi Islam Pelajaran Ilmu Tauhid	Hasbi as-Shiddiqy M. Hanafi M. Rifai	A G GTA
	Husunul Hamidiyah	Hussein Effendi	TAP
	Tijan al-Durari	Abu Zakaria an-Nawai	P

5. Akhlak	Mutiara Allah al-Akhlak Ihya al-Gazali Aqidatul Islamiyah Akhlak lil-Banina	Abu Bakar Aceh Djafar Amir Terjemahan Hasan Basri Ahmad Barjai	A T GT T I
6. Ushul Tafsir	Ushul Tafsir Fathul Fakir	Ibnu Taimiyah K.H. As'ad	AP TA
7. Ushul Hadist	Peng. Ilmu Hadist Atthaqirra tsaniyah Ijmaud Dirayah	Hasbi As-Shiddiqy M. Masysyath Imam Suyuthy	TA AP AP
8. Ushul Fiqh	Sullamul Ushul al-Warakat Ashul Fiqhi	K.H. As'ad Dimyaty al-Khudhrawy	AP AP AP
9. Tarikh Islam	Khulashatu Nurul Yakin Sejarah Ummat Islam Ringkasan Sej. Islam	Abd. Jabbar HAMKA A. Latif Osman	IAT TA IT
10. Sharaf	Matan al-Bina Matnul Baqa	Abi Hasan Ali Ibrahim bin Abd. Wahab	PA P

11. Nahwu	al-Qawaid Lughah Arabiyah	M. Yunus Martan	IT
	Qawaid Lughah Arabiyah	Hafni Bek	IA
	Durus Nahwiyah	Hafni Bek	IT
12. Balaghah	Balaghah al-Wadhihah	Ali al-Yazim	TA
	Qawaid Lughah Arabiyah	Hafni Bek	TA

389 1984

Agama bukanlah sesuatu yang bersifat subordinatif terhadap kenyataan sosial-ekonomis. Agama pada dasarnya bersifat independen, yang secara teoritis bisa terlibat dalam kaitan saling mempengaruhi dengan kenyataan sosial-ekonomis itu. Sebagai unit yang independen, maka bagi penganutnya, agama mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk menentukan pola perilaku manusia dan bentuk struktural sosial. Dengan begini ajaran agama (atau aspek kultural agama), mempunyai kemungkinan untuk mendorong atau bahkan menahan proses perubahan sosial, yaitu suatu proses yang menggunakan kemantapan struktur dan mempersoalkan keberlakuan nilai-nilai lama.



didirikan tgl 27 Oktober 1976 sebagai kelanjutan dari Panitia Program Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Pedesaan. Yayasan bertujuan mengembangkan Ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Kegiatan YIIS a.l. : melatih calon tenaga peneliti ilmu sosial di Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (PLPIIS) yang didirikan Yayasan di, dan bekerja sama dengan, berbagai Universitas negeri; mengusahakan beasiswa bagi para sarjana ilmu sosial yang ingin melanjutkan studi pasca sarjana atau program doktor; menyemponsori seminar-seminar ilmiah; dan juga penerbitan buku-buku ilmu sosial.

Yayasan diasuh Dewan Pengurus yang kini (1981-83) diketuai Prof. Dr. Selo Soemardjan wakil ketua Prof. Dr. A. Hafid, dan para anggota: Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar, Prof. Dr. Sajogyo, Prof. Dr. Koentjaraningrat, Prof. Dr. Mukti Ali, Dr. Taufik Abdullah, Dr. Mely G. Tan, Soelaeman Soemardi, S.H., M.A., Sekretaris pelaksana Soemardman, S.H.. Ketua dilantik oleh Menteri P dan K, anggota Pengurus diadakan pencalonan kembali tiap 3 tahun sekali.

Naskah-naskah yang akan diterbitkan YIIS, diseleksi oleh suatu Dewan Editor yang anggotanya terdiri atas Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar, Prof. Dr. Koentjaraningrat, Prof. Dr. Sajogyo, Dr. Soedjatmoko, Dr. Taufik Abdullah, Bur Rasuanto - dengan Dr. Alfian sebagai Ketua.

PENERBIT
CV. RAJAWALI
JAKARTA